PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2017-2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan pembangunan, dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang saat ini telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022;

b. bahwa terjadinya perubahan kebijakan nasional dan perkembangan kondisi saat ini di Kota Payakumbuh perlu disesuaikan dengan kebijakan dan program yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan nasional dan kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Payakumbuh Tahun 2017 – 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dan

WALIKOTA PAYAKUMBUH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT : (8/100/2020)

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 8 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 – 2022

I. Penjelasan Umum

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang hirarki perencanaan, proses perencanaan, mekanisme perencanaan, isi rencana, waktu pelaksanaan serta stakeholder perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, undang-undang tersebut juga mengamanatkan tentang perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah atau sedang dijalankan untuk dapat mengetahui tingkat capaian pelaksanaan pembangunan berikut masukan kebijakan dan program yang perlu dilakukan untuk menjamin suksesnya pelaksanaan rencana pada periode yang tersisa.

Perencanaan pembangunan lima tahunan Kota Payakumbuh yang sedang dilaksanakan adalah *Rencana Pembangunan Jangka Menengah* (RPJMD) Tahap IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Periode 2005-2025. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut berisikan lima Agenda untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. kelima agenda tersebut adalah sebagai berikut: Agenda mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompetitif, agenda membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama, agenda meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan, agenda menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, agenda mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan

berbudaya berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

Terdapat beberapa kebijakan yang harus disesuaikan disebabkan karena adanya perubahan kebijakan nasional sehingga kebijakan daerah yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali dengan perubahan kebijakan dimaksud. Perubahan kebijakan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memuat lima arahan Presiden yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan kebijakan tersebut membawa dampak terhadap struktur keuangan daerah dan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan. Terkait kondisi pandemi yang terjadi secara nasional mempengaruhi sektor-sektor ekonomi dan sosial yang berpengaruh kepada capaian indikator pembangunan, yang selanjutnya untuk sisa tahun rencana perlu dilakukan kesesuaian kembali antara capaian pembangunan daerah dengan target indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 50 ayat (1) huruf b yang berbunyi rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan yang mendasar, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) huruf c yang berbunyi perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi terjadi perubahan yang mendasar dan pasal 342 ayat (3), yang berbunyi perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau

perubahan kebijakan nasional. Maka Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh perlu dilakukan perubahan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 46

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR DIAGRAM xi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum 1-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen 1-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-7
1.5 Sistematika Penulisan I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II–1
2.1 Sejarah Kota Payakumbuh II-1
2.2 Aspek Geografi dan Demografi II-2
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-17
2.4 Aspek Pelayanan Umum II-26
2.5 Aspek Daya Saing Daerah II-102
2.6 Gambaran Wajah Covid-19 di Kota Payakumbuh II-111
2.7 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-114
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-9
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-16
3.3 Kerangka Pendanaan III-19
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.2 Isu Strategis IV-4
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN V-1
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-3
5.3 Tujuan dan Sasaran V-4

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH VI-1

6.1 Misi 1 :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, Dan Kompetitif VI-1

6.2 Misi 2 :

Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama VI-36

6.3 Misi 3 :

Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur danFasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan VI-59

6.4 Misi 4 :

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih VI-78

6.5 Misi 5 :

Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya BerdasarkanAdat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ….. VI-125

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH VIII-1

8.1 Indikator Kinerja Utama VIII-1

8.2 Indikator Kinerja Daerah VIII-3

BAB IX PENUTUP IX-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2020 ...	II-3
Tabel II.2	Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh	II-4
Tabel II.3	Satuan Peta Tanah (SPT) di Kota Payakumbuh	II-6
Tabel II.4	Tipe Iklim dan Tipe Hujan Kota Payakumbuh	II-8
Tabel II.5	Distribusi Hujan Kota PayakumbuhTahun 2015- 2019	II-8
Tabel II.6	Luas Penggunaan Lahan menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh Tahun 2015- 2019	II-9
Tabel II.7	Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh (Ha) Tahun 2015- 2019	II-9
Tabel II.8	Persentase Luas Penggunaan Lahan Pertanian Sawah dan Non-Sawah dengan Luas Daerah Kota PayakumbuhTahun 2019	II-10
Tabel II.9	Perkembangan Nilai Indek Koefisien Lokasi (LQ)Menurut Sektor danSubsektor di Kota Payakumbuh Tahun 2015- 2019	II-10
Tabel II.10	Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektor (Lapangan Usaha) Kota Payakumbuh	II-11
Tabel II.11	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015- 2019 ..	II-14
Tabel II.12	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015- 2019	II-15
Tabel II.13	Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk 2015- 2019	II-15
Tabel II.14	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015- 2019	II-16
Tabel II.15	Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2015-2019	II-17
Tabel II.16	Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2015- 2019	II-17
Tabel II.17	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Kota Payakumbuh tahun 2015-2019	II-18
Tabel II.18	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK Kota Payakumbuh tahun 2015-2019	II-19
Tabel II.19	Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor Dan PDRB ADHK Kota Payakumbuh 2015-2019	II-20
Tabel II.20	Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2015-2019	II-20
Tabel II.21	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga KonstanTahun 2015 -2019 (2000 = 100)	II-21
Tabel II.22	Capaian Indikator HDI Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-22
Tabel II.23	Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-23
Tabel II.24	Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019.....	II-24
Tabel II.25	Perkembangan Data Kemiskinan Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-24
Tabel II.26	Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-26
Tabel II.27	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-27
Tabel II.28	Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015 – 2019	II-29
Tabel II.29	Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015 – 2019	II-29
Tabel II.30	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015 – 2019	II-30
Tabel II.31	Kondisi Ketersediaan Kelas dan Rombel Tahun 2019	II-30
Tabel II.32	Rasio Guru dan Murid Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-30

Tabel II.33	Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 – 2019.....	II-31
Tabel II.34	Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 – 2019	II-32
Tabel II.35	Data Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-33
Tabel II-36	Perbandingan Muatan Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia, Sekolah Negeridan Sekolah Swasta di Kota Payakumbuh	II-34
Tabel II-37	Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Berkategori Baik di Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-35
Tabel II.38	Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan Tahun 2015 – 2019	II-36
Tabel II.39	Jumlah Posyandu dan Balita Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-37
Tabel II.40	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-37
Tabel II.41	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per-jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-38
Tabel II.42	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-38
Tabel II.43	Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di Luar Rumah Sakit Tahun 2015 – 2019	II-39
Tabel II.44	10 Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019.....	II-40
Tabel II.45	Data Prevalensi HIV/ AIDS Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019 ..	II-41
Tabel II.46	Jumlah Jaminan Kesehatan Nasional Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-41
Tabel II.47	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-42
Tabel II.48	Persentase Panjang Jalan Kota Payakumbuh yang memiliki Drainase Tahun 2017- 2019	II-43
Tabel II.49	Persentase Panjang Jalan Kota Payakumbuh yang memiliki Trotoar Tahun 2015- 2019	II-43
Tabel II.50	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019.....	II-43
Tabel II.51	Jumlah Turap yang Dibangun Kota Payakumbuh Tahun 2015- 2019	II-44
Tabel II.52	Rasio Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019	II-44
Tabel II.53	Panjang Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-45
Tabel II.54	Persentase Pelayanan Air Minum di Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019	II-45
Tabel II.55	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019.....	II-46
Tabel II.56	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019.....	II-46
Tabel II.57	Rasio Bangunan ber-IMB Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019 ...	II-47
Tabel II.58	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2015 – 2019.....	II-48
Tabel II.59	Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019.....	II-48
Tabel II.60	Rasio Permukiman Layak Huni Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-48
Tabel II.61	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2016- 2019.....	II-49
Tabel II.62	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019.....	II-50
Tabel II.63	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-50
Tabel II.64	Tingkat Pelanggaran Kota Payakumbuh dari Tahun 2015 – 2019	II-51
Tabel II.65	Data Tingkat Waktu Tanggap Bencana Wilayah Manajemen Kebakaran (MK) Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-51
Tabel II.66	Data Bencana Alam di Kota Payakumbuh tahun 2015 – 2019	II-51

Tabel II.67	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2016-2019	II-52
Tabel II.68	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-53
Tabel II.69	Capaian Kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2015- 2019	II-53
Tabel II.70	Indikator Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019.....	II-54
Tabel II.71	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-54
Tabel II.72	Data Ketersediaan Pangan dan Perbandingan Skor PPH Kota Payakumbuh dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 - 2019 ..	II-56
Tabel II.73	Data Keamanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-57
Tabel II.74	Indeks Kualitas Udara Ambien Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-57
Tabel II.75	Data Baku Mutu Sungai Batang Agam di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-58
Tabel II.76	Jumlah Kawasan Lindung Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019.....	II-58
Tabel II.77	Volume dan Produksi Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-59
Tabel II.78	Jumlah TPS 3R Perkecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-59
Tabel II.79	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019.....	II-60
Tabel II.80	Persentase Penduduk dan Cakupan Pelayanan Air Minum Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019.....	II-60
Tabel II.81	Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-61
Tabel II.82	Penerbitan Dokumen dan Akta pada Kota Payakumbuh tahun 2015 – 2019	II-61
Tabel II.83	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir,Akte Nikah Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-62
Tabel II.84	Kondisi Gedung Kantor Lurah per-Kecamatan Tahun 2019	II-62
Tabel II.85	Kondisi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-63
Tabel II.86	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-64
Tabel II.87	Perkembangan Peserta KB Aktif Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-64
Tabel II.88	Pencapaian Peserta KB Baru Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-65
Tabel II.89	Jumlah Arus Penumpang Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019 ..	II-65
Tabel II.90	Jumlah Izin Trayek dan Rasio yang Dikeluarkan Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-66
Tabel II.91	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat Kota PayakumbuhTahun 2015-2019	II-66
Tabel II.92	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-67
Tabel II.93	Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019.....	II-68
Tabel II.94	Jumlah Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-68
Tabel II.95	Lokasi Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-69
Tabel II.96	Perkembangan Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-70
Tabel II.97	Jenis Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-71
Tabel II.98	Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-72
Tabel II.99	Perkembangan Penanaman Modal Kota PayakumbuhTahun 2015-2019	II-72
Tabel II.100	Potensi Investasi Kota Payakumbuh Tahun 2019.....	II-73
Tabel II.101	Prestasi Olahraga Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-74

Tabel II.102	Sarana Prasarana Olahraga di Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-76
Tabel II.103	Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019.....	II-77
Tabel II.104	Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-78
Tabel II.105	Perkembangan Kearsipan di Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-79
Tabel II.106	Jumlah Arsip dan Pejabat Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-79
Tabel II.107	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2015- 2019	II-80
Tabel II.108	Jumlah Tamu Menginap Di Hotel/Wisma Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-81
Tabel II.109	Jumlah Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019.....	II-81
Tabel II.110	Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-82
Tabel II.111	Luasan Lahan yang Mengalami Penurunan Tingkat Kesuburan di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-82
Tabel II.112	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019 (ton)	II-83
Tabel II.113	Data Kelembagaan Tani Beserta Kelasnya di Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-83
Tabel II.114	Sarana dan Prasarana Penunjang Kelembagaan Tani Tahun 2019 ..	II-87
Tabel II.115	Produktifitas Peternakan Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-89
Tabel II.116	Perkembangan Produksi Daging dan Telur Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019.....	II-89
Tabel II.117	Jumlah Usaha Pertanian Yang Membutuhkan Akses Permodalan di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-90
Tabel II.118	Jumlah Gapoktan yang Difasilitasi Permodalan di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-90
Tabel II.119	Jumlah Teknologi Anjuran Yang Telah Diterapkan di Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-91
Tabel II.120	Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2015-2019	II-91
Tabel II.121	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-92
Tabel II.122	Jumlah Tenaga Penyuluh Berdasarkan Keahlian di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-92
Tabel II.123	Perkembangan Sarana Perdagangan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019.....	II-93
Tabel II.124	Perkembangan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-94
Tabel II.125	Data Industri dan Penggunaan Tenaga kerja Tahun 2019	II-95
Tabel II.126	Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-96
Tabel II.127	Jumlah Produksi Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019…	II-97
Tabel II.128	Capaian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-97
Tabel II.129	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Struktural di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-98
Tabel II.130	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Tertentu di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-98
Tabel II.131	Daftar Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai Tahun 2015-2019.....	II-99
Tabel II.132	Jumlah Kerjasama Litbang yang Berkelanjutan di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019.....	II-100
Tabel II.133	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-102
Tabel II.134	Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019	II-103

Tabel II.135	Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh Tahun 2015- 2019	II-104
Tabel II.136	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-105
Tabel II.137	Rasio Luas Wilayah Produktif Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019..	II-105
Tabel II.138	Rasio Luas Wilayah Industri Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019 …	II-105
Tabel II.139	Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-106
Tabel II.140	Tindak Kriminal Pelanggaran Perda di Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019.....	II-106
Tabel II.141	Jumlah Pos Siskamling di Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019.....	II-106
Tabel II.142	Pajak dan Retribusi Daerah Kota Payakumbuh sampai dengan Tahun 2019	II-108
Tabel II.143	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-109
Tabel II.144	Rasio Ketergantungan Kota Payakumbuh Tahun 2015–2019.....	II-110
Tabel II.145	Sebaran Kasus Covid-19 Kota Payakumbuh per September 2020.....	II-111
Tabel II.146	Data Kasus Covid-19 Kota Payakumbuh Bulan April - September 2020	II-112
Tabel II.147	Karakteristik Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kota Payakumbuh Per- September 2020	II-113
Tabel II.148	Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2019	II-114
Tabel II.149	Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2019	II-115
Tabel III.1	Komposisi APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017-2020.....	III-9
Tabel III.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-Bulan Agustus 2020 (Rp)	III-10
Tabel III.3	Persentase Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2017 – 2019 ...	III-11
Tabel III.4	Target dan Realisasi Belanja Daerah yang Sah Tahun 2017-Bulan Agustus 2020 (Rp).....	III-12
Tabel III.5	Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2017-Bulan Agustus 2020	III-12
Tabel III.6	Rata-rata Proporsi Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2019	III-13
Tabel III.7	Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2017 s/d 2019.....	III-13
Tabel III.8	Rata-rata Pertumbuhan APBD Tahun 2017 s/d 2020 (dalam Milyar Rupiah	III-14
Tabel III.9	Rasio Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2019.....	III-15
Tabel III.10	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah tahun 2017-2019	III-15
Tabel III.11	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2019 dan Target Perubahan 2020 (dalam juta rupiah)	III-16
Tabel III.12	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja tahun 2017-2019.....	III-17
Tabel III.13	Defisit Riil Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2020	III-18
Tabel III.14	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2020.....	III-18
Tabel III.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2019.....	III-19
Tabel III.16	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2020	III-19
Tabel III.17	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 – 2022	III-22
Tabel III.18	Realisasi Pengeluaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2020	III-23
Tabel III.19	Prediksi Pengeluaran Daerah Tahun 2021-2022.....	III-23
Tabel III.20	Realisasi Pembiayaan Tahun 2017-2019 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2020-2022	III-24

Tabel III.21	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022.....	III-25
Tabel III.22	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022	III-26
Tabel IV.1	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik di Kota Payakumbuh Tahun 2030	IV-18
Tabel IV.2	Proyeksi Kebutuhan Jaringan telepon (Kabel) di Kota Payakumbuh Tahun 2030	IV-19
Tabel IV.3	Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik KLHS Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022	IV-23
Tabel IV.4	Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Pengkajian TPB	IV-24
Tabel IV.5	Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan di Provinsi Sumatera Barat	IV-27
Tabel IV.6	Kawasan Pertanian Holtikultural di Provinsi Sumatera Barat	IV-27
Tabel IV.7	Kawasan Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sumatera Barat	IV-28
Tabel IV.8	Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat	IV-29
Tabel IV.9	Wilayah Pengembangan Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat	IV-30
Tabel IV.10	Persandingan Keselarasan Isu Strategis antara RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kota Payakumbuh	IV-40
Tabel V.1	Sasaran Misi 1 Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-5
Tabel V.2	Tujuan Misi 2 sebelum dan sesudah perubahan	V-6
Tabel V.3	Sasaran Misi 2 Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-6
Tabel V.4	Tujuan Misi 3 sebelum dan sesudah perubahan	V-7
Tabel V.5	Sasaran Misi 3 Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-8
Tabel V.6	Tujuan Misi 4 sebelum dan sesudah perubahan	V-9
Tabel V.7	Sasaran Misi 4 sebelum dan sesudah perubahan	V-9
Tabel V.8	Tujuan Misi 5 sebelum dan sesudah perubahan	V-10
Tabel V.9	Sasaran Misi 5 Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-11
Tabel V.10	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 Sebelum Perubahan	V-12
Tabel V.11	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 Setelah Perubahan .....,	V-14
Tabel VI.1	Tujuan Misi 1 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-1
Tabel VI.2	Sasaran Misi 1 Sebelum dan Sesudah Perubahan .....,	VI-1
Tabel VI.3	Strategi Misi 1 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-2
Tabel VI.4	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pada Misi 1 setelah perubahan	VI-3
Tabel VI.5	Arah Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-3
Tabel VI.6	Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 1 Kota Payakumbuh 2018 – 2022 setelah perubahan	VI-5
Tabel VI.7	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Misi 1	VI-7
Tabel VI.8	Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 1 Kota Payakumbuh 2017-2022 setelah perubahan	VI-10
Tabel VI.9	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 1 setelah perubahan	VI-14
Tabel VI.10	Tujuan Misi 2 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-36
Tabel VI.11	Sasaran Misi 2 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-36
Tabel VI.12	Strategi Misi 2 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-37
Tabel VI.13	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pada Misi 2 setelah perubahan	VI-38
Tabel VI.14	Arah Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-39
Tabel VI.15	Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 2 Kota Payakumbuh 2018 – 2022 setelah perubahan	VI-40
Tabel VI.16	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Misi 2	VI-42
Tabel VI.17	Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 2 Kota Payakumbuh 2017-2022 setelah perubahan	VI-44

Tabel VI.18	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 2 setelah perubahan	VI-48
Tabel VI.19	Tujuan Misi 3 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-59
Tabel VI.20	Sasaran Misi 3 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-60
Tabel VI.21	Strategi Misi 3 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-60
Tabel VI.22	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pada Misi 3 setelah perubahan	VI-60
Tabel VI.23	Arah Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-61
Tabel VI.24	Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 3 Kota Payakumbuh 2018 – 2022 setelah perubahan	VI-62
Tabel VI.25	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Misi 3	VI-63
Tabel VI.26	Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 3 Kota Payakumbuh 2017-2022 setelah perubahan	VI-65
Tabel VI.27	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 3 setelah perubahan	VI-68
Tabel VI.28	Tujuan Misi 4 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-79
Tabel VI.29	Sasaran Misi 4 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-79
Tabel VI.30	Strategi Misi 4 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-79
Tabel VI.31	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pada Misi 4 setelah perubahan	VI-80
Tabel VI.32	Arah Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-81
Tabel VI.33	Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 4 Kota Payakumbuh 2018 – 2022 setelah perubahan	VI-82
Tabel VI.34	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Misi 4	VI-83
Tabel VI.35	Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 4 Kota Payakumbuh 2017-2022 setelah perubahan	VI-86
Tabel VI.36	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 4 setelah perubahan	VI-88
Tabel VI.37	Tujuan Misi 5 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-125
Tabel VI.38	Sasaran Misi 5 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-125
Tabel VI.39	Strategi Misi 5 Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-125
Tabel VI.40	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pada Misi 5 Setelah Perubahan	VI-125
Tabel VI.41	Arah Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perubahan	VI-126
Tabel VI.42	Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 5 Kota Payakumbuh 2017 – 2022 setelah perubahan	VI-126
Tabel VI.43	Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Misi 5	VI-126
Tabel VI.44	Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 5 Kota Payakumbuh 2017-2022 setelah perubahan	VI-127
Tabel VI.45	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 5 setelah perubahan	VI-128
Tabel VII.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022	VII-3
Tabel VII.2	Indikasi Rencana program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Payakumbuh	VII-5
Tabel VIII.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022	VIII-2
Tabel VIII.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1	Batas Administrasi Kota Payakumbuh	II-3
Gambar II.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh	II-4
Gambar II.3	Peta Jenis Tanah Kota Payakumbuh	II-6
Gambar II.4	Peta Hidrologi Kota Payakumbuh	II-7
Gambar II.5	Peta Rencana Rawan Bencana Kota Payakumbuh	II-13
Gambar II.6	Perkembangan Kepadatan Penduduk di Kota Payakumbuh	II-14
Gambar II.7	Water Treatment Plant (WTP) Kota Payakumbuh	II-46
Gambar II.8	RTH Ratapan Ibu Kota Payakumbuh	II-47
Gambar II.9	TPA Regional Kota Payakumbuh	II-59
Gambar II.10	Salah Satu Aplikasi Terintegrasi, Aplikasi SODAP Kota Payakumbuh	II-69
Gambar II.11	Salah Satu Aplikasi Terintegrasi, Aplikasi E – SPPD	II-70
Gambar II.12	Rencana Stadion Olah Raga Yang Dibangun di Area Sungai Batang Agam Kota Payakumbuh	II-76
Gambar II.13	Aplikasi Penilaian Kinerja ASN Kota Payakumbuh	II-99
Gambar II.14	Aplikasi Sistim Informasi Kota Payakumbuh	II-100
Gambar IV.1	Nawacita Kedua RPJMN 2020 – 2024	IV-8
Gambar VI.3	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-12

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I.1	Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014	I-2
Diagram I.2	Hubungan Dokumen RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022 Dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya	I-6
Diagram II.1	Kuadran Tipologi Klassen	II-12
Diagram II.2	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2015 -2019	II-15
Diagram II.3	Beban Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2015 -2019	II-16
Diagram II.4	Perbandingan Angka Inflasi Nasional, Provinsi dan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-21
Diagram II.5	Perbandingan Gini Ratio Kota Payakumbuh dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019	II-22
Diagram II.6	Balita Gizi Buruk Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-23
Diagram II.7	Perkembangan Data Kemiskinan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-25
Diagram II.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-25
Diagram II.9	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019 (dalam %)	II-27
Diagram II.10	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-28
Diagram II.11	Angka Partisipasi Sekolah Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019 ...	II-28
Diagram II.12	Rekapitulasi Guru PNS dan Non-PNS TK/SD/SMP Negeri Kota Payakumbuh Tahun 2019	II-31
Diagram II.13	Rasio Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019	II-32
Diagram II.14	Rasio Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019	II-33
Diagram II.15	Rasio SD dan SMP Terakreditasi-A di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-34
Diagram II.16	Perkembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kota Payakumbuh Tahun 2015 -2019	II-40
Diagram II.17	Persentase Jaringan Irigasi di Kota Payakumbuh dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019	II-44
Diagram II.18	Jumlah Anak Berakte Kelahiran di Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019	II-55
Diagram II.19	Tingkat Kepesertaan KB Aktif atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-64
Diagram II.20	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019	II-80
Diagram II.21	Perkembangan kasus Covid 19 di Kota Payakumbuh April-September 2020	II-112
Diagram II.22	Jumlah Spesimen yang di Periksa di Kota Payakumbuh Selama April-September 2020	II-112

BAB 1
PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi Kepala Daerah yang mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah aktual. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



Diagram I.1
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

Dalam ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Pasangan Kepala Daerah terpilih pada tanggal 15 Februari 2017 untuk periode 2017-2022 adalah H. Riza Falepi, ST, MT selaku walikota dan H. Erwin Yunaz, SE. MM selaku wakil walikota, RPJMD 2017 – 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dan telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan bahwa RPJMD dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evalusi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
c. Terjadi perubahan yang mendasar;

Selanjutnya pada ayat (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya **bencana alam**, goncangan politik, **krisis ekonomi**, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau **perubahan kebijakan nasional.** Kondisi saat ini terjadi pandemi covid-19 yang tergolong ke dalam bencana non alam yang mengakibatkan krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis. Hasil proyeksi provinsi Sumatera Barat pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar 1,18 % dan tahun 2021 mencapai 4,18. Hasil proyeksi ini juga merubah indikator makro ekonomi lainnya seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio. Perubahan pada proyeksi indikator makro ini akan berpengaruh kepada proyeksi dan target indikator lainnya yang berhubungan langsung dengan indikator makro ekonomi yang berubah.

Selain hal tersebut di atas, juga terjadi perubahan yang mendasar terhadap kebijakan perencanaan yang mengubah struktur belanja seluruh nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD. Perubahan kebijakan mendasar tersebut meliputi :

1. Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa proses perencanaan harus melalui SIPD Nasional; dan
4. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Penyusunan musrenbang;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Dalam ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa perubahan RPJMD menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Berdasarkan ketentuan tersebut, perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 dan pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra-PD. Dalam penyusunan perubahan RPJMD, mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005 – 2025. Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh periode 2017-2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005 - 2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh 2010 - 2030, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitannya dengan hubungan fungsional dengan dokumen perencanaan lain, selain memperhatikan RTRW Kota Payakumbuh sendiri, penyusunan dokumen ini senantiasa memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten tetangga dan juga RTRW Kabupaten tetangga. Keterkaitan hubungan fungsional ini terutama pada program-program pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan sinergitas perencanaan untuk pencapaian prioritas pembangunan kewilayahan maka diharapkan pembangunan terutama pada kawasan perbatasan dan sekitarnya akan dapat diintegrasikan.

Pemerintah daerah dengan seluruh jajaran *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) berkewajiban juga menyusun kebijakan, program dan kegiatan responsif gender yang dituangakan di dalam RPJMD ini, selanjutnya direspon langsung dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD setiap tahunnya, sebagai bentuk responsif terhadap isu sentra permasalahan kesenjangan gender.

Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai *stakeholders*. Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh ini nantinya akan dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini setiap tahun

dapat dicapai secara bertahap, sehingga proses pembangunan dapat terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

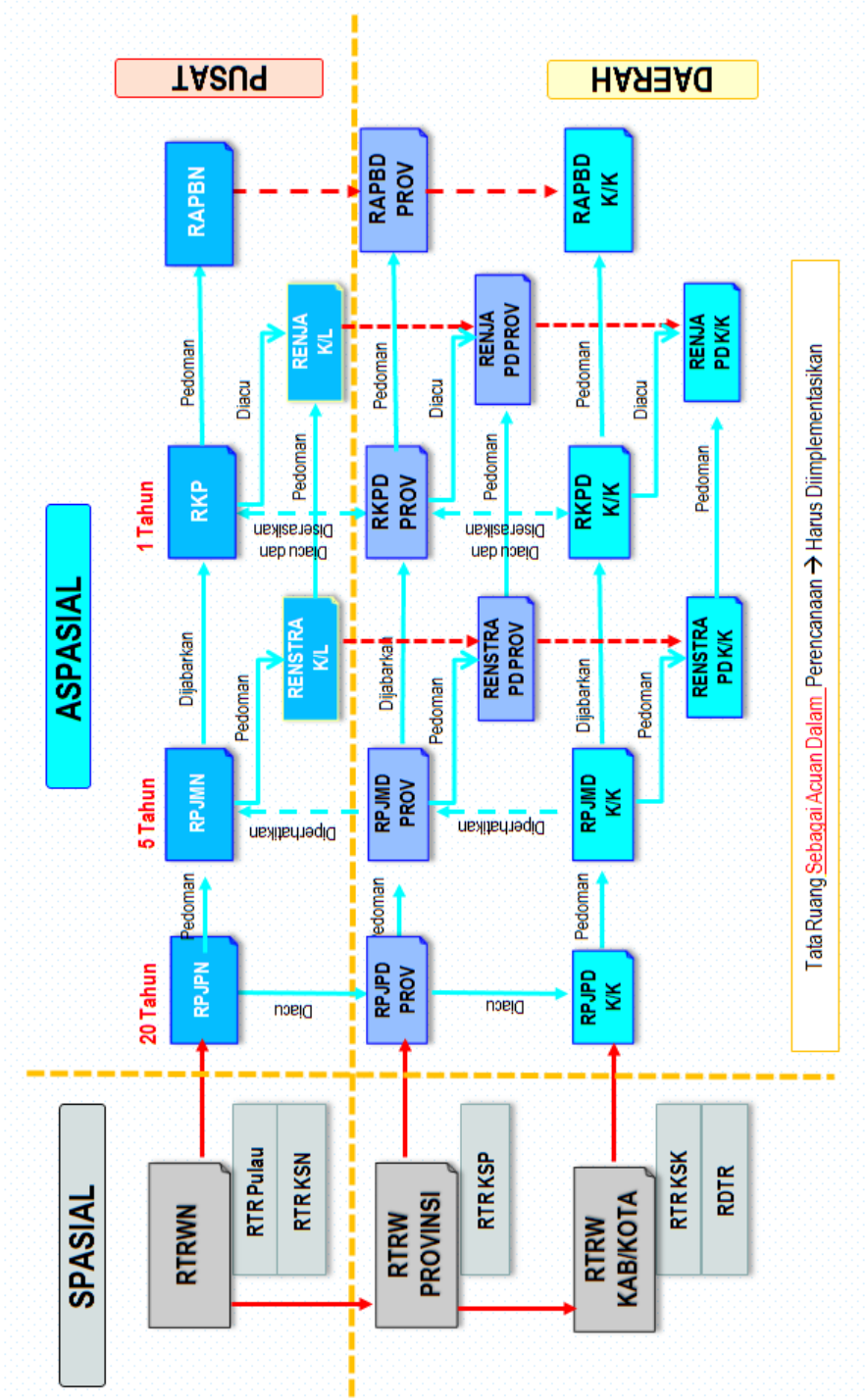


Diagram I.2.
Hubungan Dokumen PerubahanRPJMD Kota Payakumbuh 2017 – 2022
Dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 dimaksudkan untuk:

a. Menyediakan rumusan kebijakan dan program pembangunan;
b. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
c. Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Kota Payakumbuh pada tahun 2022 yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini juga menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai hingga tahun 2022 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya. Tujuan Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah untuk :

a. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2017 - 2022;
b. Sebagai rujukan bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD;
c. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
d. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
e. Sebagai acuan penyusunan RKPD tahun 2022;
f. Sebagai tolok ukur kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota;
g. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
h. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kota Payakumbuh;
i. Sebagai acuan dalam fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Perda RPJMD;
j. Sebagai rumusan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu-Isu Strategis Daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan program pembangunan daerah, kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan, agenda dan prioritas pembangunan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja makro pemerintah daerah dalam pencapaian outcome tahunan selama periode 2017-2022.

BAB IX PENUTUP



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah merupakan gambaran kondisi geografi, demografi dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Payakumbuh. Ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan Kota Payakumbuh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah terdapat indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Selanjutnya, gambaran umum kondisi daerah diharapkan dapat memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Payakumbuh, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan secara series beberapa tahun terakhir sesuai dengan data yang tersedia.

2.1 Sejarah Kota Payakumbuh

Payakumbuh berasal dari kata Payau dan Kumbuah, dimana berdasarkan literatur lama Payau (Payo) dalam Bahasa Indonesia berarti rawa-rawa, dan Kumbuah adalah sejenis tanaman yang dulunya tumbuh subur di daerah rawa di kanagarian Koto Nan Gadang. Kota Payakumbuh berdiri pada tanggal 17 Desember 1970, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19). Berdasarkan peraturan tersebut Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai daerah tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri, dan tanggal 17 Desember ditetapkan menjadi hari jadi Kota Payakumbuh. Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka status Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh, berubah menjadi Kota Payakumbuh.

2.2 Aspek Geografi dan Demografi

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang ada, dibutuhkan pemahaman mengenai kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan melalui proses pembangunan taat lingkungan.

2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Payakumbuh secara geografis berada pada daerah pegunungan bukit barisan yang berjarak 124 Km dari ibukota provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang menjadi gerbang utara sebelum menuju Provinsi Riau. Dengan Posisi astronomis Kota Payakumbuh terletak pada 00^0-10^0sampai dengan 0^0-17′ LS dan 100^0-35′ sampai dengan 100^0-48′ BT. Kota Payakumbuh dapat didominasi dataran rendah (92,30%), dan sisanya perbukitan dengan elevasi maksimum ±825 m dpl (7,70%). Area perbukitan terletak di batas barat daya dan selatan Kota Payakumbuh, disamping jaringan alur sungai yang secara umum mengalir dari barat daya ke timur laut dan bergabung ke Batang Sinamar. Walaupun sepanjang aliran sungai terakumulasi endapan aluvial, tetapi mayoritas material pembentuk muka bumi berasal dari aktifitas gunung berapi.

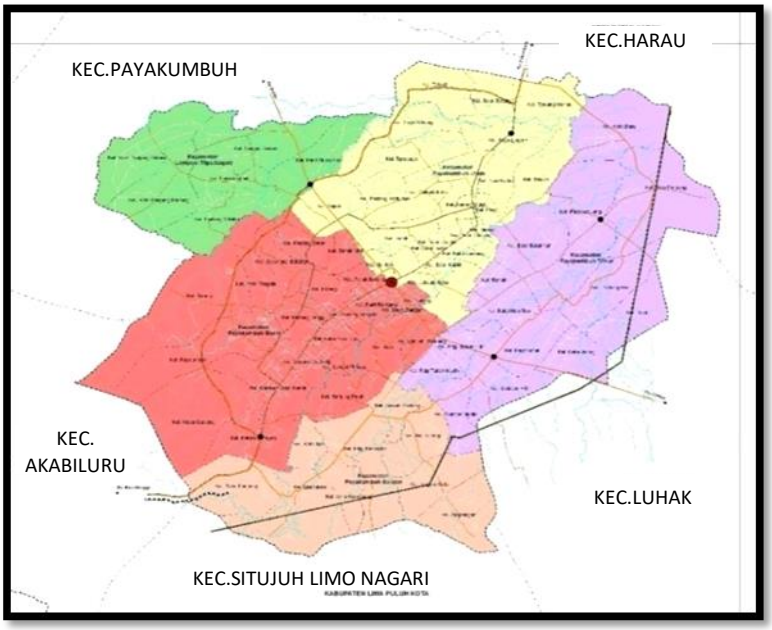
2.2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Payakumbuh memiliki luas wilayah ±80,43 Km^2 atau ±0,19% dari luas Propinsi Sumatera Barat. Sementara berdasarkan perhitungan peta citra, luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 75,26 Km^2. Selisih perhitungan ini dikarenakan perbedaan sumber peta dan teknik yang digunakan untuk menghitung luas wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dimekarkan dari tiga kecamatan menjadi lima kecamatan, dengan ditambahkannya Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tanggal 23 Desember 2008, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tanggal 24 Desember 2008.

Sebagai bagian dari Luhak Nan Bungsu, Kota Payakumbuh dikelilingi oleh Kabupaten Limapuluh Kota yang secara administratif berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh
- Sebelah Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari
- Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru
- Sebelah Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau



Gambar II-1
Batas Administrasi Kota Payakumbuh
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

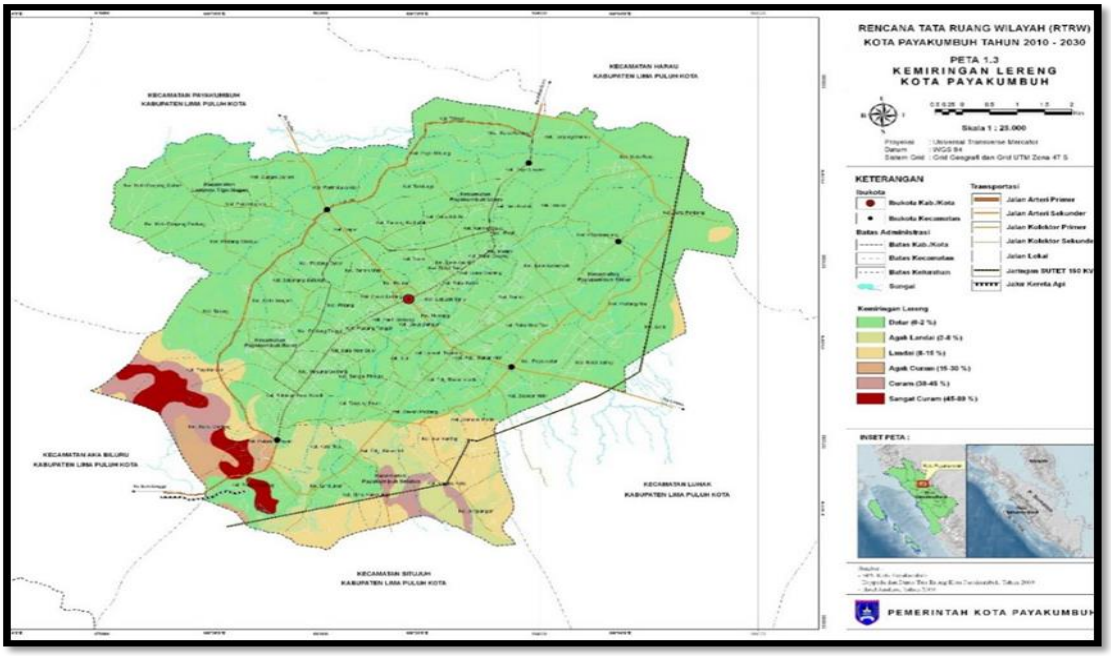
Tabel II-1
Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah		
				Kelurahan	RW	RT
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,06	17	58	168
2	Payakumbuh Utara	Tigo Koto Diate	14,53	9	35	122
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,73	9	33	91
4	Payakumbuh Selatan	Sawah Padang Aur Kuning	14,68	6	16	50
5	Lamposi Tigo Nagori	Sei Durian	09,43	6	14	50
Total			**80,43**	**47**	**156**	**481**

Sumber **:** Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh, 2020

2.2.1.3 Topografi

Topografi Kota Payakumbuh berdasarkan aspek ketinggian dan kemiringan lahan, dimana hampir sebagian wilayahnya (±92,30% atau ±7423,75 Ha) terletak dengan kemiringan lahan kurang dari 2%, yang mencakup Kecamatan Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Sedangkan Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih tergolong pada perbukitan. Secara umum Kota Payakumbuh memiliki relief dengan kemiringan lereng beragam dari 0% (datar) hingga lebih dari 40% (curam), yang terletak pada ketinggian daerah berada pada 500 Meter di atas permukaan laut.



Gambar II-2
Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh
Sumber**:** Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Tabel II-2
Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh

No	Kemiringan Lahan	Lereng(%)	Kelas	(Luas)	
				Ha	%
1	Datar	0-2	A	6.601,7	82,08
2	Agak Landai	2-8	B	304,0	3,78
3	Landai	8-15	C	588,8	7,32
4	Agak Curam	15-30	D	112,6	1,40
5	Curam	30-45	E	298,4	3,71
6	Sangat Curam	45-60	F	137,5	1,71
Luas				**8.043,0**	**100,00**

Sumber **:** Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Berdasarkan Gambar II-2 dan tabel II-2 Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berpotensi untuk usaha pertanian.

2.2.1.4 Geologi

Berdasarkan sistem klasifikasi tipe tanah yang dikemukakan Marsoedi, Widigdo dan S. Hardjo Wigeno (1995), maka bentuk tanah dari Kota Payakumbuh sebagai berikut:

1. Aluvial

Tanah aluvial merupakan tanah mineral yang berasal dari endapan alluvium sungai, terutama Sungai Batang Agam dan Sungai Sinamar yang tersebar dengan kemiringan (0-2%). Tanah Aluvial dimanfaatkan untuk areal persawahan, permukiman dan ladang/ kebun campuran. Jenis tanah alluvial dikelompokkan menjadi dua; aluvial distrik dan alluvial gleiik. Sifat dan karakteristik tanah dicirikan dengan drainase tanah sedang

sampai sangat terhambat, permeabelitas tanah sedang sampai lambat dan tanah agak dalam (60-80 cm), tekstur tanah bervariasi antara lempung liat dan lempung liat berdebu, dengan reaksi tanah masam (PH 4,5-5,5) dan status kesuburan tanah rendah.

2. Gleisol

Tanah Gleisol merupakan tanah mineral yang selalu tergenang air dan tanahnya belum matang (unriped soil), dengan bahan induk tanah berasal dari tufa batu apung. Tanah Gleisol di Kota Payakumbuh dikelompokkan menjadi Gleisol hidrik, yang tersebar pada dataran dengan kemiringan lahan (0- 2%). Jenis tanah gleisol dicirikan dengan drainase tanah sangat terhambat, permeabilitas tanah sangat lambat dan kedalaman tanah agak dalam (51-75 cm). Tekstur tanah halus (liat, lempung liat dan liat berdebu). Kandungan C-Organik tergolong sedang dan reaksi tanah sangat masam (PH <4,5), dan status kesuburan tanah tergolong rendah.

3. Kambisol

Tanah Kambisol merupakan induk tanah yang berasal dari batuan sedimen masam atau dari tufa bahan apung. Secara fisiografis tanah ini tersebar pada dataran berombal aluvial-koluvial, lereng bawah perbukitan, dataran vulkanik dan perbukitan terpisah dengan kemiringan lahan bervarasi dari agak landai (3-8%), landai (8-15%), curam (30-45%) dan sangat curam (>45%). Tanah kambisol dikelompokkan dalam kambisol distrik, kambisol gleiik, dan kambisol litik. Karakteristik tanah ini dicirikan dengan drainase sangat terhambat-baik, permeabilitas tanah sangat lambat-agak cepat dan tekstur tanah lempung liat, lempung, lempung berdebu dan lempung liat berpasir. Kedalaman tanah bervariasi dari cukup dangkal (30-50 cm) sampai agak dalam (51-75 cm), reaksi tanah masam (PH <4,5) dan status kesuburan tanah tergolong rendah.

4. Padsolik

Tanah Padsolik merupakan tanah mineral yang mempunyai horizon argilik dengan kejenuhan basa kurang dari 35%. Bahan induk tanah berasal dari batuan sediment masam yang tersebar pada dataran perbukitan dalam pola rendah. Untuk Kota Payakumbuh, tipe tanah ini dikelompokkan atas dua macam tanah yakni Padsolok ortik dan padsolik humik.Sifat dan karakteristik tanah dicirikan dengan drainase tanah sedang, permeabelitas tanah sedang, dan kedalaman tanah tergolong dalam (100 – 120 cm), tekstur halus (liat dan liat berdebu), reaksi tanah masam (PH 4,5 – 5,5) dan status kesuburan tanah tergolong rendah.

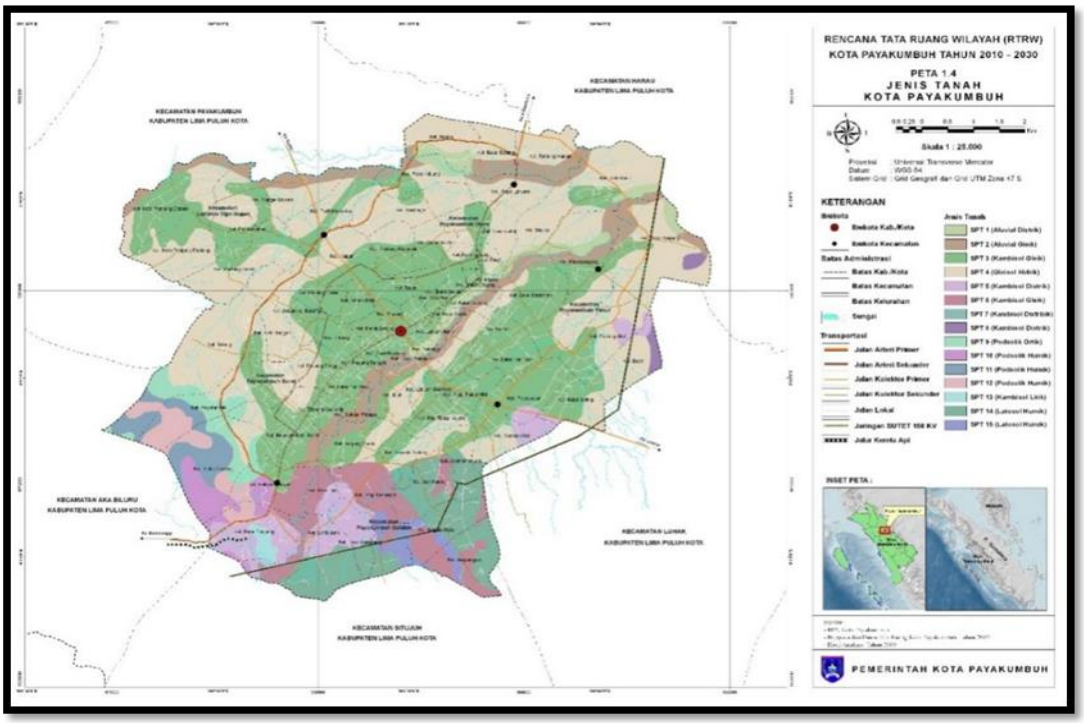
5. Latosol

Tanah Latosol merupakan tanah mineral yang telah berkembang, dengan bahan induk tanah berasal dari batuan vulkanik dan tersebar pada lereng bawah vulkanik. Pemanfaatan tanah tipe ini digunakan untuk ladang dan kebun campuran. Jenis tanah latosol di wilayah studi termasuk pada tingkat tanah latosol humik.Sifat dan karakteristik tanah dicirikan dengan drainase tanah baik, permeabilitas tanah agak cepat dan *Porosital*(100-120cm). Tekstur tanah halus (liat berdebu sampai liat), dan reaksi tanah masam (PH 4,5-5,5). Status kesuburan tanah adalah sedang.

Tabel II-3
Satuan Peta Tanah (SPT) di Kota Payakumbuh

SPT	Jenis Tanah	Lereng (%)	Posisi Fisiografi	Bahan Induk Tanah	Luas	
					Ha	%
1	Aluvial Distrik	Datar (0 - 2)	Dataran Aluvial	Endapan aluvial sungai	423,06	5,26
2	Aluvial Gleiik	Datar (0 - 2)	Dataran Aluvial	Endapan aluvial sungai	754,43	9,38
3	Kambisol Gleiik	Datar (0 - 2)	Dataran Aluvial	Endapan aluvial & koluvium	2.767,60	34,41
4	Gleisol Hidrik	Datar (0 - 2)	Dataran	Tufa batu apung	2.538,37	31,56
5	Kambisol Distrik	Datar (0 - 2)	Dataran	Tufa batu apung	118,23	1,47
6	Kambisol Gleiik	Agak landai (2 - 8)	Dataran aluvial-koluvial	Endapan aluvium dan koluvium	304,03	3,78
7	Kambisol Distrik	Landai (8 - 15)	Perbukitan kecil	Batuan sedimen	58,71	0,73
8	Kambisol Distrik	Landai (8 - 15)	Perbukitan kecil	Tufa batu apung	86,06	1,07
9	Padsolik Ortik	Landai (8 - 15)	Lereng Bawah Perbukitan	Batuan sedimen	186,60	2,32
10	Padsolik Humik	Agak curam (15 - 30)	Perbukitan	Batuan sedimen	112,60	1,4
11	Padsolik Humik	Curam (30 - 45)	Perbukitan	Batuan sedimen	171,32	2,13
12	Padsolik Humik	Sangat curam (45 - 60)	Perbukitan	Batuan sedimen	84,45	1,05
13	Kambisol Litik	Sangat curam (45 - 60)	Perbukitan terpisah	Batuan vulkanik & Intrusi	53,08	0,66
14	Latosol Humik	Landai (8 - 15)	Lereng bawah vulkanik	Batuan vulkanik	257,38	3,2
15	Latosol Humik	Curam (30 - 45)	Lereng bawah vulkanik	Batuan vulkanik	127,08	1,58
Total					**8.043,00**	**100**

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030



Gambar II-3
Peta Jenis Tanah Kota Payakumbuh
Sumber **:** Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

2.2.1.5 Hidrologi

Kota Payakumbuh memiliki sumber air baku yang cukup potensial. Berdasarkan gambar II.4 terlihat ada tujuh alur sungai, yaitu: Batang Lampasi, Batang Pulau, Batang Agam, Batang Sikali, Sungai Talang, Sungai Baih, dan Batang Sinamar. Aliran sungai yang menjangkau setiap wilayah di Kota Payakumbuh tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, tetapi juga dikembangkan sebagai bagian dari objek wisata Kota Payakumbuh.

1. **Sungai Batang Agam**

   Sumber air yang berasal dari air permukaan dengan debit air mencapai 3,38 m^3/detik sampai 6,30 m^3/detik. Sedangkan pada saat kemarau debit air sebesar 4,40m^3/detik.

2. **Mata Air Bulakan**

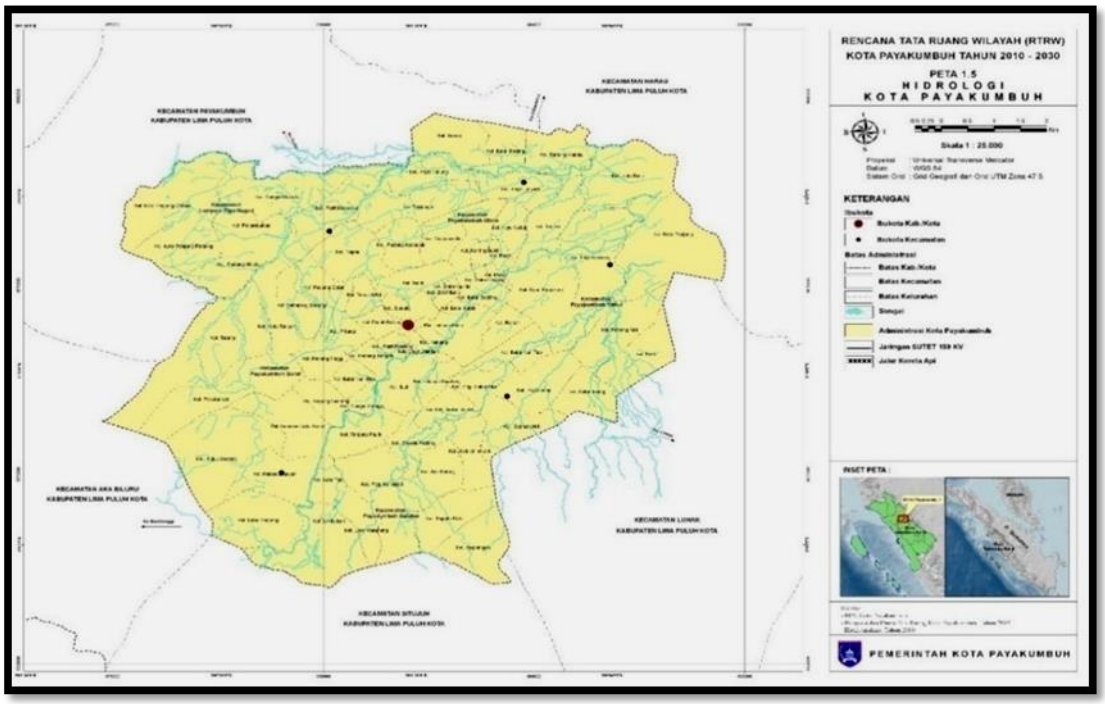
   Mata air ini berada di Kelurahan Limbukan. Selain sebagai sumber air baku, mata air Bulakanyang mempunyai tiga outlet dari dua bangunan penangkap air tersebut dengan debit sebesar 325 liter/detik dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perikanan.

3. **Sungai Batang Lampasi**

   Sungai ini mengalir melewati Kelurahan Koto Panjang, Sungai Durian, Taratak Padang Kampuang dan Ompang Tanah Sirah, yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan

4. **Sungai Batang Sinamar**

   Sungai yang mengalir melewati Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kotobaru Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur ini belum dapat dioptimalkan untuk keperluan irigasi karena elevasi pada hulu sungai sangat rendah dan hanya melewati Kota Payakumbuh sepanjang ±3 (tiga) kilometer, Sungai Batang Sinamar juga merupakan batas alami dengan Kabupaten Limapuluh Kota.



Gambar II-4
Peta Hidrologi Kota Payakumbuh
Sumber **:** Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

2.2.1.6 Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, dan sistem klasifikasi iklim W. Koppen Kota Payakumbuh digolongkan pada tipe iklim A (iklim hujan tropis). Iklim hujan tropis dicirikan dengan suhu normal, dengan bulan terdingin suhu diatas 18ºC dan suhu bulan terpanas di atas 22ºC. Untuk sistem klasifikasi iklim zona agroklimat yang dipublikasikan oleh Oldeman Irsal Las dan S.N.Darwis (1979), Kota Payakumbuh tergolong pada zona agroklimat D1, dengan ciri-ciri mempunyai bulan basah (curah hujan diatas 200 mm) berturut-turut sebanyak 3–4 bulan dan bulan kering (curah hujan di bawah 100 mm) berturut-turut kurang dari dua bulan.

Tabel II-4
Tipe Iklim dan Tipe Hujan Kota Payakumbuh

Stasiun Pengamat Hujan	Elevasi (mdpl)	Tahun Pengamatan	Jumlah Bulan Kering			Jumlah Bulan Basah			Nilai Q	Tipe Hujan Schmidt dan Ferguson	Tipe Iklim Koppen
			Rerata	Maks	Frek	Rerata	Maks	Frek			
Payakumbuh	512	20	1,1	3	2	9,3	11	3	0,12	A	Afa

Sumber : FH. Schmidt and J.H.A Ferguson. 1951. Rainfall Types Based On Wet And Day Preiods Ratio for Indonesia With Western New Guine. Verhodelingon. 42

Curah hujan berpengaruh terhadap ketersediaan air bagi tanaman. Pada daerah yang tidak terairi oleh irigasi, maka pertanian didaerah tersebut sangat tergantung pada hujan. Agar tanaman tidak kekurangan air dan dapat berproduksi maksimum, maka daerah perlu menyediakan sumber air bagi tanaman. Sedangkan untuk yang memiliki curah hujan rendah, petani atau instansi terkait membangun saluran irigasi agar air selalu tersedia bagi tanaman. Di sisi lain, Pertumbuhan vegetasi tidak hanya ditentukan oleh curah hujan, tetapi juga oleh distribusi hujan. Hari hujan dinyatakan sebagai suatu tempat yang mengalami hujan dengan angka curah hujan 0,5 mm atau lebih. Jumlah hujan yang sama dalam mm akan berbeda pengaruhnya jika tercurah pada waktu yang berbeda. Distribusi hujan dapat dinyatakan dengan melihat data jumlah hari hujan.

Tabel II-5
Distribusi Hujan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Bulan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	174	14	417	18	107	10	226	19	231	15
2.	Februari	132	9	126	9	131	9	204	14	148	10
3.	Maret	198	17	258	11	379	15	228	10	266	13
4.	April	35	20	223	13	252	18	258	18	192	16
5.	Mei	188	15	177	12	224	15	159	11	187	13
6.	Juni	159	9	46	4	96	11	93	11	99	10
7.	Juli	22	3	55	6	53	7	110	12	60	7
8.	Agustus	41	5	48	6	191	14	120	9	100	9
9.	September	95	6	61	5	223	16	165	12	136	10
10.	Oktober	64	5	62	7	66	7	190	13	96	8
11.	November	392	24	202	16	284	22	219	18	274	20
12.	Desember	168	19	122	11	244	17	235	16	192	15

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020

2.2.1.7 Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang wilayah perencanaan merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan alam. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan manusia dikategorikan sebagai kegiatan budi daya yang dalam prosesnya harus didukung dengan penyediaaan kawasan lindung. Kelangkaan lahan (*Land Scarcity*) mencerminkan bahwa lahan/tanah merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak mungkin bertambah kedepannya, kecuali untuk daerah pantai yang melakukan reklamasi pada daerah pantai atau tanjung. Di sisi lain, perkembangan sosial ekonomi menuntut adanya kenaikan permintaan lahan, baik dari segi luas maupun dari segi keragamannya. Karena itu penataan ruang menjadi sebuah kebutuhan dari kota untuk mengoptimalkan pola kegiatan keruangan dari manusianya. Tanaman padi dapat hidup baik didaerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air. Curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih. Untuk daerah dengan ketersediaan air yang cukup, penanaman padi dilakukan pada periode tertentu saat selalu tergenang air. Berdasarkan tabel II-6, hampir sepertiga luas daerah Kota Payakumbuh dimanfaatkan sebagai sawah.

Tabel II-6
Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019

No	Jenis Penggunaan Lahan	2015		2016		2017		2018		2019	
		Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)	Luas Area (Ha)	Persen (%)
1.	Sawah	2.123	26,40	2.123	26,40	2.751	34,20	2.684	33,37	2.749,00	34,18
2.	Tanah untuk Bangunan dan Sekitarnya	3.533	43,89	3.530	43,88	2.968	36,90	3.034	37,73	2.970,41	36,92
3.	Kebun/ Ladang	1.456	18,10	1.458	18,13	1.380	17,16	1.380	17,16	1.450	18,03
4.	Hutan	356	4,43	354	4,40	385	4,79	385	4,79	283,00	3,52
5.	Padang Rumput	11	0,14	11	0,14	3	0,04	3	0,04	4	0,05
6.	Lainnya	550	6,87	553	6,88	542	6,73	542	6,73	587	7,30
	Jumlah	8.043	0	8.043	100	8.043	100	8.043	100	8.043	100

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020.

Pada tahun 2019 dilakukan Studi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Payakumbuh yang oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNAND, sehingga data sebenarnya terhadap luas penggunaan lahan sesuai hasil studi tersebut menjadi acuan dalam penetapan data mulai tahun 2019 ini. Ini berkonsekuensi terhadap perbedaan luasan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana dari hasil studi itu luas sawah Kota Payakumbuh bertambah menjadi menjadi 2.749,00 Ha atau sebesar 34,18%.

Tabel II-7
Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh (Ha) Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Luas Daerah	2015		2016		2017		2018		2019	
			Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah
1	Payakumbuh Barat	1.906	529	577	529	577	529	577	527	577	527	577
2	PayakumbuhTimur	2.273	663	772	663	772	663	772	663	772	663	772
3	Payakumbuh Utara	1.453	745	255	745	225	745	225	745	191	745	191
4	Payakumbuh Selatan	1.468	378	493	378	491	378	491	378	491	378	491
5	Lamposi Tigo Nagori	943	436	293	436	293	436	293	436	293	436	293
	Jumlah	8.043	2.751	2.390	2.751	2.358	2.751	2.358	2.749	2.324	2.749	2.324

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020 , Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020.

Untuk tahun 2019 terlihat bahwa Kecamatan Payakumbuh Barat memiliki lahan sawah terkecil di Kota Payakumbuh, karena sebagian besar wilayah di Kecamatan Payakumbuh Barat merupakan pusat Kota Payakumbuh yang sekaligus pusat kegiatan ekonomi.

Tabel II-8
Persentase Luas Penggunaan Lahan Pertanian Sawah dan Non-Sawah dengan Luas Kota Payakumbuh Tahun 2019

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Daerah	Sawah	Bukan Sawah	Persentase Luas Lahan Pertanian Sawah terhadap Luas Daerah	Persentase Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah terhadap Luas Daerah	Persentase Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Daerah
1.	Payakumbuh Barat	1.906	527	577	26,80%	29,35%	56,15%
2.	PayakumbuhTimur	2.273	663	772	29,17%	33,96%	63,13%
3.	Payakumbuh Utara	1.453	745	191	51,27%	13,15%	64,42%
4.	Payakumbuh Selatan	1.468	378	491	26.83%	34,85%	61,68%
5.	Lamposi Tigo Nagori	943	436	293	47,28%	31,11%	77,39%
Total		8.043	2.749	2.324	34,18%	28,89%	63,07%

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020 (data diolah)

2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah dilakukan untuk mengetahui secara konkrit sektor dan sub-sektor yang berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana daerah untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga pertumbuhan ekonomi optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maksimal dapat diwujudkan. Potensi pengembangan ekonomi kabupaten/ kota dari sisi pembangunan sektoral ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dibandingkan dengan kinerja sektoral pada tingkat provinsi. Alat analisa yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan komparatif sektor dan sub-sektor daerah adalah Indeks Koefisien Lokasi (Location Quotient, LQ).

LQ adalah suatu perbandingan besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut pada tingkat yang lebih luas.Teknik ini mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah pada sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis dan sektor mana yang bukan sektor basis. LQ dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sektor unggulan daerah. Dalam perhitungannya nilai LQ diperoleh dengan membandingkan PDRB Kota Payakumbuh dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat pada rentang waktu tahun 2012-2016, hasil perhitungan sebagaimana yang tergambar pada Tabel II-9.

Tabel II- 9
Perkembangan Nilai Indek Koefisien Lokasi (LQ) Menurut Lapangan Usaha di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019	Rerata*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
B	Pertambangan dan Penggalian	0,16	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15
C	Industri Pengolahan	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,58	0,60	0,59	0,60	0,60	0,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	2,86	2,75	2,73	2,75	2,75	2,77

	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata*)
	Limbah dan Daur Ulang						
F	Konstruksi	1,51	1,48	1,47	1,48	1,48	1,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,55	1,56	1,55	1,55	1,55	1,55
H	Transportasi dan Pergudangan	1,16	1,10	1,10	1,12	1,12	1,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,81	2,97	2,95	2,96	2,96	2,93
J	Informasi dan Komunikasi	1,00	0,97	0,97	0.97	0.97	1,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	2,23	2,25	2,25	2,25	2,23
L	Real Estat	1,53	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50
M,N	Jasa Perusahaan	0,61	0,61	0,60	0,61	0,61	0,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,25	1,24	1,25	1,25	1,25	1,27
P	Jasa Pendidikan	1,17	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	1,13	1,14	1,15	1,15	1,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,10	2,06	2,08	2,08	2,08	2,08
	Produk Domestik Regional Bruto	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : Data PDRB Kota Payakumbuh menurut lapangan usaha Tahun 2015-2019
*) Angka diolah

Selama kurun waktu tahun 2015-2019, terlihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada sektor basis di Kota Payakumbuh. Dari nilai rata-rata LQ terlihat bahwa sektor yang menjadi basis dan menjadi sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai LQ>1 yaitu sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai LQ rata-rata 2,93; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai LQ rata-rata = 2,77, sub sektor konstruksi dengan nilai LQ rata-rata = 1,47, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai LQ rata-rata = 1,55; sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai LQ rata-rata 1,12; sektor jasa keuangan dan asuransi dengan nilai LQ rata-rata = 2,23; sektor real estat dengan nilai LQ rata-rata = 1,50; Jasa Pendidikan dengan nilai LQ rata-rata = 1,18; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai LQ rata-rata = 1,15; serta sektor jasa lainnya yang memiliki LQ = 2,08. Angka koefisien ini memperlihatkan bahwa sektor tersebut mempunyai keunggulan komparatif yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama secara rata-rata di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan merupakan sektor basis di Kota Payakumbuh.

Tabel II-10
Hasil Analisis Tipologi Klassen Sektor (Lapangan Usaha) Kota Payakumbuh

No	Sektor / Lapangan Usaha	Daerah Analisis (Payakumbuh)		Daerah Acuan (Sumbar)		Kuadran
		Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,95	7,35	4,13	24,44	4
2	Pertambangan dan Penggalian	5,78	0,59	5,12	4,48	3
3	Industri Pengolahan	4,79	6,14	4,66	11,37	3
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,01	0,06	5,54	0,10	4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,55	0,38	4,62	0,10	2
6	Konstruksi	8,04	12,14	8,42	8,46	2
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,71	23,48	6,43	15,33	1

No	Sektor / Lapangan Usaha	Daerah Analisis (Payakumbuh)		Daerah Acuan (Sumbar)		Kuadran
		Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)	
8	Transportasi dan Pergudangan	6,47	13,71	8,01	11,03	2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,37	2,35	6,12	1,00	1
10	Informasi dan Komunikasi	10,64	8,19	9,75	6,08	1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,13	6,36	6,04	3,03	1
12	Real Estate	5,50	2,94	5,24	1,97	1
13	Jasa Perusahaan	6,50	0,28	6,60	0,44	4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan &Jaminan Sosial Wajib	2,33	7,49	2,14	5,93	1
15	Jasa Pendidikan	7,19	3,81	8,40	3,44	2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,73	1,51	8,39	1,28	2
17	Jasa lainnya	5,97	3,23	6,52	1,54	2

Sumber : PDRB Kota Payakumbuh menurut lapangan usaha Tahun 2015-2019, Data Diolah

Berdasarkan tabel II-10 dan diagram II-1, maka dapat diinformasikan bahwa sektor perdagangan dan pariwisata merupakan sektor basis, sektor industri pengolahan sebagai sektor potensial. Sektor pertanian bukan merupakan sektor basis, tetapi berpotensi dikembangkan untuk mendukung sektor hilir dalam rangka peningkatan nilai tambah pada pembangunan ke depan.

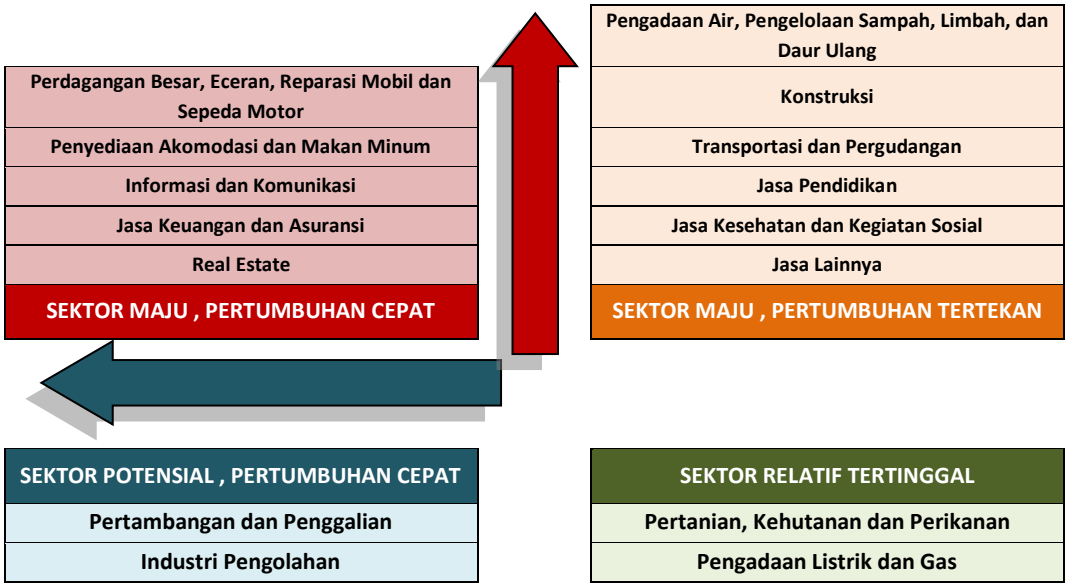
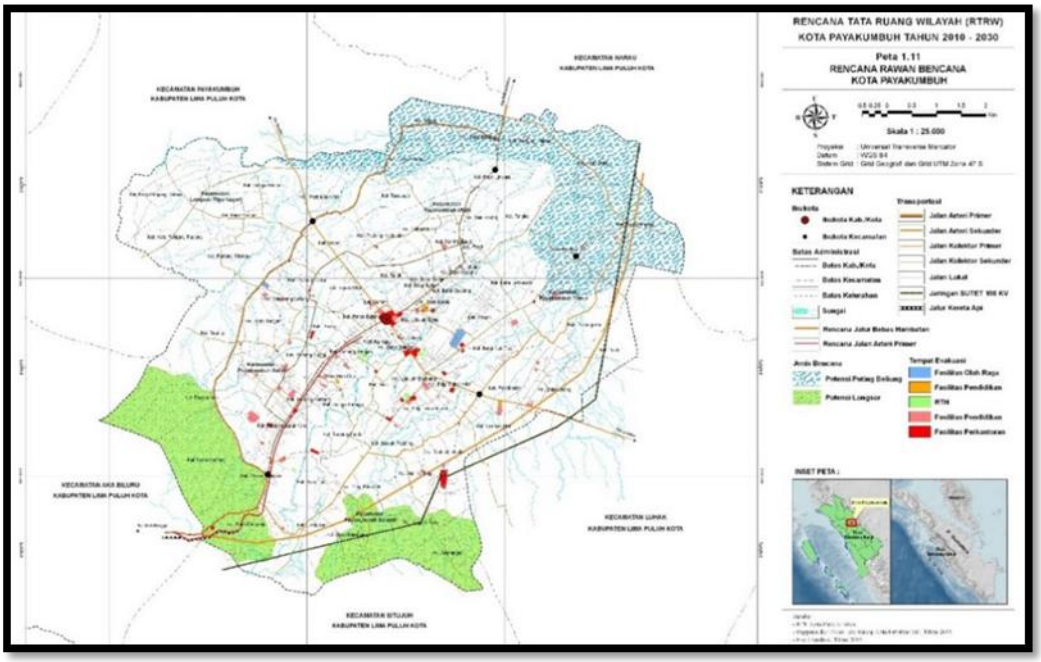


Diagram II-1
Kuadran Tipologi Klassen
Sumber: Data Diolah

2.2.3 Wilayah Rawan Bencana

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat yang terletak di zona patahan, Kota Payakumbuh relatif aman dari ancaman bencana alam gempa bumi, tanah longsor, banjir dan letusan gunung api. Namun ancaman bencana alam yang perlu mendapatkan perhatian adalah angin puting beliung.



Gambar II - 5
Peta Rencana Rawan Bencana Kota Payakumbuh
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Kejadian bencana alam ataupun bencana sosial mengakibatkan penurunan pada daya dukung wilayah, dikarenakan adanya sumber daya yang rusak akibat bencana. Potensi bencana alam untuk Kota Payakumbuh dapat dikelompokkan menjadi dua; tanah longsor pada beberapa kelurahan di kecamatan Payakumbuh Selatan, dan potensi angin puting beliung pada bagian luar kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara. Dengan mengetahui potensi bencana daerah, peruntukan fungsi ruang dapat dikendalikan dan juga dapat meminimalkan resiko sosial yang muncul apabila bencana terjadi. Wilayah berpotensi rawan bencana (Gambar II-5) menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi padat karya dan padat karsa, seperti: pemukiman, perdagangan, pendidikan dsb.

2.2.4 Demografi

Perencanaan Kota Payakumbuh merupakan perencanaan yang dimulai dari pemahaman untuk membangun manusia seutuhnya. Pola pendekatan ini mengevaluasi kebutuhan penduduk dari sisi kualitas dan kuantitas penduduk. Dari sisi kualitas dipahami perencanaan penduduk sebagai upaya meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia, sedangkan dari sisi kuantitas diperhatikan melalui pola kependudukan itu sendiri. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan tidak diikuti oleh pertambahan daya dukung baik dari lahan maupun sumber daya, menjadi salah satu pertimbangan bahwa pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan subjek dan objek dari pembangunan yaitu manusia. Dengan mengetahui kondisi penduduk suatu wilayah secara menyeluruh maka selanjutnya dapat diperkirakan tingkat kebutuhan dan kepentingan penduduk yang harus dipenuhi berdasarkan potensi-potensi yang ada baik untuk saat ini maupun kedepannya.

2.2.4.1 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Dari lima lokasi kecamatan tempat penyebaran penduduk Kota Payakumbuh, maka kecamatan Payakumbuh Barat adalah kecamatan yang paling padat penduduknya dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya. Walaupun Kecamatan Payakumbuh Timur adalah kecamatan yang paling luas wilayahnya, namun justru penduduknya tidak sebanyak

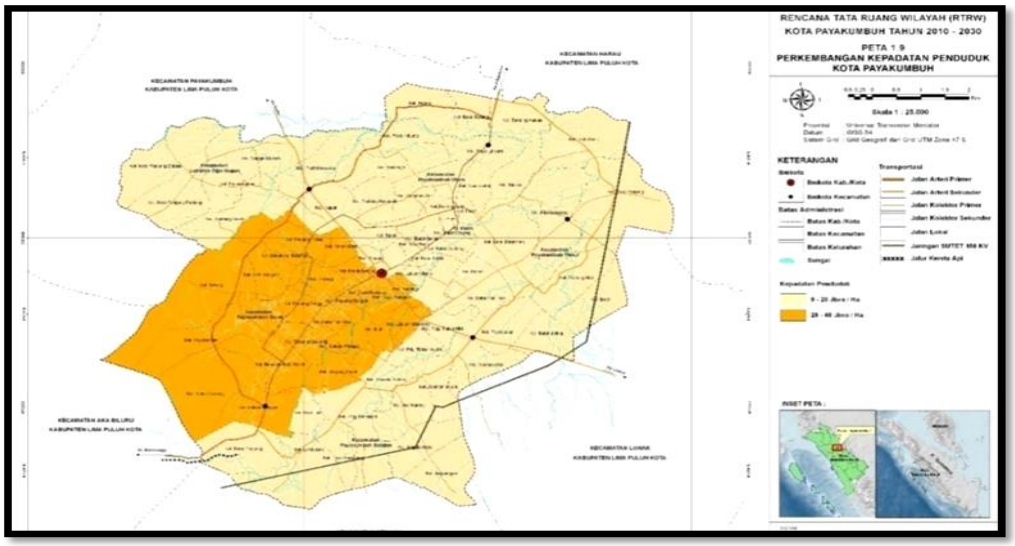
Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Utara. Ini disebabkan dominasi wilayah pertanian di kecamatan ini, sedangkan Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Utara merupakan pusat perdagangan dan jasa serta merupakan *Central Business District*nya Kota Payakumbuh**.**

Tabel II-11
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Luas	2015		2016		2017		2018		2019	
			Jumlah	Density	Jumlah	Density	Jumlah	Density	Jumlah	Density	Jumlah	Density
1.	Payakumbuh Barat	19,06	49.450	2.594	50.033	2.562	51.435	2.699	52.449	2.754	53.266	2.792
2.	Payakumbuh Timur	22,73	27.634	1.216	28.370	1.230	28.253	1.234	28.274	1.244	28.477	1.253
3.	Payakumbuh Utara	14,53	30.679	2.112	30.797	2.120	31.359	2.158	31.883	2.194	32.269	2.221
4.	Payakumbuh Selatan	14,69	10.453	712	10.752	732	10.775	734	11.032	750	11.406	810
5.	Lamposi Tigo Nagori	9,42	9.610	1.020	9.855	1.037	9.997	1.061	10.015	1.063	10.155	1.078
	Total	80,43	127.826	1.589	129.807	1.614	131.819	1.639	133.703	1.662	135.573	1.686

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh struktur ruang kota, dimana pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi kota berada pada Kecamatan Payakumbuh Barat, dan Payakumbuh Utara. Di samping itu bentang alam kecamatan juga mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih lingkungan perumahannya, sebagai contoh luas daerah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak terlalu berbeda, tetapi karena Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih didominasi perbukitan, sehingga kecamatan Payakumbuh Utara lebih padat dibanding Kecamatan Payakumbuh Selatan.



Gambar II-6
Peta Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Payakumbuh
Sumber **:** Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 - 2030

2.2.4.2 Struktur dan Karakteristik Penduduk

1. Struktur Penduduk Berdasarkan Umur

Klasifikasi penduduk berdasarkan umur berguna untuk memperlihatkan karakteristik penduduk suatu daerah, dan juga untuk menunjukkan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) antara penduduk produktif (15-64 tahun) dengan penduduk non produktif (0-14 tahun dan diatas 65 tahun). Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data

pada tabel II-8, didapatkan *dependency ratio* atau rasio ketergantungan penduduk di Kota Payakumbuh (tabel II-12).

Tabel II-12
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015-2019

No	Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019
1.	0-4	13.936	13.914	13 898	13.858	13.825
2.	5 -9	12.598	12.777	12.927	13.041	13.126
3.	10 -14	11.374	11.548	11.730	11.912	12.104
4.	15-19	11.370	11.487	11.598	11.646	11.771
5.	20-24	9.213	9.334	9.481	9.598	9.775
6.	25-29	10.477	10.507	10.549	10.549	10.589
7.	30-34	9.992	10.181	10.350	10.535	10.705
8.	35-39	9.396	9.455	9.529	9.601	9.692
9.	40-44	8.631	8.832	9.016	9.185	9.276
10.	45-49	7.478	7.654	7.846	8.034	8.226
11.	50-54	6.767	6.875	6.997	7.128	7.269
12.	55-59	5.584	5.754	5.886	5.994	6.087
13.	60-64	3.897	4.139	4.382	4.631	4.412
14.	65+	7.113	7.350	7.630	7.991	8.316
	Jumlah	**127.826**	**129.807**	**131 819**	**133.703**	**135.573**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020

Selanjutnya jika ditampilkan dalam bentuk piramida, gambaran struktur penduduk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Diagram berikut yang berkaitan erat dengan analisis tingkat ketergantungan pada struktur penduduk di Kota Payakumbuh.

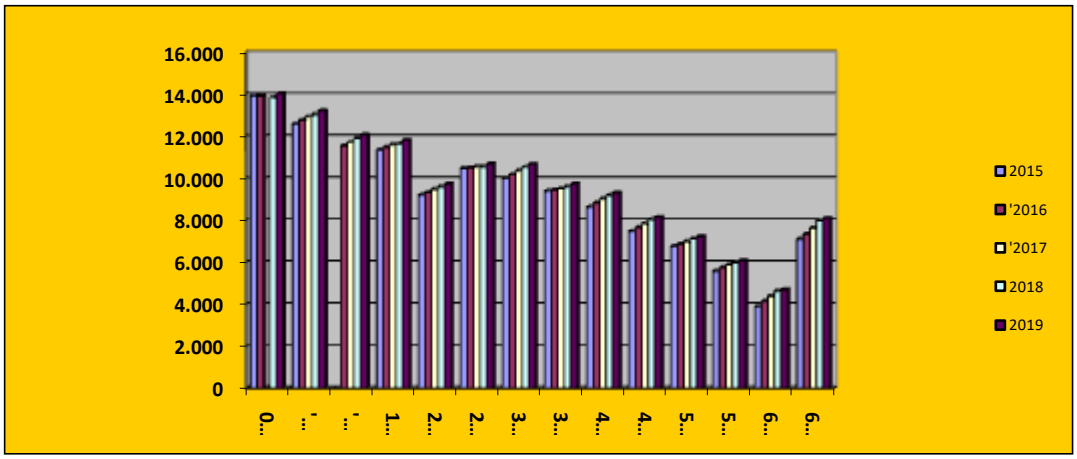


Diagram II-2
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019
Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020

Tabel II-13
Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk

No	Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelompok Umur Produktif	82.805	84.218	85.634	86.901	88.202
2	Kelompok Umur Non-Produktif	45.021	45.589	46.185	46.802	47.371
P3	Rasio Beban Tanggungan (%)	54,37	54,13	53,93	53,86	53,71

Sumber : Statistik Kesra Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019, Data Diolah.

Rasio ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai beban tanggungan menjadi lebih baik. Jika dilihat dari tabel di atas, selama periode tahun 2015-2019 terjadi penurunan beban ketergantungan dari 54,37 menjadi 53,71. Untuk lebih jelasnya digambarkan melalui grafik di bawah ini.

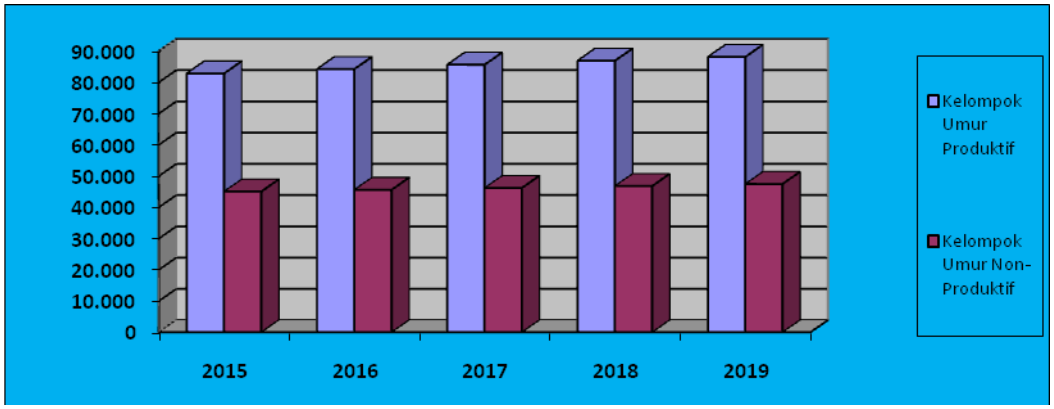


Diagram II-3
Beban Ketergantungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019
Sumber : Statistik Kesra Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019, Data Diolah

Hal ini menggambarkan bahwa setiap 100 orang penduduk kelompok produktif harus menanggung 54,37 (~55 orang) dari kelompok tidak produktif pada tahun 2015 dan menurun menjadi 53,71 pada tahun 2019. Rasio ketergantungan penduduk dengan rentang nilai 51-69 diklasifikasikan sebagai sebagai pola ketergantungan sedang. Disamping itu, memperhatikan jumlah penduduk per-kelompok umur, dapat digolongkan bahwa penduduk kota Payakumbuh bercirikan ekspansif. Tipe penduduk ini dicirikan melalui tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, hal ini berarti bahwa kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah meningkat setiap tahunnya.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan sex ratio (rasio jenis kelamin) di Kota Payakumbuh adalah 0,99 untuk laki-laki terhadap perempuan, yang dipahami bahwa 100 orang perempuan, sebanding dengan 99 orang penduduk laki–laki.

Tabel II-14
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	2015		2016		2017		2018		2019	
		LK	Pr	LK	Pr	LK	Pr	LK	Pr	LK	Pr
1.	Payakumbuh Barat	24.566	24.884	25.035	25.270	25.562	25.873	26.116	26.383	26.515	26.751
2.	Payakumbuh Timur	13.728	13.906	13.895	14.122	14.041	14.212	14.065	14.209	14.175	14.302
3.	Payakumbuh Utara	15.241	15.438	15.449	15.677	15.585	15.744	15.861	16.022	16.063	16.206
4.	Payakumbuh Selatan	5.193	5.260	5.273	5.342	5.355	5.420	5.488	5.544	5.678	5.728
5.	Lamposi Tigo Nagori	4.774	4.836	4.848	4.911	4.968	5.029	4.982	5.033	5.055	5.100
	Total	63.502	64.324	64.486	65.321	63.502	64.324	66.512	67.191	67.443	68.130

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020

3. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Pada tahun 2019, jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Payakumbuh diproyeksikan adalah 65.892 jiwa, dimana 63.182 jiwa dikategorikan sebagai penduduk sudah bekerja atau 95,89% dari penduduk angkatan kerja sudah mempunyai pekerjaan. Berdasarkan tabel II-12, sektor perdagangan masih merupakan sektor favorit yang terlihat

dari meningkatnya serapan tenaga kerja pada sektor ini. Untuk tahun 2019 sektor perdagangan menyerap 41,05% dari jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut, yang melebihi sepertiga dari angkatan kerja aktif. Untuk sektor lainnya juga terdapat peningkatan dalam serapan tenaga kerja, yang diiringi dengan penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Tabel II-15
Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuhan, Perikanan	8.380	7.387	7.641	8.881	6.290
2.	Industri Pengolahan	6.725	7.428	8.598	7.687	13.682
3.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	21.397	22.845	26.091	27.633	43.210
4.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	13.246	13.890	14.082	11.143	-
5.	Lainnya	8.814	9.044	8.200	9.201	-
Jumlah yang Bekerja		**58.562**	**60.594**	**64.612**	**64.545**	**63.182**
Jumlah yang Mencari Pekerjaan		**4.455**	**4.662**	**4.844**	**2.538**	**2.710**
Total		**63.017**	**65.256**	**69.456**	**67.083**	**65.892**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020

4. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh berguna untuk menunjukkan kebutuhan terhadap kuantitas pendidikan yang berkualitas. Data pada tabel II-13 menjadi dasar bagi pemerintah untuk menghitung jumlah guru, sekolah dan sarana pendidikan lainnya yang berguna untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing.

Tabel II-16
Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)	2015	2016	2017	2018	2019
1.	TK	5-6	5.692	5.264	5.294	5.371	5.347
2.	SD	7-12	15.756	14.477	13.867	14.853	15.097
3.	SLTP	13-15	7.403	6.933	6.924	7.118	7.205
4.	SLTA	16-18	7.475	6.991	6.943	7.105	7.150
Total			**33.215**	**33.665**	**33.028**	**34.447**	**34.779**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020

2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pokok pembangunan Kota Payakumbuh.Pada kenyataannya, selama kurun waktu perencanaan sudah menunjukkan perkembangan dan peningkatan yang sangat baik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam Perubahan RPJMD ini, aspek kesejahteraan masyarakat ini meliputi indikator-indikator makro yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB Perkapita, Koefisien Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup. Namun, banyaknya kemajuan yang telah dicapai, tetap masih menyisakan banyak tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hasil-hasil pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat yang sudah dicapai selama ini diuraikan dalam indikator-indikator sebagai berikut :

2.3.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi dikurangi dengan biaya antara. Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, serta keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. PDRB mengukur seluruh transaksi ekonomi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat dari daerah lain (*non-residen*). Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu pada tahun dasar.

Gambaran perkembangan PDRB Kota Payakumbuh selama kurun waktu tahun 2015-2019 menurut nilai dan kontribusi masing-masing lapangan usaha dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) disajikan pada tabel berikut. Untuk analisa PDRB ini, masih menggunakan angka proyeksi/perkiraan untuk tahun 2019, karena data PDRB tahun 2019 belum release oleh BPS. Perkembangan nilai PDRB kota Payakumbuh dari Tahun 2015-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tiga sektor utama yang mendominasi dalam pembentukan PDRB Kota Payakumbuh ADHB dan ADHK periode 2015-2019 adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sektor Konstruksi, serta sektor Transportasi dan Pergudangan. Pada tahun 2019 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 24,29% terhadap PDRB, Sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 14,18% terhadap nilai PDRB dan sektor Transportasi dan Pergudangan berkontribusi sebesar 12,67%. Kondisi yang sama juga terlihat berdasarkan perhitungan PDRB dengan menggunakan harga Konstan. Sehingga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang ketiga sektor ini masih memiliki peluang untuk dikembangkan dan menjadi sektor utama pengungkit pertumbuhan ekonomi disamping sektor-sektor lainnya.

Terlihat bahwa terjadi penurunan laju pertumbuhan PDRB ADHK pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan produksi. Akan tetapi tahun 2017 kembali mangalami kenaikan dan tahun 2018 juga terjadi penurunan diperkirakan dan diproyeksikan pada tahun 2019 akan kembali turun dibandingkan dengan tahun 2018 karena melihat dari tren yang terjadi duan tahun berturut-turut.

Tabel II-17
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	355.806,48	7,69	374.141,62	7,39	397.080,33	6,95	413.931,42	6,74	433.766,45	6,35
2	Pertambangan & penggalian	30.787,92	0,68	31.985,70	0,64	32.991,64	0,57	34.498,78	0,54	35.570,90	0,52
3	Industri Pengolahan	255.975,87	5,61	291.224,66	5,64	296.555,53	5,35	314.900,96	5,12	327.452,44	4,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.801,96	0,06	3.241,90	0,07	3.626,45	0,07	3.922,55	0,06	4.380,00	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.099,95	0,29	13.913,12	0,28	14.552,17	0,26	15.109,51	0,25	16.541,59	0,24
6	Konstruksi	612.633,13	13,21	693.984,24	13,08	761.083,28	13,64	832.979,20	14,00	939.929,46	13,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.113.984,91	23,73	1.240.827,06	23,92	1.380.679,29	24,03	1.543.290,31	24,25	1.716.042,44	25,13

No	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
8	Transportasi dan Pergudangan	608.975,29	13,40	667.333,32	13,01	706.098,33	12,68	766.742,17	12,74	861.387,14	12,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	131.809,17	2,83	160.507,84	3,16	176.721,35	3,12	198.504,76	3,24	228.069,39	3,34
10	Informasi dan Komunikasi	311.678,29	6,42	363.993,10	6,50	403.003,24	7,30	449.097,30	7,50	516.224,82	7,56
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	306.272,79	6,70	343.267,50	6,82	354.380,96	6,25	366.749,62	5,95	390.511,00	5,72
12	Real Estat	140.787,16	2,99	156.452,10	2,92	164.408,64	2,91	173.380,72	2,81	191.572,00	2,81
13	Jasa Perusahaan	12.352,46	0,27	13.512,00	0,27	14.436,60	0,26	15.271,11	0,25	16.719,91	0,24
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329.839,82	7,01	363.685,30	6,96	400.759,97	6,95	422.590,49	6,87	477.806,83	7,00
15	Jasa Pendidikan	201.876,63	4,22	233.407,50	4,38	254.316,70	4,68	277.385,68	4,66	316.858,00	4,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68.721,54	1,51	73.725,20	1,48	80.834,62	1,46	87.632,93	1,47	100.267,00	1,47
17	Jasa Lainnya	157.572,19	3,38	177.918,20	3,47	198.155,34	3,51	220.258,83	3,55	255.460,00	3,74
	Total	4.654.975,54	**100,00**	5.203.120,37	**100,00**	5.639.684,44	**100,00**	6.136.246,34	**100,00**	6 828.559,37	**100,00**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2016-2020

Tabel II-18
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	251.460,28	7,64	257.764,45	7,19	270.119,71	7,04	270.834,61	6,39	270.310,00	6,02
2	Pertambangan & penggalian	20.393,76	0,66	21.139,40	0,61	21.559,51	0,58	22.342,67	0,53	22.380,83	0,50
3	Industri Pengolahan	209.923,38	5,5	225.115,13	5,6	226.461,78	5,26	236.741,96	5,58	243.473,77	5,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.248,47	0,06	2.487,24	0,06	2.586,74	0,07	2.691,94	0,06	2.757,49	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.021,73	0,28	13.192,07	0,27	13.616,81	0,26	13.791,64	0,33	14.121,37	0,31
6	Konstruksi	445.405,73	13,16	479.091,84	13,34	518.832,53	13,64	557.193,94	13,14	595.425,89	13,26
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	830.764,74	23,93	871.203,20	23,85	931.200,49	24,03	997.376,10	23,52	1.064.425,82	23,70
8	Transportasi dan Pergudangan	491.293,17	13,08	515.593,50	12,83	538.277,24	12,68	574.575,84	13,55	611.394,72	13,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	86.525,90	2,83	98.080,30	3,08	106.204,79	3,12	115.108,13	2,71	124.379,16	2,77
10	Informasi dan Komunikasi	305.455,47	6,7	335.794,90	7	366.799,99	7,3	399.107,51	9,41	436.269,52	9,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	223.630,45	6,58	241.635,50	6,6	247.383,34	6,25	249.665,63	5,89	254.189,67	5,66
12	Real Estat	103.260,47	3,02	108.004,00	3,01	112.157,10	2,91	116.639,26	2,75	122.844,50	2,74
13	Jasa Perusahaan	9.789,41	0,27	10.320,30	0,26	10.907,55	0,26	11.348,74	0,27	11.864,84	0,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	251.484,57	7,09	259.887,90	6,99	275.750,18	6,95	288.689,29	6,81	302.621,59	6,74
15	Jasa Pendidikan	137.594,27	4,34	148.621,70	4,49	159.690,91	4,68	172.286,69	4,06	186.495,55	4,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54.157,01	1,48	56.660,70	1,42	61.266,96	1,46	65.692,78	1,55	70.640,69	1,57
17	Jasa Lainnya	114.818,63	3,38	122.878,30	3,4	135.127,27	3,51	145.685,73	3,44	157.242,32	3,50
	Total	3.551.227,44	100,00	3.767.470,43	100,00	3.997.942,90	100,00	4.239.772,47	100,00	4.490.837,76	100,00

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2016-2020

Tabel II-19
Laju Pertumbuhan Per-Sektor PDRB ADHK Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
		%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,24	2.51	4,79	0,26	-0,19
2	Pertambangan & penggalian	4,61	3,66	2,96	3,63	0,17
3	Industri Pengolahan	1,98	7,24	0,60	4,54	2,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,78	10.62	3,91	4,07	2,44
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,15	1,31	3,22	1,28	2,39
6	Konstruksi	9,16	7,56	8,30	7,39	6,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,15	4,81	6,89	7,10	6,72
8	Transportasi dan Pergudangan	8,15	4,95	4,40	6,75	6,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	8,40	13.35	8,59	8,08	8,05
10	Informasi dan Komunikasi	9,88	9,93	9,11	8,93	9,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,94	8,05	2,38	0,92	1,81
12	Real Estat	5,49	4,59	3,85	4,00	5,32
13	Jasa Perusahaan	5,92	5,42	5,69	4,04	4,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,45	3,34	6,10	4,69	4,83
15	Jasa Pendidikan	8,69	8,01	7,45	7,89	8,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,48	4,62	8,13	7,22	7,53
17	Jasa Lainnya	6,86	7,02	9,97	7,81	7,93
Total		**6,19**	**6,09**	**6,12**	**6,02**	**5,92**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2016-2020

2.3.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakansuatu kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam kurun waktu yang terus-menerus (kontinu) disebabkan karena ketidakseimbangan arus uang dan barangsesuai dengan mekanisme pasar, yaitu oleh faktor permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang yang beredar di pasaran. Berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga secara menyeluruh antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi Kota Payakumbuh pada tahun 2015-2019 mengacu pada angka inflasi ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu kota Padang.

Tabel II-20
Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2015-2019

Tahun	Payakumbuh	Sumbar	Indonesia
2015	1,08	1,08	3,35
2016	4,17	4,89	3,02
2017	2,11	2,03	3,61
2018	2,55	2,60	3,31
2019	1,72	1,67	3,02
Rata-rata	**2,33**	**2,45**	**3,26**

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa angka inflasi Kota Payakumbuh selama periode 2015-2019 cenderung sama dengan Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, dibandingkan dengan angka inflasi nasional, laju inflasi Kota Payakumbuh secara rata-rata lebih rendah dari nasional. Berdasarkan informasi dari tabel tersebut terlihat bahwa setelah tahun 2015 laju inflasi mengalami penurunan yang signifikan dan cenderung stabil pada angka rata-rata 2,5%. Pada tahun 2019 tingkat inflasi daerah mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1,72% dibanding tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh Pasokan produksi yang memadai dengan permintaan pasar dan nilai tukar rupiah yang cenderung stabil sepanjang tahun 2019.

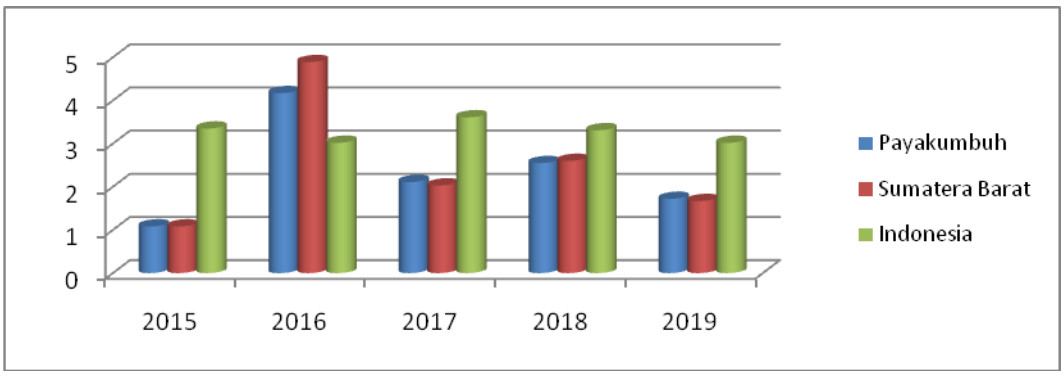


Diagram II-4
Perbandingan Angka Inflasi Nasional, Provinsi dan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019
Sumber : BPS (data diolah) Tahun 2020

Terlihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir angka inflasi Kota Payakumbuh dan Sumatera Barat jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.

2.3.3 PDRB per-Kapita

PDRB per-kapita merupakan perbandingan angka PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah, hal ini juga menunjukan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat

Tabel II-21
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019 (2000 = 100)

No	Tahun	PDRB (juta rupiah)		Jumlah penduduk	PDRB per kapita (juta rupiah)	
		ADHB	ADHK		ADHB	ADHK
1	2015	4.654,98	3.551,23	127,826	36,42	27.78
2	2016	5.203,12	3.767,27	129,807	40,08	29,02
3	2017	5.639,68	3.997,85	131.819	42,78	30,33
4	2018	6.136,25	4.239,77	133.703	45,89	31,71
5	2019	6.828,56	4.490,84	135.573	50,37	33,12

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020

Sesuai tabel diatas, pada tahun 2019 PDRB per-kapita Kota Payakumbuh berdasarkan ADHB sebesar 50,37 juta rupiah meningkat sebesar 9,76%, dibanding tahun 2018, Sedangkan untuk PDRB ADHK Perkapita tahun 2019 adalah sebessar 33,12 juta rupiah atau naik sebesar 3,29% dibanding tahun 2018. Berdasarkan tabel di atas, PDRB per-kapita Kota Payakumbuh setiap tahunnya meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

2.3.4 Indeks Gini Ratio

Indeks Gini Ratio (*Rasio Gini*) merupakan salah satu ukuran umum untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi pada suatu wilayah. Indeks Gini memiliki kisaran nilai antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

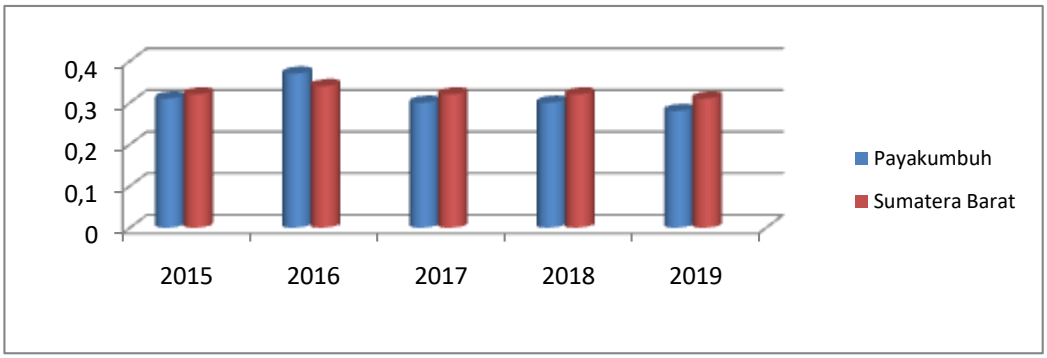


Diagram II-5
Perbandingan Gini Ratio Kota Payakumbuh dengan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2019
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2020

Pada tahun 2015, tingkat ketimpangan pendapatan di kota Payakumbuh relatif rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 0,31. Sedangkan untuk tahun 2016, Indeks Gini Kota Payakumbuh meningkat menjadi 0,37. Hal ini dipahami bahwa terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin dengan tidak miskin. Sedangkan pada tahun 2019, tingkat ketimpangan menurun menjadi 0,28, di bawah angka Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,31. Walaupun ini masih berada pada batas bawah tingkat ketimpangan sedang, namun selama kurun waktu dari 2016-2019, terjadi tren penurunan tingkat ketimpangan di Kota Payakumbuh. Kondisi tersebut menandakan bahwa Pemerintah berhasil meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.

2.3.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian pembangunan daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tabel II-22
Capaian Indikator HDI Kota PayakumbuhTahun 2015-2019

No	Indikator HDI	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pendidikan					
	▪ Harapan Lama Sekolah	14,21	14,22	14,25	14,24	14,25
	▪ Rata-rata lama Sekolah (Thn)	10,29	10,30	10,42	10,50	10,72
2.	Kesehatan					
	▪ Angka Harapan Hidup (Thn)	72,93	73,03	73,23	73,33	73,61
3.	Ekonomi					
	▪ Pengeluaran Riil/ Kapita (Rp/bln)	1.067.170	1.250.424	1.243.171	1.325.403	1.431.848
4.	Human Developmen Index (IPM)	77,42	77,56	77,91	78,23	78,95

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2020

Dari data di atas terlihat bahwa selama rentang waktu 5 tahun terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) dari angka 77,42 pada tahun 2015 menjadi 78,95 pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.6 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan salah satu indikator dalam pembangunan bidang kesehatan, dimana semakin rendah capaian angka persentase balita gizi buruk maka semakin baik kinerja bidang kesehatan di Kota Payakumbuh. Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein (KEP) dalam makanan sehari-hari. Persentase Balita Gizi Buruk dari tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan, yang mengindikasikan program/kegiatan yang dilaksanakan sudah cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran para ibu dari anak balita untuk memperhatikan keadaan gizi anak mereka, sekaligus mencerminkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat kota Payakumbuh. Apabila dibandingkan dengan target pada RPJMD tahun 2017 sebesar <3% maka target ini sudah tercapai.

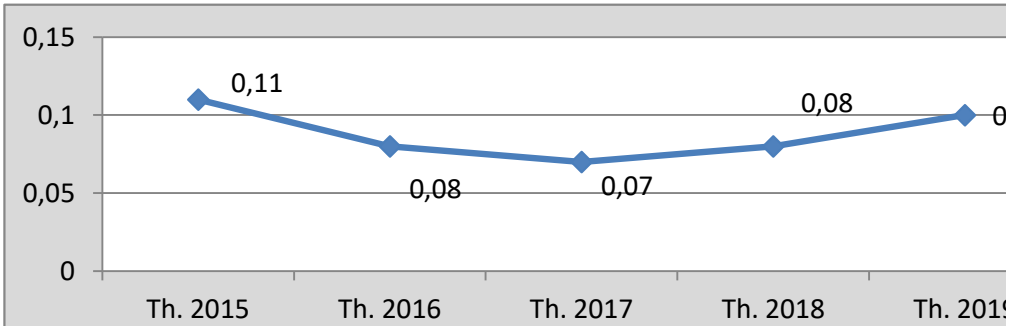


Diagram II-6
Balita Gizi Buruk Kota PayakumbuhTahun 2015-2019

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2020

2.3.7 Tingkat Partisipasi Angka Kerja

Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Untuk tahun 2019 terdapat 65.892 orang angkatan kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota. Angka TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan demografis; diantaranya jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan.

Tabel II-23
Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota PayakumbuhTahun 2015-2019

Kegiatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	**63.017**	**63.017**	**66.919**	**67.083**	**65,892**
Bekerja	58.562	58.562	64.612	64.545	63.182
Penganggur	4.455	4.455	2.307	2.538	2.710
Bukan Angkatan Kerja	**27.205**	**27.205**	**26.780**	**28.083**	**30.919**
Sekolah	7.776	7.776	9.739	11.219	8.708
Mengurus Rumah Tangga	15.019	15.019	13.720	15.030	18.403
Lainnya	4.410	4.410	3.321	1.834	3.808
Penduduk Usia Kerja	**90.222**	**90.222**	**93.699**	**95.166**	**96.811**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,85	69,85	71,42	70,49	68,06
Tingkat Penganggur Terbuka (%)	7,07	7,07	3,45	3,78	4,11
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	92,93	92,93	96,55	96,22	95,89

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2020

Terjadi penurunan angkatan kerja dari tahun 2018 ke tahun 2019, dimana jumlah angkatan kerja tahun 2018 sebanyak 67.083 orang menjadi 65.892 orang pada tahun 2019, ini disebabkan oleh banyaknya siswa tamatan SMA/SMK tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan juga tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan/keahlian yang mumpuni untuk berkompetisi dengan yang lainnya.
Angka bukan angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 28.083 orang menjadi 30.919 orang pada tahun 2019.
Angka pengangguran turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016, dari 7,07% pada tahun 2016 menjadi 3,45% pada tahun 2017 dan meningkat sedikit pada tahun 2018 menjadi 3,78%, akan tetapi tahun 2019 terjadi lagi peningkatan menjadi 4,11%, hal ini disebabkan karena jumlah petumbuhan penduduk usia kerja tidak sebanding dengan penambahan ketersediaan lapangan kerja.

2.3.8 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio Penduduk yang Bekerja atau Tingkat Kesempatan Kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Tingkat Kesempatan Kerja berfluktuasi tergantung dengan naik turunnya jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2019 Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja adalah 95,89, mengalami penurunan dari tahun 2018 yang mencapai 96,22.

Tabel II-24
Rasio Penduduk Bekerja Kota PayakumbuhTahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angkatan Kerja (orang)	63.017	63.017	66.919	67.083	65.892
2.	Penduduk Yang Bekerja (orang)	58.562	58.562	64.612	64.545	63.182
3	Jumlah Pengangguran	4.455	4.455	2.307	2.538	2.270
3.	Rasio	92,93	92,93	96,55	96,22	95,89

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2020

2.3.9 Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

Berbagai kegiatan penangggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh dalam beberapa tahun terakhir sudah memberikan hasil yang baik, dimana setiap tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk penduduk miskin sebesar 8.510 jiwa, tingkat kemiskinan sebesar 6,67%. Sampai tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin menjadi 7.680 jiwa dan tingkat kemiskinan sebesar 5,68%.

Tabel II-25
Perkembangan Data Kemiskinan Kota PayakumbuhTahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk	Jiwa	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
2	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	8.510	8.350	7.720	7.690	7.680
3	Jumlah KK Miskin	KK	2.300	2.257	2.086	2.084	2.081
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,67	6,46	5,88	5,77	5,68

Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2020

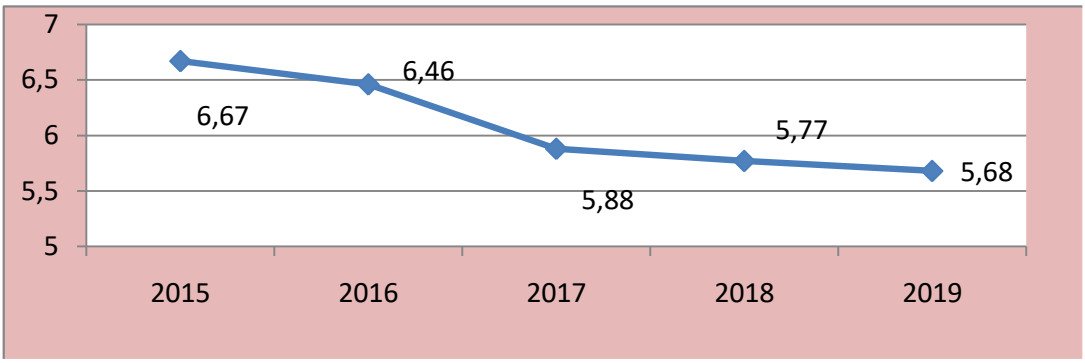


Diagram II-7
Perkembangan Data Kemiskinan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Payakumbuh 2020

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor yang terjadi pada tahun 2015-2019 mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya, walaupun terdapat kenaikan pada tahun 2019 akan tetapi secara umum masih dibawah rata-rata setiap tahunnya. Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Kota Payakumbuh. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja dibidang pertanian masih rendah, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota.

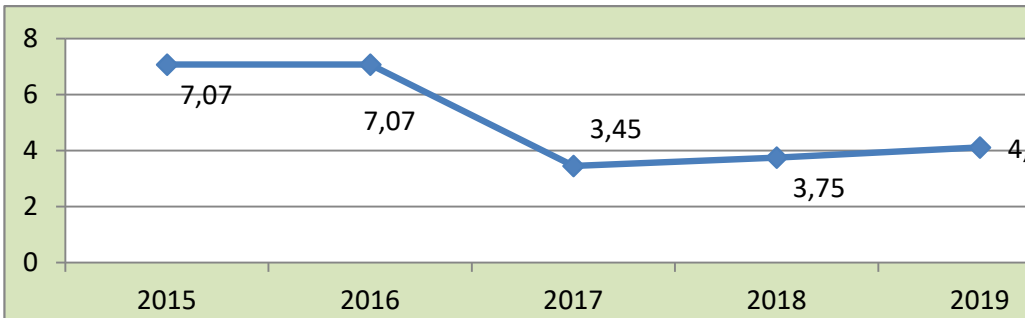


Diagram II-8
Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Payakumbuh 2020

Untuk tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Payakumbuh sedikit mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,11% dari 3,75% pada tahun 2018. Ini berarti bahwa dalam 100 orang pencari kerja yang tergolong angkatan kerja terdapat sekitar 4-5 orang yang sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha atau tidak bekerja.

Walaupun tingkat pengangguran relatif rendah, namun Pemerintah Kota Payakumbuh mulai tahun 2019 ini, telah memformulasi kebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguran yang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu peningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing angkatan kerja perlu terus dipacu agar menghasilkan tenaga kerja yang handal, terlatih dan siap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah-tengah masyarakat.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjadi salah satu orientasi pembangunan Kota Payakumbuh. Pembahasan terhadap aspek ini meliputi hasil pembangunan dilihat dari masing-masing urusan, yaitu urusan pemerintahan daerah yang mencakup layanan urusan wajib dan urusan pilihan selama kurun waktu tahun 2015-2019.

2.4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

A. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan menjadi soko guru pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Menurut ahli sumber daya manusia, Priyono (2009) dan Elfindri (2014), pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Secara umum dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan kualitas dan tingkat pendidikannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kota Payakumbuh, maka pendidikan selalu dijadikan prioritas pembangunan daerah.

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu upaya memperkenalkan pendidikan sejak dini kepada anak, dan ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sejak dini sebelum jenjang pendidikan dasar.PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel II-26
Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	PAUD Formal	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah TK/RA (Lembaga)	53	53	54	55	56
2.	Jumlah Guru (Orang)	334	317	321	319	325
3.	Jumlah Murid (Orang)	3.090	2.988	3.167	3.110	3.332
4.	Jumlah Rombongan Belajar	198	196	202	206	213

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan terhadap penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan tidak hanya pada daerah itu saja tetapi juga ada partisipasi daerah lain, dimana ada penduduknya yang sekolah pada daerah tersebut. Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar Kota Payakumbuh melebihi 100%. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk usia sekolah berasal dari Kabupaten/Kota lainnya. Penyebab lainnya adalah karena banyak terdapat anak yang sekolah di tingkat pendidikan dasar (SD/SMP/SMA) yang

umurnya diluar tingkatan usia sekolah tersebut. Kedua kondisi itulah yang menyebabkan APK di Kota Payakumbuh diatas 100%.

Tabel II-27
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Tingkat Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI	108,5	113,77	124,20	120,75	122,53
2	SMP/MTs	141	138,23	159,67	160,33	165,51
3	SMA/SMK/MA	159,6	163,87	166,16	187,11	194,87

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang ditamatkan merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah baik negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, dan untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. Untuk Kota Payakumbuh selama periode tahun 2015-2019, nilai APT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

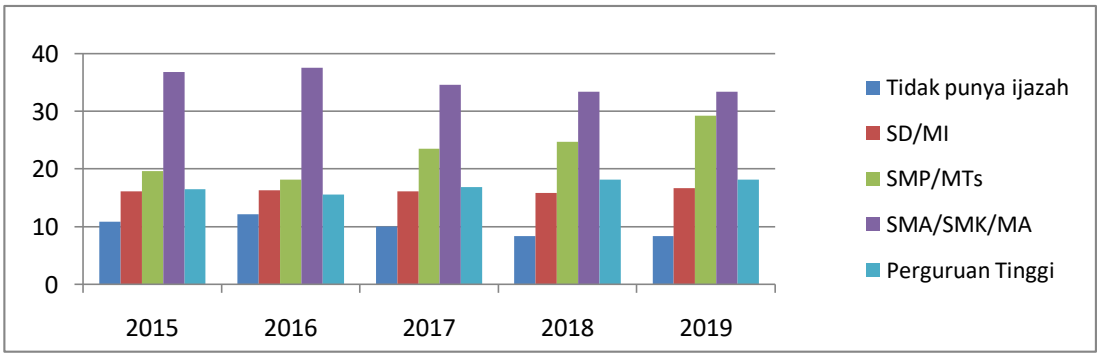


Diagram II-9
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019 (dalam %)
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur terhadap kelompok usia sekolah yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. APM Kota Payakumbuh cenderung naik dari tahun 2015-2019. APM Kota Payakumbuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik tingkat SD, SMP maupun SMA dan sederajat.

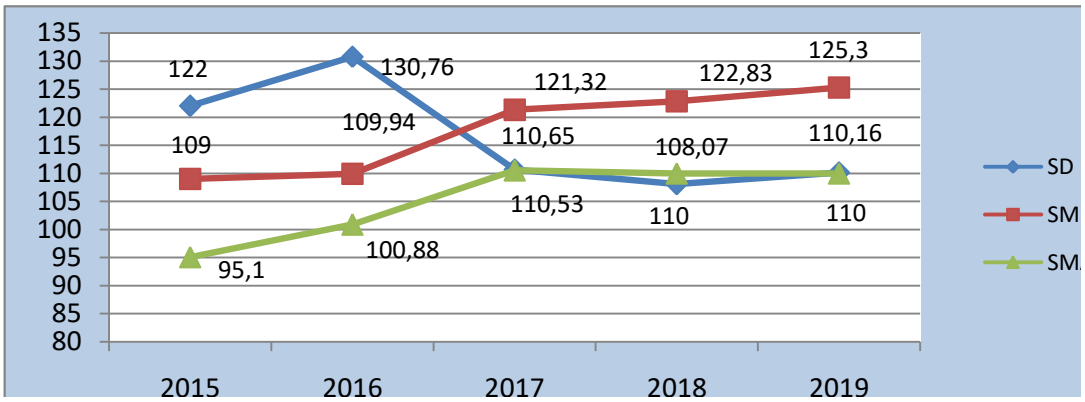


Diagram II-10
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan layanan pendidikan yang berkualitas. APS adalah jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Untuk proyeksi tahun 2019 tingkat APS 7-12 tahun mencapai 125,19, sedangkan APS 13-15 tahun 2019 sudah mencapai 150,50.

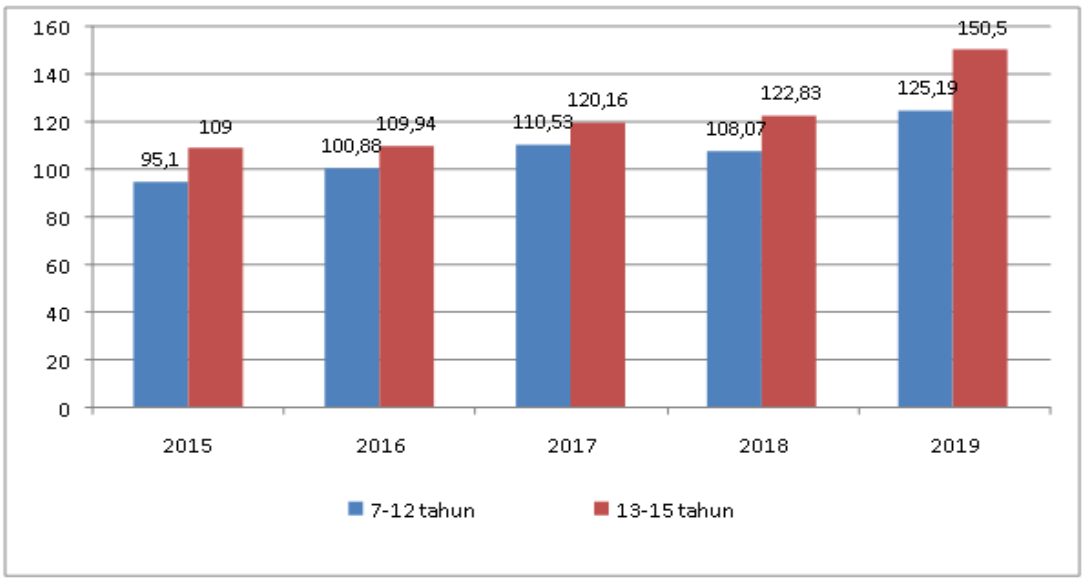


Diagram II-11
Angka Partisipasi Sekolah Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

6. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa untuk setiap tingkatan pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs) yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Indikator angka putus sekolah menggambarkan seberapa besar angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel II-28
Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah Murid SD/MI (Orang)	18.005	17.926	17.908	17.846	17.455
1.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	5	2	19	1	3
1.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,03	0,01	0,11	0,01	0,02
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah Murid SMP/MTs (Orang)	9.964	10.233	10.853	11.167	11.400
2.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	67	20	65	39	57
2.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,67	0,19	0,60	0,35	0,50

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan salah satu indikator pembangunan bidang pendidikan. Semakin tinggi angka kelulusan siswa pada masing-masing jenjang pendidikan, maka semakin baik kinerja capaian bidang pendidikan. Namun demikian, angka kelulusan 100% belumlah merupakan jaminan bahwa kualitas pendidikan semakin baik. Sebab bisa saja tingkat kelulusan 100% tersebut nilainya hanya sekedar lulus dengan standar yang minimum dan belum standar yang memuaskan.

Tabel II-29
Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	**SD/MI**					
1.1.	Peserta UN (Orang)	2.702	2.795	2.741	2.775	2.917
1.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.553	2.795	2.740	2.775	2.915
1.3.	Persentase Lulusan	100	100	99,96	100	99,93
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Peserta UN (Orang)	2.973	3.128	2.993	3.263	3.335
2.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.973	3.128	2.989	3.260	3.326
2.3.	Persentase Lulusan	99,95	100	99,87	99,91	99,73
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1.	Peserta UN (Orang)	3.118	3.514	3.502	3.930	4.144
3.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	3.540	3.513	3.499	3.907	4.140
3.3.	Persentase Lulusan	99,74	99,97	99,91	99,41	99,90

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

8. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah digunakan untuk menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.Disamping ketersediaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah juga ikut mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah.

Tabel II-30
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	79	80	80	80	80
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	15.756	14.477	14.477	12.853	14.246
1.3.	Rasio (%)	0,0050	0.0055	0,0055	0,0062	0,0056
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	23	23	24	23	25
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	7.083	7.403	6.933	6.933	6.972
2.3.	Rasio	0,0032	0,0031	0,0035	0,0033	0.0035
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1.	Jumlah gedung sekolah	23	23	24	24	25
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	7.259	7.475	6.991	6.991	7.042
3.3.	Rasio	0,0032	0,003	0,0034	0,0034	0.0036

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

Tabel II-31
Kondisi Ketersediaan Kelas dan Rombel Tahun 2019

No	Uraian	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs
1	Ruang Kelas						
	a. Kondisi Baik	16	3	492	13	364	69
	b. Kondisi Rusak Ringan	12	8	147	8	34	3
	c. Kondisi Rusak berat	-	-	9	-	11	2
	d. Bukan milik/ sewa	4	-	21	-	7	10
2	Jumlah rombel	177	39	669	11	316	84

Sumber **:** Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

Berdasarkan Tabel II-31, menggambarkan bahwa kondisi pada tahun 2019 ketersediaan ruang kelas dan jumlah rombel secara umum sudah baik, dan ketersediaan ruang kelas sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

9. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru murid adalah perbandingan jumlah guru dibagi jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, jumlah peserta didik yang besar akan mempengaruhi kualitas pengajaran. Oleh karena itu, dengan berkurangnya rasio guru terhadap murid diharapkan dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas. Rasio guru murid setingkat SD/MI tahun 2019 menunjukkan angka 1:15, yang diartikan 1 orang guru mendidik lebih kurang 15 orang murid.

Tabel II-32
Rasio Guru dan Murid Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah Guru	1.050	1.062	1.116	1.116	1.131
1.2.	Jumlah Murid	18.005	17.926	17.908	17.846	17.455
1.3.	Rasio	1 : 17	1 : 17	1:16	1:16	1:15
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah Guru	753	799	782	864	836
2.2.	Jumlah Murid	8.467	10.233	10.853	11.167	11.400
2.3.	Rasio	1:11	1:13	1:14	1:13	1:14

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

Selanjutnya terkait dengan status kepegawaian dari para pengajar dari tingkat TK sampai dengan SLTP sederajat dapat dilihat pada grafik berikut ini,

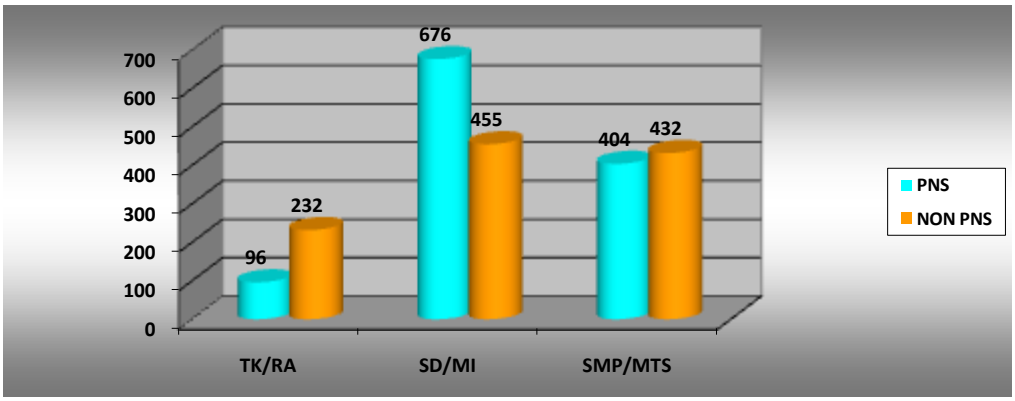


Diagram II-12
Rekapitulasi Guru PNS dan Non-PNS TK/SD/SMP Negeri Kota Payakumbuh
Tahun 2019
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pengajarnya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas guru diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Tabel II-33
Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	**TK/RA**					
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	334	317	321	319	325
1.2.	Guru Berkualifikasi S1/D4 (Orang)	221	221	246	263	274
1.3.	Rasio (%)	66,16	69,72	76,6	82,45	84,31
2	**SD/MI**					
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.050	1.062	1.116	1.116	1.131
2.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	908	957	1.026	1.040	1.067
2.3.	Rasio (%)	86,47	90,11	91,94	93,19	94,34
3	**SLB**					
3.1.	Jumlah Guru (Orang)	115	118	120	115	115
3.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	99	104	110	104	104
3.3.	Rasio (%)	86,08	88,14	91,7	90,43	90,43
4	**SMP/MTs**					
4.1.	Jumlah Guru (Orang)	770	799	782	864	836
4.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	701	712	733	816	806
4.3.	Rasio (%)	91,04	89,11	93,73	94,44	96,41
5	**SMA/MA/SMK**					
5.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.209	1.212	1.243	1.251	1.250
5.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	1.156	1.155	1.209	1.227	1.208
5.3.	Rasio (%)	95,6	95,23	97,26	98,08	96,64

Sumber **:** Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

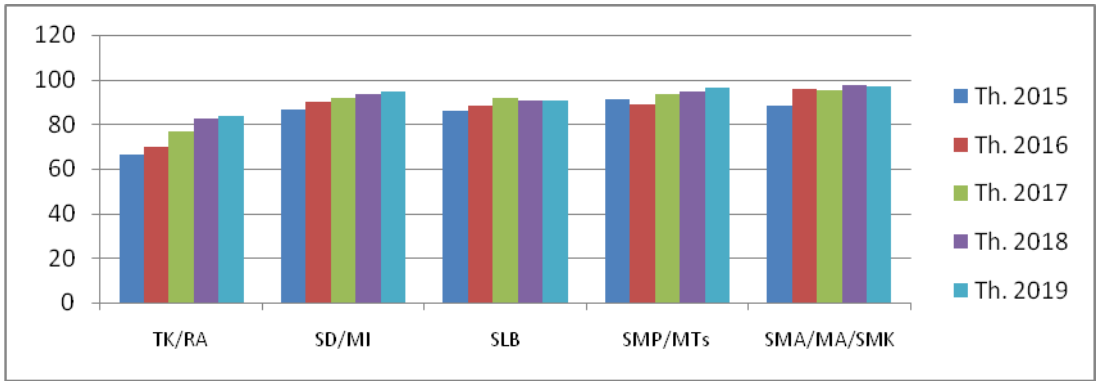


Diagram II-13
Rasio Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015-2019
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

Tabel II-34
Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	**TK/RA**					
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	334	317	321	319	325
1.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	132	126	129	133	143
1.3.	Rasio (%)	39,5	39,75	40,19	41,69	44,00
2	**SD/MI**					
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.050	1.062	1.116	1.116	1.131
2.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	537	540	458	492	528
2.3.	Rasio (%)	51,10	50,85	41,04	44,09	46,68
3	**SMP/MTs**					
3.1.	Jumlah Guru (Orang)	770	799	782	864	836
3.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	414	302	271	293	295
3.3.	Rasio (%)	53,74	37,80	34,65	33,91	35,29
4	**Pengawas Sekolah**					
4.1.	Jumlah Pengawas (Orang)	34	30	19	20	20
4.2.	Pengawas Bersertifikasi (Orang)	34	30	19	20	20
4.3.	Rasio (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

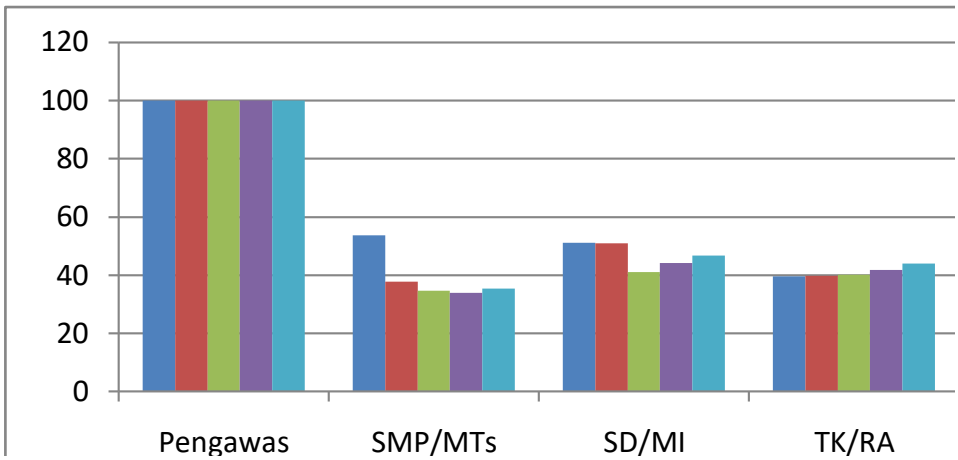


Diagram II-14
Rasio Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015-2019
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

11. Akreditasi Sekolah

Akreditasi merupakan salah satu upaya meningkatkan *kualitas layanan pendidikan*, karena jika rata-rata sekolah telah berakreditasi baik maka diharapkan secara sarana prasarana, kurikulum dan sistim pembelajaran telah berkualitas. Untuk itu, Pemerintah Kota berupaya meningkatkan sekolah yang terakreditasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, Sekolah Dasar yang sudah terakreditasi A mencapai 77,63% dan SMP baru 66,67%. Ke depannya diharapkan seluruh sekolah pada jenjang pendidikan tersebut sudah terakreditasi A.

Tabel II-35
Data Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	**Sekolah Dasar**	**76**	**76**	**76**	**76**	**78**
	Akreditasi A	36	54	54	59	63
	Akreditasi B	15	15	15	17	12
	Akreditasi C	1	1	1	1	1
	Belum Terakreditasi	24	6	6	0	2
	Persen SD terakreditasi A	47,37%	71,05%	71,05%	77,63%	80,77%
2	**SMP**	**15**	**18**	**18**	**17**	**18**
	Akreditasi A	6	10	11	11	12
	Akreditasi B	1	1	1	3	3
	Akreditasi C	1	1	1	1	3
	Belum Terakreditasi	7	6	5	2	-
	Persen SMP terakreditasi A	40%	55,5%	61,11%	64,71%	66,67%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

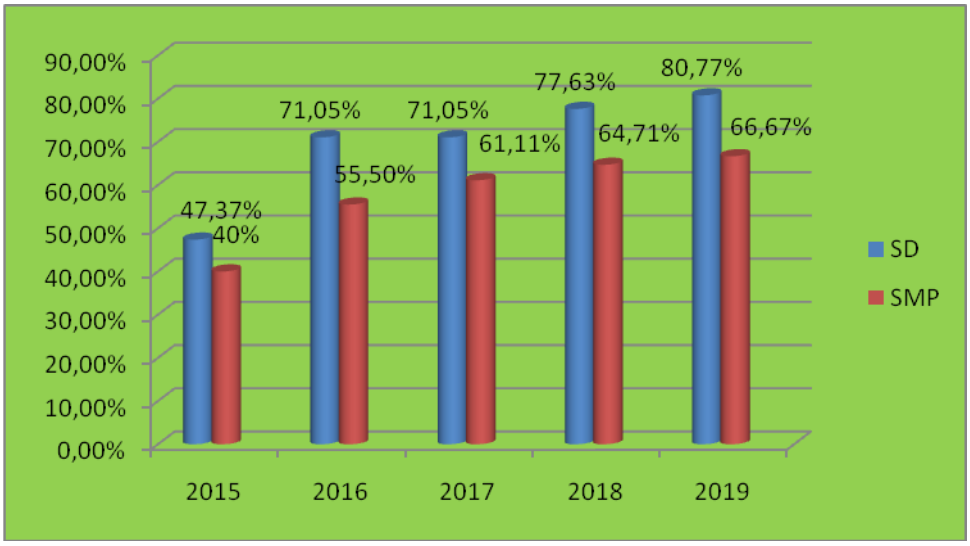


Diagram II-15
Rasio SD dan SMP Terakreditasi-A di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

12.Muatan Pendidikan Karakter

Hal yang juga menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam penentuan sekolah bagi anak-anaknya adalah dalam hal muatan pendidikan karakter disekolah tersebut. Jika di telusuri memang terdapat perbedaan muatan pendidikan karakter yang ada pada sekolah negeri dan swasta tertentu. Hal ini disebabkan kewenangan dan keleluasaan sekolah swasta dalam menyusun muatan kurikulum pendidikannya.

Secara umum, pada sekolah negeri muatan pendidikan karakter dan akhlak mulia/keagamaannya relatif rendah dibanding sekolah swasta tertentu, baik dari segi materi yang diberikan, kuantitas serta metoda pelaksanaan. Hal ini disebabkan kewenangan dan keleluasaan sekolah swasta dalam menyusun materi kurikulum pendidikannya. Berikut perbedaan kurikulum pendidikan karakter sekolah swasta dan negeri pada tabel II-36

Tabel II - 36
Perbandingan Muatan Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia, Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta di Kota Payakumbuh

No	Muatan/Materi	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Keterangan
1	AGAMA			
	- Pendidikan Agama Islam	4 JP/minggu	4 JP/minggu	
	- Tahsin / Tahfilz	-	8 JP/minggu	Sekolah tertentu, (ekskul)
	- Baca/tulis Al Qur'an	2 JP/minggu	2 JP/minggu	
	- Doa harian / hadist	-	2 JP/minggu	
	- Zikir Almatsura	-	1 JP/minggu	
2	PEMBIASAAN KARAKTER/AKHLAK MULIA			
	- Sholat Berjamaah (Zuhur)	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Sholat Berjamaah (Ashar)	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Sholat Duha	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	

No	Muatan/Materi	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Keterangan
	- Adab Islami	NA	Setiap hari	Di pantau guru /teman
	- Puasa Sunnah	-	2 x /bulan	Senin/Kamis
	- Berdoa sebelum/ sesudah belajar	Setiap hari	Setiap hari	
	- Mengucapkan salam keluar/masuk ruangan	NA	Setiap hari	
3	**KEMANDIRIAN / KEPEMIMPINAN**			
	- Out Bond	-	1x/semester	
	- Malam pembinaan Iman & Taqwa	-	1x/semester	
	- Kunjungan edukatif	1x/semester	1x/semester	
	- Kunjungan ke rumah (home visit)	1x/semester	1x/semester	
	- Muhaddaroh	1x/semester	2x/bulan	
	- Market day	-	2x/bulan	
4	**EVALUASI / KONTROL AKHLAK / KARAKTER**			
	- Pengisian buku penghubung /kontrol amalan di rumah/ sekolah	Belum setiap hari	Setiap hari	Di cek oleh guru kelas/walas
	- Kontrol guru	Belum dinilai	Dinilai setiap minggu	Nilai mingguan
	- Kontrol orang tua	Belum Optimal	Dinilai setiap minggu	
	- Kontrol Kepala Sekolah	Belum Optimal	Setiap Bulan	
5	**KEJUJURAN**			
	Kantin Jujur Sehat	Belum Optimal	Setiap hari	Kontrol guru & Kepala sekolah
6	Pramuka	1/Minggu	1/Minggu	Ekskul Wajib
7	Parenting	1/Tahun	1/Bulan	
8	Literasi	2 JP/minggu	2 JP/minggu	Ditambah Ekskul
9	Olah raga	4 JP/minggu	4 JP/minggu	Ditambah Ekskul
10	Seni budaya	4 JP/minggu	4 JP/minggu	Ditambah Ekskul

Sumber **:** Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu indikator kinerja yang digunakan pada urusan pendidikan adalah "persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik". Kategori sekolah dengan pendidikan karakter berketegori baik ini, berdasarkan pada sekolah yang telah melaporkan kegiatan-kegiatan pendidikan karakter ke Dinas Pendidikan melalui rekapitulasi buku penghubung yang ada disekolah. Buku penghubung adalah buku yang melaporkan pelaksanaan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh guru dan siswa berdasarkan instrument yang disusun Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Berikut data sekolah yang melaksanakan Pendidkan Karakter sebagai mana pada tabel II-37

Tabel II - 37
Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Berkategori Baik di Kota PayakumbuhTahun 2019

No	Sekolah	No	Sekolah
A	SD		
1.	SDN 01 Payakumbuh	25.	SDN 36 Payakumbuh
2.	SDN 02 Payakumbuh	26.	SDN 37 Payakumbuh
3.	SDN 03 Payakumbuh	27.	SDN 39 Payakumbuh
4.	SDN 05 Payakumbuh	28.	SDN 40 Payakumbuh

No	Sekolah	No	Sekolah
5.	SDN 06 Payakumbuh	29.	SDN 42 Payakumbuh
6.	SDN 07 Payakumbuh	30.	SDN 43 Payakumbuh
7.	SDN 08 Payakumbuh	31.	SDN 44 Payakumbuh
8.	SDN 10 Payakumbuh	32.	SDN 46 Payakumbuh
9.	SDN 11 Payakumbuh	33.	SDN 49 Payakumbuh
10.	SDN 13 Payakumbuh	34.	SDN 50 Payakumbuh
11.	SDN 14 Payakumbuh	35.	SDN 52 Payakumbuh
12.	SDN 15 Payakumbuh	36.	SDN 53 Payakumbuh
13.	SDN 16 Payakumbuh	37.	SDN 56 Payakumbuh
14.	SDN 18 Payakumbuh	38.	SDN 57 Payakumbuh
15.	SDN 19 Payakumbuh	39.	SDN 58 Payakumbuh
16.	SDN 22 Payakumbuh	40.	SDN 59 Payakumbuh
17.	SDN 23 Payakumbuh	41.	SDN 63 Payakumbuh
18.	SDN 25 Payakumbuh	42.	SDN 64 Payakumbuh
19.	SDN 27 Payakumbuh	43.	SDN 65 Payakumbuh
20.	SDN 28 Payakumbuh	44.	SDN 66 Payakumbuh
21.	SDN 30 Payakumbuh	45.	SDIT Al Huffazh Payakumbuh
22.	SDN 33 Payakumbuh	46.	SDIT Madani Payakumbuh
23.	SDN 34 Payakumbuh	47.	SDIT IPHI Payakumbuh
24.	SDN 35 Payakumbuh		
B.	SMP		
1	SMPN 6 Payakumbuh		
2	SMPN 8 Payakumbuh		
3	SMPN 10 Payakumbuh		

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2020

2.4.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2019. Dalam menggambarkan capaian pembangunan pada urusan ini masih dalam kondisi normal sebelum adanya wabah Covid-19. Pembahasan tentang kondisi dan dampak Covid-19 akan dibahas pada Sub Bab tersendiri dalam Bab ini. Capaian urusan kesehatan tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator berikut ini.

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, masih terdapat kasus kematian bayi di Kota Payakumbuh, dimana pada tahun 2018 terdapat 16 kasus, dan turun menjadi 10 kasus pada tahun 2019. Sedangkan kasus kematian balita pada tahun 2018 terdapat 1 kasus dan kasus kematian ibu melahirkan tidak ada.

Tabel II-38
Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kasus Kematian Bayi	26	13	13	16	10
2.	Kasus Kematian Balita	3	5	3	0	1
3.	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	5	0	3	1	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2020

2. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM). Pada tahun 2015 s.d 2019 posyandu di Kota Payakumbuh berjumlah 165 buah dengan rincian Posyandu Madya sebanyak 1 buah, posyandu Purnama sebanyak 82 buah dan posyandu Mandiri sebanyak 82 buah. Sedangkan untuk jumlah balita di Kota Payakumbuh tahun 2019 sebanyak 13.825 jiwa. Sehingga dapat dihitung rasio posyandu per satuan balita adalah 1:84, yang dipahami bahwa setiap Posyandu melayani rata-rata 84 orang anak balita.

Tabel II-39
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah posyandu	165	165	165	165	165
2.	Jumlah balita	13.936	13.914	13.898	11.529	13.825
	Rasio	1:84	1:84	1:84	1:70	1:84

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2020

Tabel II-40
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut KecamatanTahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1	Kecamatan Payakumbuh Timur	38	2.887	1:80
2	Kecamatan Payakumbuh Barat	55	5.407	1:98
3	Kecamatan Payakumbuh Selatan	18	1.135	1:63
4	Kecamatan Payakumbuh Utara	42	3.401	1:81
5	Lamposi Tigo Nagori	12	1.005	1:84
Jumlah		**165**	**11.529**	**1:84**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2020

3. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu per-satuan Penduduk

Jumlah Puskesmas di Kota Payakumbuh pada tahun 2019 tetap sebanyak 8 unit, dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk maka memiliki rasio 1:16.947. Kondisi ini diartikan bahwa satu Puskesmas melayani 16.947 jiwa. Dibandingkan dengan Standar Pelayanan Nasional maka angka ini jauh lebih tinggi, karena secara nasional satu Puskesmas diharapkan mampu melayani 30.000 penduduk, sehingga lima tahun kedepan jumlah puskesmas yang ada diperkirakan di Kota Payakumbuh masih ideal untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Payakumbuh. Untuk membantu Puskesmas memberikan pelayanan kepada masyarakat, terdapat puskesmas pembantu di Kota Payakumbuh sebanyak 23 unit, yang jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan sebanyak 47 kelurahan maka rata-rata satu Puskesmas pembantu melayani dua kelurahan sehingga cakupan layanan puskesmas pembantu sudah melayani hampir seluruh kelurahan.

4. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Selama kurun waktu tahun 2015-2019 jumlah rumah sakit di Kota Payakumbuh masih tetap. Dengan jumlah yang ada saat ini sebetulnya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, bahkan Rumah Sakit ini menjadi rujukan bagi darah-daerah sekitarnya. Berikut disajikan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Payakumbuh beserta rasionya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

RSUD Dr Adnaan WD Payakumbuh yang dikelola oleh Pemerintah Kota saat ini masih berstatus type C, namun telah terakreditasi **Paripurna** oleh Badan Akreditasi Kementerian Kesehatan RI sejak tahun 2017 lalu. RSUD ini merupakan RSUD rujukan dari beberapa RSUD Type D di wilayah Kabupaten tetangga, seperti RSUD Suliki dan Tanah Datar. Oleh sebab itu dalam upaya peningkatan pelayanan di RSUD Dr Adnaan WD, untuk percepatan pembangunanberbagai fasilitas melalui pembiayan pembangunan fasilitas layanan prima RSUD Dr Adnaan WD Payakumbuh dengan Dana Pembiayaan dengan sharing pembayaran dari anggaran pembiayaan APBD Kota Payakumbuh dengan sumber atas pendapatan RSUD Adnaan WD Payakumbuh yang telah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Tabel II-41
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan khusus lainnya	2	2	2	2	2
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	4	4	4	4	4
6.	Jumlah Penduduk	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
	Rasio	1:31.957	1:32.451	1:32.954	1:33.426	1:33.893

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2020

5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Jumlah dokter umum dan dokter gigi di Kota Payakumbuh belum merata. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil rasio dokter di tiap kecamatan.

Tabel II-42
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit
Kota Payakumbuh Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter		Rasio	
			dr	drg	dr	drg
1	Payumbuh Timur	28.670	14	10	1:2.048	1:2.867
2	Payakumbuh Barat	53.232	62	6	1:3.859	1:8.872
3	Payakumbuh Selatan	11.187	4	3	1:2.797	1:3.729
4	Payakumbuh Utara	32.329	49	4	1:660	1:8.082
5	Lamposi Tigo Nagori	10.155	3	1	1:3.385	1:10.155
	Jumlah	**135.573**	**75**	**24**	**1:1.808**	**1:5.656**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2020

Berdasarkan tabel II-42 terlihat bahwa rasio dokter 1:1.808, menggambarkan bahwa 1 (satu) orang dokter melayani 1.808 jiwa, dan rasio dokter gigi 1:5.656, menggambarkan 1 (satu) orang dokter gigi melayani 5.656 jiwa.

6. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan besarnya ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk tenaga para medis (bidan, perawat, perawat gigi) pada tahun 2019 berjumlah sebanyak 250 orang, maka rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2019 adalah 1:542.

Tabel II-43
Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di Luar Rumah Sakit Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Tenaga Para Medis	107	102	157	225	250
2.	Jumlah Penduduk	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
	Rasio	1:1.195	1:1.236	1:840	1:380	1:542

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2020

7. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization*

Cakupan Pelayanan Imunisasi Anak (*Universal Child Immunization* (UCI)) pada tahun 2019 telah mencapai 100% di seluruh kelurahan.

8. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Dari pelaksanaan Posyandu maka diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan balita, dan diharapakan akan terjaring bayi dan balita dengan keadaan gizi kurang atau buruk. Jika dilihat pada tahun 2019 terdapat 12 orang bayi dan balita dengan gizi buruk (0,1%), dan semuanya telah mendapat penanganan sesuai dengan standar tata laksana gizi buruk adalah 100%.

9. Cakupan Kunjungan Bayi

Pada tahun 2019 jumlah dan rasio perbandingan pelayanan posyandu di Kota Payakumbuh, dari 165 buah Posyandu yang ada jika dibandingkan dengan jumlah bayi yang ada sebanyak 13.825 orang, maka didapat perbandinngan 1:84 orang yang berarti satu Posyandu akan melayani sampai 84 orang balita. Sedangkan cakupan kunjungan bayi mencapai 90,22%.

10. Cakupan Puskesmas

Jumlah puskesmas di Kota Payakumbuh tahun 2019 adalah sebanyak 8 (delapan) unit dan jumlah kecamatan di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 5 kecamatan, sehingga cakupan puskesmas sudah tercapai sebesar 100%.

11. Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas pembantu di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 23 unit dengan jumlah seluruh kelurahan adalah sebanyak 47 kelurahan, sehingga cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2019 adalah sebesar 0,51 (51%), sehingga target sebesar 65% pada tahun 2019 belum tercapai.

12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

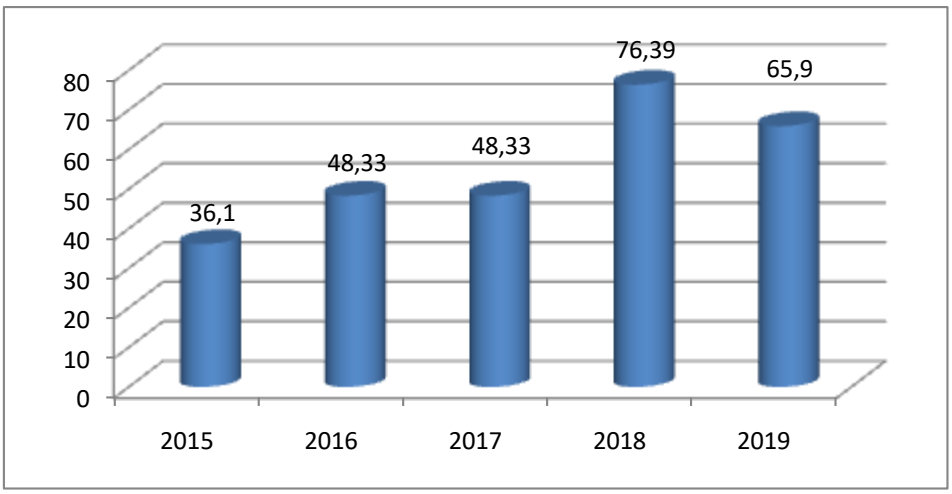


Diagram II-16
Perkembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019
Sumber:Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2020

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa perilaku hidup bersih dan sehat dari tahun 2015–2019 cenderung meningkat, akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan dari 76,39% menjadi 65,9%. Namun nilai tersebut masih diasumsikan rendah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam Rumah Tangga ber-PHBS, karena dari 10 indikator PHBS Rumah Tangga apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka belum bisa dikatakan rumah tangga ber-PHBS. Indikator tersebut adalah merokok di dalam rumah, makan buah dan sayur, dan aktivitas fisik.

13. Prevalensi Penyakit

Tabel II-44
10 Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

Jenis Diagnosis Penyakit	Jumlah Kunjungan				
	2015	2016	2017	2018	2019
ISPA	25.782 (1)	19.249 (1)	19.228 (1)	16.247 (1)	16.795 (1)
Hipertensi primer	6.183 (2)	7.588 (2)	7.501 (2)	9.523 (2)	12.381 (2)
Penyakit pulpa dan jar. Perifikal	4.540 (5)	3.733 (6)	5.067 (3)	5.726 (3)	5.252 (3)
Nasofaringitis akut (Common Cold)	-	4.400 (5)	2.708 (8)	3.042 (6)	3.149 (7)
Penyakit kulit Alergi	2.918 (6)	3.010 (8)	-	2.461 (7)	-
Rheumatoid	5.000 (3)	5.174 (4)	4.856 (5)	3.297 (5)	3.167 (6)
Diare	-	-	-	2.220 (8)	-
Penyakit saluran pernapasan atas lainnya	-	2.267 (10)	-	-	-
Diabetes	1.991 (8)	3.287 (7)	3.388 (6)	3.603 (4)	4.474 (4)
Gasteristis	4.962 (4)	6.024 (3)	5.022 (4)	-	3.007 (8)
Dispepsia	2.549 (7)	2.879 (7)	2562 (9)	2.239 (10)	-
Cepalgia	-	1.557 (10)	-	2.873(7)	-
Dermatitis	1.516 (8)	-	-	-	3.395 (5)
Kelainan Refraksi	-	1.632 (9)	-	-	-

Jenis Diagnosis Penyakit	Jumlah Kunjungan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Myalgia	-	-	-	2.534(9)	-
Jantung					2.319 (9)
Karies Gigi	-	-	--	-	1.693 (10)

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat dalam empat tahun terakhir jenis penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat Payakumbuh untuk rangking pertama dan kedua adalah penyakit ISPA dan Hipertensi, ISPA atau Inveksi Saluran Pernapasan Atas dan Hipertensi biasanya terkait dengan pola hidup yang ada ditengah masyarakat itu sendiri, karena kedua jenis penyakit ini disebabkan oleh pola hidup yang kurang memperhatikan kesehatan, ISPA terkait pada kualitas udara yang ada di sekitar pasien bisa saja disebabkan karena asap rokok atau pembakaran sampah yang menyebakan penurunan mutu udara, hipertensi terkait dengan pola hidup baik makan maupun aktifitas fisik sehingga diperlukan upaya prefentif dan promotif untuk permasalahan ini.

Tabel II-45
Data Prevalensi HIV/ AIDS Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Prevalensi jumlah penderita HIV/AIDS	0,0039	0,0053	0,0053	0,635	0,013

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2020

Berdasarkan data prevalensi HIV/ AIDS, masih banyak masyarakat yang belum bersedia untuk memeriksakan diri terkait penyakit HIV ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga penularan penyakit HIV masih belum bisa ditekan.

14. Jaminan Kesehatan Nasional

Tabel II-46
Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepesertan JKN	Persentase
1	2015	127.826	113.055	88,4
2	2016	129.807	110.514	85,1
3	2017	131.819	109.238	82,9
4	2018	133.703	130.039	97,3
5	2019	135.573	128.347	94,7

Sumber **:** Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2020

Kepesertaan JKN ini terdiri dari Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran yang terdiri dari dua kepesertaan yaitu kepesertaan yang dibiayai dengan APBN dan kepesertaan yang dibiayai oleh APBD dan non Penerima bantuan iuran yang terdiri dari Pegawai Negeri sipil, TNI/Polri dan Pekerja Mandiri.Tahun 2015, 2016 dan 2017 terjadi penurunan kesertaan JKN, pada tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi 130.039 jiwa atau sebesar 97,3% dari jumlah penduduk, akan tetapi pada tahun 2019 terjadi kembali penurunan dengan persentase 94,7% atau 128.347 penduduk dari 135.573 jiwa. Ini disebabkan oleh adanya kepesertaanyang selama ini ditanggung oleh pemerintah dan saat ini sudah keluar, karena sudah mampu secara ekonomi namun tidak melanjutkan kepesertaan mandirinya.

2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan dalam kondisi baik merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana, karena ini berkaitan langsung dengan kelancaran akses masyarakat baik akses orang maupun barang. Salah satu unsur yang menjadi acuan adalah kinerja jaringan jalan ditinjau dari aspek kemantapan, yang mana ini merupakan gabungan kinerja dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap. Melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan maka kondisi jalan mantap (kondisi baik dan rusak sedang) di Kota Payakumbuh pada akhir tahun 2019 mencapai 178,45 Km meningkat dari kondisi tahun 2018 yaitu sepanjang 2,19 Km. Semenjak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 panjang jalan di Kota Payakumbuh tetap yakni sepanjang 286,80 km, sedangkan proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 61,45%. Hal ini memerlukan keseriusan pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Selain itu, 29,93% jalan dalam kondisi rusak, ini terutama diakibatkan antara lain tingginya volume kendaraan yang melebihi tonase, khususnya beberapa ruas jalan kota karena adanya kegiatan normalisasi sungai Batang Agam yang mengangkut bahan baku untuk kegiatan normalisasi tersebut.

Tabel II-47
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kondisi Baik	72,06	84,65	89,17	88,37	89,50
2.	Kondisi Rusak Sedang	70,85	77,86	82,02	87,89	88,95
3.	Kondisi Rusak/Rusak Berat	91,68	92,17	83,49	78,41	76,23
4.	Panjang Jalan Kota	236,59	254,68	254,68	254,68	254,68
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	261,45	286,80	286,80	286,80	286,80
6.	Persentase	60,40	63,81	66,56	69,21	72,25

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik di Kota Payakumbuh dari tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2019 secara persentase selalu mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan setiap tahunnya.

2. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan

Keberadaan trotoar di sepanjang jalan terutama yang selalu dipergunakan pejalan kaki menjadi salah satu indikator kemudahan akses pejalan kaki di sepanjang jalan. Di samping itu, untuk menjamin usia jalan yang sudah dibangun seharusnya terdapat pembuangan air hujan di sepanjang jalan berupa adanya drainase yang akan menampung air dikala terjadinya hujan. Untuk itulah panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh menjadi indikator pembangunan ke-PU-an. Berdasarkan hal tersebut, terjadi peningkatan panjang jalan yang memiliki drainase sampai tahun 2019 adalah 58,95% dan panjang jalan yang memiliki trotoar sampai dengan tahun 2019 sudah 7,63% jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-48
Persentase Panjang Jalan Kota Payakumbuh
yang Memiliki Drainase Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang jalan kota yang memiliki drainase skala kota (km)	114,5	117,5	120,83	131,77	150,12
2.	Panjang jalan kota (km)	236,59	254,68	254,68	254,68	254,68
	Persentase drainase skala kota	48,39	46,13	47,44	51,74	58,95

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

Tabel II-49
Persentase Panjang Jalan Kota Payakumbuh
yang Memiliki Trotoar Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang jalan Kota yang memiliki trotoar (km)	16,50	17,75	18,75	18,75	19,43
2.	Panjang jalan Kota (km)	236,59	254,68	254,68	254,68	254,68
	Persentase	6,97	6,97	7,36	7,36	7,63

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

3. Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Berkaitan dengan indikator sebelumnya, maka drainase yang ada harus terjamin baik dan tidak tersumbat. Panjang drainase keseluruhan dan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019. Peningkatan yang signifikan ini dikarenakan pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan kualitas drainase tidak hanya didanai dari APBD Kota juga bersumber dari APBN. Secara persentase drainase kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 73,26%, kondisi ini lebih banyak dipengaruhi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase yang sudah terbangun di kawasan permukiman dan banyaknya pembuangan air hujan yang langsung ke saluran drainase tanpa adanya resapan terlebih dahulu. Kondisi drainase yang baik digambarkan pada tabel berikut.

Tabel II-50
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang drainase dalam Kondisi baik (km)	114,50	117,50	130,78	141,41	114,50
2.	Panjang drainase seluruhnya (km)	158,27	171,55	171,55	182,17	156,27
	Persentase	73,26	74,23	76,23	77,62	73,26

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

4. Pembangunan Turap/ Pengamanan Tebing di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Pembangunan turap/ pengamanan tebing di Kota Payakumbuh semakin meningkat melebihi jumlah lokasi rawan longsor. Kondisi ini dilakukan untuk mengantisipasi abrasi pinggir sungai, karena debit air sungai yang besar dan tidak bisa diperkirakan terutama pada musim hujan. Gambaran pembangunan turap selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel II-51
Panjang Turap/Pengamanan Tebing yang Dibangun
Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang turap yang dibangun (m)	1.934	2.305	1.376	4.006	1.238
2.	Jumlah lokasi rawan longsor	50	49	48	48	48

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

5. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dihitung dari panjang saluran irigasi (m) dibandingkan dengan luas lahan budidaya pertanian (hektar) yang ada di Kota Payakumbuh. Dari tahun 2015 s.d 2016 terjadi kenaikan rasio karena adanya alih fungsi lahan akibat pengembangan pembangunan permukiman dan bencana alam. Pada tahun 2017 sampai 2019 tidak terjadi kenaikan rasio jaringan irigasi. Untuk mengantisipasi alih fungsi lahan, Pemerintah Kota Payakumbuh telah menyiapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Tabel II-52
Rasio Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah jaringan irigasi	151.176	151.174,7	161.862	161.862,0	161.862,0
2.	Luas lahan budidaya (ha)	5.598	5.051,5	5.051,5	5.051,5	5.051,5
	Rasio	27,01	29,93	32,04	32,04	32,04

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

Kondisi jaringan irigasi yang baik dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan,di awal tahun 2015 baru 66,01% yang berkondisi baik dan meningkat menjadi 80,27% pada akhir tahun 2019, sebagaimana tertuang pada diagram berikut ini.

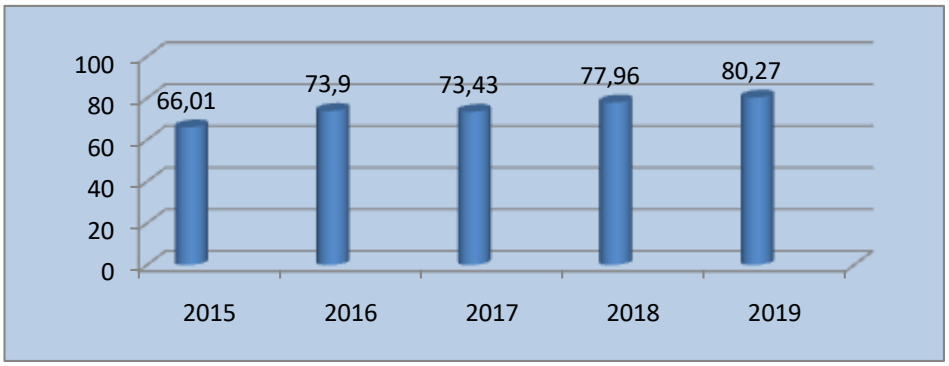


Diagram II-17
Persentase Jaringan Irigasi di Kota Payakumbuh dalam Kondisi Baik
Tahun 2015-2019

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

Secara detail persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik juga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-53
Panjang Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang jaringan irigasi (m')	158.590,7	158.590,7	161.862	161.862	161.862
2.	Jaringan irigasi dalam kondisi baik (m')	104.70	117.198	124.257	126.192	129.927
	Persentase	**66,01**	**73,90**	**76,77**	**77,96**	**80,27**

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

6. Panjang Sungai yang Dinormalisasi

Salah satu potensi Kota Payakumbuh adalah adanya beberapa sungai yang mengaliri wilayah ini, diantaranyaSungai Batang Agam, Batang Pulau, Batang Sikali, Sungai Baih, Sungai Tembok dan Sungai Talang. Kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk irigasi dan buangan disaat terjadi genangan atau banjir. Namun sungai-sungai tersebut juga berpotensi menimbulkan abrasi dan longsoran tebing. Inilah yang senantiasa dijaga dan dipertahankan dengan pembangunan turap, bronjong serta normalisasi dengan pengerukan dasar sungai. Dari tahun 2017-2019 telah dilakukan penanganan terhadap tebing sungai yang berpotensi mengalami abrasi baik dengan menggunakan pendanaan APBD maupun APBN. Pada tahun 2019 telah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 866 meter. Jadi semenjak tahun 2019 total normalisasi sungan sepanjang 2.873 meter.

7. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Selama waktu 2015-2019, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mendapat akses air minum, dimana pada tahun 2018 sudah mencapai 97,84%.

Tabel II-54
Persentase Pelayanan Air Minum di Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	jiwa	119.875	122.485	125.840	129.331	132.645
2	Jumlah penduduk	Jiwa	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
	Persentase pelayanan air minum		**93,78**	**94,36**	**95,46**	**96,73**	**97,84**

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

Untuk menjamin kelancaran pasokan air bersih di Kota Payakumbuh, maka mulai tahun 2018 telah dibangun Water Treatment Plant (WTP) berteknologi tinggi sehingga menjadi air bersih dan layak untuk dikonsumsi dengan memanfaatkan air Sungai Batang Agam dan telah dioperasikan mulai tahun 2019 dan direncanakan pada tahun 2020 ini akan dilakukan peningkatan kapasitas melalui penambahan kolam pengolahan dan penampungan dengan menggunakan APBN.



Gambar II-7
Water Treatment Plant (WTP) Kota Payakumbuh

8. Rasio Tempat Ibadah per-Satuan Penduduk

Rasio ini dihitung antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk di Kota Payakumbuh. Untuk tahun 2019 nilai rasio bernilai 2,90 yang dipahami bahwa hampir tiga tempat ibadah dapat menampung untuk 1.000 penduduk. Nilai rasio yang cenderung turun setiap tahunnya dipengaruhi oleh pertambahan penduduk yang tidak diiringi dengan pertambahan jumlah tempat ibadah.

Tabel II-55
Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kota PayakumbuhTahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Tempat Ibadah	390	390	390	390	390
2.	Jumlah Penduduk	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
	Rasio	3,04	2,99	2,96	2,91	2,90

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2020

9. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Rasio ruang terbuk hijau setiap tahun selalu meningkat, dimana pada tahun 2019 persentase Ruang Terbuka Hijau dibandingkan dengan luas wilayah sudah mencapai angka 9,30%, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-56
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	20,98	20,98	20,99	22,99	747,69
2.	Luas wilayah	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
3	Rasio ruang terbuka hijau (1:3)	0,26	0,26	0,26	0,29	9,30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2020



Gambar II-8
RTH Ratapan Ibu Kota Payakumbuh

Indikator Jenis pemanfaatan ruang yang diarahkan dalam ruang terbuka hijau di Kota Payakumbuh terdiri dari ; RTH taman kota, RTH jalur hijau, RTH tempat pemakaman umum, RTH jalur hijau dan RTH ruang pejalan kaki. Rasio ruang terbuka hijau diukur dari perbandingan luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah ber-HPL/HGB.

10. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan baik IMB untuk bangunan publik maupun bangunan privat serta IMB pemutihan untuk bangunan yang telah berdiri. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan dihitung dengan jumlah bangunan ber-IMB per jumlah bangunan.

Tabel II-57
Rasio Bangunan ber-IMB Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	4.730	5.170	5.625	6.190	11.637
2.	Jumlah Bangunan	27.530	28.058	28.513	29.088	34.479
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0,17	0,18	0,19	0,21	0,34

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya peningkatan dari tahun ketahun, baik untuk bangunan yang sudah ada maupun yang baru dibangun. Hal ini karena adanya peningkatan kinerja dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian IMB.

11. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan dalam pemanfaatan ruang didasarkan pada pemenuhan indikator tertib Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Selama kurun waktu perencanaan dari tahun 2015-2019 ketaatan terhadap RTRW cenderung meningkat kecuali pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena tingginya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terlihat dari meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB baik bangunan privat maupun bangunan publik.

Sebagai tindak lanjut dari Perda RTRW yang sudah ada, maka Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah menetapkan **Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)** melalui **Peraturan Daerah**

Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang disusun guna menjaga integritas, keseimbangan dan keserasian perkembangan suatu wilayah Kota Payakumbuh dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan.

Tabel II-58
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Realisasi RTRW (ha)	440	580	612,97	682,42	635,40
2.	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
3.	Rasio (1/2)	0,054	0,072	0,076	0,084	0,079

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Payakumbuh. Di samping dalam rangka penyediaan rumah bagi warga miskin juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dalam bentuk penataan dan pembangunan perumahan permukiman yang dilaksanakan secara bertahap dan diprioritaskan pada permukiman penduduk untuk masyarakat berpenghasilan rendah.Rasio rumah layak huni dihitung dari perbandingan jumlah rumah layak huni (unit) dengan jumlah penduduk (jiwa).

Tabel II-59
Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah Layak Huni	26.823	26.893	26.132	26.441	26.791
2.	Jumlah Penduduk	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
3.	Rasio	0,21	0,21	0,19	0,19	0,19

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2020

Jumlah rumah layak huni Kota Payakumbuh pada awal tahun Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 adalah 26.132 unit dengan perkiraan jumlah total unit rumah adalah 28.436 unit dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah 2.304 Unit. Setelah dilakukan intervensi peningkatan rumah tidak layak huni sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan komposisi jumlah intervensi tiap tahun adalah 356 unit, 309 unit dan terkahir tahun 2019 adalah sebanyak 350 unit. Pelaksanaan peningkatan rumah tidak layak huni ini setiap tahunnya adalah didukung oleh pendanaan APBD Kota Payakumbuh, DAK Bidang Perumahan serta APBN melalui kegiatan Bantuan Stimulasi Pembangunan Swadaya/BSPS.

Tabel II-60
Rasio Permukiman Layak Huni Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Permukiman Layak Huni	2.092	2.092	2.092	2.103	2.122
2.	Jumlah luas permukiman	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
3.	Rasio	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh, 2020

Permukiman layak huni disini adalah dipersepsikan permukiman yang telah dilakukan intervensi penuntasan kriteria kumuh yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tahun 2019, melalui program nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), telah dilakukan pengentasan ± 19 Ha permukiman kumuh di Kota Payakumbuh. Hal ini menyebabkan penambahan luas permukiman layak huni menjadi 3.328 Ha untuk tahun 2019 dan rasio antara luas permukiman layak huni dengan luas permukiman adalah 0,63.

2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Jumlah rumah tinggal bersanitasi selalu meningkat di Kota Payakumbuh, seiring dengan meningkatnya pembangunan sanitasi perkotaan sebagai salah satu prioritas penanggulangan kekumuhan.

Tabel II-61
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	23.833	23.833	24.434	29.669	30.809
2.	Jumlah Rumah Tinggal	27.723	27.723	28.436	33.046	33.046
3.	Persentase	85,95	85,95	85,92	89,78	93,23

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2020

3. Rumah tinggal berakses sanitasi

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 dirumuskan adalah rumah tangga/KK yang memperoleh akses sanitasi dasar dalam hal ini berupa tangki septik, baik individu maupun komunal. Awal tahun Renstra ditetapkan jumlah rumah tangga/KK di Kota Payakumbuh tahun 2017 adalah 33.046 KK. Pelaksanaan Program Lingkungan Sehat Perumahan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin terhitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan pembangunan tangki septik individu dan komunal. Pelaksanaan kegiatan ini telah sampai akhir tahun 2019 mengakomodir 2.163 KK di Kota Payakumbuh untuk memperoleh akses sanitasi layak, sehingga jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak di Kota Payakumbuh akhir tahun 2019 adalah 30.809 KK. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak akhir tahun 2019 adalah 93,23%.

4. Kawasan Kumuh

Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor: 653.3/210/wk-Pyk/2016 pada tahun 2017, dinyatakan bahwa luas kawasan kumuh Kota Payakumbuh adalah 59 Ha yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan, dengan adanya fasilitasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dari Kementerian PUPR, maka luas kawasan kumuh saat ini sudah berkurang menjadi hanya sekitar 8,01 Ha. Berdasarkan SK Nomor: 653.3/289/wk-Pyk/2019 tahun 2019, dengan 7 (tujuh) indikator dan 16 (enam belas) kriteria, luas kawasan kumuh Kota Payakumbuh menjadi 63,45 Ha.

5. Backlog Rumah

Backlog Rumah menggambarkan kebutuhan rumah yang ideal di Kota Payakumbuh dengan melihat jumlah keluarga dan jumlah rumah yang tersedia, dengan mempertimbangkan kelayakan. Sampai dengan tahun 2019 ini, jumlah backlog rumah mencapai 6.013 unit. Sedangkan rata-rata pengurangan backlog setiap tahunnya sekitar 4,5%. Pemerintah telah

berupaya mengurangi backlog dengan membuat kebijakan rumah bersubsidi dan meningkatkan kelayakan rumah melalui pembangunan rumah layak huni setiap tahun.

2.4.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaannya melayani masyarakat melalui pembinaan wawasan kebangsaan, politik dan kerukunan beragama dan juga pengendalian ketertiban dan keamanan lingkungan.

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara, menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penegakan peraturan daerah.

Tabel II-62
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Petugas Pol PP	102	108	115	123	138
2.	Jumlah Penduduk	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
3.	Rasio Jumlah Petugas Pol PP / 10.000 Penduduk	7,97	8,32	8,72	9,20	9,80

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2020

Perlindungan masyarakat adalah komponen khusus pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil resiko kerugian. Perlindungan masyarakat berfungsi menyelenggarakan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.

Tabel II-63
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Linmas	630	630	525	525	786
2.	Jumlah Penduduk	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 / Peduduk	49,28	48,53	39,83	39,27	57,98

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2020

2. Cakupan ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos Kamling adalah salah satu penyelenggaraan keamanan masyarakat dengan pola peningkatan partisipasi mayarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tingkat pelangagaran terhadap Perda di Kota Payakumbuh masih tinggi dan bervariasi tiap tahun dari tahun 2015-2019 , total pelanggaran tiap tahunnya pada tahun 2015 sebanyak 262 kasus dan tahun 2016 sebanyak 268 kasus, tahun 2017 melonjak menjadi 773 kasus, tahun 2018 hanya 435 kasus, dan

tahun 2019 turun menjadi 229 kasus. Dari kasus pelanggaran Perda yang terjadi tahun 2019 yang dapat tertangani seluruhnya (100%).

Tabel II-64
Tingkat Pelanggaran Kota Payakumbuh dari Tahun 2015-2019

No	Kategori Kasus	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	75	86	121	179	61
2.	Selain Pelanggaran Perda Pekat	Kasus	`187	182	652	224	195
	Jumlah Pelanggaran	Kasus	262	268	773	435	229
	Jumlah Pelanggaran yang di Proses/ tertangani	Kasus	262	268	618	403	229
	Persentase Perda yang tertangani	%	100	100	80	92,64	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2020

Tabel II-65
Data Tingkat Waktu Tanggap terhadap Bencana Wilayah Manajemen Kebakaran (MK)
Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus kebakaran	Kasus	178	212	120	176	162
2.	Kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit	Kasus	178	212	120	176	162
3.	Persentase kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel diatas dari tahun 2015 sampai tahun 2019 jumlah kasus bencana kebakaran yang terjadi cenderung meningkat dari tahun ke tahun kebanyakan diakibatkan konsleting listrik, karena umumnya instalasi listrik yang sudah lama.

Tabel II-66
Data Bencana Alam di Kota Payakumbuh tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angin Kencang, Badai/Puting Beliung	Kejadian	18	24	26	22	74
2	Banjir	Kejadian	2	1	1	1	7
3	Longsor	Kejadian	1	1	3	1	1

Sumber : Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel diatas, bencana alam yang paling berpotensi dan dan sering terjadi di Kota Payakumbuh adalah bencana angin puting beliung, ini dipengaruhi oleh keadaan topografi Kota Payakumbuh yang cenderung datar dan kemudian banjir pada titik-titik tertentu akibat luapan dari beberapa sungai.

2.4.1.6 Urusan Sosial

Penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan kewenangan Dinas Sosial Kota Payakumbuh, namun dalam pelaksanaan kegiatannya tetap berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait, terutama setelah adanya pendampingan oleh Kementerian PAN dan RB yang menyarankan bahwa dalam pencapaian sasaran pembangunan khususnya

masalah sosial dalam pelaksanaan kegiatannya harus *crosscutting* dengan Perangkat Daerah lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program-program kesejahteraan sosial mencakup 4 (empat) kriteria: Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di Kota Payakumbuh diantaranya adalah kemiskinan, ketunaan, penyandang cacat, lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal.

Tabel II-67
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Jenis PMKS	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Balita Terlantar	78 Orang	78 Orang	16 Orang	11 Orang	8 Orang
2	Anak Terlantar	100 Orang	62 Orang	62 Orang	42 Orang	41 Orang
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	10 Orang	10 Orang	10 Orang	34 Orang	6 Orang
4	Anak Jalanan	12 Orang	25 Orang	5 Orang	7 Orang	5 Orang
5	Anak dengan Kedasibilitasan	25 Orang	25 Orang	165 Orang	181 Orang	216 Orang
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	1 Orang	4 Orang
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3 Orang	3 Orang	3 Orang	1 Orang	- Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	220 Orang	220 Orang	220 Orang	144 Orang	319 Orang
9	Penyandang Disabilitas	441 Orang	277 Orang	277 Orang	389 Orang	517 Orang
10	Tuna Susila	1 Orang	1 Orang	1 Orang	- Orang	- Orang
11	Gelandangan	1 Orang	1 Orang	1 Orang	6 Orang	1 Orang
12	Pengemis	15 Orang	15 Orang	15 Orang	14 Orang	19 Orang
13	Pemulung	62 Orang	62 Orang	62 Orang	74 Orang	56 Orang
14	Kelompok Minoritas	3 Orang	3 Orang	3 Orang	4 Orang	1 Orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	48 Orang	48 Orang	48 Orang	292 Orang	75 Orang
16	Orang dengan HIV/AIDS	1 Orang	1 Orang	2 Orang	4 Orang	4 Orang
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	335 Orang	333 Orang	39 Orang	56 Orang	49 Orang
18	Korban Trafficking	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang	- Orang
19	Korban Tindakkekerasan	7 Orang	7 Orang	7 Orang	- Orang	27 Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	5 Orang	5 Orang	2 Orang	- Orang	- Orang
21	Korban Bencana Alam	1 Orang	1 Orang	1 Orang	8 Orang	- Orang
22	Korban Bencana Sosial	7 Orang	7 Orang	7 Orang	2 Orang	9 Orang
23	Perempuan Rawan Sosial ekonomi	491 Orang	491 Orang	491 Orang	374 orang	- Orang
24	Fakir Miskin	8.510 Orang	6.383 Orang	5745 Orang	6.855 orang	7.998 Orang
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	7 Orang	7 Orang	7 Orang	26 orang	9 Orang
26	Komunitas Adat Terpencil	- Orang	- Orang	- Orang	- orang	- Orang
	Jumlah	9.764 orang	7.446 orang	7.191orang	8.525 orang	9.364 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

Salah satu program nasional yang diberikan untuk masyarakat miskin adalah Pemberian beras miskin (Raskin). Di Kota Payakumbuh jumlah penduduk yang memperoleh Raskin tahun 2019 sebanyak 5.625 KK, dengan pembagian menurut kecamatan adalah 459 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Payakumbuh Utara, 1.857 RTS di Payakumbuh Barat, 1.413 RTS di Payakumbuh Timur, 1.118 RTS di Payakumbuh Selatan, dan 778 RTS di Lamposi Tigo Nagori. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah yang terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT).

2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Selanjutnya terkait potensi sumber kesejahteraan sosial aktif menurut jenis kelamin pada tahun 2019 tercatat sebanyak 111 orang dengan dominasi perempuan sebanyak 93 orang. Secara lebih detilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel II-68
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Kota Payakumbuh Tahun 2019

No	Jenis PSKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)			
	Kec. Payakumbuh Barat	3	32	35
	Kec. Payakumbuh Timur	2	24	26
	Kec. Payakumbuh Utara	8	17	25
	Kec. Payakumbuh Selatan	2	11	13
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	3	9	12
	TOTAL	**18**	**93**	**111**
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)			
	Kec. Payakumbuh Barat	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Timur	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Utara	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Selatan	0	1	1
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	0	1	1
	TOTAL	**3**	**2**	**5**

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

2.4.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut Undang Undang dibatasi antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun, yang perlu menjadi perhatian adalah dengan semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja produktif setiap tahunnya baik dari lulusan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi yang tidak tersalurkan secara maksimal dikarenakan sangat terbatasnya kesempatan kerja berakibat tingginya angka pengangguran. Hal ini diperburuk dengan sulitnya mendapatkan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pasar kerja dan belum adanya lembaga pendidikan dan keterampilan yang menjamin lulusannya untuk ditempatkan pada lapangan kerja yang tersedia.

Tabel II-69
Capaian Kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tenaga kerja yang kompeten	%	60	60	32	70	102
2	Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi tenaga kerja	org	1.302	1.100	1.034	1.167	684
3	Jumlah Tenaga kerja yang mendapat BPJS Kesehatan	org	880	882	2.015	2.025	2.068
4	Jumlah perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan	perusahaan	28	29	40	98	124
5	Pencari kerja yang ditempatkan	%	25.6	25	38,49	61,1	77,34

No	Indikator Kinerja OPD	Satuan	Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
6	Jumlah Sengketa Perusahaan	Kasus	-	2	6	-	-
7	Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	75	100	100	77,8	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2020

Pengangguran merupakan dampak dari jumlah angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat dari pada kesempatan kerja. Dalam rangka mengurangi angka pengangguran Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Perhotelan (STP) Sahid Jakarta dalam upaya memenuhi kebutuhan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja bidang perhotelan dan kepariwisataan dengan melakukan magang di perusahaan-perusahaan dan hotel di dalam dan luar negeri.

2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan penetapan kuota perempuan dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan manusia berawal dari pendidikan dalam keluarga yang peran terbesarnya ada pada ibu. Untuk melihat sejauh mana peran perempuan dan keluarga dalam perlindungan anak maka dapat dilihat dari beberapa indikator. Berdasarkan tabel di bawah ini terlihat bahwa nilai IPG meningkat setiap tahunnya, indeks IPG merupakan cerminan dari meningkatnya taraf hidup masyarakat yang dikoreksi dengan gender. Untuk tahun 2015 terlihat nilai IPG bernilai 98,54 Ini dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan kesejahteraan/ kondisi yang diterima antara lelaki dan perempuan, baik dari pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan tahun 2016 BPS tidak melakukan pengukuran IPG dan IDG tidak diukur tahun 2016 dan 2017, tetapi pada tahun 2018 dan 2019 kembali dilakukan pengukuran dan tahun 2019 didapat hasil 98,54.

Tabel II-70
Indikator Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,52	N/A	N/A	98,53	98,54
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,70	N/A	61,70	61,99	62,30
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	69,92	69	20,8	66,76	67,33
4.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga non pemerintah (swasta)	30,08	30,6	75,57	55,74	55,64
5.	Rasio KDRT	0,0016	0,0015	0,0015	0,0395	0,018

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2020
N/A) = Tidak dilakukan penghitugan

Tabel II-71
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Kasus KDRT	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kekerasan terhadap perempuan	51	11	9	19	12
2.	Kekerasan terhadap anak	44	8	23	15	20

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2020

2. Pembangunan Responsif Gender

Disamping itu, hal yang menjadi perhatian dalam percepatan pengarusutamaan gender adalah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) oleh pemerintah daerah. Berdasarkan informasi dari bidang pemberdayaan perempuan, 40% stakeholder sudah melaksanakan PPRG, dalam artian sudah membuat *Analisis Responsive Gender (ARG)* berupa *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)*. Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan.

3. Pemenuhan Hak-hak Anak

Terkait dengan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Fasilitas umum yang ramah anak
   Sebagai Kota ramah anak, tentunya fasilitas umum di Kota Payakumbuh diharapkan juga dilengkapi dengan fasilitas ramah anak, seperti tempat bermain anak baik itu di tempat – tempat pelayanan publik maupun fasilitas umum lainnya. Namun harus diakui kondisi ini belum optimal dilakukan. Tempat pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, tempat pelayanan publik seperti pencatatan sipil, pelayanan satu pintu, zona aman sekolah dan lain-lain masih minim dengan fasilitas yang ramah anak. Beberapa fasilitas umum dan taman bermain di Kota Payakumbuh telah mulai dilengkapi dengan fasilitas bermain anak, diantaranya RTH Batang Agam, RTH Talawi serta Objek wisata Ngalau Indah.

b. Fasilitas Pojok ASI untuk ibu menyusui
   Untuk fasilitas pojok ASI bagi ibu menyusui pada perkantoran juga masih minim. Dari 31 Perangkat daerah, yang memiliki fasilitas ruang ibu menyusui (pojok ASI) baru perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPMDPTSP, Rumah sakit dan Puskesmas

c. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran
   Berdasarkan data dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, jumlah anak yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2019 adalah sebanyak 48.359 anak dari total 51.163 anak. Artinya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak berusia 18 tahun ke bawah adalah sebesar 94,52%. Angka ini sudah berada diatas target nasional yang mengisyaratkan cakupan kepemilikan akta kelahiran oleh anak sebesar 85% pada tahun 2019.

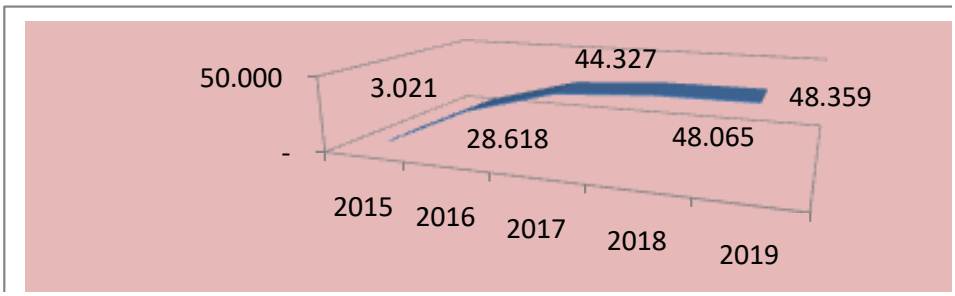


Diagram II-18
Jumlah Anak Berakte Kelahiran di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

Sumber : Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Payakumbuh, 2020

2.4.2.3 Pangan

Ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Ketersediaan pangan di kota Payakumbuh secara makro menunjukkan surplus terutama untuk kelompok padi-padian, sayuran, buah-buahan dan ikan. Distribusi pangan yang efektif dan efisien berguna untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Informasi harga pangan diperlukan oleh produsen untuk melihat jadwal tanam melalui pengaturan pola tanam, peluang pasar, dan gejolak harga yang terjadi. Disisi lain, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengantisipasi gejolak harga pada saat tertentu. Dengan demikian. diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan, sehingga informasi harga sampai ke tangan produsen dan pemerintah tepat waktu.

Terkait penataan ini, Pemko Payakumbuh juga memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap Kelompok-Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tersebar di seluruh kelurahan, dimana upaya yang dilakukan meliputi **pemanfaatan pekarangan rumah** untuk ditanami berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan. Pemanfaatan fungsi KWT ini juga sejalan dengan peningkatan peran Dasawisma di tingkat kelurahan se-Kota Payakumbuh.

1. Ketersediaan Pangan Utama

Secara umum kualitas (Keragaman dan Keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat Payakumbuh ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 87,64 pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh karena ketersediaan 3 kelompok bahan pangan masih rendah tingkat ketersediaannya yaitu Kacang – kacangan, Buah Biji Berminyak dan Sayuran dan Buah. Untuk tahun selanjutnya diupayakan agar kelompok bahan pangan yang menyebabkan PPH rendah akan ditingkatkan produksinya dan akan dilancarkan distribusinya sehingga ketersediaannya mencukupi untuk Kota Payakumbuh. Pada tahun 2019 skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh turun dan berada di bawah skor PPH Konsumsi Provinsi Sumatera Barat.

Tabel II-72
Data Ketersediaan Pangan dan Perbandingan Skor PPH Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Ketersediaan Pangan (Kg/Kap/th)	Skor PPH Konsumsi Provinsi Sumatera Barat	Skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh	Skor PPH Ketersediaan Kota Payakumbuh
1	2015	1.132,86	83,8	NA	79,13
2	2016	1.132,86	84,5	NA	78,84
3	2017	571,26	86,3	NA	81,51
4	2018	594,59	83,7	84,1	84,31
5	2019	541,04	86	82	87,64

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2020

2. Cadangan Pangan

Pada awal RPJMD jumlah cadangan pangan mengacu kepada standar pelayanan minimal Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, dimana setiap kabupaten/kota memiliki cadangan pangan utama beras sebanyak 100 ton. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 11/Permentan/KN/138/2018 disebutkan bahwa cadangan pangan kabupaten/kota adalah 80% dari cadangan pangan provinsi dikalikan dengan rasio jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk provinsi. Atas dasar hal tersebut, maka cadangan pangan Pemerintah Kota Payakumbuh harus tersedia sebesar ±30 ton. Pada akhir RPJMD (tahun 2022) diharapkan minimal 60% sesuai Peraturan Menteri Pertanian di atas dapat terpenuhi. Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2015-2019 terjadi penurunan cadangan/ketersediaan pangan Kota Payakumbuh.

3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Dari data pengambilan sampel bahan pangan di Kota Payakumbuh pada tahun 2019 dari 47 sampel yang diambil sebanyak 38 sampel aman dikonsumsi (80,85%) dan sebanyak 9 sampel tidak aman dikonsumsi. Kedepannya perlu dilakukan pengawasan bahan pangan yang lebih intensif lagi dengan melibatkan tim terpadu yang berwenang dan pemeriksaan sampel dilakukan secara kontinyu 4 kali setahun, agar bahan pangan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi.

Tabel II-73
Data Keamanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah sampel	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel tidak aman	Sampel aman (%)
1	2019	47	38	9	80,85
2	2018	57	48	9	84,2
3	2017	83	70	13	80,4
4	2016	82	69	13	84
5	2015	8	6	2	75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2020

2.4.2.4 Lingkungan Hidup

1. Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara di Kota Payakumbuh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pengaruh semakin tingginya volume kendaraan, hal ini perlu diimbangi dengan penyediaan hutan kota atau tanaman penghijauan untuk menetralisir kembali udara yang tercemar.

Tabel II-74
Indeks Kualitas Udara Ambien Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Parameter	2015	2016	2017	2018	2019
1	SO_2	21,26	4,75	4,73	6,30	5,49
2	CO	6409	600	-	6,50	
3	NO_2	17.76	3.16	4,3	-	5,86
4	O_3	9.6	15.9	-	-	-
5	HC	-	-	-	-	-
6	PM10	142.3	79.1	-	-	-
7	PM2,5	-	-	-	-	-
8	TSP	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2020

2. Pencemaran Sungai

Baku mutu sungai di Kota Payakumbuh di ambil sampel adalah sungai Batang Agam pada dua lokasi, dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 baku mutu Sungai di Kota Payakumbuh dari parameter yang diambil terhadap dua lokasi tingkat kecemarannya tergolong dalam tercemar sedang, artinya kualitas air Sungai batang Agam masuk dalam kategori 2, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-75
Data Baku Mutu Sungai Batang Agam di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

Nama Sungai	No	Parameter Pengujian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Baku Mutu Air Kelas II PP 82/2001
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	
Sungai Batang Agam	1	pH	8,16	8,16	7,57	7,62	7,33	7,29	7,9	7,7	7,24	7,55	6-9
	2	TSS	-	-	-	-	-	-	16,6	27	57,4	20,2	50
	3	BOD	2,5	1,7	2,29	1,44	1,29	2,03	2,11	1,08	3,66	3,66	3
	4	COD	16,8	15,6	6,5	5,6	6,45	22,4	9,29	23,07	5,82	129	25
	5	Fecal coliform	15.000	15.000	12.000	12.000	-	-	4.900	4.900	13.000	>160.000	1.000
	6	Total Coliform	11.000	11.000	13.000	13.000	-	-	17.000	17.000	13.000	160.000	5.000
Status mutu sungai			Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar berat	Tercemar sedang	Tercemar sedang	Tercemar sedang	Tercemar sedang			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2020

3. Kawasan Lindung dan Pemanfaatan Air Tanah

Jumlah kawasan lindung di Kota Payakumbuh dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan berkurangnnya fungsi dan luasan kawasan lindung. Sedangkan untuk jumlah mata air di Kota Payakumbuh dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berjumlah 2 buah, yakni di Bulakan Balai Kandi dan daerah Limbukan. Untuk penggunaan air tanah di Kota Payakumbuh dari tahun 2015 sampai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan, hal ini disebabkan pengalihan penggunaan air tanah ke penggunaan air dengan sistem perpipaan dari PDAM, akan tetapi angka pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Tabel II-76
Jumlah Kawasan Lindung di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kawasan Lindung	Ha	343,11	343,11	343,11	343,11	1.196,156
2.	Mata Air	buah	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Lingkungan HidupKota Payakumbuh, 2020

4. Persentase Pengelolaan Sampah

Volume sampah yang dihasilkan belum seluruhnya dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Hal ini disebabkan karena armada sampah yang ada kurang memadai sehingga belum semua kelurahan yang terlayani. Kota Payakumbuh mensiasati hal ini dengan program 3R dalam rangka pengelolaan sampah yang belum terlayani, serta terus didorong untuk mewujudkan pengelolaan sampah dengan pola 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*).

Tabel II-77
Volume dan Produksi Sampah Kota PayakumbuhTahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	1.460	1.460	1.137	3.482	8.968
2.	Jumlah sampah yang terangkut (ton)	23.360,0	24.820,0	22.732	22.494	26.177
3.	Jumlah volume produksi sampah (ton)	38.069,5	47.012,0	45.464	27.813	29.280
	Persentase	62,88	73,29	69,33	53,79	89,40

Sumber **:** Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2020

5. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Pada tahun 2015 terjadi penambahan TPS yang cukup signifikan, terhitung untuk tahun 2015 terhitung sebanyak 218 TPS dibangun. Untuk tahun 2016 sampai 2018, pemerintah fokus melakukan rehabilitasidan revitalisasi TPS. Pada tabel di bawah ini, jumlah tempat pembuangan sampah menurun dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah sebelum di buang ke TPS. Wadah yang digunakan untuk tempat pembuangan sampah (TPS) terbuat dari tembok dan logam atau material lain seperti kayu dan fiber.

Tabel II-78
Jumlah TPS 3R Perkecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Payakumbuh Timur	1	1	1	-	-
2.	Payakumbuh Barat	2	2	2	1	1
3.	Payakumbuh Utara	-	-	-	-	-
4.	Payakumbuh Selatan	2	2	2	1	1
5.	Lampasi Tigo Nagori	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2020

Dari sisi Tempat Pembuangan Sampah Akhir **(TPA),** Kepalo Koto di wilayah Kota Payakumbuh juga merupakan lokasi TPA Regional yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



Gambar II-9
TPA Regional Payakumbuh
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2020

TPA Regional ini menampung sampah dari beberapa wilayah, antara lain Kota Bukittinggi, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam dan Kota Payakumbuh sendiri. Penanganan TPA Regional sampai saat ini dilakukan dengan sistem *sanitarian landfill*.

Tabel II-79
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah tempat pembuangan sampah TPS (unit)	218	218	218	142	142
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	190,7	190,7	190,7	182,15	218,58
3.	Jumlah penduduk	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
4.	Rasio	0,17	0,17	0,16	1,33	2,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2020

6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Seiring peningkatan jumlah penduduk Kota Payakumbuh, cakupan pelayanan air minum juga meningkat dari tahun ketahun. Karena adanya layanan pada Kabupaten Limapuluh Kota sebesar 2,3%. Kondisi ini kemudian disesuaikan dengan adanya pemisahan layanan antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota pada tahun 2015. Dengan demikian penduduk Kota Payakumbuh yang belum mendapat pelayanan air minum perpipaan dari PDAM pada tahun 2019 adalah 2.928 jiwa atau hanya sebesar 2,16%.

Tabel II-80
Persentase Penduduk dan Cakupan Pelayanan Air Minum
Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Terlayani	Jiwa	116.035	121.187	125.834	128.448	132.645
2.	Persentase Cakupan Layanan	%	90,78	93,36	95,46	96,07	97,84

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

7. Pengawasan Izin Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Cakupan ini dilihat dari jumlah perusahan wajib AMDAL yang telah diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL. Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dari tahun 2015 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2015 berjumlah 152 dokumen pada tahun 2016 menjadi 198 dokumen dan tahun 2017 turun menjadi 152 dokumen, tahun 2018 naik menjadi 155 dokumen dan tahun 2019 naik menjadi 260 dokumen.

Penegakan atas izin lingkungan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh melalui pengawasan lapangan, pemberian peringatan dan fasilitasi percepatan pengurusan izin sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pertimbangan atas pemberian izin lingkungan ini dalam beberapa aspek juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Tabel II-81
Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan	Dokumen	152	198	152	155	260
2.	Kasus Penegakan Hukum Lingkungan	Kasus	3	3	7	13	7
3.	Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Diselesaikan	Kasus	3	3	6	13	7
4.	Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan	Surat Rekomendasi	-	189	139	140	251
5.	Usaha Pengendalian Lingkungan/ Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	Surat Rekomendasi	161	12	13	15	9

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2020

2.4.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berupa penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil dari tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung meningkat, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Untuk melihat persentase penduduk yang telah mengurus dokumen kependudukannya dapat dilihat dari rasio penduduk ber KTP. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah, dan Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

Tabel II-82
Penerbitan Dokumen dan Akta pada Kota Payakumbuh tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kartu Tanda Penduduk	KTP/Lembar	79.430	85.160	87.087	21.457	15.536
2.	Akta Kelahiran	Lembar	3.813	3.539	9.881	3.738	4.456
3.	Akta Kematian	Lembar	30	129	279	835	925
4.	Akta Perkawinan	Lembar	28	1	17	6	26
5	Akta Perceraian	Lembar	4	14	1	0	2
6	Akta Pengakuan dan Pengangkatan Adopsi Anak	Lembar	2	0	0	1	0
7	Akta Ganti Nama	Lembar	21	0	8	28	39
8	Jumlah Kartu Keluarga diterbitkan	Lembar	34.981	36.916	18.811	11.147	11.147

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, 2020

Layanan administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh memiliki keunggulan dalam hal upaya pelayanan administrasi yang berdasarkan ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan. Layanan ini melayani penduduk untuk penerbitan dokumen kependudukan hanya membutuhkan waktu 10 (sepuluh) menit apabila dokumen persyaratan administrasinya mencukupi. Program ini dikenal dengan nama **SEMEDI (Sepuluh Menit Jadi).**

Tabel II-83
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah
Kota Payakumbuh Tahun 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
	KTP		KK		Akte lahir		Akte nikah	
	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
2015	79.430	24.320	34.981	-	3.813	12.100	45.125	55.639
2016	73.273	16.406	34.509	-	36.785	88.823	37.598	45.286
2017	87.087	2.586	37.539	-	44.629	86.429	24.737	34.602
2018	92.202	4.614	39.008	-	56.435	80.466	18.710	38.210
2019	95.672	1.006	39.861	-	63.427	75.292	14.848	49.092

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel II-83 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Payakumbuh yang sudah memiliki KTP, KK dan Akte Kelahiran menunjukkan peningkatan dari tahun 2015-2019, namun untuk dan Akte Nikah cenderung menurun. Hal ini disebabkan semakin baiknya inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

2.4.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pembangunan melalui berbagai pendekatan telah dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Pada Tahun 2008 di Kota Payakumbuh terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 tahun 2008. Pada tahun 2014 dilaksanakan penggabungan kelurahan dari 76 menjadi 62 kelurahan. Tahun 2015 kembali dilaksanakan penggabungan kelurahan menjadi 48 kelurahan yang berlaku mulai tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi penggabungan Kelurahan Tanah Mati dan Padang Datar, sehingga jumlah kelurahan saat ini adalah 47 kelurahan.

Tabel II-84
Kondisi Gedung Kantor Lurah per-Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Kondisi			Jumlah Kantor Lurah
		Baik	Sedang	Kurang	
1	Payakumbuh Barat	9	1	7	17
2	Payakumbuh Utara	7	1	1	9
3	Payakumbuh Timur	8	-	1	9
4	Payakumbuh Selatan	5	1	-	6
5	Lamposi Tigo Nagori	-	5	1	6
Total		**29**	**8**	**10**	**47**

Sumber : Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, 2019

Pemerintah kelurahan sebagai pemerintahan terendah di Kota Payakumbuh merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, maka kelurahan harus dilengkapi dengan fasilitas gedung kantor dan prasarana yang mencukupi. Kondisi kantor lurah yang ada saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kantor dengan kondisi baik/representatif sebanyak 29 unit atau 61,70% dari 47 kelurahan. Kondisi baik disebabkan gedung kantor masih baru, penataan ruang sudah baik, cukup luas, gedung sudah milik sendiri, dan ruang kantor sudah tidak digunakan

bersama-sama dengan unsur-unsur yang ada di kelurahan. Kantor kondisi ini banyak pada kelurahan yang bergabung.

2. Kondisi kantor sedang sebanyak 8 unit atau 17,02%. Kondisi ini berupa gedung kantor yang masih baik, tapi bangunan sudah lama, ruangan belum memadai, bangunan masih didirikan pada tanah masyarakat yang disewa.
3. Kantor dengan kondisi kurang sebanyak 10 unit atau 21,28%. Kondisi kantor yang kurang/tidak representatif dapat dikatakan karena kondisi kantor kurang layak disebabkan kantor kecil, ruangan sempit, tidak ada penataan ruang yang jelas, kantor menumpang pada tanah masyarakat, pemakaian ruangan masih bergabung dengan unsur-unsur yang ada pada kelurahan seperti PKK, LPM.

Untuk menggerakkan partisipasi dan pembangunan di kelurahan, terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti LPM. Masing-masing kelurahan memiliki satu organisasi LPM yang saat ini berjumlah 47 LPM, LPM tersebut aktif dan sangat berperan dalam menunjang pembangunan.

Tabel II-85
Kondisi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Payakumbuh Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah LPM		Keaktifan			
				2019		2020	
		2019	2020	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
1	Payakumbuh Barat	17	17	17	-	17	-
2	Payakumbuh Utara	9	9	9	-	9	-
3	Payakumbuh Timur	9	9	9	-	9	-
4	Payakumbuh Selatan	6	6	6	-	6	-
5	Latina	6	6	6	-	6	-

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh, 2020

2.4.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Trend pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Payakumbuh tumbuh secara linier.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa setiap kecamatan di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan pertambahan penduduk, walaupun begitu laju pertumbuhan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar 0,27%, dari yang awalnya 1,67% menjadi 1,40%. Pertambahan atau pengurangan penduduk setiap tahunnya dipengaruhi oleh proses alami, dan migrasi penduduk; masuk atau keluar dari suatu daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, pertumbuhan penduduk bernilai positif, yang diartikan sebagai tingkat kelahiran dan migrasi masuk di Kota Payakumbuh lebih besar dibandingkan tingkat kematian dan migrasi keluar Kota Payakumbuh.

Prediksi untuk pola pertumbuhan penduduk melalui pertumbuhan alami, dan melalui migrasi merupakan pola perhitungan yang kompleks yang tidak hanya memperhitungan satu indeks pengukuran saja, karena dalam perhitungan pertumbuhan penduduk didasarkan dari tingkat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik dari kota yang dituju maupun yang ditinggalkan.

Tabel II-86
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Payakumbuh Barat	49.450	50.305	50.616	51.340	53.266
2.	Payakumbuh Timur	27.634	28.017	29.106	29.522	28.477
3.	Payakumbuh Utara	30.679	31.126	30.946	31.389	32.269
4.	Payakumbuh Selatan	10.453	10.615	11.051	11.209	11.406
5.	Lamposi Tigo Nagori	9.610	9.759	10.100	10.244	10.155
6.	Total Jumlah Penduduk	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
7.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,67%	1,69%	1,69%	1,43%	1,40%

Sumber *:* Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020

2. Tingkat Kepesertaan KB Aktif atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)

Tingkat Kepesertaan KB Aktif atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) merupakan persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2019, untuk Kota Payakumbuh nilainya masih di bawah 80%, yaitu sekitar 69,07%, masih sama dengan tahun 2018.

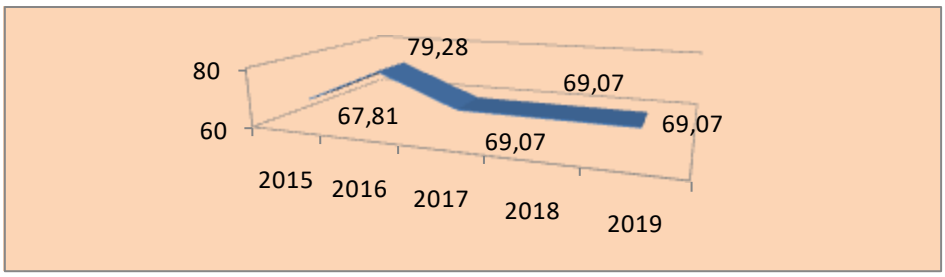


Diagram II-19
Tingkat Kepesertaan KB Aktif atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) di Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2020

3. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB merupakan perbandingan jumlah akseptor KB (peserta KB aktif) dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Perkembangan rasio akseptor KB ini cenderung mengalami fluktuasi, namun penambahan jumlah akseptor KB tidak sebanding dengan penambahan PUS sendiri. Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan program Keluarga Berencana dan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) setiap tahun.

Tabel II-87
Perkembangan Peserta KB Aktif Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah akseptor KB (Pasang)	15.098	12.895	14.043	13.217	13.508
2.	Jumlah PUS (pasang)	20.041	19.016	19.740	19.137	19.213
3.	Rasio Akseptor KB (%)	75,34	76,36	71,14	69,07	70,30

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2020

Sejak tahun 2015-2019 terjadi penurunan dalam Rasio Akseptor KB, dimana pada tahun 2015 Rasio Akseptor KB sebesar 75,34%, dan pada tahun 2019 menjadi 70,30%.

Tabel II-88
Pencapaian Peserta KB Baru Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Mix Kontrasepsi	2015		2016		2017		2018		2019	
		PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian	PPM	Pencapaian
1	I U D	724	557	562	694	647	680	729	543	802	503
2	M O P	8	12	24	0	2	8	6	5	8	6
3	M O W	98	92	163	195	150	185	150	105	198	171
4	I M P	347	296	366	376	373	350	466	292	317	228
5	SUNTIK	853	1.234	1688	1545	1.476	1.912	1.627	1.713	1.583	1.094
6	P I L	152	143	246	313	1.013	941	544	289	438	157
7	KONDOM	160	121	82	205	194	213	238	207	241	280
Jumlah		3.645	2.234	3131	3131	3.855	3.855	3.760	3.760	3.587	2.439
Pencapaian (%)			104,82		106,29		111,34		83,88		68,00

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2020

Pencapaian peserta KB baru cenderung menurun dari tahun ke tahun, dimana dibandingkan antara tahun 2018 dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat tajam dengan gap lebih dari 15%

4. Petugas dan Kader KB

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Payakumbuh mempunyai petugas KB sebanyak 13 orang yang tersebar di 47 kelurahan, dan dibantu oleh 280 orang kader KB. Rata–rata 1 (satu) orang petugas KB melayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kelurahan. Kader adalah seorang yang mampu dan suka rela berpartisipasi menyumbangkan pemikiran tenaga dan waktu nya untuk membantu pengelolahaan kegiatan program KB di kelurahan. Secara kuantitas dapat dilihat jumlah kader KB ini telah mencukupi, namun secara kualitas perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM kader KB tersebut.

2.4.2.8 Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkatan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah Kota Payakumbuh selama 1 tahun, jenis angkutan umum yang digunakan adalah bis. Untuk tahun 2016 sampai 2019 terjadi penurunan pada jumlah penumpang angkutan umum. Hal ini disebabkan adanya angkutan sewa "travel" yang bisa antar jemput ke lokasi keberangkatan dan lokasi tujuan. Di samping itu, juga adanya kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi melalui uang muka ringan yang berdampak pada menjamurnya kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat.

Tabel II-89
Jumlah Arus Penumpang Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penumpang	143.876	162.676	117.617	82.654	82.098

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2020

2. Rasio izin trayek

Rasio izin trayek di tidak ada perubahan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, karena tidak adanya penambahan izin trayek angkutan dalam kurun waktu tersebut. Ini menandakan bahwa kurangnya minat perusahaan melakukan usaha di bidang angkutan umum disebabkan berkurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum serta adanya kemudahan dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Perkembangan ijin trayek selama tahun 2015-2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-90
Jumlah Izin Trayek dan Rasio yang Dikeluarkan Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Izin Trayek	Dokumen	110	105	105	105	105
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
3.	RasioTrayek dengan Jumlah Penduduk	-	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0.0008

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2020

3. Jumlah Terminal Bis

Di Kota Payakumbuh pada tahun 2019 terdapat tiga buah terminal yang terdiri dari 1 terminal bis antar kota antar propinsi (Terminal Koto Nan Ampek) yang sekarang sudah menjadi kewenangan provinsi dan 2 terminal angkutan kota/pedesaan yaitu Terminal Labuah Baru dan Pos Kota. Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda. Saat ini kewenangan pengelolaan terminal bus Koto Nan IV (tipe B) berada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 2 terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan (tipe C) dikelola Pemerintah Kota Payakumbuh. Pengelolaan terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan belum beroperasi secara optimal dikarenakan rendahnya aksesibilitas pengguna jasa angkutan ke terminal membuat penumpang angkutan umum lebih memilih naik dan turun langsung di pusat-pusat kegiatan. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan terminal penumpang tersebut perlu dilakukan penertiban terhadap terminal bayangan, meningkatkan pengamanan dan pelayanan di terminal serta meningkatkan kualitas fasilitas di terminal.

4. Angkutan Darat

Angkutan darat yang dimaksudkan disini adalah semua jenis angkutan umum yang terdiri dari mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang. Tahun 2015 perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang adalah 1,84%. kondisi ini meningkat signifikan pada tahun 2019 dengan persentase perbandingan menjadi 3,83%. Ini disebabkan adanya penurunan jumlah penumpang dan meningkatnya jumlah angkutan darat.

Tabel II-91
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Darat Kota PayakumbuhTahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Angkutan Darat	2.655	2.786	2.664	2.978	3.147
2.	Jumlah Penumpang	143.876	162.676	117.617	82.654	82.098
3.	Persentase Perbandingan	1,84	1,71	2,26	3,6	3,83

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2020

5. Perparkiran

Parkir kendaraan merupakan permasalahan yang cukup pelik di Kota Payakumbuh, apalagi dengan meningkatnya volume kendaraan terutama di saat keramaian dan hari libur, karena Kota Payakumbuh belum memiliki lahan parkir yang representatif. Sampai saat ini masih menggunakan tepi jalan umum sebagai area/lokasi parkir (*on street*). Lokasi parkir tersebut terletak di pusat kota dan pusat perbelanjaan, sedangkan kondisi lalu lintas semakin padat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu luas area/lokasi parkir yang tidak sebanding dengan jumlah pertambahan kendaraan mengakibatkan pelayanan terhadap pengguna jasa parkir belum maksimal. Jumlah titik parkir ditepi jalan umum dalam Kota Payakumbuh sebanyak 23 titik. Jumlah tersebut masih sangat kurang sehingga perlu dilakukan penambahan lokasi parkir baru untuk mengimbangi potensi parkir akibat pertumbuhan kendaraan, selain penambahan titik parkir *on street* diperlukan juga titik parkir *off street* berupa gedung parkir maupun taman parkir. Disamping meningkatkan ketersedian lokasi parkir, peningkatan kualitas pengelolaan parkir juga diperhatikan dari sisi pelayanan petugas parkir dengan cara memberikan pembinaan secara berkala kepada petugas parkir sehingga petugas parkir tersebut memahami tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan perparkiran.

6. Pelanggaran lalu Lintas

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Payakumbuh. Pelanggaran lalu lintas ini terutama disebabkan rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Secara bertahap dengan pembinaan/penyuluhan dan pengawasan yang semakin ketat dari pihak Satlantas dan Dinas Perhubungan secara terus menerus akan menambah pengetahuan masyarakat dalam berlalu lintas. Selain pembinaan/penyuluhan Dinas Perhubungan juga melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dijalan. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dilaksanakan di daerah rawan hambatan, persimpangan, sekolah, dan perkantoran. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat pengguna jalan sehingga mampu menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

Tabel II-92
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	6.520	7.041	6.689	7.871	5.862

Sumber **:** Polres Kota Payakumbuh, 2020

7. Prasarana Jalan

Kelengkapan prasarana jalan merupakan salah satu jaminan terhadap kelancaran arus transportasi baik orang maupun barang. Dengan pertambahan jumlah kendaraan secara kontinu, ruas jalan dan dinamika lalu lintas yang semakin kompleks dibutuhkan ketersediaan prasarana jalan yang memadai. Prasarana jalan meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung jalan lainnya. Sampai dengan tahun 2019 masih banyak ruas jalan di Kota Payakumbuh, persimpangan dan sekolah serta pusat keramaian yang belum dilengkapi prasarana jalan. Untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana jalan tersebut adalah dengan meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan berupa perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana jalan dalam rangka

mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Tabel II-93
Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rambu (buah)	882	995	995	1.025	1.077
	Jumlah RPPJ (buah)	27	27	27	27	27
	Jumlah Papan Nama Jalan (buah	246	246	246	246	246
2.	Jumlah traffic light (tiang)	48	48	48	52	56
	Jumlah warning light (tiang)	24	31	34	38	40
3.	Jumlah marka (m2)	30.340	30.340	30.340	30.340	30.340
4.	Jumlah halte (buah)	8	8	8	7	7
5.	Jumlah pagar pembatas jalan portable(buah)	120	120	120	120	120

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2020

2.4.2.9 Komunikasi dan Informatika

Perkembangan komunikasi dan informatika menjadi salah satu kesempatan untuk meningkatkan keterbukaan terutama dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih. Dinas Komunikasi dan Informatika yang mewadahi pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika ini telah berupaya mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan dan urusan kepemerintahan. Pada tahun 2015 telah disusun *Master Plan E-Government*untuk periode Tahun 2015 – 2020, sehingga acuan pengembangan Teknologi Informatika (TI) di Kota Payakumbuh telah terarah sesuai dengan dokumen tersebut. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Jumlah Hotspot

Jumlah hotspot yang disediakan pemerintah Kota Payakumbuh dimulai dari 2013 sebanyak 1 unit sampai tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 10 unit terus meningkat tahun 2016 sebanyak 15 unit dan tahun 2017 ditingkatkan dengan titik Hotspot FO di meeting point untuk publik melalui Hotspot PT Telkom, sedangkan pada tahun 2018 ditingkatkan dengan radio penerima dan pemancar pada 15 titik perkantoran dan pada tahun 2019 berkurang menjadi 11 titik.

Tabel II-94
Jumlah Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Hotspot	Unit	10	15	15	15	11

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, 2020

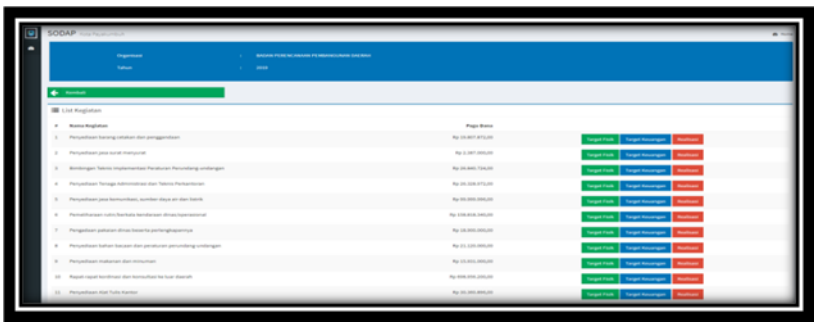
Tabel II-95
Lokasi Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2019

No	Lokasi	Jenis	Jumlah
1	Tugu Adipura	public	1
2	Ngalau Indah	public	1
3	Perkantoran Bukik Sibaluik	Private	2
4	GOR M. Yamin	public	1
5	Lapangan Tenis Gelanggang	public	1
6	Balaikota	Private	2
7	Kantor Persatuan Wartawan Indonesia	public	1
8	Kantor PKK	public	1
9	Mall Pelayanan Publik	public	1
	Jumlah		11

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, 2020

2. Integrasi Sistem Informasi Teknologi

Di samping itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga terus berupaya meningkatkan pelayanan adminsitrasi kepemerintahan dan layanan masyarakat melalui integrasi sistem informasi teknologi pada Sub Domain Web Resmi Kota Payakumbuh, yakni http://www.payakumbuhkota.go.id

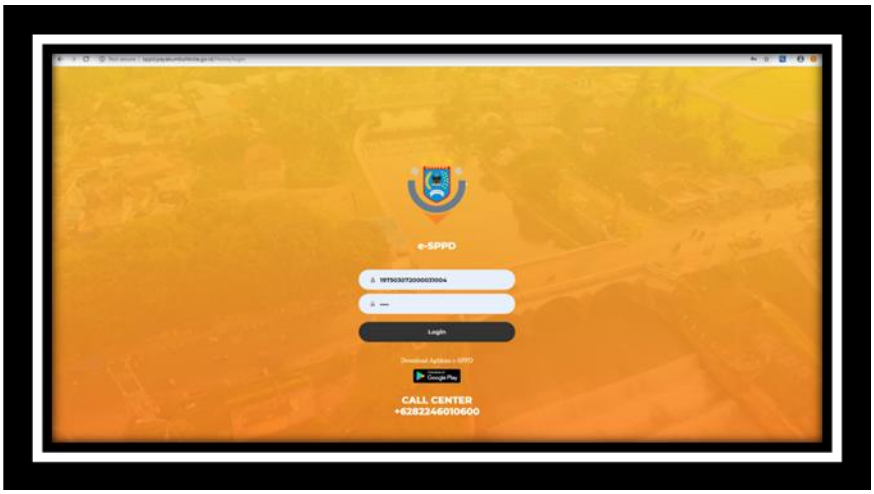


Gambar II-10
Salah Satu Aplikasi Terintegrasi, Aplikasi SODAP Kota Payakumbuh

Sistem informasi yang telah terintegrasi di Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, terdiri dari

- ✓ Aplikasi e-Musrenbang, e-Pokir dan SIPKD
- ✓ Aplikasi Pengelolaan Jaringan Kota
- ✓ Aplikasi CCTV Jalan Raya
- ✓ Aplikasi SAKIP (Bagian Organisasi SETDAKO)
- ✓ Aplikasi Sicantik (DMD-PTSP)
- ✓ Aplikasi SIWARTA (Kominfo)
- ✓ Aplikasi SIWASPADA (Kominfo)
- ✓ Aplikasi Kliping (Kominfo)
- ✓ Aplikasi SIKOPAY (protokoler SETDAKO)
- ✓ SMS Centre RSUD (Dinas Kesehatan)
- ✓ Aplikasi AKIP Online (BKPSDM)

- ✓ Aplikasi E-SPPD
- ✓ Aplikasi SODAP untuk Pengendalian dan Evaluasi
- ✓ Aplikasi E-Kinerja



Gambar II-11
Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi E-SPPD

2.4.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi di Kota Payakumbuh. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi daerah berbasis kerakyatan. Jumlah koperasi Aktif pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding dengan jumlah koperasi pada tahun 2018, sedangkan jumlah koperasi sehat mengalami peningkatan menjadi 22,54% dari tahun sebelumnya hanya 21,25%.

Tabel II-96
Perkembangan Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah koperasi aktif	123	126	133	80	71
2.	Jumlah koperasi	153	158	144	145	149
3.	Persentase koperasi aktif	80,3	81	92,4	55,2	47,7
4.	Persentase koperasi sehat	10,61	11,36	12,03	21,25	22,54

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2020

Mulai tahun 2018, Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan Program dan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Prinsip dasarnya adalah lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas koperasi. Hal ini menyikapi banyaknya koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif (sesuai ketentuan UU 25/1992 dan Permenkop No. 9/2018) tapi masih terdapat dalam data koperasi nasional dan daerah sebagai koperasi aktif. Kebijakan ini seiring dengan makin selektifnya input data pada ODS (Online Data System) Kemenkop dan UKM RI, dimana data yang diinput adalah data koperasi berdasarkan data pelaksanaan RAT terakhir (dan RAT 3 tahun terakhir) yang dikategorikan untuk koperasi aktif. Karena hal ini terkait juga dengan penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi) Jumlah izin usaha simpan pinjam yang hanya diterbitkan untuk koperasi aktif. Konsekuensinya kita

harus mempedomani ketentuan perundang-undangan tersebut bahwa kategori koperasi aktif adalah yang melaksanakan RAT dan tidak melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut masuk kategori tidak aktif dan kemungkinan dikategorikan untuk dibubarkan.

2. Jenis Koperasi

Jenis koperasi di Kota Payakumbuh cukup beragam, yang dominan adalah Koperasi Serba Usaha, Koperasi Fungsional dan Koperasi Tani. Jenis dan jumlahnya digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II-97
Jenis Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Jenis koperasi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koperasi Unit desa	5	5	5	5	5
2	Koperasi Fungsional	43	43	43	43	43
3	Koperasi Karyawan	8	8	8	8	8
4	Koperasi serba Usaha	51	53	43	43	43
5	Koperasi wanita	7	7	7	7	7
6	Koperasi Tani	20	20	15	15	15
7	Koperasi Pondok Pesantren	2	2	2	2	2
8	Koperasi Simpan Pinjam	5	5	6	6	7
9	Koperasi Angkutan Darat	1	1	1	1	1
10	Koperasi Pasar	2	2	0	0	0
11	Koperasi Peternak Sapi	2	2	2	2	2
12	Koperasi PEPABRI	1	1	1	1	1
13	Koperasi WERDATAMA	1	1	1	1	1
14	Koperasi Veteran	1	1	1	1	1
15	Koperasi Kepolisian	1	1	1	1	1
16	Koperasi Pedagang Kaki Lima	1	1	1	1	1
17	Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah	5	5	5	5	5
18	Koperasi Pemasaran	0	0	2	2	3
19	Koperasi Produsen	0	0	0	1	3
JUMLAH		**156**	**158**	**144**	**145**	**149**

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2020

Dibandingkan dengan tahun 2018, pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah koperasi dimana ada penambahan koperasi yang terdiri dari 1 (satu) koperasi simpan pinjam, 1 (satu) koperasi pemasaran dan 2 (dua) koperasi produsen.

3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UMKM menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UMKM. Pada tahun 2019, persentase UMKM di Kota Payakumbuh mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 dari 15,27% menjadi 15,49%.

Tabel II-98
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

Jenis usaha	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Usaha Mikro	Unit	34.814	32.751	15.262	16.714	16.770
Usaha Kecil	Unit	4.021	5.225	5.471	2.565	2.615
Usaha Menengah-Besar	Unit	204	210	214	448	458
Persentase UKM terhadap UMKM	%	10,82	16,60	27,14	15,27	15,49
Total UMKM	Unit	39.039	38.186	20.947	19.727	19.843

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2020

2.4.2.11 Penanaman Modal

Kinerja pembangunan daerah Kota Payakumbuh pada urusan Penanaman Modal dapat digambarkan melalui indikator jumlah investor, nilai investasi dan rasio daya serap tenaga kerja.

Tabel II-99
Perkembangan Penanaman Modal Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	11	28	23	22	6
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	milyar	37,1	134,7	112,08	49,4	16,1
3	Nilai realisasi investasi	milyar	160,2	240,7	229,3	231,5	236,6
4	Kenaikan /penurunan nilai realisasi investasi	milyar	36	14,8	54,3	2,2	5,1
5	Lama proses perijinan	hari	7	7	7	7	7

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Payakumbuh, 2020

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 terjadi kenaikan realisasi investasi sebesar 1,1% dibandingkan tahun 2018, akan tetapi nilai investasi yang berasal dari perusahaan skala nasional dan asing turun secara signifikan dari Rp. 49,4 milyar pada tahun 2018 menjadi hanya Rp. 16,1 milyar pada tahun 2019. Ini disebabkan terutama karena perekonomian nasional yang cenderung lesu pada tahun 2019. Peningkatan realisasi investasi lebih besar disebabkan adanya investor lokal yang menanamkan modalnya di Kota Payakumbuh.
Untuk mendukung iklim usaha di Kota Payakumbuh, maka Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan regulasi terkait Izin usaha konstruksi pada tahun 2014 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014) dan regulasi terkait penanaman modal pada tahun 2017 (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017).
Pembentukan MPP di berbagai daerah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2017 telah mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2019 survei tentang efektivitas MPP dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian Daerah, dimana hasil survei yang dilaksanakan di 11 Daerah yang memiliki MPP menunjukkan bahwa MPP mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga tahun 2020, telah dibentuk 24 MPP di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, dengan rincian dibentuk di 1 provinsi, 12 kabupaten dan 11 kota. "Selanjutnya pada tahun 2020 ini, akan dibentuk 33 MPP, dengan rincian dibentuk di 2 provinsi, 25 kabupaten dan 6 kota.

Guna menunjang pelayanan publik dan kemudahan investasi Kota Payakumbuh sebagai salah satu kota di antara 6 kota di Indonesia telah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sejak tahun 2018 dan *launching* pelayanan tahun 2019. Ini menjadi upaya pemerintah

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Mal Pelayanan Publik merupakan bagian dari pengelolaan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah; penyelenggaraan MPP merupakan terobosan pelayanan publik yang diharapkan tidak berpotensi menimbulkan kelembagaan baru.

Mall Pelayanan Publik didirikan sesuai dengan amanat Permenpan Nomor 23 Tahun 2017 dengan tujuan agar pelayanan tersebut bisa terintegrasi, satu kali ke Mall pelayanan publik masyarakat bisa mengurus 1 atau lebih pelayanan yang dibutuhkannya. Satu layanan spesifik adalah kemudahan dalam membuat paspor, sebelum ada MPP pengurusannya ke Kabupaten Agam, namun sekarang dengan adanya MPP di Kota Payakumbuh pelayanan lebih efektif baik dari segi waktu maupun biaya. Untuk saat ini kita sudah melayani 168 jenis layanan dengan 26 outlet, 17 counter di 9 ruangan, dan terpusat di lantai satu Kantor Walikota Payakumbuh di Kelurahan Tigo Koto di Balai, jalan Veteran nomor 70 kec. Payakumbuh utara.

Tabel II-100
Potensi Investasi Kota Payakumbuh Tahun 2019

No	Potensi Investasi	Lokasi (Kelurahan jorong, desa/nagari dan kecamatan)	Luas Lahan (Ha) Dan Status Kepemilikan Lahan	Perkiraan nilai investasi	Sarana dan prasarana penunjang investasi	Target/ peluang pasar	Dokumen pendukung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Objek Wisata Ampangan	Kel. Kapalo Koto Ampangan Kec. Payakumbuh Selatan	20 Ha, lahan milik perorangan dan ulayat	Rp. 153 M	Kondisi jalan bagus, tersedianya air bersih, telekomunikasi lancar	Lokal, Domestik, Internasional	FS Objek Wisata Ampangan dan Bukit Panjang Patah Sembilan 2013
2	Kawasan Wisata Batang Agam	Sepanjang Batang Agam 3 Km, mulai dari Sungai Pinago sampai RTH Ibuh Kec. Payakumbuh Barat	3 Ha sepanjang batang agam, lahan milik pemerintah	Rp. 8 M	Kondisi jalan bagus, tersedianya air bersih, telekomunikasi lancar	Lokal, Domestik, Internasional	Study Kelayakan Tahun 2019 (dalam proses penyusunan)
	a. Sektor Wisata - Pembangunan Pujasera Kota Payakumbuh	Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Ibuh, (antara Tepi Sungai dan Pasar Ibuh)	Milik Pemda	Rp. 1.069.820.617	Kondisi jalan bagus, telekomunikasi lancar	Lokal, Domestik, Internasional	Kajian Potensi Sumberdaya Yang Terkait Investasi di kota Payakumbuh.
	b. Pelabuhan Air Taman Bermain Wisata Air Jembatan Ratapan Ibu	Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Ibuh, Tepi Sungai, samping Pasar Ibuh	Milik Pemda	Rp. 445.484.428	Kondisi jalan bagus, telekomunikasi lancar	Lokal, Domestik, Internasional	Kajian Potensi Sumberdaya Yang Terkait Investasi di kota Payakumbuh.
	c. Cotage dan Homestay Sepanjang Kawasan Batang Agam	Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Tanjung Pauh	Milik Pemda	Rp. 89.445.528	Kondisi jalan bagus, telekomunikasi lancar	Lokal, Domestik, Internasional	Kajian Potensi Sumberdaya Yang Terkait Investasi di kota Payakumbuh.
3	Objek Wisata Bendungan Talawi	Kel. Ompang Tanah SirahKec. Payakumbuh Utara	5 Ha, lahan milik pemerintah	Rp. 5 M	Kondisi jalan bagus, tersedianya air bersih, telekomunikasi lancar	Lokal, Domestik, Internasional	Study Kelayakan Tahun 2016
4	Industri Rendang	Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara	2 Ha, lahan milik pemerintah	Rp. 2 M	Kondisi jalan bagus, telekomunikasi lancar, sudah adanya Gedung Sentra IKM Rendang	Lokal, Domestik, Internasional	

No	Potensi Investasi	Lokasi (Kelurahan jorong, desa/nagari dan kecamatan)	Luas Lahan (Ha) Dan Status Kepemilikan Lahan	Perkiraan nilai investasi	Sarana dan prasarana penunjang investasi	Target/ peluang pasar	Dokumen pendukung
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Industri Pengolahan Sirsak Beku dan Sari Sirsak	Terminal Agribisnis Kel. Koto Panjang Kec. Payakumbuh Timur	0,5 Ha, lahan milik pemerintah	Rp. 1 M	Kondisi jalan bagus, telekomunikasi lancar	Lokal, Domestik, Internasional	
6	Stadion Sepak Bola bertaraf Internasional dan Sport Centre	Kel. Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat	1 Ha, lahan milik pemerintah		Kondisi jalan bagus, telekomunikasi lancar	Lokal, Domestik, Internasional	
7	Objek Wiisata Ngalau	Kawasan Ngalau Indah Kel. Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat	10 Ha, lahan milik masyarakat/ulayat		Kondisi jalan bagus, tersedianya air bersih, telekomunikasi lancar	Lokal, Domestik, Internasional	
8	Wisata Embung Dareh Bulakan	Kel. Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan	6 Ha	Rp. 13 M	Kondisi jalan bagus, telekomunikasi lancar	Lokal, Domestik, Internasional	
9	Industri Pengolahan Kakao	Kel. Kapalo Koto Kec. Payakumbuh Selatan	1 Ha, milik masyarakat	Rp. 12,71 M	Kondisi jalan bagus, telekomunikasi lancar	Lokal, Domestik, Internasional	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 9 (sembilan) potensi investasi Kota Payakumbuh yang menjadi rekomendasi Pemerintah yang bisa ditawarkan kepada investor dan wisatawan. Kepemilikan lahan dimiliki oleh pemerintah daerah serta sudah tersedia sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kegiatan usaha.

2.4.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi merupakan salah satu sasaran strategis RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022. Untuk mencapainya Pemerintah Kota mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana olah raga berupa pembangunan GOR yang berskala nasional yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat. Prestasi atlet Kota Payakumbuh di level regional dan nasional cukup menggembirakan dengan perolehan medali pada setiap event olah raga yang diikuti sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel II-101
Prestasi Olahraga Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Cabang Olah Raga	2015		2016		2017		2018		2019	
		Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
1	Angkat Berat	-	-	11	-	-	-	12	-	-	-
2	Atletik	-	-	2	-	-	-	4	-	12	1
3	Balap Sepeda	-	-	3	-	-	-	0	-	-	-
4	Bola Basket	1	-	1	-	-	-	2	1 (Popnas)	-	-
5	Bola Volly	-	-	1	-	-	-	0	1 (Popwil)	1	-

No	Cabang Olah Raga	2015		2016		2017		2018		2019	
		Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
6	Billyard	-	-	4	-	-	-	3	-		
7	Bulu Tangkis	-	-		-	-	Juara III O2SN Nasional	0	Juara III O2SN Nasional	14	-
8	Catur	-	-	5	-	-	1	3	1	2	-
9	Dayung	-	-	7	-	-	-	6	-		-
10	Judo	-	-	15	-	-	-	9	-	-	-
11	Karate	8	-	8	-	-	24	6	24	16	-
12	Kempo	-	-	4	-	-		4	-	-	-
13	Menembak	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-
14	Panjat Tebing	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
15	Pencak Silat	6	-	8	-	-	-	3	-	-	-
16	Renang	-	-	9	-	-	-	22	1 (Spesial Olimpics Indonesia / SOIna)	2	38
17	Senam	-	-	15	-	-	-	13	-	-	-
18	Sepak Bola	-	-	1	-	-	-	0	-	-	-
19	Sepak Takraw	-		1	-	-	-	2	-	-	-
20	Taekwondo	3	-	4	-	-	7	5	7	9	1
21	Tarung Drajat	-	-	4	-	-	-	8	-	3	-
22	Tenis Lapangan	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-
23	Tinju	-	-	7	-	-	2	6	2	-	1
24	Wushu	-	-	11	-	-	-	5	-	-	-
25	Aero Sport	-	-	9	-	-	2	10	2	-	9
26	Soft Tenis	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-
27	Panahan	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-
28	Muaythai	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
29	BOCCE (Tolak Peluru)	-	-		-	-				1	-

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2020

2. Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah sarana dan prasana olah raga di Kota Payakumbuh cukup signifikan, namun kualitasnya belum representatif untuk even-even skala nasional.

Pada tahun 2019 telah dibangun stadion olah raga dengan berstandar nasional di area Sungai Batang Agam Kelurahan Tanjung Pauh yang pengerjaannya paralel dengan rencana penyiapan spot wilayah Normalisasi Sungai Batang Agam yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 lalu. Pembangunan stadion olah raga tersebut didanai melalui Dana Alokasi

Khusus dan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2019. Namun sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan, karena perlu finalisasi pengerjaan sampai dapat dimanfaatkan.



Gambar II-12
Rencana Stadion Olah Raga Yang Dibangun di Area Sungai Batang Agam Kota Payakumbuh

Selanjutnya terkait jenis sarana dan prasarana olahraga yang ada sampai saat ini di wilayah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel II-102
Sarana Prasarana Olahraga di Kota Payakumbuh Tahun 2019

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi
1	Lapangan Sepak Bola	10 Lapangan	Sawah Padang; Kubu Gadang; Sicincin Mudiak; Subarang Batuang; Parambahan; Padang Kaduduak; Talawi; Balai Jariang Utara; SMAN 2; SMAN 3
2	Lapangan Basket	20 Lapangan	Kubu Gadang; Daya Bangun; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2; SMKN 3; Ngalau Indah Medan Nan Bapaneh
3	Lapangan Volley	53 Lapangan	Kubu Gadang (GOR); Balai Jariang Timur; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; SMPN 10; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2, sebanyak 2 bh;SMKN 3; SMKN 4; SMKN 5; Padang Cubadak; Nan Kodok; Polsek Kaning Bukit; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Tarok; Balai Betung; Bodi; Muaro; Balai Gadang; Balai Cacang; Balai Baru; Labuah Baru; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Padang Tiakar Hilir; Kubu Gadang (Jl. Jeruk); Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Kubu Gadang (Dekat PHI); Koto Baru Payobasuang; Napar; Tanah Mati; Ibuh; Tambago; Bonai;
4	Lapangan Bulu Tangkis	35 Lapangan	Ibuh; GOR M. Yamin; Jax's Bonai Tanjung Gadang; Polsek Kota Kaniang Bukit; Kaning Bukit; SMAN 2, Indoor 2 bh; SMKN 2 indoor, 3 bh; GOR Kantor Bupati 50 Kota Lama; Balai Jariang Timur; Nan Kodok; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Tarok; Balai Betung; Muaro; Balai Gadang; Balai Baru; Labuah Baru; Padang Cubadak; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Koto Baru Payobasuang; Tanah Mati; Padang Karambia; Koto Baru Balai Janggo; Padang Tinggi
5	Lapangan Tenis	8 Lapangan	Tenis Indoor Kubu Gadang, 2 bh; Tenis Outdoor Kubu Gadang, 2 bh, Tenis Outdoor SMAN 2,Tenis Outdoor MAN 2, Tenis Outdoor Batalyon 131 BS, Tenis Outdoor SMAN 3

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi
6	Lapangan Atletik	2 Lapangan	Gelanggang Kubu Gadang, Lapangan Sicincin
7	Kolam Renang	1 Lapangan	Ngalau Indah
8	Gelanggang/ Balai Remaja	4 Lapangan	Ngalau Indah; Gelanggang Kubu Gandang; GOR M. Yamin; Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah
TOTAL		**131**	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2020

2.4.2.13 Statistik

Sampai saat ini Kota Payakumbuh belum memiliki sistem aplikasi data secara elektronik, sehingga belum terwujud pengarsipan data tahunan yang tertata dengan baik. Ini mengakibatkan sulitnya *updating* data dan terjadinya perubahan data setiap tahun yang disampaikan oleh penyedia data. Sistem aplikasi yang digunakan saat ini adalah aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.

2.4.2.14 Kebudayaan

Perkembangan urusan kebudayaan di Kota Payakumbuh dapat dilihat dari indikator "kinerja jumlah pameran/expo, jumlah sarana dan penyelenggaraan festifal seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta jumlah grup kesenian". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-103
Perkembangan Kinerja Urusan kebudayaan Kota PayakumbuhTahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pameran/ Expo per tahun	Kali	1	1	1	3	13
2.	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	Kali	5	6	9	38	40
3.	Jumlah Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya	Buah	2	2	2	3	4
4.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan	Unit	20	22	22	26	26
5.	Total benda, situs dan kawasan yg dimiliki	Unit	20	22	22	26	26
6.	Jumlah Grup Kesenian yang Aktif	Grup	62	36	70	70	15

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, 2020

2.4.2.15 Perpustakaan

Seiring dengan perkembangan multi media yang memberikan kemudahan akses terhadap data, berita dan informasi, sehingga menyebabkan perpustakaan daerah harus menghadapi tantangan dalam pemanfaatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru. Untuk mewujudkan kondisi perpustakaan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka perpustakaan harus diubah sistem operasionalnya dari perpustakaan manual/tradisional menjadi perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (perpustakaan digital). Konsep pengembangan kepustakaan di Kota Payakumbuh mengambil prinsip "**Literasi Menuju Kesejahteraan**", prinsip ini mengupayakan peningkatan budaya baca ditengah-tengah masyarakat.

Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan setiap perpustakaan secara bertahap dapat mengejar ketertinggalannya dari perpustakaan-perpustakaan yang lebih maju dan lebih modern serta dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Selain hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar dalam mengelola perpustakaan. Untuk tahun 2019, terlihat bahwa judul koleksi buku yang ada di perpustakaan dibandingkan dengan jumlah buku, persentasenya masih rendah yaitu dibawah 44,6%. Hal ini berarti masih terbatasnya judul koleksi buku yang ada diperpustakaan. Kemudian dari jumlah perpustakaan yang ada ternyata masih jauh dari target populasi yang harus dilayani. Walaupun dunia digital semakin pesat, namun kenyataanya jumlah kunjungan ke perpustakaan justru meningkat sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel II-104
Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	4.579	5.129	5.351	6.609	6.914
	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	10.788	11.890	12.375	14.891	15.501
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	42,45	43,14	43,24	44,38	44,6
2	Kunjungan perpustakaan	orang	4.344	4.559	8.850	14.086	15.102
	Orang dalam populasi yang harus dilayani	orang	50.000	50.000	91.672	95.338	118.704
	Pengunjung perpustakaan	%	8,69	9,12	9,66	14,77	12,72
3	Jumlah perpustakaan	unit	37	38	37	36	38

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2020

Koleksi judul buku bertambah pada tahun 2019 bertambah karena pada tahun tersebut dilaksanakan kegiatan pengadaan bahan bacaan untuk perpustakaan. Sementara itu kunjungan perpustakaan untuk tahun 2019 meningkat akan tetapi secara persentase mengalami penurunan, hal ini disebabkan populasi yang akan dilayani meningkat.

2.4.2.16 Kearsipan

Arsip merupakan dokumen otentik dan legal tercipta karena pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip juga merupakan akuntabilitas kinerja aparatur yang dapat dijadikan sebagai saksi abadi terhadap keberhasilan dan kegagalan tugas aparatur negara. Arsip juga dapat dijadikan sebagai budaya dan sejarah. Untuk itu arsip harus diselamatkan dan dikelola dengan baik. Di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, urusan kearsipan diselenggarakan oleh kantor Arsip dan Perpustakaan. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk tracking surat/arsip serta memudahkan pencarian, pendokumentasian data secara baik, tepat dan akurat serta menjaga data tersimpan dengan baik.

1. Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip secara baku merupakan salah satu indikator keberhasilan urusan kearsipan, untuk itu Pemerintah Kota Payakumbuh tetap berupaya setiap tahunnya mewujudkan pengelolaan kearsipan yang baku sebagaimana tergambar pada tabel II-105.

Tabel II-105
Perkembangan kearsipan di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	PD	1	3	5	3	5
2.	Jumlah Perangkat Daerah	PD	31	31	31	31	31
3.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	%	3,33	10,00	16,13	9,68	16,13
4.	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1	1	2	2

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel di atas terlihat hampir semua Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh belum menerapkan arsip secara baku hanya 5 (lima) PD atau 16,13% dari 31 PD yang ada pada tahun 2019. Hal ini menandakan belum adanya keseriusan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secara tertib, hal ini disebabkan karenasumber daya yang mengelola kearsipan di masing-masing PD masih terbatas. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari SDM yang mengelola arsip di setiap PD, karena dari tabel di atas pada tahun 2013-2014 tidak ada kegiatan peningkatanuntuk peningkatan SDM pengelola kearsipan, mulai tahun 2015 baru ada kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.

2. SDM Pengelola Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang harus tersimpan sebagai bukti historis dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Jumlah arsip yang harus dikelola di Kota Payakumbuh tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 meningkat dari 29.000 berkas menjadi 35.138 berkas. Namun kondisi ini tidak sebanding dengan jumalh pejabat fungsional arsiparis yang tersedia. Jumlah pejabat arsiparis pada tahun 2019 hanya tersedia 3 orang. Kondisi ini sangat tidak ideal di saat jumlah arsip yang dikelola selalu meningkat setiap tahunnya.

Tabel II-106
Tabel Jumlah Arsip dan Pejabat Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Arsip Daerah yang Harus Dikelola	berkas	29.000	29.000	31.818	34.392	35.138
2	Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis	orang	2	2	1	2	3

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2020

2.4.3 Urusan Pilihan

2.4.3.1 Urusan Pariwisata

Kota Payakumbuh tidak mempunyai potensi pariwisata alam, hanya terbatas di Ngalau Indah dan Panorama Ampangan. Namun, potensi pengembangan pariwisata kedepannya cukup besar, terutama wisata budaya dan wisata kuliner. Untuk objek wisata budaya antara lain meliputi kebudayaan Minangkabau berikut kesenian asli rakyatnya sedangkan untuk wisata kuliner disepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman Payakumbuh. Dilihat dari jumlah kunjungan wisata, jumlahnya cukup besar dan

terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Meskipun jumlah kunjungan wisata cukup tinggi, namun belum memberikan kontribusi yang cukup berarti kepada perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah wisatawan yang tercatat umumnya merupakan wisatawan lokal dan regional yang tidak menginap di Kota Payakumbuh.

1. Kunjungan Wisata

Salah satu indikator kinerja kepariwisataan adalah tingkat kunjungan wisata. Capainnya selama kurun waktu perencanaan cenderung terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata erat kaitannya dengan objek wisata dan event wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, untuk melihat peran sektor kepariwisataan terhadap daerah dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB. Walaupun kontribusinya relatif kecil, namun ada kecenderungan peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan yang drastis, hal ini mungkin disebabkan karena wisatawan yang datang tidak menginap dan tidak membelanjakan uangnya di Payakumbuh, sedangkan industri pariwisata yang ada masih bersifat tradisional dan belum memberikan nilai tambah bagi daerah.

Tabel II-107
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Kunjungan wisata	Orang	129.963	166.017	183,942	193.502	203.389
	Kunjungan wisata Asing	Orang	1.156	2.355	957	164	183
	Kunjungan wisata Domestik	Orang	128.807	163.662	182.983	193.338	203.206
2	Jumlah objek wisata unggulan	buah	1	1	1	3	3
3	Jumlah restoran, rumah makan dan warteg	Unit	138	161	178	176	187
4	Jumlah event pariwisata dan budaya yang terlaksana	kali	11	16	16	12	24
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,95	0,95	1,00	0,30	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2020

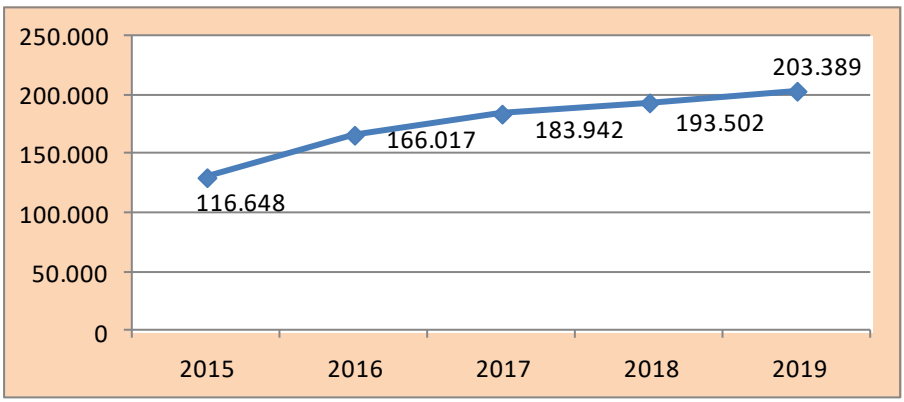


Diagram II-20
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019
Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2020

Gambar di atas memaparkan bahwa kunjungan wisata di Kota Payakumbuh cenderung mengalami peningkatan yang cukup baik. Peningkatan ini sejalan dengan mulai atraktifnya potensi wisata di Payakumbuh yang meliputi destinasi wisata alam dan wisata event/kegiatan di Payakumbuh.

Tabel II-108
Jumlah Tamu Menginap Di Hotel/Wisma Kota Payakumbuh Tahun 2019

No	Nama Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Tamu Menginap
1	Hotel Mangkuto	50	98	4.999
2	Hotel Bundo Kanduang	50	96	2.276
3	Wisma Flamboyan	12	22	5.440
4	Hotel Farabi	15	30	1.257
5	Hotel Kolivera I	15	33	2.515
6	Hotel Kolivera II	15	26	1.634
7	Hotel Kolivera III	16	26	1.065
8	Hotel Sari I	19	42	1.701
9	Hotel Faradisa	16	32	1.434
10	Hotel Pondok Bambu	19	6	235
11	Hotel Hafara Inn	10	15	556
12	Grand Narasaki	15	19	1.015
13	Hotel Candano	6	9	641
	Jumlah	258	454	36.195

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2020

Sampai sekarang, hotel di Kota Payakumbuh masih kelas Melati III. Kondisi ini membuka potensi investasi perhotelan di Payakumbuh seiring dengan peningkatan kunjungan wisata sebagaimana tercantum pada gambar di atas.

2. Atraksi Wisata

Salah satu daya tarik wisatawan untuk datang adalah atraksi wisata yang diadakan, pada tahun 2019 naik menjadi 15 atraksi dari sebelum 14 atraksi pada tahun 2018, walau dibandingkan dengan tahun 2017 masih jauh penurunannya, ini masih disebabkan oleh efek dari penyederhanaan beberapa atraksi, namun kualitasnya ditingkatkan, sehingga tidak mengurangi bahkan menambah ketertarikan wisatawan untuk berkunjung.

Tabel II-109
Jumlah Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Atraksi Wisata	16	11	19	24	21

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2020

2.4.3.2 Urusan Pertanian

1. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan di Kota Payakumbuh cukup tinggi setiap tahunnya sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan perumahan serta bangunan komersil

lainnya. Dalam lima tahun terakhir perubahan fungsi lahan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini, dimana pada tahun 2019 terjadi alih fungsi lahan yang cukup tinggi sebesar 27 Ha. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perlu pemberian izin yang ketat dengan penerapan RTRW dan RDTR serta penetapan Perda tentang Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B).

Tabel II-110
Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Data Awal (Ha)	Alih Fungsi Lahan (Ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Lahan Pertanian Awal; 2751 Ha	2 Ha	3 Ha	1 Ha	66,8 Ha	27 Ha

Sumber : Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan Sawah Tahun 2018 – 2035; Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

Alih fungsi terjadi pada kawasan permukiman, jalan utama, jalan, jalan penghubung, kawasan perkembangan perekenomian yang pesat untuk perumahan dan permukiman, pusat pertokoan dan pembangunan jalan.

Selain itu, penurunan tingkat kesuburan lahan juga perlu menjadi perhatian, karena dalam pantauan Dinas Pertanian, terdapat luasan lahan pertanian yang menurun tingkat kesuburannya sebagai akibat penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan serta pencemaran tanah oleh pesatnya industri dan perbengkelan, walaupun dari data pada tahun 2018 tidak ada catatan adanya penurunan kesuburan lahan. Ini diakibatkan semakin ketatnya pengawasan terhadap usaha industri dan perbengkelan yang ada**.**

Tabel II-111
Luasan Lahan yang Mengalami Penurunan Tingkat Kesuburan
di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Jenis lahan	Luas lahan (ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Lahan basah	6 ha	6 ha	1 Ha	0 Ha	0 Ha
2	Lahan kering	2 ha	2 ha	1 Ha	0 Ha	0 Ha

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

2. Potensi Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Walaupun corak kekotaan Payakumbuh semakin tampak, namun areal pertanian masih mendominasi penggunaan lahannya. Potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura di Kota Payakumbuh antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, cabe, terung, ketimun, dan kakao. Produksinya cukup prospektif untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor ke luar daerah.Komoditas hortikultura terutama sayur-sayuran telah dipasarkan ke luar Provinsi Sumatera Barat. Walaupun lahan pertanian dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan karena banyaknya alih fungsi menjadi area pemukiman dan pemanfaatan lahan untuk non pertanian. Namun dengan program intensifikasi pertanian seperti penggunaan benih unggul bermutu dan penerapan teknologi anjuran sudah berkembang, maka produktifitas komoditi pertanian dapat meningkat selama lima tahun terakhir. Pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura juga telah dibarengi dengan peningkatan dan pengembangan kelembagaan, akses permodalan dan pemasaran, yaitu dalam bentuk Gabungan Kelompok

Tani, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis (STA).

Tabel II-112
Jumlah Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019 (ton dan ton/ha)

No	Komoditas	Tahun									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas
1.	Produksi Padi	35.962	6,98	37.402	6,08	28.113	5,46	41.515	5,37	39.800	5,13
2.	Produksi Jagung	1.519	6,17	1.180	4,79	1.414	5,74	1.302	5,74	2.640,73	7,32
3.	Produksi Ubi Kayu	76.647	67,35	5.250	38,04	6.598	47,81	6.178	46,19	5.519,25	41,45
4.	Produksi Kacang panjang	305	7,27	252	6,01	387	9,23	645	6,93	605,44	7,58
5.	Produksi Cabe	390	6,77	973,9	16,90	306	5,31	892	6,49	897,6	5,48
6.	Produksi Terung	539,6	9,47	1.070,3	18,78	1.190	20,88	1.385	18,3	872,63	20,45
7.	Produksi Ketimun	688	7,48	1.469,8	15,98	1.671	18,17	4.095	9,65	819,80	13,92
8.	Produksi Kangkung	8,4	0,15	161,8	2,89	481	8,6	480	8,83	739,14	8,52
9.	Produksi Kakao	967,5	1,34	321,5	0,45	780	1,08	1.045	0,96	3.000,2	0,92

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 terjadi penurunan produksi beberapa komoditas, seperti padi dan cabe ini disebabkan adanya pengaruh cuaca, dimana tingginya curah hujan selama tahun 2017 serta masih rendahnya pengetahuan petani terhadap produk pertanian tersebut.

Penurunan yang paling besar terletak pada produksi padi yang oleh berkurangnya luas panen dikarenakan kegagalan panen / puso yang disebabkan oleh serangan hama tikus (42 ha). Akan tetapi produksi untuk tahun 2019 produksi jagung mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dikarenakan meningkatnya luas panen jagung yang disebabkan oleh bagusnya harga jagung ditahun 2019 yang ber efek pada menurunnya hasil produksi ubi.

Tabel II-113
Data Kelembagaan Tani Beserta Kelasnya di Kota Payakumbuh Tahun 2019

No.	Lembaga Tani		Kelas Kelembagaan
	Kelompok Tani	Alamat	
1	Raso	Ompang Tanah Sirah	Lanjut
2	Telaga	Ompang Tanah Sirah	Lanjut
3	Sawah Talawi	Ompang Tanah Sirah	Pemula
4	Sawah Ampang	Ompang Tanah Sirah	Pemula
5	Sahati	Ompang Tanah Sirah	Lanjut
6	Anak Aia	Ompang Tanah Sirah	Pemula
7	Mufakat	Ompang Tanah Sirah	Lanjut
8	KWT kamboja	Ompang Tanah Sirah	Pemula
9	Kwt Dalimo Saiyo	Ompang Tanah Sirah	Pemula
10	KWT Bina Bersama	Ompang Tanah Sirah	Pemula
11	KWT Mekar	Ompang Tanah Sirah	Pemula
12	Karya Mutiara	Ompang Tanah Sirah	Pemula
13	KWT Sahati	Ompang Tanah Sirah	Pemula
14	Nan Lombiang	Tigo Koto Dibaruah	Pemula
15	KWT Nanlombianng	Tigo Koto Dibaruah	Pemula
16	Rawang Laweh	Tigo Koto Dibaruah	Lanjut
17	Sintua	Tigo Koto Dibaruah	Pemula

No.	Lembaga Tani		Kelas Kelembagaan
	Kelompok Tani	Alamat	
18	Kosiak	Tigo Koto Dibaruah	Lanjut
19	KWT Rosella	Tigo Koto Dibaruah	Lanjut
20	Tembok Jua	Tigo Koto Dibaruah	Pemula
21	Bina Bersama	Ikua koto dibalai	Lanjut
22	Muaro saiyo	Ikua koto dibalai	Lanjut
23	KWT Bina Bersama	Ikua koto dibalai	Pemula
24	Titian Agam	Ikua koto dibalai	Pemula
25	Kumbuah Payau	Ikua koto dibalai	Pemula
26	Sumur Dayang	Ikua koto dibalai	Pemula
27	Anak jua	Ikua koto dibalai	Lanjut
28	munggu Panjang	Ikua koto dibalai	Pemula
29	KWT Karya Bunda	Ikua koto dibalai	Lanjut
30	KWT Murni	Ikua koto dibalai	Lanjut
31	Sawah Rawang	Kapaalo koto dibalai	Pemula
32	Ompek Niniak	Balai Tangah Koto	Pemula
33	Rawang Takuluak	Balai Tangah Koto	Pemula
34	Mengkudu	Balai Tangah Koto	Pemula
35	Ambacang Putiah	Balai Tangah Koto	Lanjut
36	KWT Bundo Mudo	Balai Tangah Koto	Pemula
37	Budi Luhur	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	Pemula
38	KWT Kasih Ibu	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	Pemula
39	Sawah Baruah	Tigo Koto Diateh	Lanjut
40	Sarana Tani	Tigo Koto Diateh	Lanjut
41	Muhasabah	Tigo Koto Diateh	Pemula
42	Sawah Sudut 9	Tigo Koto Diateh	Pemula
43	KWT Sarunai	Tigo Koto Diateh	Pemula
44	KWT Ingin Maju	Tigo Koto Diateh	Pemula
45	Nangguang	Tigo Koto Diateh	Pemula
46	KTW Taratak Indah	Tigo Koto Diateh	Pemula
47	Makmur	Tigo Koto Diateh	Lanjut
48	KWT Dahlia Sakato	Tigo Koto Diateh	Pemula
49	Sawah Talang	Napar	Pemula
50	KWT Harapan Bunda	Napar	Pemula
51	Tangah Tambago	Taratak Padang Kampuang	Lanjut
52	Simantuang RW Laweh	Taratak Padang Kampuang	Pemula
53	Fajar	Taratak Padang Kampuang	Pemula
54	Sawah Kosiak	Taratak Padang Kampuang	Pemula
55	KWT Gambia Sejahtera	Taratak Padang Kampuang	Pemula
56	KWT Mawar Putih	Taratak Padang Kampuang	Pemula
57	Solok Mato Aia	Tanjung Pauh	Lanjut
58	Parit Panjang	Tanjung Pauh	Lanjut
59	KWT Dahlia	Tanjung Pauh	Pemula
60	Sawah Kareh	Pakan Sinayan	Pemula
61	Rawang Panjang	Pakan Sinayan	Pemula
62	KWT Kenanga	Pakan Sinayan	Pemula
63	Paku Tiang	Kubu gadang	Pemula
64	KWT Berlian	Kubu gadang	Pemula
65	Ubi Tagak	Kubu gadang	Pemula
66	Sikosan	Bulakan Balai Kandi	Pemula
67	Ingin Maju	Bulakan Balai Kandi	Pemula
68	KWT Sun Flawer	Bulakan Balai Kandi	Pemula
69	Baliak Saiyo	Payolansek	Lanjut
70	Bk. Palano Sejati	Payolansek	Pemula
71	Bukik Cambang	Payolansek	Pemula
72	KWT Semanggi	Payolansek	Pemula
73	KWT sarumpun sorai	Payolansek	Pemula
74	Tani Mandiri	Payolansek	Pemula
75	Karya Tani	Talang	Pemula
76	Tanjuang Cubadak	Talang	Pemula
77	UBA	Talang	Pemula
78	Ar-Rahman	Talang	Pemula
79	Makmur	Talang	Pemula
80	KWT Anggrek	Talang	Pemula
81	Amanah	Talang	Pemula
82	Tan. Hias Anggrek	Talang	Pemula
83	Ademas	Koto Tangah	Lanjut
84	KWT Melati	Koto Tangah	Pemula
85	Sumber Rezeki	Koto Tangah	Lanjut
86	Sejahtera	Koto Tangah	Pemula
87	Semangat baru	Koto Tangah	Pemula

No.	Lembaga Tani		Kelas Kelembagaan
	Kelompok Tani	Alamat	
88	JK. Tuah Sakato	Subarang Batuang	Lanjut
89	KWT Belimbing	Subarang Batuang	Lanjut
90	Alfalah	Subarang Batuang	Madya
91	Mata Air	Padang Tinggi Piliang	Pemula
92	Berkah	Padang Tinggi Piliang	Lanjut
93	Taruko	Padang Tinggi Piliang	Pemula
94	KWT Lumbuang Rasoki	Padang Tinggi Piliang	Pemula
95	PATAS	Padang Tangah Balai Nan Duo	Pemula
96	Saiyo	Padang Tangah Balai Nan Duo	Pemula
97	Pulutan sati I	Padang Datar Tanah Mati	Pemula
98	Sepakat	Padang Datar Tanah Mati	Pemula
99	KWT Teratai	Padang Datar Tanah Mati	Pemula
100	Saiyo Sakato	Padang Datar Tanah Mati	Pemula
101	S. Munggu Panjang	Padang Datar Tanah Mati	Pemula
102	Kwt Sejahtera	Padang Datar Tanah Mati	Pemula
103	Lakuang Parbati	Parit rantang	Pemula
104	Bendang Permai	Parit rantang	Pemula
105	Balai Baringin	Tanjung Gadang Sei.Panago	Pemula
106	KWT Permata	Tanjung Gadang Sei.Panago	Pemula
107	Cimpago	Tanjung Gadang Sei.Panago	Pemula
108	KWT Cimpago	Tanjung Gadang Sei.Panago	Pemula
109	Solok Naur	Ibuh	Pemula
110	Pasie Makmur	Ibuh	Pemula
111	Picancang Jaya	Ibuh	Pemula
112	KWT Maju bersama	Labuah basilang	Pemula
113	Suka Damai	Koto Baru	Pemula
114	Sepakat	Koto Baru	Lanjut
115	Bina Bersama	Koto Baru	Lanjut
116	Mustika Alam	Koto Baru	Pemula
117	Tepian Agam	Koto Baru	Pemula
118	KWT Delima	Koto Baru	Pemula
119	Saiyo Sakato	Koto Baru	Pemula
120	Makmur	Koto Baru	Pemula
121	Suka Maju	Koto Panjang	Pemula
122	Serasi	Koto Panjang	Pemula
123	Karya Nyata	Koto Panjang	Pemula
124	Tarak Mandiri	Koto Panjang	Pemula
125	KWT Berkat Yakin	Koto Panjang	Pemula
126	Amanah	Koto Panjang	Pemula
127	Cahaya Mandiri	Koto Panjang	Pemula
128	Tunas Mekar	Payobasung	Lanjut
129	Serba Guna	Payobasung	Pemula
130	Koto Saiyo	Payobasung	Lanjut
131	Global	Payobasung	Pemula
132	Sejahtera Bersama	Payobasung	Lanjut
133	Makmur Basamo	Payobasung	Pemula
134	KWT Koto Saiyo	Payobasung	Pemula
135	KWT Teratai	Payobasung	Pemula
136	KWT Serumpun Bambu	Payobasung	Pemula
137	KWT Kaluek	Payobasung	Lanjut
138	KWT Tanjung Harapan	Payobasung	Lanjut
139	Boncah Tani Mandiri	Tiakar	Lanjut
140	Padang Baru	Tiakar	Lanjut
141	Murni Tanjung Durian	Tiakar	Pemula
142	Jirek Sawah Kubang	Tiakar	Pemula
143	KWT Indak Disangko	Tiakar	Pemula
144	KWT Bungo Tanjung	Tiakar	Pemula
145	KWT Mawar	Tiakar	Pemula
146	TSM 2000	Tiakar	Lanjut
147	Multi Agro	Tiakar	Pemula
148	Ihsan	Tiakar	Pemula
149	Harapan	Padang Tiakar	Lanjut
150	Banda Sukali	Padang Tiakar	Pemula
151	KWT. Tanjung Jaya	Padang Tiakar	Pemula
152	KWT Agri Prima	Padang Tiakar	Pemula
153	Ateh Pandan	Sicincin	Lanjut
154	Taruko	Sicincin	Lanjut
155	Munggu Gadang	Sicincin	Pemula
156	KWT Cempaka Putih	Sicincin	Pemula
157	KWT.Markinis	Sicincin	Pemula

No.	Lembaga Tani		Kelas Kelembagaan
	Kelompok Tani	Alamat	
158	Saiyo Sakato	Sicincin	Pemula
159	Ujung Padang	Padang Alai Bodi	Lanjut
160	Sungai Baih	Padang Alai Bodi	Lanjut
161	Baliak Mayang	Padang Alai Bodi	Lanjut
162	KWT Bunga Melati	Padang Alai Bodi	Lanjut
163	Ateh Padang	Padang Alai Bodi	Pemula
164	Usaho Bundo	Padang Alai Bodi	Pemula
165	Sejahtera Bersama	Padang Alai Bodi	Pemula
166	Bodi Jaya	Padang Alai Bodi	Pemula
167	Pincuran Tinggi	Padang Alai Bodi	Pemula
168	Bukik Patah Sembilan	Padang Alai Bodi	Pemula
169	Subur Jaya	Padang Alai Bodi	Pemula
170	Sungai Talang	Pd. Tangah Payobadar	Pemula
171	Pincuran Randah	Pd. Tangah Payobadar	Pemula
172	KWT Sumua Paraku	Pd. Tangah Payobadar	Pemula
173	Sawah Tangah	Balai Jariang	Lanjut
174	Sungai Landai	Balai Jariang	Pemula
175	Elok Basamo	Balai Jariang	Pemula
176	Gunuang Saiyo	Balai Jariang	Pemula
177	KWT Gunuang Saiyo	Balai Jariang	Pemula
178	Harapan Kami	Kapalo Koto Ampangan	Pemula
179	Fajar Harapan	Kapalo Koto Ampangan	Pemula
180	Tuah Saiyo	Kapalo Koto Ampangan	Pemula
181	Tanjung Subur	Kapalo Koto Ampangan	Lanjut
182	Padang Cubadak	Kapalo Koto Ampangan	Lanjut
183	Banda Jariang	Kapalo Koto Ampangan	Lanjut
184	Barokah	Kapalo Koto Ampangan	Pemula
185	Cerma	Sawah Padang Aur Kuning	Lanjut
186	Subur Indah	Sawah Padang Aur Kuning	Pemula
187	Sei. Lindiang	Sawah Padang Aur Kuning	Pemula
188	Barumbuang	Sawah Padang Aur Kuning	Pemula
189	Pdg. Cubadak Indah	Sawah Padang Aur Kuning	Pemula
190	Saiyo Sakato	Padang Karambia	Pemula
191	Tani Makmur	Padang Karambia	Pemula
192	Kami Saiyo	Padang Karambia	Pemula
193	Tanjung Panjang	Koto Tuo Limo Kampung	Pemula
194	Sakato	Koto Tuo Limo Kampung	Pemula
195	Sakinah	Koto Tuo Limo Kampung	Pemula
196	Badunsanak	Koto Tuo Limo Kampung	Pemula
197	Tanjung Jaya	Koto Tuo Limo Kampung	Pemula
198	Maju Bersama	Koto Tuo Limo Kampung	Pemula
199	Tanah Sirah	Limbukan	Pemula
200	Jaso Kawan	Limbukan	Pemula
201	Sei. Tandang	Limbukan	Pemula
202	Maju Jaya	Limbukan	Lanjut
203	Mutiara Taratak	Limbukan	Pemula
204	Pincuran Tigo	Limbukan	Lanjut
205	Sadar	Limbukan	Pemula
206	Ngalau Sijambi	Limbukan	Pemula
207	Bina Bersama	Limbukan	Pemula
208	Guguak Ampalu	Limbukan	Pemula
209	Usaha Bersama	Limbukan	Pemula
210	Saiyo Mandiri	Limbukan	Pemula
211	Tegar Mandiri	Limbukan	Pemula
212	Maju Jaya	Balai Panjang	Lanjut
213	Tunas Muda	Balai Panjang	Pemula
214	Batu Putiah	Balai Panjang	Pemula
215	Usaha Mandiri	Balai Panjang	Pemula
216	KWT Seroja	Kapalo Koto Ampangan	Pemula
217	KWT Melati Putih	Kapalo Koto Ampangan	Pemula
218	KWT Jaya Mandiri	Padang Karambia	Pemula
219	KWT Saiyo	Balai Panjang	Pemula
220	KWT Sahati	Sawah Padang Aua kuniang	Pemula
221	KWT Mutiara	Sawah Padang Aua kuniang	Pemula
222	KWT Adelwais	Sawah Padang Aua kuniang	Pemula
223	KWT Tanjung Mutiara	Sawah Padang Aua kuniang	Pemula
224	KWT Kemuning	Sawah Padang Aua kuniang	Pemula
225	KWT Lurah Taluak	Limbukan	Pemula
226	KWT Para Indah	Limbukan	Pemula
227	KWT Maju Bersama	Koto Tuo limo kampuang	Pemula

No.	Lembaga Tani		Kelas Kelembagaan
	Kelompok Tani	Alamat	
228	KWT Sejahtera mandiri	Koto Tuo limo kampuang	Pemula
229	Bakuang Jaya	Koto Panjang Dalam	Madya
230	Tanjuang Dama	Koto Panjang Dalam	Lanjut
231	Padang Baringin Talao	Koto Panjang Dalam	Lanjut
232	Tunas Baru	Koto Panjang Dalam	Pemula
233	Mekar Sari	Parik Muko Aia	Lanjut
234	Rinai Talao	Parik Muko Aia	Lanjut
235	Saiyo	Parambahan	Lanjut
236	Sawah Padang	Parambahan	Pemula
237	Sikabu	Padang Sikabu	Lanjut
238	Padang Aur Sepakat	Padang Sikabu	Lanjut
239	Oriza	Padang Sikabu	Pemula
240	Harapan Tani	Padang Sikabu	Pemula
241	Serumpun	Sungai Durian	Lanjut
242	Sungai Durian Hilir	Sungai Durian	Lanjut
243	Sungkai Indah	Sungai Durian	Lanjut
244	Sungai Durian Mudiak I	Sungai Durian	Pemula
245	Sungai Durian Mudiak II	Sungai Durian	Pemula
246	Cahaya Baru	Sungai Durian	Pemula
247	Bina Warga	Sungai Durian	Pemula
248	Melur	Sungai Durian	Lanjut
249	Cahaya Tani	Sungai Durian	Pemula
250	Sungai Tabir	Koto Panjang Padang	Lanjut
251	Parupuak	Koto Panjang Padang	Lanjut
252	KWT Tunas Baru	Koto Panjang Dalam	Pemula
253	KWT Padang Baringin	Koto Panjang Dalam	Pemula
254	KWT Nusa Indah	Koto Panjang Dalam	Pemula
255	KWT Harapan Jaya	Koto Panjang Dalam	Pemula
256	KWT Mekar Sari	Parik Muko Aie	Pemula
257	KWT Bundo Sakato	Parambahan	Pemula
258	KWT Pandan Wangi	Parambahan	Pemula
259	KWT Cinta Damai	Padang Sikabu	Pemula
260	KWT Kemuning	Padang Sikabu	Pemula
261	KWT Dahlia	Sungai Durian	Pemula
262	KWT Cempaka Putih	Sungai Durian	Pemula
263	KWT Makmur	Sungai Durian	Pemula
264	KWT Mutiara Hati	Sungai Durian	Pemula
265	KWT Lestari Bateh	Koto Panjang Padang	Pemula
266	KWT Harapan Bersama	Koto Panjang Padang	Pemula
267	KWT Sei Tabia	Koto Panjang Padang	Pemula
268	KWT Menara Jaya	Koto Panjang Padang	Lanjut

Kelembagaan tani di Kota Payakumbuh cukup baik, dimana terdapat 268 lembaga yang terdapat di seluruh kecamatan, namun sebagian besar masih kelas pemula, untuk ini pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan tani ini terus dilakukan oleh Dinas Pertanian dengan mengintensifkan peran PPL dan kerja sama dengan kelembagaan yang sudah berstatus madya.

Tabel II-114
Sarana Dan Prasarana Penunjang Kelembagaan Tani
di Kota Payakumbuh Tahun 2019

No	Kelembagaan Tani	Sarpras Penunjang Kelembagaan
1	STA TANJUANG DAMA	1. Bangunan 2. Lemari Kayu 3. Timbangan 4. Mesin Penjahit Karung 5. Keranjang 6. Kursi Goyangi 7. Kursi Plastik 8. Kursi Besar/Stenlis
2	BALIAK MAYANG	1. Timbangan 50 kg 2. Timbangan 100 kg 3. Timbangan Pegas 4. MesinJahit Karung

No	Kelembagaan Tani	Sarpras Penunjang Kelembagaan
		5. Pisau Stenlestil 6. Kalkulator Kitizen SDC 7. Benang Jahit Karung 8. Sumur Bor 9. Pompa DUP 10. Kursi Plastik Napoly 11. Kursi Susun 12. Kursi Kecil Plastik Star 13. Kursi Putar Fantoni 14. Etalase 15. Genset 16. Weftafel 17. Meja Komputer 18. Komputer 19. Printer 20. Meja Stenlestil 21. Nen Book 22. Kipas Angin 23. Meja Resepsionis 24. Lemari Arsip 25. Bak Cucu 26. Tenda 27. Kulkas 28. Keranjang 29. Kand Tractor 30. Embung (Bak Penampung)
3.	JK.TUAH SAKATO	1. Timbangan 500 kg 2. Timbangan 20 kg 3. Lemari Arsip 4. Meja Kasir 5. Meja Stenlis 6. Komputer 7. Talase Dinding 8. Tenda 9. Bak Pancuci 10. Plang Nama 11. Kursi Plastik 12. Kursi Putar
4.	TANJUANG DAMA	1. Bangunan 2. Lemari Kayu 3. Timbangan 4. Mesin Penjahit Karung 5. Keranjang 6. Kursi Goyangi 7. Kursi Plastik 8. KursiBesar/Stenlis
5.	MEKAR HARAPAN	1. Keranjang 2. Gerobak 3. Bentor 4. Timabangan

Sedangkan untuk kelembagaan tani yang sudah madya dan lanjut, diberikan bantuan di samping sudah ada yang menyediakan sarana dan prasarana secara swadaya untuk menunjang operasional kelembagaannya. Untuk ini sudah ada 5 (lima) kelembagaan tani yang sarana dan prasarananya cukup lengkap sebagaimana tabel di atas.

3. Produktifitas Peternakan

Kemajuan dibidang peternakan dapat dilihat dengan peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi daging serta menurunnya berbagai penyakit ternak. Disamping dalam

bentuk perkembangan populasi, produksi daging, telur dan susu dalam pembangunan peternakan juga dilakukan berbagai kegiatan yang bersifat penunjang seperti inseminasi buatan dan kegiatan pemeliharaan kesehatan. Perkembangan populasi dan produksi peternakan tidak hanya dari sisi pengembangan produksi peternakan, Kota Payakumbuh juga telah menyiapkan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu, yang meintegrasikan lokasi Pasar Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH), Laboratorium Percontohan, BPP dan instalasi Pengolahan Pakan di kawasan Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur. Untuk meningkatkan produksi daging, Pemerintah Kota Payakumbuh juga mendirikan *breeding farm* di Kelurahan Kapalo Koto.

Tabel II-115
Produktifitas Peternakan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Ternak	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sapi	5.689	5.536	5.530	5.756	5.849
2	Kerbau	383	189	170	177	169
3	Kuda	521	337	258	263	362
4	Kambing	5662	5.028	5.240	3.975	3.860
5	Ayam Kampung	83.061	50.728	45.134	39.457	33.840
6	Puyuh	207.800	123.650	192.000	154.300	156.000
7	Itik	83.203	56.167	57.324	63.608	54.090
8	Ayam Ras Petelur	737.250	788.300	1.045.800	1.080.700	1.111.700
9	Ayam Ras Pedaging	1.144.000	2.730.500	2.754.000	2.657.800	2.815.000

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa populasi ternak besar mengalami peningkatan pada tahun 2019, terutama pada populasi Sapi, dimana dari tahun 2015 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan, ini hal ini di dukung dengan adanya program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif. Selain itu juga didukung oleh adanya UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak. Demikian pula dengan populasi ayam ras pedaging dan ayam ras petelur, puyuh. Sedangkan populasi ternak kerbau, kambing, itik, dan ayam kampung mengalami penurunan pada tahun 2019.
Sedangkan produksi daging dan produksi telur pada tahun 2019 sama-sama mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018, karena memang Kota Payakumbuh merupakan Wilayah sentra unggas. Selain itu dengan dicanangkannya Kota Payakumbuh sebagai *City Of Rendang*, maka permintaan akan kebutuhan daging juga mengalami peningkatan. Hal ini juga didukung dengan adanya fasilitas yang ada di Kota Payakumbuh berupa Rumah Potong Hewan Modern dan Pasar Ternak sebagai akses keluar masuk ternak, perkembangannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-116
Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun Kota Payakumbuh 2015-2019

No	Jenis Ternak dan Unggas	Tahun (Kg)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Daging	**3.061.946**	**2.404.694**	**4.474.195**	**4.345.275**	**4.446.102**
	Daging Sapi	1.074.433	1.250.000	939.256	914.820	1.091.500
	Daging Kerbau	111.038	46.972	43.051	111.038	18.542
	Daging kambing	89.458	34.632	84.388	85.119	83.171
	Daging Kuda	18.060	7.770	7.350	15.540	4.410
	Daging ayam kampung	89.540	16.405	48.654	45.535	26.406
	Daging Ayam ras pedaging	1.075.360	497.918	2.525.780	2.322.740	2.357.990

No	Jenis Ternak dan Unggas	Tahun (Kg)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Daging ayam ras petelur	575.072	242.640	802.070	824.245	843.835
	Daging itik	28.985	308.357	314.709	26.238	20.248
2.	Telur	**5.794.692**	**6.060.000**	**7.181.078**	**8.042.777**	**8.210.909**
	Telur ayam ras	5.284.583	5.700.552	7.437.540	7.668.366	7.925.781
	Telur ayam kampung	53.055	32.403	28.829	25.203	15.646
	Telur itik	456.785	308.357	314.709	349.208	269.482

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

4. Dukungan Permodalan

Sebagai perwujudan peran Pemerintah dalam memfasilitasi perekonomian masyarakat, maka Pemerintah Kota Payakumbuh telah memberikan berbagai fasilitas di bidang pertanian kepada kelompok masyarakat petani yang membutuhkan pengembangan usaha dan permodalan.

Tabel II-117
Jumlah Usaha Pertanian Yang Membutuhkan Akses Permodalan
Di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Sub sektor	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tanaman pangan	92	97	98	101	124
2	Hortikultura	40	44	46	48	109
3	Bunhut	11	14	14	15	17
4	Perikanan	14	21	21	3	2
5	Peternakan	89	99	100	114	98
6	Up3hp	4	4	4	4	4
7	Poklahsar	3	3	3	2	1

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa Jumlah Usaha Pertanian yang membutuhan akses permodalan dari tahun sebelumnya terjadi peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Jumlah Masyarakat Petani yang mengakses permodalan pada LKMA yang ada di Kota Payakumbuh. Namun karena keterbatasan terutama kelayakan usaha belum semuanya dapat diberikan bantuan tersebut. dari tahun 2015-2019 hanya 32 Gapoktan yang mendapat fasilitasi permodalan yang tersebar di 5 kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II-118
Jumlah Gapoktan yang Difasilitasi Permodalan
Di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Jumlah Awal Gapoktan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah awal yang difasilitasi	32	32	32	32	32
1	Payakumbuh barat	7	7	7	7	7
2	Payakumbuh timur	7	7	7	7	7
3	Payakumbuh utara	4	4	7	4	4
4	Payakumbuh selatan	9	9	9	9	9
5	Lamposi Tigo Nagori	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

Fasilitas permodalan pada Gapoktan sama dari tahun 2014 – 2019 karena merupakan dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) yang disalurkan Kementrian Pertanian

melalui LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agrbisnis) yang ada pada masing masing Gapoktan mulai tahun 2008-2010. Dana ini merupakan dana bergulir bagi anggota Gapoktan sebagai modal dalam usaha budidaya pertanian, sehingga petani terhindar dari rentenir dan pinjaman dengan bunga tinggi. Untuk Payakumbuh Barat ada 7 Gapoktan yang difasilitasi, Payakumbuh Timur ada 7 Gapoktan, Payakumbuh Utara ada 4 Gapoktan, Payakumbuh Selatan ada 9 Gapoktan dan Lamposi Tigo Nagori ada 5 gapoktan

5. Pemanfaatan Teknologi Pertanian

Di samping itu, dalam meningkat produksi dan produktifitas sektor pertanian, juga telah difasilitasi penerapan teknologi pertanian kepada kelompok masyarakat petani, tidak hanya pada sektor pertanian saja, tapi juga pada sektor peternakan dan perikanan.

Tabel II-119
Jumlah Teknologi Anjuran Yang Telah Diterapkan
di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Sub sektor	Jumlah Teknologi (Paket)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tanaman pangan	19	20	21	22	22
2	Hortikultura	19	21	22	23	23
3	Perkebunan	15	15	16	16	17
4	Peternakan	16	17	21	21	25
5	Perikanan	6	10	10	12	12

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

Jumlah teknologi anjuran tanaman pangan tahun 2019 adalah sebanyak 22 teknologi diantaranya pemakaian bibit unggul, pupuk berimbang, jajar legowo, pemakaian berbagai macam alsintan (traktor, combine harvester, alat penyiangan dsb), irigasi, padi tanam sebatang (PTS), Pemakaian pupuk organik, PGPR, dsb. Teknologi anjuran untuk tanaman hortikultura ada sebanyak 23 teknologi diantaranya pemakaian barrier tanaman, bibit unggul, pemakaian tricoderma, pestisida nabati,dsb. Teknologi anjuran untuk perkebunan sebanyak 17 teknologi diantaranya sambung samping, sambung pupuk pucuk, pemakaian beauveria bassiana, fermentasi kakao, pemangkasan, dsb. Teknologi anjuran untuk peternakan sebanyak 25 teknologi diantaranya embrio transfer, Inseminasi buatan, Teknologi pakan ternak (silase, permen sapi, fermentasi jerami) dsb.

6. Pelaku Sektor Pertanian

Walaupun secara umum terjadi perubahan alih fungsi lahan pada sektor pertanian, namun minat masyarakat terhadap pertanian justru cukup menggembirakan. Ini ditandai dengan peningkatan jumlah kelompok usaha yang menggeluti sektor pertanian setiap tahunnya sebagaimana tabel di bawah ini. Namun, jika dilihat dari jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian justru mengalami penurunan.

Tabel II-120
Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian
Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Jenis usaha/ komunitas	Kelompok yang mengusahakan (kelompok)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi	167	175	175	175	175
2	Palawija	41	45	46	46	46
3	Hortikultura					
	- Sayuran	39	43	45	45	45
	- Buah-buahan	5	8	8	8	8

No	Jenis usaha/ komunitas	Kelompok yang mengusahakan (kelompok)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	- Tanaman hias	14	15	15	15	15
	- Biofarmaka	21	21	21	21	42
4	Peternakan					
	- Ternak besar	45	45	47	47	42
	- Unggas	36	40	40	40	4
5	Perikanan	2	2	3	30	31
6	Up3hp	6	6	6	6	6
7	Poklahsar	3	3	3	4	4
8	Perkebunan	23	24	24	24	24

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

Jumlah kelompok usaha pertanian tanaman padi tahun 2019 sebanyak 175 kelompok, sama dengan tahun sebelumnya. Jumlah kelompok palawija adalah 46, sama dengan tahun sebelumnya. Demikian juga untuk kelompok hortikultura, peternakan, UP3HP, Poklasar dan perkebunan juga sama dengan tahun sebelumnya. Untuk kota Payakumbuh jumlah kelompok tersebut sudah memadai yang perlu dilakukan adalah membina agar kelompok kelompok tersebut terus aktif sehingga bisa meningkatkan pendapatan anggotanya.

Tabel II-121
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Sektor	Tenaga Kerja (org)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tanaman pangan	22.547	22.180	22.150	22.122	9.217
2	Hortikultura	3.628	3.697	3.700	3.723	1.563
3	Perkebunan	1.878	1.848	1.840	1.811	1.876
4	Peternakan	9.198	9.242	9.334	9.322	2.980
	Jumlah	37.251	36.967	37.024	36.978	15.636

Sumber:Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa Jumlah tenaga kerja sektor tanaman pangan (padi, Jagung) tahun 2019 adalah sebesar 9.217. Jumlah tenaga kerja sektor hortikulturan (Cabe, Bawang, Sayuran, dsb) sebesar 1.563. Jumlah tenaga kerja sektor perkebunan (Kakao) sebesar 1.876. Jumlah tenaga kerja sebesar 15.636. Terjadinya pengurangan tenaga kerja disektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan karena beralihnya tenaga kerja tersebut kesektor ekonomi lain seperti perdagangan dan jasa. Kebanyakan tenaga kerja di sektor pertanian merupakan petani penggarap bukan petani pemilik lahan sehingga mudah untuk berpindah ke sektor ekonomi lain.

Untuk meningkatkan tata usaha pertanian dan peternakan, Dinas Pertanian menurunkan cukup banyak penyuluh pertanian dan perternakan walaupun jumlahnya menurun pada tahun 2019 disebabkan adanya yang memasuki masa pensiun dan belum ada tambahan rekrut penyuluh pertanian baru.

Tabel II-122
Jumlah Tenaga Penyuluh Berdasarkan Keahlian
di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Jenis Keahlian	Jumlah (org)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pegawai Negeri Sipil						
1	Tanaman pangan	16	16	19	19	12
2	Peternakan	14	14	14	14	13

No	Jenis Keahlian	Jumlah (org)				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	Perkebunan	1	1	1	1	-
4	Penyuluhan					
	- Pertanian	3	3	3	2	1
	- Peternakan	2	2	2	2	5
	- Perikanan	3	3	3	3	3
Tenaga Harian Lepas						
	S1					
5	Tanaman pangan	6	6	-	-	-
6	Peternakan	1	1	-	-	-
	D3					
7	Tanaman pangan	4	4	-	-	-
	SMK					
8	Tanaman pangan	5	5	-	-	-
9	Peternakan	10	10	7	-	-
THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian						
10	Tanaman pangan	8	8	19	11	11
11	Peternakan	12	11	9	8	8

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

Tahun 2019, jumlah penyuluh dengan dasar keilmuan tanaman pangan sebesar 12 orang, penyuluh dengan dasar keilmuan peternakan 13 orang, penyuluh dasar keilmuan penyuluhan 9 orang. jumlah penyuluh PNS tanaman pangan dan peternakan berkurang dari tahun sebelum nya karena adanya penyuluh yang pensiun dan pindah ke struktural. Sedangkan jumlah THL-TBPP tahun 2019 berjumlah 19 orang, sama dengan jumlah tahun sebelumnya dengan dasar keilmuan tanaman pangan sebanyak 11 orang dan dasar keilmuan peternakan sebanyak 8 orang.

2.4.3.3 Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan sangat besar perannya dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Sektor perdagangan di Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan yang diiringi dengan adanya peningkatan infrastruktur, kejelian pemasaran dari masyarakat dalam membaca peluang, dan lembaga keuangan penyandang dana pinjaman yang ada serta pembinaan pemerintah dalam memotivasi usaha masyarakat.

Tabel II-123
Perkembangan Sarana Perdagangan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pasar (Pasar Tradisional, modern, swalayan, kios, toko)	unit	4.246	4.260	4.272	4.272	4.272
2	Pasar Tradisional (Ibuh& Padang Kaduduk)	unit	2	2	2	2	2
3	Pasar Lokal (Pusat Pertokoan)	unit	1	1	1	1	1
4	Mall	buah	1	1	1	1	1
5	Pasar Swalayan	buah	15	15	15	42	42
6	Kaki lima	buah	2.261	2.261	2.261	2.261	2.169

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Kota Payakumbuh, 2020

Dalam rangka mewujudkan Program Pasar Sehat telah dijalin beberapa bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Beberapa nota kesepakatan

kerjasama yang disepakati antara lain adalah dengan Yayasan Danamon Peduli dalam bentuk bantuan program dan sarana pendukung untuk terwujudnya lingkungan pasar yang sehat dan kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh untuk menata dan merealisasikan Pasar Kuliner Malam yang sehat dan representatif.

2.4.3.4 Urusan Perindustrian

Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Berfluktuasinya perkembangan industri di Kota Payakumbuh karena industri yang berkembang masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah atau *Home Industry* yang dikelola baik secara formal maupun informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (*Home Industry*) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk industri ini antara lain melalui kegiatan promosi di pondok promosi serta melalui program *one produk one vilage* (OVOP) yang direalisasikan dengan mendirikan sentra kampung rendang, kampung tenun, sentra makanan ringan dan kampung kerajinan bambu. Kedepan, diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri.

1. Perkembangan Industri

Industri Kota Payakumbuh didominasi oleh industri non formal dengan skala usaha mikro dan kecil. Perkembangan industri selama kurun waktu 5 (lima) tahu terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-124
Perkembangan Industri Kota PayakumbuhTahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Unit Usaha	Unit	1.763	1.763	1.963	1.783	1.853
2.	Formal	unit	503	503	594	225	583
3.	Non Formal	unit	1.260	1.260	1.369	1.558	1.270
4.	Tenaga Kerja	orang	6.410	5.630	4.486	5.854	6.106
5.	Nilai Investasi (ribu)	Rp.	86.366.384	86.366.384	86.567.512	86.742.512	88.040.791
6.	Nilai Produksi (ribu)	Rp.	230.967.00	325.430.000	364.355.333	337.720.000	342.785.800

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah unit usaha terutama sektor formal yang mengalami kenaikan sangat signifikan dari 225 unit pada tahun 2018 menjadi 583 unit pada tahun 2019, sedangkan usaha non formal mengalami penurunan. Begitu jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi mengalami peningkatan.

2. Tenaga Kerja

Kegiatan industri mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, dimana dari catatan yang ada pada Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, selama tahun 2019 lapangan usaha industri mampu menyerap tenaga mencapai lebih dari 6.000 orang yang sebagian besar bergerak di industri mikro dan kecil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II-125
Data Industri dan Penggunaan Tenaga kerja Tahun 2019

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri kerupuk dan sejenisnya	373	1.885
2	Industri penggilingan padi	53	133
3	Industri kue basah	240	801
4	Industri makanan yang belum termasuk kelompok manapun	80	248
5	Industri furniture dari kayu	122	413
6	Industri percetakan	24	103
7	Industri roti dan sejenisnya	50	175
8	Industri air minum dalam kemasan/air isi ulang	63	126
9	Industri anyaman-anyaman dari rotan dan bambu	116	199
10	Industri barang-barang dari semen	97	193
11	Industri batu bata dari tanah liat	19	52
12	Industri pengolahan dan pengawetan daging	9	45
13	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe (industry tahu)	65	213
14	Industri penggergajian kayu	7	28
15	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	2	2
16	Industri bumbu masak dan penyedap makanan	43	158
17	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	4	18
18	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	9	9
19	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	12	18
20	Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati	12	32
21	Industri kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture	4	10
22	Industri ransum pakan ternak/ikan	0	0
23	Industri minuman ringan (soft drink)	5	24
24	Industries (macam-macam es)	7	17
25	Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan panjangan	1	4
26	Industri pengolahan teh dan kopi	15	28
27	Industri kapur	1	2
28	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	3	33
29	Industri tempe	2	8
30	Industri macaroni, mie, spaghetti, bihun, soun dan sejenisnya	5	37
31	Industri susu	2	11
32	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	4	6
33	Industri jasa reparasi kendaraan bermotor (mobil)	9	15
34	Industri barang-barang logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	115	277
35	Industri jasa bengkel/reparasi sepeda motor	9	16
36	Industri pakaian jadi dari tekstil	116	271
37	Industri barang tekstil jadi kecuali untuk pakaian jadi	43	156
38	Industri pemeliharaan dan perbaikan elektronik	1	2
39	Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun	19	63
40	Industri jasa reparasi kendaraan bukan bermotor (sepeda)	4	10
41	Industri border/sumalan	6	8
42	Industri jasa perorangan lainnya	1	3
43	Industri pengolahan lainnya yang belum termasuk golongan manapun	11	32
44	Industri furniture dari logam	15	46
45	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	15	19
46	Industri kain rajut	11	63
47	Industri alat pertukangan dari logam	0	0
48	Industri alat pertanian dari logam	2	5
49	Industri pertenunan	6	22
50	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	0	0
51	Industri mesin pertanian dan kehutanan	2	7
52	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	4	7
53	Industri mainan	0	0
54	Industri alat music tradisional	0	0
55	Industri penempaan pengepresan dan penggilingan logam	5	6
56	Industri alat-alat dapur	5	17

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
57	Industri minyak dari kelapa	0	0
58	Industri moulding dan komponen bahan bangunan	1	4
59	Industri pemintalan benang	0	0
60	Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	5	11
61	Industri peralatan kantor dari logam tidak termasuk furniture	0	0
62	Industri komponen dan suku cadang motor	1	3
63	Industri jasa reparasi jam	0	0
64	Industri konsentrat pakan ternak	6	12
	Jumlah	**1.853**	**6.106**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2020

2.4.3.5. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi perikanan di Kota Payakumbuh dilihat dari peningkatan produksi budidaya perikanan konsumsi, peningkatan produksi benih ikan dan peningkatan penangkapan ikan di perairan umum.Pada umumnyakegiatan perikanan lebih banyak bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan mayarakat Kota Payakumbuh akan protein hewani dari ikan. Sampai saat ini walaupun produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tapi untuk pemenuhan kebutuhan Kota Payakumbuh sebagian besar masih didatangkan dari daerah lain di sekitar Kota Payakumbuh, karena produksi yang ada belum mencukupi untuk kebutuhan dalam daerah.

Aktivitas budidaya perikanan darat dilaksanakan melalui budidaya kolam air deras, kolam air tenang, keramba, dan perairan umum. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami. Di samping itu, dalam upaya peningkatan kegiatan budidaya untuk peningkatan produksi sudah diiringi dengan penyediaan benih unggul, pakan yang murah dan jaminan pasar melalui kegiatan pengolahan yang dikelola di bawah bimbingan petugas penyuluh perikanan pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh. Secara lebih lengkap perkembangan populasi, produksi dan kegiatan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-126
Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Rumah Tangga Pembudidaya ikan**						
	1. Pembudidaya ikan kultur (sambilan utama)	RT	698	698	698	625	718
	2. Pembudidaya Ikan Kultur (sambilan tambahan)	RT	2.513	2.513	2.513	2.208	2208
	3. Penangkap ikan	RT	38	38	38	38	38
2	**Produksi Benih Ikan**						
	1. Luas Kolam	Ha	4,4	4,4	6,3	6,3	6,5
	2. Produksi	Juta ekor	6.092	6.092	8.358	10.865	11.951
3	**Produksi Pembudidayaan Ikan Rakyat (Ikan Konsumsi)**						
	1. Luas Kolam	Ha	201,73	201,73	201,73	201,73	64
	2. Produksi	Ton	512,37	433,27	482,25	501,65	520,11
4	**Penangkapan Ikan di Perairan Umum**						
	1. Luas Kolam	Ha	38,95	38,95	38,95	38,95	38,95
	2. Produksi	Ton	5,6	6,2	6,6	8,07	8,56

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada Rumah Tangga Pembudidaya Ikan, aspek yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya adalah pada pembudidaya ikan kultur (sambilan utama) yang merupakan sebagai mata pencaharian utama bagi pembudidaya ikan. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya Peningkatan minat masyarakat dalam pembudidaya, optimalisasi lahan untuk usaha perikanan.

Dengan adanya pengalihan pengelolaan (Balai Benih Ikan) BBI Padang Tangah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2018, maka diharapakan adanya kenaikan luas dan produksi budidaya ikan dengan dukungan dengan adanya 2 (dua) Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) sebanyak 4 unit, serta didukung dengan pengembangan pabrik pakan ikan, sehingga menyebabkan Produksi Benih Ikan, mengalami peningkatan yang signifikan selain peningkatan permintaan pasar atas benih ikan yang menjadi salah satu faktor.

Tabel II-127
Jumlah Produksi Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2015 - 2019

No	Jenis produk	Satuan	Produksi				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi Perikanan	Ton	512,35	433,27	482,25	501,65	520,11
2	Produk Olahan Perikanan	Ton	17,9	18,3	20	26,74	34,212
3	Benih Perikanan	Ribu ekor	6.512	8.632	10.865	11.951	12.340.150

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2020

Produksi perikanan dan Produk Olahan perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini dipengaruhi oleh Optimalisasi Lahan dan Usaha Perikanan Masyarakat dan meningkatnya permintaan pasar dimana dipengaruhi oleh tingginya tingkat konsumsi ikan. Hal ini juga di dukung oleh program kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh yaitunya Penyuluhan Gemarikan yang dilakukan kepada masyarakat, termasuk anak-anak usia dini.

2.4.4 Penunjang Urusan

A. Perencanaan

Dari sisi perencanaan,belanja langsung yang mengakomodir usulan masyarakat, konsistensi program RKPD terhadap RPJMD dan indikator RPJMD yang tercapai menjadi alat ukur berkualitasnya sebuah perencanaan. Ini terjadi perubahan dari indikator tahun 2014-2016 karena adanya penyesuaian dengan indikator yang ada dalam RPJMD tahun 2017-2022. Untuk kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-128
Tabel Capaian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	95,64	95,69	95,80	-	-
2.	Persentase Realisasi Rencana Pembangunan	%	99,44	99,30	99,35	-	-
3.	Persentase pagu belanja langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	-	-	31,23	33,08	33,11
4.	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	-	-	100	92,24	76,78
5.	Persentase indikator RPJMD yang tercapai	%	-	-	83,29	77,38	88,76

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2020

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, bahwa untuk mengukur capaian perencanaan, maka mulai tahun 2017 mulai menggunakan indikator baru sesuai dengan yang ada dalam RPJMD tahun 2017-2022, dimana untuk 3 (tiga) indikator hanya pagu belanja langsung yang mengakomodir usulan masyarakat yang tercapai sedangkan konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD dan indikator RPJMD yang tercapai terjadi penurunan dibandingkan tahun 2018. Mulai tahun 2017 indikator 1 dan 2 tidak digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga Bappeda tidak lagi melakukan pengukuran pada indikator ini. Dari data di atas, terdapat penurunan kinerja pada dua indikator, yaitu Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD dan Persentase indikator RPJMD yang tercapai, ini disebabkan adanya penyesuaian dan *refocusing* terhadap program dan kegiatan yang tidak berdampak terhadap pencapaian sasaran strategis daerah, sehingga tidak dilaksanakan pada tahun 2019. Ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan intensifikasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dipersyaratkan oleh Kementerian PAN dan RB.

B. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Pengembangan Kapasitas Kepegawaian

Tabel II-129
Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Struktural
di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Eselon	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Eselon II	orang	-	3	2	-	1
2.	Eselon III	orang	2	1	2	3	1
3.	Eselon IV	orang	-	32	-	30	-

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pejabat yang mengikuti Diklat Struktural cukup fluktuatif. Untuk eselon II ada pada tahun 2016 dan 2017 ada 3 dan 2 orang yang mengikuti Diklat Struktural dan tahun 2018 tidak ada yang mengikuti. Sedangkan untuk tahun 2019 ada 1 orang dari eselon II dan 1 orang eselon III yang mengikuti diklat struktual.

Tabel II-130
Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Tertentu
di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis	Orang	97	199	143	139	20
2	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu	orang	2.225	1.569	1.562	27	14

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, 2020

Selanjutnya untuk pejabat yang mengikuti Diklat Teknis tahun 2015 sampai tahun 2018 cenderung tetap akan tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 139 orang menjadi 20 orang. Kondisi yang hampir sama pada jumlah pejabat fungsional tertentu dimana tahun 2014 sampai dengan 2018 cenderung menurun sedikit, namun pada tahun 2018 turun sangat signifikan dari 1.562 orang pada tahun 2017 menjadi 27 orang saja pada tahun 2018, dan tahun 2019 juga terjadi penurunan menjadi 14 orang. Ini disebabkan sudah hampir terpenuhinya jumlah guru yang melakukan diklat untuk meraih sertifikasi.

2. Kedisiplinan Pegawai

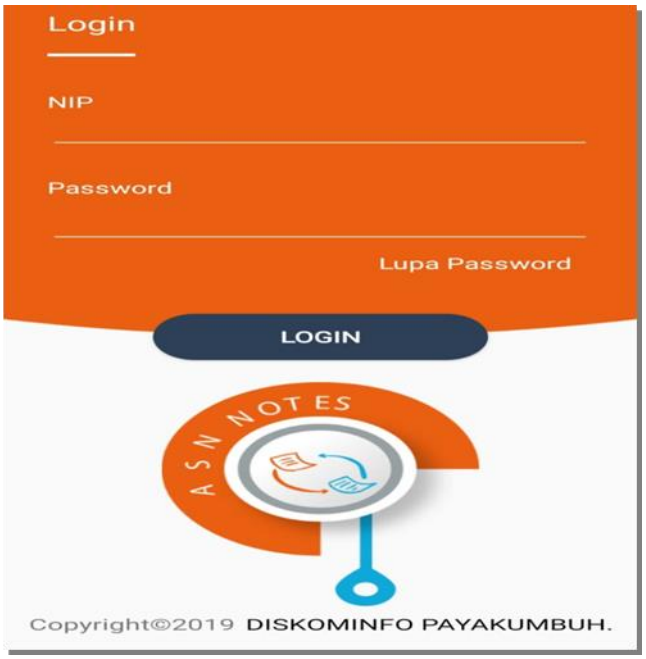
Permasalahan kepegawaian di Kota Payakumbuh, berdasarkan data pada tahun 2015 dan 2016 diidentifikasikan terkait dengan pelanggaran kewajiban pegawai untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 4) dan menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS (ayat 6) pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Disamping itu Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 walaupun bersifat personal juga nantinya mempengaruhi kinerja PNS secara tidak langsung. Pada tahun 2019 terdapat pelanggaran disiplin PNS sesuai peraturan yang berlaku dan telah dilakukan pemberian sanksi sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel II-131
Daftar Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2010	Orang	6	8	-	10	24
2.	Pasal 9 PP Nomor 53 Tahun 2010	orang	2	-	-	-	-
3.	Pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010	orang	-	-	-	1	5
4.	Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 2010	orang	-	-	-	1	-
5.	Pasal 6 PP Nomor 53 Tahun 2010	orang	-	-	-	-	1

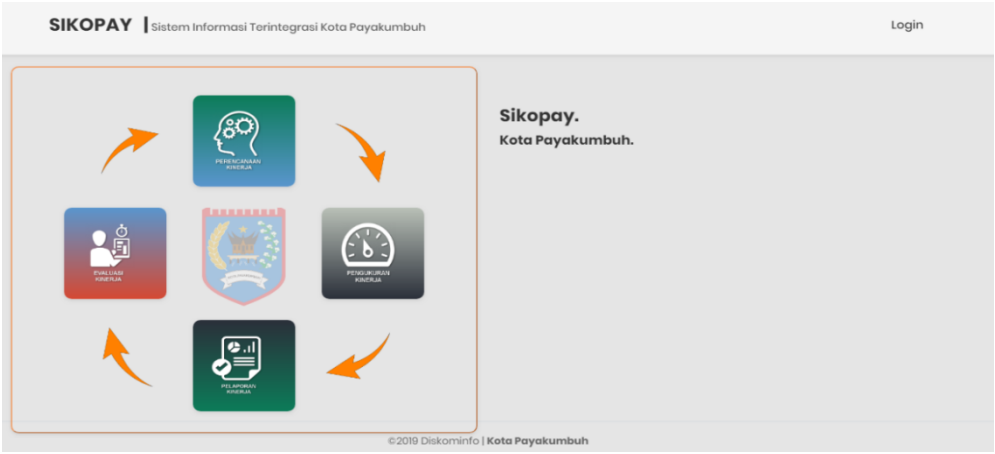
Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, 2020

Untuk meningkatkan disiplin PNS ini, mulai tahun 2018 pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan Sistem Kinerja Pegawai Negeri (SKP Online) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) dan mulai tahun 2019 meningkatkan sistem tersebut dengan Aplikasi Penilaian Kinerja dengan nama E-Kinerja yang menerapkan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan kinerja, aktifitas harian dan presensi kehadiran yang sudah online dan sinkron dengan sistem *Finger Print* (Sidik Jari) dalam absensi serta perhitungan sanksi potongan sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.



Gambar II-13
Aplikasi Penilaian Kinerja ASN Kota Payakumbuh
Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, 2020

Selain aplikasi E-Kinerja kota payakumbuh juga membuat aplikasi terintegrasi proses bisnis yang dimulai dari tahap perencanaan, pengeloaan keuangan pengendalian, pengawasan sampai dengan kepegawaian, yang diberi nama Sistim Informasi Kota Payakumbuh (SIKOPAY).



Gambar II-14
Aplikasi Sistim Informasi Kota Payakumbuh

Sumber : Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, 2020

C. Penelitian dan Pengembangan

Dengan adanya Bidang Penelitian dan Pengembangan di Bappeda, maka kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan semakin ditingkatkan baik kuantitas dan pendanaannya. Topik penelitian diusahakan bertumpu pada isu strategis dan permasalahan pembangunan yang sedang mengemuka di Kota Payakumbuh. Penelitian yang dilakukan masih bekerja sama dengan lembaga penelitian yang ada di perguruan-perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat, seperti Universitas Andalas (UNAND), dan Universitas Negeri Padang (UNP). Untuk kondisi idealnya seharusnya sudah terbentuk Dewan Riset Daerah Kota Payakumbuh, dengan beranggotakan akademisi pemerhati pembangunan daerah dan Pemerintah Kota Payakumbuh saat ini sedang melakukan proses tersebut.

Tabel II-132
Jumlah Kerjasama Litbang yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh
Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Penelitian	Peneliti	Lembaga Penelitian	Judul Penelitian
1	2015	2	Universitas Andalas	LPPM	Roadmap Sistim Informasi Daerah Kota Payakumbuh
			Univesitas Negeri Padang	PKSBE	Tingkat Capaian Profesionalisme Guru Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Payakumbuh
2	2016	2	Universitas Andalas	LPPM	Grand Design Tecnopark Kota Payakumbuh.
			Univesitas Negeri Padang	PKSBE	Pengaruh Perilaku Pelaku Pendidikan, Orang Tua dan Pelaku Budaya

No.	Tahun	Jumlah Penelitian	Peneliti	Lembaga Penelitian	Judul Penelitian
					terhadap Perilaku Peserta Didik Pada SMP dan MTs di Kota Payakumbuh
3	2017	4	Universitas Andalas	LPPM	Sistim Inovasi Daerah Kota Payakumbuh
				PSKP	Background Study RPJMD Kota Payakumbuh
					Kajian Peningkatan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah Kota Payakumbuh tahun 2017
			Univesitas Negeri Padang	PKSBE	Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP dan MTs Kota Payakumbuh
4	2018	4	Universitas Andalas	PSKP	Penyusunan Dokumen Kajian Kebutuhan Daerah dan Kelayakan Bidang Usaha BUMD Kota Payakumbuh
			Univesitas Negeri Padang	PKSBE	Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Karakter Peserta Didik Pada Tingkat SMP dan MTs Kota Payakumbuh.
					Studi Perencanaan Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Payakumbuh Tahun 2018.
			BPS Kota Payakumbuh	BPS	Nilai Tukar Petani (NTP)
5	2019	4	Universitas Andalas	PSKP	Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis Pendirian BUMD Kota Payakumbuh.
			Univesitas Negeri Padang	PKSBE	Evaluasi Program Pesantren Ramadhan Bagi Peserta Didik SMP dan MTs di Kota Payakumbuh.
					Rencana Induk Kelitbangan Kota Payakumbuh Tahun 2020-2024.
			BPS Kota Payakumbuh	BPS	BPS Kota Payakumbuh

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2020

Pada tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2015 penelitian daerah dikerjasamakan dengan UNP sebanyak 1 penelitian dan UNAND sebanyak 1 penelitian. Dan pada tahun 2016 penelitian daerah berjumlah 2 dokumen yang melibatkan UNP sebanyak 1 penelitian dan

UNAND sebanyak 1 penelitian. Sedangkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 meningkat menjadi masing-masing 4 dokumen. Tahun 2018 dan 2019 Litbang bekerjasama dengan BPS untuk melakukan penelitian Nilai Tukar Petani (NTP). Untuk penyebarluasan atau pemanfaatan terhadap hasil riset/penelitian sudah diupayakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pengembangan melalui pemasyarakatan teknologi tepat guna yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

D. Pengawasan

Salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih adalah terciptanya reformasi birokrasi yang baik yang diindikasikan dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan secara Nasional oleh Kemeterian PAN dan RB. Untuk Kota Payakumbuh baru dilaksanakan pada tahun 2016 dan nilainya pada saat itu adalah sebesar 45 yang menandakan bahwa kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN masih rendah, karena target dari Kemenpan RB adalah 50, namun pada tahun 2017 nilainya sudah meningkat menjadi 56,83, tahun 2018 menjadi 67,41 dan tahun 2019 naik menjadi 71,66 yang menandakan bahwa reformasi birokrasi sudah semakin baik.Di samping itu, akuntabilitas kinerja pemerintahan juga semakin meningkat dengan diraihnya nilai "BB" atau sangat memuaskan.

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Payakumbuh, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Payakumbuh maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga, karena fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia.

Data berikut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2015-2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel II-133
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
▪ ADHB/ (Miliar Rp)	2.379,85	2.568,15	2.758,19	2.999,58	3.298,89
▪ ADHK 2010/ (Miliar Rp)	1.799,03	1.883,56	1.984,17	2.091,12	2.190,09
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	51,12	49,36	48,91	48,88	48,18
Rata-rata konsumsi per kapita (Ribu Rp)					

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
▪ ADHB/ (Ribu Rp)	18.617,91	19.937,76	21.451,85	22.896,70	24.341,56
▪ ADHK 2010/ (Ribu Rp)	14.074,06	14.509,51	15.091,91	15.555,91	15.555,91
Pertumbuhan					
Total konsumsi RT per kapita	2,79	2,73	3,09	4,01	4,42
Jumlah penduduk (orang)	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2016-2020

Selama periode 2015-2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung menurun. Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 51,12% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 48,18%. Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan baik menurut Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Pada tahun 2019 diperkirakan total konsumsi rumah tangga rata-rata/kapita sebesar Rp. 24.341.560,- per-tahun meningkat dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp.22.896.700,-/tahun. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rata-rata per kapita meningkat sebesar 4,42% pada tahun 2019. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pengeluaran, yang secara tidak langsung juga menunjukkan peningkatan pendapatan.

Sementara itu, dilihat dari sisi konsumsi terhadap makanan dan non makanan, tergambar bahwa tingkat konsumsi non makanan mengalami kenaikan sejak tahun 2017 dan pada tahun 2019 naik cukup signifikan dari 51,83% di tahun 2018 menjadi 60,18%. Peningkatan ini disebabkan semakin banyaknya pengeluaran masyarakat untuk memperoleh kebutuhan non makanan seperti perumahan, fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa serta untuk rekreasi. Komposisi pengeluaran non makanan yang naik ini juga mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, karena sebagian besar pendapatan sudah dibelanjakan untuk kebutuhan non makanan. Untuk lebih jelasnya tergambar pada tabel II-134.

Tabel II-134
Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

Kelompok Pengeluaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Rumah Tangga (%)					
• Makanan	37,47	48,8	50,80	48,17	39,82
• Non Makanan	62,53	51,2	49,20	51,83	60,18
Total	100	100	100	100	100

Sumber : Statistik Kesra Kota Payakumbuh, 2020

B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani. Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi Indeks Harga Yang Diterima yang berada pada pembilang (*enumerator*) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Di sisi lain, untuk melihat tingkat kesejahteraan petani secara utuh perlu juga dilihat faktor

pembentuk yang lain, yaitu perkembangan jumlah pengeluaran/pembelanjaan mereka baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi. Dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi, dengan demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani.

Tahun 2015, NTP Kota Payakumbuh adalah sebesar 100,18 dan pada tahun 2016 naik menjadi 100,32%, sedangkan tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 99,33%. Ini disebabkan terjadinya kenaikan biaya produksi berupa bahan baku dan peralatan, sehingga hasil yang diterima petani tidak dapt menutupi biaya produksi yang dikeluarkan. Untuk tahun 2018 NTP kembali meningkat dan melebihi 100%, artinya hasil produk pertanian sudah memberi tambahan kesejahteraan bagi petani dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 nilai rata-ratanya turun kembali menjadi 98,95%. Secara umum hasil pertanian belum memberikan kesejahteraan kepada petani, akan tetapi jika dilihat dari tabel hanya sektor peternakan yang nilainya dibawah 100, artinya secara umum sektor pertanian membuat kesejahteraan masyarakat meningkat, kecuali peternakan. Hal ini mungkin disebabkan karena peternakan merupakan pekerjaan sambilan bagi masyarakat, dan mereka tidak menggantungkan pendapatannya dari hasil peternakan. Ke depannya diharapkan pemerintah terus dapat memberikan stabilisasi harga komoditas pertanian/perikanan, insentif usaha tani/perikanan, fasilitasi permodalan bagi petani/peternak ikan dan penguatan kelembagaan dan kemitraan petani/peternak ikan dengan stakeholder pertanian/perikanan, mendorong masyarakat agar lebih serius dalam menggarap usaha peternakannya sehingga NTP dapat meningkat dan berefek terhadap kesejahteraan petani.

Tabel II-135
Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	NTP Subsektor Tanaman Pangan (%)	98,40	100,20	99,99	100,50	100,70
2	NTP Subsektor Tanaman Hortikultura (%)	103,58	102,52	99,75	105,58	100,65
3	NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (%)	101,46	99,17	96,18	103,46	100,54
4	NTP Subsektor Perikanan	96,94	99,44	100,73	99,14	102,62
5	NTP Subsektor Peternakan	100,54	100,26	99,50	101,54	91,04
	Total	**100,18**	**100,32**	**99,23**	**100,44**	**98,95**

Sumber: Buku Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

2.5.2 Fokus Fasilitasi Wilayah / Infrastruktur

a. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam hal pemanfaatan ruang, berdasarkan indikator pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa Peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.Rasio realisasi rencana tata ruang wilayah dibandingkan dengan rencana peruntukan rencana tata ruang wilayah dari tahun 2015 sampai dengan 2018 cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena tingginya ketaatan masyarakat terhadap regulasi penataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-136
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Realisasi RTRW (ha)	440	580	612,97	682,42	763,23
2.	Rencana Peruntukan RTRW (ha)	8.043	8.043	8.043	8.043	8.043
	Rasio (1/2)	0,054	0,072	0,076	0,084	0,095

Sumber : Dinas PU-PR Kota Payakumbuh, 2020

Salah satu ketaatan terhadap RTRW adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB baik bangunan privat maupun bangunan publik. Untuk semakin meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap RTRW kendala yang dihadapi yaitu belum adanya instrumen peraturan yang operasional, pemahaman masyarakat tentang tata ruang masih rendah, dan SDM aparatur belum mencukupi.

b. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif dilihat dari jumlah luas wilayah produktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan wilayah budidaya. Luas wilayah produktif jika dibandingkan dengan luas seluruh wilayah budidaya dari tahun 2015 sampai dengan 2019 tidak mengalami perubahan dengan rasio rata-rata sebesar 0,94 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel II-137
Rasio Luas Wilayah Produktif Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Wilayah produktif	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041
	Rasio (1:2)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Sumber : Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

c. Luas Wilayah Industri

Rasio luas wilayah industri dilihat dari perbandingan luas seluruh wilayah industri dibandingkan dengan luas wilayah budi daya. Sama halnya dengan luas wilayah produktif di atas, rasio luas wilayah industri dari tahun 2015 sampai tahun 2019 juga tidak mengalami perubahan, karena perkembangan wilayah industri skala menengah dan besar di Kota Payakumbuh tidaksignifikan, sedangkan yang ada hanyalah industri rumah tangga atau berbentuk UMKM, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-138
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas Wilayah industri	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	5.041	5.041	5.041	5.041	5.041
	Rasio (1:2)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Sumber : Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi

kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti pencurian, pembunuhan, kejahatan seksual, kasus narkoba dsb.

Tabel II-139
Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Jenis Kriminal	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus Narkoba	36	43	43	59	46
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	1	0	1	0
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	7	4	4	5	2
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	226	155	155	175	102
5.	Jumlah kasus Pencurian	338	311	311	352	427
6.	Jumlah kasus Penipuan	125	126	125	181	45
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	732	640	640	773	775
9.	Jumlah Penduduk	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	57,27	49,30	48,55	57,81	57,16

Sumber : Polres Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel di atas, angka kriminalitas di Kota Payakumbuh relatif rendah, dimana pada tahun 2019 angka kriminalitas adalah 775 kasus, sedikit lebih tinggi dari tahun 2018.

Tabel II-140
Tindak Kriminal Pelanggaran Perda di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tindak Pelanggaran Perda	kasus	435	430	773	435	229
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
3	Rasio Pelanggaran Perda per 10.000/Penduduk	%	34,03	33,7	58,64	32,53	16,89

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2020

Kasus pelanggaran Perda yang terjadi justru lebih rendah, yaitu hanya berkisar rata-rata 17 kasus dalam 10.000 penduduk pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa Kota Payakumbuh relatif aman, ini semua berkat kerja sama seluruh pihak yang terkait dan adanya kesadaran masyarakat terhadap hidup aman, nyaman dan tenteram di lingkungannya.

Relatif amannya Kota Payakumbuh juga tidak terlepas dari banyaknya jumlah pos-pos keamanan yang dibuat melalui swadaya masyarakat, dimana pada tahun 2019 terdapat 94 unit pos Siskamling, artinya setiap 10.000 orang penduduk terdapat 6 sampai 7 unit pos Siskamling. Dimana pada tahun 2019 ini meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2018 sebanyak 48 unit atau 3-4 pos setiap 10.000 orang penduduk.

Tabel II-141
Jumlah Pos Siskamling di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Pos Siskamling	Unit	76	48	48	48	94
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573
3	Rasio Pos Siskamling per 10.000/Penduduk	%	5,94	3,7	3,6	3,5	6,7

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2019

Kasus pelanggaran Perda yang terjadi justru lebih rendah, yaitu hanya berkisar rata-rata 17 kasus dalam 10.000 penduduk pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa Kota Payakumbuh relatif aman, ini semua berkat kerja sama seluruh pihak yang terkait dan adanya kesadaran masyarakat terhadap hidup aman, nyaman dan tenteram di lingkungannya.

Pada ghalibnya, angka kriminalitas mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Investor dalam menghasilkan barang dan jasa, akan dirugikan jika terganggu oleh kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum (perijinan). Untuk mengurangi angka kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan petugas keamanan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kota Payakumbuh sehingga investor tidak ragu dan merasa nyaman untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan; pengembangan sistem pengamanan rahasia; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Payakumbuh

b. Jumlah Demonstrasi

Kota Payakumbuh adalah kota yang relatif aman, selama tahun 2019 tidak ada gejolak sosial kemasyarakatan yang mengganggu aktifitas pembangunan dan investasi. Ini menandakan bahwa masyarakatnya sudah makmur dan sejahtera, sehingga tidak perlu menyampaikan aspirasinya dengan demonstrasi menuntut hal-hal yang tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat. Walaupun ada riak-riak kecil, itu selalu disampaikan melalui mekanisme langsung dengan tatap muka dengan pemerintah Kota Payakumbuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

c. Perijinan dan Pelayanan untuk Investasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. ini berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Payakumbuh menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, dimana terjadi penyederhanaan terhadap ijin usaha yang diberikan dalam rangka peningkatan peluang investasi, dimana terdapat 79 jenis pelayanan dan perijinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lama proses pelayanan perizinan disederhanakan sesuai

dengan jenis perijinan dan diberikan, yaitu berkisar antara 3 s/d 14 hari kerja dengan layanan gratis dan berbiaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara garis besarnya, jenis perijinan yang diberikan antara lain :

SIU : Surat Izin Usaha sesuai dengan jenis usahanya
TDP : Tanda Daftar Perusahaan
TDI : Tanda Daftar Industri
IMB : Izin Mendirikan Bangunan
Dan berbagai jenis pelayanan lainnya.

Sejak tahun 2019 Pemerintah Kota Payakumbuh telah membuat terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam hal proses perizinan dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik, yang telah dibuka mulai bulan Oktober tahun 2019.

d. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah sampai tahun 2019 ini meliputi ; Pajak sebanyak 10 macam dan retribusi terdiri dari 3 jenis yaitu Retribusi jasa umum 8 macam, Retribusi Jasa usaha 8 macam dan retribusi perizinan tertentu satu macam, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel II-142
Pajak dan Retribusi Daerah Kota Payakumbuh sampai dengan Tahun 2019

No	Pajak/Retribusi
Pajak	
1.	Pajak Hotel
2.	Pajak Restoran
3.	Pajak Hiburan
4.	Pajak Reklame
5.	Pajak Penerangan Jalan
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7.	Pajak Parkir
8.	Pajak Air Tanah
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)
Retribusi	
	Retribusi Jasa Umum
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2.	Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.	Retribusi Pelayanan Pasar
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
7.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
	Retribusi Jasa Usaha
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3.	Retribusi Tempat Pelelangan
4.	Retribusi Terminal
5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir
6.	Retribusi Rumah Potong Hewan

No	Pajak/Retribusi
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
	Retribusi Perizinan Tertentu
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sumber : Badan keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh, 2020

Dalam memajukan iklim investasi, Pemda dan masyarakat harus komitmen, dengan memberi rasa aman bagi investor, kemudahan dalam mengurus administrasi perizinan, serta daya dukung anggaran pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi mutakhir. Majunya iklim investasi akan berdampak positif tehadap kemajuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik maka iklim investasi akan terus berkembang dan angka pengangguran akan berkurang, karena terbukanya lapangan kerja baru.

Pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik, serta masyarakat terus menjaga keamanan yang kondusif demi mendukung perkembangan iklim investasi demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu berupaya mengevaluasi seluruh bidang pembangunan di Kota Payakumbuh yang dapat dijadikan peluang bagi investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Sehingga, dapat diketahui bidang mana yang memerlukan investasi yang lebih baik di Kota Payakumbuh.

2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja.untuk kota payakumbuh sendiri kualitas tenaga kerja yang dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II-143
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

Pendidikan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
≤SD	17.216	17.222	17.223	16.586	17.062
SMTP	10.242	10.264	10.272	11.303	10.520
SMTA Umum	13.758	14.165	14.741	15.243	14.477
SMTA Kejuruan	10.799	10.896	10.984	9.918	10.649
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	2.690	2.870	3.024	3.965	3.137
UNIVERSITAS	8.312	8.622	8.917	10.068	8.982
JUMLAH	**63.017**	**53.143**	**54.177**	**67.083**	**64.827**

Sumber : Statistik Kesra Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019,
Dinas Nakerperin Kota Payakumbuh, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja, demikian pula kualitas angkatan kerja untuk lulusan Universitas dan Diploma juga menurun. Ini menggambarkan bahwa pada tahun 2019 jumlah lulusan perguruan tinggi lebih kecil

dibandingkan tahun 2018. Dari perbandingan masing-masing jenjang pendidikan tersebut kualitas angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah. Yang secara umum menandakan bahwa kualitas angkatan kerja di Kota Payakumbuh relatif masih rendah. Untuk mengatasi kondisi ini, Pemerintah harus menggalakkan pendidikan keterampilan, sehingga daya saing angkatan kerja dapat ditingkatkan.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Tabel II-144
Rasio Ketergantungan Kota Payakumbuh Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	38.146	38.495	38.555	38.811	39.055
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	7.038	7.223	7.630	7.991	8.316
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	45.184	45.718	46.185	46.802	47.371
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	82.642	84.089	85.634	86.901	88.202
5.	Rasio ketergantungan total (3)/(4)	54,67	54,37	53,93	53,85	53,71
6.	Rasio Ketergantungan muda (1/4)	46,15	45,78	45,02	44,66	44,28
7.	Rasio ketergantungan tua (2/4)	8,5	8,59	8,91	9,20	9,43
8.	Jumlah Penduduk	127.826	129.807	131.819	133.703	135.573

Sumber **:** Payakumbuh Dalam Angka, 2020

Rasio ketergantungan terbesar selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2015 dimana tingkat ketergantungan ini sebesar 54,67. Ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 46,15 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 8,50. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2015 penduduk usia kerja di Kota Payakumbuh masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Semenjak tahun 2016 sampai tahun 2019 terus terjadi penurunan, dimana pada tahun 2019 rasio ketergantungan berada diangka 53,86%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 53 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 53,86 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 44,66% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 9,20%. Sekitar 46.14% dari jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2019 adalah penduduk usia produktif, sedangkan sisanya merupakan jumlah usia tidak produktif yang otomatis menjadi beban ketergantungan. Jika dilihat dari proporsi ketergantungan penduduk, Rasio ketergantungan muda lebih besar dari rasio ketergantungan tua. Ini diartikan beban penduduk produktif proporsi tanggung jawabnya lebih besar terhadap penduduk muda dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

2.6 Gambaran Wabah Covid-19 di Kota Payakumbuh

Sejak awal tahun 2020 ini, wabah Covid-19 yang menimpa hampir seluruh negara-negara di dunia akhirnya juga menimpa Indonesia. Provinsi Sumatera Barat termasuk Kota Payakumbuh tidak dapat menghindar dari wabah tersebut. Jika dilihat trend perkembangan kasus yang menimpa penduduk dari awal bulan April sampai September 2020 cenderung semakin meningkat.

Sampai bulan September ini kasus yang terkonfirmasi positif di Kota Payakumbuh berjumlah 106 orang, meninggal 1 orang dan yang sembuh 61 orang, sedangkan sisanya masih menjalani perawatan baik secara mandiri maupun di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah serta dirawat pada beberapa Rumah Sakit Rujukan Covid. Berikut sebaran kasus Covid-19 di Kota Payakumbuh.

Tabel II-145
Sebaran Kasus Covid-19 Kota Payakumbuh Per-September 2020

No.	Kecamatan	Spesimen Diperiksa (orang)	Konfirmasi (orang)	Sembuh (orang)	Meninggal (orang)	Positif Rate (%)
1.	Payakumbuh Utara	1403	20	9	0	1,21
2.	Payakumbuh Barat	2526	49	25	0	1,82
3.	Payakumbuh Timur	1844	20	15	1	1,08
4.	Payakumbuh Selatan	977	13	8	0	1,33
5.	Lamposi Tigo Nagori	790	4	4	0	0,5
Jumlah		**7540**	**106**	**61**	**1**	**1,4**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, September 2020

Dari data di atas terlihat bahwa Kecamatan Payakumbuh Barat menunjukkan tingkat positif rate tertinggi sebesar 1,82%. Ini berbanding lurus dengan kepadatan dan jumlah penduduk yang lebih tinggi di kecamatan ini. Dari jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 2.526 orang ditemukan kasus positif sebanyak 49 orang. Sementara itu, secara keseluruhan tingkat positif rate kasus Covid-19 di Kota Payakumbuh sebesar 1,4%, dimana dari jumlah spesimen sebanyak 7.540 orang terkonfirmasi positif sebanyak 106 orang. Pada bulan September ini juga terjadi 1 (satu) kasus meninggal dari pasien yang terkonfirmasi positif di Kecamatan Payakumbuh Timur. Di samping itu, jumlah pasien terkonfirmasi positif yang sembuh mencapai 61 orang atau sebesar 57,55%. Ini tidak lain karena penanganan yang cukup baik terhadap semua kasus yang terkonfirmasi.

Sejak terjadi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada bulan April 2020 lalu di Kota Payakumbuh, sebetulnya tingkat perkembangannya tidak terlalu signifikan, terdapat fluktuasi setiap bulannya sampai sekarang, walaupun di bulan September mencatatkan kasus terbesar sebanyak 55 orang dari jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 2.135 orang. Sampai bulan September 2020 telah diperiksa sebanyak 7.540 spesimen. Untuk lebih lengkapnya sebagaimana tergambar pada tabel II-146.

Tabel II-146
Data Kasus Covid-19 Kota Payakumbuh Bulan April-September 2020

No	Uraian	Bulan						Jumlah
		April (orang)	Mei (orang)	Juni (orang)	Juli (orang)	Agustus (orang)	September (orang)	
1	Spesimen	56	914	243	1550	2642	2135	7540
2	Positif	6	12	2	3	28	55	106
3	Sembuh	-	8	12	2	4	35	61
4	Meninggal	-	-	-	-	-	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, September 2020

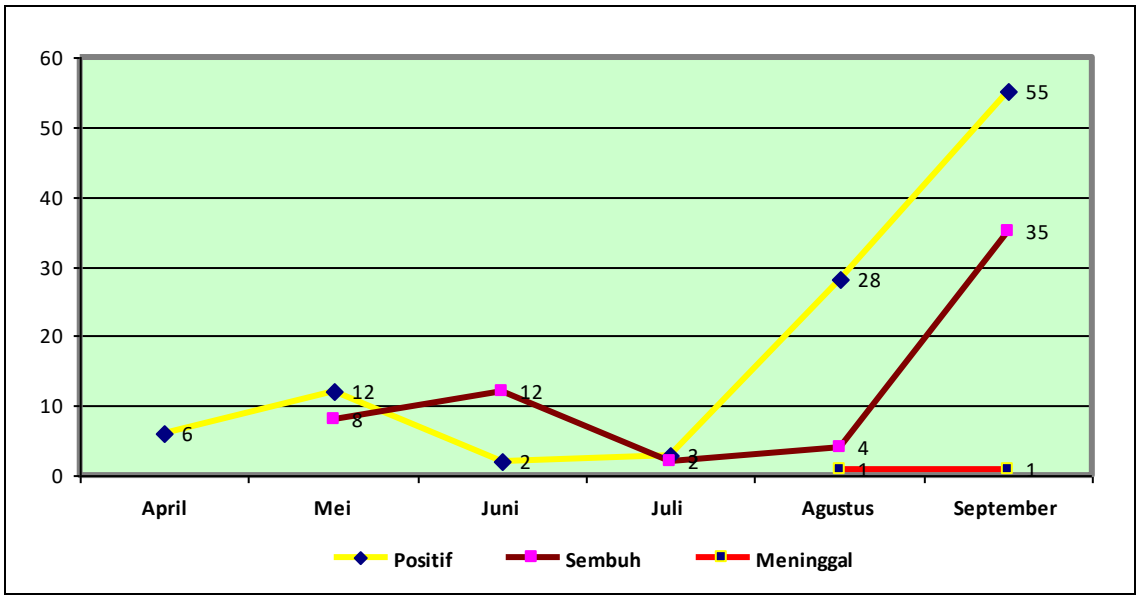


Diagram II-21
Perkembangan kasus Covid 19 di Kota Payakumbuh Periedo April-September 2020
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, September 2020

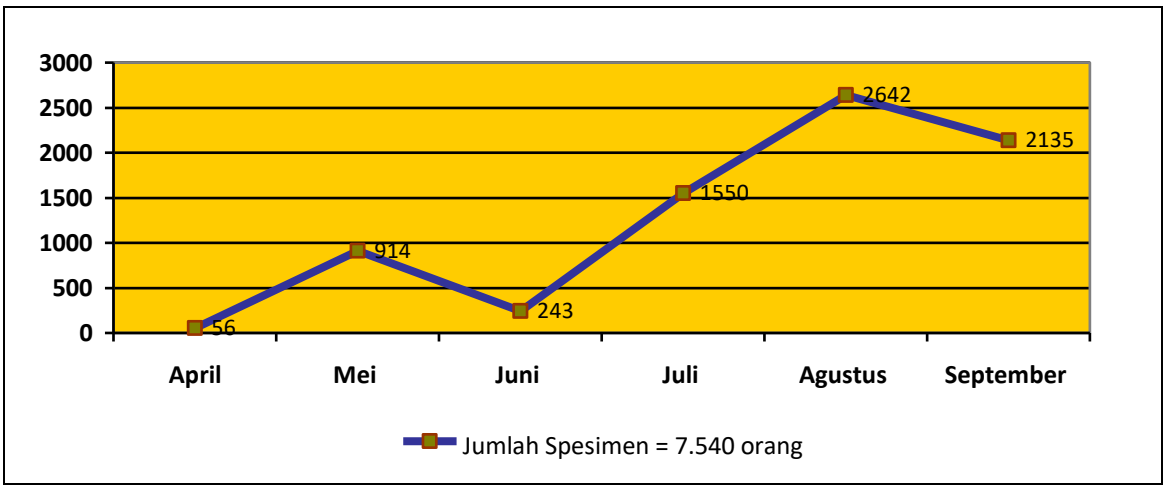


Diagram II-22
Jumlah Spesimen yang di Periksa di Kota Payakumbuh Selama April-September 2020
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, September 2020

Sementara itu, jika dilihat dari karakteristik kasus pada pasien yang terkonfirmasi positif sebanyak 106 orang tersebut, sebagian besar adalah perempuan sebanyak 62 orang

dan sisanya 44 orang laki-laki, ini cukup menandakan bahwa perempuan cukup rentan terhadap wabah ini. Rata-rata lama perawatan yang dilakukan terhadap kasus positif ini adalah 19,43 hari, dimana perawatan yang paling lama adalah 47 hari dan terpendek adalah 9 hari saja. Sedangkan yang menderita penyakit bawaan berjumlah 19 orang. Untuk lebih lengkapnya sebagaimana tergambar pada tabel II-147.

Tabel II-147
Karakteristik Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Kota Payakumbuh
Per-September 2020

No	Karakteristik Kasus Konfirmasi Positif Covid	Jumlah
1	Jumlah Kasus Konfirmasi	106 orang
2	Distribusi berdasarkan Jenis Kelamin : - Laki-laki - Perempuan	 44 orang 62 orang
3	Perawatan Terpanjang	47 hari
4	Perawatan Terpendek	9 hari
5	Comorbid	19 orang
6	Klinis	35 orang
7	Rata-rata Lama Rawat	19,43 hari

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, September 2020

Secara keseluruhan dari kasus kematian yang ditimbulkan oleh wabah covid ini dari 106 orang yang terkonfirmasi positif dan meninggal 1 orang (0,94%) ini menandakan penanganan yang cukup baik dari pemerintah dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi terhadap wabah ini.

Namun dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan juga sangat besar, dimana terjadinya halangan bagi masyarakat untuk berkumpul untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan sehingga mengakibatkan sekolah diliburkan dan dilakukan secara online, aktifitas perekonomian masyarakat menurun serta menimbulkan tersedotnya perhatian semua pihak terutama pemerintah kepada wabah ini. Pemerintah terpaksa melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, dengan beberapa kebijakan yang diambil antara lain, meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan, melakukan langkah-langkah mitigasi, penanganan dampak sosial, ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan. Dari beberapa data kondisi sosial ekonomi sebagai dampak wabah Covid-19 di Sumatera Barat sampai dengan bulan Agustus 2020 ini antara lain ;

a. Pelarangan kegiatan berkumpul, terutama saat PSBB dari April-Juni berdampak pada penutupan tempat-tempat ibadah, perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan dan tempat aktivitas ekonomi lainnya, peniadaan penerbangan dan penutupan akses keluar masuk jalur darat kecuali untuk barang. Yang pada gilirannya menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
b. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat mencatat sampai bulan September 2020 sebanyak 10.690 pekerja terkena dampak virus corona (Covid-19), dengan perincian 10.060 orang dirumahkan dan 630 orang dipecat di seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
c. Turunnya harga kebutuhan pokok yang diproduksi dalam daerah seperti telur dan cabe, sedangkan yang didatangkan dari luar daerah naik, seperti bawang.
d. Turunnya realisasi belanja pemerintah hingga 90,96% dibandingkan waktu yang sama di tahun 2019.
e. Turunnya realisasi investasi sebesar 24,26% dibandingkan waktu yang sama di tahun 2019.

Di samping itu, dampak global akibat wabah Covid-19 ini juga menyebabkan pemerintah harus menyesuaikan target-target makro ekonomi serta indikator-indikator pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Sebagai

gambaran, pemerintah pusat dan provinsi sudah menurunkan target makro ekonomi mereka, seperti pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat terkontraksi pada triwulan II tahun 2020 ini menjadi minus 4,91%, namun target secara keseluruhan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2020 ini berada pada 1,18%.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kota Payakumbuh juga harus menyesuaikan target makro ekonominya dengan mempertimbangkan kondisi lokal, regional dan nasional. Target-target tersebut akan digambarkan dan ditetapkan dalam pembahasan pada BAB selanjutnya.

2.7 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Evaluasi capaian kinerja untuk perubahan RPJMD ini menggunakan model evaluasi Form E.58 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena kita perlu menampilkan evaluasi tahunan mulai dari target, realisasi dan tingkat capaian. Sehingga bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan matrik indikasi program dan pendanaan pada Bab VIII perubahan RPJMD ini. Evaluasi ini terdiri dari evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Tabel II-148
Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target di akhir Periode RPJMD	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	82	67	70	74	65	70	75	97,01	100,00	101,35	91,46
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2	Angka Usia Harapan Hidup	74,50	73,14	73,40	73,60	73,13	73,33	73,61	99,99	99,90	100,01	98,81
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,50	61,70	61,76	61,80	61,70	61,99	62,30	100,00	100,37	100,81	99,68
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	4	Tingkat Kemiskinan	5,00	6,2	5,93	5,66	5,88	5,77	5,68	105,44	102,77	99,65	88,03
		5	Tingkat Pengangguran	5,80	7,07	6,77	6,62	3,45	3,78	4,11	204,93	179,10	161,07	141,12
5	Meningkatnya prestasi Atlet	6	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional	20	4	7	11	9	14	20	225,00	200,00	181,82	100,00
6	Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis	7	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	24,17	23,92	23,97	24,02	24,48	25,15	25,13	102,34	104,92	104,62	103,97
		8	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	6,12	5,98	6,00	6,02	5,26	5,13	4,80	87,96	85,50	79,73	78,43
		9	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	7,47	7,39	7,42	7,44	7,04	6,75	6,35	95,26	90,97	85,35	85,01
		10	Persentase peningkatan kunjungan wisata	7,50	1,2	5,00	5,10	10,80	11,28	5,11	900,00	225,60	100,20	68,13
7	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	11	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	202	195	195,00	196,90	229,3	231,5	250,6	117,59	118,72	127,27	124,06
		12	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	29,70	27,14	27,64	28,15	27,14	15,27	15,49	100,00	55,25	55,03	52,15
8	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi	13	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	18,30	10,26	10,00	12,15	2,18	3,77	9,01	21,25	37,70	74,16	49,23
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	14	Persentase pelayanan air minum	100,00	94,41	96,71	98,80	95,46	96,73	97,84	101,11	100,02	99,03	97,84
		15	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	80,31	66,56	69,31	72,06	67,22	69,21	72,25	100,99	99,86	100,26	89,96
		16	Persentase Sistem drainase skala kota	50,44	42,17	44,46	47,93	47,44	51,74	58,95	112,50	116,37	122,99	116,87
		17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,10	78,60	78,90	79,20	78,60	78,90	79,23	100,00	100,00	100,04	98,91
		18	Persentase daerah irigasi berkinerja baik	86,58	73,43	76,34	79,10	76,77	77,96	80,60	104,55	102,12	101,90	93,09
		19	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	94,44	72,22	77,78	83,33	66,67	66,67	66,98	92,32	85,72	80,38	70,92
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,00	56,5	57,00	57,25	56,5	58,96	59,66	100,00	103,44	104,21	102,86
11	Mewujudkan Perumahan dan permukiman yang layak	21	Persentase luas permukiman kumuh	1,17	1,77	1,77	1,62	2,59	1,88	1,64	146,33	106,21	101,23	140,17
12	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan	22	Nilai Evaluasi AKIP Kota	A	BB	BB	BB	BB	BB	BB	146,33	106,21	101,23	140,17
		23	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	80,00
		24	Persentase Perangkat Daerah (PD) terintegrasi Teknologi Informasi (TI)	100,00	9,68	29,03	45,16	9,68	29,03	45,16	100,00	100,00	100,00	45,16
		25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,85	79,35	79,85	80,35	79,35	80,90	81,66	100,00	101,31	101,63	99,77
		26	Indeks Reformasi Birokrasi	70,00	45	50,00	55,00	56,83	67,41	71,66	126,29	134,82	130,29	102,37
13	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	27	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	51,06	5,81	21,28	28,72	13,83	22,00	47,62	238,04	103,38	165,81	93,26

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target di akhir Periode RPJMD	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		28	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	5,00	3,0	3,40	3,80	3,00	3,20	4,78	100,00	94,12	125,79	95,60
14	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	29	Persentase lembaga keagamaan(MUI) yang aktif	100,00	61,29	30,00	40,00	20,00	20,00	60,00	32,63	66,67	150,00	60,00
		30	Persentase lembaga adat yang aktif (Kerapatan Adat Nagari/KAN)	100,00	80,00	90,00	95,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	105,26	100,00

Tabel II-149
Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh
Tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,38	6,11	6,14	6,20	6,12	6,05	5,92	100,16	98,53	95,48	92,79
2	Laju Inflasi	%	2,85	4,17	4,97	4,44	2,11	2,55	1,72	197,63	194,90	258,14	165,70
3	PDRB Perkapita	*juta rupiah*	47,89	40,11	41,93	43,87	42,78	45,89	50,37	106,66	109,44	114,82	105,18
4	Nilai Koefisien Gini	Nilai	0,300	0,303	0,302	0,301	0,303	0,303	0,280	100,00	100,33	93,02	93,33
5	Tingkat kemiskinan	%	5,00	6,20	5,93	5,66	5,88	5,77	5,68	105,44	102,77	99,65	88,03
6	Tingkat Pengangguran	%	5,80	6,92	6,77	6,62	3,45	3,78	4,11	200,58	179,10	161,07	141,12
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	79,63	77,90	78,25	78,60	77,97	78,23	78,95	100,09	99,97	100,45	99,15
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,90	10,40	10,50	10,60	10,42	10,50	10,72	100,19	100,00	101,13	98,35
9	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,77	14,31	14,40	14,49	14,25	14,24	14,25	99,58	98,89	98,34	96,48
10	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,50	73,14	73,40	73,60	73,13	73,33	73,61	99,99	99,90	100,01	98,81
	Aspek Pelayanan Umum												
	Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar												
a.	**Urusan Pendidikan**												
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)												
-	APK PAUD	%	76,30	75,00	75,50	75,70	62,61	82,81	81,49	83,48	109,68	107,65	106,80
-	APK SD/MI/Paket A	%	132,75	114,31	121,66	125,05	124,20	125,89	122,53	108,65	103,48	97,98	92,30
-	APK SMP/MTs/Paket B	%	162,10	141,05	156,98	158,10	159,67	163,68	163,51	113,20	104,27	103,42	100,87
2	Angka Partisipasi Murni												
-	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	113,80	100,88	108,39	109,75	110,65	112,68	110,16	109,68	103,96	100,37	96,80
-	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	124,15	109,94	119,30	120,15	121,32	125,40	125,30	110,35	105,11	104,29	100,93
-	Jumlah prestasi siswa tingkat provinsi	Prestasi	109	15	15	16	27	15	30	180,00	100,00	187,50	27,52
-	Jumlah prestasi siswa tingkat nasional	Prestasi	18	2	2	2	7	1	4	350,00	50,00	200,00	22,22
-	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	Sekolah	82	67	70	74	70	70	75	104,48	100,00	101,35	91,46
-	Jumlah Lembaga PAUD dan Dikmas yang terakreditasi	Sekolah	12	4	5	7	54	4	9	1350,00	80,00	128,57	75,00
-	Angka kelulusan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91	100	100	99,91	100,00	100,00	100,00
-	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SD	Nilai	7,90	7,60	7,65	7,70	7,60	7,43	7,29	100,00	97,12	94,68	92,28
-	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	Nilai	6,51	5,75	5,80	5,85	5,75	5,95	5,81	100,00	102,59	99,32	89,25
b.	**Urusan Kesehatan**												
1	Jumlah Kasus Kematian Bayi	jumlah	23	27	27	26	13	16	9	207,69	168,75	288,89	255,56
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	jumlah	3	3	3	3	3	1	2	100,00	300,00	150,00	150,00
3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	<3	<3	<3	<3	0,07	0,08	0,13	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah kasus Kematian Balita	jumlah	<8	<13	<12	<11	3	0	1	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Menular berpotensi KLB	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,87	100,00	100,00	97,87	100,00	100,00
6	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,39	100,00	100,00	95,39	100,00	100,00
7	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	%	95,00	85,00	87,00	89,00	80,00	85,56	100,00	100,14	98,34	109,31	102,41
8	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Kelurahan STBM	%	95	87	87	90	90,00	95,74	100,00	103,45	110,05	111,11	105,26
10	Persentase Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat	%	87	77	77	80	75,55	77,14	77,98	98,12	100,18	97,48	89,63
11	Persentase Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat dan Perbelkes	%	93	80	80	85	90,00	85,46	85,00	112,50	106,83	100,00	91,40
12	Persentase IRTP sesuai standar kesehatan	%	80	60	60	65	60,00	75,50	65,00	100,00	125,83	100,00	81,25
c.	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**												
1	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan	%	94,89	91,61	92,30	92,97	93,92	95,57	96,37	102,52	103,54	103,66	101,56
2	Persentase irigasi dengan kondisi baik	%	86,58	76,34	76,34	79,10	73,43	77,96	80,60	96,19	102,12	101,90	93,09
3	Persentase Penataan sungai	%	26,37	18,56	18,56	21,69	18,56	20,53	23,38	100,00	110,61	107,79	88,66

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
4	Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	%	80,31	66.56	69,31	72,06	67,22	69,21	72,25	100,99	99,86	100,26	89,96
5	Persentase jalan kota yang memiliki drainase	%	50,44	44,46	44,46	45,95	47,44	51,74	58,95	106,70	116,37	128,29	116,87
6	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	%	34,18	31,32	31,32	32,02	30,90	32,77	33,75	98,66	104,63	105,40	98,74
d.	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**												
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,98	91,70	92,95	93,81	91,90	92,98	94,22	100,22	100,03	100,44	97,15
2	Persentase pengurangan Backlog	%	2,06	NA	2,04	3,04	16,96	16,23	15,02	NA	12,57	20,24	13,72
3	Persentase rumah bersanitasi layak	%	95,76	88,20	89,71	91,22	89,78	91,47	93,23	101,79	101,96	102,20	97,36
4	Luas pengurangan kawasan kumuh	Ha	5,30	5,80	5,70	5,60	2,59	1,88	1,64	223,94	303,19	341,46	323,17
e.	**Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**												
1	Penegakkan Perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	80	92,6	100,00	80,00	92,60	92,60
2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	13,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,8	100,00	100,00	122,50	75,38
3	Rasio jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Rasio	48,00	48,00	48,00	48,00	42,00	39,81	56,25	87,50	82,94	117,19	117,19
4	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ kelurahan	Unit	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan pelayanan penanganan kebakaran	%	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33	124,33	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	40,91	40,35	40,91	40,91	55,77	84,64	85,71	138,22	206,89	209,51	209,51
f.	**Urusan Sosial**												
1	Tingkat Kemiskinan	%	5,00	6,20	5,93	5,66	5,88	5,77	5,68	105,44	102,77	99,65	88,03
2	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu	%	1,00	0,20	0,20	0,40	0,53	1,95	7,93	265,00	975,00	1982,50	793,00
3	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	%	70,00	44,00	48,00	50,00	45,55	92,57	66,66	103,52	192,85	133,32	95,23
4	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	%	100,00	99,50	99,60	99,70	98,00	101,64	98,85	98,49	102,05	99,15	98,85
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar												
a.	**Urusan Ketenagakerjaan**												
1	Tingkat Pengangguran	%	5,80	6,92	6,77	6,62	3,45	3,78	4,11	200,58	179,10	161,07	141,12
2	Tingkat Partisipasi Angatan Kerja (TPAK)	%	67,00	35,68	43,68	51,00	70,62	43,67	68,06	197,93	99,98	133,45	101,58
b.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**												
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	98,62	98,52	98,52	98,52	98,52	98,53	98,54	100,00	100,01	100,02	99,92
2	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Mentor	-	Utama	-	-	Utama	-	-	100,00	-	90,00
3	Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	Nindya	Pratama	-	Madya	Pratama	-	Madya	100,00	100,00	100,00	90,00
4	Jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak	Jumlah	10	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	10,00
5	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO)	%	100	95	95	95	95	100	100	100,00	105,26	105,26	100,00
6	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD)	%	12,00	8,00	8,00	12,00	8,00	8,00	16,00	100,00	100,00	133,33	133,33
7	Persentase kekerasan terhadap anak	%	0,026	0,07	0,061	0,052	0,07	0,0385	0,0385	100,00	158,44	135,06	67,53
8	Persentase kekerasan terhadap perempuan	%	0,04	0,10	0,092	0,074	0,10	0,0395	0,0395	100,00	232,91	187,34	101,27
c.	**Urusan Pangan**												
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berbasis ketersediaan	skor	96,50	80,00	83,00	86,00	81,50	84,31	87,64	101,88	101,58	101,91	90,82
2	Skor PPH Konsumsi	skor	93,00	NA	80,50	82,00	NA	84,1	82	NA	104,47	100,00	88,17
3	Tingkat Keamanan Pangan	Indeks	Tinggi	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	Sedang	100,00	100,00	100,00	90,00
4	Stabilisasi harga												
	a. Beras	%	≤10	≤10	≤10	≤10	3,18	1,74	3,13	100,00	100,00	100,00	100,00
	b. Cabe	%	≤25	≤25	≤25	≤25	28,87	13,62	22,80	86,60	100,00	100,00	100,00
	c. Bawang	%	≤10	≤10	≤10	≤10	11	15,83	17,25	90,91	63,17	57,97	57,97
5	Stabilisasi Pasokan	%	≥77	≥77	≥77	≥77	77,55	78,25	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d.	**Urusan Pertanahan**												
1	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko	%	63,64	56,82	58,18	59,55	56,82	58,18	59,55	100,00	100,00	100,00	93,57
e.	**Urusan Lingkungan Hidup**												
1	Persentase RTH Publik	%	17,00	15,45	15,91	16,25	15,45	0,96	14,87	100,00	6,03	91,51	87,47
2	Indeks Kualitas Air	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	66,67	70,83	100,00	88,89	94,44	94,44
3	Indeks Kualitas Udara	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	92,29	93,73	100,00	115,36	117,16	117,16
4	Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	%	60,01	35,05	42,02	46,03	30,01	42,06	42,22	85,62	100,10	91,72	70,35
5	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	95,34	89,12	90,16	91,22	88,02	88,00	89,40	98,77	97,60	98,00	93,77
f.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**												
1	Contrasepsi Prevalens Rate	%	77,10	76,60	76,80	76,9	76,60	69,07	70,30	100,00	89,93	91,42	91,18
2	Cakupan Pelayanan Program Kependudukan,	%	90,00	70,00	74,00	80,00	70,00	74,00	80,00	100,00	100,00	100,00	88,89

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)												
g.	**UrusanKependudukan dan Pencatatan Sipil**												
1	Cakupan kepemilikan KTP	%	91,00	83,00	84,00	88,00	96,70	95,23	98,96	116,51	113,37	112,45	108,75
2	Cakupan kepemilikan Akte kelahiran (0–18 Tahun)	%	92,00	85,00	87,00	89,00	86.10	91,01	94,52	101,29	104,61	106,20	102,74
3	Cakupan kepemilikan KK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Cakupan kepemilikan akte kematian	%	62,00	36,00	37,00	40,00	36,00	50,17	70,53	100,00	135,59	176,33	113,76
5	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	86,25	76,00	77,00	79,25	76	84,10	90,77	100,00	109,22	114,54	105,24
6	Persentase Penyelesaian Penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	%	98,00	85,00	88,00	90,00	85	100	100	100,00	113,64	111,11	102,04
7	Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen	hari	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
h.	**Urusan Perhubungan**												
1	Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	%	75,84	63,24	65,36	67,48	63,24	92,95	94,77	100,00	142,21	140,44	124,96
2	Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	71,55	70,45	70,60	70,75	70,45	71,42	100	100,00	101,16	141,34	139,76
3	Jumlah rute pelayanan angkutan umum dalam kota	Rute	13,00	23,00	23,00	13,00	23	23	13	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Nilai survey IKM Pelayanan Transportasi	angka	100,00	90,16	90,22	90,28	90,16	89,20	89,28	100,00	98,87	98,89	89,28
5	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	80,21	68,50	70,70	73,25	40,00	86,06	146,67	171,25	82,15	49,94	54,69
i.	**Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**												
1	Persentase UKM terhadap UMKM	%	29,70	27,14	27,64	28,15	27,14	15,27	15,49	100,00	55,25	55,03	52,15
2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	%	20,00	10,00	12,00	14,00	10,09	14,18	1,50	100,90	118,17	10,71	7,50
3	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	%	18,30	7,26	10,00	12,15	2,18	3,77	9,01	30,03	37,70	74,16	49,23
4	Persentase pertumbuhan aset koperasi	%	12,60	2,77	5,00	6,50	14,54	5,30	4,33	524,91	106,00	66,62	34,37
j.	**Urusan Penanaman Modal**												
1	Jumlah investor	orang	1.451	496	766	936	564	1.038	1.539	113,71	135,51	164,42	106,06
2	Nilai Survey Kepuasaan Masyarakat	Nilai	82,80	82,00	82,00	82,20	81,67	90,05	93,49	99,60	109,82	113,73	112,91
3	Jumlah penurunan pengaduan perizinan masyarakat	pengaduan	7	8	7	6	7	5	3	114,29	140,00	200,00	233,33
4	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	202,00	195,00	195,00	196,90	229,3	231,5	250,6	117,59	118,72	127,27	124,06
k.	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**												
1	Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional	Peringkat	1	1	1	1	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peringkat pramuka tk. Propinsi	Regu	9	1	1	2	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Peringkat pemuda pada lomba wirausaha muda tk. Propinsi dan tk. nasional	Peringkat	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisasi	30	20	22	24	1	1	1				
5	Jumlah medali pada even olahraga tingkat daerah	Medali	170	24	145	30	-	-	24	5,00	4,55	4,17	3,33
l.	**Urusan Statistik**												
1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	buah	4	3	4	4	3	4	4	100,00	100,00	100,00	100,00
	Urusan Komunikasi dan Informasi												
1	Persentase Perengkat Daerah yang telah terintegrasi TI	%	100,00	9,68	29,03	45,16	12,90	29,03	45,16	133,26	100,00	100,00	45,16
m.	**Urusan Kebudayaan**												
1	Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) yang dilindungi	unit	28	18	20	22	18	26	26	100,00	130,00	118,18	92,86
2	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	grup	74	66	70	71	70	70	15	106,06	100,00	21,13	20,27
n.	**Urusan Perpustakaan**												
1	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	13.000	7.500	9.000	10.500	8.850	14.086	15.102	118,00	156,51	143,83	116,17
o.	**Urusan Kearsipan**												
1	Jumlah khasanah arsip	berkas	9.500	6.000	7.250	8.000	6.541	10.645	8.594	109,02	146,83	107,43	90,46
	Layanan Urusan Pilihan												
a.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**												
1	Produksi ikan konsumsi	Ton	560,00	482,25	500,00	520,00	485,74	501,65	520,11	100,72	100,33	100,02	92,88
2	Angka Konsumsi Ikan	%	35,00	28,99	31,00	31,50	29	30,15	31,52	100,03	97,26	100,06	90,06
b.	**Urusan Pariwisata**												
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	7,50	2,50	5,00	5,10	10,80	11,28	5,11	432,00	225,60	100,20	68,13
c.	**Urusan Pertanian**												
1	Produksi padi	Ton	43.000	37.500	37.750	38.588	41.150	41.515	39.800	109,73	109,97	103,14	92,56
2	Produksi cabe	Ton	990	980	980	985	606	892	897,6	61,84	91,02	91,13	90,67
3	Produksi bawang	Ton	600	180	200	300	110	140	211,50	61,11	70,00	70,50	35,25
4	Produksi Kakao	Ton	1.230	1.095	1.095	1.095	950	1.045	3.002,24	86,76	95,43	274,18	244,08
5	Populasi sapi	Ekor	6.200	5.620	5.732	5.846	5.707	5.756	5.849	101,55	100,42	100,05	94,34
d.	**Urusan Perdagangan**												
1	Persentase pertumbuhan omset	%	35,00	25,00	27,00	29,00	-	6,45	6,45	0,00	23,89	22,24	18,43
2	Kontribusi sektor	%	24,17	23,92	23,97	24,02	24,48	25,15	25,13	102,34	104,92	104,62	103,97

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Perdagangan terhadap PDRB (2010=100)												
e.	**Urusan Perindustrian**												
1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (2010=100)	%	6,12	5,98	6,00	6,02	5,67	5,35	5,60	94,82	89,17	93,02	91,50
2	Persentase peningkatan nilai produksi	%	10,00	-	1,50	1,50	2,15	1,59	1,65	-	106,00	110,00	16,50
3	Jumlah Produk Industri yang mendapatkan sertifikat industri	Nilai	15,00	6,00	8,00	8,00	5,52	9,00	9,00	92,00	112,50	112,50	60,00
	Fungsi Pendukung												
a.	**Kesekretariatan Daerah**												
1	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai	A	B	BB	BB	BB	BB	BB	120,00	100,00	100,00	90,00
2	Peringkat LPPD	Peringkat	12	20	18	16	15	15	30	75,00	83,33	187,50	250,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi	%	90,00	50,00	60,00	70,00	50	60	60	100,00	100,00	85,71	66,67
b.	**Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**												
1	Indeks kepuasan pimpinan & anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	81,00	70,00	74,00	76,00	73,29	82,00	83,00	104,70	110,81	109,21	102,47
2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD	%	88,00	80,00	82,00	85,00	100	100,00	100,00	125,00	121,95	117,65	113,64
	Penunjang												
a.	**Inspektorat**												
1	Persentase Perangkat Daerah yg Bebas dari temuan Keuangan	%	64,52	16,13	25,80	35,48	64,52	81,48	77,78	400,00	315,81	219,22	120,55
2	Persentase Perangkat Daerah yg Bebas dari temuan Aset	%	64,52	16,13	25,80	35,48	80,65	62,96	74,07	500,00	244,03	208,77	114,80
3	Nilai Indeks RB pada area pengawasan	indeks	70,00	45,00	50,00	55,00	56,83	67,41	71,66	126,29	134,82	130,29	102,37
4	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yg ditindaklanjuti	%	59,00	59,00	59,00	59,00	85,12	86,02	86,02	144,27	145,80	145,80	145,80
5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yg ditindaklanjuti	%	60,00	60,00	60,00	60,00	53,75	80,80	64,42	89,58	134,67	107,37	107,37
6	Persentase Perangkat Daerah yg akuntabilitas kinerjanya meningkat per tahun	%	80,64	48,38	54,83	61,29	93,55	83,87	100	193,37	152,96	163,16	124,01
7	Nilai evaluasi AKIP Inspektorat yg diberikan oleh tim evaluasi AKIP	Nilai	A	B	BB	BB	B	A	A	100,00	100,00	100,00	100,00
b.	**Perencanaan**												
1	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	%	36,00	31,00	32,00	33,00	31,24	33,08	33,11	100,77	103,38	100,33	91,97
2	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	%	98,80	94,08	95,21	95,24	94,08	92,24	88,76	100,00	96,88	93,20	89,84
3	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	%	97,22	85,31	87,78	89,44	83,29	78,57	89,88	97,63	89,51	100,49	92,45
c.	**Keuangan**												
1	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Waktu	20 Des	27 Des	28 Des	20 Des	23 Nov	23 Nov	27 Des	103,25	103,25	98,19	98,19
3	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	%	12,00	11,61	12,00	12,00	15,78	13,64	13,36	135,92	113,67	111,33	111,33
d.	**Kepegawaian**												
1	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	100,00	52,97	57,54	70,68	52,97	57,54	57,81	100,00	100,00	81,79	57,81
2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	%	98,28	41,79	47,27	54,31	41,79	47,63	48,86	100,00	100,76	89,97	49,72
3	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	85,00	80,00	80,40	81,55	79,34	83,00	83,28	99,18	103,23	102,12	97,98
e.	**Penelitian dan Pengembangan**												
1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	%	95,00	60,00	75,00	80,00	80	85,71	90,91	133,33	114,28	113,64	95,69
	Kesatuan Bangsa dan Politik												
1	Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase ormas yang aktif	%	90,64	90,64	90,64	90,64	88,89	84,78	86,27	98,07	93,53	95,18	95,18
	Penanggulangan Bencana Daerah												
1	Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	%	18,36	16,24	17,34	17,34	18	17,34	74,47	110,84	100,00	429,47	405,61
2	Presentase kejadian bencana yang bisa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target di akhir Periode RPJMD	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)			Tingkat Capaian Akhir RPJMD (%)
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana												
	Kewilayahan												
1	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aspek Daya Saing Daerah												
1	Produktifitas Total Daerah	Rp. Jt	106,93	81,34	85,91	90,74	81,92	84,24	108,73	100,71	98,06	119,83	101,68
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp. Ribu	2.271,42	1.743,42	1.848,89	1.954,43	1.816,96	2.602,68	1.431,85	104,22	140,77	73,26	63,04
3	Nilai Tukar Petani	%	101,00	100,38	100,51	100,61	99,23	100,44	98,95	98,85	99,93	98,35	97,97
4	Rasio Ketergantungan	%	54.39	54.39	54.40	54.41	54,15	53,62	53,86	100,44	101,45	101,02	100,98



BAB 3
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pola dan proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh pada tahun awal periode RPJMD 2017-2022 yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, dan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004, telah ditegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Namun untuk mengakomodir konsistensi kewenangan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diterbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Dengan adanya regulasi ini, untuk tahun 2021 dan 2022 program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, tidak lagi digunakan. Hal ini sejalan dengan keluarnya Permendagri Nomor

70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a) Informasi Pembangunan Daerah; dan b) Informasi Keuangan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah tersebut dikelola dalam SIPD.

Kemudian untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. B ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Arah Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh untuk sisa waktu RPJMD periode Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/ pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumtah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau unit SKPD yang

merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntasi akrual.

c. Pertanggungiawaban Keuangan Daerah

Pertanggungiawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari Penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungiawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggararan dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungiawaban keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan Kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

1. Transparansi dan Akuntabel

   Setiap pengeluaran belanja langsung akan dipublikasikan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan secara terbuka berarti pihak ketiga/swasta dan warga masyarakat mudah mendapatkan informasinya serta tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja langsung. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja langsung tidak hanya dari aspek administrasi keuangan tetapi berkaitan dengan proses perencaan, pelaksanaan dan manfaat dari kegiatan dan program.

2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
   Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepentingan warga masyarakat.

3. Optimalisasi Belanja Langsung
   Belanja Langsung mendukung tujuan pembangunan secara efisien dan efektif yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata warga masyarakat. Optimalisasi Belanja Langsung untuk membangun infrastruktur melalui kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Prioritas
   Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dan program dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja guna mnedukung ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan

5. Tolok Ukur dan Target Kinerja
   Belanja Daerah pada setiap kegiatan dan program disertai dengan tolok ukut dan target kinerja yang meliputi masukan *(input)*, output *(keluaran)* dan hasil *(outcome)* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan daerah;
2. Belanja daerah;
3. Pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Pendapatan Transfer
   a. Transfer Pemerintah Pusat
      1) Dana Perimbangan
         a) Dana Transfer Umum
            (1) DBH; dan
            (2) DAU.

b) Dana Transfer Khusus
(1) DAK Fisik; dan
(2) DAK Non Fisik.
2) Dana Insentif Daerah;
3) Dana Otonomi Khusus;
4) Dana Keistimewaan;
5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
2) Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
   a. Hibah;
   b. Dana Darurat;
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Subsidi;
   e. Belanja Hibah; dan
   f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
   a. Belanja Tanah;
   b. Belanja Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Bangunan dan Gedung;
   d. Belanja Jalan;
   e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
   f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
   a. Belanja Bagi Hasil;
   b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah,

organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan
   a. SiLPA;
   b. Pencairan Dana Cadangan;
   c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
   e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
   a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
   b. Penyertaan Modal Daerah;
   c. Pembentukan Dana Cadangan;
   d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal di atas maka pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 secara nasional efektif dilaksanakan dimulai pada Tahun Anggaran 2021.

Pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah menyadari bahwa upaya pembangunan pada Tahun 2021 tidak mudah dan menghadapi tantangan berat yang harus diatasi bersama-sama oleh semua pihak. Tantangan tersebut diantaranya adalah ketidakpastian global, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun tingkat kesejahteraan, sehingga ke depan membutuhkan reformasi struktural untuk menata kembali alokasi sumber daya ekonomi daerah agar lebih efisien dan efektif. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 dengan penetapan Perppu No.1/2020 dan Perpres No. 54/2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2021. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan fundamental yang dinamis, APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Pemerintah Daerah akan melakukan upaya pemulihan (*recovery*).

Melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020, Pemerintah juga mengatur percepatan pelaksanaan *refocusing*, realokasi, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Intensitas pandemi yang terus tereskalasi serta dampaknya yang mengancam jiwa masyarakat, stabilitas ekonomi dan sektor keuangan menciptakan situasi kegentingan yang mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 sebagai payung hukum untuk mengambil

langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Dalam kondisi tidak normal, peran belanja daerah menjadi sangat krusial dalam merespons dampak pandemi COVID-19 baik dari untuk mendukung upaya pemulihan dan reformasi pada berbagai bidang antara lain kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan serta dukungan pada dunia usaha. Langkah-langkah *extraordinary* perlu ditempuh agar rambatan pandemi dapat dimitigasi melalui bauran kebijakan baik pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan belanja daerah secara umum yang ditempuh Pemerintah Kota Payakumbuh antara lain melakukan efisiensi, realokasi, dan refocusing untuk penanganan COVID-19 dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi.

Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Kota Payakumbuh dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan skenario ***the new normal*** dan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID19;
2. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi;
3. Melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19, yang antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak terduga;
4. Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dengan prioritas :
    a. Penanganan kesehatan; antara lain berupa penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat, penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19, melakukan upaya pelacakan dan pembatasan sosial dalam hal terjadi transmisi lokal kasus pandemi Covid-19, dukungan kegiatan penunjang lainnya terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan penanganan kesehatan lainnya.
    b. Penanganan dampak ekonomi; antara lain berupa pelaksanaan program padat karya dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penanganan dampak ekonomi lainnya.
    c. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengamanan sosia/*social safety net;* antara lain berupa melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat yang menangani pendataan dimaksud.
5. Menggalakkan kampanye penggunaan masker dalam rangka pencegahan dan menekan penyebarluasan pandemi Covid-19.

Pandemi global COVID-19 telah memberikan efek negatif bagi perekonomian sehingga secara alamiah akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan atas *baseline* dan proyeksi perekonomian ke depan. Dengan adanya perubahan asumsi-asumsi ekonomi

makro maka basis perhitungan dalam menentukan besaran-besaran APBN akan berubah dengan siginfikan yang tentu juga akan berdampak pada APBD Kota Payakumbuh. Dampak paling siginfikan dari COVID-19 diperkirakan akan mempengaruhi *baseline* pendapatan daerah baik dari sisi Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang tentunya akan berdampak besar pada belanja daerah, sehingga mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh pada Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengakomodirnya melalui Peraturan Walikota Nomor 8, 11, 19 dan 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang kemudian ditampung pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Untuk menyusun rencana keuangan dua tahun tersisa dari periode RPJMD 2017-2022, perlu ditinjau kinerja keuangan daerah tiga tahun berjalan agar dapat diketahui kondisi keuangan yang dipergunakan Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan. Hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya dapat menjadi salah satu informasi bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan untuk membiayai pembangunan di masa yang akan datang.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Azas umum pengelolaan keuangan daerah telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh. Pengelolaan keuangan daerah seoptimal mungkin dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada Tabel III.1 di bawah ini dapat dilihat gambaran komposisi realisasi APBD Kota Payakumbuh sekaligus menggambarkankan kondisi kemampuan keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya.

Tabel III.1
Komposisi APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017-2020

NO	TAHUN	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA DAERAH (Rp)	PEMBIAYAAN (Rp)
1	2017	739.010.301.393	694.223.803.927	78.089.893.439
2	2018	708.532.769.023	716.396.747.761	91.411.296.761
3	2019	796.837.014.305	805.939.541.097	79.735.967.331
4	2020	708.900.288.188	750.947.870.902	42.047.582.714

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2017 s/d 2019 dan Perubahan Tahun 2020

Dari tabel III.1 terlihat anggaran untuk pendapatan turun tahun 2018 karena pengurangan dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah, namun kembali naik tahun 2019 dan turun kembali pada tahun 2020 karena turunnya TKDD yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Untuk belanja daerah tahun 2020 mengalami penurunan, karena berkurangnya pendapatan daerah akibat pandemi Covid-19, sementara pembiayaan daerah berfluktuasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Payakumbuh. Pendapatan daerah Kota Payakumbuh disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran rencana target pendapatan daerah dalam APBD Kota Payakumbuh, menyangkut kemampuan kapasitas fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Sumatera Barat serta sumber lain – lain yang sah.

Menurut Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Sistem Pembagian Keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun awal periode RPJMD yaitu mulai tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019, pendapatan daerah Kota Payakumbuh berfluktuasi. Hal ini karena adanya pengurangan pendapatan pada dana perimbangan dan lain-lain PAD yang sah. Namun tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, secara rinci dapat kita lihat pada Tabel III.2. Hal ini patut disyukuri karena dengan kenaikan pendapatan masyarakat Kota Payakumbuh dapat mengalami kemajuan dan peningkatan taraf hidup. Terjadinya bencana Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara global dan nasional yang juga berdampak di Kota Payakumbuh sehingga tahun 2020 pendapat daerah mengalami penurunan, karena berkurangnya Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah.

Tabel III.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2017- Bulan Agustus 2020 (Rp)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	TK. PERTUMBUHAN
1	2017	746.928.793.801	739.010.301.393	98,94%	-
2	2018	723.204.712.708	708.532.769.023	97,97%	-4,12%
3	2019	818.001.019.824	796.837.014.305	97,41%	12,46%
4	2020	708.900.288.188	520.581.990.176	74,38%	-34,66
Rata- Rata		**749.258.703.630**	**691.240.518.724**	**92,25%**	

Sumber : Perubahan APBD Tahun 2017 s/d 2019 & Realisasi sampai Agustus 2020

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam 3 tahun terakhir, kontribusi PAD Kota Payakumbuh terhadap total realisasi pendapatan daerah rata-rata berada pada angka 14,05% seperti Tabel III.3, terbilang rendah sehingga Kota Payakumbuh masih tinggi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat.

Tabel III.3
Persentase Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2019

No.	Uraian	Realisasi			%			
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	rata-rata
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendapatan Asli Daerah	116.596.479.804	94.287.442.041	104.070.234.422	15,78	13,31	13,06	14,05
2	Dana Perimbangan	596.081.338.107	565.250.189.018	609.589.230.923	80,66	79,78	76,50	78,98
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	26.332.483.482	48.995.137.964	83.177.548.960	3,56	6,92	10,44	6,97
	Total	739.010.301.393	708.532.769.023	796.837.014.305	100	100	100	100

Sumber : Perubahan APBD Tahun 2017 s/d 2019

Dalam upaya meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, banyak upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh baik melalui upaya pendataan sumber-sumber pendapatan baru, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, pembinaan aparatur maupun perbaikan-perbaikan berbagai fasilitas pendukung pembangunan ekonomi.

2. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber Pendapatan, pengukuran kinerja juga dilakukan pada sisi realisasi belanja Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin banyak belanja yang terserap semakin bagus kinerja suatu daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Payakumbuh bertumpu pada alokasi anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja telah dilakukan dengan proporsional. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kedua jenis belanja ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Belanja yang dilakukan Kota Payakumbuh dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Namun pembagian jenis belanja sebagaimana hal tersebut hanya digunakan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, seiring keluarnya Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berikut tabel III.4 yang menunjukkan target dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota tahun 2017-2022.

Tabel III.4
Target dan Realisasi Belanja Daerah yang Sah Kota Payakumbuh
Tahun 2017 s/d Bulan Agustus 2020 (Rp.)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	Tk. Pertumbuhan
1	2017	749.948.767.275,00	694.223.803.927,00	92,57	-
2	2018	794.830.171.158,00	716.396.747.761,00	90,13	3,19%
3	2019	876.370.302.788,00	805.939.541.097,00	91,96	12,49%
4	2020	750.947.870.902,00	400.966.067.538,15	53,39	-50,24%
Rata- Rata		**809.666.262.762,20**	**739.413.421.919,25**	**91,32**	

Sumber : Perubahan APBD Tahun 2017 s/d 2019 & Realisasi sampai Agustus 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah Kota Payakumbuh meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata realisasi yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2020 mencapai 92,25%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni 92.57%. Adapun Komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun anggaran 2017 – 2020 dapat dilihat pada tabel III.5.

Pada tabel III-5 terlihat komposisi belanja langsung merupakan komponen terbesar yang mendukung belanja daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 57,10%, sedangkan belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 42,90%. Kondisi belanja ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang dianut oleh pemerintah Kota Payakumbuh sudah mengedepankan urusan-urusan yang berkenaan dengan masyarakat langsung, hal ini memiliki makna bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan penganggaran pembangunan yang dilakukan Kota Payakumbuh sudah *pro public*. Rata-rata realisasi belanja tidak langsung dalam kurun tahun 2017 sampai bulan Agustus 2020 sebesar 84,08 %, dan rata-rata realisasi belanja langsung dari kurun tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2020 sebesar 80,69 %

Tabel III.5
Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Payakumbuh
Tahun 2017 s/d Bulan Agustus 2020

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PERTUM BUHAN %	KONTRI BUSI %
Belanja Tidak Langsung						
1	2017	299.864.067.041,00	276.055.631.402,00	92,06	(2,38)	37,04
2	2018	344.086.330.691,00	313.862.704.296,00	91,22	(0,84)	42,50
3	2019	348.942.113.166,00	332.698.706.126,00	95,34	4,13	43,10
4	2020	362.389.196.881,00	227.796.110.118,00	58,90	-31,53	-
Rata- Rata		**342.039.291.161,00**	**287.603.287.985,00**	**84,08**	-	-
Belanja Langsung						
1	2017	450.084.700.234,00	418.168.172.525,00	92,91	23,92	55,59
2	2018	450.743.840.467,00	402.534.043.465,18	89,3	-3,73	55,67
3	2019	527.428.189.622,00	473.240.834.971,00	89,73	17,56	65,14
4	2020	388.558.674.021,00	172.169.957.420,15	44,30	-63,61	59,23
Rata- Rata		**454.203.851.086,00**	**366.528.252.095,00**	**80,69**	**-**	**-**

Sumber : Perubahan APBD Tahun 2017 s/d 2019 & Realisasi sampai Agustus 2020

Sementara untuk proporsi belanja langsung Kota Payakumbuh terhadap total realisasi belanja daerah, rata-rata dalam kurun waktu tahun 2017 – 2019 masih lebih besar

alokasi anggarannya dari belanja tidak langsung seeprti terlihat pada Tabel III.6. Hal ini menunjukkan Kota Payakumbuh selalu memprioritaskan anggaran belanjanya kepada pelayanan masyarakat dan upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tabel III.6
Rata-rata Proporsi Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 -2019

No.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI(Rp)	Proporsi Terhadap Belanja Daerah %
Belanja Tidak Langsung				
1	2017	299.864.067.041,00	276.055.631.402,00	
2	2018	344.086.330.691,00	313.862.704.296,00	
3	2019	348.942.113.166,00	332.698.706.126,00	
Rata- Rata		**330.964.170.299**	**307.539.013.941,33**	**41,62**
Belanja Langsung				
1	2017	450.084.700.234,00	418.168.172.525,00	
2	2018	450.743.840.467,00	402.534.043.465,18	
3	2019	527.428.189.622,00	473.240.834.971,00	
Rata- Rata		**476.085.576.774,33**	**431.314.350.320,39**	**58,38**
Total Belanja Daerah		807.049.747.073,67	738.853.364.261,73	

Sumber : BKD

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dalam hal terjadi deficit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Pos pembiayaan ini berkaitan dengan penerapan anggaran kinerja dimana dimungkinkan adanya surplus atau defisit dalam penganggaran daerah. Berikut tabel III.7 yang menunjukkan target dan Realisasi pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dari tahun tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2020.

Tabel III.7
Target dan Realisasi Pembiayaan Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2019

No	Tahun	Target	Realisasi	%	Tingkat Pertumbuhan %
1	2017	3.019.973.474,00	43.650.893.439,00	1.445,41	(0,30)
2	2018	71.625.458.450,00	82.411.296.761,00	115,06	88,79
3	2019	58.369.282.964,00	69.344.667.905,00	118,80	-15,85
Rata- Rata		44.338.238.296,00	65.135.619.368,0	559,75	-

Sumber : BKD

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh sepanjang tahun 2017-2019, sumber pembiayaan penerimaan yang digunakan adalah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang merupakan pembentuk terbesar dari nominal realisasi penerimaan pembiayaan. Tingkat realisasi penerimaan Pembiayaan Daerah berkisar antara Rp. 43.650.893.439 (2017) hingga Rp. 69.344.667.905,00 (2019). Tingginya realiasi penerimaan pembiayaan disebabkan oleh penerimaan kembali atas investasi non permanen (dana bergulir). Penyaluran dana bergulir kepada masyarakat yang merupakan pengeluaran kembali investasi non permanen juga menjadi point tingginya pengeluaran pembiayaan daerah.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah berfluktuasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dari tahun ke tahun, sementara pembiayaan daerah berfluktuasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan, sebagaimana dapat dilihat dari tabel III.8. berikut ini;

Tabel III.8
Rata-rata Pertumbuhan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2020
(dalam Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				Rata-rata Pertum buhan %
		2017	2018	2019	2020	
1	**PENDAPATAN DAERAH**	739,01	708,53	796,83	708,90	0,01
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	116,59	94,28	104,07	98,32	0,06
1.1.1	Pajak Daerah	14,04	16,09	17,65	15,28	0,30
1.1.2	Retribusi Daerah	6,72	7,28	7,39	4,60	0,08
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	8,82	5,94	7,02	7,04	5,59
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yg sah	86,99	64,96	71,99	71,38	0,04
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	596,08	565,25	609,58	527,55	(0,25)
1.2.1	Dana Bagi Hasil	13,37	12,03	9,18	12,97	(0,05)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	437,69	437,69	468,54	423,28	0,01
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	94,21	99,02	131,85	91,28	(0,08)
1.2.4	Dana Insentif Daerah	50,78	16,50	0,00	0,00	0,00
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**26,33**	**48,99**	**83,17**	**83,02**	**0,47**
1.3.1	Hibah	0,81	22,42	19,80	18,59	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	25,51	26,56	30,35	25,55	0,04
1.3.4	Dana Penyesuaian & Dana OTSUS	0,00	0,00	33,01	38,86	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Dari Pemerintah Lainnya	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**BELANJA DAERAH**	**694,22**	**716,39**	**805,93**	**750,94**	**0,01**
2.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**276,05**	**313,86**	**332,69**	**362,38**	**(0,02)**
2.1.1	Belanja Pegawai	268,61	303,28	318,91	326,62	(0,02)
2.1.2	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.1.4	Hibah	7,32	4,86	8,46	7,19	**0,21**
2.1.5	Bantuan Sosial	0,00	4,63	4,72	4,41	**0,00**
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.1.7	Bantuan Keuangan	0,49	1,07	589,91	0,65	**0,05**
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,45	462,53	23,50	**0,00**
2.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**418,16**	**402,53**	**473,24**	**388,55**	**0,03**
2.2.1	Belanja Pegawai	37,46	14,51	18,61	19,93	(0,03)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	204,06	238,57	272,40	240,17	0,09
2.2.3	Belanja Modal	176,63	149,44	182,21	128,44	(0,01)
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**43,65**	**82,41**	**69,34**	**42,04**	**0,93**
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	**60,87**	**86,91**	**74,54**	**42,04**	**0,94**
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	**17,21**	**4,50**	**5,19**	**-**	**0,00**

Sumber : Perubahan APBD

3.1.2. Neraca Daerah

Secara umum kondisi neraca daerah Kota Payakumbuh tergolong baik, terlihat dari rasio lancar dan rasio *quick* yang mencapai lebih dari angka 1, dan rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang bernilai kurang dari 0,1. Kondisi ini tentunya perlu dijaga dan dipertahankan sehingga kondisi keuangan daerah tetap dalam kondisi sehat. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban - kewajiban jangka panjangnya. Hasil perhitungan analisis rasio keuangan daerah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel III.9.

Tabel III.9
Rasio Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2019

NO	URAIAN	2017	2018	2019
I	**RASIO LIKUIDITAS**			
1	Rasio Lancar = Aktiva Lancar : Kewajiban Jangka Pendek	20,47	56,42	20,47
2	Rasio Quick =(Aktiva Lancar-persediaan):Kewajiban Jangka Pendek	17,56	53,62	17,56
II	**RASIO SOLVABILITAS**			
1	Rasio Total Hutang Terhadap Aset = Total Hutang : Total Aset	0,001	0,001	0,01
2	Rasio Hutang terhadap Modal = Total Hutang : Total Ekuitas	0,001	0,001	0,01

Sumber : BKD

Selama periode 2017-2019, Kota Payakumbuh mengalami penurunan jumlah aset dari Rp. 1.209.901.212,00 menjadi Rp. 1.054.710.869.365,00. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dimana untuk aset tetap sudah diakui adanya akumulasi penyusutan terhadap nilai aset. Disamping itu penurunan aset tetap juga disebabkan oleh penyerahan aset yang ada disekolah menengah dilingkungan Dinas Pendidikan dan di Dinas Perhubungan yang akan diserahkan ke Propinsi Sumatera Barat terkait urusan pemerintahan konkuren. Selanjutnya mengenai Neraca Kota Payakumbuh dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 disajikan pada Tabel III.10.

Tabel III.10.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah tahun 2017-2019

No.	URAIAN	rata-rata pertumbuhan %
I	**ASET**	
I.I	**ASET LANCAR**	2,42
I.I.I	Kas	-9,88
I.I.2	Piutang	32,92
I.I.3	Penyisihan Piutang	226,12
I.I.4	Beban Dibayar di Muka	-19,24
I.I.5	Persediaan	131,07
I.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	4,18
I.2.I	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,78
I.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	5,27
I.3	**ASET TETAP**	-10,31
I.3.I	Tanah	15,98
I.3.2	Peralatan dan Mesin	8,48
I.3.3	Gedung dan Bangunan	-9,06
I.3.4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	21,16
I.3.5	Aset Tetap Lainnya	-0,11
I.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	40,07
I.3.7	Akumulasi Penyusutan	1,70
I.4	**ASET LAINNYA**	258,07
I.4.I	Tagihan Jangka Panjang	75,99
I.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
I.4.3	Aset Tak Berwujud	-9,05
I.4.4	Aset Lain-lain	606,19
	JUMLAH ASET	-4,90
2	**KEWAJIBAN**	188,15

No.	URAIAN	rata-rata pertumbuhan %
2.I	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	188,15
2.I.I	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	27,59
2.I.2	Utang Beban	185,92
2.I.3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
2.I.4	Pendapatan Diterima Dimuka	74,30
3	**EKUITAS DANA**	-5,37
3.I	**EKUITAS DANA LANCAR**	537,58
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	-4,90

Sumber : BKD

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Uraian rekening belanja tahun 2017 – 2020 masih mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan penggunaan anggaran untuk Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur pada periode tersebut dapat dilihat pada Tabel III.11.

Tabel III.11
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Payakumbuh Tahun 2017-2019 dan Target Perubahan 2020 (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				Rata-Rata Kontribusi %
		2017	2018	2019	2020	
A	**Belanja Tidak Langsung**	**276.055,63**	**313.862,70**	**332.698,70**	**362.389,196**	**55,74**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	196.232,26	195.113,13	202.768,89	215.488,65	37,89
2	Belanja Tambahan Penghasilan	68.799,81	101.650,68	107.287,91	103.753,00	16,88
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	3.049,11	5.731,95	7.930,50	6.456,10	0,84
4	Insentif Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah	532,37	789,39	928,46	929,76	0,13
B.	**Belanja Langsung**	**418.168,17**	**402.534,04**	**473.240,83**	**388.558,67**	44,26
1	Belanja Honorarium PNS	27.777,38	9.406,88	13.086,42	14.887,46	3,45
2	Belanja Uang Lembur	-	1.242,80	1.632,11	1.160,00	0,13
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	400,50	343,90	457,30	459,90	0,08
4	Belanja Kursus, Pelatihan, dan Sosialisasi	1.040,17	991,11	636,28	170,95	0,17
5	Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	-	-
6	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.219,74	9.520,19	14.696,95	11.667,58	**1,56**
7	Belanja Makanan dan Minuman	10.390,35	11.815,30	13.195,44	9.461,73	2,04
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1526,50	1.449,69	1.851,86	1.443,37	0,31
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	684,58	1.128,72	1.025,04	355,04	0,16
10	Belanja Perjalanan Dinas	31.540,69	38.703,93	37.029,15	17.840,54	6,07
11	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-		-	-	-
12	Belanja Pemulangan Pegawai	-		-	-	-
13	Belanja Modal	176.632,63	149.445,42	182.218,04	128.448,26	30,30
	TOTAL	**694.223,80**	**716.396,74**	**805.939,54**	**750.947,87**	100.00

Sumber : BKD, 2020

Penggunaan anggaran pada belanja tidak langsung didominasi oleh Belanja Gaji & Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan. Belanja Gaji dan Tunjangan selama kurun waktu 2017-2019 memiliki rata – rata kontribusi sebesar 37,89% dari total Belanja

Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dengan trend kontribusi yang cenderung naik, sedangkan untuk Belanja Tambahan penghasilan memiliki rata-rata kontribusi sebesar 16,88% dari Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dengan trend kontribusi yang cenderung naik. Adapun pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang ada di belanja langsung, komponen terbesar adalah Belanja Modal dengan rata-rata prosentase kontribusi pada tahun 2017-2019 mencapai 30.30% dari total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, disusul oleh Belanja perjalanan dinas dan Belanja honorarium PNS dengan rata-rata kontribusi mencapai 4.85% dan 6,07% dari Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur. Dari analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada Tabel III.11, meskipun Belanja Honorarium dan belanja Perjalanan Dinas secara proporsi terlihat relatif kecil terhadap total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, tetapi bila dibandingkan kepada komponen Belanja Langsung akan terlihat bahwa Belanja Honorarium dan Belanja Perjalanan Dinas mencapai 11% dari total komponen Belanja Langsung yang ada pada Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur. Belanja Modal menempati Proporsi tertinggi dari komponen belanja langsung yakni dengan rata-rata proporsi sebesar 30,30%.

Tabel III.12
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja tahun 2017-2019

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2017	291.675.855.832	772.068.292.035	38%
2	2018	332.259.714.482	812.499.240.542	41%
3	2019	333.948.956.689	876.939.267.788	38%

Sumber : BKD, 2020

Berdasarkan tabel–tabel pengeluaran APBD Kota Payakumbuh tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara total keseluruhan belanja proporsi realisasi belanja tidak langsung masih merupakan komponen terbesar dari belanja daerah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 tetapi pada komponen belanja langsung terus mengalami peningkatan sehingga proporsi antara kedua komponen belanja ini semakin berimbang.
2. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota payakumbuh pada rincian belanja bantuan keuangan kepada parpol adalah tetap sedangkan belanja tidak terduga mengalami fluktuasi naik dan turun.
3. Realisasi belanja kebutuhan aparatur lingkup Kota Payakumbuh untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan dengan proporsi yang juga tidak berbeda jauh dari tahun ke tahun.
4. Realisasi Pengeluaran pembiayaan daerah pada dasarnya hanya penyertaan modal.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Komponen pembiayaan merupakan salah satu penutup defisit penganggaran, oleh karena itu perlu dilihat perkembangannya. Berikut ini Analisis pembiayaan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel III-13.

Tabel III.13
Defisit Riil Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2020

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	739.010.301.393	708.532.769.023,54	796.837.014.305	520.581.990.176,79-
	Dikurangi realisasi				
2	Belanja Daerah	694.223.803.927	716.396.747.761,18	805.939.541.097	400.966.067.538,15-
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.219.500.000	4.500.000.000	5.195.649.713	-
A	**Defisit Rill**	**27.566.997.466**	**(12.363.978.738)**	**(14.298.176.505)**	-
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan				
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. Sebelumnya	47.701.324.055	86.911.296.761,00	74.540.317.618	51.452.537.631,34
5	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	-
10	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	13.169.069.384	0,00	0,00	-
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**60.870.393.439**	**86.911.296.761**	**74.540.317.618**	-
A-B	**Sisa Lebih Pembiayaan TA. Berkenaan**	**88.437.390.904**	**74.547.318.023,82**	**60.242.141.113**	**171.068.460.270,19**

Sumber : BKD, 2020

Berdasarkan tabel analisis III-13, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil tersaji pada tabel III-14.

Tabel III.14
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Payakumbuh
Tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2020

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil			
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
	Defisit Riil				
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. Sebelumnya	**47.701.324.055**	**86.911.296.761**	**74.540.317.618**	**51.452.537.631,34**
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	13.169.069.384	0,00	0,00	0,00
8	Sisa Lebih Pembiayaan TA. Berkenaan	**88.437.390.904**	**74.547.318.023,82**	**60.242.141.113**	**171.068.460.270,19**

Sumber : BKD, 2020

Berdasarkan perkembangan realisasi dan komposisi Pembiayaan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Bulan Agustus TA. 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam hal Kota Payakumbuh mengalami defisit riil anggaran oleh karena belanja dan pengeluaran pembiayaan melebihi pendapatan. Defisit riil anggaran ini ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya terutama dari pelampauan pendapatan dan sisa penghematan belanja.
2. SiLPA tahun anggaran sebelumnya menjadikan komponen ini menjadi yang terbesar dari penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh.

Tabel III-15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d 2019

No	Uraian	2017		2018		2019	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	**Jumlah SiLPA**	**47.701.324.055**		**86.911.296.761**		**74.540.317.618**	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	191,649,473	0,32	16,596,767,238	22,45	(1.031.741.974)	-2,18
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	70,372,922	0,12	(3,501,055,341)	-4,74	(2.748.771.098)	-5,80
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(204,801,000)	-0,34	4,811,905,322	6,51	(125.258.568)	-0,26
5	Sisa Penghematan Belanja	60,130,623,407	99,91	50,997,343,357	68,99	44.485.555.820	93,79
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	belum terselesaikan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kegiatan lanjutan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah	(8,116,211.00)	0,00		0,00	17.119.524.760	36,09
10	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	5,012,821,110	6,78	6.276.830.909	13,23
11	Penghematan Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.543.000.000)	34,88

Sumber : BKD, 2020

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk memperhitungkan kapasitas riil keuangan daerah untuk sisa tahun periode RPJMD. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat tergambar pada realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti pada Tabel III.16.

Tabel III.16.
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kota Payakumbuh Tahun sampai Bulan Agustus 2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**327.138.852.509**	**337.028.533.769**	**358.740.827.062**	**362.002.835.174**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	243.246.364.830	213.562.989.150	232.903.293.643	220.192.723.810
2	Belanja Tambahan Penghasilan	72.742.533.000	108.048.145.000	101.066.558.000	114.817.605.000

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,861,600,000	7.839.100.000	7.889.100.000	8.343.620.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	618.341.847	618.341.563	1.405.910.810	1.469.048.410
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	334.801.623	333.341.563	513.508.600	762.363.593
7	Belanja Hibah pada Organisasi Kemasyarakatan	3.205.000.000	2.463.805.000	5.812.044.800	5.031.200.000
8	Belanja Hibah pada Instansi Vertikal	0.00	0,00	0,00	0,00
9	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	3.471.000.000	3.153.600.000	3.316.200.000	4.066.000.000
10	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	4.825.000.000	6.218.800.000
12	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/desa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	559.211.209	559.211.209	559.211.209	651.474.361
14	Belanja Tidak Terduga	450.000.000	450.000.000	450.000000	450.000.000
B	**BELANJA LANGSUNG**	17.716.047.462	10.434.310.126	11.980.054.679	22.334.106.270
	belanja pegawai BLUD	10.241.105.533	1.179.048.000	1.153.511.000,00	1.287.600.000,00
	belanja premi asuransi	6.901.909.929,00	8.854.926.126,00	10.433.443.679,00	20.481.606.270,48
	belanja beasiswa pendidikan PNS	573.032.000,00	400.336.000,00	393.100.000,00	564.900.000,00
B.	**Pembiayaan Pengeluaran**	0,00	0,00	1,650,000,000	1.500,000,000
1	Pembentukan Dana Cadangan				
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1,650,000,000	1.500,000,000
	TOTAL (A+B)	344.854.899.971	347.462.843.895	372.370.881.741	385.836.941.444

Sumber : BKD, 2020

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti pembayaran belanja gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta Tambahan Penghasilan PNS. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh pada akhir tahun 2019 sebesar 4.020 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu baik yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Lebih dari separonya merupakan tenaga dari urusan pendidikan dan urusan kesehatan seperti guru-guru dan tenaga kesehatan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya menyeimbangkan alokasi belanja langsung dengan Belanja Tidak Langsung pada setiap tahunnya Pengalokasiaan anggaran pada program kegiatan lebih diprioritaskan sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kemajuan daerah. Upaya ini tentu saja dalam koridor peratuaran perundang undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedomanan umum penyusunan APBD tahun yang berkenaan.

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan pertumbuhan rata rata peiode RPJMD sebelumnya perubahan regulasi dan issu perubahan kebijakan fiskal, di samping sumping itu tentu ada usaha Untuk meningkatkan volume pendapatan daerah, maka strategi yang ditempuh dengan kebijakan antara lain :

1. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan akurasi data potensi pajak;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal pemungutan pendapatan daerah;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat kepada masyarakat;
7. Penggalakan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat;
8. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
9. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;

Sesuai dengan ruang lingkup Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh mengarahkan pada mengupayakan sumber pendapatan desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum yang menempati proporsi paling besar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan namun tetap mempertimbangkan kemampuan warga masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian juga dengan sumber pendapatan lainnya terus ditingkatkan yaitu Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, proporsi Dana Alokasi Umum secara bertahap dapat digantikan oleh sumber pendapatan yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

3.3.2.2 Proyeksi Kebutuhan Belanja dan Pembiayaan

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro daerah diharapkan memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah melalui *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan rakyat lebih merata. Untuk itu diperlukan analisa terhadap pengeluaran belanja yang akan dilakukan dalam dua tahun sisa pelaksanaan RPJMD.

Proyeksi belanja dilakukan dengan cara memperhatikan besaran target capaian indikator sasaran program yang hendak dicapai, perkiraan inflasi yang mungkin terjadi, serta trend perkembangan komponen-komponen yang masuk dalam aspek belanja seperti komposisi belanja langsung dan tidak langsung, belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa dan lain-lain. Dari pertimbangan aspek-aspek tersebut, maka skenario yang dipakai dalam melakukan proyeksi belanja ini adalah skenario moderat, artinya tidak terlalu optimis tetapi tidak juga pesimis. Hal ini didasari pertimbangan bahwa ke depan tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber belanja akan menghadapi tantangan yang semakin sulit. Disisi lain dengan kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan memberikan ketidakpastian yang tinggi, karena porsinya sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah.

Disamping itu, merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran diarahkan pada program prioritas. Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung belanja Aparatur dan Belanja Publik secara proporsional. Secara umum belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang erat kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan

penyelenggaraan pemerintah seperti pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai Tahun 2021 struktur APBD harus mengacu kepada PP tersebut, sehingga kedua jenis belanja tersebut menjadi belanja operasional. Berikut ini dapat dilihat proyeksi Pendapatan Daerah pada tabel III.17.

Tabel III.17
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 – 2022

No.	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**711.270295895**	**711.270295895**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**107.757.183.602**	**107.757.183.602**
1.1.1	Pajak Daerah	17.077.752.692	17.077.752.692
1.1.2	Retribusi Daerah	7.797.531.468	7.797.531.468
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.049.367.383	8.049.367.383
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	74.832.532.059	74.832.532.059
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**584.976.212.293**	**584.976.212.293**
1.2.1	Transfer pemerintah pusat	554.695.682.483	554.695.682.483
1.2.1.1	Dana Perimbangan	537.001.352.483	537.001.352.483
1.2.1.1.1	Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.317.597.483	10.317.597.483
1.2.1.1.2	Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	427.519.801.000	427.519.801.000
1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	44.175.340.000	44.175.340.000
1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	54.988.614.000	54.988.614.000
I.2.1.2	Dana Insentif Daerah	17.694.330.000	17.694.330.000
1.2.2	Pendapatan Transfer antar daerah	30.280.529.810	30.280.529.810
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.280.529.810	30.280.529.810
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**18.536.900.000**	**18.536.900.000**
1.3.1	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	18.536.900.000	18.536.900.000
1.3.1.1	Lain-Lain Pendapatan	18.536.900.000	18.536.900.000
1.3.1.1.1	Pendapatan Hibah Dana BOS	17.636.900.0001	17.636.900.0001
1.3.1.1.2	Pendapatan Atas pengembalian Hibah	900.000.000	900.000.000

Sumber : BKD, 2020

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka komponen belanja untuk tahun 2021 mengalami perombakan yang signifikan. Dalam regulasi pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, tidak dikenal lagi istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Komponen belanja terdiri dari : belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Seluruh belanja pegawai termasuk gaji dan tunjangan bersama-sama dengan belanja barang dan jasa berada pada belanja operasi. Jadi realisasi pengeluaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d Bulan Agustus Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel III-18.

Tabel III-18
Realisasi Pengeluaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 s/d Bulan Agustus 2020

Uraian	2017	Pertum buhan (%)	2018	2019	2020 (Realisasi s/d Agustus)
Belanja Daerah	**694.223.803.927**		**716.396.747.761**	**805.939.541.097**	**400.966.067.538**
Belanja Tidak Langsung	**276.055.631.402**	5,00	**313.862.704.296**	**332.698.706.126**	**227.796.110.118**
Belanja Pegawai	268.613.558.873	5,00	303.285.170.661	318.915.773.919	202.121.802.437
Belanja Hibah	6.942.395.604	0,00	4.863.322.426	8.467.558.024	5.085.150.000
Belanja Bantuan Sosial			4.635.000.000	4.725.000.000	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa & Partai Politik	499.676.925	0,00	1.079.211.209	589.911.650	651.312.613
Belanja Tidak Terduga	-	0,00	-	462.533	19.937.845.068
Belanja Langsung	**418.168.172.525**		**402.534.043.465**	**473.240.834.971**	**173.169.957.420**
Belanja Pegawai	37.466.734.399	3,52	14.515.771.750	18.618.588.401	10.495.602.050
Belanja Barang Dan Jasa	204.068.799.002	10,00	238.572.846.724	272.404.198.399	123.559.800.901
Belanja Modal	176.632.639.124	15,00	149.445.424.991	182.218.048.171	39.114.554.469

Sumber : BKD, 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuagan Daerah, struktur APBD mulai Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan secara signifikann. Berkenaan dengan hal tersebut maka prediksi pengeluaran daerah untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah sebagaimana terdapat pada tabel III.19.

Tabel III.19
Prediksi Pengeluaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 s/d 2022

No.	URAIAN	2021	2022
II.	**BELANJA DAERAH**	**731.004.205.721**	**731.004.205.721**
II.1	**BELANJA OPERASI**	**602.403.629740**	**602.403.629740**
II.1.1	**Belanja Pegawai**	**340.910.932.658**	**340.910.932.658**
II.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	**254.836.584.469**	**254.836.584.469**
II.1.3	**Belanja Bunga**	**-**	**-**
II.1.4	**Belanja Subsidi**	**-**	**-**
II.1.5	**Belanja Hibah**	**6.656.112.613**	**6.656.112.613**
II.1.6	**Belanja Bantuan Sosial**	0	0
II.2	**BELANJA MODAL**	**118.600.575.981**	**118.600.575.981**
II.2.1	Belanja Tanah	**22.077.724.840**	**22.077.724.840**
II.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	**19.514.145.442**	**19.514.145.442**
II.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	**26.429.883.235**	**26.429.883.235**
II.2.4	Belanja Jalan, jaringan dan irigasi	**50.273.977.514**	**50.273.977.514**
II.2.5	Belanja Aset tetap lainnya	**304.844.950**	**304.844.950**
II.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**
II.4	**BELANJA TRANSFER**	**-**	**-**
II.4.1	Belanja Bagi Hasil	**-**	**-**
II.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	**-**

No.	URAIAN	2021	2022
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(19.733.909.826)**	**(19.733.909.826)**
III.	**PEMBIAYAN DAERAH**	**19.733.909.826**	**19.733.909.826**
III.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**19.733.909.826**	**19.733.909.826**
III.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	19.733.909.826	19.733.909.826
III.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**
	PEMBIAYAAN NETTO	**19.733.909.826**	**19.733.909.826**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0**	**0**

Sumber : BKD, 2020

Sementara dari sisi belanja daerah terjadi peningkatan pengeluaran dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah perlu disusun dalam kerangka sistimatis dan terpola. Belanja Daerah diarahkan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun. Pengelolaan Belanja Daerah sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja Daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan *(input)*, keluaran *(output)* dan manfaat *(outcome)* yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja daerah harus diadministrasikan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Di dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dengan belanja sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dari belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Arah pengelolaan pembiayaan ini adalah :

1. Penerimaan pembiayaan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan pada waktu APBD dijalankan.
2. Penerimaan pembiayaan juga dimungkinkan untuk mendorong program-program strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pinjaman ke Bank.
3. SILPA sedapat mungkin ditekan realisasinya dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran tentunya dengan tetap memperhatikan capaian indikator kinerja program.
4. Untuk pengeluaran pembiayaan akan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal/ investasi ke BUMD seperti Bank Nagari dan PDAM serta pembayaran cicilan hutang ke Bank.

Tabel III.20
Realisasi Pembiayaan Tahun 2017-2019 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2020-2022

KODE	URAIAN	2017 (Realisasi)	2018 (Realisasi)	2019 (Realisasi)	2020 (Proyeksi)	2021 (Proyeksi)	2022 (Proyeksi)
PEMBIAYAAN		**78.089.893.439**	**91.411.296.761.**	**79.735.967.331**	**42.047.582.714**	**19.733.909.826**	**19.733.909.826**
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	**60.870.393.439**	**86.911.296.761**	**74.540.317.618**	**42.047.582.714**	**19.733.909.826**	**19.733.909.826**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Thn Sebelumnya	47.701.324.055	86.911.296.761	74.540.317.617	42.047.582.714	19.733.909.826	19.733.909.826
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan						

KODE	URAIAN	2017 (Realisasi)	2018 (Realisasi)	2019 (Realisasi)	2020 (Proyeksi)	2021 (Proyeksi)	2022 (Proyeksi)
	Pinjaman dari Bank				-		
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	13.169.069.384	-	-	-	-	-
3.2.	**Pengeluaran** Pembiayaan **Daerah**	**17.219.500.000**	**4.500.000.000**	**5.195.649.713**	**42.047.582.714**	**0**	**0**
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) PemerintahDaerah	17.219.500.000	4.500.000.000	5.195.649.713	-	-	-
	Investasi BLUD RSUD			-	-		
	Ivestasi UPTD Ternak Sapi		-	-	-	-	-
PEMBIAYAANNETTO		**43.650.893.439**	**82.411.296.761**	**69.344.667.905**	**42.047.582.714**	**19.733.909.826**	**19.733.909.826**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**88.437.390.904**	**74.547.318.023**	**60.242.141.113**	**-**	**-**	**-**

Sumber : BKD,2020

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembanguna jangka menengah daerah periode RPJMD yang tersisa. Perhitungan kerangka pendanaan meliputi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti yang ditunjukan dalam Tabel 3.19 dan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti yang ditunjukan dalam Tabel III.21.

Tabel III.21
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan DaerahKota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Proyeksi (Rp)	Proyeksi (Rp)	Proyeksi (Rp)
1	Pendapatan	708.532.769.023	796.837.014.305	708.900.288.188	711.270.295.895	711.270.295.895
2	Pencairan Dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih (Rill) Perhitungan Anggaran	86.911.296.761	74.540.317.618	42.047.582.714	19.733.909.826	19.733.909.826
	Total Penerimaan	795.444.065.784	871.377.331.923	750.947.870.902	731.004.205.721	731.004.205.721
	Dikurangi					
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang wajib Mengikat	333.123.651.553	346.685.724.703	359.632.328.222	371.958.548.387	383.505.430.700
5	Serta Prioritas Utama					
	Kapasitas riil Kemampuan Keuangan	462.320.414.231	524.691.607.220	391.315.542.680	359.045.657.334	347.498.775.021

Sumber : BKD, 2020

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah derah dalam membiayai :

1. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi,

memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
3. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Tabel III.22
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
		(Juta Rp)	(juta Rp)	(juta Rp)	(juta Rp)	(juta Rp)
1	**Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan**	**462.320,41**	**524.691,60**	**391.315,54**	**669.576,50**	**721.841,766**
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I					
I.a	Belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan	461.782,48	537.625,38	576.866,33	645.692,01	723.402,98
I.b	Pembentukan Dana Cadangan					
	Dikurangi					
I.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	15.290,495	38.834,61	19.081,20	21.315,61	23.811,66
I.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Total rencana Pengeluaran Prioritas I (I.a+I.b-I.c-I.d)**	**446.491,994**	**498.790,77**	**557.785,13**	**624.376,41**	**699.591,32**
	sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas	25.245,88	30.211,51	36.839,15	45.200,09	55.524,65
II.a	Belanja Tidak Langsung	329.006,06	338.062,62	348.98,.76	361.856,90	376.917,21
	Dikurangi					
II.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	303.760,18	307.851,10	312.146,57	316.656,81	321.392,56
III	**Total rencana pengeluaran prioritas II (II.a-II.b)**	**25.245,88**	**30.211,51**	**36.839,15**	**45.200,09**	**55.524,65**
	Surplus Anggaran Riil atau berimbang (I-II-III)	**BERIMBANG**	**BERIMBANG**	**BERIMBANG**	**BERIMBANG**	**BERIMBANG**

Sumber : BKD, 2020

3.3.4 Pinjaman Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota Payakumbuh periode 2017-2022, dan untuk percepatan pencapaian target program pembangunan daerah, adanya kegiatan prioritas daerah, pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, dan dengan terbatas

dan rendahnya kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Kota Payakumbuh dapat melakukan pinjaman daerah.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali

Pinjaman daerah adalah alternatif sumber pendanaan APBD dan solusi untuk menutup kekurangan kas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan untuk kepentingan daerah seperti kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah, kegiatan untuk kepentingan layanan masyarakat, dan lain sebagainya dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Pemerintah Kota Payakumbuh harus mengikuti batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional.

Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum Pinjaman Daerah

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
7. PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Prinsip Dasar Pinjaman Daerah

Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah;
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah;
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

Persyaratan Pinjaman

Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu;
2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut:
   DSCR = (PAD + (DBH – DBHDR) + DAU) – BW ≥ 2,5 Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain
3. Dalam hal Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah;
4. Khusus untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD;

Sumber Pinjaman

Pinjaman Daerah bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Jenis Dan Jangka Waktu Pinjaman

1. Pinjaman Jangka Pendek Merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan;
2. Pinjaman jangka Menengah Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan;
3. Pinjaman Jangka Panjang Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Jangka Panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Penggunaan Pinjaman

Penggunaan Pinjaman Daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

a. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
b. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;
c. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial;
d. Khusus Pinjaman Jangka Panjang dalam bentuk Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;

Prosedur Pinjaman Daerah

1. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri;
2. Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari Pusat Investasi Pemerintah;
3. Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Perbankan;
4. Pinjaman Daerah yang dananya bersumber dari Masyarakat (Obligasi Daerah).

Larangan Penjaminan

1. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh jadikan jaminan;
2. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Pembayaran Kembali Pinjaman

1. Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
2. Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut.

Pelaporan Pinjaman

1. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
2. Dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.



BAB 4
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pelaksanaan Pembangunan di Kota Payakumbuh merupakan proses yang melibatkan pemangku kepentingan dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Melalui proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan Kota Payakumbuh secara proporsional, dengan memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif, serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran. Secara umum tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengupayakan tidak terjadinya ketimpangan baik dari sisi sosial ekonomi maupun lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini maka pembangunan dilakukan dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Dalam perspektif pelaksanaan tata kelola pemerintahan, tujuan tersebut direpresentasikan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditentukan oleh kinerja seluruh Lurah dan Camat, serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kota Payakumbuh, dukungan dari Pemerintah Pusat, serta kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan memperhatikan cakupan efek dari masalah, intensitas kemunculan masalah dalam masyarakat, efek beruntun yang berpengaruh pada kinerja sektor lain, dan kecenderungan untuk meningkat atau membesar dimasa yang akan datang dan berdampak negatif nantinya. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut dapat dihasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan daerah, yang dikelompokkan menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Berikut permasalahan pembangunan daerah di Kota Payakumbuh dijabarkan di bawah ini.

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Untuk itu pemenuhan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Layanan pendidikan di Kota Payakumbuh masih belum optimal dimana jumlah SD dan SMP yang terakreditasi A masih 75%. Di samping itu sarana dan prasarana pendukung di beberapa sekolah belum memenuhi standar serta kekurangan Guru yang ASN juga ikut memicu rendahnya kualitas layanan pendidikan di Kota Payakumbuh. Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan menjadi kewajiban yang senantiasa harus menjadi prioritas daerah, ke depannya akan meningkatkan peluang rata-rata lama sekolah, yang tergolong masih rendah di Kota Payakumbuh.

Tahun 2020 kita dihadapkan dengan masalah pandemi covid-19 yang menuntut untuk mengurangi aktivitas apapun diluar rumah guna memutus rantai penyebaran covid-19. Hal ini sangat berdampak besar terhadap proses belajar dan mengajar yang tidak bisa dilaksanakan tatap muka diruang kelas seperti kondisi normal, sedangkan proses tersebut harus terus berjalan sehingga pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara online. Harus diakui bahwa tidak sedikit permasalahan-permasalahan pendidikan yang muncul selama pandemi termasuk di Kota Payakumbuh. Beberapa fakta menunjukkan bahwa masih banyaknya tenaga pengajar/guru terkendala dalam penggunaan teknologi pembelajaran, orangtua siswa harus mendampingi anak-anak mereka belajar terutama untuk tingkatan sekolah dasar, dan masih ada orangtua siswa berada dibawa garis kemiskinan yang membuat mereka tidak mampu menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis online seperti yang diharapkan terlebih lagi jika memiliki anak lebih dari satu.

Permasalahan di bidang kesehatan adalah menurunnya kualitas kesehatan masyarakat yang dipicu oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS, pergeseran gaya hidup masyarakat ke pola yang tidak sehat sehingga berdampak pada peningkatan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diderita masyarakat seperti hipertensi, diabetes dan lain-lain. Kemudian faktor lain yang memicu rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di Kota Payakumbuh adalah meningkatnya jumlah penderita HIV serta belum terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebar hampir diseluruh wilayah global termasuk di Indonesia.

Kota Payakumbuh pun ikut terdampak pandemi covid-19, semakin hari semakin bertambah anggota masyarakat yang terpapar covid-19. Untuk itu dibutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak karena pasien covid-19 harus segera mendapat penanganan segera untuk menghindari penularan kepada orang yang masih sehat. Kota Payakumbuh tidak memiliki rumah sakit rujukan covid-19 sehingga setiap pasien positif covid-19 harus dirujuk ke luar daerah. Prosesnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena banyak hal yang perlu dipersiapkan diintaranya petugas kesehatan yang mendampingi pasien, kendaraan khusus, sopir, serta Alat Pelindung Diri (APD). Sementara itu pasien yang terpapar covid-19 kategori OTG harus diisolasi supaya tidak menularkan kepada orang yang sehat. Tempat isolasi ini pun terbatas sehingga pasien OTG tetap dirujuk untuk diisolasi di luar daerah. Tempat isolasi di luar daerah pun juga terbatas karena pasien yang terpapar covid-19 terus meningkat dengan signifikan. Idealnya Kota Payakumbuh juga memiliki tempat isolasi yang layak. Sedangkan anggaran untuk ini masih terbatas sehingga diperlukan anggaran yang memadai untuk penanganan covid-19 yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian untuk pasien yang dinyatakan positif covid-19 yang

tidak memiliki penyakit bawaan dan tidak memilki gejala khusus yang disebut dengan Orang Tanpa Gejala (OTG) harus diisolasi di tempat khusus agar tidak Tem

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Payakumbuh pada tahun 2019 berada pada angka 4,11%. Hal ini dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya keterampilan para pencari kerja. Angkatan kerja yang baru menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya akhirnya menjadi pengangguran, karena untuk bekerja pun mereka belum memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja atau spesifikasi pendidikannya belum sesuai kebutuhan yang ada. Hal ini diperburuk dengan sulitnya mendapatkan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pasar kerja dan belum adanya lembaga pendidikan dan keterampilan yang menjamin lulusannya untuk ditempatkan pada lapangan kerja yang tersedia.

Rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja juga ikut mendorong meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Payakumbuh. Sektor non formal ini jika dioptimalkan akan menyerap tenaga kerja yang tidak memerlukan spesifiksai khusus, misalnya industri rumah tangga, industri makanan ringan, industri kuliner dan sebagainya. Akan tetapi terkadang yang menjadi kendala adalah hak-hak tenaga kerja belum terlindungi sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja maka pihak industri tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh tenaga kerja. Dampak pandemi covid-19 juga berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat diantaranya menurunnya daya beli masyarakat terutama yang bekerja pada sektor non formal seperti perdagangan dan jasa. Transaksi jual beli berkurang karena masyarakat yang berpotensi sebagai pembeli mengurangi aktivitas di luar rumah. Sehingga pendapatan yang diharapkan menjadi berkurang dan tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kondisi normal. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi ini, siswa belajar dirumah dengan menggunakan fasilitas internet, hal ini tentu saja menambah beban pengeluaran masyarakat karena para orang tua mau tidak mau harus membeli paket internet bahkan ada yang terpaksa membeli alat komunikasi baru supaya anak tetap bisa bersekolah.

4.1.3. Permasalahan Pembangunan Sarana Prasarana Perkotaan dan Lingkungan Hidup

Guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, Pemerintah Kota Payakumbuh masih memiliki permasalahan yang cukup kompleks terkait sarana dan prasarana diantaranya belum optimalnya kualitas pelayanan air bersih walaupun sudah hampir 100% rumah tangga terlayani air bersih dengan sistem perpipaan namun debit air yang diterima pada jam-jam tertentu sangat kecil. Kemudian permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya ketersediaan bangunan pelengkap jalan seperti drainase dan trotoar yang layak. Untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan ada acuan yang perlu dipedomani yaitu dokumen rencana tata ruang. Kondisi saat ini pemanfaatan dokumen rencana tata ruang belum optimal.

Dari segi pengelolaan lingkungan hidup terkait persampahan, sampai saat ini pengelolaan persampahan belum tertangani dengan baik. Belum seluruh sampah rumah tangga yang diangkut dan dibuang ke TPST dan TPA serta belum terpilah antara sampah organik, anorganik dan beracun (B3). Disamping itu armada persampahan juga belum memadai sehingga tidak mampu melayani seluruh rumah tangga di Kota Payakumbuh.

Dengan adanya TPST maka jumlah timbulan sampah yang akan diangkut ke TPA Regional semakin berkurang. TPA Regional berada di Kota Payakumbuh menampung sampah dari Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Akibatnya timbulan sampah sudah melebihi ambang batas dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini berdampak kepada lahan pertanian penduduk yang berada pada sekitar lokasi TPA Regional.

4.1.4 Permasalahan Efektifitas Pengelolaan Pemerintahan dan Layanan Publik.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah belum optimalnya penerapan program reformasi birokrasi untuk mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi belum didukung dengan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang masih terbatas bagi penyelenggara pemerintahan menjadi kendala dalam menerapkan penyelenggaran pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kemudian dalam proses pengawasan penyelenggaran pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dilakukan merata secara optimal. SPIP dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

4.2 ISU STRATEGIS

Walaupun dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, tetapi hal tersebut haruslah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dimana adanya kaitan/hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya yang mencakup hubungan administrasi maupun antar susunan pemerintahan. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis juga merupakan kondisi yang berpotensi menjadi peluang daerah dimasa datang. Perumusan isu strategis dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan di Kota Payakumbuh serta arah kebijakan dalam dokumen perencanaan jangka panjang Kota Payakumbuh, Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Global.

4.2.1. Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Global

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025 yaitu"Terwujudnya Payakumbuh sebagai Kota Maju dengan pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah"

Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";

2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing didunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Isu-Isu Strategis yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Payakumbuh 2005-2025:

1. Pemerintahan dan Hukum: Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum dan HAM;
2. Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Peningkatan Kinerja Aparatur;
3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam: Ekonomi, Sumber Daya Alam;
4. Sumber Daya Manusia;
5. Tata Ruang, Prasarana dan Sarana;
6. Lingkungan Hidup;
7. Sosial Budaya.

Isu-isu strategis pada perencanaan jangka panjang, dikelompokkan dalam kaitannya untuk mencapai Kota Payakumbuh yang maju, dengan motor penggerak ekonomi difokuskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Indikator Kota Maju ditetapkan melalui pengembangan SDM, pemantapan tata pemerintahan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan agama dan budaya dalam kesesuaian pola pembangunan yang memperhatikan lingkungan. Masyarakat dan Pemerintah merupakan subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri, dimana pembangunan yang dilakukan pada sejatinya disektor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dengan memperhatikan kondisi ruang daerah. Pola ini dapat dipertimbangkan dalam merumuskan misi Kota Payakumbuh pada pembangunan strategis Kota Payakumbuh untuk tahun 2017–2022.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 2012-2017

Rencana pembangunan strategis Kota Payakumbuh tahun 2012-2017 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005–2025. Sebagai bagian dari proses, RPJMD Tahun 2017–2022 merupakan kelanjutan dari RPJMD Tahun 2012–2017, sehingga dengan memperhatikan perencanaan pembangunan strategis sebelumnya dapat dilihat target pembangunan yang belum dicapai, dan isu-isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Visi RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 yaitu "Terwujudnya Payakumbuh Menjadi Kota yang Maju, Sejahtera dan Religius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan yang Berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basan diKitabullah".

Misi yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi RPJMD Tahun 2012-2017:

1. Menjadikan Payakumbuh sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bebas KKN;
3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama ditengah masyarakat sesuai dengan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";

4. Mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral;
5. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
6. Melakukan revitalisasi nagari dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat lokal dalam membangun masyarakat dan Kota Payakumbuh;
7. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai RTRW Kota Payakumbuh.

Isu-Isu Strategis yang dimuat dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 antara lain:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemahaman, Pengamalan Agama dan Budaya;
3. Nilai Tambah Produksi Industri;
4. Investasi;
5. Pertumbuhan Ekonomi;
6. Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik;
7. Jaminan Sosial;
8. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;
9. Penataan Ruang Kota;
10. Kualitas Lingkungan Hidup;
11. Prasarana dan Sarana Daerah;
12. Kewenangan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Akses dengan Daerah Provinsi Tetangga;
14. Pengalihan Kewenangan Urusan.

Poin penting yang dapat diperhatikan pada rencana pembangunan strategis sebelumnya menunjukkan bahwa Visi Kota Payakumbuh sebagai kota maju dikembangkan secara lebih detail, dengan setiap target capaian pembangunan kota pada akhir 2017 dikembangkan melalui misi yang tetap mengedepankan pengembangan agama dan budaya melalui peningkatan SDM Kota Payakumbuh yang berkualitas (pendidikan dan kesehatan). Pemberdayaan masyarakat diketengahkan sebagai bagian capaian visi yang pro-rakyat melalui penegasan kewenangan nagari dan lembaga kemasyarakatan.

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2016–2021

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 disusun dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat, serta masukan dari konsultasi publik dan Focus Group Discussion (FGD). RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD serta perencanaan dan penganggaran Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dan untuk membantu Kabupaten/Kota mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras dengan Provinsi Sumatera Barat.

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera", dengan misi antara lain:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional;

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

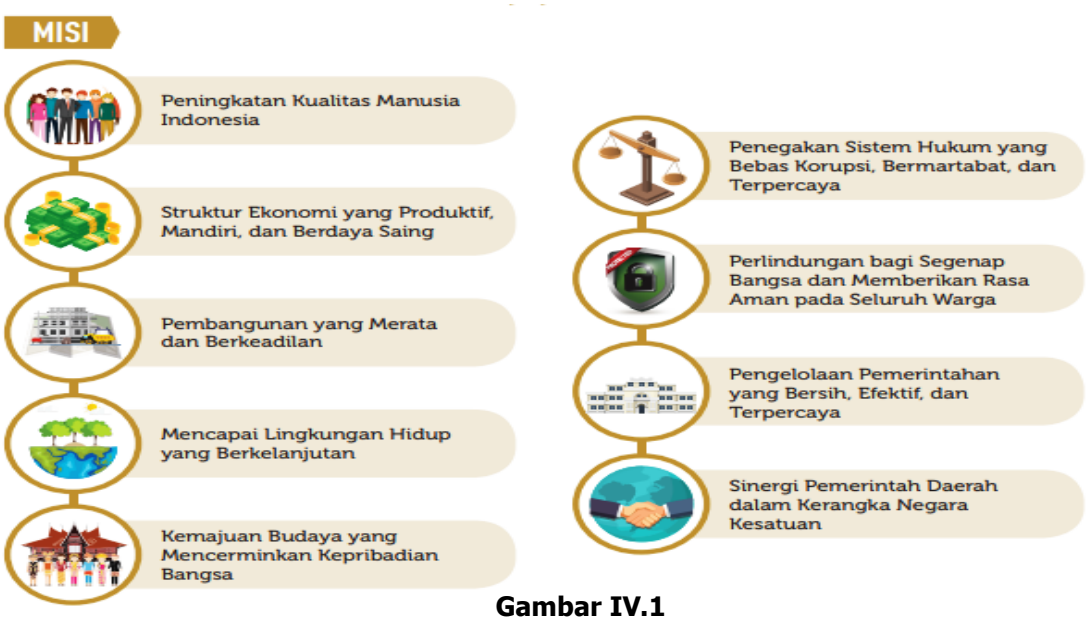
1. Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan;
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis;
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi;
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan;
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal;
9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur;
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan informasi visi, misi dan prioritas tersebut, Provinsi Sumatera Barat menekankan pembangunan daerah pada masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan melalui perbaikan sikap mental yang sesuai dengan nilai agama, adat dan kearifan lokal budaya Minangkabau, yang kemudian diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan SDM, ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Prioritas pembangunan daerah provinsi yang diusulkan dikembangkan dari persyaratan minimum standar pembangunan daerah (SPM). Dan memperhatikan kondisi daerah dan isu global Sustainable, maka prioritas pembangunan untuk provinsi Sumatera Barat juga difokuskan pada pengembangan sumber energi terbarukan dan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan, disamping kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.



Gambar IV.1
Nawacita Kedua RPJMN 2020-2024

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



Gambar IV.2
5 Arahan Utama Presiden

E. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 4, menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 jenis yaitu terdiri atas:

1. SPM Pendidikan;
2. SPM Kesehatan
3. SPM Pekerjaan Umum
4. SPM Perumahan Rakyat
5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Pelindungan Masyarakat
6. SPM Sosial.

PP Nomor 2 Tahun 2018 ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur lebih rinci dalam penerapan SPM oleh Pemerintah daerah. Dalam Pasal 3 Perarturan Menteri Dalam Negeri ini keenam jenis SPM dirinci lagi kepada bentuk-bentuk pelayanan yang diprioritaskan sebagai berikut :

1. Pendidikan

Mutu dan pelayanan dasar terkait dengan bidang pendidikan yaitu:

a. Pendidikan anak usia dini;
   Untuk pendidikan anak usia dini ini pelayanan diberikan pada warga Negara usia 5 - 6 tahun
b. Pendidikan dasar;
   Untuk warga Negara usia 7 - 15 Tahun dan penerimaan pelayanan dasar pendidikan kesetaraan
c. Pendidikan kesetaraan;
   Untuk warga Negara usia 7 – 18 tahun dan penerimaan pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Pendidikan meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

2. Kesehatan

Mutu dan pelayanan dasar yang diberikan terkait dengan SPM bidang kesehatan adalah:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; untuk ibu hamil
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; untuk ibu melahirkan
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; untuk bayi baru lahir
d. Pelayanan kesehatan balita; untuk balita
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; untuk usia pendidikan dasar
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; untuk usia produktif

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; untuk usia lanjut
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; untuk penderita hipertensi
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; untuk penderita diabetes melitus
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; untuk orang dengan gangguan jiwa berat
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; untuk orang terduga tuberkulosis
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*); untuk orang beresiko HIV

Mutu pelayanan dasar pada SPM kesehatan meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, Standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mutu dan pelayanan dasar yang diberikan terkait dengan SPM bidang pekerjaan umum terkait pada :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;untuk seluruh warga negara
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah omestik yang mampu dan dapat diakses oleh masyarakat; untuk seluruh warga negara

Mutu pelayanan dasar pada SPM PUPR meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

4. Perumahan Rakyat

Mutu pelayanan dasar bidang perumahan rakyat adalah:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; untuk Korban bencana Kabupaten/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena relokasi program pemerintah; untuk Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

6. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan minimum dasar yang diberikan terkait dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; untuk
b. Pelayanan informasi rawan bencana;
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penerima layanan dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
b. Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana;
c. Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran

Mutu pelayanan dasar pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

7. Sosial

Jenis pelayanan minimum bidang sosial yaitu :

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

Penerima layanan dasar SPM Sosial adalah Penyandang disabilitas telantar, Anak telantar, Lanjut usia telantar, Gelandangan dan pengemis, Korban bencana di tingkat provinsi, Korban bencana di tingkat kabupaten/kota.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Sosial meliputi Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri ini juga diatur tahapan Penerapan SPM dengan empat tahapan yaitu :

1. Tahap pengumpulan data;
2. Tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Tahap penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
4. Tahap pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

F. *Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)

Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) adalah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs, dengan masa berlakunya 2015–2030, yang disepakati oleh lebih dari 190 negara berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara diseluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah, sebagai ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah.

Secara garis besar SDGs 2045 berjalan dengan memperhatikan aspek penting yang dilewati sebelumnya yakni MDGs 2030 dimana diharapkan kaum millennial mampu berperan banyak dalam memajukan perekonomian dunia dengan tetap memperhatikan aspek penting termasuk alam dan menggunakan sumber daya yang ada secara maksimal yakni technology agar tidak tertinggal jauh dengan negara yang sudah lebih maju.



Gambar IV.3.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berikut penjelasan setiap tujuan dalam SDGs beserta logonya



Tujuan 1

Tanpa kemiskinan *(No Poverty)*. Hingga kini, kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di berbagai belahan dunia. Agar dapat mensejahterakan penduduk dunia, maka penuntasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Inti dari target tersebut adalah untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.



Tujuan 2

Tanpa kelaparan *(Zero Hunger)*. Selain kemiskinan, masalah kelaparan atau kurang pangan juga masih menghantui berbagai tempat di belahan dunia. Maka dari itu, menggalakkan pertanian dan ketahanan pangan menjadi agenda utama dalam mencapai tujuan perbaikan nutrisi.



Tujuan 3

Kehidupan sehat dan sejahtera *(Good Health and Well-Being)*. Isu kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Maka dari itu, kini tengah digalakkan gaya hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia



Tujuan 4

Pendidikan berkualitas *(Quality Education)*. Memastikan agar pendidikan berkualitas bisa di akses oleh semua orang. Hal ini lantaran pendidikan punya peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat



Tujuan 5

Kesetaraan gender *(Gender Equality)*. Meski sedang terjadi perkembangan kesetaraan gender yang masif belakangan ini, namun diskriminasi terhadap gender terutama perempuan masih menjadi permasalahan di berbagai negara. Dengan memperjuangkan kesetaraan gender dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang pesat, memerintah dengan efektif, dan mengentaskan kemiskinan.



Tujuan 6

Air bersih dan sanitasi layak *(Clean Water and Sanitation)*. Bank Dunia pada tahun 2014 merilis data bahwa masih ada 780 juta orang yang tidak punya akses air bersih di dunia ini dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi tak punya akses sanitasi. Hal ini mengakibatkan kerugian materi hingga 7 persen dari PDB dunia akibat banyak nyawa melayang setiap harinya. Maka dari itu, menjamin akses atas air bersih dan sanitasi untuk semua merupakan hal yang penting dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia.



Tujuan 7

Energi bersih dan terjangkau *(Affdorable and Clean Energy)*. Di dunia ini masih banyak daerah yang terisolasi dan belum memiliki listrik, padahal hal tersebut penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.



Tujuan 8

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi *(Decent Work and Economy Growth)*. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, maka pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang sehat harus dijamin agar investasi dan konsumsi terus berjalan.



Tujuan 9

Industri, inovasi dan infrastruktur *(Industry, Innovation, and Infrastructure)*. Di dunia ini, lebih dari 4 miliar orang belum memiliki akses internet dan 90 persen di antaranya berasal dari negara-negara berkembang. Maka dari itu, untuk membangun infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan, hal ini akan segera dituntaskan.



Tujuan 10

Berkurangnya kesenjangan *(Reduce Inequality)*. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Kesenjangan pendapatan sedang mengalami kenaikan, 10 persen orang-orang terkaya menguasai 40 persen dari total pendapatan global. Di lain pihak, 10 persen orang-orang termiskin hanya mendapat antara 2 sampai 7 persen dari total pendapatan global. Di negara-negara berkembang, kesenjangan ini telah meningkat sebanyak 11 persen jika kita menghitung berdasarkan pertumbuhan populasi.



Tujuan 11

Kota dan komunitas berkelanjutan *(Sustainable Cities and Communities)*. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.



Tujuan 12

Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab *(Responsible Consumption and Production)*. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.



Tujuan 13

Penanganan perubahan iklim *(Climate Action)*. Melawan dan mengatasi iklim yang terus berubah dan pemanasan global merupakan salah satu tugas utama.



Tujuan 14

Ekosistem laut *(Life Below Water)*. Akibat banyak perburuan dan pencemaran terhadap ekosistem laut, maka dalam pembangunan berkelanjutan, kehidupan laut akan dilindungi dengan lebih maksimal.

Mengingat Kota Payakumbuh, tidak memiliki kawasan laut maka goals tidak dilaksanakan di Kota Payakumbuh



Tujuan 15

Ekosistem darat *(Life On Land)*. Selain berpengaruh terhadap iklim, mengelola hutan secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati juga jadi tujuan utama.



Tujuan 16

Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh *(Peace, Justice, and Strong Institution)*. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.



Tujuan 17

Kemitraan untuk mencapai tujuan *(Partnership for The Goals)*. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*SDGs* merupakan tindak lanjut dan penyempurnaan *MDGs*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*SDGs* lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang; memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta; menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya; inklusif, secara spesifik menyasar kepada yang rentan – *no one left behind;* pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, Organisasi Masyarakat dan media, filantropi dan bisnis, serta pakar dan akademisi*; MDGs* hanya menargetkan pengurangan "setengah", sedangkan *SDGs* menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator "*Zero Goals*"*;* tidak hanya memuat *Goals* tetapi juga Cara Pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Filantropi menjadi salah satu dari empat pilar pendukung SDGs dari sisi dunia usaha, tiga pilar lainnya adalah pemerintah, Organisasi Masyarakat dan media, serta pakar dan akademisi. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama filantropi karena filantropi memiliki jangkauan yang luas. Hal ini disebabkan karena filantropi biasanya digerakkan oleh orang-orang dermawan yang suka memberi dan memiliki nilai-nilai untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Melalui RPJMD ini pada dokumen jabarannya akan ditindaklanjuti serius oleh masing-masing perangkat daerah agar bersama-sama bergerak dengan filantropi untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah sekaligus percepatan tujuan pembangunan nasional maupun tujuan pembangunan berkelanjutan.

G. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Tata ruang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan terkait dengan infrastruktur, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Perencanaan tata ruang dikembangkan untuk mempercepat terjadinya pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur.

G.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhirarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota dan Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota. Berikut Penjabaran rencana struktur ruang dalam RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 :

G.1.1. Rencana Pusat-Pusat Pelayanan Kota

Rencana pusat-pusat pelayan Kota Payakumbuh meliputi:

A. Pusat Pelayanan Kota.
   Pusat Pelayanan Kota mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa regional Kota Payakumbuh, dengan pusat terletak di Kawasan Pusat Kota.
B. Sub pusat pelayanan kota.
   Sub pusat Pelayanan Kota (SPPK) terdiri dari:
   1. SPPK I mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pariwisata dan pengembangan kawasan permukiman, yang melayani sebagian wilayah kecamatan Payakumbuh Timur dan sebagian wilayah Payakumbuh Selatan, dengan pusat pelayanan terletak di Kelurahan Padang Tangah payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur;
   2. SPPK II mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan agroindustri yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara, dengan pusat pelayanan terletak di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Timur;
   3. SPPK III mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan Pertanian, yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara, dengan pusat pelayanan terletak di Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara;
   4. SPPK IV mempunyai fungsi utama sebagai kawasan industri kecil dan menengah Kota Payakumbuh yang melayani Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat , dengan pusat pelayanan terletak di Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
   5. SPPK V mempunyai fungsi utama sebagai pusat pengembangan pariwisata yang melayani sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan dan sebagian wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat, dengan pusat pelayanan terletak di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat.

   C. Pusat Lingkungan (PL) merupakan pusat pelayanan yang terdekat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hirarki struktur ruangnya, maka PL yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
      a. PPK yang terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:
         1. PL 1-1, dengan pusat di Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo;
         2. PL 1-2, dengan pusat di Kelurahan Balai Tongah Koto;
         3. PL 1-3, dengan pusat di Kelurahan Padang Tangah Balai Nan Duo; dan
         4. PL 1-4, dengan pusat di pada Kelurahan Ibuh.
      b. SPPK I terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:
         1. PL 2-1, dengan pusat di Kelurahan Sicincin;
         2. PL 2-2, dengan pusat di Kelurahan Padang Tiakar;
         3. PL 2-3, dengan pusat di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan; dan
         4. PL 2-4, dengan pusat di Kelurahan Balai Jaring.
      c. SPPK II terdiri 3 (tiga) PL, yang meliputi:
         1. PL 3-1, dengan pusat di Kelurahan Payobasung;
         2. PL 3-2, dengan pusat di Kelurahan Tiakar; dan
         3. PL 3-3, dengan pusat di Kelurahan Koto Baru.
      d. SPPK III terdiri 3 (tiga) PL, yang meliputi:
         1. PL 4-1, dengan pusat di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah;
         2. PL 4-2, dengan pusat di Kelurahan Taratak Padang Kampuang; dan
         3. PL 4-3, dengan pusat di Kelurahan Tigo Koto Diateh.

e. SPPK IV terdiri dari 4 (empat) PL, yang meliputi:
   1. PL 5-1, dengan pusat di Kelurahan Sungai Durian;
   2. PL 5-2, dengan pusat di Kelurahan Koto Panjang Padang;
   3. PL 5-3, dengan pusat di Kelurahan Koto Tangah; dan
   4. PL 5-4, dengan pusat di Kelurahan Napar.

f. SPPK V terdiri dari 3 (tiga) PL, yang meliputi:
   1. PL 6-1, dengan pusat di Kelurahan Pakan Sinayan;
   2. PL 6-2, denga pusat di Kelurahan Padang karambia; dan
   3. PL 6-3, dengan pusat di Kelurahan Payolansek.

G.1.2. Rencana Sistem Prasarana Utama Wilayah Kota

Arahan Pengembangan sistem jaringan transportasi adalah bertujuan untuk mengembangkan keterhubungan antar pusat kegiatan dan memperkuat sistem pergerakan antar wilayah baik internal maupun eksternal. Rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Payakumbuh, dan mengarahkan pertumbuhan wilayah terutama pada wilayah pengembangan baru dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Oleh sebab itu, rencana struktur prasarana jalan meliputi rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder dan lokal primer. Selain itu untuk mengembangkan sistem jaringan jalan eksternal, dalam rangka pengembangan sistem transportasi terhadap kawasan di sebelah utara Kota Payakumbuh menuju arah Kota Pekanbaru dan meningkatkan potensi ekonomi (perdagangan dan jasa) serta wisata di Kota Payakumbuh maka dikembangkan sistem jaringan jalan arteri primer yang sering disebut *Ring Road Utara* Kota Payakumbuh.

Di samping rencana sistem jaringan jalan juga direncanakan sistem jaringan Perkeretaapian. Fungsi jalur kereta api terhadap sistem jaringan transportasi Kota Payakumbuh dalam lingkup regional Propinsi Sumatera Barat diarahkan sebagai salah satu alternatif angkutan moda transportasi darat, baik untuk mengangkut orang maupun barang inter dan intra regional, yaitu dengan mendorong percepatan realisasi dari pengoperasian jaringan jalur kereta api dengan terkoneksi dalam sistem jaringan kereta api Sumatera (*Sumatera Railway*). Untuk Kota Payakumbuh, jalur kereta api antara Padang Panjang-Payakumbuh eksisting sudah ada hingga Kelurahan Parik Rantang (stasiun), namun jalur ini sebagian besar sudah ditutup untuk badan jalan dan masih berupa jalan rel non operasi (jalan mati). Pengembangan jalur kereta api yang direncanakan adalah dari batas kota Balai Panjang sampai kawasan Ngalau Sampik saja, dimana lokasi stasiun kereta api kelas kecil akan ditetapkan di Kawasan Ngalau Sampik ini. Dalam rangka rencana aktifasi jalur kereta api yang melalui Kota Payakumbuh, maka dilakukan pengalihan trase jalur ruas Padang Panjang-Payakumbuh-Limbanang yakni melalui jalan lingkar utara yang meliputi : Kawasan Balai Panjang-Pakan Sinayan-Kubu Gadang-Bulakan Balai Kandi-Payolansek-Talang-Sungai Durian-Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

G.1.3 Rencana Sistem Prasarana Lainnya

a. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Listrik merupakan sumber penerangan dan energi yang sangat penting dalam menunjang perekonomian daerah. Pembangkit tenaga listrik yang dimanfaatkan di Kota Payakumbuh bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maninjau, PLTA Batang Agam, PLTA Ombilin, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Salak, dan PLTA Koto Panjangyang didistribusikan melalui gardu induk/kubikel dengan kapasitas tegangan 20 KV

dan berdaya 200 KVA. Jaringan listrik sudah menyebar hampir keseluruh bagian wilayah Kota Payakumbuh.

Secara umum jaringan listrik yang ada di Kota Payakumbuh pada saat ini sudah merata penyebarannya disetiap kecamatan yang ada di Payakumbuh, terutama pada pusat-pusat kegiatan dan lingkungan perumahan penduduk. Dari data yang ada diketahui bahwa daya terpasang yang ada di Kota Payakumbuh adalah sebesar 23.529 kilowatt dan dari hasil analisa yang telah dilakukan terlihat bahwa jumlah kebutuhan listrik Kota Payakumbuh sampai pada akhir tahun rencana adalah sebesar 54.852 kilowatt. Jadi dapat disimpulkan bahwa daya terpasang yang ada di Kota Payakumbuh tidak mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat akan kebutuhan energi listrik dan dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa permintaan masyarakat terhadap sambungan listrik masih memerlukan tambahan daya energi listrik dari pihak PLN.

Tabel IV-1
Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik di Kota Payakumbuh Tahun 2030

No	Kecamatan	Kebutuhan Tahun 2030 (Watt)				
		Rumah Tangga	Komersil dan Jasa	Fasum & Sosial	PJU	Total Kebutuhan
1.	Payakumbuh Barat	16.152.760	2.485	3.230.522	1.615.276	21.001.073
2.	Payakumbuh Timur	9.757.800	1.501	1.951.560	975.780	12.686.641
3.	Payakumbuh Utara	9.354.200	1.439	1.870.856	935.428	12.162.003
4.	Payakumbuh Selatan	3.538.860	544	707.772	353.886	4.602.062
5.	Lamposi Tigo Nagari	3.501.420	539	700.284	350.142	4.552.385
	Kota Payakumbuh	42.189.420	6.491	8.437.884	4.218.942	54.852.737

Sumber : RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030

Perkiraan kebutuhan listrik pada tahun 2030 pada Kota Payakumbuh meningkat yaitu sebesar 54.852 kilowatt. Jumlah kebutuhan listrik tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan juga penerangan jalan. Kebutuhan listrik lebih didominasi untuk kebutuhan rumah tangga dimana jumlah energi listrik yang dibutuhkan adalah sebesar 42.189 kilowatt pada tahun 2030.

b. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Dalam mendukung perkembangan Kota Payakumbuh terutama sebagai daerah permukiman, perdagangan dan perkantoran, maka kebutuhan prasarana telekomunikasi sudah merupakan suatu keharusan yang perlu dipenuhi dalam menunjang perkembangan daerah. Perkiraan kebutuhan sambungan telepon (SST) di Kota Payakumbuh dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Untuk sambungan langsung Rumah Tangga, kebutuhan telepon rumah adalah sebesar 1 SST untuk 50 jiwa penduduk.
2. Untuk sarana umum/sosial diasumsikan kebutuhan telepon adalah 1 SST untuk 250 jiwa penduduk.
3. Untuk sarana komersial dan lainnya diasumsikan kebutuhan telepon adalah 1 SST untuk 150 jiwa penduduk.

4. Untuk melayani kebutuhan fasilitas telepon umum, maka diasumsikan 1 SST untuk 1000 jiwa.

Berdasarkan jumlah penduduk terkini dan standar teknis bahwa 1 unit rumah dihuni oleh 5 jiwa, maka diperkirakan pada Tahun 2030 dibutuhkan jumlah sambungan telepon rumah (dari Telkom) sebesar 5.684SST untuk melayani 25.261unit rumah dengan dibagi kedalam beberapa tipe perumahan, dari mulai tipe rumah berukuran kecil, sedang, hingga tipe rumah berukuran besar di seluruh Kota Payakumbuh. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel proyeksi kebutuhan telekomunikasi Kota Payakumbuh.

Tabel IV-2
Proyeksi Kebutuhan Jaringan telepon (Kabel) di Kota Payakumbuh Tahun 2030

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Jaringan Telepon						Total Kebutuhan
			Rumah Kecil	Kebutuhan Telepon (SST)	Rumah Sedang	Kebutuhan Telepon (SST)	Rumah Besar	Kebutuhan Telepon (SST)	
1.	Payakumbuh Barat	62.126	5.907	886	2.954	886	985	443	2.215
2.	Payakumbuh Timur	37.530	3.170	475	1.585	475	528	238	1.189
3.	Payakumbuh Utara	35.978	3.815	572	1.908	572	636	286	1.431
4.	Payakumbuh Selatan	13.611	1.125	169	563	169	188	84	422
5.	Lamposi Tigo Nagari	13.467	1.140	171	570	171	190	85	427

Sumber : RTRW Kota Payakumbuh 2010-2030

c. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air, meliputi : a) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada diwilayah kota, b) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota, dan c) Sistem jaringan sumber daya air kota. Sumber daya air yang terdapat di Kota Payakumbuh salah satunya adalah dari sungai yang mengalir atau yang melalui Kota Payakumbuh. Sungai merupakan sumber daya air permukaan yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk Pengelolaan sungai dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab penetapannya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11 A / PRT / M / 2006. dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa wilayah sungai terbagi atas lima yakni :

1. Wilayah sungai lintas Negara;
2. Wilayah sungai lintas provinsi;
3. Wilayah sungai strategis nasional;
4. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
5. Wilayah sungai dalam satu kabupaten.

Penetapan wilayah sungai tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan dan kriteria tertentu yakni :

a. Efektifitas pengelolaan sumber daya air
   Efektifitas ini diterjemahkan dalam bentuk pengelolaan sumber daya air dan juga ketersediaan prasarana sumber daya air. Efektifitas ini dapat berupa kegiatan sebagai berikut :
   1. Pengelolaan sumber daya air pada wilayah tersebut memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.
   2. Keberadaan prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan aliran sungai yang lain.
b. Efisiensi pengelolaan sumber daya air

Tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sedangkan penetapan wilayah sungai strategis nasional ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

1. Potensi sumber daya air pada wilayah sungai dibandingkan dengan potensi sumber daya air pada provinsi lebih besar atau sama dengan 20%.
2. Banyaknya sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 16 sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling kurang 30% dari jumlah penduduk provinsi.
3. Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional

c. Sosial
   1. Tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air paling kurang 30% dari seluruh tenaga kerja di tingkat provinsi.
   2. Wilayah sungai yang terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain.
d. Lingkungan hidup
   1. Terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik pada sumber air yang langka dan perlu dilindungi atau yang merupakan konvensi internasional
   2. Perbandingan antara debit air sungai maksimum dengan debit air sungai minimum rata-rata tahunan sungai utama melebihi 75
   3. Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui angka 1,5
   4. Seringnya timbul kejadian penyakit terkait dengan air yang mengakibatkan kematian / cacat tetap dalam jumlah besar.
e. Ekonomi
   1. Terdapatnya paling kurang satu daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 ha
   2. Nilai produksi industri terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 20% dari nilai produksi industri di tingkat provinsi.
   3. Produksi pembangkit listrik tenaga air pada wilayah sungai yang bersangkutan terkoneksi atau merupakan bagian dari jaringan listrik lintas provinsi.

Besarnya dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat kerugian ekonomi yang diakibatkan paling kurang 1% dari produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi.

Di Kota Payakumbuh secara perwilayahan dialiri oleh tiga aliran sungai besar yakni Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi dan Sungai Batang Sinamar. Dari ketiga sungai tersebut, sungai terbesar merupakan sungai Batang Agam dengan lebar 20 m, panjang 14,6 km yang melintasi Kota Payakumbuh pada bagian selatan dan utara Kota. Berdasarkan kriteria penetapan wilayah sungai maka sungai-sungai yang mengalir di Kota Payakumbuh tidak dapat diklasifikasikan ke dalam wilayah sungai strategis nasional. Wilayah sungai di Kota Payakumbuh tergolong pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai Dalam Satu Kota, yang kedepannya perlu dilakukan pengawasan secara ketat dalam peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air untuk peningkatan hasil-hasil produkstivitas pertanian dan perkebunan Kota Payakumbuh.

Kegiatan usaha pertanian masih merupakan usaha yang digeluti sebagian besar masyarakat Kota Payakumbuh. Hal ini didukung dengan perkembangan fisik kawasan yang sebahagian besar merupakan kawasan pertanian dan kawasan pedesaan. Perkembangan Kota Payakumbuh sebagai salah satu Kota Pertanian mengingat masih besarnya penduduk

yang bekerja di sektor ini ± 22,46% dan hampir setengah lahan kota adalah lahan pertanian.

Jaringan Irigasi sangat berperan dalam meningkatkan produksi pertanian pada suatu wilayah, di Kota Payakumbuh sudah menggunakan beberapa jenis irigasi sebagai pengairan sawah, seperti irigasi teknis, semi teknis, dan juga irigasi sederhana yang masih digunakan. Sumber air dari irgasi tersebut berasal dari Batang Lampasi, Sungai Beringin, Batang Agam, Sungai Dareh, dan Batang Tabik. Kelima sumber pengairan tersebut berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Lahan pertanian merupakan lahan cadangan untuk pengembangan kawasan permukiman. Jika terjadi pengembangan kawasan permukiman maka lahan utama yang tetap dipertahankan adalah lahan pertanian beririgasi.

d. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan didalam RTRW Kota Payakumbuh tahun 2010-2030 dijabarkan kedalam beberapa sistem, yaitu :

a. Sistem Jaringan Air Baku;
b. Sistem Penyediaan Air Minum;
c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota;
d. Sistem Persampahan Kota;
e. Sistem Jaringan Drainase Kota;
f. Rencana Sistem Proteksi Kebakaran;
g. Rencana Sistem Perparkiran;
h. Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki;
i. Jalur Evakuasi Bencana.

Pendekatan pembangunan kota saat ini adalah penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Artinya, bagaimana penataan kota tersebut dapat meminimalkan korban jika terjadi bencana. Untuk konteks Kota Payakumbuh, bencana yang dialami adalah bencana alam angin puting beliung dan kawasan yang terkena dampak dari gempa bumi (Kota Payakumbuh tidak merupakan jalur sesar yang menimbulkan gempa atau gerakan tanah).

Ruang Evakuasi dan jalur penyelamatan *(Escape Road)* adalah ruang terbuka dan jalan-jalan kota yang dikembangkan/direncanakan sebagai jalur pelarian ke titik kawasan penyelamatan dan wilayah yang aman lainnya. Jalur evakuasi bencana bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana. Strategi yang dapat dilakukan adalah :

1. Pemanfaatan RTH sebagai salah satu kawasan evakuasi. Dalam hal ini titik utama evakuasi bencana adalah Lapangan Kapten Tantawi dan Lapangan Kubu Gadang.
2. Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota secara umum.
3. Meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi dengan cara : pelebaran jalan, perbaikan *agliment* jalan eksisting, peningkatan kualitas badan jalan penambahan jalan-jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas dan efisiensi kota.
4. Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting tersebut dengan rencana jalur penyelamatan yang merupakan urban sistem lama sehingga menjadi suatu sistem kota yang terpadu dan dapat memitigasi bencana alam.
5. Pembangunan jalur penyelamatan harus disertai dengan: penyadaran publik (pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, demo evakuasi, dan sebagainya).

6. Penanaman pohon-pohon besar sebagai peneduh jalan dan taman secara teratur memberikan keteduhan kota dan jiwa warga kota. Jenis pohon yang ditanam adalah jenis tanaman lokal. Pohon-pohon besar tersebut akan dirancang sebagai pohon penyelamatan di sepanjang rute-rute penyelamatan, taman penyelamatan, atau bangunan penyelamatan lainnya.
7. Jalan-jalan yang dapat dikembangkan sebagai jalur penyelamatan (*Escape Road*) di Kota Payakumbuh antara lain : Jalan Sudirman dan Jalan Soekarno Hatta dan Jalan-jalan disekitar Lapangan Kapten Tantawi dan Kawasan Kubu Gadang dan jalan-jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya.

G.1.4. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang kota adalah bentuk pengaturan pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturan pemanfaatan tersebut harus dapat menggambarkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar 13 sektor pembangunan kota.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990, dengan batasan sebagai berikut :

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan, dan sumberdaya manusia.

Konsep pengembangan pola ruang kawasan Perkotaan Payakumbuh pada dasarnya diarahkan berdasarkan evaluasi kesesuaian lahan dan kondisi eksisting penggunaan dan pemanfaatan lahan yang ada serta indikasi arah dan kebijakan pengembangan pemanfaatan lahan yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang berdasarkan struktur ruang yang diinginkan berdasarkan dinamika pembangunan Kota Payakumbuh. Berdasarkan hal tersebut maka kawasan perkotaan dibagi atas penetapan 2 kawasan utama yang terbagi atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

G.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Salah satu hal penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup adalah pengembangan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environment Assessment (SEA). Pada prinsipnya KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan dan evaluasi RPJMD periode 2017-2022 yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil pembobotan, maka isu strategis KLHS Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh adalah : rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, tingginya intensitas alih fungsi lahan, rendahnya kapasitas penyediaan sumber air baku, rendahnya kapasitas pengelolaan limbah, berkurangnya kawasan hijau, dan minimnya sanitasi perkotaan.

Berikut ini Rekomendasi Perbaikan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Visi-Misi dan Arahan Kebijakan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022 :

Tabel IV-3
Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik KLHS Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

No	Isu Strategis	Rekomendasi
1	Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah	1. Perlu diupayakan secara bertahap pengurangan timbulan sampah melalui pola 3R. 2. Distribusi TP sampah sementara perlu ditingkatkan mengingat adanya sampah yang tak tertampung pada TPS. 3. Mengembangkan regulasi untuk menurunkan timbulan sampah. (Kantong plastik berbayar, insentif dan disinsentif penanganan sampah). 4. Meningkatkan partisipasi public dalam pengelolaan sampah (insentif dan disinsentif). 5. Mengupayakan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah.
2	Tingginya intensitas alih fungsi lahan	1. Mengembangkan insentif dan disinsentif untuk imlementasi LP2B. 2. Mendorong pengembangan pemukiman hemat lahan dan arsitektur selaras alam. 3. Mengembangkan infrastruktur untuk mengendalikan pemanfaatan lahan sawah.
3	Rendahnya kapasitas penyediaan air bersih	1. Mengembangkan infrastruktur penyediaan air (Instalasi penampungan air, penjernihan dan distribusi air). 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan air. 3. Meningkatkan Kerjasama berbasis jasa lingkungan dengan para pihak penyedia dan pemanfaat air. (Koordinasi dgn kab .Agam dan BP DAS,)
4	Rendahnya kapasitas pengelolaan limbah	1. Mengembangkan regulasi pengelolaan limbah (termasuk limbah B3). 2. Disinsentif untuk industri penghasil limbah. 3. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan limbah (IPAL Komunal, *sewerage system* perkotaan). 4. Meningkatkan partisipasi public dalam pengelolaan limbah berbasis filantropis
5	Berkurangnya kawasan hijau	1. Optimalisasi implementasi LP2B 2. Mengembangkan regulasi alokasi RTH untuk pengembang perumahan baru. 3. Meningkatkan kualitas sempadan sungai dan lahan masyarakat belum terbangun

Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap dekomen RPJMD Periode 2017-2022 telah menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan, rencana, dan/atau program guna mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Total isu strategis KLHS RPJMD Kota Payakumbuh adalah 60 indikator TPB Kota Payakumbuh, diantaranya terdapat 14 indikator yang termasuk dalam kategori SPM. Oleh karena itu direkomendasikan untuk menjalankan skenario pencapaian TPB untuk 14 indikator tersebut seperti terlihat pada tabel IV-4.

Tabel IV-4
Rekomendasi Terkait Isu Strategis Hasil Pengkajian TPB

SPM	Isu Strategis	Skenario Pencapaian TPB	
		Arah Kebijakan	**Indikasi Program**
Kesehatan	Belum tercapainya Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular	1. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 2. Pengembangan sarana prasarana olah raga
	Tidak ada data Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada anak balita.	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tidak adanya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang minim risiko bencana	1. Pengembangan basis data Pengurangan Risiko Bencana 2. Peningkatan kapasitas Pengurangan Risiko Bencana
	Tidak adanya data Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1. Meningkatkan informasi dan pengetahuan menuju Tangguh Bencana 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1. Pengembangan infrastruktur tangguh bencana. 2. Pengembangan kelembagaan siaga bencana.
	Tidak adanya kecamatan tangguh bencana yang terbentuk.	Mengoptimalkan Kelompok Siaga Bencana di 47 Kelurahan	1. Pembentukan dan Pelatihan Kelompok Siaga Bencana untuk 12 kelurahan 2. Peningkatan kapasitas

SPM	Isu Strategis	Skenario Pencapaian TPB	
		Arah Kebijakan	**Indikasi Program**
			kelembagaan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di 35 kelurahan siaga bencana yang telah terbentuk
	Tidak adanya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Mengoptimalkan sistim peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	1. Peningkatan sarana dan prasarana peringatan dini kebencanaan 2. Peningkatan SDM yang mengelola sistim peringatan dini kebencanaan
Pekerjaan Umum	Tidak adanya data kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri.	1. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum 2. Mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak yang melakukan pengelolaan air baku	1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 2. Peningkatan pengelolaan sumber daya air (SDA) 3. Peningkatan kerja sama para pihak dalam penyediaan air baku
	Tidak adanya data lembaga pembiayaan infrastruktur.	1. Meningkatkan kerjasama pembiayaan infrastruktur 2. Mengembangkan penataan kawasan kumuh melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat	1. Pengembangan perumahan 2. Penataan dan peningkatan kawasan permukiman 3. Penataan dan peningkatan perumahan dan kawasan permukiman kumuh 4. Peningkatan PSU 5. Pengembangan kapasitas jasa konstruksi
Pendidikan	Tidak adanya data daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Mengembangkan upaya pendidikan layanan khusus untuk daerah bencana alam/ bencana	Penyediaan SDM, teknologi dan informasi, kurikulum dan sarana prasarana

SPM	Isu Strategis	Skenario Pencapaian TPB	
		Arah Kebijakan	Indikasi Program
	(SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	sosial	
	Tidak adanya data rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatkan kerja sama dengan filantropi untuk pembiayaan pendidikan	Peningkatan kualitas pelaksanaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
	Tidak adanya data Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	1. Meningkatkan sistem informasi Pendidikan 2. Mengembangkan sumber pendanaan pendidikan berbasis masyarakat	1. Pengembangan basis data berbasis teknologi informasi 2. Peningkatan sarana prasarana pendidikan 3. Peningkatan kualitas belajar mengajar.
	Tidak adanya data Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	1. Meningkatkan minat baca dan motivasi penduduk umur 15 – 24 tahun dan umur 15 – 59 tahun 2. Meningkatkan fungsi satuan pendidikan non formal (SPNF) dalam meningkatkan angka melek aksara	1. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder 2. Pelaksanaan monev secara berkala 3. Penyediaan pemenuhan SDM di SPNF 4. Peningkatan Penyediaan sarana prasarana di SPNF
Sosial	Tidak adanya data Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Mengoptimalkan penanganan korban bencana baik alam maupun non alam	Pengembangan sarana dan prasarana kebutuhan pangan
	Tidak adanya data Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan	Pengembangan kependidikan tentang kebencanaan

H. Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

1. Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan Sentra Produksi (KSP) Pertanian

Sesuai dengan SK Gubernur No. 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan kawasan pengembangan peternakan provinsi, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai kawasan pengembangan peternakan sapi, ayam buras, itik. Ini dapat dilihat dalam tabel IV.5.

Tabel IV.5
Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan di Provinsi Sumatera Barat

No	Kawasan/Komoditi Peternakan	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan
1.	Kawasan Sentra Produksi		
	Sapi potong/klaster tri arga	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar, ***Kota Payakumbuh*** dan Kota Padang Panjang	Kecamatan Payakumbuh Timur Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
	Sapi Potong/ simenthal	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar, ***Kota Payakumbuh*** dan Kabupaten Solok	Kecamatan Payakumbuh Barat Kecamatan Payakumbuh Selatan
	Kerbau	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung	
	Unggas	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, ***Kota Payakumbuh***, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat	Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina)
	Ayam Buras	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, ***Kota Payakumbuh***, Kota Padang, Kota Sawahlunto	Kecamatan Payakumbuh Barat Kecamatan Payakumbuh Selatan
	Itik	Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, ***Kota Payakumbuh***, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kabupaten Solok	Kecamatan Payakumbuh Barat Kecamatan Payakumbuh Timur
2.	Kawasan Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan		
	Sapi, Sawit dan Kakao	Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Pesisir Selatan	
	Sapi dan Kakao	Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok	

Sumber : SK Gubernur No. 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016

Pengembangan Unggas yang menonjol terdapat pada 2 kecamatan di kota Payakumbuh yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Namun demikian peternakan unggas dalam skala kecil dengan populasi di bawah 5.000 ekor masih dibudidayakan pada 3 kecamatan lain yaitu itik di kecamatan Payakumbuh Timur dan Selatan, ayam dan puyuh di kecamatan Payakumbuh Barat.

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan

Sesuai dengan SK Gubernur No. 521-849-2019 tanggal 13 November 2019 tentang penetapan kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan provinsi, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan untuk komoditas tanaman hias sebagaimana yang tercantum dalam tabel IV.6

Tabel IV.6
Kawasan Pertanian Holtikultura di Provinsi Sumatera Barat

No	Komoditi/ Produk	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
1	Tanaman Jeruk	Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh kota , Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Komoditi/ Produk	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
2	Tanaman Pisang	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kep. Mentawai Kabupaten Dharmasraya, Kota Pariaman	
3	Tanaman Manggis	Kota Padang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh kota , Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan	
4	Tanaman Durian	Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Solok	
5	Tanaman Buah Lainnya	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman	
6	Tanaman Aneka Cabai	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh kota , Kabupaten Padang Pariaman	
7	Tanaman Aneka Bawang	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh kota	
8	Tanaman Hias	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Solok	Kawasan Koto Tangah Kawasan Tigo Koto Diateh
9	Tanaman Sayur Lainnya	Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat	

Sumber : SK Gubernur No. 521-849-2019 tanggal 13 November 2019

Kawasan Agribisnis

Tabel IV.7
Kawasan Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sumatera Barat

No	Komoditi/ Produk	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
1	Daging	Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh kota , Kabupaten Agam, ***Kota Payakumbuh***	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan
2	Sayuran Dataran Tinggi	Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar	
3	Kakao	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, ***Kota Payakumbuh,*** Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman	Kelurahan kapalo koto Ampangan kec. Payakumbuh Selatan

Sumber : RTRW Kota Payakumbuh, 2010-2030

Kawasan dan Sentra Industri

Tabel IV.8
Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat

No	Sentra Industri	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
1 .	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kota Bukittinggi, ***Kota Payakumbuh***, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kota Padang Panjang, Kab. Pasaman Barat	Kelurahan Balai Panjang kecamatan Payakumbuh Selatan Tenun Balai Panjang) Kelurahan koto kociak kubu tapak rajo (lilit songkok)
2.	Industri Makanan Ringan	Kota Padang, Kota Bukittinggi, ***Kota Payakumbuh***, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sijunjung	Kelurahan Payolansek, Padang tinggi, padang Tangah, Sungai Durian
3.	Industri Pengolahan Kakao	Kab. Padang Pariaman, ***Kota Payakumbuh***, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang	Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan
4.	Industri Semen dan Turunannya	Kota Solok, Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, ***Kota Payakumbuh***, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang	
5.	Industri Alsintan	Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, ***Kota Payakumbuh***, Kota Padang, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya Kabuapten Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Kepulauan Mentawai	Kelurahan Tanah mati, kecamatan Payakumbuh Barat
6.	Industri Minyak Atsiri dan Turunannya	Kota Solok, Kab. Agam, Kab. Mentawai, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kota Padang	
7.	Industri Kulit dan Alas Kaki	Kota Padang Panjang, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar	
8.	Industri Pengolahan Gambir	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Psisir Selatan, Kab. Agam	
9.	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota	
10.	Industri Maritim	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang.	

Sumber : RTRW Kota Payakumbuh, 2010-2030

Kawasan Pariwisata

Tabel IV.9
Wilayah Pengembangan Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat

No	Wilayah Pengembangan	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
1	Wilayah I Padang dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: a. KUPP Kota Padang (Kawasan Wisata Terpadu Kota Padang) b. KSPP Kab. Pesisir Selatan (Kawasan Wisata Mandeh). 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kab. Padang Pariaman (Kawasan Wisata Pantai Tiram) b. KPPP Kota Pariaman (Kawasan Pantai Gondariah, Pulau Angso Duo)	
2	Wilayah II Bukittinggi dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: KUPP Bukittinggi (kawasan Jam Gadang Pasar Atas, Bukittinggi sebagai Kota Pusaka dan Geopark) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kab. Agam, (Kawasan Maninjau) b. KSPP Kab. Lima Puluh Kota, (Kawasan Harau) c. KPPP Kab. Pasaman, (Kawasan Equator) d. KPPP Kab. Pasaman Barat (Kawasan Pulau Panjang) *e.* ***KPPP Kota Payakumbuh (Kawasan Ngalau Indah)***	Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan
3	Wilayah III Tanah Datar dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: KUPP Kab. Tanah Datar, (Istano Basa Pagaruyuang sebagai Kawasan Wisata Budaya) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Kota Padang Panjang, (Bukit Tui sebagai Kawasan Berkuda) b. KSPP Kab. Solok, (Wisata Danau Singkarak dan Danau Kembar) c. KPPP Kota Solok (Kawasan Wisata Pulau Belibis) d. KPPP Kab. Solok Selatan (Kawasan Wisata Budaya 1000 Rumah Gadang)	
4	Wilayah IV Sawahlunto dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan : KUPP Sawahlunto (Wisata Tambang di Kawasan Wisata Kota Tua) 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan berikutnya, sebagai berikut: a. KSPP Kab. Sijunjung (Kawasan Silokek) b. KSPP Dharmasraya (Kawasan Wisata Sejarah Candi Padang Roco)	
5	Wilayah V Kepulauan Mentawai dan sekitarnya	1. Kawasan yang dikembangkan: KUPP Dusun Jati dan Dusun Mapadegat, 2. Kawasan strategis dan potensial yang akan	

No	Wilayah Pengembangan	Lokasi Kawasan	
		Kab/Kota	Kecamatan/ Kelurahan
		dikembangkan sebagai berikut: a. KSPP Teluk Katurai, b. KSPP Katiet, c. KSPP Tua Pejat, d. KPPP Desa Silabu	

Sumber : RTRW Kota Payakumbuh, 2010-2030

Keterangan:

KUPP = Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata
KSPP = Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata
KPPP = Kawasan Potensial Pengembangan Pariwisata

4.2.2 Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 5 tahun, dimana identifikasi dan klasifikasi isu–isu didasarkan kepada asumsi pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, luas dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan dengan memperhatikan pada tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Perumusan isu strategis yang berangkat dari permasalahan pembangunan daerah, akan menjadi dasar yang tepat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang strategis. Adapun isu-isu strategis tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan Kota Payakumbuh sebagai Kota Pendidikan, maka peningkatan kualitas baik dari sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, siswa maupun lulusan, menjadi sebuah keharusan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Payakumbuh telah memenuhi target pencapaian. Masalah yang perlu ditanggulangi adalah terkait dengan ketersediaan dan pemerataan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas. Kekurangan tenaga pendidik ini terutama untuk guru bidang studi tertentu serta guru kelas untuk tingkat sekolah dasar.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengakomodir perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah dengan muatan agama dan karakter. Fenomena yang terjadi adalah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak kesekolah swasta dengan muatan agama dan karakter. Sementara muatan pendidikan agama dan karakter di pendidikan dasar negeri dirasakan masih rendah. Ditambah lagi dengan banyaknya siswa yang berasal dari luar Kota Payakumbuh, di satu sisi ini menjadi sebuah alasan yang menguatkan bahwa pendidikan di Kota Payakumbuh lebih baik dibandingkan daerah sekitar. Kondisi ini perlu diatasi dengan pembenahan tata kelola sekolah dan pemerataan kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang diterima di setiap sekolah. Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada peningkatan proses belajar dan mutu lulusan. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia ke depan.

Hal lain yang juga harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah adalah upaya fasilitasi terhadap perkembangan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Payakumbuh. Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi

masyarakat Payakumbuh *(multiplier effect)* baik dari segi peningkatan kualitas manusia, peningkatan taraf ekonomi dan sosial budaya.

Kemudian proses penyelenggaran pendidikan sejak bulan maret 2019 tidak bisa terlaksana seperti biasa dalam kondisi normal karena pandemi covid-19. Siswa belajar dari rumah dengan sistem online, akan tetapi tidak bisa berjalan optimal karena keterbatasan jaringan dan alat komunukasi serta tenaga pendidik yang belum siap memberikan bahan ajar melalui media online. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi sangat mempengaruhi pelaksanaan dunia pendidikan karena terjadi perubahan mendasar dalam proses pendidikan, jadi diperlunkan peningkatan kapasistas guru dan tenaga pendidikan, percepatan digitalisasi pendidikan dan kesiapan adaptasi kebiasaan baru di fasilitas pendidikan.

Isu Optimalisasi kualitas pendidikan ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Propinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang juga merupakan jawaban atas isu Nasional berupa pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Terkait peran pemuda dan olah raga dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik sudah tidak diragukan lagi. Selain bermanfaat jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter bangsa. Olahraga mampu melahirkan kebiasaan yang baik seperti jujur, disiplin, sportif, tanggungjawab dan kerjasama. Walaupun bidang olah raga memiliki alat ukur yang jelas dalam pencapaian prestasi dan keberhasilannya, namun tak bisa dipungkiri pembangunan olah raga di Kota Payakumbuh masih menemui hambatan dan keterbatasan. Persoalan pembinaan terhadap bibit–bibit atlet berprestasi yang masih belum terarah seperti; sistem rekruitmen calon atlet, pembibitan, pembinaan pada cabang olah raga, sampai pada peningkatan prestasi.

2. Belum optimalnya Kualitas dan layanan Kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan merupakan salah satu layanan yang wajib disediakan oleh pemerintah melalui : (a) penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang optimal (Puskesmas dan Rumah Sakit), (b) tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas, dan (c) ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan, sehingga kualitas dan derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Karena dari tubuh yang sehat, memungkinkan manusia untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai modal dasar pembangunan. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dengan menciptakan lingkungan sehat dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Pada pemenuhan layanan dasar urusan kesehatan, Kota Payakumbuh memiliki 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Kapasitas tampung rumah sakit diidentifikasi belum seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mencakup penduduk Kota Payakumbuh sendiri dan sebagian penduduk dari Kabupaten Limapuluh Kota. Kapasitas tampung juga terkait dengan jumlah dan kualitas tenaga medis yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemenuhan pelayanan kesehatan sedikit terganggu dengan adanya pandemi covid-19, layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta sempat terhenti karena

adanya beberapa pegawai rumah sakit dan tenaga kesehatan yang terpapar covid-19, untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Klinik swasta atau tempat praktek pribadi beberapa dokter ditutup untuk mencegah penyebaran covid-19. Hal ini menyebabkan layanan kesehatan yang diterima masyarakat menjadi tidak optimal.

Selain itu juga teridentifikasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Hal ini merupakan catatan tersendiri bagi peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Peran tenaga medis diharapkan makin meningkat dalam hal pencegahan timbulnya penyakit melalui upaya edukatif terhadap masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

Kondisi-kondisi tersebut tentu menjadi penghambat terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kota Payakumbuh. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat perlu untuk dikedepankan mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan modal utama pembangunan.

Isu Optimalisasi kualitas dan layanan kesehatan masyarakat ini juga sejalan dengan isu yang ada di tingkat Propinsi Sumatera Barat terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang juga merupakan jawaban atas isu nasional berupa peningkatan akses pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas di semua lini pelayanan kesehatan. Sejalan dengan isu propinsi Sumatera Barat terkait pengembangan Kualitas SDM dari sektor kesehatan, permasalahan yang mendapatkan perhatian meliputi peningkatan angka harapan hidup, angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi dibanding rata-rata nasional. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat dari sektor hulu akan memperkuat capaian kualitas SDM di tingkat Propinsi Sumatera Barat.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak serta Kesetaraan Gender

Isu perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender di Kota Payakumbuh masih perlu menjadi perhatian. Berdasarkan data yang ada, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan dibandingkan dengan daerah lain.

Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender juga merupakan isu nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Terlebih lagi dengan adanya pandemic covid-19 timbul permasalahan baru dalam pemenuhan hak anak serta kesetaraan gender. Dalam masa pandemi ini anak-anak harus dirumah saja untuk menghindari terpapar covid-19, hal ini berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak karena ruang gerak yang terbatas sehingga anak-anak tidak bebas untuk menyalurkan potensinya. Keterbatasan dalam beraktifitas berdampak kepada aktifitas ekonomi yang terganggu, berkurangnya pendapatan rumah tangga sedangakn pengeluaran rumah tangga tidak bisa dikurangi yang menyebabkan permasalahan di dalam keluarga terkadang memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Peningkatan kualitas perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesetaraan Gender harus terus diupayakan dan dijaga agar tetap berkelanjutan. Di samping itu peningkatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak harus terus diupayakan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah ke depan.

4. Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Yang Masih Relatif Tinggi

Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tinggi seharusnya dapat menekan angka pengangguran di Kota Payakumbuh. Namun, pada kenyataannya angka pengangguran masih tinggi seiring dengan masih tingginya angka kemiskinan.

Hal ini menunjukkan rendahnya elastisitas perekonomian terhadap angka pengangguran dan kemiskinan. Pada persoalan ini, bisa saja ketersediaan tenaga kerja di Kota Payakumbuh tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja yang ada serta rendahnya keterampilan penduduk usia kerja di Kota Payakumbuh. Rendahnya penciptaan lapangan kerja bidang jasa dan lapangan kerja berbasis produk lokal sehingga belum mampu menampung tenaga kerja yang ada. Untuk itu, isu ini perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah ke depannya.

Pandemi covid-19 berperan serta, menambah jumlah pengangguran dimana pada masa ini tenaga kerja yang bekerja pada sektor non formal seperti pedagang, penyedia jasa penyelenggaraan pernikahan *(wedding organizer)*, penyedia jasa fotografi akan banyak kehilangan pelanggan. Omset pedagang menurun karena sepinya pembeli, penyedia jasa penyelenggaraan pernikahan *(wedding organizer)* dan penyedia jasa fotografi tutup sementara karena penyelenggaran pernikahan dan membuat keramaian dengan melibatkan banyak orang dilarang demi mencegah penyebaran covid-19. Secara otomatis hal ini berdampak kepada menurunnya pendapatan masyarakat dan bahkan menimbulkan pengangguran baru.

Secara Nasional isu ini juga muncul dan bersesuaian, sebagaimana tertuang pada RPJMN tahun 2020-2024 bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi belum mampu mengatasi tantangan demografis pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penganggur.

Selain itu PMKS menjadi isu tersendiri yang perlu menjadi perhatian. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Penurunan angka pengangguran juga diarahkan dalam upaya penyelesaian isu nasional terkait mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif. Sektor pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana menjadi Isu Nasional juga belum tereksplorasi dengan matang di daerah, termasuk Kota Payakumbuh.

5. Belum Terintegrasinya Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih diukur dari pertumbuhan nilai PDRB setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh tercatat sebesar 5,92 persen mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Jika potensi sektor unggulan tidak dipetakan secara tepat maka pertumbuhan ekonomi akan sulit ditingkatkan. Pada kenyataannya masih banyak sumber daya alam yang belum tergarap dan potensi sumber daya lokal yang belum termanfaatkan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan aparatur dalam pemanfaatan sumber daya yang ada serta belum terintegrasinya pengembangan masing-masing sektor tersebut.

Jika dilihat dari sektor pembentuk PDRB, sektor perdagangan, industri, pertanian dan pariwisata adalah sektor pengungkit perekonomian Kota Payakumbuh yang masih belum optimal dikembangkan. Rendahnya daya saing produk, lemahnya pemasaran, kurangnya inovasi dan permodalan adalah fenomena yang hampir ditemukan pada pengembangan setiap sektor unggulan. Perlu terobosan baru untuk menggerakkan keempat sektor di atas secara terintegrasi sehingga dapat mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam lima tahun periode RPJMD sektor strategis ini harus dikelola secara terintegrasi melalui pendekatan *cluster* industri dengan memperkuat pasokan bahan baku hasil pertanian dihilir seperti padi, bawang, cabe, mendorong peningkatan produksi sub sektor perkebunan melalui produksi perkebunan unggulan kakao, dan pada sub sektor peternakan dapat dijadikan fokus utama dengan pengembangan peternakan sapi yang berskala cukup besar. Peternakan sapi mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan karena bebera sarana dan prasarana pendukung sudah ada seperti keberadaan Balai Benih Ternak Unggul (BBTU) di Padang Mangateh, didukung juga dengan adanya Rumah Potong Hewan Modern di Payobasung serta diperkuat dengan adanya Jurusan Peternakan Universitas Andalas (UNAND) yang berada di Kota Payakumbuh sebagai pencetak sumber daya yang unggul di bidang peternakan. Dengan terjaminya bahan baku maka dapat memperkuat kapasitas sproduksi industri pengolahan makanan seperti rendang, dan makanan ringan serta olahan kuliner lainnya. Pembangunan *city branding* Kota Payakumbuh sebagai produsen rendang terbesar di dunia dapat dilakukan dengan terjaminnya bahan baku daging dan penerapan teknologi dalam proses produksi. Hal ini semakin diperkuat dengan rencana pembukaan program studi kuliner rendang oleh Universitas Negeri Padang di Kota Payakumbuh.

Seiring dengan penguatan di sektor hulu (bahan baku dan industri) perlu dilakukan juga penguatan pada sektor hilir yaitu adanya usaha untuk perluasan pangsa pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dapat disinergikan dengan penguatan pada sektor wisata dengan strategi menjadikan Kota Payakumbuh menjadi destinasi wisata kuliner dan wisata event berskala lokal, nasional bahkan internasional. Kondisi saat ini wisatawan di siang hari hanya melewati kota Payakumbuh, malam hari untuk menikmati kuliner malam, sedangkan menginap di Bukittinggi atau Batusangkar. Tidak tersedianya hotel yang representatif sebagai sarana pendukung pariwisata menjadikan Kota Payakumbuh belum masuk dalam kalender biro perjalanan wisata di Sumatera Barat, hanya menjadi persinggahan untuk kuliner malam saja.

Kondisi perekonomian global, dan nasional berdampak sampai ke Kota Payakumbuh, berdasarkan proyeksi pemerintah provinsi, diasumsikan pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020 ini adalah 1,18 % sementara pada tahun 2019 adalah 5,92%. Hal ini menyebabkan terkontraksinya lapangan usaha ekonomi yang akan berpengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Kondisi ini membutuhkan analisis bersama untuk menghadirkan pola baru dalam kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kontraksi pada lapangan usaha ekonomi tersebut

Faktor penghambat yang paling mendasar dalam meningkatkan produktivitas sektor unggulan ini adalah pendampingan pengembangan usaha oleh pihak terkait yang belum terintegrasi. Agar dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada dibutuhkan upaya yang terintegrasi oleh semua pemangku kepentingan, pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat. Pengembangan sektor unggulan harus dilaksanakan secara terpadu dan tidak sektoral untuk dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan.

6. Masih Rendahnya Iklim Usaha dan Investasi

Permasalahan mendasar terkait rendahnya iklim usaha dan investasi antara lain masih rendahnya kualitas dan daya saing IKM dan UMKM; struktur pelaku usaha masih didominasi usaha mikro yang informal dengan produktivitas terbatas; minimnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi peluang investasi yang terbatas; belum tersedianya informasi kelayakan usaha unggulan bagi calon investor; terbatasnya kepastian hukum dan pendukung usaha terutama tentang pajak dan tanah; belum efektifnya pemberian insentif; belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi. Kondisi ini memerlukan perhatian pemerintah kedepannya dalam hal mengoptimalkan penguatan kelembagaan ekonomi yaitu koperasi, IKM, dan UMKM melalui pendampingan dan pembinaan yang intensif.

Isu terkait pengembangan sektor unggulan daerah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dalam penguatan kelembagaan ekonomi di daerah juga sejalan dengan isu Nasional bahwa populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%) dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Salah satu soko guru untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Payakumbuh adalah melalui koperasi, namun bersamaan dengan persoalan nasional bahwa Koperasi-koperasi juga masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.

Secara umum pelayanan perizinan di Kota Payakumbuh melalui pelayanan satu pintu sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan reputasinya dua kali mendapat anugerah *investment award* tingkat nasional. Akan tetapi pelayan yang perizinan yang baik belum mampu menarik minat investor terutama yang berskala besar untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh.

7. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Pemenuhan Infrastruktur

Pada dasarnya kondisi infrastruktur dasar di Kota Payakumbuh sudah memadai. Namun, kondisi yang sudah ada perlu terus dijaga dan dioptimalkan sesuai dengan SPM Perkotaan yang lengkap. Pemenuhan infrastruktur dasar ditekankan pada terpenuhinya cakupan pelayanan air minum, jalan status kota dalam kondisi sedang dan mantap, drainase kota yang mampu mencegah timbulnya genangan air, dan infrastruktur penunjang pertanian berupa irigasi primer yang berkinerja baik.

Ketersediaan air baku di Kota Payakumbuh saat ini masih bergantung pada sumber air dari Kabupaten Limapuluh Kota. Permasalahan ini menimbulkan dampak kurangnya pelayanan PDAM Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan MoU dengan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pengembangan SPAM Regional yang di fasilitasi Oleh Provinsi melalui Biro Kerjasama Rantau.

Kota Payakumbuh merupakan satu dari tujuh kabupaten/kota yang termasuk koridor pertumbuhan RPJMN 2020-2024. Hal ini antara lain melalui rencana pembangunan Jalan Trans Sumatera Koridor Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi. Dalam rencana pembanguna jalan tol tersebut Kota Payakumbuh tidak dilalui secara langsung oleh trase Jalan Tol, namun Pemerintah Kota Payakumbuh berharap adanya *entry* dan *exit point* (gerbang tol) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Payakumbuh.

Terkait dengan fungsi drainase kota, diidentifikasi luas lokasi genangan air setelah hujan meningkat setiap tahunnya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu

diidentifikasi lebih lanjut. Kondisi-kondisi ini memerlukan penanganan yang serius pada pembangunan ke depan.

Menyangkut dengan kelengkapan fasilitas umum yang harus ada dalam sebuah kota, Kota Payakumbuh perlu melengkapi tersebut seperti luas RTH minimal disebuah kota adalah 30% dari luas wilayah perkotaan. Proporsi 30% merupakan ukuran minima untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal di wilayah perkotaan.

Berkaitan dangan masjid sebagai fasilitas umum peribadatan yang berskala kota perlu diwujudkan di Kota Payakumbuh. Masjid terbagi menjadi beberapa kelas atau strata. Kelas atau strata masjid ini ditentukan berdasarkan fungsi masjid, fasilitas masjid dan fungsi sosial yang diamanahkan dalam ketetapan Dewan Mesjid Indonesia. Untuk sebuah kota ditetapkan statusnya sebagai mesjid agung yang berperan sebagai suatu institusi yang sangat penting untuk membina masyarakat muslim juga sebagai tempat ibadah dan pusat kebudayaan Islam, tempat pendidikan dan pusat urusan keagamaan masyarakat.

Fasilitas umum lainnya adalah berupa Stadion. Stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk acara olahraga, dimana di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton. Bangunan stadion olahraga merupakan jenis bangunan teater besar untuk mempertunjukan berbagai macam pertandingan di dalamnya.

Beberapa pertandingan olahraga yang dapat digelar di stadion antaranya olah raga basket, voly, badminton, bola kaki dan lain-lain. Umumnya stadion memiliki tempat duduk penonton yang disebut tribun. Sebagai sebuah kota menengah sudah selayaknya ada di Kota Payakumbuh yang akan meningkatkan prestasi olah raga Kota Payakumbuh.

8. Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Lingkungan yang terjaga dari pencemaran akan meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kualitas lingkungan di Kota Payakumbuh mengalami penurunan, diantaranya pengelolaan limbah domestik, bengkel dan pasar yang belum optimal. Dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan keberadaan regulasi yang jelas juga sangat diperlukan.

Kondisinya saat ini ketersediaan regulasi terkait pengelolaan lingkungan belum optimal, salah satunya regulasi pemanfaatan air tanah. Akibatnya pelanggaran terkait kelestarian lingkungan pun masih cenderung tinggi diantaranya pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam dan pelanggaran aturan pengelolaan limbah berbahaya beracun yang masih tinggi. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan juga relatif rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat juga belum memahami pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan prinsip 3R *(reuse, reduce, recycle)*. Disamping itu, TPA regional yang berada di Kota Payakumbuh perlu mejadi perhatian khusus dari pemerintah, karena dengan proses pengolahan *sanitary landfill*, keterbatasan lahan dan peningkatan timbulan sampah yang seimbang dengan pertambahan penduduk, maka perlu adanya manajemen pengolahan sampah, baik dalam proses sosialisasi konsep 3R, atau melalui pemanfaatan sampah menjadi sumber energi terbarukan. Disamping itu Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan

sampah yang layak perlu ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada dan keterbatasan daya tampung lahan yang ada, maka jika tidak ada penataan perumahan dan kawasan permukiman yang komprehensif dapat dipastikan kawasan kumuh akan semakin meningkat di masa mendatang. Perbaikan kawasan kumuh dapat dilakukan secara swadaya dengan memanfatkan modal sosial di daerah. Selain itu untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman terkait pembangunan bidang air minum dan sanitasi perlu juga untuk diperhatikan.

Belum optimalnya kenyamanan kota sebagai tempat tinggal, dan wadah aktifitas manusianya, juga dipengaruhi oleh pemanfatan ruang. Dimana proses penataan ruang dalam prakteknya harus disesuaikan dengan rencana tata ruang (RTRW), pada kenyataannya masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB, dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Upaya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% dilakukan dengan membangun taman kota, jalur hijau, permakaman, dan inisiasi rasionalisasi sempadan sungai. Kondisi ini, perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat, dimana 10% dari kebutuhan RTH tersebut dipenuhi oleh pribadi. Ruang kota yang nyaman juga dapat muncul dari kesiapsiagaan terhadap rawan bencana alam maupun bencana kebakaran.

9. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri dari tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah, yaitu mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam prosesnya transaparansi pada proses ini akan meningkatkan kepuasan masayarakat. Pengoptimalan *E-Government* melalui *E-Budgeting* dan *E-Planning* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi ini dilakukan dengan mekanisme perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tetapi proses penyaringan aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan pembangunan dilaksanakan dari tingkat RT. RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Diharapkan dengan inovasi pada proses perencanaan pembangunan daerah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

Reformasi kedua terkait dengan sumber daya aparatur daerah, dimana profesionalisme aparatur daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai pada isu strategis ini, profesionalisme dipahami sebagai proses rekrutmen dan penempatan pegawai disesuaikan dengan bidang keahlian, disamping penilaian kepegawaian dilakukan berdasarkan kinerja. Hal lain yang patut untuk dipertimbangkan adalah berkaitan dengan penempatan aparatur dengan membuat sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. Disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Reformasi pelayanan publik, yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan

daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu terbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi pemerintahan adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan inovatif serta dapat memuaskan masyarakat. Komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menegakkan integritas untuk merealisasikan pelayanan publik yang ideal, dibutuhkan kerjasama yang sangat terorganisasi dan efektif antar komponen di dalam jajaran Pemerintah Kota, termasuk hubungan pemerintah kota dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 2014. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

10. Menurunnya Nilai-Nilai Karakter dan Adat dalam Tata Kehidupan Bermasyarakat

Permasalahan sosial yang muncul ditengah masyarakat adalah menurunnya nilai-nilai karakter pada masyarakat terutama remaja dan anak-anak. Karakter masyarakat Payakumbuh sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau mengedepankan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah". Hal ini menunjukkan bahwa adat budaya dan agama merupakan dua panduan dalam hidup dan menjadi karakter masyarakat Minangkabau.

Faktanya penerapan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah semakin lama mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari makin tingginya tingkat perceraian dan kenakalan remaja, implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mengalami degradasi, jumlah pengguna narkoba meningkat, penderita HIV/AIDS dan jumlah penduduk LGBT meningkat. Pengamalan agama ditengah masyarakat masih kurang dan pelestarian adat masih belum maksimal. Peranan pemerintah bekerjasama dengan ninik mamak dan lembaga adat dan agama yang ada diharapkan lebih optimal ke depannya. Disamping itu, seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi memudahkan masuknya pengaruh budaya asing. Kurangnya peran Lembaga Agama dan Adat dalam menyaring pengaruh budaya asing tersebut mengakibatkan menurunnya nilai-nilai karakter di tengah masyarakat.

Keselarasan isu strategis antara RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh, bertujuan untuk percepatan pembangunan melalui sinergisitas isu strategis yang dapat ditelaah dalam penyusunan arah kebijakan daerah nantinya untuk dapat diimplementasikan pada rencana pembangunan jangka menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Isu strategis yang dirumuskan dalam Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 juga dilahirkan dari isu-isu yang berkembang di tingkat nasional dan propinsi sehingga dapat diterjemahkan selaras dengan isu strategis yang ada di Kota Payakumbuh, namun terkait dengan isu Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Kemaritiman di tingkat propinsi serta isu pembangunan perekonomian berbasis kelautan di tingkat nasional tidak dapat diselaraskan mengingat letak geografis Payakumbuh tidak berada daerah pesisir. Secara lebih detil dapat dilihat pada Tabel IV-10.

Tabel IV-10
Persandingan keselarasan Isu Strategis antara RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kota Payakumbuh

RPJMN	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	RPJMD Kota Payakumbuh
• Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	• Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia	• Belum optimalnya Kualitas dan layanan Kesehatan masyarakat
• Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas • Peningkatan kualitas pembelajaran • Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan • Peningkatan budaya dan prestasi olahraga		• Belum optimalnya Kualitas Pendidikan
• Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan • Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal		• Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak serta Kesetaraan Gender
• Tingkat pertumbuhan ekonomi belum mampu mengatasi tantangan demografis pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penganggur • Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lanjut usia	• Pengurangan Tingkat Kemiskinandan Ketimpangan Pembangunan AntarDaerah • Pengurangan Pengangguran	• Tingkat Pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi
• Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif • Proses perijinan masih belum efisien • Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas • Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan • Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%), dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah • Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.	• Penguatan Struktur Ekonomi Daerah • Peningkatan Ketahanan Pangan • Globalisasi dan Peningkatan Daya SaingDaerah • Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi	• Belum Terintegrasinya Pengembangan Sektor Unggulan Daerah sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi • Masih rendahnya Iklim usaha dan investasi
• Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI • Kebutuhan infrastruktur perumahaan dan permukiman	• Penanganan Bencana Alam • Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	• Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
• Masih belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) di kota dan kawasan perkotaan, sehingga menjadi kurang layak huni.	• Peningkatan Infrastruktur	• Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas Pemenuhan infrastruktur
• Keterbukaan informasi, komunikasi publik, dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik. • Meingkatkan dukungan iptek untuk penyiapan masyarakat indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern	• Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	• Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi
• Penguatan karakter dan jati diri bangsa • Pengembangan sumber daya kebudayaan • Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	• Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Agama	• Menurunnya Nilai-Nilai Karakter dan Adat dalam Tata Kehidupan Bermasyarakat

RPJMN	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	RPJMD Kota Payakumbuh
• Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan	• Pemanfaatan Potensi Kelautan danKemaritiman	-

BAB 5
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN



5.1. VISI

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan, guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, adalah rencana pelaksanaan tahap ketiga (2016-2020) dan keempat (2021-2025) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun 2025 adalah

"Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah".

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Payakumbuh telah menetapkan pula 6 misi utama pembangunan daerah, meliputi : 1) Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*; 2) Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif; 3) Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial; 4) Mewujudkan sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global; 5) Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik; 6) Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Payakumbuh pada Tahap ke-3 tahun 2016-2020 dan Tahap ke-4 tahun 2021-2025, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada **peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).**

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia;
2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan daerah fokus pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, meningkatnya akuntabilitas kinerja Birokrasi, optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, mewujudkan penerapan *e-Government* dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur yang bebas KKN, mewujudkan supremasi hukum sesuai kewenangan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan terbangunnya sistem pengelolaan tanah ulayat yang mempunyai kepastian hukum;

3. Bidang ekonomi dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana untuk kawasan industri, memfasilitasi terwujudnya agribisnis maju dan efisien, pengembangan usaha wisata dan terbangunnya beberapa lokasi pusat kegiatan sektor ekonomi;
4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus pada pengembangan sistem jaringan jalan untuk kelancaran lalu lintas, penyediaan prasarana tenaga listrik ke seluruh wilayah kota, penyediaan air bersih bagi penduduk kota, mewujudkan sistem drainase yang representatif, menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi yang cukup bagi warga kota;
5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus mewujudkan penataan ruang yang serasi, efektif dan efisien, terpeliharanya kawasan konservasi alam dan jalur hijau dan mewujudkan masyarakat sadar lingkungan.

Pada RPJPD Kota Payakumbuh Tahap ke-3 tahun 2016-2020, penekanan pembangunan diarahkan pada **melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pada tahap kedua dengan fokus pada peningkatan capaian sasaran masing-masing bidang.**

Guna mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 untuk tahun 2017-2019 telah disinkronkan dengan RPJMN Tahun 2014-2019 dan dijabarkan dalam RPJMD awal. Sedangkan untuk tahun 2020-2022 disinkronkan dengan RPJMN Tahun 2020-2021. Sehubungan dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta arahan utama yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun gambaran ringkas visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional adalah sebagi berikut; Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Meskipun terjadi perubahan dalam visi misi presiden, namun hal itu tidak merubah visi dan misi pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 yaitu :

"Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang"

PAYAKUMBUH Meliputi Payakumbuh dengan segala kesatuannya: kesatuan demografis, kesatuan geografis dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Payakumbuh merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata.

MAJU adalah kondisi dimana pada tahun 2022, Payakumbuh menjadi lebih baik dengan kualitas hidup yang relatif tinggi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan infrastruktur, sarana dan utilitas yang memperhatikan efek keberlanjutan lingkungan.

SEJAHTERA dimaknai sebagai peningkatan standar hidup masyarakat yang sehat, handal, makmur dan merata yang diindikasikan dengan pendapatan perkapita melampaui rata - rata nasional (non migas).

BERMARTABAT diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita.

SEMANGAT KEBERSAMAAN maksudnya adalah menghadirkan kekuatan politik, pemerintahan sosial budaya dan ekonomi dengan sistem ekonomi yang menekankan pada keadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi, proses produksi serta konsumsi di mana kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu. Menggunakan model pertumbuhan tinggi yang independen dengan berbasis produksi secara berkesinambungan untuk mendukung perkembangan UKM yang menjalankan konsep bisnis ***One Village One Product (OVOP)***. Upaya agar UKM dapat eksis dan meningkatkan daya saing produk-produk mereka dalam perdagangan pasar nasional maupun pasar internasional, perlu memiliki jejaring dengan sesama UKM sesuai bidang geraknya dan terus melakukan interaksi positif seperti: berbagi gagasan, dialog terbuka, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, *networking*, toleran dan saling bersinergi untuk mendorong terciptanya produk-produk baru, membuka inovasi, serta mendorong terus pengembangan *skill* untuk peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing. Selanjutnya perwujudan dari ekonomi kerakyatan adalah lahirnya UKM-UKM dan juga koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi di kota Payakumbuh. Penguatan pilar-pilar ini tentu merupakan sebuah keharusan demi tercapainya tujuan dasar dari prinsip ekonomi kerakyatan.

MENUJU PAYAKUMBUH MENANG maksudnya adalah kesiapan Payakumbuh untuk menghadapi globalisasi, berbasis kekuatan lokal, untuk menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain untuk menciptakan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Payakumbuh. Menuju Payakumbuh menang diartikan maju dalam ketersediaan infrastruktur, sejahtera secara ekonomi dan SDM yang bermartabat, dengan berbasis potensi lokal yang mempunyai daya saing dengan semangat kebersamaan.

5.2 MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini, maka misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut: Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*; mewujudkan tatapemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif; mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial; mewujudkan sentra usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia

global; mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik; dan mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih dan hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2017-2022 ditetapkan sejalan dengan RPJPD Kota Payakumbuh tersebut, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif;
2. Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama;
3. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan;
4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih;
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

5.3.1 Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan kompetitif.

Misi mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat dan kompetitif ini dimaksudkan untuk:

- Mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter, memiliki kompetensi dan daya saing melalui pengembangan kualitas pendidikan, pemanfaatan *e-informasi* dan kemampuan iptek yang maju dan tepat guna;
- Meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata;
- Meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat;
- Serta dengan menangani masalah kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial.

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kota Payakumbuh dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan dan indikator tujuan dalam misi ini tidak mengalami perubahan. Untuk sasaran pada misi ini mengalami perubahan dari sebelumnya 5 sasaran menjadi 4 sasaran. Untuk sasaran "meningkatnya kualitas layanan pendidikan" dirubah menjadi "meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing". Salah satu sasaran pada RPJMD awal yaitu "meningkatnya prestasi atlit" tidak lagi menjadi sasaran strategis kota dan indikatornya diturunkan ke perangkat daerah, karena lebih efektif jika sasaran ini diturunkan pada Perangkat Daerah dengan tetap menunjang pada misi 1. Sedangkan untuk indikator sasaran "meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing" mengalami perubahan, dimana indikator pada RPJMD awal yaitu "jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A" tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) kota dan diturunkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) diganti dengan "angka rata-rata lama sekolah" yang sebelumnya berada di IKD. Sasaran dan indikator dari misi 1 sebelum dan sesudah perubahan terlihat pada tabel V.1:

Tabel V.1
Sasaran Misi 1 sebelum dan sesudah perubahan

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Sasaran	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	*Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A*	*1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing*	*Angka rata – rata lama sekolah*
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	- Tingkat Kemiskinan - Tingkat Pengangguran	4. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	- Tingkat Kemiskinan - Tingkat Pengangguran
5. Meningkatnya prestasi atlit	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional	-	-

5.3.2 Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan perekonomian kota Payakumbuh untuk lima tahun periode RPJMD diarahkan pada pembangunan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan. Perekonomian yang tangguh diupayakan dengan membangun kemandirian perekonomian daerah sehingga perekonomian kota Payakumbuh diharapkan tidak mudah goyah dan terpengaruh oleh kondisi ekonomi nasional maupun global. Selanjutnya perekonomian ke depannya juga diharapkan mampu memiliki daya saing dengan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Terwujudnya hal tersebut diharapkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi merata dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat kota Payakumbuh. Oleh sebab itu, salah satu penekanan dalam misi ini adalah upaya pembangunan perekonomian melalui gerakan ekonomi bersama dalam hal ini melalui kelembagaan koperasi yang sudah teruji sebagai suatu kelembagaan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Untuk itu, dalam rangka mencapai misi kedua ini, maka tujuan yang akan dicapai dari misi kedua adalah "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas". Tujuan ini tidak mengalami perubahan, namun pada indikator tujuan terjadi penambahan indikator yaitu "nilai koefisien gini". Perubahan ini dapat dilihat pada tabel V.2 :

Tabel V.2

Tujuan Misi 2 sebelum dan sesudah perubahan

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Tujuan	**Indikator**	**Tujuan**	**Indikator**
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) *2. Nilai Koefisien Gini*

Sasaran misi 2 pada RPJM awal sejumlah 3 sasaran, setelah perubahan menjadi 2 sasaran. Salah satu sasaran pada RPJMD awal misi 2 yaitu "meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi" tidak lagi menjadi sasaran strategis kota dan indikatornya diturunkan ke perangkat daerah, karena lebih efektif jika sasaran ini diturunkan pada Perangkat Daerah dengan tetap menunjang pada misi 2. Sasaran yang akan dicapai sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel V.3:

Tabel V.3

Sasaran Misi 2 sebelum dan sesudah perubahan

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Sasaran	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Meningkatnya produktivitas sektor strategis	- Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB - Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB - Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB - Persentase peningkatan kunjungan wisata	1. Meningkatnya produktivitas sektor strategis	- Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB - Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB - Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB - Persentase peningkatan kunjungan wisata
2. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	- Nilai Realisasi Investasi - Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	2. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	- Nilai Realisasi Investasi - Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM
3. Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	-	-

5.3.3 Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan

Misi ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Disamping itu juga untuk meningkatkan konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sehingga sektor unggulan di Kota Payakumbuh dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan dasar masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka pencapaian misi "meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan", maka tujuan misi ini adalah : "Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan". Tujuan ini tidak mengalami perubahan, namun pada indikator tujuan terjadi penambahan indikator yaitu "indeks kualitas lingkungan". Perubahan ini dapat dilihat pada tabel V.4 :

Tabel V.4

Tujuan Misi 3 sebelum dan sesudah perubahan

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Tujuan	**Indikator**	**Tujuan**	**Indikator**
Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Persentase Pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan Standar pelayanan minimum (SPM)	Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan	1. Persentase Pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan Standar pelayanan minimum (SPM) 2. *Indeks kualitas lingkungan*

Salah satu sasaran pada RPJMD awal misi 3 yaitu "mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak" tidak lagi menjadi sasaran strategis kota dan indikatornya diturunkan ke perangkat daerah, karena lebih efektif jika sasaran ini diturunkan pada Perangkat Daerah dengan tetap menunjang pada misi 3. Sedangkan untuk indikator, salah satu indikator pada sasaran "meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan" yaitu "persentase daerah irigasi berkinerja baik" diturunkan menjadi IKD. Sedangkan indikator pada sasaran "mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak" yang tidak ada lagi pada kondisi setelah perubahan yaitu "persentase luas permukiman kumuh" dijadikan indikator pada sasaran "meningkatnya kualitas lingkungan hidup" dengan posisi tetap menjadi IKU kota. Sasaran yang akan dicapai sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel V.5 :

Tabel V.5

Sasaran Misi 3 sebelum dan sesudah perubahan

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Sasaran	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	- Persentase pelayanan air minum - Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap - Persentase Sistem drainase skala kota - Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang - *Persentase daerah irigasi berkinerja baik* - Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	- Persentase pelayanan air minum - Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap - Persentase Sistem drainase skala kota - Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang - Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - *Persentase luas permukiman kumuh*
3. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak	*Persentase luas permukiman kumuh*	-	-

5.3.4 Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang yang baik dan bersih sehingga dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, aspiratif, partisipatif dan transparan, mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui inovasi dan pengembangan sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat, meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur dan menanamkan nilai-nilai kesadaran berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik.

Tekad untuk menjadikan tata pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi melibatkan segenap elemen masyarakat dan kalangan swasta untuk menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Langkah utama yang diambil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah membangun birokrasi yang kokoh, memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi. Birokrasi sebagai salah satu aktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima.

Dari uraian di atas, maka secara umum tujuan yang akan dicapai dari misi ini sebelum perubahan adalah "Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi", setelah perubahan menjadi "meningkatnya penerapan RB". Indikator tujuan sebelum perubahan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" dirubah menjadi "Indeks RB". Sebelumnya indikator ini merupakan indikator sasaran yang dinaikkan menjadi indikator tujuan. Sedangkan indikator yang lama dan juga merupakan indikator sasaran ditunukan menjadi IKD. Perubahan ini dapat dilihat pada tabel V.6 :

Tabel V.6

Tujuan Misi 4 sebelum dan sesudah perubahan

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Tujuan	**Indikator**	**Tujuan**	**Indikator**
Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	*Meningkatnya penerapan RB*	*Indeks RB*

Sasaran pada misi 4 adalah : "Meningkatkan akuntabilitas layanan pemerintahan". Sasaran ini tidak mengalami perubahan pada Perubahan RPJMD. Namun pada indikator sasaran terjadi perubahan, dimana indikator "persentase PD yang terintegrasi TI" dan "IKM" diturunkan menjadi IKD, sedangkan indikator "Indeks RB" menjadi indikator tujuan. Disamping itu setelah perubahan pada indikator sasaran dimunculkan 2 buah indikator baru yaitu "Indeks SPBE" dan "Indeks Pelayanan Publik", dimana kedua indikator ini belum pernah ada pada RPJMD awal. Semua perubahan sasaran dan indikatornya ini dapat dilihat pada tabel V.7 :

Tabel V.7

Sasaran Misi 4 sebelum dan sesudah perubahan

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Sasaran	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
Meningkatkan akuntabilitas layanan pemerintahan	- Nilai Evaluasi AKIP Kota - Opini BPK - *Persentase PD terintegrasi TI* - *IKM* - *Indeks RB*	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	- Nilai Evaluasi AKIP Kota - Opini BPK - *Indeks SPBE* - *Indeks Pelayanan Publik*

5.3.5 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan adat basandi syara' syara' basandi kitabullah

Pembangunan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan, pembangunan akhlak mulia dan berbudaya memiliki posisi dan peran yang strategis sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan. Akhlak mulia yang berasal dari pengamalan ajaran agama mendorong manusia untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, mendidik manusia agar

berbuat baik dan mencegahnya berbuat buruk. Pengamalan ajaran agama seseorang mampu memahami keberadaan Tuhan dan mengabdi kepada-Nya, bersikap empati kepada sesama. Agama sebagai sistem nilai berfungsi sebagai penyelamatan, pendidikan, bimbingan, pemersatu, pengubah dan pemecahan yang diarahkan pada upaya pembentukan tatanan kehidupan masyarakat yang semakin maju.

Penekanan pada akhlak mulia yang berbudaya juga memiliki maksud peningkatan intensitas perhatian terhadap peningkatan peran dan pemberdayaan kelembagaan budaya dalam membentuk akhlak mulia di masyarakat untuk mewujudkan pembangunan. Langkah untuk memberdayakan dan meningkatkan peran tersebut dilakukan melalui peningkatan akses di segala bidang : ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga diharapkan lembaga budaya di masyarakat dapat terlibat lebih aktif lagi dalam membentuk akhlak mulia dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah "Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis". Untuk indikator tujuan sebelum perubahan adalah "Persentase peningkatan zakat/wakaf yg dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf", setelah perubahan ditambah dengan "Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya". Perubahan ini dapat dilihat pada tabel V.8 :

Tabel V.8

Tujuan Misi 5 sebelum dan sesudah perubahan

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Tujuan	**Indikator**	**Tujuan**	**Indikator**
Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis	Persentase peningkatan zakat /wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis	1. Persentase peningkatan zakat /wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf 2. *Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya*

Salah satu sasaran pada RPJMD awal misi 5 yaitu "menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat" tidak lagi menjadi sasaran strategis kota dan indikatornya diturunkan ke perangkat daerah, karena lebih efektif jika sasaran ini diturunkan pada Perangkat Daerah dengan tetap menunjang pada misi 5. Untuk sasaran "meningkatnya pengamalan ajaran agama" setelah perubahan dirubah menjadi "meningkatnya penerapan ABS SBK dalam perilaku masyarakat". Ini untuk mengakomodir bahasa 2 sasaran sebelum perubahan. Sasaran yang akan dicapai sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel V.9 :

Tabel V.9

Sasaran Misi 5 sebelum dan sesudah perubahan

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Sasaran	**Indikator**	**Sasaran**	**Indikator**
1. *Meningkatnya pengamalan ajaran agama*	- Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karakter berkategori baik - Persentase peningkatan zakat/wakaf yg dikumpul kan melalui lembaga Zakat/ Wakaf	*Meningkatnya penerapan ABS SBK dalam perilaku masyarakat*	- Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karakter berkategori baik - Persentase peningkatan zakat/wakaf yg dikumpul kan melalui lembaga Zakat/ Wakaf - *Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya*
2. Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	- Persentase lembaga keagamaan (MUI) yg aktif - Persentase lembaga adat yang aktif (Kerapatan Adat Nagari / KAN)	-	-

Perubahan terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan penyesuaian terhadap target dapat dilihat pada tabel V.10 dan V.11 :

Tabel V.5

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 Sebelum Perubahan

VISI : PAYAKUMBUH MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN MENUJU PAYAKUMBUH MENANG

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi			Target			Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif	1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,93	1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1.Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A	64	65	70	75	77	80	82	82
				2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2.Angka Usia Harapan Hidup	73,03	73,13	73,33	73,61	73,90	74,30	74,50	74,50
				3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	3.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	NA	61,70	61,99	62,30	61,86	61,92	62,50	62,50
				4. Meningkatnya pena-nggulangan kemiski nan & pengangguran	4.Tingkat Kemiskinan	6,46	5,88	5,77	5,68	5,39	5,12	5,00	5,00
					5.Tingkat Pengangguran	7,07	3,45	3,78	4,11	6,47	6,32	5,80	5,80
				5. Meningkatnya prestasi Atlet	6.Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional.	3	9	14	20	15	18	20	20
2	Membangun Perekonomian Yg Tangguh, Unggul, Ber-daya Saing & Berkeadilan Dengan Berba -sis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama	2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5%	6. Meningkatnya Produktivitas Sektor Strategis	7.Kontribusi sektor Perda-gangan terhadap PDRB	23,92	24,48	25,15	25,13	24,07	24,12	24,17	24,17
					8.Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	5,64	5,67	5,35	5,60	6,08	6,11	6,12	6,12
					9.Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	7,39	7,04	6,75	6,35	7,45	7,46	7,47	7,47
					10.Persentase peningka-tan kunjungan wisata	27,74	10,8	11,28	5,11	5,50	6,70	7,50	7,50
				7. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	11.Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	175,70	229,3	231,5	250,6	198,90	200,9	202,00	1.188,70
					12.Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	26,64	27,14	15,27	15,49	28,66	29,18	29,70	29,70
				8. Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi	13.Persentase Peningkatan SHU Koperasi	6,25	2,18	3,77	9,01	14,25	16,40	18,30	18,30
3	Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan	3. Meningkatkan keberlanjutan pembanguna n yang	Persentase Pemenuhan sarana prasarana	9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	14.Persentase pelayanan air minum	94,21	95,46	96,73	97,84	99,02	99,67	100	100
					15.Persentase panjang jalan status Kota dalam	63,81	67,22	69,21	72,25	74,81	77,56	80,31	80,31

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi			Target			Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan	berwawasan lingkungan	sesuai dengan Standar pelayanan minimum (SPM) 100%	perkotaan	kondisi mantap								
					16.Persentase Sistem drainase skala kota	39,88	47,44	51,74	58,95	47,39	48,91	50,44	50,44
					17.Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	78,30	78,60	78,90	79,23	79,50	79,80	80,10	80,10
					18.Persentase daerah irigasi berkinerja baik	70,52	76,77	77,96	80,60	81,72	84,21	86,58	86,58
					19.Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	66,66	66,67	66,67	66,98	88,89	94,44	94,44	94,44
				10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	20.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,23	56,50	58,96	59,66	57,50	57,75	58,00	58,00
				11. Mewujudkan Perumahan dan pemukiman yang layak	21.Persentase luas permukiman kumuh	1,77	2,59	1,88	1,64	1,47	1,32	1,17	1,17
4	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	4. Meningkatnya profesionalisme birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81.85	12. Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	22.Nilai Evaluasi AKIP Kota	B	BB	BB	BB	A	A	A	A
					23.Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					24.Persentase PD terintegrasi TI	0,00	9,68	29,03	45,16	64,52	100	100	100
					25.IKM	78,39	79,35	80,90	81,66	80,75	81,35	81,85	81,85
					26.Indeks RB	NA	56,83	67,41	71,66	60,00	65,00	70,00	70,00
5	Mewujudkan Masyarakat Yg Berakhlak Mulia & Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis	Persentase peningkatan zakat/wakaf yg dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf 5%.	13. Meningkatnya pengamalan ajaran agama	27.Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karakter berkategori baik	5,31	13,83	22	47,62	36,17	43,62	51,06	51,06
					28.Persentase peningkatan zakat/wakaf yg dikumpulkan melalui lembaga Zakat/ Wakaf.	2,5	3	3,20	4,78	4,20	4,60	5,00	5,00
				14. Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	29.Persentase lembaga keagamaan (MUI) yg aktif	20,00	20,00	20,00	60,00	60,00	80,00	100,00	100,00
					30.Persentase lembaga adat yang aktif (Kerapatan Adat Nagari / KAN)	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel V.6

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 Setelah Perubahan

VISI : PAYAKUMBUH MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN MENUJU PAYAKUMBUH MENANG

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi			Target			Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif	1.Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (79,63)	1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing	1. Angka rata – rata lama sekolah	-	-	-	-	10,79	10,85	10,90	10,90
				2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2. Angka Usia Harapan Hidup	73,03	73,13	73,33	73,61	73,90	74,30	74,50	74,50
				3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	NA	61,70	61,99	62,30	61,86	62,35	62,37	62,37
				4. Meningkatnya pena-nggulangan kemiski nan & pengangguran	4. Tingkat Kemiskinan	6,46	5,88	5,77	5,68	5,54	5,41	5,27	5,27
					5. Tingkat Pengangguran	7,07	3,45	3,78	4,11	5,90	5,83	5,80	5,80
2	Membangun Perekonomian Yg Tangguh, Unggul, Ber-daya Saing & Berkeadilan Dengan Berba-sis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama	2.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5% 3. Nilai Koefisien Gini (0,271)	5. Meningkatnya Produktivitas Sektor Strategis	6. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	23,92	24,48	25,15	25,13	24,07	24,12	24,17	24,17
					7. Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	5,64	5,67	5,35	5,60	6,08	6,11	6,12	6,12
					8. Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	7,39	7,04	6,75	6,35	7,45	7,46	7,47	7,47
					9. Persentase peningka-tan kunjungan wisata	27,74	10,8	11,28	5,11	5,50	6,70	7,50	7,50
				6. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10. Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)	175,70	229,3	231,5	250,6	74,4	200,9	203,8	1.190,5
					11. Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	26,64	27,14	15,27	15,49	1,50	2,00	2,50	2,50

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi			Target			Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3	Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan	3. Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan	4. Persentase Pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan Standar pelayanan minimum (SPM) 100% 5. Indeks kualitas lingkungan Hidup (58,00)	7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	12. Persentase pelayanan air minum	94,21	95,46	96,73	97,84	99,02	99,67	100	100
					13. Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	63,81	67,22	69,21	72,25	73,81	75,56	77,31	77,31
					14. Persentase Sistem drainase skala kota	39,88	47,44	51,74	58,95	60,39	62,91	64,40	64,40
					15. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	78,30	78,60	78,90	79,23	79,50	79,80	80,10	80,10
					16. Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	66,66	66,67	66,67	66,98	70,41	71,39	71,98	71,98
				8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,23	56,50	58,96	59,66	57,50	57,75	58,00	58,00
					18. Persentase luas permukiman kumuh	1,77	2,59	1,88	1,64	1,34	0,82	0,30	0,30
4	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	4. Meningkatnya penerapan RB	6. Indeks RB (75)	9. Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	19. Nilai Evaluasi AKIP Kota	B	BB	BB	BB	A	A	A	A
					20. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					21. Indeks SPBE	-	-	-	-	2,70	2,80	3,00	3,00
					22. Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	4,00	4,20	4,51	4,51
5	Mewujudkan Masyarakat Yg Berakhlak Mulia & Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	5. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis	7. Persentase peningkatan zakat /wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf (5%.) 8. Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan	10. Meningkatnya penerapan ABS SBK dalam prilaku masyarakat	23. Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karakter berkategori baik	5,31	13,83	22	47,62	36,17	43,62	51,06	51,06
					24. Persentase peningkatan zakat/wakaf yg dikumpul kan melalui lembaga Zakat/ Wakaf.	2,5	3	3,20	4,78	4,20	4,60	5,00	5,00
					25. Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi			Target			Kondisi Akhir
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			nilai nilai budaya (100%)										

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan, terdapat penyesuaian terhadap sasaran, indikator sasaran dan target seperti yang terlihat pada Tabel V.5 dan V.6. Penyesuaian sasaran dan indikator dilakukan berdasarkan kewenangan dan lingkup tugas kepala daerah. Untuk sasaran dan indikator yang dipandang terlalu sempit/ mikro, maka sasaran dan indikator tersebut diturunkan ke Perangkat Daerah. Sementara untuk target disesuaikan berdasarkan evaluasi hasil capaian serta penyelarasan proyeksi target indikator oleh pemerintah propinsi.



BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan Arah kebijakan adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, dan komprehensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam kebijakan dan program merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pada bab ini tergambar perencanaan terintegrasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Dimana pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut merupakan kolaborasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada Perangkat Daerah. Pada Bab ini juga dapat dilihat program prioritas apa saja yang muncul dan diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut.

6.1. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, Dan Kompetitif.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini sebelum dan setelah perubahan adalah :

Tabel VI. 1
Tujuan Misi 1 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan
1	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas

Sasaran yang akan dicapai dalam misi 1 ini ada 5 sasaran sebelum perubahan menjadi 4 sasaran setelah perubahan yaitu :

Tabel VI. 2
Sasaran Misi 1 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing;
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan;	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
5	Meningkatnya Prestasi Atlet	-

6.1.1. Strategi untuk Misi 1

Untuk mencapai sasaran pada Misi 1, strategi sebelum dan sesudah perubahan RPJMD sebagai berikut :

Tabel VI. 3
Strategi Misi 1 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Strategi Sebelum Perubahan	Strategi Setelah Perubahan
1	Peningkatan Manajemen dan mutu pendidikan;	Peningkatan Manajemen dan mutu pendidikan;
2	Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan;	Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan;
3	Penguatan Pendidikan Karakter;	Penguatan Pendidikan Karakter;
4	Peningkatan angka keberlanjutan pendidikan;	Peningkatan angka keberlanjutan pendidikan;
5	Peningkatan budaya gemar membaca;	Pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;
6	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular;	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
7	Peningkatan Ketahanan Keluarga;	Peningkatan Ketahanan Keluarga;
8	Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat;	Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat;
9	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan;	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan;
10	Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;	Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11	Peningkatan penanggulangan PMKS;	Peningkatan penanggulangan PMKS;
12	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan;	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan;
13	Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja;	Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja;
14	Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga untuk prestasi.	Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga untuk prestasi.

Terkait dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi tersebut untuk dilaksanakan dalam 5 tahun periode RPJMD adalah sebagaimana pada Tabel VI.4.

Tabel VI.4
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Misi 1
Setelah Perubahan

Visi: Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang		
Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing	1. Peningkatan Manajemen dan mutu pendidikan;
		2. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan;
		3. Penguatan Pendidikan Karakter;
		4. Peningkatan angka keberlanjutan pendidikan;
		5. Pengembangan budaya gemar membaca dan literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;
		6. Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga untuk prestasi.
		7. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar penunjang pendidikan *)
		8. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan*)
	2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	9. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
		10. Peningkatan Ketahanan Keluarga;
		11. Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat;
		12. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan;
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	13. Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	4. Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	14. Peningkatan penanggulangan PMKS
		15. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan
		16. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja

6.1.2. Arah Kebijakan untuk Misi 1

Dalam rangka mengimplementasikan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun, diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Perubahan dalam arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel VI. 5
Arah Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Arah Kebijakan Sebelum Perubahan	Arah Kebijakan Setelah Perubahan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan;	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan;
2	Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan;	Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan;
3	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal;	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal;
4	Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah;	Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah;
5	Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan	Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan

No	Arah Kebijakan Sebelum Perubahan	Arah Kebijakan Setelah Perubahan
	keuangan/hibah;	keuangan/hibah;
6	Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;	Mendorong pengembangan budaya gemar membaca serta literasi, dan meningkatkan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;
7	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olah raga prestasi;	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olah raga prestasi;
8	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.
9	Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan;	Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan;
10	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS) ;	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS) ;
11	Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;	Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;
12	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat;	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat;
13	Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA;	Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA;
14	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga;	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga;
15	Peningkatan pola konsumsi pangan harapan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG);	Peningkatan pola konsumsi pangan harapan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG);
16	Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan;	Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan;
17	Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan;	Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan;
18	Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan;	Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan;
19	Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan;	Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan;
20	Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;	Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;
21	Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial;	Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial;
22	Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan;	Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan;

No	Arah Kebijakan Sebelum Perubahan	Arah Kebijakan Setelah Perubahan
23	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan;	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan;
24	Fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan perluasan kesempatan kerja;	Fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan perluasan kesempatan kerja;
25	Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai;	Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai;

Tabel VI.6.
Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 1 Kota Payakumbuh 2018-2022
Setelah Perubahan

No	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	2	3	4	5	6
	SASARAN 1				
1	Meningkatnya kualitas perencanaan & pengawasan pendidikan	Meningkatnya kualitas perencanaan & pengawasan pendidikan	Meningkatnya kualitas perencanaan & pengawasan pendidikan	Meningkatnya kualitas perencanaan & pengawasan pendidikan	Meningkatnya kualitas perencanaan & pengawasan pendidikan
2	Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan	Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan	Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan	Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan	Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan
3	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal;	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal;	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal;	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal;	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan non formal;
4	Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah	Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah	Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah	Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah	Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia di sekolah
5	Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) & perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/ hibah	Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) & perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/ hibah	Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) & perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/ hibah	Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) & perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/ hibah	Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) & perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/ hibah
6	Mendorong pengembangan budaya literasi & layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT.	Mendorong pengembangan budaya literasi & layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT.	Mendorong pengembangan budaya literasi & layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT.	Mendorong pengembangan budaya gemar membaca serta literasi, dan meningkatkan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	Mendorong pengembangan budaya gemar membaca serta literasi, dan meningkatkan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT
	SASARAN 2				
1.	Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan;	Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan;	Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan;	Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan;	Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan;
2.	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS)	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS)	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS)	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS)	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup sehat (PHBS)
3.	Menurunkan angka kesakitan penyakit menular & tidak menular	Menurunkan angka kesakitan penyakit menular & tidak menular	Menurunkan angka kesakitan penyakit menular & tidak menular	Menurunkan angka kesakitan penyakit menular & tidak menular	Menurunkan angka kesakitan penyakit menular & tidak menular
4.	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat;	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat;	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat;	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat;	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat;

No	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	2	3	4	5	6
5.	Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA	Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA	Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA	Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA	Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA
6.	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga
7.	Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)
8.	Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan	Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan	Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan	Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan	Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan
9.	Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan.	Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan.	Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan.	Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan.	Mendorong peningkatan sarana prasarana Rumah sakit yang representatif melalui dana pembiayaan.
10.	Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan	Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan	Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan	Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan	Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan
11.	Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan.	Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan.	Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan.	Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan.	Meningkatkan jaminan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan.
	SASARAN 3				
1.	Optimalisasi program pemberdayaan & perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak	Optimalisasi program pemberdayaan & perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak	Optimalisasi program pemberdayaan & perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak	Optimalisasi program pemberdayaan & perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak	Optimalisasi program pemberdayaan & perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak
	SASARAN 4				
1.	Meningkatkan akses & kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, & perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial	Meningkatkan akses & kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, & perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial	Meningkatkan akses & kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, & perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial	Meningkatkan akses & kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, & perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial	Meningkatkan akses & kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, & perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial
2.	Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalampenanggulangan kemiskinan	Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalampenanggulangan kemiskinan	Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalampenanggulangan kemiskinan	Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalampenanggulangan kemiskinan	Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalampenanggulangan kemiskinan
3.	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan
4.	Fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan perluasan kesempatan kerja	Fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan perluasan kesempatan kerja	Fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan perluasan kesempatan kerja	Fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan perluasan kesempatan kerja	Fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan perluasan kesempatan kerja
5.	Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai.	Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai.	Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai.	Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai.	Peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai.

No	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	2	3	4	5	6
	SASARAN 5				
1.	Peningkatan pembibi-tan atlit & pembinaan olah raga prestasi	Peningkatan pembibi-tan atlit & pembinaan olah raga prestasi	Peningkatan pembibi-tan atlit & pembinaan olah raga prestasi		
2.	Meningkatkan sarana & prasarana olahraga	Meningkatkan sarana & prasarana olahraga	Meningkatkan sarana & prasarana olahraga		

6.1.3. Program pembangunan Daerah Misi 1

Program-program prioritas untuk mewujudkan misi 1 adalah:

Tabel VI.7.
Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Misi 1

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 1 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 1 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 DAN PEMUTAHIRAN
1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 2. Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5. Program Pendidikan Non Formal; 6. Program Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia;	1. Program Pengelolaan Pendidikan; 2. Program Pengembangan Kurikulum; 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Kepustakaan;	4. Program Pembinaan Perpustakaan;
8. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga; 9. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga; 10. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga;	5. Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan; 6. Program pengembangan kapasitas kepramukaan; 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak; 12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 13. Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Menular; 14. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular; 15. Program Perbaikan Gizi Masyarakat; 16. Program Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM; 17. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 18. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;	8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; 10. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan; 11. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 1 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 1 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 DAN PEMUTAHIRAN
20. Program diversifikasi dan keamanan pangan; 21. Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan;	12. Program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat;
22. Program pengembangan perumahan; 23. Program lingkungan sehat perumahan;	13. program pengembangan perumahan; 14. program kawasan permukiman ;
24. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 25. Program Perluasan dan Peningkatan Sambungan Rumah (SR); 26. Program pembangunan jalan dan jembatan; 27. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; 28. Program pembangunan fasilitas umum;	15. program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; 16. Program penyelenggaraan jalan; 17. program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; 18. program penataan bangunan gedung; 19. program penyelenggaraan penataan ruang; 20. Program pengembangan pemukiman;
29. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 30. Program pengelolaan ruang terbuka hijau;	21. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
31. Program sarana dan prasarana perhubungan;	22. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
32. Program Keluarga Berencana; 33. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Paud;	23. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); 24. Program Pengendalian Penduduk; 25. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
34. Program Penguatan Kelembagaan PUG Dan Anak; 35. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan;	26. Program pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan; 27. Program Perlindungan Khusus Anak; 28. Program Pemenuhan Hak Anak; 29. Program Peningkatan Kualitas Keluarga; 30. Program Perlindungan Perempuan; 31. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
36. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, Dan PMKS Lainnya; 37. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 38. Program Pemberdayaan Dan Kelembagaan Kesos;	32. Program Rehabilitasi Sosial; 33. Program perlindungan dan Jaminan Sosial; 34. Pemberdayaan Sosial;
39. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan;	35. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen; 36. Program Penggunaan dan Pemasaan Produk dalam Negeri;
40. Program Peningkatan Kesejahteraan	37. Program penyediaan dan

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 1 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 1 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 DAN PEMUTAHIRAN
Petani;	Pengembangan Sarana pertanian; 38. Program Perizinan Usaha Pertanian; 39. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; 40. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 41. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
41. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM; 42. Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM;	42. Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah; 43. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
43. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 44. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja; 45. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;	44. Program Penempatan Tenaga Kerja; 45. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 46. Program Hubungan Industrial;
46. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ; 47. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;	47. Program Promosi Penanaman Modal 48. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 49. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
48. Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama.	50. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
	51. Program Pengembangan Kebudayaan; 52. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
	53. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
	54. Program Pencatatan Sipil.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan juga terdapat program yang pembiayaannya bersumber dari APBN, antara lain : Program Indonesia Pintar, Program BOS/BOSDA, Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, Program RASTRA, dan Program Kotaku.

Keterkaitan antara Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel VI.8 :

Tabel VI.8
Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 1 Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 90/2019 dan Pemutakhiran
1. Peningkatan Manajemen dan mutu pendidikan	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan;	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
	2. Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan;	Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pemgembangan kurikulum
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan	3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan pendidikan non formal;	Program Pendidikan Non Formal	Program Pengelolaan Pendidikan
3. Penguatan Pendidikan Karakter	4. Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia disekolah	Program Pendidikan karakter/akhlak mulia	Program Pengelolaan Pendidikan
4. Peningkatan angka keberlanjutan pendidikan	5. Mendorong peningkatan pelayanan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/MA) dan perguruan tinggi di Kota Payakumbuh melalui bantuan keuangan/hibah	-	Program Pengelolaan Pendidikan
5. Pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	6. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT;	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Kepustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
6. Peningkatan Pemuda dan Olah raga pemuda dan olahraga untuk berprestasi	7. Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi	Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	8. Meningkatkan sarana dan prasarana Olahraga	Program Pembanguanan sarana dan prasarana Olahraga	
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
		Program Perencanaan Penataan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
7. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	9. Menurunkan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	10. Meningkatkan partisipasi masyarakt untuk hidup sehat (PHBS) ;	Program pengembangan lingkungan sehat	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
	11. Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;	Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pengendalian penyakit tidak menular	

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 90/2019 dan Pemutakhiran
	12. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat;	Program perbaikan gizi masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	13. Optimalisasi pelayanan penyalahgunaan NAPZA (termasuk ke dalam operasional)	-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat.	14. Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG);	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat
	15. Meningkatkan sarana prasarana layanan kesehatan serta ketersediaan obat obatan;	Program Pengadaan, peningkatan sarana prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru- paru/RS Mata	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
	16. Mendorong peningkatan sarana prasarana RS yang representastif melalui pendanaan pembiayaan	-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	17. Meningkatkan kualitas manajemen layanan kesehatan;	Standarisasi pelayanan kesehatan	Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9. Peningkatan Ketahanan Keluarga	18. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga	Program keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS))
			Program Pengendalian Penduduk
10. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan	19. Meningkatkan jaminan dan kemandirian kesehatan dalam penjaminan kesehatan;	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Program penyelenggaraan jalan
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Program pengeloaan dan pengembangan system drainase
		Program pembangunan fasilitas	Program penataan bangunan gedung
		Program sarana dan prasarana perhubungan	Program penyelenggaraan lalul lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
		Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau	
		Program lingkungan sehat perumahan	Program kawasan permukiman
		Program pengembangan perumahan	Program pengembangan perumahan
11. Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan	20. Optimalisasi program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;	Program Penguatan kelembagaan PUG dan anak	Program pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 90/2019 dan Pemutakhiran
perlindungan anak			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Perlindungan Perempuan
			Program Perlindungan Khusus Anak
12. Peningkatan penanggulangan PMKS	21. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.	Program Rehabilitasi Sosial
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Program perlindungan dan Jaminan Sosial
13. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan*)	22. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistim layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemskinan	Program pemberdayaan kelembagaan kesos	Program Pemberdayaan Sosial
	23. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan;	Program ketersediaan dan distribusi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat
		Program penanganan kerawanan Pangan	
		Program pengembangan perumahan	Program Kawasan Permukiman
		Program Lingkungan sehat perumahan	
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Program Penggunaan dan Pemasaan Produk dalam Negeri
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	
		Program Perluasan dan Peningkatan Sambungan Rumah (SR)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		Program pembangunan fasilitas umum	Program penataan bangunan gedung
		Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-	

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 90/2019 dan Pemutakhiran
		gorong	
		Program Pembangunan infrastruktur perdesaa	Program pengembangan pemukiman
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Program Wajib Belajar 9 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidikan Non Formal	
		Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi UMKM	Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah
		Program Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
			Program Pengendalian Penduduk
		Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PAUD	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Pencatatan Sipil
14. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja	24. Fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan perluasan kesempatan kerja;	Program peningkatan kesempatan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
	25. peningkatan daya saing angkatan kerja siap pakai	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel VI.9.

Tabel VI.9
Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Untuk Misi 1

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Misi:	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif**																
	Tujuan:	**Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas**																
	Indikator Tujuan	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**77,56**	**77,91**		**78,23**		**78,95**		**78,94**		**79,29**		**79,63**		**79,63**		
	SASARAN 1	**Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing**																
	Indikator Sasaran	***Jumlah Sekolah (SD,SMP) yang terakreditasi A***	***64 sekolah***	***65 sekolah***		***70 sekolah***		***75 sekolah***										
		Rata-rata Lama Sekolah								**10,79**		**10,85**		**10,90**		**10,90**		
	Program pendidikan anak usia dini	*Persentase satuan PAUDNI yang memiliki sapras sesuai SNP*	*58,00 %*	*60,00%*		*62%*		*65,00%*		*65,00 %*								
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang pengelolaannya berkategori baik	*68,50 %*	*70,00%*	*2.443,84*	*72%*	*1.939,16*	*74,00%*	*3.821,73*	*77,00 %*	*3.805,46*						*12.010,18*	
		Persentase PTK PAUD yang sesuai dengan SNP	*49,00 %*	*50,00%*		*52%*		*55,00%*		*56,00 %*								
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	*Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP*	*78,50 %*	*80,00%*		*83%*		*85,00%*		*86,00 %*								
		Rata - rata nilai Mid semester	*7,14*	*7,50*	*10.779,75*	*7,55*	*13.618,03*	*7,5*	*18.873,37*	*7,65*	*14.883,52*						*58.154,67*	
		Rata - rata nilai semester	*7,16*	*7,55*		*7,55*		*7,6*		*7,65*								
	Program Pendidikan Non Formal	*Angka melek huruf*	*99,63 %*	*99,56%*	*4.074,38*	*99,56%*	*814,51*	*100%*	*2.228,01*	*99,71 %*	*185,89*						*7.302,79*	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	*Persentase satuan pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik*	*67,00 %*	*70,00%*	*439,52*	*72%*	*334,73*	*74,50%*	*162,54*	*75,00 %*	*77,49*						*1.014,28*	
	Program Pendidikan Karakter/ Akhlak mulia	*Persentase sekolah dgn pendidikan karakter berkategori baik*	*5,31%*	*13,83%*	*-*	*22%*	*3.832,51*	*47,62%*	*4.531,08*	*47,62 %*	*2.628,57*						*10.992,16*	
	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	*APK SD*	*114*	*124,20*		*125,89*		*122,53*		*127,50*								
		APK SMP	*141*	*159,67*		*163,68*		*165,51*		*160,08*								
		APM SD	*100,88*	*110,65*	*16.869,95*	*112,68*	*17.178,79*	*110,16*	*17.706,73*	*110,50*	*19.129,67*						*70.255,14*	
		APM SMP	*109,94*	*121,32*		*125,40*		*125,30*		*121,30*								
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki sarana										87%	48.284,36	90%	48.284,36	90%	96.568,71	

DINAS PENDIDIKAN

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		prasarana sesuai dengan SNP																
		Rata-rata Nilai Mid Semester										7,70		7,75		7,75		
		Persentase pencapaian KKM SD pada Satuan Pendidikan										92%		94%		94%		
		Persentase Pencapaian KKM Siswa SMP pada Satuan Pendidikan										6%		6,1%		6,1%		
		Rata-Rata Nilai Semester										7,70		7,75		7,75		
		Persentase satuan PAUDNI yang memiliki sapras sesuai SNP										67%		70%		70%		
		Persentase satuan Pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik										77%		80%		80%		
		Persentase PTK yang sesuai dengan SNP										60%		65%		65%		
		Angka Melek Huruf										99,75		99,81		99,81		
		Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik										47,62%		51,06%		51,06%		
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan Pendidikan PAUD yang pengelolaannya berkategori baik										78%	3,99	80%	3,99	80%	7,99	
		Persentase PTK PAUD yang sesuai dengan SNP										60%		65%		65%		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Persentase ketersediaan guru per rombongan belajar*	*86,50 %*	*86,70%*	*537,97*	*86,90%*	*389,13*	*87,50%*	*3.408,49*	*87,50 %*	*3.627,53*							*7.963,12*	
		Persentase ketersediaan guru per mata pelajaran	*79,83 %*	*80,00%*		*80%*		*81,00%*		*80,75 %*								
		Persentase PTK yang sesuai dengan SNP	*46,00 %*	*50,00%*		*53%*		*54,00%*		*57,00 %*								
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketersediaan guru per rombongan belajar										88%	8.49	88,50%	8.49	88,50%	16,99	
		Persentase ketersediaan guru per mata pelajaran										81%		81,50%		81,50%		
		Persentase PTK yang										60%		65%		65%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		sesuai dengan SNP																
	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	*Jumlah anggota perpustakaan*	*1290 orang*	*1509 orang*	*297,54*	*1637 orang*	*408,59*	*1913 orang*	*375,66*	*1675 orang*	*271,11*						*1.352,91*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan										1736 orang	372,28	1810 orang	372,28	3546 orang	744,55	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	*Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah*	*149 medali*	*24 medali*	*4.052,94*	*145 medali*	*4.751,34*	*30 medali*	*5.282,34*	*155 medali*	*688,11*						*14.774,73*	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	*Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik*	*75,00 %*	*75,00%*	*9.328,58*	*75,00%*	*2.580,77*	*80,00%*	*1.693,58*	*85,00 %*	*634,57*						*14.237,50*	
	Program Pembangu-nan Sarana dan Prasarana Olahraga	*Jumlah sapras olah raga yang dibangun*	*3 buah*			*1 buah*	*430,75*	*3 buah*	*6.915,45*	*2 buah*	*5.377,23*						*12.723,43*	
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah										33 medali	12.104,96	170 medali	12.104,96	557 medali	24.209,93	
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik										87,00%		90,00%		90,00%		
		Jumlah sapras olah raga yang dibangun										3 buah		2 buah		13 buah		
		Jumlah Penyelenggaraan event olah raga rekreasi										8 event		9 event		30 event		
	Program Pengembangan Nilai Budaya)*	*Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif*	*66 kelompok*	*66 kelompok*	*711,68*	*70 kelompok*	*614,72*	*71 kelompok*	*503,61*	*72 kelom-pok*	*11,15*						*1.841,16*	
		Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah	*22 orang*	*22 orang*		*23 orang*		*24 orang*		*25 orang*								
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya)*	*Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya*	*8 event*	*8 event*	*963,65*	*8 event*	*1.169,80*	*13 event*	*1.541,82*	*5 even*	*322,39*						*3.997,66*	
6	Program Pengembangan Kebudayaan*)	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif										73 kelompok	365,44	74 kelompok	365,44	74 kelompok	730,87	
		Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah										26 orang		27 orang		27 orang		
		Jumlah penyelenggaraan										12		15		15		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		festival budaya										event		event		event		
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	*persentase Panjang jalan status kota dengan kondisi mantap*	*63,81 %*	*67,22%*	*1.798,27*	*69,21%*	*1.325,49*	*72,25%*	*4.153,71*	*75,90 %*	*4.426,00*						*11.703,48*	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG*)**
	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	*persentase Panjang jalan yang dipelihara*	*13,70 %*	*15,70%*	*29.124.46*	*17,60%*	*30.539,15*	*19,60%*	*33.042,23*	*21,50 %*	*18.093,30*						*110.799,14*	
7	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kota memenuhi standar konstruksi dan fungsi										48,84	24.364,69	50,01	24.364,69	50,01	48.729,38	
	Program Perencanaan Penataan ruang	*Persentase Tertatanya kawasan pusat kota*	*55,00 %*	*60,00%*	*212,82*	*60,00%*	*600,06*	*69,00%*	*525,59*	*73,00 %*	*546,87*						*1.885,34*	
		Jumlah advice planning yang dikeluarkan	*586 buah*	*583 buah*		*583 buah*		*571 buah*		*610 buah*								
		Keberadaan PERDA RTRW	*1 perda*	*1 perda*		*1 perda*		*1 perda*		*1 perda*								
8	Program penyelenggaraan penataan ruang	Pesentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang										35,05%	1.564,82	36,18%	1.564,82	36,18%	3.129,64	
	Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	*Jumlah kelembagaan PUG*	*33 lembaga*	*30 lembaga*	*595,37*	*33 lembaga*	*588,01*	*33 lembaga*	*678,92*	*33 lembaga*	*399,89*						*2.262,18*	**DP3AP2KB*)**
		Persentase program dan kegiatan yang di PPRG-kan	*1,00%*	*2,00%*		*5,00%*		*10,00%*		*12,00 %*								
		Persentase penganaan kasus kekerasan perempuan	*100,00 %*	*100,00 %*		*100,00 %*		*100,00 %*		*100,00 %*								
		Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak	*tidak ada penilaian*	*520*		*560*		*610*		*650*								
		Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	*0*	*0*		*5 lembaga*		*10 lembaga*		*10 lembaga*								
		Persentase kasus penanganan kekerasan anak	*100,00 %*	*100,00 %*		*100,00 %*		*100,00 %*		*100,00 %*								
9	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang duduk di legislatif										16,00	88,44	16,00	88,44	16,00	176,88	
		Jumlah kelembagaan PUG										33 lembaga		33 lembaga		33 lembaga		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase program dan kegiatan yang di-PPRG-kan										15,00%		17,00%		17,00%		
		Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan										75,00%		80,00%		80,00%		
10	Program Pemenuhan Hak Anak	Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak										720		850		850		
		Jumlah Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat										11 lembaga	107,59	12 lembaga	107,59	12 lembaga	215,18	
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	18 buah	20 buah	368,44	25 buah	361,23	27 buah	350,35	30 buah	185,51						1.265,53	
11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang aktif										33 buah	517,06	33 buah	517,06	33 buah	1.034,12	
	SASARAN 2	**Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat**																
	Indikator Sasaran	**Angka Usia Harapan Hidup**	**73,03 th**	**73,13 th**		**73,33 th**		**73,61 th**		**73,90 th**		**74,30 th**		**74,50 th**		**74,50 th**		**DINAS KESEHATAN**
	program perbaiki gizi masyarakat	*Persentase peningkatan status gizi masyarakat*	*100%*	*100%*	*71,06*	*100%*	*70,93*	*100%*	*263,30*	*100%*	*88,59*						*493,90*	
		Persentase penangan balita gizi buruk	*100%*	*100%*		*100%*		*100%*		*100%*								
		Cakupan balita gizi buruk	0,08%	< 3%		< 3%		< 3%		< 3%								
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian bayi										24	31,529,46	24	31,529,46	24	63,058,93	
		Jumlah kasus kematian ibu melahirkan										3		3		3		
		Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB										100%		100%		100%		
		Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular										100%		100%		100%		
		Persentase kelurahan STBM										93%		95%		95%		
2	Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pelayanan Kesehatan										100%	180,57	100%	180,57	100%	361,14	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	program pengawasan obat dan makanan	*persentase kegiatan pengawasan keamanaan pangan*	*100,00 %*	*100,00 %*	*186,51*	*100,00 %*	*194,10*	*100,00 %*	*154,99*	*100%*	*266,82*						*802,42*	
		persentase kelompok masyarakat cerdas menggunakan obat	*25,00 %*	*25,00%*		*30,00%*		*35,00%*		*40%*								
3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase peningkatan pengelolaan obat sesuai standar										100%	6,99	100%	6,99	100%	13,98	
		Persentase kegiatan pengawasan keamanan pangan										100%		100%		100%		
	program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	*Persentase rumah ber PHBS*	*66,33 %*	*67,00%*	*569,56*	*70,00%*	*659,26*	*75,00%*	*169,69*	*77,00 %*	*97,50*						*1.496,02*	
		Persentase sekolah ber PHBS	*48,33 %*	*73,00%*		*75,00%*		*78,00%*		*80,00 %*								
4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase PHBS rumah tangga dan sekolah										85%	729,99	90,00%	729,99	90,00%	1.459,99	
	Program peningkatan pengendalian polusi	*Indeks Kualitas Air*	*75*	*76*	*24,21*	*66,67*	*443,85*	*70,83*	*804,36*	*75*	*420,47*						*1,692,90*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP*)
		Indeks kualitas udara	*80*	*95,32*		*92,29*		*93,73*		*80*								
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air										75	475,38	75	475,38	75	950,77	
		Indeks kualitas udara										80		80		80		
	Program Lingkungan sehat Perumahan	*Persentase rumah bersanitasi layak*	*88,20%*	*89,78%*	*4,640,79*	*91,47%*	*4,300,72*	*93,23%*	*4,829,77*	*92,74%*	*5.323,16*						*19.094,46*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN*)
6	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak										94,25%	7,705,46	95,76%	7,705,46	95,76%	15.410,92	
		Persentase Rumah Layak Huni										95,92%		96,98%		96,98%		
		Persentase Luas Permukiman Kumuh										0,82		0,30		0,30		
	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	*Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE*	-	-	-	-	-	*45%*	*759,22*	*50%*	*83,58*						*842,80*	DINAS KETAHANAN PANGAN*)
		Persentase Penurunan Konsumsi Beras	-	-		-		*1%*		*1%*								
		Persentase bahan pangan	-	-		-		*80,09%*		*85,00%*								

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		yang aman dikonsumsi																
7	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	% masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE										54%		60%		60%		
		Persentase cadangan pangan yang tersedia										40%	746,86	50%	746,86	50%	1,493,72	
		% penurunan konsumsi beras										1%		1%		1%		
		Cakupan supply lembaga distribusi pangan										12%		15%		15%		
		Nilai capaian ketersedia-an informasi harga, pasokan &akses pangan										50,00%		60,00%		60,00%		
	Program Pembangunan Fasilitas Umum	*Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan*	*66,66%*	*66,67%*		*66,67%*		*68,00*	*6,795,11*	*69,84%*	*11,234,53*						*18,029,64*	
8	Program penataan bangunan gedung	Persentase penyediaan sarana perkantoran tertentu yang representatif										78,03%		79,38%		79,38%		
		Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan										71,39%	18,466,85	71,98%	18,466,85	71,98%	36,933,11	
		Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif										79,25%		83,15%		83,15%		
	Program perluasan & peningkatan sambungan rumah (SR)	*Persentase rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan*	*91,61%*	*94,41%*	-	*98,84%*	*754,89*	*99,12%*	*2.135,10*	*96,84%*	-						*2,889,9*	DINAS PU-PR*)
	Program Pengembangan Kinerja, Pengelolaan Air Minum dan Limbah	*Persentase rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan*	*91,61%*	*94,41%*	*559,65*	*98,84%*	*723,36*	*99,12%*	*886,73*	*96,84%*	*957,92*						*3,127,6*	
9	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah yg terlayani air minum perpipaan										99,25%	1,914,03	100%	1,914,03	100%	3,828,06	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	*Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas*	*65,25%*	*40,00%*	*234,79*	*86,06%*	*122,68*	*76,67%*	*212,87*	*75,33%*	*556,51*						*1,126,88*	DINAS PERHUBUNGAN*)
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	*Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum*	*60,12%*	*63,24%*	*1,068,45*	*92,95%*	*391,54*	*94,77%*	*308,53*	*50,50%*	*281,66*						*2,050,21*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	*Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan*	*65,00%*	*89,22%*	*103,67*	*70,00%*	*377,21*	*82,00%*	*596,70*	*85,00%*	*132,00*						*1,209,59*	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	*Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas*	*65,25%*	*40,00%*	*291,34*	*86,06%*	*150,14*	*76,67%*	*108,41*	*75,33%*	*251,24*						*801,14*	
	Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Parkir	*Persentase peningkatan pelayanan parkir*	*65%*	*65%*	-	*65%*	*327,65*	*70,20%*	*321,63*	*71,00 %*	*322,51*						*971,80*	
10	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase ketersediaan fasilitas umum										71,45%	554,03	71,55%	554,03	71,55%	1,108,07	
		Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan										88,00%		88,00%		88,00%		
		Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas										78,15%		80,21%		80,21%		
		Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum										50,65%		50.80%		50,80%		
		Persentase peningkatan pelayanan parkir										74,00%		74,00%		74,00%		
SASARAN 3		**Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan**																
Indikator Sasaran		**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**NA**	**61,70**		**61,99**		**62,30**		**61,86**		**62,35**		**62,37**		**62,37**		
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	*Jumlah kelembagaan PUG*	*33 lembaga*	*33 lembaga*	*595,36*	*33 lembaga*	*588,00*	*33 lembaga*	*678,91*	*33 lembaga*	*399,88*						*2,262,17*	DP3AP2KB
		Persentase program dan kegiatan yang di PPRG - kan	*1,00%*	*2,00%*		*5,00%*		*10,00%*		*12,00%*								
		Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak	*Tidak ada penilaian*	*520*		*560*		*610*		*650*								
		JumlahPerlindunganana terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	*0*	*0*		*5 lembaga*		*10 lembaga*		*10 lembaga*								
		Persentase penanganan kasus kekerasan anak	*100%*	*100%*		*100%*		*100%*		*100%*								
		Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan	*100%*	*100%*		*100%*		*100%*		*100%*								
	Program Peningkatan	*Persentase Pelaku usahan*	*40%*	*41%*	*20,55*	*55%*	*78,47*	*60%*	*17,75*	*66%*	*17,45*						134,2	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	kualitas dan perlindungan perempuan	*ekonomi perempuan*															4	
		Persentase kekerasan terhadap perempuan	*0,11%*	*0,05%*		*0,039%*		*0,018%*		*0,06%*								
1	Program Pengarus-utamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang duduk di legislatif										16,00	88,44	16,00	88,44	16,00	176,88	
		Jumlah kelembagaan PUG										33 lembaga		33 lembaga		33 lembaga		
		Persentase program dan kegiatan yang di-PPRG-kan										15.00%		17.00%		17.00%		
		Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan										75%		80%		80%		
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan										0,055%	25,13	0,04%	25,13	0,04%	50,26	
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan										100%		100%		100%		
	Program peningkatan peran serta & kesetaraan gender dlm pembangunan	*Jumlah organisasi perempuan yang aktif*	*18 Buah*	*20 Buah*	*368,44*	*25 Buah*	*361,22*	*27 Buah*	*350,35*	*30 buah*	*185,51*						*1,265,51*	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang aktif										33 buah	517,06	33 buah	517,06	33 Buah	1,034,12	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak										2	9,01	2	9,01	2	18,02	
		Rata- rata capaian pengelolaan sistem data gender dan anak										35,00		35,00		35,00		
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	*Persentase perempuan yang duduk di legislatif*	8%	8%		8%		16%		16%								
		umlah perwako, himbauan, MOU terkait perlindungan anak	1	0	119,83	1	86,19	1	49,27	1	29,20						284,50	
		Persentase kekerasan terhadap anak	0,075%	0,040%		0,039%		0,054%		0,040%								
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak										720	107,58	850	107,58	850	215,17	
		Jumlah Perlindungan Anak terpadu berbasis										11 lembag		12 lembag		12 lembag		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		masyarakat										a		a		a		
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak										0,035%	375,57	0,026%	375,57	0,026%	751,14	
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak										100%		100%		100%		
7	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian bayi										24	31,529,46	24	31,529,46	24		DINAS KESEHATAN*)
		Jumlah kasus kematian ibu melahirkan										3		3		3		
		Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB										100%		100%		100%		
		Persentase Kelurahan STBM										93%		95%		95%		
		Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular										100%		100%		100%		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	*Persentase bahan pa-ngan yg telah memenu-hi Angka Kecukupan Energi (AKE)*	*55%*	*67%*	*915,12*	*77%*	*833,65*	-	-	-	-						*1,748,77*	DINAS KETAHANAN PANGAN*)
		Persentase cadangan pangan yang tersedia	*7%*	*19%*		*20,5%*		-		-								
		Cakupan supply lemba-ga distribusi pangan	*2%*	*2%*		*4%*		-		-								
		Nilai capaian keterse-diaan informasi harga, pasokan&akses pangan	22%	25%		22%		-		-								
		Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	*NA*	*NA*		*40%*		-	-	-	-							
		Persentase penurunan konsumsi beras	*NA*	*NA*		*1%*		-		-								
		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	*60%*	*75%*		*91,5%*		-		-								
8	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	% cadangan pangan yang tersedia										40%	746,86	50%	746,86	50%	1,493,72	
		% masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE										54%		60%		60%		
		%penurunan konsumsi										1%		1%		1%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		beras																
		Cakupan supply lembaga distribusi pangan										12%		15%		15%		
		Nilai capaian keterse-diaan informasi harga, pasokan &akses pangan										50,00%		60,00%		60,00%		
SASARAN 4		**Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**																
Indikator Sasaran		**Tingkat kemiskinan**	**6,46%**	**5,88 %**		**5.77 %**		**5,68%**		**5,54%**		**5,41%**		**5,27%**		**5,27%**		
		Tingkat pengangguran	**7.07%**	**3,45**		**3,78**		**4,11**		**5,90%**		**5.83%**		**5,80%**		**5,80%**		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya	*Persentase peningka-tan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan*	*0,00%*	*10,00%*	*539.25*	*19,67%*	*835.95*	*45,00%*	*602.51*	*46,77%*	*334.20*						*2.311,93*	
1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS										99,90%	563,88	100%	122,11	100%	686,00	
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	*Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak nakal*	*70,00%*	*70,00%*	*864.69*	*80,00%*	*631,02*	*82,00%*	*879,92*	*90,00%*	*721.35*						*3.096,98*	**DINAS SOSIAL**
	Program pemberda-yaan kelembagaan kesejahteraan sosial	*Persentase pening-katan kualitas lembaga kesejahteraan sosial*	*70,00%*	*70,00%*	*782.27*	*80,00%*	*853.32*	*82,50%*	*810.80*	*90,00%*	*264.76*						2.711,17	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos										65%	234.63	70%	234.63	70%	469.27	
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)												100%	441,76	100%	441,76	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	*Persentase bahan pa-ngan yg telah memenu-hi Angka Kecukupan Energi (AKE)*	55,00%	*67,00%*		*77,00%*		-		-		-		-		-		
		Persentase cadangan pangan yang tersedia	7,00%	*19,00%*		*20,5%*		-		-		-		-		-		
		Cakupan supply lemba-ga distribusi pangan	2,00%	*2,00%*	*915.12*	*4,00%*	*833.65*	-		-	-	-	-	-	-	-	*1.748.77*	**KETAHANAN PANGAN*)**
		Nilai capaian keterse-diaan informasi harga, pasokan&akses pangan	*22,00%*	*25,00%*		*22,00%*		-		-		-		-		-		
		Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	*NA*	*NA*		*40,00%*		-		-		-		-		-		
		Persentase penurunan	*NA*	*NA*		*1,00%*		-		-		-		-		-		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		konsumsi beras																
		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	*60%*	*75,00%*		*91,5%*		-		-		-		-		-		
	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	*Persentase bahan pa-ngan yg telah memenu-hi Angka Kecukupan Energi (AKE)*	-	-		-		*88,00%*		*88,00%*								
		Persentase cadangan pangan yang tersedia	-	-		-		*21,00%*		*35,00%*								
		Cakupan supply lemba-ga distribusi pangan	-	-	-	-	-	*8,00%*	*130.80*	*10,00%*	*105.32*						*236.13*	
		Nilai capaian keterse-diaan informasi harga, pasokan&akses pangan	-	-		-		*33,00%*		*33,00%*								
	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	*Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE*	-	-		-		*45,00%*		*50,00%*								
		Persentase penurunan konsumsi beras	-	-	-	-	-	*1,00%*	*759.22*	*1,00%*	*83.58*						*842.80*	
		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	-	-		-		*80,09%*		*85,00%*								
4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	% cadangan pangan yang tersedia										40,00%		50,00%		50,00%		
		% masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE										54,00%		60,00%		60,00%		
		%penurunan konsumsi beras										1,00%	746,86	1,00%	746,86	1,00%	1.493,72	
		Cakupan supply lemba-ga distribusi pangan										12,00%		15,00%		15,00%		
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan										50%		60.00%		60.00%		
	program upaya kesehatan masyarakat	*persentase kepersetaan jkn*	*85,10%*	*87,00%*	*7.380,97*	*89,00%*	*8.894,39*	*95,00%*	*13.596,66*	*100%*	*18.450,2*						*48.322,27*	DINAS KESEHATAN*)
	program perbaiki gizi masyarakat	*Persentase peningkatan status gizi masyarakat*	*100,00%*	*100,00%*		*100,00%*		*100,00%*		*100,00%*							493,91	
		Persentase penangan balita gizi buru	*100,00%*	*100,00%*	*71,06*	*100,00%*	*70,93*	*100,00%*	*263,30*	*100,00%*	*88,59*							
		Cakupan balita gizi buruk	*0,08%*	*<3%*		*<3%*		*<3%*		*<3%*								
5	Program pemenuhan upaya kesehatan	Jumlah kasus kematian bayi										24,00	31.529,47	24,00	31.529,47	24,00	63.058,94	
		Jumlah kasus kematian ibu										3,00		3,00		3,00		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	melahirkan																
		Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB										100,00%		100,00%		100,00%		
		Persentase kelurahan STBM										93.00%		95,00%		95,00%		
		Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular										100,00%		100,00%		100,00%		
	Program Pengembangan Perumahan	*Persentase Rumah Layak Huni*	*91,70%*	*91,90%*	*4.045,78*	*92,98%*	*977,32*	*94,22%*	*823,65*	*94,87*	*521,54*						*6.368.31*	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
6	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penurunan angka Backlog (kebutuhan rumah)										14,57%	10,24	13,97%	10,24	13,97%	20,48	
	Program Lingkungan sehat Perumahan)*	*Persentase rumah bersanitasi layak*	*88,20%*	*89,78%*	*4.640,79*	*91,47%*	*4.300,72*	*93,23%*	*4.829,77*	*92,74%*	*5.323,16*						*19.094,46*	
7	Program Kawasan Permukiman*)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak										94,25%	7.705,46	95,76	8,188,84	95,76	15.894,30	
		Persentase Rumah Layak Huni										95,92%		96,98%		96,98%		
		Persentase Luas Permukiman Kumuh										0,82		0,30		0,30		
	Program Pendidikan Non Formal	*Angka melek huruf*	*99,63%*	*99,56%*	*4.074,38*	*99,56%*	*814,50*	*100%*	*2.228,,01*	*99,71%*	*185,89*						*7.302,79*	**DINAS PENDIDIKAN**
8	Program Pengembangan kurikulum	Persentase satuan Pendidikan PAUD yang pengelolaannya berkategori baik										78%	3,99	80%	3,99	80%	7,99	
		Persentase PTK PAUD yang sesuai dengan SNP										60%		65%		65%		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun)*	*Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP*	*78,5%*	*80%*	*10.779,75*	*83%*	*13.618,03*	*85%*	*18.873,,36*	*86%*	*14.883,52*						*58.154,67*	
		Rata - rata nilai Mid semester	*7,14*	*7,50*		*7,55*		*7,5*		*7,65*								
		Rata - rata nilai semester	*7,16*	*7,55*		*7,55*		*7,6*		*7,65*								
9	Program Pengelolaan Pendidikan*)	Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP										87%	48.284,35	90%	48.284,35	90%	96.568,7	
		Rata-rata Nilai Mid Semester										7,70		7,75		7,75		
		Rata-rata persentase pencapaian KKM pada										92%		94%		94%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Satuan Pendidikan (SD)																
		Rata-rata persentase pencapaian KKM pada Satuan Pendidikan (SMP)										6		6,1		6,1		
		Rata-Rata Nilai Semester										7.70		7.75		7.75		
		Persentase satuan PAUDNI yang memiliki saparas sesuai SNP										67%		70%		70%		
		Persentase satuan Pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik										77%		80%		80%		
		Persentase PTK yang sesuai dengan SNP										60%		65%		65%		
		Angka Melek Huruf										99.75		99.81		99.81		
		Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik										47.62%		51.06%		51.06%		
	Program Perlindungan Konsumen & pengamanan perdagangan	*Persentase peningkatan pelaku usaha yg tertib niaga*	*50,00%*	*55,00%*	*339,63*	*55,00%*	*622,27*	*65,00%*	*1037,43*	*70,00%*	*99,68*						*2.099,02*	**DINAS KOPERASI DAN UKM*)**
		Persentase Peningkatan Komoditi yg diperdagangkan	*2,00%*	*3,00%*		*3,00%*		*4,00%*		*4,50%*								
10	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga										20.00%	62,32	20.00%	62,32	20.00%	124,63	
	Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi UMKM	*Persentase peningkatan modal UMKM*	*2,00%*	*15,00%*	*77,73*	*2,00%*	*140,81*	*1,70%*	*62,29*	*3,00%*	*17,04*						*297,89*	
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	*1,00%*	*5*		*1.50%*		*1,70%*		*1,80%*								
	Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM	*Persentase pertambahan tenaga manajer UMKM*	*1,00%*	*1,00%*	*170,06*	*1,00%*	*187,52*	*1,00%*	*205,94*	*1,70%*	*1.1.787,8*						*565,32*	
		Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM	*1,00%*	*2,00%*		*1,00%*		*2,00%*		*1,70%*								
11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase pertumbuhan UMKM										1,80%	16.48	2,00%	16,48	2,00%	32,96	
12	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan modal UMKM										3,00%	42,84	3,50%	42,84	3,50%	85.69	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern										2,00%		2,20%		2,20%		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	*Jumlah Kerjasama Perdagangan*	*25 kerjasama*	*30 kerjasama*	*8.532,37*	*30 kerjasama*	*4.143,94*	*32 kerjasama*	*4.687,78*	*33 kerjasama*	*1.901,72*						*19.265,81*	
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	*Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP*	*60,00%*	*65,00%*	*1.377,27*	*65,00%*	*1.811,14*	*75,00%*	*1.865,13*	*80%*	*1.867,72*						*6.921,28*	
13	Program Penggunaan dan Pemasaan Produk dalam Negeri	Jumlah kerjasama perdagangan										4 kerjasama	169,28	4 kerjasama	169,28	11 kerjasama	328,,64	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	*Nilai Tukar Petani (NTP)*	*100,28*	*99,23*	*452,63*	*100,44*	*221,95*	*98,95*	*181,62*	*100,73*	*39,00*						*895,22*	
	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	*Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan*	*15,00%*	*20,00%*	*124,81*			*25,00%*	*37,85*	*28,00%*	*145,39*						*308,06*	
14	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan										29,00%	10,03	30,00%	10,03	30,00%	20,06	
		Nilai Tukar Petani (NTP)										100,15		100,22		100,22	-	
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	*Produktivitas Padi*	*5,30 ton/ha*	*5,46 ton/ha*	*906,53*	*5,36 ton/ha*	*932,06*	*5,13 ton/ha*	*611,20*	*5,69 ton/ha*	*431,30*						*2.881,43*	DINAS PERTANIAN*)
		Produktivitas Cabe	*9,00 ton/ha*	*5,3 ton/ha*		*5,5 ton/ha*		*6,5 ton/ha*		*11 ton/ha*								
		Produktivitas Bawang	*10,00 ton/ha*	*11,32 ton/ha*		*5,3 ton/ha*		*6,5 ton/ha*		*13 ton/ha*								
		Produktivitas Kakao	*1,00 ton/ha*	*0,97 ton/ha*		*0,96 ton/ha*		*0,91 ton/ha*		*1,33 ton/ha*								
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	*Jumlah Populasi Sapi (ekor)*	*5510 ton/ha*	*5707*	*583,18*	*5756 ton/ha*	*2.447,55*	*5849 ton/ha*	*4.991,53*	*5962 ton/ha*	*546.48*						*8.598,75*	
		Jumlah Produksi Sapi Konsumsi (ton)	*922 ton*	*923 ton*		*914 ton*		*1091 ton*		*1036 ton*								
15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi										5,17 ton/ha		5,18 ton/ha		5,18 ton/ha		
		Produktivitas bawang merah										8 ton/ha	981.53	9 ton/ha	981.53	9 ton/ha	1.963,06	
		Produktivitas Cabe										6,84 ton/ha		6,94 ton/ha		6,94 ton/ha		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Produktivitas kakao										0,95 ton/ha		0,96 ton/ha		0,96 ton/ha		
		Produktivitas jagung										7,77 ton/ha		7,93 ton/ha		7,93 ton/ha		
		populasi sapi										5992 ekor		6025 ekor		6025 ekor		
		Jumlah kelahiran sapi										800 ekor		820 ekor		820 ekor		
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	*Produksi padi*	*37.402 ton*	*41150 ton*	*1.202,74*	*41515 ton*	*3.151,95*	*39800 ton*	*1.309,72*	*40517 ton*	*1.334,89*						*6.999,31*	
		Produksi cabe	*973,90 ton*	*606 ton*		*892 ton*		*897,6 ton*		*985 ton*								
		Produksi bawang	-	*110 ton*		*140 ton*		*211,5 ton*		*400 ton*								
		Produksi Kakao	*1092 ton*	*950 ton*		*1045 ton*		*2002,24 ton*		*1100 ton*								
16	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produksi padi										41000 ton	113,99	41200 ton	113,99	41200 ton	227,88	
		Produksi bawang merah										215 ton		220 ton		220 ton		
		Produksi cabe										900 ton		905 ton		905 ton		
		Produksi kakao										1,105 ton		1,110 ton		1,110 ton		
		Produksi jagung										2,942 ton		3003 ton		3003 ton		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	*Persentase angka kematian ternak*	*0,45%*	*0,16*	*333,35*	*0,21*	*273,70*	*0,22*	*657,.88*	*0,35%*	*250,48*						*1.515,43*	
	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	*Persentase Fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan*	*20,00%*	*29*	*640,13*	*30*	*636,21*	*31*	*952,33*	*32%*	*532,15*						*2.760,84*	
17	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kematian ternak										0,3%	1.262,28	0,3	1.262,28	0,3	2524,57	
		Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan										34%		35%		35%		
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	*Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan*	*1 kali*	*1 kali*	*33,28*	*1 kali*	*51,96*	*1 kali*	*16,95*								*102.21*	
18	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan										1 kali	19.99	2 kali	19,99	4 kali	39,99	
19	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh pemko										100,00%	62,99	100,00%	62,99	100,00%	125,99	**DP3A P2KB**

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		payakumbuh																
	Program keluarga berencana	*unmeet need*	*11,85*	*14,29*	*1.614.6*	*15,90*	*2.328,02*	*13,22*	*2.092,64*	*11,06*	*2.379,10*						*8.414,48*	
20	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmeet need										10,92		10,87		10,87		
		Cakupan peserta KB aktif										61,84%	2.292,16	62,94%	2.292,16	62,94%	4.584.33	
		Jumlah Peserta KB Baru (PB)										2284		2170		2170		
	Program pengembangan model operasional BKB, Posyandu, PAUD	*Persentase posyandu dengan stata mandiri*	*57,00%*	*59,00%*	*764.67*	*65,00%*	*677.90*	*70,00%*	*589.00*	*70,00%*	*555.25*						*2.586.83*	
21	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rata- rata Usia Perkawinan										22, 4 tahun	51,13	22,5 tahun	51.13	22,5 tahun	102.26	
		Jumlah Kelompok PIK-Remaja sekolah dan luar sekolah yang aktif										29 kelompok		30 kelompok		30 kelompok		
		Persentase BKB aktif										65,00%		65,00%		65,00%		
		Persentase UPPKS Aktif										53,00%		54,00%		54,00%		
		Persentase BKL aktif										81,00%		83,00%		83,00%		
	Program perluasan & peningkatan sambu-ngan rumah (SR)	*Persentase rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan*	*91,61%*	*93,32%*	*-*	*95,57%*	*754.8*	*94,46%*	*2.135,10*	*97,39%*	*0*						*2.899,99*	
	Program Pengemba-ngan Kinerja, Pengelolaan Air Minum dan Limbah	*Persentase rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan*	*91,61%*	*93,32%*	*559.65*	*95,57%*	*723,67*	*94,46%*	*886,71*	*97,39%*	*957.92*						*3.127,67*	
22	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan										96,94	1.914,03	97,22	1.914,03	97,22	3.828.06	DINAS PUPR*)
	Program Pembangunan Fasilitas Umum	*Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum perkotaan*	*66,66%*	*66,67%*	*-*	*66,67%*	*-*	*68,00%*	*6.795.11*	*69,84%*	*11.234.53*						*18.029.64*	
23	Program penataan bangunan gedung	Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum perkotaan										71,39%		71,98%		71,98%		
		Persentase penyediaan sarana perkantoran tertentu yang representatif										78,03%	18.466,85	79,38%	18.466,85	79,38%	36.933,7	
		Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif										79,25%		83,15%		83,15%		
	Program Pembangu-nan	*Panjang jalan lingkung yang*	*2.503 m*	*3303m*	*2.168.03*	*3903m*	*172,55*	*9.938,81m*	*7.720.8*	*3.332,14*	*3.079.74*						*13.141,1*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Infrastruktur Perdesaan	*dibangun*								*m*							*6*	
24	Program pengembangan pemukiman	Persentase jalan lingkung dengan kondisi baik										42%	3.910,81	45%	3.910,81	45%	7.344,12	
	Program Pembangu-nan saluran drainasi/ gorong-gorong	*persentase jalan kota yang memiliki drainase*	*42,17%*	*51,86%*	*11.783.17*	*54,74%*	*13.983.17*	*58,95%*	*14.676.94*	*61,24%*	*7.080.96*						*47.524.69*	
25	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase jalan kota yang memiliki drainase										62,91%	10.985,83	64,44%	10.985,83	64,44%	21.971,66	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha*	*57 orang*	*57 orang*	*390,65*	*57 orang*	*1.070,92*	*60 orang*	*338,51*	*96 orang*	*3,41*						*1.803,50*	**DINAS NAKER PERIN**
		Jumlah tenaga kerja yg diserap wirausaha	*86 orang*	*86 orang*		*86 orang*		*88 orang*		*143 orang*								
26	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Jumlah Tenaga Kerja Yang Berwirausaha										25 org	73,15	50 orang	73,15	50 orang	146,30	
		2. Jumlah Tenaga Kerja Yang Diserap Wirausaha										45 org		75 orang		75 orang		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	*Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan*	*160 orang*	*160 orang*	*777,13*	*160 orang*	*1.472,92*	*170 orang*	*881,85*	*219 orang*	*643,32*						*3.775,23*	
27	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan										239 orang	114,59	261 orang	114,59		229,17	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	*Jumlah penurunan angka pemutusan hubungan kerja*	*8 orang*	*8 orang*	*24,52*	*8 orang*	*66,28*	*18 orang*	*53,15*	*34 orang*	*26,35*						*2.407,32*	
		Jumlah Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan								*5 kasus*								
28	Program Hubungan Industrial	Jumlah Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan										4 kasus	21.62	3 kasus	21.62	12 kasus	43,24	
	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	*Persentase peluang investasi yang telah divalidasi*	*20,00%*	*22,00%*	*471,27*	*22,00%*	*203,4*	*25,00%*	*75,61*	*28,00%*	*18,99*						*766,29*	**DINAS PMD PTSP*)**
29	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi										28,00%	326,12	29,00%	326,12	29,00%	652,24	
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	*jumlah kerjasama investasi*	*4 kerjasama*	*8 kerjasama*	*127,02*	*8 kerjasama*	*132,35*	*8 kerjasama*	*33.6*	*1 kerjasama*	*45.8*						*338,81*	
		jumlah promosi investasi	*2 kali*	*2 kali*		*2 kali*		*3 kali*		*2 kali*								

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	*4 orang*	-		*1 orang*		*2 orang*		-								
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	*Jumlah investor*	*327 investor*	*496 investor*	*354,07*	*766 investor*	*195,27*	*936 investor*	*19.07*	*1.151 investor*	*30.1*						*598,6*	
30	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah promosi investasi										1 kali	39,99	1 kali	39,99	11 kali	79,99	
31	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kerjasama investasi										1 kerjasama	52,20	1 kerjasama	52,20	27 kerjasama	104,40	
		Jumlah investor										1.839 investor		2.000 investor		2.000 investor		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga)*	*Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah*	*127 medali*	*24 medali*	*4.052,93*	*145 medali*	*4.751,34*	*30 medali*	*5.282,34*	*155 medali*	*688,10*						*14.774,73*	
32	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan*)	Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah										33 medali	12.104,96	170 medali	12.104,96	557 medali	24.209,92	
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik										87,00%		90,00%		90,00%		
		Jumlah sapras olah raga yang dibangun										3 buah		2 buah		13 buah		
		Jumlah Penyelenggraan event olah raga rekreasi										8 event		9 event		30 event		
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	*Persentase pemuda yang berwirausaha*	*na*	*60,00%*	*36,48*	*61*	*631,73*	*63,00%*	*895,41*	*64,00%*	*56,41*						*1.620,05*	
33	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Peringkat pramuka tingkat provinsi										2	208,14	2	208,14	2	416,28	
34	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional										2 orang	605.47	2 orang	605.47	8 orang	1.210,95	
		Persentase pemuda yang berwirausaha										65,00%		65,00%		65,00%		
		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif										27 buah		30 buah		30 buah		
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata)(*	*Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik*	*32,50%*	*35%*	*3.593.09*	*35,00%*	*6.120.51*	*37,00%*	*4.791.10*	*40,00%*	*4.630.55*						*19.135.26*	
		Jumlah Pengembangan	*1 ow*	*1 ow*		*1 ow*		*1 ow*		*1 ow*								

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Destinasi Pariwisata																
35	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata*)	Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik										45,00%	1.270,53	50,00%	1.270,53	50,00%	2.541,07	
		Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata										1 ow		1 ow		7 ow		
	Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	*Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga zakat/wakaf*	*2,50%*	*3,00%*	*1.419,33*	*3,20%*	*545,99*	*4,78%*	*425,58*	*4,20%*	*170,50*						*2.561,41*	
		Persentase masjid yang dikelola secara optimal	*40,00%*	*50,00%*		*55,00%*		*60,00%*		*65,00%*								
36	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD Kota Payakumbuh										3,1500	2.442.78	3,1600	2.442.78	3,1600	4.885,57	SETDAKO*)
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik										100%		100%		100%		
		Persentase masalah kewilayahan yang ditangani										90%		100%		100%		
		Persentase mesjid yang berfungsi secara optimal										80%		85%		85%		
		Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif										77%		80%		80%		
		Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif										80%		100%		100%		
		Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf										80%		85%		85%		
		Jumlah sekolah/ madrasah yang meningkat strata UKS/M pada tahun n										4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah		
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan										100%		100%		100%		
		Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani										75%		80%		80%		
		Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa										80%		85%		85%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan ke masyarakat										100%		100%		100%		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*	*100%*	*1.540.12*			*100%*	*1.462.45*	*100%*	*2.529.45*						*5.532.03*	**Kecamatan Payakumbuh Barat*)**
		Nilai IKM	*82,19*	*82,17*				*87,11*		*89,00*								
37	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan										65%	2.321,88	70%	2.321,88	70%	4.643,77 -	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif										100%		100%		80%		
		IKM Kelurahan										90		91		91		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100,00%*	-	*1.127,83*		-	*100,00%*		*100,00%*	*1.423,52*						*2.551,36*	**Kecamaan Payakumbuh Timur*)**
		Nilai IKM	*79,42*	*81,00*		*83,00*		*85,23*		*87,00*								
38	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan										65%	1.242,99	70%	1.242,99	70%	2.485,99	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif										100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan										90		91		91		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100,00%*	*100,00%*	*1.583,64*					*100,00%*	*1.487,58*						*3.071,22*	**Kecamatan Pyakumbuh Utara*)**
		Nilai IKM	*85,72*	*86,19*						*89,00*								
39	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan										65%	1.639,72	70%	1.639,72	70%	3.279,44	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif										100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan										90		91		91		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	*Persentase pengaduan* pelayanan *masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*	*100%*	*660.13*		-			*100%*	*863.65*						*1.523.78*	**Kecamatan Payakumbuh Selatan*)**
		Nilai IKM	*79,5*	*80,89*						*87,08*								
40	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan										65%	921,77	70%	921,77	70%	1.843,54	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp(Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif										100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan										89		90		90		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100,00%*	-	*436,05*	-		*100,00%*		*100,00%*	*1.009.98*						*1.446.03*	**Kecamatan Lamposi Tigo Nagori*)**
		Nilai IKM	*72,48*	*79,94*		*84,68*		*84,85*		*84,00*								
41	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan										65%	879.75	70%	879.75	70%	1.759.51	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif										100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan										86		89		89		
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	*Cakupan kepemilikan kartu keluarga*	*90,00%*	*100,00%*		*100,00%*		*100,00%*		*100,00%*								
		Cakupan kepemilikan KTP-el	*80,00%*	*96,70%*		*95,23%*		*98,96%*		*98,96%*								
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 1-18 tahun	*69,00%*	*86,10%*		*91,01%*		*94,52%*		*94,52%*								
		Cakupan penertiban ate kematian	*24,00%*	*36,00%*	*1.362.07*	*50,17%*	*1.251.09*	*70,53%*	*1.438.29*	*47,00%*	*1.231.46*						*5.282,93*	**Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil*)**
		Persentase penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	*80,00%*	*85,00%*		*100%*		*100%*		*100%*								
		Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (SOP)	*1 hari*	*1 hari*		*1 hari*		*1 hari*		*1 hari*								
42	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun										91%		92%		92%		
		Cakupan penerbitan akta kematian										52%		62%		62%		
		Persentase penyelesaian penertiban dokumen tepat waktu										100%	465.29	100%	465.29	100%	920,58	
		Rata-rata lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen (SOP) pencatatan sipil										1 hari		1 hari		1 hari		

*Ket : *) Crosscutting*

6.2. Misi 2 :

Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi 2 ini sebelum dan setelah perubahan adalah :

Tabel VI.10
Tujuan Misi 2 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Sasaran yang akan dicapai dalam misi 2 ini ada 3 sasaran sebelum perubahan menjadi 2 sasaran setelah perubahan yaitu :

Tabel VI. 11
Sasaran Misi 2 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
1	Meningkatnya produktifitas sektor strategis	Meningkatnya produktifitas sektor strategis
2	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh
3	Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	-

Peningkatan pemerataan dan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut hendaklah memperhatikan antara lain; kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, kemampuan daya saing daerah serta infrastruktur yang tersedia. Kondisi terjadinya bencana pandemi covid-19 yang tergolong ke dalam bencana non alam yang mengakibatkan krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis. Hasil proyeksi provinsi Sumatera Barat pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar 1,18 %.

Peranan Pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat yaitu; (1) Fungsi alokasi terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, (2) Peranan distribusi dan peranan stabilisasi. Di samping itu perlu upaya bersama antara pemerintah daerah bersama masyarakatnya mengelola semua potensi sumber daya yang tersedia dengan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini perlu diwujudkan guna mencapai misi 2 yaitu; 'Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan dengan memunculkan gerakan ekonomi bersama".



Gambar VI.1.
Sektor-sektor ekonomi strategis Kota Payakumbuh
yang akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi.

6.2.1. Strategi untuk Misi 2

Untuk mencapai sasaran pada Misi 2, strategi sebelum dan sesudah perubahan RPJMD sebagai berikut :

Tabel VI. 12
Strategi Misi 2 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Strategi Sebelum Perubahan	Strategi Setelah Perubahan
1	Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;	Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
2	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;	Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;
3	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal;	Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;
4	Menumbuhkembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya;	Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya;
5	Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM;	Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM;
6	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi
7	Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan Koperasi	Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan Koperasi

Terkait dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi tersebut untuk dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan adalah sebagaimana pada Tabel VI.13.

Tabel VI.13
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Startegi Pada Misi 2 Setelah Perubahan

Visi : **Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang**		
Misi : **Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis	1. Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
		2. Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis;
		3. Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;
		4. Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya;
	2. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	5. Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi;
		6. Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM;
		7. Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan Koperasi

6.2.2. Arah Kebijakan untuk Misi 2

Dalam rangka mengimplementasikan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun, diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Misi 2 sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat Tabel VI.14 dan Arah Kebijakan setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel VI.15.

Tabel VI.14
Arah Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Arah Kebijakan Sebelum Perubahan	Arah Kebijakan Setelah Perubahan
1.	Peningkatan volume perdagangan antar daerah	Peningkatan volume perdagangan antar daerah
2.	Peningkatan transaksi perdagangan	Peningkatan transaksi perdagangan
3.	Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa;	Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa;
4.	Penguatan kelembagaan petani & Pening katan kapasitas sumberdaya pertanian	Penguatan kelembagaan petani & Pening katan kapasitas sumberdaya pertanian
5.	Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis;	Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis;
6.	Penerapan sistim pertanian berkelanjutan.	Penerapan sistim pertanian berkelanjutan.
7.	Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masya-rakat yg terintegrasi;	Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yg terintegrasi;
8.	Peningkatan kemam puan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk;	Peningkatan kemam puan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk;
9.	Peningkatan kemam puan manajerial dan SDM pelaku industri;	Peningkatan kemam puan manajerial dan SDM pelaku industri;
10.	Peningkatan penerapan teknologi industri.	Peningkatan penerapan teknologi industri.
11.	Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata;	Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata;
12.	Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata;	Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata;
13.	Mengembangkan paket destinasi wisata	Mengembangkan paket destinasi wisata
14.	Menyelenggarakan Event-event untuk menarik wisatawan	Menyelenggarakan Event-event untuk menarik wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan
15.	Pembentukan dan Pengembangan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbu han sektor strategis;	Pembentukan dan Pengembangan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbu han sektor strategis;
16.	Menciptakan iklim investasi yang kondusif;	Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
17.	Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha.	Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha.
18.	Fasilitasi penguatan modal bagi UKM & IKM	Fasilitasi penguatan modal bagi UKM & IKM
19.	Fasilitasi pemasaran produk UMKM.	Fasilitasi pemasaran produk UMKM.
20.	Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi	Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi menyesuaikan dengan kondisi covid-19.

Tabel VI.15
Arah Kebijakan Pembangunan Pada Misi 2 Kota Payakumbuh 2018-2022
Setelah Perubahan

No	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	SASARAN 1				
1	Peningkatan transaksi perdagangan	Peningkatan volume perdagangan antar daerah	Peningkatan volume perdagangan antar daerah	Peningkatan volume perdagangan antar daerah	Peningkatan volume perdagangan antar daerah
2	Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa	Peningkatan transaksi perdagangan	Peningkatan transaksi perdagangan	Peningkatan transaksi perdagangan	Peningkatan transaksi perdagangan
3	Penguatan kelemba- gaan petani & Pening katan kapasitas sumberdaya pertanian	Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa;	Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa;	Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa;	Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa;
4	Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis;	Penguatan kelemba- gaan petani & Pening katan kapasitas sumberdaya pertanian	Penguatan kelemba- gaan petani & Pening katan kapasitas sumberdaya pertanian	Penguatan kelemba- gaan petani & Pening katan kapasitas sumberdaya pertanian	Penguatan kelemba- gaan petani & Pening katan kapasitas sumberdaya pertanian
5	Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegia- tan ekonomi masyarakat yg terintegrasi	Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis;	Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis;	Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis;	Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis;
6	Peningkatan kemampuan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk;	Penerapan sistim pertanian berkelanjutan.	Penerapan sistim pertanian berkelanjutan.	Penerapan sistim pertanian berkelanjutan.	Penerapan sistim pertanian berkelanjutan.
7	Peningkatan kemampuan manajerial dan SDM pelaku industri;	Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegia-tan ekonomi masyarakat yg terintegrasi;	Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yg terintegrasi;	Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yg terintegrasi;	Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yg terintegrasi;
8	Peningkatan penerapan teknologi industri.	Peningkatan kemam puan industri dalam penerapan standari sasi mutu produk;	Peningkatan kemam puan industri dalam penerapan standari sasi mutu produk;	Peningkatan kemam puan industri dalam penerapan standari sasi mutu produk;	Peningkatan kemam puan industri dalam penerapan standari sasi mutu produk;
9	Peningkatan kualitas sarana	Peningkatan kemam puan	Peningkatan kemam puan	Peningkatan kemam puan	Peningkatan kemam puan

No	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	prasarana pariwisata;	manajerial dan SDM pelaku industri;	manajerial dan SDM pelaku industri;	manajerial dan SDM pelaku industri;	manajerial dan SDM pelaku industri;
10	Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata;	Peningkatan penerapan teknologi industri.	Peningkatan penerapan teknologi industri.	Peningkatan penerapan teknologi industri.	Peningkatan penerapan teknologi industri.
11	Mengembangkan paket-paket destinasi wisata.	Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata;	Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata;	Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata;	Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata;
12	-	Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata;	Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata;	Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata;	Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata;
13	-	Mengembangkan paket destinasi wisata	Mengembangkan paket destinasi wisata	Mengembangkan paket destinasi wisata	Mengembangkan paket destinasi wisata
14	Menyelenggarakan Event-event untuk menarik wisatawan	Menyelenggarakan Event-event untuk menarik wisatawan	Menyelenggarakan Event-event untuk menarik wisatawan	Menyelenggarakan Event-event untuk menarik wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan	Menyelenggarakan Event-event untuk menarik wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan
	SASARAN 2				
1.	Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbu han sektor strategis;	Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbu han sektor strategis;	Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbu han sektor strategis;	Pembentukan dan Pengembangan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbu han sektor strategis;	Pembentukan dan Pengembangan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbu han sektor strategis;
2.	Menciptakan iklim investasi yang kondusif;	Menciptakan iklim investasi yang kondusif;	Menciptakan iklim investasi yang kondusif;	Menciptakan iklim investasi yang kondusif;	Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
3.	Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha.	Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha.	Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha.	Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha.	Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha.
4.	Fasilitasi penguatan modal bagi UKM & IKM	Fasilitasi penguatan modal bagi UKM & IKM	Fasilitasi penguatan modal bagi UKM & IKM	Fasilitasi penguatan modal bagi UKM & IKM	Fasilitasi penguatan modal bagi UKM & IKM
5.	Fasilitasi pemasaran produk UMKM.	Fasilitasi pemasaran produk UMKM.	Fasilitasi pemasaran produk UMKM.	Fasilitasi pemasaran produk UMKM.	Fasilitasi pemasaran produk UMKM.
6.				Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi	Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi

No	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
				menyesuaikan dengan kondisi covid-19.	menyesuaikan dengan kondisi covid-19.
	SASARAN 3				
7.	Meningkatkan Pembi-naan terhadap koperasi.	Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi	Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi		

6.2.3. Program Pembangunan Daerah Misi 2

Program-program prioritas untuk mewujudkan misi 2 adalah:

Tabel VI.16
Program Prioritas Pencapaian Sasaran Pada Misi 2

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 2 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 2 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 2. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan; 3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1. Program standarisasi dan perlindungan konsumen 2. Program pengembangan ekspor 3. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 4. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan 5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 6. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
5. Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif; 6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; 8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;	7. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm) 8. Program pengembangan usaha, mikro, kecil dan menengah 9. Program pendidikan dan latihan perkoperasian; 10. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi; 11. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian; 10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 11. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan; 13. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan; 14. Program Pencegahan Dan	12. Program Penyuluhan Pertanian 13. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 14. Program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian 15. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 16. Program Perizinan Usaha Pertanian; 17. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 2 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 2 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Penanggulangan Penyakit Ternak; 15. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan;	18. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; 19. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
17. Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	20. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 21. Program penanganan kerawanan pangan; 22. Program pengawasan keamanan pangan;
18. Program Penataan Struktur Industri; 19. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Produksi; 20. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 21. Program peningkatan kemampuan teknologi industri; 22. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial;	23. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 24. Program Pengelolan Sistem Informasi Industri Nasional 25. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
23. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 24. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 25. Program Pengembangan Kemitraan; 26. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif;	26. Program Pemasaran Pariwisata 27. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 28. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
27. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;	29. Program Pengembangan Kebudayaan;
28. Program Pengembangan Olah Raga Rekreasi;	-
29. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 30. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; 31. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah; 32. Program Optimalisasi Pelayanan Publik;	30. Program Promosi Penanaman Modal 31. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 32. Program Pelayanan Penanaman Modal; 33. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 34. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
33. Program Perencanaan Penataan ruang;	35. Program peyelenggaraan penataan ruang
34. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.	36. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
	37. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Keterkaitan antara Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel VI.17 dibawah ini :

Tabel VI.17
Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 2 Kota Payakumbuh 2017-2022 Setelah Perubahan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 90/2019
1. Mendorong peningkatan peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian melalui perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;	1. Peningkatan volume perdagangan antar daerah;	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Program pengembangan ekspor
		Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	
	2. Peningkatan transaksi perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Program standarisasi dan perlindungan konsumen Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
	3. Peningkatan kelancaran distribusi barang/ jasa	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
2. Mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian melalui peningkatan produksi hasil pertanian strategis	4. Penguatan kelembagaan petani & Peningkatan kappa sitas sumberdaya pertanian	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Program Penyuluhan Pertanian
	5. Peningkatan produktivitas komoditi pertanian strategis	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan*	
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 90/2019
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Ketersediaan & distribusi pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program penanganan kerawanan pangan
			Program pengawasan keamanan pangan
	6. Penerapan sistim pertanian pangan berkelanjutan	Program peningkatan produksi hasil pertanian / perkebunan	Program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian
3. Mendorong peningkatan kontribusi sektor industri melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal	7. Pembentukan sentra-sentra produksi IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi	Program penataan struktur industri;	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	8. Peningkatan kemampuan industri dalam penerapan standarisasi mutu produk	Program peningkatan kapasitas iptek produksi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	9. Peningkatan kemampuan manajerial & SDM pelaku industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
	10. Peningkatan penerapan teknologi industri	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Program Pengelolan Sistem Informasi Industri Nasional
		Program pengembangan sentra-sentra industri	

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 90/2019
		potensial	
4. Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya.	11. Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata;	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	12. Membangun kemitraan antar jasa usaha pariwisata;	Program pengembangan kemitraan	Program Pemasaran Pariwisata
	13. Mengembangkan paket-paket destinasi wisata.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	
	14. Menyelenggarakan event – event untuk menarik wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan	Program pengelolaan keragaman budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
		Program pengembangan olah raga rekreasi	-
		Program pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi;	15. Pembentukan BUMD untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor strategis;	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Program Promosi Penanaman Modal
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		-	Program Perekonomian Dan Pembangunan
	16. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;	Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Perencanaan Penataan ruang	Program peyelenggaraan penataan ruang

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 90/2019
		Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
	17. Meningkatkan kualitas pelayan perizinan Usaha.	Program Optimalisasi Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal
6. Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM	18. Fasilitasi penguatan modal bagi UKM, dan IKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program pengembangan usaha, mikro, kecil dan menengah
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
	19. Fasilitasi pemasaran produk UMKM	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm)
7. Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan kelembagaan Koperasi	20. Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi menyesuaikan dengan kondisi covid-19.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program pendidikan dan latihan perkoperasian Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel VI.18 dibawah ini :

Tabel VI.18

Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Untuk Misi 2 Setelah Perubahan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
Misi : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama																		
	Tujuan:Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,08 %	6,12%		6,05 %		5,92 %		1,18 %		4,18%		5,00%		5,00%		
		Nilai Koefisien Gini	0,340	0,303		0,303		0,280		0,276		0,273		0,271		0,271		
	Sasaran 1	**Meningkatkan Produktivitas Sektor Strategis**																
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	23,92%	24,48%		25,15%		25,13%		24,07%		24,12%		24,17%		24,17%		
		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	5,64%	5,67%		5,35%		5,60%		6,08%		6,11%		6,12%		6,12%		
		Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	7,39%	7,04%		6,75%		6,35%		7,45%		7,46%		7,47%		7,47%		
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	7,5%	10,80%		11,28%		5,11%		5,50%		6,70%		7,50%		7,50%		
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	*Nilai Tukar Petani (NTP)*	*100,28*	*99,23*	*452,63*	*100,44*	*221,95*	*98,95*	*181,62*	*100,73*	*39,00*						*895,22*	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	*Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan*	*15,00%*	*20,00%*	*124.81*	-	-	*25,00%*	*37,85*	*28,00%*	*145,39*						*308,06*	
1	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan										29,00%	10.03	30,00%	10.03	30,00%	20.06	
		Nilai Tukar Petani (NTP)										100,15		100,22		100,22		
	Program peningkatan	*Produktivitas Padi*	*5,30 ton/ha*	*5,46 ton/ha*	*906,53*	*5,36 ton/ha*	*932,07*	*5,13 ton/ha*	*611,20*	*5,69 ton/ha*	*431,30*						*2.881,11*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
	penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	*Produktivitas Cabe*	*9,00 ton/ha*	*5,3 ton/ha*		*5,5 ton/ha*		*6,5 ton/ha*		*11 ton/ha*								
		Produktivitas Bawang	*10,00 ton/ha*	*11,32 ton/ha*		*5,3 ton/ha*		*6,5 ton/ha*		*13 ton/ha*								
		Produktivitas Kakao	*1,00 ton/ha*	*0,97 ton/ha*		*0,96 ton/ha*		*0,91 ton/ha*		*1,33 ton/ha*								DINAS PERTANIAN
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	*Jumlah Populasi Sapi (ekor)*	5510 *ekor*	*5707 ekor*	*583,18*	*5756 ekor*	*2.477,55*	*5849 ekor*	*4.991,53*	*5962 ekor*	*546,49*							*8.598,75*	
		Jumlah Produksi Sapi Konsumsi (ton)	*922 ton*	*923 ton*		*914 ton*		*1091 ton*		*1036 ton*								
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi										5,17 ton/ha	981,53	5,18 ton/ha	981,53	5,18 ton/ha	1.963,06	
		Produktivitas bawang merah										8 ton/ha		9 ton/ha		9 ton/ha		
		Produktivitas Cabe										6,84 ton/ha		6,94 ton/ha		6,94 ton/ha		
		Produktivitas kakao										0,95 ton/ha		0,96 ton/ha		0,96 ton/ha		
		Produktivitas jagung										7,77 ton/ha		7,93 ton/ha		7,93 ton/ha		
		populasi sapi										5992 ekor		6025 ekor		6025 ekor		
		Jumlah kelahiran sapi										800 ekor		820 ekor		820 ekor		
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	*Produksi padi*	*37.402 ton*	*41.150 ton*	*1.202,74*	*41.515 ton*	*3.151,95*	*39.800 ton*	*1.309,72*	*40.517 ton*	*1.334,89*							*6.999,3*	
		Produksi bawang	-	*110 ton*		*140 ton*		*211,5 ton*		*400 ton*								
		Produksi cabe	*973,90 ton*	*606 ton*		*892 ton*		*897,6 ton*		*985 ton*								
		Produksi kakao	*1092 ton*	*950 ton*		*1045 ton*		*2002,24 ton*		*1100 ton*								
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produksi padi										41.000 ton	113,99	41.200 ton	113,99	41.200 ton	227,99	
		Produksi bawang merah										215 ton		220 ton		220 ton		
		Produksi cabe										900 ton		905 ton		905 ton		
		Produksi kakao										1,105 ton		1,110 ton		1,110 ton		
		Produksi jagung										2,900 ton		2.950 ton		2.950 ton		
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian										57,31%	444,14	58,50%	444,14	58,50%	888,29	
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	*Persentase angka kematian ternak*	*0,45%*	*0,16%*	*333,35*	*0,21%*	*273,71*	*0,22 %*	*657,88*	*0,35%*	*250,48*							*1.515,43*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								Penanggung Jawab PD
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	*Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi Peternakan*	*20,00%*	*29,00%*	*640,13*	*30,00%*	*636,21*	*31,00%*	*952,33*	*32,00%*	*532,15*						*2.760,84*	
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyrakat Veteriner	Persentase angka kematian ternak										0,3%	1.262,28	0,3%	1.262,28	0,3%	2.524,57	
		Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan										34%		35%		35%		
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	*Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya pertanian*	*35,00%*	*41,00%*	*164,09*	*43,00%*	*114,73*	*45,00%*	*43,52*	*51,00%*	*68,28*						*390,64*	
6	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yg menerapkan teknologi anjuran										55	226,78	60	226,78	108,00%	453,57	
	Program pengembangan budidaya perikanan	*Produksi ikan konsumsi*	*433,27 ton*	*485,27 ton*	*1.003,51*	*501.65 ton*	*504,67*	*520.11 ton*	*579,51*	*540 ton*	*352,78*						*2.440,47*	
	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	*Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan*	*73.33%*	*50,00%*	*127,24*	*56,00%*	*181,46*	*65,00 %*	*104,85*	*83,87 %*	*34,24*						*447,79*	
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan										70%	402,75	72%	402,75	72%	805,51	
		Persentase kematian ikan										5%		5%		5%		
		Jumlah Produksi ikan konsumsi										550 Ton		560 ton		560 ton		
		Jumlah Angka konsumsi ikan										34 kg/ kapita/thn		35 kg/ kapita/thn		35 kg/ kapita/thn		
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	*Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan*	*1 kali*	*1 kali*	*33,29*	*1 kali*	*51,96*	*1 kali*	*16,95*								*102,21*	
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan										1 kali	19,99	2 kali	19,99	3 kali	39.99	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	*Persentase bahan pangan yang telah memenuhi angka kecukupan energy (AKE*	*55,00%*	*67,00%*		*77,00%*			*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase cadangan pangan yang tersedia	*7,00%*	*19,00%*		*20,5%*												
		Cakupan supply lembaga distribusi pangan	*2,00%*	*2,00%*		*4,00%*												
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	*22,00%*	*25,00%*	*915,12*	*22,00%*	*833,65*										*1.748,77*	
		Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar	*NA*	*NA*		*40,00%*												
		Persentase penurunan konsumsi beras	*NA*	*NA*		*1,00%*												
		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	*60,00%*	*75,00%*		*91,50%*												
	Program Ketersediaan dan distribusi pangan	*Persentase bahan pangan yg telah me menuhi Angka Kecukupan Energi (AKE)*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*88,00%*	*130,80*	*88,00%*	*105,32*						*236,13*	
		Persentase cadangan pangan yang tersedia	*-*	*-*		*-*		*21,00%*		*35,00%*								
		Cakupan supply lembaga distribusi pangan	*-*	*-*		*-*		*30,00%*		*10,00%*								
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	*-*	*-*		*-*		*33,00%*		*33,00%*								
	Program Diversifikasi dan keamanan pangan	*Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar*	*-*					*45,00%*	*759,22*	*50,00%*	*83,58*						*842,80*	
		Persentase penurunan konsumsi beras	*-*					*1,00%*		*1,00%*								
		Persentase bahan pangan aman konsumsi	*-*					*80,09%*		*85,00*								

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
9	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan yang tersedia										40,00%	746,86	50,00%	746,86	50,00%	1.493,72	
		Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE										54,00%		60,00%		60,00%		
		Persentase penurunan konsumsi beras										1,00%		1,00%		1,00%		
		Cakupan supply lembaga distribusi pangan										12,00%		15,00%		15,00%		
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan										50,00%		60,00%		160,00%		
10	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase bahan pangan yg telah memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE)	-	-	-	-	-	-	-			88,00%	16,51	88,00%	16,51	88,00%	33,03	
11	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase bahan pangan yang aman di konsumsi										87,00%	57,22	90,00%	57,22	90,00%	114,45	
	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	*Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga*	*50,00 %*	*55,00%*	*339.62*	*55,00 %*	*622.28*	*65,00 %*	*1.037.43*	*70,00 %*	*99.68*						*2.099.02*	DINAS KOPERASI & UKM
		Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan	*2,00%*	*3,00%*		*3,00%*		*4,00%*		*4,50%*								
12	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga										20%	62.32	20%	62.3	20,00%	124.6	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	*Jumlah Kerjasama Perdagangan*	*25 kerja sama*	*30 kerjasama*	*8.532,37*	*30 kerja sama*	*4.143,95*	*32 kerja sama*	*4.687,78*	*33 kerjasama*	*1.901,73*						*19.265,83*	
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	*Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP*	*60,00 %*	*65,00%*	*1.377,28*	*65,00 %*	*1.811,14*	*75,00 %*	*1.865,14*	*80,00 %*	*1.867,72*						*6.921,28*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
13	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah kerjasama perdagangan										4 kerjasama	164.28	4 kerjasama	164.28	11 kerjasama	328.56	
14	Program Pengembangan Ekspor	Volume Perdagangan Luar Negeri											-	6 ton	150	6 ton	150	
15	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha										20%	19,68	25%	19,68	25%	39,36	
16	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan										5%	34,37	5,50%	34,37	5,50%	68,74	
17	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP										85%	720,83	90%	570,82	90%	1.291,66	
		Persentase sarana prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik										80%		80%		80%	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	*Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk*	*1,50 %*	*1,50%*	*473.34*	*1,50 %*	*379.07*	*2,00 %*	*228.2*	*2,25 %*	*93.46*						*1.174,13*	DINAS TENAGA KERJA & PERINDUSTRIAN
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	*Persentase promosi produk yang memperoleh umpan balik*	*30,00 %*	*40,00%*	*64.04*	*40,00 %*	*2.07*		-	*45,00 %*	-						*66,12*	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	*Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna*	*3,00 %*	*3,00%*	*140.79*	*3,00 %*	*736.16*	*3,00 %*	*221.22*	*3,25 %*	*48.24*						*1.146,43*	
18	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna										3,30%	6.179,13	3,35%	6.159,13	3,35%	12.338,26	
		Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata										40%		60%		60%	-	
	Program Penataan Struktur Industri	*Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat*	*1 buah*	*2 buah*	*9.231,03*	*1 buah*	*6.676,40*	*1 buah*	*3.841,26*	*1 buah*	*1.601,31*						*21.350,02*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
		produk																
19	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk										2,50%	37,2	2,75%	37,2	2,75%	74,46	
		Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk										1 bh		1 bh		1 bh	-	
	Program Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	*Persentase sentra/klaster industri yang tertata*	-					*40%*	*40.43*	*20,00 %*	-						*40.43*	
20	Program Pengelolan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah izin usaha yang diawasi dari jumlah izin yang dikeluarkan 2 tahun sebelumnya										0	-	25IUI	20	25 IUI	20	
	Program pengembangan pemasaran Pariwisata	*Persentase promosi kepariwisa-taan yang dilaksanakan*	*40,00 %*	*50,00%*	*1.101,3*	*50,00 %*	*1.195,51*	*24,00 %*	*1.153,33*	*65,00 %*	*165,50*						*3.615, 63*	DINAS PARIWISATA PEMUDA& OLAH RAGA
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	*1,20 hari*	*1,20 hari*		*1,25 hari*		*1,27 hari*		*1,30 hari*							-	
	Program Pengembangan Kemitraan	*Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa Pariwisata*	*3 kerja sama*	*3 kerjasama*	*67,64*	*3 kerja sama*	*88,70*	*2 kerja sama*	*529,69*	*5 kerjas ama*	*333,04*						*1.019, 08*	
21	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan									-	75,00%	162,99	80,00%	162,99	80,00%	325,99	
		Rata-rata lama tingggal wisatawan										1,40 hari		1,50 hari		1,50 hari		
		Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa Pariwisata										6 kerjasama		7 kerjasam a		7 kerjasa ma		
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	*Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik*	*32,50 %*	*35%*	*3.593,0 9*	*35,00 %*	*6.120,51*	*37,00 %*	*4.791,10*	*40,00 %*	*4.630,5 5*						*19.135 ,26*	
		Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata	*1 ow*	*1 ow*		*1 ow*		*1 ow*		*1 ow*								
22	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase objek wisata unggulan dgn kondisi baik										45,00%	1.270,54	50,00%	1.270,54	50,00%	2.541,08	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
		Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata										1 ow		1 ow		7 ow		
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	*Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitas*	-	-	-	*1 fasilitasi*	*363,16*	*1 fasilitasi*	*637,16*	*1 fasilitasi*	*22,38*						*1..022,71*	
23	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitas										1 fasilitasi	110,68	1 fasilitasi	110,68	5 fasilitasi	221,36	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya)*	*Jumlah Penyelenggaraan Festival Budaya*	*8 event*	*8 event*	*963,65*	*8 event*	*1.169,80*	*13 event*	*1.541,81*	*5 event*	*322.39*						*3.997,66*	
24	Program Pengembangan Kebudayaan*)	Jumlah penyelenggaraan festival budaya										12 event	365,44	15 event	365,44	15 event	730,87	
	Sasaran 2	**Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh**																
	Indikator Sasaran	Nilai Realisasi Investasi (Milyar)	175,70	229,30		231,50		250,60		74,40		200,90		203,80		1.190,5		
		Persentase UKM Terhadap UMKM	26,64%	27,14%		15,27%		15,49%		1,50%		2,00%		2,50%		2,50%		
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	*Jumlah kerjasama investasi*	*4 kerja sama*	*8 kerjasama*	*127,02*	*8 Kerja-sama*	*132,36*	*8 kerja-sama*	*33,60*	*1 kerja-sama*	*45,83*						*338,82*	DINAS DPMD DAN PTSP
		Jumlah promosi investasi	*2 kali*	*2 kali*		*2 kali*		*3 kali*		*2 kali*								
		Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	*4 orang*	-		*1 orang*		*2 orang*		-								
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	*Jumlah investor*	*327 investor*	*496 investor*	*354,06*	*766 investor*	*195,27*	*936 investor*	*19,07*	*1.151 investor*	*30,20*						*598,61*	
1	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah promosi investasi										1 kali	39,99	1 kali	39,99	11 kali	79,99	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor										1.839 investor	52,19	2.000 investor	52,19	2.000 investor	104,39	
		Jumlah kerjasama investasi										1 kerjasama		1 kerjasama		27 kerjasama		
	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	*Persentase peluang investasi yang telah divalidasi*	*20,00%*	*22,00%*	*471,28*	*22,00%*	*203,40*	*25%*	*72,62*	*28,00%*	*19,00*						*766,30*	
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi										28%	326,12	29%	326,12	29%	652,24	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
	Program optimalisasi pelayanan publik	*Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti*	*100%*	*100%*	*-*	*100%*	*-*	*100%*	*2.882,76*	*100%*	*1.286,93*	*-*	*-*	*-*	*-*		*4.169,68*	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penertiban dokumen perijinan dan non perijinan sesuai SOP										100%	264,40	100%	264,40	100%	528,80	
		Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti										100%		100%		100%		
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan										80%	24,99	80%	24,99	80%	49,99	
6	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan										100%	670,42	100%	670,42	100%	1.340,84	SETDAKO
		Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ										100%		100%		100%		
		Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi										100%		100%		100%		
		Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi										100%		100%		100%		
		Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral										100%		100%		100%		
		Persentase BUMD yang sehat dan menguntungkan										100%		100%		100%		
	Program Perencanaan Penataan ruang	*Jumlah advice planning yang diterbitkan*	*586 berkas*	*445 berkas*	*212,82*	*487 berkas*	*600,06*	*464 berkas*	*525,58*	*538 berkas*	*546,86*						*1.885,33*	DINAS PUPR*)
		Jumlah regulasi tata ruang yang tersedia	*1 perda*	*1 perda*		*3 perda*		*4 perda*		*5 perda*								
7	Program peyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang										35,05%	1.564,82	36,18%	1.564,82	36,18%	3.129,64	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
	Program pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup	*Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup*	*30,01%*	*40.00%*	*771,13*	*40,00%*	*874,40*	*42,22%*	*218,35*	*51,05%*	*349,35*						*2.213,25*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP*)
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup										55,03%	35,29	55,03%	35,29	55,03%	70,59	
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yg kondusif	*Persentase pertumbuhan UMKM*	*1,20%*	*100%*	*60.81*	*1,00 %*	*23.03*	*1,00 %*	*25.51*	*1,70 %*	*42.84*						*152.20*	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	*Persentase pertambahan tenaga manajer UMKM*	*1,00%*	*1,00%*	*170,06*	*1,00%*	*187,52*	*1,00%*	*205,94*	*1,70%*	*1,78*						*565.32*	
		Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM	*1,00%*	*2,00%*		*1,00%*		*2,00%*		*1,70%*								
9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase pertumbuhan UMKM										1,80%	16.48	2,00%	16.48	2,00%	32,96	
10	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan modal UMKM										3,00%	42.8	3,50%	42.8	3,50%	85,69	
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern										2,00%		2,20%		2,20%		
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	*Persentase peningkatan modal UMKM*	*2,00 %*	*15,00%*	*77.73*	*2,00 %*	*140.81*	*1,70 %*	*62.30*	*3,00 %*	*17.04*						*297.89*	
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	*1,00 %*	*5,00%*		*1,50 %*		*8,00 %*		*1,80 %*							-	
11	Program Pendidikan Dan Latihan	Persentase penambahan anggota baru koperasi										0,75%	443,9	0,75%	443,9	0,75%	887,85	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp(Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	16	18	19
	Perkoperasian	Persentase peningkatan koperasi aktif										48,25%		49,00%		49,00%		
12	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase peningkatan koperasi sehat										11,80%	14.99	11,90%	14,99	11,90%	29,99	
13	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase penurunan jumlah tunggakan										5,00%	19.99	5,00%	19,99	5,00%	39,99	

*Keterangan : *)Crosscutting*

6.3. Misi 3 : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum Yang Nyaman dan Berkelanjutan

Dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, Kota Payakumbuh tetap mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang bersih, serta menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan pencemaran air, polusi udara, penataan pembangunan yang merata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Disamping itu, Pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa terus berusaha dan berupaya untuk meningkatkan prestasi pemuda dalam berbagai bidang dan aspek, diantaranya adalah prestasi olah raga. Karena itu, pembenahan pada berbagai aspek baik itu prasarana dan sarana, infrastruktur maupun suprastruktur terus menerus dilakukan. Fasilitasi dukungan dan support secara maksimal diberikan kepada organisasi induk olah raga, begitu juga terhadap organisasi cabang olah raga. Berbagai even olah raga, baik itu antar sekolah, antar club dan antar kecamatan serta even antar kelurahan dan bahkan even antar daerah dan nasional perlu diselenggarakan secara kontiniu. Disamping itu, Pemda juga mendorong peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang bersih melalui kegiatan Olah Raga Bersepeda.

Penguatan, pengembangan dan pelestarian seni dan kebudayaan lokal, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya di Kota Payakumbuh terus digalakkan dalam rangka melestarikan, menjaga dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah untuk mempertahankan jati diri dan karakter masyarakat yang dibangun dari nilai-nilai kebudayaan daerah, yaitu budaya alam minangkabau yang religius berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang dapat berperan sebagai benteng kepribadian ditengah marak dan semakin derasnya arus informasi serta kebudayaan global. Penguatan budaya daerah dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan daerah. Pemerintah dan masyarakat Kota Payakumbuh memiliki komitmen dan tekad untuk menghidupkan aktivitas yang berakar dari tradisi lokal masyarakat Kota Payakumbuh.

Pemenuhan fasilitas umum menambah kenyamanan masyarakat Kota Payakumbuh dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari dan menarik kunjungan wisatawan ke Kota Payakumbuh. Normalisasi sungai membuat perubahan besar terhadap Kota Payakumbuh, selain untuk penataan sungai juga dilengkapi dengan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik menyediakan fasilitas olahraga dan pariwisata.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini sebelum dan setelah perubahan sebagaimana tabel VI.19

Tabel VI.19
Tujuan Misi 3 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan
1	Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Sasaran yang akan dicapai dalam misi 3 ini terdapat 3 sasaran sebelum perubahan dan menjadi 2 sasaran setelah perubahan sesuai tabel VI.20

Tabel VI.20
Sasaran Misi 3 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
1	Meningkatnya kualitas dan Kualitas pemenuhan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya kualitas dan Kualitas pemenuhan infrastruktur perkotaan
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3	Mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak	-

6.3.1. Strategi untuk Misi 3

Untuk mencapai sasaran pada misi 3, strategi sebelum dan sesudah perubahan RPJMD sebagaimana tabel VI.21

Tabel VI.21
Strategi Misi 3 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Strategi Sebelum Perubahan	Strategi Setelah Perubahan
1	Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian	Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian
2	Mendorong peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian	Mendorong peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian
3	Penataan Kawasan Kumuh perkotaan	Penataan Kawasan Kumuh perkotaan

Terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut untuk dilaksanakan selama 5 tahun sebagaiman tabel VI.22.

Tabel VI.22
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pada Misi 3 Setelah Perubahan

Visi : Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang		
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan.	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.	1. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian.
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	2. Mendorong peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian 3. Penataan Kawasan Kumuh perkotaan

6.3.2. Arah Kebijakan untuk Misi 3

Dalam rangka mengimplementasikan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun, diperlukan arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kenijakan dapat dilihat pada tabel VI.23

Tabel VI.23
Arah Kebijakan Misi 3 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Arah Kebijakan Sebelum Perubahan	Arah Kebijakan Setelah Perubahan
1. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;	1. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;
2. Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik.	2. Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik.
3. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan.	3. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan.
4. Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal;	4. Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal;
5. Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase.	5. Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase.
6. Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang.	6. Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang.
7. Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang.	7. Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang.
8. Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan IMB.	8. Meningkatkan Pembangunan Bangunan sesuai dengan IMB.
9. Pendataan dan Konsolidasi Tanah Eks KTP.	9. Fasilitasi Pendataan dan Konsolidasi Tanah Eks KTP.
10. Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.	10. Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.
11. Meningkatkan Penataan sungai.	11. Meningkatkan Penataan sungai.
12. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.	12. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.
13. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.	13. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.
14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.	14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.
15. Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian.	15. Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian.
16. Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup.	16. Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup.
17. Peningkatkan Persentase cakupan pelayanan persampahan.	17. Peningkatkan Persentase cakupan pelayanan persampahan.
18. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.	18. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.
19. Peningkatkan Persentase Kualitas RTLH bagi MBR.	19. Peningkatkan Persentase Kualitas RTLH bagi MBR.
20. Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Melalui Penyediaan Hunian dan Ruang Publik Layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.	20. Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Melalui Penyediaan Hunian dan Ruang Publik Layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
21. Peningkatan Persentase Rumah bersanitasi layak.	21. Peningkatan Persentase Rumah bersanitasi layak.
22. Perencanaan pengembangan kawasan Bukapalipatar	22. Perencanaan pengembangan kawasan Bukapalipatar

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Misi 3 setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel VI.24. berikut :

Tabel VI.24
Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 3 Kota Payakumbuh 2018-2022
Setelah Perubahan

No	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	SASARAN 1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan				
1	Mendorong pening-katan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;	Mendorong pening-katan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;	Mendorong pening-katan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;	Mendorong pening-katan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;	Mendorong pening-katan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;
2	Meningkatkan persentase panjang jalan dlm kondisi baik	Meningkatkan persentase panjang jalan dlm kondisi baik	Meningkatkan persentase panjang jalan dlm kondisi baik	Meningkatkan persentase panjang jalan dlm kondisi baik	Meningkatkan persentase panjang jalan dlm kondisi baik
3	Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
4	Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus & universal	Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus & universal	Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus & universal	Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus & universal	Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus & universal
5	Meningkatkan persentase jalan kota yg memiliki drainase	Meningkatkan persentase jalan kota yg memiliki drainase	Meningkatkan persentase jalan kota yg memiliki drainase	Meningkatkan persentase jalan kota yg memiliki drainase	Meningkatkan persentase jalan kota yg memiliki drainase
6	Meningkatkan Kepa-tuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	Meningkatkan Kepa-tuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	Meningkatkan Kepa-tuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	Meningkatkan Kepa-tuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	Meningkatkan Kepa-tuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang
7	Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang	Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang	Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang	Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang	Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang
8	Meningkatkan Pem-bangunan Bangunan Gedung sesuai IMB	Meningkatkan Pem-bangunan Bangunan Gedung sesuai IMB	Meningkatkan Pem-bangunan Bangunan Gedung sesuai IMB	Meningkatkan Pem-bangunan Bangunan Gedung sesuai IMB	Meningkatkan Pem-bangunan Bangunan Gedung sesuai IMB
9	Fasilitasi Pendataan dan Konso lidasi Tanah Eks KTP	Fasilitasi Pendataan dan Konso lidasi Tanah Eks KTP	Fasilitasi Pendataan dan Konso lidasi Tanah Eks KTP	Fasilitasi Pendataan dan Konso lidasi Tanah Eks KTP	Fasilitasi Pendataan dan Konso lidasi Tanah Eks KTP
10	Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.	Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.
11	Meningkatkan Penataan sungai.	Meningkatkan Penataan sungai.	Meningkatkan Penataan sungai.	Meningkatkan Penataan sungai.	Meningkatkan Penataan sungai.
12	Meningkatkan kualitas pengelolaan jari-ngan irigasi & bangu-nan pengairan lainnya	Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.	Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.	Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.	Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.
13	Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.	Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.	Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.	Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.	Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.
14	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.
15	Perencanaan pengembangan kawasan Bukapalipatar (Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, 50 Kota, Padang Panjang, Tanah Datar)				
	SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.				
1.	Peningkatkan Persen-tase cakupan pelaya-nan persampahan	Peningkatkan Persen-tase cakupan pelaya-nan persampahan	Peningkatkan Persen-tase cakupan pelaya-nan persampahan	Peningkatkan Persen-tase cakupan pelaya-nan persampahan	Peningkatkan Persen-tase cakupan pelaya-nan persampahan
2.	Mendorong peningka-tan kualitas Lingkung-an Hidup melalui pen-erapan berbagai ins-trumen pengendalian	Mendorong peningka-tan kualitas Lingkung-an Hidup melalui pen-erapan berbagai ins-trumen pengendalian	Mendorong peningka-tan kualitas Lingkung-an Hidup melalui pen-erapan berbagai ins-trumen pengendalian	Mendorong peningka-tan kualitas Lingkung-an Hidup melalui pen-erapan berbagai ins-trumen pengendalian	Mendorong peningka-tan kualitas Lingkung-an Hidup melalui pen-erapan berbagai ins-trumen pengendalian
3.	Meningkatkan Usaha yg memenuhi baku mu -tu lingkungan hidup	Meningkatkan Usaha yg memenuhi baku mu tu lingkungan hidup	Meningkatkan Usaha yg memenuhi baku mutu lingkungan hidup	Meningkatkan Usaha yg memenuhi baku mutu lingkungan hidup	Meningkatkan Usaha yg memenuhi baku mu -tu lingkungan hidup
4.	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.	Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.
5.	Peningkatkan Persen-	Peningkatkan Persen-	Peningkatkan Persen-	Peningkatkan Persen-	Peningkatkan Persen-

No	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	tase kualitas rumah tidak layak huni(RTLH) bagi masyarakat ber-penghasilan rendah (MBR)	tase kualitas rumah tidak layak huni(RTLH) bagi masyarakat ber-penghasilan rendah (MBR)	tase kualitas rumah tidak layak huni(RTLH) bagi masyarakat ber-penghasilan rendah (MBR)	tase kualitas rumah tidak layak huni(RTLH) bagi masyarakat ber-penghasilan rendah (MBR)	tase kualitas rumah tidak layak huni(RTLH) bagi masyarakat ber-penghasilan rendah (MBR)
6	Penataan Kawasan Ku-muh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yg layak & terjangkau bagi selu ruh lapisan masyarakat	Penataan Kawasan Ku-muh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yg layak & terjangkau bagi selu ruh lapisan masyarakat	Penataan Kawasan Ku-muh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yg layak & terjangkau bagi selu ruh lapisan masyarakat	Penataan Kawasan Ku-muh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yg layak & terjangkau bagi selu ruh lapisan masyarakat	Penataan Kawasan Ku-muh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yg layak & terjangkau bagi selu ruh lapisan masyarakat
7	Peningkatkan Persentase rumah bersanitasi layak.	Peningkatkan Persentase rumah bersanitasi layak.	Peningkatkan Persentase rumah bersanitasi layak.	Peningkatkan Persentase rumah bersanitasi layak.	Peningkatkan Persentase rumah bersanitasi layak.

6.3.3. Program Pembangunan Daerah Misi 3

Program-program prioritas untuk mewujudkan misi 3 adalah :

Tabel VI.25

Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Misi 3

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 3 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 3 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1. Program perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	1. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
3. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 6. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	2. Program Penyelenggaraan jalan
7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 9. Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjong 10. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	4. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
11. Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	5. Program Pengembangan jasa konstruksi
12. Program Pembangunan Fasilitas Umum	6. Program penataan bangunan gedung 7. Program penataan bangunan dan lingkungan 8. Program pengembangan pemukiman

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 3 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 3 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
13. Program perencanaan tata ruang 14. Program pemanfaatan ruang 15. Program pengendalian pemanfaatan ruang	9. Program penyelenggaraan penataan ruang
16. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 17. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Pemanfaatan Tanah	10. Program penatagunaan tanah 11. Program penyelesaian sengketa tanah garapan 12. Program pengelolaan izin lokasi
18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	13. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
19. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 20. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 22. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 23. Program peningkatan pengendalian polusi 24. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	14. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; 15. Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 16. Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat; 17. Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarkat; 18. Program Pengelolaan Persampahan; 19. Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; 20. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati; 21. Program Pengendalian Bahan bakar Berbahaya (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
25. Program pengembangan perumahan 26. Program lingkungan sehat perumahan	22. Program Pengembangan Perumahan 23. Progran kawasan permukiman 24. Program Peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
27. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	25. Program penanggulangan kebakaran
28. Program kerjasama pembangunan antar daerah	26. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
-	27. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
-	28. Program Penggunaan dan

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 3 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 3 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
	Pemasaran Produk Dalam Negeri;
-	29. Program Pengelolaan Pendidikan;
-	30. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
-	31. Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
-	32. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
-	33. Program Penyuluhan Pertanian

Keterkaitan antara Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel VI.26. :

Tabel VI.26
Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 3 Kota Payakumbuh 2017-2022 Setelah Perubahan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 90/2019
1. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian.	1. Mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum;	Program perluasan &peningkatan sambungan rumah (SR)	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	
	2. Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik.	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Program Penyelenggaraan jalan
	3. Peningkatkan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Program Penyelenggaraan jalan
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	
	4. Mengembangkan trotoar yang nyaman, menerus dan universal;	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Program Penyelenggaraan jalan
	5. Meningkatkan persentase jalan kota yang memiliki drainase.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
	6. Meningkatkan Kepatuhan Pembangunan sesuai dokumen tata ruang.	Program perencanaan penataan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang
	7. Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang.	Program pemanfaatan ruang	Program pengembangan pemukiman
	8. Meningkatkan Pembangunan Bangunan Gedung sesuai dengan IMB.	Program pengendalian pemanfaatan ruang	
	9. Pendataan dan Konsolidasi Tanah Eks KTP.	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Program penyelesaian sengketa tanah garapan
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan danPenggunaan	Program penatagunaan tanah

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 90/2019
		Pemanfaatan Tanah	Program pengelolaan izin lokasi
	10. Meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
	11. Meningkatkan Penataan sungai.	Program Pembangunan Turab/Talud/Bronjong	
	12. Meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.	Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	
	13. Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum perkotaan.	Rogram Pembangunan Fasilitas Umum	Program Penataan Bangunan Gedung
			Program penataan bangunan dan lingkungannya
		-	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Program Pengelolaan Pendidikan
			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri
			Program Penyuluhan Pertanian
	14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program penyelenggara-an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
	15. Perencanaan pengembangan kawasan Bukapalipatar	Program kerjasama pembangunan antar daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Mendorong peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian	1. Mendorong peningkatan kualitas Lingkungan Hidup melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian.	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Program Pembinaan dan pengawasan terhaadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	2. Meningkatkan Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program peningkatan pendidikan dan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			Program Pengendalian Bahan bakar Berbahaya (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	3. Peningkatkan Persentase cakupan pelayanan persampahan.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
		Program peningkatan pengendalian polusi	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 90/2019
			hidup
	4. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program Pengelolaan keanekaragaman hayati
	5. Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Melalui Penyediaan Hunian dan Ruang Publik Layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Program pengembangan perumahan	Program pengembangan perumahan
		Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Program Penyelenggaraan jalan
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Program penanggulangan kebakaran
	6. Peningkatan Persentase Rumah bersanitasi layak	Program lingkungan sehat perumahan	Program kawasan permukiman
			Program Peningkatan prasarana, , sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel VI.27. :

Tabel VI.27

Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Untuk Misi 3 Setelah Perubahan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				K	Rp(Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan																		
	Tujuan :	**Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan**																
		Persentase Pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	85%	87%		89%		91%		94%		97%		100%		100%		
		Indeks kualitas lingkungan	56,23	56,50		58,96		59,66		57,50		57,75		58,00		58,00		
	Sasaran 1	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan**																
		Persentase pelayanan air minum	94,21%	95,46%		96,73%		97,84%		99,02%		99,67%		100%		100%		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap	63,81%	67,22%		69,21%		72,25%		75,90%		75,56%		77,31%		77,31%		
		Persentase sistem drainase skala kota	39,88%	47,44%		51,74%		58,95%		60,39%		62,91%		64,40%		64,40%		
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	78,30%	78,60%		78,90%		79,23%		79,50%		79,80%		80,10%		80,10%		
		Persentase Daerah Irigas Berkinerja Baik	*73,43%*	*73,45%*		*77,73%*		*80,20%*		-								
		Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	66,66%	66,67%		66,67%		68,00%		70,41%		71,39%		71,98%		71,98%		
	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	*Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap*	*63,81%*	*67,22%*	*1.798,27*	*69,21%*	*1.325,49*	*72,25%*	*4.153,71*	*75,90%*	*4.426,00*						*11.703,48*	
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan	*Persentase panjang jalan yang dipelihara*	*13,70%*	*15,70%*	*29.124,45*	*17,60%*	*30..539,14*	*19,60%*	*33.042,23*	*21,5%*	*18.093,30*						*110.799,13*	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	*Jumlah alat berat yg tersedia*	*16 unit*	*16 unit*	*396,77*	*19 unit*	*757,26*	*19 unit*	*847,53*	*19 unit*	*533,96*						*2.353,54*	
		Jumlah alat labor yg tersedia	*0*	*0*		*13 unit*		*28 unit*		*29 unit*								
	Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh	*Panjang jalan kota yang memiliki trotoar*	*18.753 m*	*18.753 m*	*1.259,34*	*18.753 m*	*469,37*	*19.426 m*	*1.266,70*	*19.560 m*	*2.628,54*						*5.623,96*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								Penanggung Jawab PD
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				K	Rp(Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan																		
1	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kota memenuhi standar konstruksi dan fungsi										48,84	24.364,69	50,01	24.364,69	50,01	77.847,59	
	Program Pembangunan saluran drainasi/gorong2	*Persentase jalan kota yang memiliki drainase*	*42,17%*	*51,86%*	*11.783,17*	*54,74%*	*13.983,61*	*58,95%*	*14.676,94*	*61,28%*	*7.080,96*						*47.524,69*	
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase jalan kota yang memiliki drainase										62,91%	10.985,83	64,44%	10.985,83	64,44%	21.971,67	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	*persentase irigasi dengan kondisi baik*	*73,43%*	*76,43 %*	*17.616,03*	*77,96 %*	*17.806,35*	*80,6 0%*	*14.695,80*	*87,6 2%*	*11.901,36*						*62.019,56*	
		Persentase Daerah Irigasi berkinerja baik	*73,43%*	*73,45 %*		*77,73 %*		*80,2 0%*		*82,0 8%*								
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	*Persentase Penataan sungai*	*15,44%*	*18,56%*	*676,07*	*20,53%*	*1.216,01*	*23,28%*	*807,45*	*23,52%*	*673,79*						*3.373,33*	
	Program pengembangan, pengelolaan, dan konser-vasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	*Persentase sungai yang dinormalisasi*	*15,44%*	*25,44%*	*12.954,47*	*30,44%*	*13.017,13*	*35,44%*	*6.996,71*	*40,44%*	*5.329,54*						*38.297,87*	
	Program Pengendalian Banjir	*Persentase sungai yang terpelihara*	*N/A*	*28,72%*	*100,71*	*28,77%*	-	*26,14%*	-	*22,23%*	-						*100,71*	
3	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	persentase irigasi dengan kondisi baik										86,40%	20.322,85	89,49%	20.322,85	89,49%	40.645,69	
		Persentase sungai berfungsi baik										85,84%		89,59		89,59		
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan)*	*Panjang jalan lingkung yang dibangun*	*2.503 m*	*3.303 m*	*2.168,03*	*3.903 m*	*172,54*	*9.938,81 m*	*7.720,83*	*3.332,14 m*	*3.079.74*						*13.141,16*	
4	Program Pengembangan Permukiman*)	Persentase jalan lingkung dengan kondisi baik										42%	3.910,81	45%	3.910,81	45%	7.349,10	
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kawasan strategis yang tertata										12,5 %	-	20%	472,5	20%	472,5	
	Program Perencanaan Penataan ruang)*	*Jumlah advice planning yg diterbitkan*	*586 berkas*	*445 berkas*	*212,82*	*487 berkas*	*600,06*	*464 berkas*	*525,58*	*538 berkas*	*546,86*						*1.885,33*	
		Jumlah regulasi tata ruang yang tersedia	*1 Perda*	*1 Perda*		*3 Perda*		*4 Perda*		*5 Perda*								
	Program pemanfaatan ruang)*	*Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan keseluruhan*	*0,13*	*0,13*	*188,06*	*0,13*	*267,26*	*0,18*	*482,69*	*0,19*	*208,41*						*1.146,43*	
	Program pengendalian pemanfaatan ruang)*	*Rasio Ruang Terbuka Hijau*	*39,31*	*40,31*	*164,02*	*40,31*	*98,54*	*42,44*	*106,05*	*42,46*	*253,0*						*621,63*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				K	Rp(Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan																		
6	Program penyelenggaraan penataan ruang*)	Persentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang										35,05	1.564,82	36,18	1.564,82	36,18	3.129,64	
	Program Pembinaan & Pengawasan Jasa Konstruksi	*Persentase Kepatuhan pelaku Pembangunan sesuai rencana tata ruang*	*30,60%*	*30,90%*	*95,82*	*32,77%*	*136,46*	*33,75%*	*132,68*	*34,07%*	*33,64*						*398.62*	
7	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Pekerjaan jasa konstruksi yg berkinerja baik										80%	345,18	85%	345,18	85%	690,37	
	Program Pembangunan Fasilitas Umum	*Persentase Ketersediaan fasilitas umum perkotaan*	*66,66%*	*66,67%*	*-*	*66,67%*	*-*	*68,00%*	*6.795,11*	*69,84%*	*11.234,53*						*18.029,64*	
8	Program penataan bangunan gedung	Persentase penyediaan perkantoran tertentu yang representatif										78,03 %	18.466,85	79,38 %	18.466,85	79,38 %	36.933,71	
		Persentase Ketersediaan fasilitas umum perkotaan										71,39 %		71,98 %		71,98%		
		Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif										79,03 %		83,15		83,15		
	Program perluasan & peningkatan sambungan rumah (SR)	*Persentase rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan*	*91,61%*	*94,41%*	*-*	*98,84%*	*754,89*	*99,12%*	*2.135,10*	*96,84%*	*-*						*2.889,99*	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	*Persentase rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan*	*91,61%*	*94,41%*	*559,65*	*98,84%*	*723,36*	*99,12%*	*886,73*	*96,84%*	*957,92*						*3.127,67*	
9	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah yg ter-layani air minum perpipa										96,94%	1.914,03	97,22%	1.914,03	97,22%	3,828,06	
	Program Penataan Penguasaan,Pemilikan & Penggunaan Pemanfaatan Tanah	*Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan Pemko*	*56,82%*	*56,82%*	*30,60*	*58,18%*	*13,83*	*59,55%*	*48,06*	*61,36%*	*38,5*						*131,00*	
10	Program penatagunaan tanah	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum										10,00%	49,99	15,00%	49,99	15,00%	99,99	
		Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko										62,27%		63,64%		63,64%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				K	Rp(Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan																		
11	Progran pengelolaan izin lokasi	Persentase luas tanah yang pemanfaatannya sesuai izin lokasi										80%	29,99	85%	29,99	85%	59,99	
	Program Penyelesaian Konflik2 Pertanahan	*Kasus konflik tanah yang terselesaikan*	*2 kasus*	*2 kasus*	*13,56*	*2 kasus*	*-*	*2 kasus*	*-*	*2 kasus*	*-*						*13,56*	
12	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase tanah sengketa konflik yg difasilitasi										21,34	100,99	25	100,99	25	201,99	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	*Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas*	*65,25%*	*40,00%*	*234,79*	*86,06%*	*122,69*	*76,67%*	*212,87*	*75,33 %*	*556,51*							DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	*Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum*	*60,12%*	*63,24%*	*1.068,45*	*92,95%*	*391,54*	*94,77%*	*308,53*	*50,50 %*	*281,67*							
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	*Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan*	*65,00%*	*89,22%*	*103,67*	*70,00%*	*377,21*	*82,00%*	*596,70*	*85,00 %*	*132,00*							
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	*Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas*	*65,25%*	*40,00%*	*291,34*	*89,22%*	*150,14*	*76,67%*	*108,41*	*75,33 %*	*251,24*							
	Program Pengendalian da Peningkatan Pelayanan Parkir	*Persentase peningkatan pelayanan parkir*	*65,00%*	*65,00%*	*-*	*65,00%*	*327,65*	*70,20%*	*321,63*	*71,00 %*	*322,51*							
13	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas										78,15%	554,03	80,21%	554,03	80,21%	1.108,07	
		Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum										50,65%		50,80%		50,80%		
		Persentase peningkatan pelayanan parkir										74,00%		74,00%		74,00%		
		Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan										88,00%		88,00%		88,00%		
		Persentase ketersediaan fasilitasi umum										71,45%		71,55%		71,55%		
	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	*Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik*	*75,00%*	*75,00 %*	*9.328,58*	*75,00%*	*2.580,76*	*80,00%*	*1.693,57*	*85,00%*	*634,57*						*14.237,50*	DINAS PARPORA*)
	Program pembangunan sarana dan prasarana	*Jumlah sapras olah raga yang dibangun*	*3 buah*	*-*	*-*	*1 buah*	*430,74*	*3 buah*	*6.915,45*	*2 buah*	*5.377,23*						*12.721,65*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				K	Rp(Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan																		
	olahraga																	
14	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik										87%	12.104,96	90%	12.104,96	90%	24.209,92	
		Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah										33 medali		170 medali		557 medali		
		Jumlah sapras olah raga yang dibangun										3 buah		2 buah		13 buah		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	*Jumlah Kerjasama Perdagangan*	*25 kerjasama*	*30 kerjasama*	*8.532,37*	*30 kerjasama*	*4.143,94*	*32 kerjasama*	*4.687,78*	*33 kerjasama*	*1.901,72*						*19.265,83*	DINAS NAKER PERIND*)
15	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama Perdagangan										4 kerjasama	164,28	4 kerjasama	164,28	11 kerjasama	328,56	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	*Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP*	*78,50%*	*80,00 %*	*10.779,75*	*83%*	*13.618,02*	*85,00 %*	*18.873,36*	*86,00 %*	*14.883,51*						*58.154,67*	DINAS PENDIDIKAN*)
		Rata - rata nilai Mid semester	*7,14*	*7,50*		*7,55*		*7,50*		*7,65*								
		Rata - rata nilai semester	*7,16*	*7,55*		*7,55*		*7,60*		*7,65*								
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP										87%	48.284,35	90%	48.284,35	90%	96.568,71	
		Rata-rata Nilai Mid Semester										7,70		7,75		7,75		
		Rata-Rata Nilai Semester										7,70		7,75		7,75		
	Program pengadaan peningkatan, perbaikan sarpras puskesmas/pustu/jaringan	*Persentase ketersediaan prasarana puskesmas sesuai standar*	*80,00%*	*83,00 %*	*3.808,81*	*85,00 %*	*9.396,62*	*85,50 %*	*2.792,57*	*87,00 %*	*2.422,42*						*18.420,44*	DINAS KESEHATAN*)
	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS paru-paru/RS mata	*persentase ketersediaan alat kedokteran RS sesuai standar*	*78%*	*78,00 %*	*20.300,72*	*80%*	*6.082,90*	*82%*	*17.749,54*	*83%*	*6.985,49*						*51.118,67*	
17	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya	Jumlah kasus kematian bayi										24	31.529,46	23	31.529,47	23	63.058,93	
		Jumlah kasus kematian										3		3		3		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				K	Rp(Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan																		
	kesehatan masyarakat	ibu melahirkan																
		Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB										100,00%		100,00%		100,00%		
		Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular										100,00%		100,00%		100,00%		
		Persentase Kelurahan STBM										93,00%		95,00%		95,00%		
	Program kerjasama pembangunan daerah	*Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti*	*80,00%*	*80,00%*	*111,86*	*90,00%*	*38,93*	*90,00%*	*8,01*	*90,00%*	*8,12*						*166,93*	Bappeda*) ETDAKO*)
18	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase masalah kewilayahan yang ditangani										90,00%	2.442,78	100%	2.442,78	100%	4.885,57	
Sasaran 2		**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**																
Indikator Sasaran		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**56,23**	**56,50**		**58,96**		**59,66**		**57,50**		**57,75**		**58,00**		**58,00**		
	Program pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup	*Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup*	*30,01%*	*40,00%*	*771,13*	*42,06 %*	*874,40*	*42,22 %*	*218,35*	*51,05 %*	*349,35*						*2.213,24*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1	Program Perencanan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan yang disusun										5 dokumen	81,67	5 dokumen	81,67	5 dokumen	163,34	
2	Program Pembinaan dan pengawasan terhaadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup										55,03%	35,29	60,01%	35,29	60,01%	70,59	
3	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diterima										7 Penghargaan	44,56	7 Penghargaan	44,56	7 Penghargaan	89,13	
	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	*Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun*	*1 dokumen*	*2 dokumen*	*45.82*		*-*	*5 dokumen*	*176,04*	*5 dokumen*	*-*						*221,86*	
4	Program peningkatan pendiidkan dan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan										80,00%	34,69	80,00%	34,69	80,00%	69,38	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				K	Rp(Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan																		
	Program Peningkatan Kualitas & Akses Informas SDA & Lingkungan Hidup	*Persentase sekolah Adiwiyata*	*70,00%*	*70,00%*	*92,77*	*70,00 %*	*72,79*	*72,00 %*	*44,22*	*74,00 %*	*29,21*							*239,02*	
	Program peningkatan pengendalian polusi	*Indeks Kualitas Air*	*75,00*	*76,00*	*24,21*	*66,67*	*443,85*	*70,83*	*804,36*	*75,00*	*420,47*							*1.692,90*	
		Indeks Kualitas Udara	*80,00*	*95,32*		*92,29*		*93,73*		*80,00*									
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air										75,00	475,38	75,00	475,38	75,00	950,77	
		Indeks Kualitas Udara										80,00		80,00		80,00		
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH)	*Persentase RTH Publik*	*15,45%*	*21,00 %*	*2.244,20*	*22,99 %*	*576,32*	*22,99 %*	*2.187.26*	*16,50 %*	*3.515,58*							*8.523,37*	
6	Program Pengelolaan Keaneka ragaman hayati	Presentasi RTH Publik										16,75 %	1.814,80	17,00 %	1.814,8	17,00 %	3.629,60	
7	Program Pengendalian Bahan bakar Berbahaya (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH												50,00 %	60,00	50,00 %	60,00	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	*Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas*	*65,25%*	*40,00 %*	*291,34*	*86,06 %*	*150,14*	*76,67 %*	*108,41*	*75,33 %*	*251,24*							*801,14*	DINAS PERHUBUNGAN*)
8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas										78,15 %	554,03	80,21 %	554,03	80,21 %	1.108,07	
	Program Penataan Struktur Industri	*Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk*	*1 buah*	*2 buah*	*9.231,03*	*1 buah*	*6.676,40*	*1 buah*	*3.841,26*	*1 buah*	*1.601,31*							*21.350,02*	DINAS NAKER PERIN*)
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk										2,50 %	37,23	2,75 %	37,23	2,75 %	74,56	
		Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk										1 buah		1 buah		1 buah		
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	*Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya pertanian*	*35,00%*	*41,00 %*	*164,09*	*43%*	*114,73*	*45%*	*43,52*	*51%*	*68,28*							*390,62*	DINAS PERTANIAN*)
10	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok tani yang menerapkan teknologi anjuran										55%	226,78	60%	226,78	60%	453,57	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				K	Rp(Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan																		
	Indikator Sasaran	**Persentase luas permukiman kumuh**	**1,77%**	**2,59%**		**1,88%**		**1,64%**		**1,34%**		**0,82%**		**0,30%**		**0,30%**		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program pengembangan perumahan)*	*Persentase Rumah Layak Huni*	*91,70%*	*91,90 %*	*4.045,78*	*92,98 %*	*977,32*	*94,22 %*	*823,64*	*94,87 %*	*521,54*							*6.368,30*	
1	Program pengembangan perumahan*)	Persentase Penurunan Angka Backlog (kebutuhan rumah)										14,57 %	10,24	13,97 %	10,24	13,97 %	20,48	
	Program Lingkungan sehat Perumahan	*Persentase rumah bersanitasi layak*	*88,20%*	*89,78 %*	*4.640,79*	*91,47 %*	*4.300,76*	*93,23 %*	*4.829,77*	*92,74 %*	*5.323,16*							*19.094,46*	
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak										94,25%	7.705,46	95,76%	8.188,84	95,76%	15.894,30	
		Persentase Rumah Layak Huni										95,92 %		96,98 %		96,98 %		
		Persentase Luas Permukiman Kumuh										0,82		0,30		0,30		
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyerahan PSU oleh Pengembang										5,88%	617,74	7,84%	134,37	7,84%	752,12	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	*Persentase cakupan pelayanan persampahan*	*88,02%*	*88,24%*	*1.613,87*	*88,24%*	*3.201,41*	*89,40%*	*8.388,37*	*92,26%*	*7.338,21*							*20.541,86*	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan										93,30%	6.904,99	95,34%	6.844,99	95,34%	13.809,98	
	Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran	*Cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran*	*124,33%*	*124,33%*	*2.240,78*	*124,33%*	*1.249,21*	*124,33%*	*1.122,24*	*124,33%*	*1.224,90*							*5.803,81*	DINAS POL PP DAMKAR
5	Program Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran										124.33 %	1.328,15	124.33%	1.328,15	124.33%	2.656,33	
	Program Perencanaan Penataan Ruang	*Jumlah advice planning yg diterbitkan*	*586 berkas*	*445 berkas*	*212,82*	*487 berkas*	*600,063*	*464 berkas*	*525,58*	*538 berkas*	*546,86*							*1.885,33*	DINAS PUPR
		Jumlah regulasi tata ruang yang tersedia	*1 Perda*	*1 Perda*		*3 Perda*		*4 Perda*		*5 Perda*								
	Program Pemanfaatan Ruang	*Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan keseluruhan*	*0,13*	*0,13*	*188,06*	*0,13*	*267,26*	*0,18*	*482,69*	*0,19*	*208,41*							*1.146,43*	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	*Rasio Ruang Terbuka Hijau*	*39,31*	*40,31*	*164,02*	*40,31*	*98,54*	*42,44*	*106,05*	*42,46*	*253,00*							*621,63*	
6	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang										35,05 %	1.564,82	36,18	1.564,82	36,18	3.129,64	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				K	Rp(Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan																		
	Program Pembangu-nan saluran drainasi/ gorong-gorong	*persentase jalan kota yang memiliki drainase*	*42,17%*	*51,86%*	*11.783,17*	*54,74%*	*13.983,61*	*58,95%*	*14.676,94*	*61,28%*	*7.080,96*						*47.524,69*	
7	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase jalan kota yang memiliki drainase										62,91%	10.985,83	64,44%	10.985,83	64,44%	21.971,66	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	*Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan*	*91,61%*	*94,41%*	*559,65*	*98,84%*	*723,36*	*99,12%*	*886,73*	*96,84%*	*957,92*						*3.127,67*	
8	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah yg terlayani air minum perpipaan										99,25%	1.914,03	100%	1.914,03	100%	3,828,06	
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	*Panjang jalan lingkung yang dibangun*	*2.503 m*	*3.303 m*	*2.168,03*	*3.903 m*	*172,54*	*9.938,81 m*	*7.720,83*	*3.332,14 m*	*3.079.74*						*13.141,16*	
9	Program pengembangan pemukiman	Persentase jalan lingkung dengan kondisi baik										42%	3.910,81	45%	3.910,81	45%	7.349,10	
	Program pengadaan peningkatan, perbaikan sarpras puskesmas/ pustu/ jaringan	*Persentase ketersediaaan prasarana puskesmas sesuai standar*	*80,00%*	*83,00 %*	*3.808,81*	*85,00 %*	*9.396,62*	*85,50%*	*2.792,57*	*87,00%*	*2.422,42*						*18.420,44*	DINAS KESEHATAN*)
	Program pengadaan peningkatan sarana dan prasaran rumah sakit/ rumah sakit jiwa/RS paru-paru/RS mata	persentase ketersediaan alat kedokteran RS sesuai standar	78%	78,00 %	20.300,72	80%	6.082,90	82%	17.749,54	83%	6.985,49						51.118,67	
10	Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pelayanan Kesehatan										100%	180,57	100%	180,57	100%	361,14	
	Program pengembangan lingkungan sehat	*Cakupan jemban yang sesuai standar kesehatan*	*85,92%*	*87,00 %*	*351,60*	*89,50 %*	*287,58*	*90,00 %*	*191,27*	*92,00 %*	*41,377*						*871,84*	
		Cakupan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga	*97,33%*	*97,50 %*		*98,00 %*		*98,00 %*		*98,00 %*								
		Cakupan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	*98,82%*	*99,00 %*		*99,10 %*		*99,20 %*		*99,00 %*								
		Cakupan pengelolaan limbah cair rumah tangga	*92,60%*	*93,00 %*		*94,00 %*		*94,50 %*		*95,00 %*								
		Cakupan laik sehat TPM	*77,03%*	*78,00 %*		*79,00 %*		*80,00 %*		*81,00 %*								
		Cakupan laik sehat TTU	*79,64%*	*80,00*		*81,00*		*82,00*		*83,00*								

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				K	Rp(Jt)	K	Rp (Jt)	K	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan																		
				%		%		%		%								
		Persentase peningkatan STBM	*100,00 %*	*100%*		*100,00%*		*100,00%*		*100,00%*								
		Persentase cakupan stop BABS	*18,75%*	*22,91 %*		*27,08 %*		*31,25 %*		*37,50 %*								
		Persentase laik sehat TIM dan TTU	*92,99%*	*94,00 %*		*95,00 %*		*96,00 %*		*97,00 %*								
11	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian bayi										24	31,529,46	23	31,529,46	23	63,058,93	
		Jumlah kasus kematian ibu melahirkan										3		3		3		
		Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB										100%		100%		100%		
		Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular										100%		100%		100%		
		Persentase kelurahan STBM										95%		98%		98%		

*Ket : *) Crosscutting*

6.4. Misi 4 :

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang salah satu tujuannya adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisiensi, transparansi dan akutabilitas yang jelas. Namun dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang merupakan isu utama nasional bahkan internasional yang terjadi saat ini perlu dilakukan strategi-strategi dan inovasi dalam penciptaan, pengembangan dan pembaharuan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berfokus kepada penanganannya. Inisiatif strategi dan inovasi tersebut dapat berasal dari seluruh stakeholder terkait antara lain kepala daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah dan masyarakat Dalam merumuskan kebijakan prioritas daerah yang terkait dalam penanganan COVID-19, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Peningkatan efisiensi, diarahkan kepada penggunaan sumber daya minimal dalam mencapai hasil pelayanan inovatif yang optimal.
b. Perbaikan efektifitas, dengan lebih memfokuskan pada ketepatan solusi dan sasaran atas permasalahan daerah yang ada.
c. Perbaikan kualitas pelayanan, dengan mengedepankan kepuasan pelanggan/masyarakat;
d. Tidak ada konflik kepentingan, dimana inovasi lahir berdasarkan konsensus dan partisipasi seluruh elemen yang berkepentingan;
e. Berorientasi kepada kepentingan umum, dengan mengedepankan kepada layanan publik yang lebih baik.
f. Dilakukan secara terbuka, dimana pemerintah daerah selalu aktif dalam mempublikasikan segala tindakan atas inovasi daerah.
g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan,
h. Secara Akuntabel dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
i. Jabaran atas visi yang strategis dalam peningkatan layanan publik agar dapat berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tersebut dapat dilakukan melalui sinergi seluruh stakeholder yang terkait didalamnya antara lain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada saat ini, baik sumber daya manusia Sumber Daya alam, dan sumber daya pendukung lainnya. Dalam hal ini Prasyarat minimal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah adanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam perumasan program-program daerah serta Kebijakan yang memprioritaskan untuk kepentingan umum dengan dasar keadilan. Oleh karenanya sangat peran serta dan keterlibatan seluruh stakeholder terkait dalam mencapai program-program dan kebijakan yang dapat dipertanggung jawabkan bersama-sama. Selain itu Tata kelola pemerintahan yang baik juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas aparatur pemerintah yang kapabilitas dengan mengembalikan perannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan proses pembangunan pada akhirnya mampu menciptakan aparatur yang berkualitas, bersih dan profesional yang diiringi dengan peningkatan pelayanan publik.

Sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya bahwa tujuan yang akan dicapai pada misi ke-4 sebelum dan setelah perubahan adalah :

Tabel VI. 28
Tujuan Misi 4 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan
1	Meningkatnya Profesionalisme Birokrasi	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi

Sasaran yang akan dicapai dalam misi 4 ini ada 1 sasaran sebelum perubahan menjadi dan tetap menjadi 1 sasaran setelah perubahan yaitu :

Tabel VI. 29
Sasaran Misi 4 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
1	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan.	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan

6.4.1. Strategi untuk Misi 4

Untuk mencapai sasaran pada Misi 4, strategi sebelum dan sesudah perubahan RPJMD sebagai berikut :

Tabel VI. 30
Strategi Misi 4 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Strategi Sebelum Perubahan	Strategi Setelah Perubahan
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah 3. Mengembangkan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*) 4. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik 5. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam layanan publik 6. Meningkatkan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat 7. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindak lanjut hasil pengawasan 8. Melakukan penguatan kelembagaan, kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa 9. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. 2. Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah 3. Mengembangkan dan Memaksimalkan pemamfaatan teknologi informasi sebagai upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan dimasa Pandemi COVID-19. 4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 5. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam layanan publik 6. Meningkatkan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 7. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindak lanjut hasil

Strategi Sebelum Perubahan	Strategi Setelah Perubahan
	pengawasan 8. Melakukan penguatan kelembagaan, kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa 9. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik

Selanjutnya, hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dapat dilihat pada Tabel VI.13 berikut :

Tabel VI.31
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Misi ke-4 Setelah Perubahan

Visi : Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang			
Misi : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi Sebelum Perubahan	Strategi Setelah Perubahan
Meningkatnya profesionalisme birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19.
		2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	2. Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah
		3. Mengembangkan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan(*e-Government*)	3. Mengembangkan dan Memaksimalkan pemamfaatan teknologi informasi sebagai upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan dimasa Pandemi COVID-19.
		4. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik	4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19
		5. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam layanan publik	5. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam layanan publik
		6. Meningkatkan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	6. Meningkatkan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19
		7. Meningkatkan pengawasan internal & eksternal serta penga wasan masyarakat & ketegasan tindaklanjut hasil pengawasan	7. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindak lanjut hasil pengawasan
		8. Melakukan penguatan kelembagaan dan	8. Melakukan penguatan kelembagaan, kompetensi

Visi : Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang			
Misi : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi Sebelum Perubahan	Strategi Setelah Perubahan
		kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa	aparatur pengadaan barang dan jasa
		9. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	9. Meningkatkan akses keterbukaan terhadap informasi publik
			10. Menciptakan strategi-strategi efektif serta inovasi dalam pelayanan dan penanganan pandemi COVID-19.
			11. Melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan penangganan COVID-19 keseluruh lini dilingkungan Pemerintahan Daerah.
			12. Memfokuskan pemamfaatan program-program daerah untuk penanganan dan dampak pandemi COVID-19.

6.4.2. Arah Kebijakan untuk Misi 4

Kemudian untuk mencapai strategi di atas, maka arah kebijakan yang perlu menjadi acuan adalah :

Tabel VI. 32
Arah Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Arah Kebijakan Sebelum Perubahan	Arah Kebijakan Setelah Perubahan
1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual;	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
3	Pengembangan dan optimalisasi Pemamfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;	Pengembangan dan optimalisasi Pemamfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
4	Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani;	Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani;
5	Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur;	Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur;

No	Arah Kebijakan Sebelum Perubahan	Arah Kebijakan Setelah Perubahan
6	Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik;	Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik;
7	Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah;	Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah;
8	Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;	Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
9	Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur;	Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur;
10	Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);	Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
11	Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*;	Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*;
12	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik.	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
13	Mendukung komitmen kerjasama antar daerah dalam bentuk sekretariat bersama perencanaan pengembangan kawasan BUKAPALIPATAR (Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, 50 Kota, Padang Panjang, Tanah Datar).	Mendukung komitmen kerjasama antar daerah dalam bentuk sekretariat bersama perencanaan pengembangan kawasan BUKAPALIPATAR (Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, 50 Kota, Padang Panjang, Tanah Datar).
14		Mengoptimalkan penanganan korban bencana baik alam maupun non alam

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Misi 4 setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel VI.14. berikut :

Tabel VI.33.
Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 4 Kota Payakumbuh 2018-2022

No	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	SASARAN 1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan				
1	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah & akuntansi pemerintahan berbasis akrual;	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah & akuntansi pemerintahan berbasis akrual;	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah & akuntansi pemerintahan berbasis akrual;	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah & akuntansi pemerintahan berbasis akrual;	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah & akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
3	Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;	Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;	Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;	Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;	Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
4	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas	Peningkatan kualitas

No	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
	aparatur pelayanan, peningkatan kompe-tensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani;	aparatur pelayanan, peningkatan kompe-tensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani;	aparatur pelayanan, peningkatan kompe-tensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani;	aparatur pelayanan, peningkatan kompe-tensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani;	aparatur pelayanan, peningkatan kompe-tensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani;
5	Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi & promosi se-suai dengan kompe-tensinya, serta keje-lasan pengembangan karir aparatur;	Peningkatan penge-lolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi & promosi se-suai dengan kompe-tensinya, serta keje-lasan pengembangan karir aparatur;	Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yg sesuai de-ngan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi & promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur;	Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yg sesuai de-ngan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi & promosi sesuai dengan kompe- tensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur;	Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian melalui proses rekruitmen yg sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi & promosi sesuai dengan kompe-tensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur;
6	Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah;	Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah;	Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah;	Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah;	Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah;
7	Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;	Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan ketertiban & ketente-raman masyarakat;	Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan ketertiban & ketente-raman masyarakat;	Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan ketertiban & ketente-raman masyarakat;	Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan ketertiban & ketente-raman masyarakat;
8	Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik;	Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik;	Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik;	Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik;	Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik;
9				Mengoptimalkan penanganan korban bencana baik alam maupun non alam	Mengoptimalkan penanganan korban bencana baik alam maupun non alam
10	Peningkatan pembi-naan & pengawasan aparatur;	Peningkatan pembi-naan & pengawasan aparatur;	Peningkatan pembi-naan & pengawasan aparatur;	Peningkatan pembi-naan & pengawasan aparatur;	Peningkatan pembi-naan & pengawasan aparatur;
11	Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan indepen-densi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);	Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan indepen-densi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);	Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan indepen-densi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);	Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan indepen-densi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);	Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan indepen-densi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
12	Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*;	Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*;	Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*;	Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*;	Peningkatan kualitas impelementasi sistem *e-procurement*;
13	Peningkatan transpa-ransi melalui pengelo-laan dan pelayanan informasi public	Peningkatan transpa-ransi melalui pengelo-laan dan pelayanan informasi public	Peningkatan transpa-ransi melalui pengelo-laan dan pelayanan informasi public	Peningkatan transpa-ransi melalui pengelo-laan dan pelayanan informasi public	Peningkatan transpa-ransi melalui pengelo-laan dan pelayanan informasi public
14	Mendukung komitmen kerjasama antar daerah dalam bentuk sekretariat bersama perencanaan pengem bangan kawasan BUKAPALIPATAR (Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, 50 Kota, Padang Panjang, Tanah Datar).				

6.4.3. Program Pembangunan Daerah

Program-program prioritas untuk mewujudkan misi 4 adalah :

Tabel VI.34
Program Prioritas Pencapaian Sasaran pada Misi 4

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 4 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 4 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2. Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 4 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 4 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
3. Program Penataan kelembagaan dan organisasi daerah	
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Program Perencanaan pembangunan sosial budaya 6. Program Perencanaan pembangunan ekonomi	2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4. Program pengelolaan keuangan daerah 5. Program pengelolaan barang milik Daerah 6. Program pengelolaan pendapatan Daerah
8. Program Peningkatan pengendalian administrasi pembangunan 9. Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	7. Program perekonomian dan Pembangunan
10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	8. Program Aplikasi Informatika; 9. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi; 10. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi; 11. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 12. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	12. Program kepegawaian daerah 13. Program pengembangan Sumber daya manusia
13. Program Optimalisasi Pelayanan Publik	14. Program Pelayanan Penanaman Modal; 15. Program Promosi Penanaman Modal; 16. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 17. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
14. Program pengembangan inovasi daerah	18. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
15. Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	19. Program peningkatan ketenteraman dan Ketertiban umum; 20. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;
16. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 17. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 18. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	21. Program penyelenggaraan pengawasan 22. Program perumusan kebijakan, Pendampingan dan asistensi

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 4 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 4 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
19. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	23. Program Informasi dan Komunikasi Publik
20. Program kerjasama pembangunan antar daerah	24. Program pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
-	25. Program Penanggulangan Bencana
-	26. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
-	27. Program Rehabilitasi Sosial;
-	28. Program Pemberdayaan Sosial;
-	29. Program Penanganan Bencana;
-	30. Program Pegelolaan Taman Makam Pahlawanan;
-	31. Program Pembinaan Perpustakaan;
-	32. Program Pengelolaan Arsip;
-	33. Program Perindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah;
-	34. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
-	35. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
-	36. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum;
-	37. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
-	38. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
-	39. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
-	40. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
-	41. Program Peningkatan Kewaspadan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
-	42. Program pendaftaran penduduk
-	43. Program Pencatatan Sipil
-	44. Program pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
-	45. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Keterkaitan antara Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel VI.35 dibawah ini :

Tabel VI.35
Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 4 Kota Payakumbuh 2017-2022 Setelah Perubahan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 90/2019
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19.	1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Program Penunjang urusan pemerintah daerah
		Program penyelenggaraan pemerintahan umum & perangkat daerah	
		Program Penataan kelembagaan dan organisasi daerah	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan pembangunan sosial budaya	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	
		-	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum
		-	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	2. Mendukung komitmen kerjasama antar daerah dalam bentuk sekretariat bersama perencanaan pengem bangan kawasan BUKAPALIPATAR (Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, 50 Kota, Padang Panjang, Tanah Datar).	Program kerjasama pembangunan antar daerah	Program pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
2. Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah	3. Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, penge lolaan barang milik daerah &akutansi pemerintahan berbasis akrual	Program peningkatan & pengemba-ngan pengelolaan keuangan daerah	Program pengelolaan keuangan daerah Program pengelolaan barang milik Daerah
		Program Peningkatan pengendalian administrasi pembangunan	Program pengelolaan pendapatan Daerah
2. Mengembangkan dan Memaksimalkan pemamfaatan teknologi informasi sebagai upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan dimasa Pandemi COVID-19	4. Pengembangan dan optimalisasi teknologi informasi yg terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Aplikasi Informatika Program Persandian untuk Pengamanan Informasi Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19	5. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi & perubahan mentalitas/budaya melayani	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program pengembangan Sumber daya manusia
	6. Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaianmelalui proses recruit-men	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program kepegawaian daerah

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 90/2019
	yg sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah, mutasi & promosi sesuai dengan kompetensinya, serta kejelasan pengembangan karir aparatur		
	7. Penyediaan sarana keterpaduan pelayanan publik	Program Optimalisasi Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		-	Program Pembinaan Perpustakaan
		-	Program Pengelolaan Arsip
		-	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		-	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		-	Program Perindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah
		-	Program Rehabilitasi Sosial; Program Pemberdayaan Sosial; Program Pegelolaan Taman Makam Pahlawanan
		-	Program pendaftaran penduduk
		-	Program Pencatatan Sipil
		-	Program pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
		-	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	8. Mengoptimalkan penanganan korban bencana baik alam maupun non alam	-	Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana
5. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam layanan publik	9. Peningkatan Penerapan Sistem Inovasi Daerah.	Program pengembangan inovasi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Meningkatkan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	10. Peningkatan fasilitasi penegakan Perda untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program peningkatan ketenteraman dan Ketertiban umum
		-	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		-	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		-	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		-	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		-	Program Pembinaan dan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 90/2019
			Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
		-	Program Peningkatan Kewaspadan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
7. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindak lanjut hasil pengawasan	11. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Program penyelenggaraan pengawasan
	12. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Program Penataan & Penyempurnaan Kebijakan Sistem & Prosedur Pengawasan	Program perumusan kebijakan, Pendampingan dan asistensi
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	
8. Melakukan penguatan kelembagaan, kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa	13. Peningkatan kualitas implementasi sistem *e-procurement*;	Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	Program perekonomian dan Pembangunan
9. Meningkatkan akses keterbukaan terhadap informasi publik	14. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik;	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Program Informasi dan Komunikasi Publik

Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel VI.36 :

Tabel VI.36
Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Untuk Misi 4

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi		**Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**																
Tujuan		**Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi**																
Indikator Tujuan		**Indeks Reformasi Birokrasi**	NA	56,83		**67,41**		**71,66**		**72,77**		**73,89**		**75**		**75**		
Sasaran		**Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan.**																
Indikator Sasaran		**Nilai Evaluasi AKIP Kota**	**B**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**A**		
		Opini BPK	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
		Persentase Perangkat Daerah yang telah terintegrasi TI	***0***	***9,68%***		***29,03%***		***45,16 %***										
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	***78,39***	***79,35***		***80,90***		***81,66***										
		I ndeks SPBE								**2,70**		**2,80**		**3,00**		**3,00**		
		Indeks Pelayanan Publik								**4,00**		**4,20**		**4,51**		**4,51**		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*82,49*	*84,00*	*2.543,65*	*81,85*	*3.314,24*	*85,18*	*1.873,60*	*90,00*	*1.947,60*						*9.679,10*	**DINAS PENDIDIKAN**
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*75,00%*	*80,00%*	*452,74*	*80,00 %*	*109,18*	*80,00%*	*97,94*	*80,00 %*	*175,28*						*835,15*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100 %*	*100 %*		*100 %*	*-*	*100 %*	*-*	*100 %*	*39,84*						*39,84*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2 org*	*15,60*	*2 org*	*-*						*15,60*	
	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*72,37*	*BB*	*39,32*	*A*	*86,05*	*A*	*26,12*						*223,88*	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM										91,00	127.068,64	92,00	127.068,64	92,00	254.137,28	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*70,22*	*77,00*	*1.759,57*	*79,00%*	*2.081,26*	*81,00*	*2.484,81*	*84,00*	*2.460,65*						*8.786,30*	**DINAS KESEHATAN**
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana prasarana perkantoran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*166,94*	*80,00%*	*326,81*	*80,00%*	*242,73*	*80,00%*	*241,40*						*977,90*	
	Program Peningkatan disiplin aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*168,75*	*100%*	*168,96*	*100%*	*173,23*	*100%*	-						*510,94*	
	Program Peningkatan Pengembanngan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*26,17*	*BB*	*40,26*	*A*	*40,61*	*A*	*28,51*						*135,57*	
	Program peningkatan pelayanan BLUD	*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*	*85,00%*	*88,00%*	*64.229,86*	*90,00%*	*56.353,77*	*95,00%*	*62.961,33*	*100%*	*65.081,51*						*248.626,48*	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM Dinkes										87%	129.513,66	89%	129.513,66	89%	259.027,33	
		Persentase peningkatan pelayanan BLUD										100%		100%		100%		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*73,69*	*77,00*	5.458,24	*80,60*	6.012,65	*82,15*	6.540,87	*83,28*	*6.523,09*						*24.534,87*	**DINAS PUPR**
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*80,11%*	*5.013,41*	*79,95%*	2.697,73	*85,60%*	2.437,94	*93,30%*	*11.022,70*						*21.171,80*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*52,88*	*100%*	*52,23*	*100%*	*60,97*	*100%*	*71,92*						*238,00*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	*3*	-	-	*10*	*37,84*	*10*	-	*68*	-						*37,84*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*A*	*71,63*	*A*	*69,46*	*A*	*108,31*	*A*	*148,49*						*397,90*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat										85	14.439,24	87	14.439,24	87	28.878,49	
		Persentase pengelolaan RB (PANRB) SKPD										85		90		90		
		INDEKS AKIP SKPD										90		91		91		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*-*	*80,72*	*450,13*	*83,13*	*893,24*	*83,21*	*970,31*	*85,00*	*701,53*						*3.015,24*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana prasarana perkantoran dlm keadaan baik*	*-*	*90,00%*	*253,22*	*90,00%*	*995,86*	*90,00%*	*498,56*	*90,00%*	*449,21*						*2.196,85*	
	Program Peningkatan disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*11,25*	*100%*	*13,50*	*100%*	*13,05*	*100%*	*11,25*						*49,05*	
	Program Peningkatan KapasitasSumber daya aparatur	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	*4 org*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*4 org*	*-*						*-*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*A*	*A*	*41,86*	*A*	*13,95*	*A*	*20,49*	*A*	*22,06*						*98,38*	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	Nilai IKM										87	4.696,62	87	4.696,62	87	*9.393,25*	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*77,48*	*76,81*	*417,86*	*85,36*	*874,35*	*85,44*	*936,26*	*86,00*	*621,13*						*2.849,61*	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*93,07*	*80,00%*	*203,29*	*80,00%*	*128,99*	*80,00%*	*105,85*						*531,21*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*		*100%*	*11,25*	*100%*	*11,70*	*100%*	*17,09*	*100%*	*17,55*						*57,59*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*12,58*	*A*	*9,27*	*A*	*9,06*		*14,19*						*45,11*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM										89	3.177,38	90	3.177,38	90	6.354,76	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*79,95*	*78,12*	*497,38*	*87,12*	*656,74*	*88,12*	*870,25*	*89*	*735,22*						*2.759,59*	DP3AP2KB
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*191,66*	*80,00%*	*173,86*	*80,00%*	*329,01*	*80,00%*	*187,38*						*881,91*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100*	*24,20*	*100*	*25,06*	*100*	*22,27*	*100%*	*20,70*						*92,24*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	*Jumlah PKB yang meningkat kualitasnya*	*0*	*0*	*3,90*	*1*	*-*	*1*	*-*	*1*	*-*						*3,90*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*CC*	*B*	*49,45*	*BB*	*10,92*	*A*	*2,74*	*A*	*2,73*						*65,86*	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										90,00	3.658,51	90,5	3.658,51	A	7.317,03	
		Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik										80,00%		80,00%		80,00%		
		Persentase ASN berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap										100%		100%		100%		
		Persentase kepuasan ASN terhadap pelayanan kepegawaian										89,00%		89,00%		89,00%		
		Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat										A		A		A		
		Persantase sasaran program kegiatan renja perangkat daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah										90		90		90		
		Persentase pelaksanaan program dan kegiatan APBD bebas temuan										90		90		90		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program pelayanan administrasi perkantoran	*Nilai IKM*	*77,56*	*77,56*	*281,54*	*80,11*	*445,59*	*80,63*	*629,83*	*82,15*	*450,68*						*1.807,65*	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
	Program peningkatan sarana dan prasarana	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*237,56*	*80,00%*	*107,09*	*80,00%*	*73,71*	*80,00%*	*65,08*						*483,45*	
	Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*9,45*	*100%*	*12,63*	*100%*	*11,25*	*100%*	*11,25*						*44,58*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*B*	*12,22*	*BB*	*4,52*	*A*	*6,84*	*A*	*5,68*						*29,27*	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM										85	2.599.08	85	2.803,08	85	5.402,16	
	Program Pelayanan adimistrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*75,00*	*77,22*	*7.360,60*	*77,42*	*7.597,79*	*77,59*	*1.213,39*	*83,00*	*1.129,01*						*17.300,80*	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*221,40*	*80,00%*	*167,55*	*80,00%*	*119,00*	*80,00%*	*177,36*						*685,32*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*150,81*	*100%*	*150,73*	*100%*	*146,80*	*100%*	*154,51*						*602,86*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*29,36*	*A*	*8,35*	*A*	*12,30*	*A*	*4,25*						*54.27*	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										85,00%	4.575,82	89,00%	4.575,82	89,00%	9.151,65	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*89,22%*	*89,31%*	*1.413,61*	*89,20%*	*1.714,04*	*89,28%*	*1.953,99*	*100%*	*2.020,56*	-	-	–	-		*7.102,21*	**DINAS PERHUBUNGAN**
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*524,41*	*80,00%*	*369,22*	*80,00%*	*329,25*	*80,00%*	*262,94*	-	-	–	-		*1.485,84*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100 %*	*100 %*	*147,33*	*100 %*	*129,19*	*100 %*	*129,40*	*100 %*	*214,00*	-	-	_	-		*619,93*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*B*	*22,03*	*A*	*1,75*	*A*	*6,69*	*A*	*2,30*	-	-	_	-		*32,79*	
9	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,00	6.323,13	94,00	6.323,13	94,00	12.646,27	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*73,58*	*74,78*	*1.402,45*	*77,11*	*1.709,50*	*81,72*	*2.953,46*	*83,00*	*1.561,28*						*7.626,70*	DINAS KOPERASI UKM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana prasarana perkantoran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*352,31*	*80,00 %*	*538,65*	*80,00%*	*947,82*	*80,00 %*	*192,09*						*2.030,88*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100 %*	*100 %*	*22,91*	*100 %*	*33,69*	*100 %*	*48,95*	*100 %*	*53,60*						*159,16*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*24,20*	*A*	*7,75*	*A*	*7,03*	*A*	*7,03*						*46,01*	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM										86,00 %	8.002,86	89,00 %	8.002,86	89,00 %	16.005,72	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*68,60*	*78,97*	*787,57*	*74,65*	*775,63*	*84,86*	*1.429,77*	*83,00*	*1.285,44*						*4.278,42*	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*124,73*	*80,00 %*	*416,35*	*80,00%*	*217,47*	*80,00 %*	*592,09*						*1.350,65*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100 %*	*100 %*	*31,13*	*100 %*	*15,26*	*100 %*	*16,64*	*100 %*	*15,30*						*78,34*	
	Program Peningkatan Pengembangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*B*	*18,68*	*B*	*13,69*	*B*	*18,10*	*A*	*101,09*						*151,58*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM										86,00	5.130,88	89,00	5.130,88	89,00	10.261,76	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*		*79,68*	*823,39*	*80,05*	*1.119,76*	*81,91*	*1.388,10*	*83*	*1.323,97*						*4.655,23*	DINAS PERTANIAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*90,00%*	*452,74*	*90,00%*	*405,84*	*90,00%*	*665,53*	*80,00%*	*339,11*						*1.863,23*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*74,05*	*100%*	*71,80*	*100%*	*57,15*	*100%*	*49,50*						*252,51*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh inspektorat*	*BB*	*BB*	*23,07*		-		-								*23,07*	
12	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM										86	11.264,55	89	11.264,55	89	22.529,10	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM Setdako*	*76,00*	*77,00*	5.134,42	*80,98*	*5.391,90*	*83,96*	*7.593,47*	*83,00*	*7.100,22*	-	-	-	-		*25.220,03*	SETDAKO
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	5.202,48	*80,00%*	*6.569,73*	*80,00%*	*5.495,44*	*80,00%*	*3.755,98*	-	-	-	-		*21.023,64*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	181,37	*100%*	*167,57*	*100%*	*202,79*	*100%*	*180,75*	-	-	-	-		*732,49*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	*4*	*4*	-							-	-	-	-		-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*310,95*	*BB*	*444,38*	*A*	*552,72*	*A*	*321,88*	-	-	-	-		*1.629,94*	
		Nilai IKM Kota	*78,39*	*79,7*		*80,35*		*81,66*		*80,75*		-	-	-	-			

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Keuangan																	
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	*Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah*	*100.00%*	*-*	*-*	*100.00%*	*24,97*	*100.00%*	*3,68*	*100.00%*	*10,43*	*-*	*-*	*-*	*-*		*39,09*	
	Program penataan kelembagaan dan organisasi daerah	*Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk Sesuai Perundang-undangan*	*100.00%*	*100.00%*	*435,30*	*100.00%*	*131,81*	*100.00%*	*68,26*	*100.00%*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*		*653,04*	
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	*Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah*	*100.00%*	*100.00%*	*2.372,45*	*100.00%*	*3.279,68*	*100.00%*	*3.588,61*	*100.00%*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*		*11.742,34*	
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	23,495,82	100%	23,495,82	100%	46,991,64	
		Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	
		IKM Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	87	-	87	-	
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-	A	-	
		Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh KemenPan RB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,01	-	12.50	-	12.50	-	
		Indeks Kematangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,09	-	39,09	-	39,09	-	
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK pada tahun n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	
		Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,67 %	-	66,67 %	-	66,67 %	-	
		Persentase pemenuhan kebutuhan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	
		Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	-	90%	-	90%	-	
		Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sesuai SOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	
		Persentase pelayanan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	*Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara litigasi*	*40.00%*	*50.00%*	*689,94*	*60.00%*	*505,03*	*70.00%*	*305,57*	*80.00%*	*471,17*		-	-	-		*1.971,73*	
	Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah	*Peringkat LPPD*	*20*	*19*	*1.416,86*	*15*	*993,92*	*30*	*946,49*	*15*	*550,56*		-	-	-		*3.907,84*	
	Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama)*	*Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/badan zakat/wakaf*	*2.50%*	*3.00%*	*1.419,33*	*3.20%*	*545,99*	*4.78%*	*425,58*	*4.20%*	*170,50*		--	-	--		*2.561,41*	
		Persentase masjid yang dikelola secara optimal	*40.00%*	*50.00%*		*55.00%*		*60.00%*		*65.00%*		-		-				
	Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan)*	*Persentase organisasi/ lembaga sosial dan keagamaan yang aktif*	*55.00%*	*61.00%*	*374,98*	*67.00%*	*587,47*	*74.00%*	*1.271,23*	*77.00%*	*228,16*	-	-	-	-		*2.461,86*	
	Program peningkatan pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah	*Jumlah Sekolah/Madrasah yang mencapai Strata yang Maksimal*	*100.00%*	*100.00%*	*287,23*	*100.00%*	*154,53*	*100.00%*	*160,69*	*100.00%*	*17,18*	-	-	-	-		*619,65*	
14	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat*)	Nilai LPPD Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1500	2.442,78	3,1600	2.442,78	3,1600	4.885,57	
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase masalah kewilayahan yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%		100%		100%		
		Persentase mesjid yang berfungsi secara optimal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		85%		85%		
		Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77%		80%		80%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		100%		100%		
		Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		85%		85%		
		Jumlah sekolah/ madrasah yang meningkat strata UKS/M pada tahun n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah		
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%		80%		80%		
		Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		85%		85%		
		Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan ke masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti*	*100.00%*	*100.00%*	*163,40*	*100.00%*	*210,77*	*100.00%*	*34,93*	*100.00%*	*40,23*	-	-	-	-		*449,34*	
	Program peningkatan produksi daerah	*Persentase lembaga yang memanfaatkan data perkembangan produksi daerah*	*100.00%*	-	-	*100.00%*	*131,67*	*100.00%*	*89,56*	*100.00%*	*61,69*	-	-	-	-		*282,94*	
	Program peningkatan pengendalian administrasi pembangunan	*Persentase pengelola kegiatan yang tertib Administrasi sesuai aturan*	*87.00%*	*87.00%*	*137,81*	*90.50%*	*81,32*	*92.50%*	*21,57*	*94.50%*	*24,51*	-	-	-	-		*265,21*	
	Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi	*Persentase tertib administrasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah*	*100.00%*	*100.00%*	*747,00*	*100.00%*	*686,00*	*100.00%*	*635,73*	*100.00%*	*678,25*	-	-	-	-		*2.746,99*	
	Program Pengembangan Data / Informasi	*Persentase data yang dimanfaatkan untuk perkembangan produksi daerah*	*100.00%*	*100.00%*	*115,82*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*115,82*	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Forum	*Persentase lembaga yang memanfaatkan data*	*100.00%*	*100.00%*	*180,10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*180,10*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengembangan Ekonomi Daerah	*perkembangan produksi daerah*																
15	Program Perekonomian Dan Pembangunan*)	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	670,42	100%	670,42	100%	1,340,84	
		Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan menguntungkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*76,78*	*72,93*	*835,40*	*76,69*	*1.017,26*	*81,22*	*1.580,51*	*83,00*	*835,18*	-	-	-	-		*4.268,37*	BAPPEDA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*416,51*	*80,00%*	*261,77*	*80,00%*	*251,34*	*80,00%*	*215,64*	-	-	-	-		*1.145,28*	
	Program Peningkatan disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*18,89*	*100%*	*17,99*	*100%*	*17,99*	*100%*	*18,90*	-	-	-	-		*73,78*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	*3*	*3*	*26,07*	*3*	*26,16*	*3*	*26,49*	*3*	-	-	-	-	-		*78,73*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sis-tem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	*Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*A*	*34,48*	*A*	-	*A*	*12,39*	*A*	*9,56*	-	-	-	-		*56,43*	
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM		-	-	-	-	-	-	-	-	86	5.225,14	89	5.225,14	89	10.450,29	
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A		A		A		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur perencana yang memiliki sertifikat perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,12 %		58,82 %		58,82 %		
		Persentase sasaran, progam dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
	Program perencanaan pembangunan daerah	*Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD*	*92,86%*	*94,08%*	*2,656,14*	*92,24 %*	*1,317,99*	*88,76%*	*967,71*	*97,04 %*	*892,03*	-	-	-	-	-	*5,833,89*	
		Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	*40,00%*	*45,50%*		*50,00 %*		*55,00%*		*60,00 %*	-	-		-		-	-	
		Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	*100, 00%*	*100, 00%*		*100,00%*		*100, 00%*		*100,00%*	-	-		-		-	-	
	Program Pengembangan data/informasi	*Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah*	*78,00%*	*78,00%*	*267,22*	*80,00 %*	*131,24*	*80,00%*	*84,89*	*85,00 %*	*9,38*	-	-	-	-	-	*492,74*	
17	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.50 %	771,33	18.00 %	771,33	18.00 %	1,542,66	
		Persentase indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	-	-	-	-	-	-	-	-		93.39 %		97.22 %		97.22 %		
		Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-		28		29		29		
		Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-		18		20		20		
		Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-			86.36 %		90.91 %		90.91 %		
		Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-			97,38 %		98.50 %		98.50 %		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tingkat aksesibilitas data	-	-	-	-	-	-	-	-		100%		100		100		
		Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	-	-	-	-	-	-	-			90.32 %		93.55 %		93.55 %		
		Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel	-	-	-	-				-		96.20 %		96.84 %		96.84 %		
	Program Kerjasama Pembangunan	*Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti*	*80,00%*	*80,00%*	*111,86*	*90,00%*	*38,93*	*90,00%*	*8,01*	*90,00%*	*8,12*	-	-	-	-		*166,93*	
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	*Persentase PD bidang IPW yg telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras*	*100,00%*	*100,00%*	*54,09*	*100,00%*	*21,82*	*100,00%*	*8,47*	*100,00%*	*5,48*	-	-	-	-		*89,87*	
	Program Perencanaan pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	*Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menangah & besar yg ditindaklanjuti*	*100,00%*	*100,00%*	*207,19*	*100,00%*	*100,58*	*100,00%*	*25,88*	*100,00%*	*5,27*	-	-	-	-		*338,93*	
	Program peningkatan kapasitas kelembaga-an perencanaan pembangunan daerah	*Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik*	*75,00%*	*100 %*	*84,68*	*100 %*	*70,88*	*100 %*	*78,01*	*89,36 %*	*90,79*	-	-	-	-		*324,38*	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	*Persentase PD lingkup bidang ekonomi yg telah memiliki dokumen perencanaan yg baik, konsisten dan selaras*	*100,00%*	*100,00%*	*160,22*	*100,00%*	*51,75*	*100,00%*	*14,45*	*100,00%*	*12,26*	-	-	-	-		*238,68*	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	*Persentase PD lingkup bidang sosial & budaya yg telah memiliki dokumen perencanaan yg baik, konsisten & selaras*	*100,00%*	*100,00%*	*224,88*	*100,00%*	*78,83*	*100,00%*	*43,33*	*100,00%*	*23.26*	-	-	-	-		*370,30*	
	Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah	*Persentase Rencana Aksi PPK dengan Kategori Minimal Baik (Hijau)*	*100 %*	*100 %*	*54,27*	*100 %*	*10,13*	*100 %*	*5,24*	*100 %*	*3,66*	-	-	-	-		*73,31*	
18	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.20 %	206,90	98.80 %	206,90	98.80 %	413,80	
		Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%		100.00 %		100.00%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		konsisten dan selaras																
		Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menangah dan besar yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		
		Tingkat Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		
	Program pengembangan inovasi daerah	*Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder*	*50.00%*	*80.00%*	-	*85.71%*	*425,74*	*90.911%*	*388,37*	*85.00%*	*90,19*	-	-	-	-		904,32	
19	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	-	-		-		-		-		90.00%	288,36	95.00%	288,36	95.00%	576,72	
		Indeks inovasi daerah	-	-		-		-		-		4100		4140		4140		
		Persentase Implemantasi Rencana Kelitbangan	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	-	-		-		-		-		2		2		2		
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*79,25*	*79,34*	*505,07*	*83,00*	*562,01*	*83,28*	*1.144,55*	*82,70*	*918,66*						*3.130,30*	**BKPSDM**
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*80,00*	*221,15*	*80,00*	*144,32*	*80,00*	*83,93*	*80,00%*	*81,98*						*531,39*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*17,55*	*100%*	*15,30*	*100%*	*18,00*	*100%*	*17,10*						*67,95*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	*Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi*	*29,10%*	*96,03*	*1.087,16*	*97,95*	*1.205,83*	*98,36*	*1.202,55*	*48,00%*	*271,85*						*3.767,39*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Daya Aparatur																	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*B*	*19,04*	*A*	*7,27*	*A*	*9,10*	*A*	*9,22*						*44,65*	
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM										83,85	7.309,89	85,00	7.309,89	85,00	14.619,78	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	*Persentase database kepegawaian yang tersedia secara lengkap*	*100.00%*	*100.00*	*1.685,56*	*100.00*	*1.670,58*	*100.00*	*745,86*	*100.00%*	*572,77*	-	-	-	-	-	*4.674,77*	
		Persentase laporan kesalahan data kepegawaian yang ditindaklanjuti	*100.00%*	*100.00*		*100.00*		*100.00*		*100.00%*		-		-		-		
		Persentase penyelesaian produk layanan	*100.00%*	*100.00*		*100.00*		*100.00*		*100.00%*		-		-		-		
		Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	*100.00%*	*100.00*		*100.00*		*0.00*		*100.00%*		-		-		-		
		Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan	*100.00%*	*100.00*		*100.00*		*100.00*		*100.00%*		-		-		-		
		Persentase Prestasi Kerja PNS Bernilai Baik	*98.77%*	*96.00*		*93.03*		*98.90*		*99.00%*		-		-		-		
21	Program Kepegawaian Daerah	Persentase database kepegawaian yang tersedia secara lengkap										100.00%	753,07	100.00%	753,07	100.00%	1,506,14	
		Persentase laporan kesalahan data kepegawaian yang ditindaklanjuti										100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase penyelesaian produk layanan										100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan										100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan										100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase prestasi kerja PNS yang bernilai baik										99.40%		99.50%		99.50%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi										55.00 %	110,02	64.00 %	110,02	64.00 %	220,05	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*80,14*	*83,32*	*2.633,35*	*80,22*	*2.585,17*	*81,00*	*3.823,73*	*89,00*	*2.573,85*						*11.616,11*	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana prasarana perkantoran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*100 %*	*890,20*	*100 %*	*271,77*	*100 %*	*704,06*	*80,00 %*	*907,44*						*2.773,49*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100 %*	*100 %*	*33,45*	*100 %*	*28,80*	*100 %*	*27,45*	*100 %*	*27,00*						*116,70*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	-							-							-	
	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*9,43*	*A*	*6,02*	*A*	*6,27*	*A*	*6,34*						*28,07*	
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai IKM										83	10.268,82	85	10.268,82	85	20.537,64	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja*	*95.00%*	*95%*	*4,329,98*	*90.13 %*	*3,488,53*	*91.96%*	*2,851,85*	*95%*	*2,119,76*	-	-	-	-	-	*12,790,13*	
		Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap APBD	*10.00%*	*6%*		*4,91 %*		*3,55 %*		*<10.00%*		-		-		-		
		Laporan Keuangan berbasis Akrual	*Ada*	*Ada*		*Ada*		*Ada*		*Ada*		-		-		-		
		Persentase Perangkat Daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	*74.19%*	*74.41%*		*80.64 %*		*83.67%*		*87.07 %*		-		-		-		
		Persentase realisasi PAD	*100.00%*	*100 %*		*97,97 %*		*97,41%*		*100.00%*		-		-		-		
24	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	13,320,07	95,00 %	13,320,07	95,00 %	26,640,15	
		Persentase sisa lebih	-	-		-		-		-		<10		<10%		<10%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		perhitungan anggaran tahun lalu terhadap APBD										%						
		Laporan Keuangan berbasis Akrual	-	-		-		-		-		ADA		ADA		ADA		
25	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,32 %	762,46	93,54 %	762,46	93,54 %	1,524,92	
26	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	712,31	100,00 %	712,31	100,00%	1,424,62	
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan	*Persentase fasilitasi pembiayaan yg lancar dari total pembiayaan*	*70.00%*	*70.00%*	*990,56*	*800 pemanfaat*	*1,148,40*	-	-	*800 pemanfaat*	*1,025,00*	-	-	-	-	*70% ; 800 pemanfaat*	*3,163,97*	
	Program Peningkatan Pelayanan	*Jumlah penerima manfaat BLUD*	*800 pemanfaat*	-	-	-	-	*800 pemanfaat*	*1,224,85*	-	-	-	-	-	-	*800 pemanfaat*	*1,224,85*	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*78,35*	*80,56*	*481,33*	*84,20*	*448,43*	*88,38*	*753,38*	*80,75*	*903,09*						*2.586,25*	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*95,00%*	*137,69*	*96,84 %*	*179,98*	*96,84%*	*138,38*	*80,00 %*	*1.076,33*						*1.532,40*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100 %*	*100 %*	*19,20*	*100 %*	*17,85*	*100 %*	*19,35*	*100 %*	*53,25*						*109,65*	
	Program Peningkatan Pengembanngan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	*Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*A*	*38,65*	*A*	*13,75*	*A*	*12,02*	*A*	*9,70*						*74,14*	
27	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										81,85	7.501,22	81,85	7.501,22	81,85	15.002,45	
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	*Tingkat/level kapabilitas APIP*	*na*	*2*	*482,73*	*3*	*352,06*	*3*	*443,57*	*3*	*202,13*	-	-	-	-	-	*1,480,50*	
	Program penataan dan penyempurnaan	*Persentase penyelesaian pengaduan gratifikasi yang*	*100.00%*	*100.00%*	*71,779,300*	*100.00%*	*260,765,231*	*100.00%*	*271,469,734*	*100.00%*	*645,439,775*	-	-	-	-	-	*1,249,454,040*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	*ditindaklanjuti di lingkungan perangkat daerah*																
28	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Gratifikasi yang ditindaklanjuti di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	954,245	100%	954,24	100%	1,908,49	
	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	*Persentase rekomendai hasil pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti*	*55.30%*	*82.16%*	*904,46*	*85.12%*	*55,02*	*86.02%*	*60.00%*	*82.00%*	*1,238,40*	-	-	-	-	-	-	2,270,58	
29	Program Peneyelenggaraan Pengawasan	Presentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,00%	1,279,59	82,00%	1,279,59	82.00%	2,559,18	
		Presentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti	-	-		-		-		-		60,00%		60,00%		60,00%		
		Tingkat/level kapabilitas APIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		3		3		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*78,35*	*79,35*	*5.118,46*	*79,85*	*7.276,31*	*80,35*	*9.193,43*	*80,75*	*7.997,59*						*29.585,80*	SEKRETARIAT DPRD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*1.086,18*	*80,00%*	*1.114,67*	*80,00%*	*2.092,66*	*80,00%*	*2.971,66*						*7.265,19*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*150,31*	*100%*	*147,77*	*100%*	*495,75*	*100%*	*198,75*						*992,58*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	758,50	*BB*	*328,93*	*BB*	*360,64*	*A*	*320,61*						*1.768,69*	
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM										81,35	18.873,78	81,85	18.873,78	81,85	37.747,56	
		Nilai AKIP										A		A		A		
	Program Peningkatan	*Persentase fasilitasi rapat rapat dan persidangan*	*100.00%*	*100.00%*	*10.534,12*	*100.00%*	*11.510,32*	*100.00%*	*9.255,24*	*100.00%*	*6.952,31*	-	-	-	-	-	*38.252,00*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	*DPRD tepat waktu*																
		Jumlah Produk Hukum DPRD yang difasilitasi	*10*	*10*		*11*		*14*		*12*		-		-		-		
31	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi rapat rapat dan persidangan DPRD tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	14,634,93	100%	14,634,93	100%	29,269,86	
	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*77,48*	*79,00*	*560,05*	*82,00*	*718,18*	*85,00*	*800,13*	*88,00*	*584,04*						*2.662,41*	DINAS SOSIAL
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkantoran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*106,93*	*80,00%*	*121,31*	*80,00%*	*131,33*	*80,00%*	*227,91*						*587,50*	
	Program Peningkatan disiplin aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*11,69*	*100%*	*12,65*	*100%*	*13,50*	*100%*	*14,85*						*52,69*	
	Program Peningkatan Pengembanngan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*CC*	*B*	*22,57*	*BB*	*10,45*	*A*	*10,13*	*A*	*10,61*						*53,77*	
32	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai IKM										90	3.121,31	91	3.121,31	91	6.242,62	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya)*	*Persentase peningkatan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan*	*0.00%*	*10.00%*	*539,25*	*19.67%*	*835,95*	*45.00%*	*602,51*	*46.77%*	*334,20*	-	-	-	-	-	*2,311,93*	
33	Program Rehabilitasi Sosial*)	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99%	563,88	100%	122,11	100%	686,00	
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial)*	*Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak nakal*	*70.00%*	*70.00%*	*864,69*	*80.00%*	*631,02*	*82.00%*	*879,92*	*90.00%*	*721,35*	-	-	-	-	-	*3,097,00*	
	Program pemberda-yaan kelembagaan kesejahteraan sosial)*	*Persentase pening-katan kualitas lembaga kesejahteraan sosial*	*70.00%*	*70.00%*	*782,27*	*80.00%*	*853,32*	*82.50%*	*810,80*	*90.00%*	*264,76*	-	-	-	-	-	*2,711,17*	
34	Program Pemberdayaan Sosial*)	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	234,63	70%	234,63	70%	469,27	
35	Program Penanganan	Persentase korban bencana yang tetangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	102,21	100%	102,21	100%	204,43	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bencana																	
	Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP	*Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan*	*70.00%*	*70.00%*	*198,97*	*80.00%*	*80,59*	*85.00%*	*10,13*	*90.00%*	*72,75*	-	-	-	-	-	*362,45*	
36	Program Pegelolaan Taman Makam Pahlawanan	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	31,52	100.00%	31,52	100.00%	63,04	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*80,03*	*78,97*	*383,11*	*80,94*	*375,46*	*84,86*	*500,18*	*88,00*	*382,82*						*1.641,58*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*142,35*	*80,00%*	*104,13*	*80,00%*	*134,43*	*80,00%*	*79,35*						*460,28*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*9,90*	*100%*	*9,90*	*100%*	*9,90*	*100%*	*10,35*						*40,05*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*B*	*19,59*	*A*	*7,02*	*A*	*9,84*	*A*	*10,03*						*46,50*	
37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM										89,00	2.361,22	90,00	2.361,22	90,00	4.722,45	
	*Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan *)*	*Jumlah anggota perpustakaan*	*1290 orang*	*1509 orang*	*297,53*	*1637 orang*	*408,59*	*1913 orang*	*375,66*	*1675 orang*	*271,10*	-	-	-	-	-	*1,352,90*	
38	Program Pembinaan Perpustakaan *)	Jumlah Anggota Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1736 orang	372,27	1810 orang	372,27	3546 orang	744,55	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	*Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis*	*0.00%*	*0.00%*	*51,56*	*0.00%*	*114,66*	*0.00%*	*43,80*	*48,38%*	*72,33*	-	-	-	-	-	*282,34*	
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	*Persentase PD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku*	*9,67%*	*9.67%*	*64,61*	*9.67%*	*111,11*	*9.67%*	*15,67*	*48,38%*	-	-	-	-	-	-	*191,40*	
	Program pemeliharaan	*Persentase PD dan Kelurahan yang telah*	*5,13%*	*5.13%*	*9,67*	*5.13%*	*5,09*	*5.13%*	*8,20*	*19,23%*	-	-	-	-	-	-	*22,97*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	*memiliki sarana dan prasarana pengelolaan arsip sesuai standar*																
39	Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.29 %	46,77	74.19 %	46,77	74.19 %	93,54	
		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.96 %		100.00 %		100.0 0%	-	
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	*Jumlah dokumen/ arsip yang diakuisisi*	*0 berkas*	*0 berkas*	*194,33*	*3142 berkas*	*96,52*	*747 berkas*	*82,15*	*760 berkas*	*94,78*	-	-	-	-	-	*467,80*	
40	Program Perindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	Jumlah dokumen/ arsip yang diakuisisi										760 berkas	129,43	760 berkas	129,43	1520 berkas	258,86	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*82,19*	82,17	*955,47*	85,83	*1.386,58*	87,11	*923,60*	89,00	*670,11*						*3.935,78*	KECAMATAN PAYAKUMBH BARAT
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*1.717,07*	*80,00%*	*1.275,41*	*80,00%*	*653,06*	*80,00%*	*759,31*						*4.404,87*	
	Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100 %*	*100 %*	*52,99*	*100 %*	*51,22*	*100 %*	*53,92*	*100 %*	*49,05*						*207,18*	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	*Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan*	*1*	*1*	*33,29*	*1*	*3,53*										*36,82*	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	*Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*19,72*	*A*	*3,90*	*A*	*3,76*	*A*	*4,16*						*31,55*	
41	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										90,00	11.688,65	91	11.688,65	91	23.377,31	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*100.00%*	*100.00%*	*868,10*	*100.00%*	*847,62*	*100.00%*	*847,22*	*100.00%*	*588,16*	-	-	-	-	-	*3,151,12*	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	*Persentase kehadiran peserta musrenbang*	*100.00%*	*100.00%*	*233,41*	*100.00%*	*192,15*	*100.00%*	*178,50*	*100.00%*	*155,32*	-	-	-	-	-	*759,39*	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100 %*	*100 %*	*1,540,12*		-	*100 %*	*1,462,45*	*100 %*	*2,529,45*	-	-	-	-	-	*5,532,03*	
		Nilai IKM	*82.19*	*82.17*	-	-	-	*87.11*	-	*89,00*	-	-		-		-		
	Program Penyelenggaraan Kewilayahan	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100 %*	-	- -	*100 %*	*1,529,20* -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1,529,20*	
		Nilai IKM	*82.19*	-		*85.83*		-		-		-		-		-		
	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	-	-	-	-	-	*100.00%*	*4,759,20* -	-	-	-		-	-	-	*4,759,20*	
		Nilai IKM	-	-		-		*87.11*		-		-		-				
42	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	87,77	70%	87,77	70%	175,55	
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
43	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan	-	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	65%	2,321,88	70%	2,321,88	70%	4,643,77	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	-		-		-		-		100%		100%		80%		
		IKM Kelurahan	-	-		-		-		-		90		91		91		
44	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum*)	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100%	92,36	100%	92.36	100%	184.72	
		Persentase santri yang berkualitas										75%		80%		80%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti										100%	12,35	100%	12,35	100%	24,71	
	Program Pelayanan Adm Perkantoran	*Nilai IKM*	*79,42*	*81,00*	*798,73*	*83,00*	*1.355,82*	*85,00*	*874,93*	*87,00*	*721,04*						*3.750,54*	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*121,19*	*80,00%*	*554,06*	*80,00%*	*481,04*	*80,00%*	*345,14*						*1.501,45*	
	Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*30,95*	*100%*	*38,70*	*100%*	*39,60*	*100%*	*39,60*						*148,85*	
	Prog. Peningkatan pengem-bangan sistem pelaporan capaian kinerja&Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*12,73*	*BB*	*3,62*	*A*	*15,11*	*A*	*13,49*						*44,96*	
46	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										90	7.624,21	91	7.624,21	91	15.248,42	
	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*100%*	*100%*	*512,25*	*100%*	*494,86*	*100%*	*489,84*	*100%*	*323,96*	-	-	-	-	-	*1,820,91*	
	Program Peningkatan Partisipasi Masy. dlm membangun Desa	*Persentase kehadiran peserta musrenbang*	*100%*	*100%*	*115,15*	*100%*	*126,21*	*100%*	*128,91*	*100%*	*148,62*	-	-	-	-	-	*518,90*	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*	-	*1,127,83*	-	-	*100%*	-	*100%*	*1,423,52*	-	-	-	-	-	*2,551,36*	
		Nilai IKM	*79.42*	*81*		*83.00*		*85.23*		*87.00*		-		-		-		
	Program Penyelenggaraan Kewilayahan	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*	*100%*	-	*100%*	*862,99*	*100%*	*831,46*	-	-	-	-	-	-	-	*1,694,46*	
		Nilai IKM	*79.42*	*81.00*		*83.00*		*85,23*		-		-		-		-		
47	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang	-	-	-	-	-	65%	2.385,92	-	-	65%	68,71	70%	68,71	70%	2.523,35	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	pelayanan publik	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-		-		87,11%		-		100%		100%		100.00%		
48	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	1,242,99	70%	1,242,99	70%	2,485,99	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan	-	-		-		-		-		90		91		91		
49	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*)	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	79,29	75%	79,29	75%	158,59	
		Persentase santri yang berkualitas	-	-		-		-		-		75%		75%		75%		
50	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	19,43	100%	19,43	100%	38,86	
	Program Pelayanan Adm Perkantoran	*Nilai IKM*	*85,72*	*86,72*	*872,00*	*87,75*	*964,57*	*88,28*	*1.143,95*	*89,00*	*830,26*						*3.810,80*	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*1.418,51*	*80,00%*	*1.406,70*	*80,00%*	*2.763,68*	*80,00%*	*4.132,77*						*9.721,68*	
	Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*29,00*	*100%*	*26,55*	*100%*	*31,18*	*100%*	*33,40*						*120,13*	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	*Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan*	*1*	*1*	*9,26*	*1*	*6,19*										*15,46*	
	Prog. Peningkatan pengem-bangan sistem pelaporan capaian kinerja& Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*A*	*A*	*19,97*	*A*	*2,79*	*A*	*2,93*	*A*	*3,05*						*28,75*	
51	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										90	7.266,76	91	7.266,76	91	14.533,52	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*100.00%*	*100.00%*	*543,38*	*100.00%*	*711,74*	*100.00%*	*623,77*	*100.00%*	*604,74*	-	-	-	-	-	*2,483,65*	
	Program Peningkatan Partisipasi Masy. dlm membangun Desa	*Persentase kehadiran peserta musrenbang*	*100.00%*	*100.00%*	*158,85*	*100.00%*	*136,47*	*100.00%*	*151,63*	*100.00%*	*157,54*	-	-	-	-	-	*604,50*	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100 %*	*100 %*	*1,583,64*	-	-	-	-	*100 %*	*1,487,58*	-	-	-	-	-	*3,071,23*	
		Nilai IKM	*85.72*	*86.19*	-	-	-	-	-	*89*	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Penyelenggaraan Kewilayahan	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100 %*	*100 %*		*100 %*	*1,134,17*	*100 %*	*1,070,57*	-	-	-	-	-	-	-	*2,204,74*	
		Nilai IKM	*85.72*	*86.19*		*87.75*		*88.28*		-		-		-		-		
	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	*Persentase santri yang berkualitas*	*50%*	*50%*	*54,97*	*65%*	*113,47*	*70%*	*79,05*	*75%*	*103,72*	-	-	-	-	-	*351,22*	
	Program Peningkatan Ketertiban Kewilayahan	*Jumlah kegiatan peningkatan ketertiban kewilayahan yang dilaksanakan*	-	-	-	*1*	*4,43*			-	-	-	-	-	-	-	*4,43*	
	Program Pembangunan Masyarakat Sarana Prasarana dan Pemberdayaan di Kelurahan	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	-	-	-	-	-	*100 %*	*3,081,23*	-	-	-	-	-	-	-	*3,081,23*	
52	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	70,73	70%	70,73	70%	141,46	
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
53	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan										65%	1.639,72	70%	1.639,72	70%	3.279.44	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif										100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan										90		91		91		
54	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum*)	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100%	146,22	100%	146.22	100%	292.44	
		Persentase santri yang berkualitas										75%		80%		85%		
55	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti										100%	22,89	100%	22,89	100%	45,79	
	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	*Nilai IKM*	*79,5*	*80,89*	*711,62*	*81,67*	*835,50*	*85,97*	*641,54*	*87,08*	*525,24*						*2.713,91*	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80%*	*80%*	*297,53*	*80%*	*244,38*	*80%*	*284,51*	*80%*	*239,16*						*1.065,59*	
	Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100 %*	*100 %*	*24,29*	*100 %*	*25,23*	*100 %*	*23,84*	*100 %*	*22,04*						*95,41*	
	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*13,63*	*A*	*7,65*	*A*	*7,41*	*A*	*2,29*						*31,00*	
56	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										89	5.301,67	90	5.301,67	91	10.603,35	
	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*100 %*	*80.00%*	*322,56*	*100 %*	*331,77*	*100 %*	*333,73*	*100 %*	*191,69*	-	-	-	-	-	*1,179,75*	
	Program Peningkatan Partisipasi Masy. dlm Membangun Desa	*Persentase kehadiran peserta musrenbang*	*100 %*	*100 %*	*97,13*	*100.00%*	*69,79*	*100 %*	*91,24*	*100 %*	*85,24*	-	-	-	-	-	*343,41*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100 %*	*100 %*	*660,13*	-	- -	-	- -	*100 %*	*863,65*	-	- -	-	- -	-	*1,523,78*	
		Nilai IKM	*79.5*	*81*						*87.08*		-		-		-		
	Program Penyelenggaraan Kewilayahan	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100 %*	-	-	*100 %*	*576,16*	*100 %*	*567,71*	-	-	-	-	-	-	-	*1,143,88*	
		Nilai IKM	*79,50*	-		*81,67*		*85,97*		-		-		-		-		
	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*		-	-	-	-	*100 %*	*1,934,08*	-	-	-	-	-	-	-	*1,934,08*	
		Nilai IKM		-		-		*85,97*		-		-		-		-		
	Program Peningkatan kualitas hidup beragama	*Persentase santri yang berkualitas*	*50.00%*	*60.00%*	*57,96*	*65.00 %*	*123,21*	*70.00%*	*52,15*	*75.00 %*	*349,58*	-	-	-	-	-	*582,91*	
57	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	28,58	75%	28,58	75%	57,17	
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
58	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	921,77	75%	921,77	75%	1,843,54	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan	-	-		-		-		-		89		90		90		
59	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum*)	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	62,51	100.00%	62,51	100.00%	125,03	
		Persentase santri yang berkualitas	-	-		-		-		-		80.00%		85.00%		85.00%		
60	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3,08	100%	3,08	100%	6,16	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*72,48*	*79,94*	*671,55*	*84,68*	*816,07*	*84,85*	*650,23*	*84,00*	*431,32*						*2.569,18*	KECAMATAN LATINA
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*305,72*	*80,00%*	*890,46*	*80,00%*	*691,82*	*80,00%*	*214,23*						*2.102,25*	
	Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*21,04*	*100%*	*19,34*	*100%*	*20,14*	*100%*	*21,60*						*82,13*	
	Prog. Peningkatan pengem-bangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*18,56*	*BB*	*9,89*	*A*	*7,44*	*A*	*9,81*						*45,71*	
61	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										86,00	5.088,77	89,00	5.088,77	89,00	10.177,55	
	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*100%*	*100%*	*365,32*	*100%*	*360,95*	*100%*	*370,92*	*100%*	*299,75*	-	-	-	-	-	*1,396,95*	
	Program Peningkatan Partisipasi Masy. dlm Membangun Desa	*Persentase kehadiran peserta musrenbang*	*100%*	*100%*	*90,36*	*100%*	*47,01*	*100%*	*48,87*	*100%*	*46,00*	-	-	-	-	-	*232,25*	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*	*100%*	*436,05*	-	-	-	-	*100%*	*1,009,98*	-	-	-	-	-	*1,446,03* -	
		Nilai IKM	*72.48*	*79.94*		-		-		*84.00*		-		-		-		
	Program Penyelenggaraan Kewilayahan	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*	-	-	*100%*	*395,04*	*100%*	*410,73*	-	-	-	-	-	- -	-	*805,78*	
		Nilai IKM	*72.48*	-		*84.68*		*84.85*		-		-		-		-		
	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*		-	-	-	-	*100%*	*1,902,650,884*	-	-	-	-	-	-	-	*1,902,65*	
		Nilai IKM		-		-		*84.85*		-		-		-		-		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	*Persentase santri yang berkualitas*	*50.00%*	*60.00%*	*55,18*	*65.00%*	*150,64*	*70.00%*	*50,05*	*75.00%*	*115,05*	-	-	-	-	-	*370,93*	
62	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	25,00	70%	25,00	70%	50,01	
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
63	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	879,75	70%	879,75	70%	1,759,51	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan	-	-		-		-		-		86		89		89		
64	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum*)	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	83,09	100%	83,09	100%	166,18	
		Persentase santri yang berkualitas	-	-		-		-		-		70%		75%		75%		
65	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3,08	100%	3,08	100%	6,16	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*81,56*	81,67	*615,35*	*90,05*	*692,85*	*93,49*	*909,93*	*94,03*	*1.574,93*						*3.793,07*	DINAS DPM & PTSP
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*100,00%*	*95,18*	*100,00%*	*130,35*	*100,00%*	*136,91*	*80,00%*	*121,01*						*483,46*	
	Program Peningkatan disiplin aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*17,54*	*100%*	*53,98*	*100%*	*17,09*	*100%*	*26,55*						*115,18*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	BB	*19,72*	*A*	*19,93*	*A*	*19,96*	*A*	*19,22*						*78,86*	
66	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM										94,05	4.684,48	95,03	4.684,48	94,5	9.368,97	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Daerah Kab/Kota																	
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi)*	*jumlah kerjasama investasi*	*4 kerja sama*	*8 kerja sama*	*127,02*	*8 kerja sama*	*132,35*	*8 kerja sama*	*33,60*	*1 kerja sama*	*45,83*	-	-	-	-	-	*338,81*	
		jumlah promosi investasi	*2 kali*	*2 kali*		*2 kali*		*3 kali*		*2 kali*		-		-		-		
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi)*	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	*4 orang*	-	*354,06*	*1 orang*	*195,27*	*2 orang*	*19,07*	*0*	*30,19*	-	-	-	-	-	*598,61*	
		Jumlah investor	*327 investor*	*496 investor*		*766 investor*		*936 investor*		*1151 investor*		-		-		-		
67	Program Promosi Penanaman Modal*)	Jumlah promosi investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	39,99	1 kali	39,99	11 kali	79,99	
68	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*)	Jumlah investor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1839 investor	52,19	2000 investor	52,19	2000 investor	104,39	
		Jumlah kerjasama investasi	-	-		-		-		-	-	1 kerjasama		1 kerjasama		27 kerjasama		
	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah)*	*Persentase peluang investasi yang telah divalidasi*	*20%*	*22%*	*471,27*	*22%*	*203,40*	*25%*	*72,61*	*28%*	*18,99*	-	-	-	-	-	*766,29*	
69	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*)	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 %	326,12	29.00 %	326,12	29.00 %	652,24	
	Program optimalisasi pelayana publik)*	*Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti*	*100 %*	*100 %*	-	-	-	*100 %*	*2,882,75*	*100 %*	*1,286,92*	-	-	-	-	-	*4,169,68*	
70	Program Pelayanan Penanaman Modal*)	Persentase penertiban dokumen perijinan dan non perijinan sesuai SOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	264,40	100%	264,40	100%	528,81	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*82,86*	*85,57%*	*526,70*	*88,73 %*	*377,86*	*89,99%*	*628,93*	*89,00 %*	*282,28*						*1.815,79*	KANTOR KESBANG POL
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*110,03*	*80,00 %*	*72,64*	*80,00%*	*63,46*	*80,00 %*	*56,61*						*302,76*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100 %*	*100 %*	*5,85*	*100 %*	*5,85*	*100 %*	*5,85*	*100 %*	*5,85*						*23,40*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*29,38*	*A*	*11,35*	*A*	*24,47*	*A*	*14,99*						*80,22*	
71	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										87,00	1.595,85	87,00	1.595,85	87,00	3.191,70	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	*Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat*	*100 %*	*100 %*	*1,243,12*	*100 %*	*1,484,88*	*100 %*	*1,214,83*	*100 %*	*1,095,72*	-	-	-	-	-	*5,038,56*	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	*Jumlah sosialisasi yang diadakan*	*3 kali*	*3 kali*	*88,63*	*5 kali*	*143,69*	*5 kali*	*197,75*	*5 kali*	*60,82*	-	-	-	-	-	*490,91*	
72	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.05 %	52,98	25.05 %	52,98	90.00 %	105,97	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	*Persentase Ormas yang aktif*	*88.89%*	*88.89%*	*370,02*	*84.78 %*	*308,92*	*86.27%*	*346,29*	*90.64 %*	*121,72*	-	-	-	-	-	*1,146,97*	
73	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan Ormas Yang aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.64 %	789,15	90.64 %	789,15	90.64 %	1,578,30	
74	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase penangaanan konflik antar agama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	205,60	100.00 %	205,60	100.00%	411,21	
75	Program Peningkatan Kewaspadan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik yang terjadi di tengah masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	648,08	100.00 %	648,08	100.00%	1,296,17	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*89,22%*	*79,64%*	*917,19*	*80,36%*	*918,82*	*81,25%*	*911,22*	*93,00%*	*704,52*	-	-	-	-		*3.451,78*	DINAS KOMINFO
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*350,05*	*100,00%*	*277,93*	*100%*	*152,41*	*80,00%*	*247,66*	-	-	-	-		*1.028,08*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*12,55*	*100%*	*17,60*	*100%*	*27,00*	*100%*	*31,50*	-	-	-	-		*88,65*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai-an Kinerja& Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*11,43*	*A*	*3,57*	*A*	*3,81*	*A*	*1,53*	-	-	-	-		*20,36*	
76	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00	3.588,59	87,00	3.588,59	91,00	7.177,18	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	*Persentase PD yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yg terintegrasi*	*15.00%*	*20.00%*	*-*	*29.03%*	*69.42*	*45.16%*	*90.12*	-	-	-	-	-	-		*159.54*	
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	*Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media*	*15.00%*	*20.00%*	*1.279,97*	*40.00%*	*1.447,74*	*80.00%*	*2.851,97*	*60.00%*	*2.411,20*	-	-	-	-		*7.990,89*	
77	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00%	1.606,37	85.00%	1.606,37	85.00%	3.212,74	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	*Persentase layanan yang terintegrasi TIK*	*15.00%*	*20.00%*	*3.133,03*	*40.00%*	*2.540,47*	*65.00%*	*4.360,95*	*60.00%*	*3.517,45*		-		-		*13.551,91*	
78	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan yang terintegrasi TIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00%	2.223,37	72.00%	2.148,37	75.00%	4.371,74	
		Persentase PD yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yg terintegrasi	-	-		-		-		-		70.00%		72.00%		75.00%		
		Persentase ketersediaan sarana prasarana TIK PD	-	-		-		-		-		80.00%		85.00%		85.00%		
79	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jenis informasi berklasifikasi persandian yang diamankan	-	-	-	-	-	-	-		-		-	1 set	75,00	1 set	75,00	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jenis informasi berklasifikasi persandian yang diamankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 set	86.88	1 set	86.88	1 set	173,78	
		Persentase penanganan cyber attack	-	-		-		-		-		85.00 %		90.00 %		90.00 %		
	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	*Persentase kepuasan data pengguna statistik*	*80.00%*	*80.00%*	*12,97*	*89.00%*	*43,71*	*87.51%*	*72,50*	*85.00%*	*77,49*						*206,68*	
81	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00 %	74,99	80.00 %	74,99	80.00 %	149,99	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*82,83*	*83.00*	*726,21*	*85,00*	*878,88*	*87,00*	*869,51*	*88,00*	*796,41*						*3.271,04*	DISDUKCAPIL
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*%*	*288,10*	*80,00%*	*466,05*	*80,00%*	*622,25*	*80,00%*	*528,71*						*1.905,12*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100 %*	*100 %*	*24.076.000*	*100 %*	*21,47*	*100 %*	*22,68*	*100 %*	*25,27*						*93,51*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*34,74*	*BB*	*6,90*	*BB*	*19,01*	*A*	*19,20*						*79.867.110*	
82	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat										A	3.394,36	A	3.394,36	A	6.788,72	
		Nilai IKM										89,00		90,00		90%		
	Program Penataan Administrasi Kependudukan)*	*Cakupan kepemilikan kartu keluarga*	*90.00%*	*100.00%*	*1.362,07*	*100.00%*	*1.251,09*	*100.00%*	*1.438,29*	*100.00%*	*1.231,46*	-	-	-	-	-	*5.282,93*	
		Cakupan kepemilikan KTP-el	*80.00%*	*96.70%*		*95.23%*		*98.96%*		*98.96%*		-		-		-		
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 1-18 tahun	*69.00%*	*86.10%*		*91.01%*		*94.52%*		*94.52%*		-		-		-		
		Cakupan penertiban akte kematian	*24.00%*	*36.00%*		*50.17%*		*70.53%*		*47.00%*		-		-		-		
		Persentase penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	*80.00%*	*85.00%*		*100.00%*		*100.00%*		*100.00%*		-		-		-		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (SOP)	*1 hari*	*1 hari*		*1 hari*		*1 hari*		*1 hari*		-		-		-		
83	Program pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	790.66	100%	790.66	100%	1.581,33	
		cakupan kepemilikan KTP	-	-		-		-		-		90%		91%		91%		
		Persentase penyelesaian penertiban dokumen tepat waktu	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
		Rata-rata lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen (SOP)	-	-		-		-		-		1 hari		1 hari		1 hari		
84	Program Pencatatan Sipil*)	Cakupan kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91%	465,29	92%	465,29	92%	930,58	
		Cakupan penerbitan akta kematian	-	-		-		-		-		52%		62%		75%		
		Persentase penyelesaian penerbitan dokumen tepat waktu	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
		Rata-rata lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen (SOP)	-	-		-		-		-		1 hari		1 hari		1 hari		
85	Program pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Persentase sarana an prasarana SIAK dan KTP El dalam kondisi baik										90%	183,12	92%	183,12	92%	366,24	
		Jumlah nota kesepahaman kerjasam inovasi pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil										13 Nota kesepahaman		15 Nota kesepahaman		28 Nota kesepahaman		
		Persentase pemberian hak akses data kependudukan										35%		50%		60%		
		Persentase pengolahan data kependudukan										80%		85%		85%		
		Persentase media yang digunakan untuk publikasi dan edukasi										85%		90%		90%		
86	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan										100%	50,94	100%	50,94	100%	101,88	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*77,50*	*80,33%*	*500,53*	*82,50%*	*482,30*	*83,20%*	*479,34*	*82,50%*	*366,50*	-	-	-	-		*1.828,69*	BPBD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana prasarana perkantoran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*100,00%*	*1.197,06*	*100,00%*	*184,93*	*100,00%*	*124,85*	*80,00%*	*63,94*	-	-	-	-		*1.570,78*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100 %*	*100 %*	*43,25*	*100 %*	*42,90*	*100 %*	*38,30*	*100 %*	-	-	-	-	-		*124,45*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*8,55*	*A*	*6,56*	*A*	*5,58*	*A*	*5,04*	-	-	-	-		*25,74*	
87	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,00	4.080,10	89,00	4.080,10	89,00	8.160,21	
	Program Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	*Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana*	*16.24%*	*18.00%*	*730,34*	*17.34 %*	*393,40*	*74.47%*	*592,04*	*74.47 %*	*107,66*	-	-	-	-		*1.823,45*	
		Presentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	*100.00%*	*100.00%*		*100.00%*		*100.00%*		*100.00%*		-		-				
88	Program Penanggulangan Bencana	Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.47 %	748,96	100%	748,96	100%	1,497,92	
		Presentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggula-ngan bencana	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
		Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
		Persentase pelayanan penanggulangan bencana				-		-		-		100%		100%		100%		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*73,92*	*73,33*	*647,55*	*83,3*	*771,70*	*83,3*	*741,27*	*85*	*799,65*						*2.960,18*	KANTOR SATPOL PP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana prasarana perkantoran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*3.070,57*	*80,00 %*	*644,85*	*80,00%*	*375,11*	*80,00 %*	*521,58*						*4.612,13*	
	Program Peningkatan Disiplin	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut*	*100 %*	*100 %*	*218,10*	*100 %*	*197,27*	*100 %*	*195,83*	*100 %*	*245,56*						*856,76*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2016)	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Aparatur	*lengkap*																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*22,95*	*A*	*3,71*	*A*	*3,78*	*A*	-						*30,45*	
89	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										87,00	5.816,15	90,00	5.816,15	91,00	11.632,30	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	*Persentase anggota Linmas yang ikut pelatihan*	*0.00 %*	*90.00%*	*71,80*	*0.00 %*	-	*95.00%*	*216,82*	*100 %*	*116,97*						*405,60*	
	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	*Penegakan Perda*	*100 %*	*100 %*	*3.290,85*	*100 %*	*2.855,41*	*100 %*	*3.733,12*	*100 %*	*4.975,37*	-	-	-	-	-	*14.854,76*	
90	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	4.344,75	100%	4.344,75	100%	8.689,51	
		Persentase anggota Linmas yang ikut pelatihan	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran)*	*Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran*	*120,00%*	*100.00%*	*2.240,78*	*124.33%*	*1.249,21*	*124.33%*	*1.122,24*	*124.33%*	*1.224,90*	-	-	-	-	-	*5.837,15*	
91	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran*)	Persentase cakupan pelayanan penanganan kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,33%	1.328,15	124,33%	1.328,15	124,33%	2.656,31	

*Ket : *) Crosscutting*

6.5. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini sebelum dan setelah perubahan adalah :

Tabel VI. 37
Tujuan Misi 5 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan
1	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis	Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis

Sasaran yang akan dicapai dalam misi 1 ini ada 5 sasaran sebelum perubahan menjadi 4 sasaran setelah perubahan yaitu :

Tabel VI. 38
Sasaran Misi 5 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
1	Meningkatnya pengamalan ajaran agama;	Meningkatnya penerapan ABS SBK dalam Prilaku Masyarakat
2	Menguatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat.	-

6.5.1. Strategi untuk Misi 5

Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada Misi ke-5, strategi sebelum dan sesudah perubahan RPJMD sebagai berikut :

Tabel VI. 39
Strategi Misi 5 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Strategi Sebelum Perubahan	Strategi Setelah Perubahan
1	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat;	Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan ajaran Islam dalam Kehidupan Masyarakat
2	Meningkatkan fungsi dan peran lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyakatan

Terkait dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Startegi tersebut untuk dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan adalah sebagaimana pada Tabel VI.40. berikut :

Tabel VI.40
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pada Misi 5 Setelah Perubahan

Visi : Payakumbuh Maju, Sejahtera, dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang		
Misi : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis.	1. Meningkatnya penerapan ABS SBK dalam Prilaku Masyarakat	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat;
		2. Meningkatnya fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan.

6.5.2. Arah kebijakan untuk Misi 5

Perubahan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi Misi ke-5 adalah :

Tabel VI. 41
Arah Kebijakan Misi 5 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Arah Kebijakan Sebelum Perubahan	Arah Kebijakan Setelah Perubahan
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
2	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah
3	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan
4	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat
5	Mendorong revitalisasi Rumah Gadang dan Balai Adat	Mendorong revitalisasi Rumah Gadang dan Balai Adat

Arah Kebijakan Pembangunan untuk Misi ke-5 setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel VI.42. berikut :

Tabel VI.42
Arah Kebijakan Pembangunan pada Misi 5 Kota Payakumbuh 2018-2022 Setelah Perubahan

No	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
2	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah	Peningkatan peran dan fungsi sarana ibadah
3	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan	Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan
4	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat	Penguatan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat
5	Mendorong revitali-sasi Rumah Gadang dan Balai Adat	Mendorong revitali-sasi Rumah Gadang dan Balai Adat	Mendorong revitali-sasi Rumah Gadang dan Balai Adat	Mendorong revitali-sasi Rumah Gadang dan Balai Adat	Mendorong revitali-sasi Rumah Gadang dan Balai Adat

6.5.3. Program Pembangunan Daerah Misi 5

Sedangkan program-program prioritas untuk mewujudkan misi ke-5 yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama di tengah masyarakat adalah:

Tabel VI.43
Program Prioritas Pencapaian Sasaran Pada Misi 5

PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 5 SESUAI PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	PROGRAM PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN MISI 5 SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
1. Program pendidikan karakter/akhlak mulia 2. Program Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama 3. Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan 4. Program peningkatan kualitas hidup beragama 5. Program Pengembangan Nilai Budaya 6. Program pengelolaan kekayaan budaya 7. Program pengelolaan keragaman budaya	1. Program Pengelolaan Pendidikan. 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Keterkaitan antara Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel VI.44:

Tabel VI.44
Keterkaitan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada Misi 5 Kota Payakumbuh 2017-2022 setelah Perubahan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 13/2006	Program Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri 90/2019
1.Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat	1.Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan	Program pendidikan karakter/akhlak mulia	Program Pengelolaan pendidikan
	2.Peningkatan peran & fungsi sarana ibadah	Program Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	Program Pemerintahan dan kesejahteran Rakyat
2.Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan	3.Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan	Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	4.Penguatan tugas pokok & fungsi lembaga adat	Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
	5.Mendorong revitalisasi Rumah Gadang dan Balai Adat	-	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel VI.45 :

Tabel VI.45
Keterkaitan antara Misi, Tujuan,Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Untuk Misi 5

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periodeRPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasai	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Misi : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah																	
	Tujuan :	**Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis**																
		Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/Badan Zakat/Wakaf	2,5%	3%		3,2%		4,78%		4,20%		4,60%		5,00%		5,00%		
		Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai budaya	-	-		-		-		100%		100%		100%		100%		
	Sasaran 1 :	Meningkatnya penerapan ABS SBK dalam Perilaku Masyarakat																
		Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	5,31%	13,83%	-	22,00%	-	47,62%	-	47,62%	-	47,62%	-	51,06%	-	51,06%	-	
		Persentase peningkatan zakat/wakaf yg dikumpul-kan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	2,50%	3,00%	-	3,20%	-	4,78%	-	4,20%	-	4,60%	-	5,00%	-	5,00%	-	
		Persentase lembaga keagamaan(MUI) yang aktif	20,00%	20,00%		20,00%		60,00%		-		-		-		-	-	
		Persentase lembaga adat (KAN) yang aktif	75,00%	80,00%		90,00%		100%		-		-		-		-	-	
		Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai budaya		-		-		-		100%		100%		100%		100%		
	Program pendidikan karakter/akhlak mulia	*Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik*	*5,31%*	*13,83%*	-	*22,00%*	*3.832,51*	*47,62%*	*4.531,07*	*47,62%*	*2.628,57*	-	-	-	-	-	*10.992,15*	Dinas Pendidikan*)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,62%	48.284,36	51,06%	48.284,36	51,06%	96.568,71	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	*Persentase mesjid yang dikelola secara optimal*	*40,00%*	*50,00%*	*1.419,33*	*55,00%*	*545,99*	*60,00%*	*425,58*	*65,00%*	*170,50*	-	-	-	-	-	*2.561,41*	Setdako
		Persentase peningkatan zakat/wakaf yg dikumpul-kan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf	*2,50%*	*3,00%*		*3,20%*		*4,78%*		*4,20%*		-	-	-	-	-		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periodeRPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasai	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program peningkatan peran & fungsi lembaga sosial keagamaan	*Persentase organisasi/ lembaga sosial dan keagamaan yang aktif*	*55,00%*	*61,00%*	*374,99*	*67,00%*	*587,47*	*74,00%*	*1.271,24*	*77,00%*	*228,16*	-	-	-	-	-	*2.461,86*	
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00%		100,00%		100,00%		
		Persentase mesjid yang berfungsi secara optimal mendukung ABS-SBK										70,00%		80,00%		80,00%		
		Persentase masjid yang dikelola secara optimal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00%	2.442,78	25,00%	2.442,79	25,00%	4.885,57	
		Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00%		85,00%		85,00%		
	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	*Persentase santri yang berkualitas*	*50,00 %*	*60,00 %*	*75,94*	*65,00 %*	*138,87*	*70,00 %*	*68,07*	*75,00 %*	*167,49*						*450,38*	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT
	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100 %	92,36	100 %	92,36	100 %	184,72	
		Persentase santri yang berkualitas										75%		80%		80%		
	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	*Persentase santri yang berkualitas*	*50,00 %*	*60,00 %*	*73,79*	*65,00 %*	*461,75*	*70,00 %*	*50.10*	*75,00 %*	*93,92*						*679,57*	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100 %	79,30	100 %	79,30	100 %	158,60	
		Persentase santri yang berkualitas										75%		80%		80%		
	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	*Persentase santri yang berkualitas*	*50%*	*50%*	*54,97*	*65%*	*113,47*	*70%*	*79,05*	*75%*	*103,72*						*351,22*	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA
	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100 %	146,22	100 %	146,22	100 %	292,44	
		Persentase santri yang										75%		80%		85%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi						Target								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periodeRPJMD		
				Realisasi	Rp (Jt)	Realisasi	Rp (Jt)	Realisasai	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Umum	berkualitas																
	Program Peningkatan kualitas hidup beragama	*Persentase santri yang berkualitas*	*50,00 %*	*60,00 %*	*57,96*	*65,00 %*	*123,21*	*70,00 %*	*52,15*	*75,00 %*	*349,58*						*582,91*	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100,00%	62,51	100,00%	62,51	100,00%	125,03	
		Persentase santri yang berkualitas										80,00 %		85,00 %		85,00 %		
	Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama	*Persentase santri yang berkualitas*	*50,00 %*	*60,00 %*	*55,18*	*65,00 %*	*150.64*	*70,00 %*	*50,05*	*75,00 %*	*115,05*						*370,93*	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100 %	83,09	100 %	83,09	100 %	166,18	
		Persentase santri yang berkualitas										70%		75%		75%		
	Program Pengembangan Nilai Budaya	*Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif*	*66 Kelompok*	*66 Kelompok*		*70 Kelompok*		*71 Kelompok*		*72 Kelompok*		-		-		-		Disparpora
		Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah	*22 orang*	*22 orang*	*711,67*	*23 orang*	*614,72*	*24 orang*	*503,61*	*25 orang*	*11,15*	-	-	-	-		*1.841,16*	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	*Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi*	*18 bcb*	*18 bcb*	*205,97*	*26 bcb*	*94,47*	*26 bcb*	*407,53*	*26 bcb*	*19,99*	-	-	-	-	-	*727,97*	
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi										26 bcb	53,34	28 bcb	53,34	28 bcb	106,68	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	*Jumlah penyelenggaraan festival budaya*	*8 event*	*8 event*	*963,65*	*8 event*	*1.169,80*	*13 event*	*1.541,82*	*5 event*	*322,39*	-	-	-	-	-	*3.997,66*	
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 kelompok	365,44	74 kelompok	365,44	74 kelompok	730,88	
		Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 orang		27 orang		27 orang		
		Jumlah penyelenggaraan festival budaya										12 event		15 event		15 event		

*Ket : *) Crosscutting*



BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Penjabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota secara hierarki memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam 5 prioritas pembangunan. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Program dan indikator kinerja dikelompokkan ke dalam 6 urusan wajib pelayanan dasar, 16 Urusan Wajib non pelayanan dasar, 7 Urusan Penunjang , 2 Urusan Pendukung, 5 Urusan Pilihan dan 1 Urusan Kewilayahan. Urusan wajib pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan :

Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Urusan Wajib non pelayanan dasar terdiri dari Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pasar, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pemuda dan Olah Raga, Statistik, Kebudayaan, Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan karakteristik daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian. Urusan Penunjang adalah urusan pemerintahan yang berfungsi sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan dapat berjalan sebagaimana kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terdiri dari Urusan Inspektorat, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, serta Kesatuan Bangsa dan Politik dan Urusan Penanggulangan Bencana. Berikutnya Urusan Pendukung merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan fungsi fasilitasi dan koordinasi operasional Pemerintahan Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif yang terdiri dari Urusan Kesekretariatan Daerah dan Urusan Kesekretariatan DPRD. Sedangkan Urusan Kewilayahan menjadi urusan tersendiri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama Perangkat Daerah dan kemudian disepakati dengan DPRD. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan output selain outcome pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta OPD penanggungjawab. Namun demikian pendanaan program dan kegiatan setiap tahunnya mengacu kepada pagu indikatif yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah kota payakumbuh tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel VII.1 dan Indikasi rencana program prioritas yang disetai kebutuhan pendanaan secara rinci dapat dilihat pada tabel VII.2

TABEL VII.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	**URUSAN PEMERINTAH YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR**				**256,435,424,279**		**240,610,608,513**		**281,861,445,927**		**252,026,089,756**		**467,042,331,287**		**467,042,331,287**		**1,965,018,231,049**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN**				**38,214,199,483**		**41,569,617,270**		**52,175,144,160**		**46,526,983,929**		**175,365,499,741**		**175,365,499,741**		**529,216,944,324**	
1.01.01.01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*82.49*	*84.00*	*2,543,655,158*	*81.85*	*3,314,245,815*	*85.18*	*1,873,600,366*	*90.00*	*1,947,607,634*						*9,679,108,973*	
1.01.01.01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*75.00%*	*80.00%*	*452,747,697*	*80.00%*	*109,186,914*	*80.00%*	*97,941,358*	*80.00%*	*175,282,150*						*835,158,119*	
1.01.01.01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*		*100%*	*-*	*100%*	*-*	*100.00%*	*39,841,700*						*39,841,700*	
1.01.01.01.04	*Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur*	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2 orang*	*15,606,500*	*2 orang*	*-*						*15,606,500*	
1.01.01.01.05	*Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*72,372,750*	*BB*	*39,327,600*	*A*	*86,059,490*	*A*	*26,127,750*						*223,887,590*	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM										91.00	127,068,644,991	92.00	127,068,644,991	92.00	254,137,289,982	
1.01.01.01.15	*Program pendidikan anak usia dini*	*Persentase satuan PAUDNI yang memiliki sapras sesuai SNP*	*58,00%*	*60.00%*	*2,443,839,422*	*62%*	*1,939,155,800*	*65.00%*	*3,821,726,376*	*65.00%*	*3,805,461,525*						*12,010,183,123*	
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang pengelolaannya berkategori baik	*68.50%*	*70.00%*		*72%*		*74.00%*		*77.00%*								
		Persentase PTK PAUD yang sesuai dengan SNP	*49.00%*	*50.00%*		*52%*		*55.00%*		*56.00%*								
1.01.01.01.16	*Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun*	*Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP*	*78.50%*	*80.00%*	*10,779,753,262*	*83%*	*13,618,029,268*	*85.00%*	*18,873,368,983*	*86.00%*	*14,883,518,671*						*58,154,670,184*	
		Rata - rata nilai Mid semester	*7.14*	*7.50*		*7.55*		*7.5*		*7.65*								
		Rata - rata nilai semester	*7.16*	*7.55*		*7.55*		*7.6*		*7.65*								
1.01.01.01.18	*Program Pendidikan Non Formal*	*Angka melek huruf*	*99,63%*	*99,56%*	*4,074,382,311*	*99.56%*	*814,508,600*	*100%*	*2,228,006,269*	*99.71%*	*185,889,145*						*7,302,786,325*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01.01.01.22	*Program Manajemen Pelayanan Pendidikan*	*Persentase satuan pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik*	*67.00%*	*70.00%*	*439,523,880*	*72%*	*334,727,225*	*74.50%*	*162,537,200*	*75.00%*	*77,490,925*						*1,014,279,230*	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01.94	*Program Pendidikan Karakter/ Akhlak mulia*	*Persentase sekolah dgn pendidikan karakter berkategori baik [2])*	*5.31%*	*13.83%*	*-*	*22%*	*3,832,514,037*	*47.62%*	*4,531,076,685*	*47.62%*	*2,628,567,230*						*10,992,157,952*	
1.01.01.01.95	*Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*	*APK SD [1])*	*114*	*124.2*	*16,869,951,839*	*125.89*	*17,178,795,058*	*122.53*	*17,076,727,335*	*127.50*	*19,129,669,974*						*70,255,144,206*	
		APK SMP [1])	*141*	*159.67*		*163.68*		*165.51*		*160.08*								
		APM SD [1])	*100.88*	*110.65*		*112.68*		*110.16*		*110.50*								
		APM SMP [1])	*109.94*	*121.32*		*125.40*		*125.30*		*121.30*								
01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP										87%	48,284,356,430	90%	48,284,356,430	90%	96,568,712,860	
		Rata-rata Nilai Mid Semester										7.70		7.75		7.75		
		Rata-rata persentase pencapaian KKM SD pada Satuan Pendidikan										92%		94%		94%		
		Rata-rata persentase pencapaian KKM SMP pada Satuan Pendidikan										6%		6.1%		6.1%		
		Rata-Rata Nilai Semester										7.70		7.75		7.75		
		Persentase satuan PAUDNI yang memiliki sapras sesuai SNP										67%		70%		70%		
		Persentase satuan Pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik										77%		80%		80%		
		Persentase PTK yang sesuai dengan SNP										60%		65%		65%		
		Angka Melek Huruf										99.75		99.81		99.81		
		Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik [2])										47.62%		51.06%		51.06%		
01.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan Pendidikan PAUD yang pengelolaannya berkategori baik										78%	3,998,400	80%	3,998,400	80%	7,996,800	
		Persentase PTK PAUD yang sesuai dengan SNP										60%		65%		65%		
1.01.01.01.20	*Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	*Persentase ketersediaan guru per rombongan belajar*	*86.50%*	*86.70%*		*86.90%*		*87.50%*		*87.50%*								

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase ketersediaan guru per mata pelajaran	*79.83%*	*80.00%*	*537,973,164*	*80%*	*389,126,953*	*81.00%*	*3,408,493,598*	*80.75%*	*3,627,527,225*						*7,963,120,940*	
		Persentase PTK yang sesuai dengan SNP	*46.00%*	*50.00%*		*53%*		*54.00%*		*57.00%*								
#####	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketersediaan guru per rombongan belajar										88%	8,499,920	88.50%	8,499,920	88.50%	16,999,840	
		Persentase ketersediaan guru per mata pelajaran										81%		81.50%		81.50%		
		Persentase PTK yang sesuai dengan SNP										60%		65%		65%		
1.02	**URUSAN PEMERINTA BIDANG KESEHATAN**				**103,955,409,387**		**91,013,100,617**		**107,223,613,696**		**103,064,757,787**		**161,960,699,632**		**161,960,699,632**		**729,178,280,751**	
1.02.02.01.01	*Program Pelayanan administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*70.22*	*77.00*	*1,759,578,373*	*79.00%*	*2,081,266,961*	*81.00*	*2,484,810,924*	*84.00*	*2,460,651,734*						*8,786,307,992*	
1.02.02.01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana prasarana perkantoran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*166,947,847*	*80.00%*	*326,817,746*	*80.00%*	*242,731,126*	*80.00%*	*241,405,450*						*977,902,169*	
1.02.02.01.03	*Program Peningkatan disiplin aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*168,750,000*	*100%*	*168,960,000*	*100%*	*173,236,800*	*100%*	-						*510,946,800*	
1.02.02.01.04	*Program Peningkatan Pengembanngan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*26,173,050*	*BB*	*40,269,600*	*A*	*40,617,500*	*A*	*28,517,495*						*135,577,645*	
1.01..02.01.34	*Program peningkatan pelayanan BLUD*	*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*	*85.00%*	*88.00%*	*64,229,867,277*	*90.00%*	*56,353,774,043*	*95.00%*	*62,961,330,800*	*100%*	*65,081,510,042*						*248,626,482,162*	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM Dinkes										87%	129,513,668,550	89%	129,513,668,550	89%	259,027,337,100	
		Persentase peningkatan pelayanan BLUD										100%		100%		100%		
1.01.02.01.15	*Program obat dan pembekalan kesehatan*	*persentase ketersedian obat &perbelkes untuk 24 bulan*	*100%*	*100%*	*1,049,103,812*	*100%*	*1,902,655,802*	*100%*	*1,365,687,312*	*100%*	*1,492,070,017*						*5,809,516,943*	
		persentase rumah tangga yg mendapatkan sosialisasi pangan sehat	*80.00%*	*80.00%*		*80.00%*		*85.00%*		*85.00%*								
1.01.02.01.16	*program upaya kesehatan masyarakat*	*persentase kepersetaan jkn*	*85.10%*	*87.00%*	*7,380,979,038*	*89.00%*	*8,894,399,422*	*95.00%*	*13,596,664,976*	*100%*	*18,450,226,440*						*48,322,269,876*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01..02 .01.20	program perbaiki gizi masyarakat	Persentase peningkatan status gizi masyarakat	100.00%	100.00%	71,068,550	100.00%	70,936,216	100.00%	263,305,722	100.00%	88,599,050						493,909,538	
		Persentase penanganan balita gizi buruk	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%								
		Cakupan balita gizi buruk	0.08%	<3%		<3%		<3%		<3%								
1.01..02 .01.21	Program pengembangan lingkungan sehat	Cakupan jemban yang sesuai standar kesehatan	85.92%	87.00%		89.50%	287,581,250	90.00%	191,276,892	92.00%	41,377,700						871,844,512	
		Cakupan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga	97.33%	97.50%		98.00%		98.00%		98.00%								
		Cakupan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	98.82%	99.00%	351,608,670	99.10%		99.20%		99.00%								
		Cakupan pengelolaan limbah cair rumah tangga	92.60%	93.00%		94.00%		94.50%		95.00%								
		Persentase cakupan stop BABS	18.75%	22.91%		27.08%		31.25%		37.50%								
		Cakupan laik sehat TPM	77.03%	78.00%		79.00%		80.00%		81.00%								
		Cakupan laik sehat TTU	79.64%	80.00%		81.00%		82.00%		83.00%								
		Persentase peningkatan STBM	100.00%	100%		100.00%		100.00%		100.00%								
		Persentase laik sehat TIM dan TTU	92.99%	94.00%		95.00%		96.00%		97.00%								
1.01..02 .01.22	Progam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Cakupan penemuan semua kasus TB	40.90%	41.00%	175,881,150	41.50%	88,344,604	42.00%	151,817,350	43.00%	90,864,835						506,907,939	
		Persentase TB yang nmengatahui status HIV	38.00%	39.00%		40.00%		42.00%		43.00%								
		Persentase HIV AIDS yang mendapatkan ARV	18.90%	20.00%		20.00%		20.00%		20.00%								
		Cakupan penanganan kasus diare	100%	100%		100%		100%		100%								
		Insident rate DBD per 100.000 penduduk	0.83	<41		<41		<41		<41								
		Cakupan kelurahan UCI	96.30%	97.00%		97.50%		98.00%		98.50%								

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Cakupan pelayanan imunisasi anak sekolah	*90.00%*	*90.00%*		*92.00%*		*93.00%*		*95.00%*								DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap	*89.87%*	*90.00%*		*93.00%*		*95.00%*		*96.00%*								
		Cakupan penaganan kasus DBD	*100%*	*100%*		*100%*		*100%*		*100%*								
1.01..02 .01.22	*Program standarlisasi Pelayanan kesehatan*	*Persentase RS & puskesmas terakreditasi*	*66.60%*	*80%*	*528,090,729*	*100%*	*255,916,175*	*100%*	*492,931,090*	*100%*	*314,024,435*						*1,590,962,429*	
		Persentase puskesmas dengan nilai IKM >75	*100%*	*100%*		*100%*		*100%*		*100%*								
		Persentase sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai standar	*50.00%*	*65%*		*70.00%*		*72.00%*		*75.00%*								
1.01..02 .01.25	*Program pengadaan peningkatan, perbaikan sarpras puskesmas/pustu/jaringan*	*Persentase ketersediaaan prasarana puskesmas sesuai standar*	*80.00%*	*83.00%*	*3,808,818,268*	*85.00%*	*9,396,629,838*	*85.50%*	*2,792,577,794*	*87.00%*	*2,422,422,104*		-		-		*18,420,448,004*	
1.01..02 .01.26	*Program pengadaan peningkatan sarana dan prasaran rumah sakit/rumah sakit jiwa/RS paru-paru/RS mata*	*persentase ketersediaan alat kedokteran RS sesuai standar*	*78.00%*	*78.00%*	*20,300,721,693*	*80.00%*	*6,082,905,916*	*82.00%*	*17,749,547,627*	*83.00%*	*6,985,497,000*				-		*51,118,672,236*	
		Persentase ketersediaan prasarana RS sesuai standar	*75.00%*	*75.00%*		*80.00%*		*82.00%*		*83.00%*								
1.01..02 .01.30	*Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia*	*Cakupan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sesuai standar*	*88.20%*	*90.00%*	-	*100.00%*	*55,852,050*	*100.00%*	*59,049,900*	*100%*	*5,191,650*						*120,093,600*	
1.01..02 .01.32	*Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak*	*Cakupan persalinan dengan nakes di faskes*	*91.80%*	*98.00%*	*242,308,227*	*100%*	*292,384,750*	*100%*	*240,013,679*	*100%*	*253,678,312*						*1,028,384,968*	
		Cakupan pelayanan nifas sesuai standar	*92.50%*	*95.00%*		*100%*		*100%*		*100%*								
		Cakupan pelayanan neonatal sesuai standar	*95.51%*	*98.00%*		*100%*		*100%*		*100%*								
1.01..02 .01.34	*Program pengendalian penyakit tidak menular*	*Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan*	*92.78%*	*95.00%*		*100%*	*25,996,800*	*100%*	*124,329,650*	*100%*	*10,167,500*						*180,350,850*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Cakupan penderita DM yang mendapat pelayanan sesuai standar	*95.00%*	*95.00%*	*19,856,900*	*100%*		*100%*		*100%*								
		Cakupan IVA positif yang tertangani	*95.00%*	*95.00%*		*100%*		*100%*		*100%*								
		Cakupan pelayanan IVA usia produktif	*30.00%*	*30.00%*		*32.00%*		*33.00%*		*34.00%*								
		Cakupan penemuan kasus hipertensi usia >15 tahun	*20.00%*	*20.00%*		*22.60%*		*22.80%*		*23.00%*								
		Cakupan penemuan kasus DM usia >15 tahun	*1.40%*	*1.50%*		*1.60%*		*1.70%*		*1.80%*								
1.01..02 .01.34	*Program pelaksanaan bantuan operasional kesehatan puskesmas*	*Persentase puskesmas dengan nilai IKM >75*	*100%*	*100%*	*2,919,572,914*	*100%*	*3,835,044,761*	*100.00%*	*3,968,995,804*	*100%*	*4,734,232,000*						*15,457,845,479*	
1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian bayi										24	31,529,468,558	23	31,529,468,558	23	63,058,937,116	
		Jumlah kasus kematian ibu melahirkan										3		3		3		
		Persentase penanganan kasus penyakit menular berpotensi KLB										100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular										100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase Kelurahan STBM										93.00%		95.00%		95.00%		
1.02.03	Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Persentase peningkatan kualitas dan kualitas SDM pelayanan kesehatan										100%	180,570,904	100%	180,570,904	100%	361,141,808	
1.01.02. 01.17	*program pengawasan obat dan makanan*	*persentase kegiatan pengawasan keamanaan pangan*	*100.00%*	*100.00%*	*186,514,825*	*100.00%*	*194,101,214*	*100.00%*	*154,991,450*	*100%*	*266,821,013*						*802,428,502*	
		persentase kelompok masyarakat cerdas menggunakan obat	*25.00%*	*25.00%*		*30.00%*		*35.00%*		*40%*								

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase peningkatan pengelolaan obat sesuai standar										100%	6,991,800	100%	6,991,800	100%	13,983,600	
		Persentase kegiatan pengawasan keamanan pangan										100%		100%		100%		
1.01.02.01.19	*program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat*	*Persentase rumah ber PHBS*	*66.33%*	*67.00%*	*569,568,064*	*70.00%*	*659,263,469*	*75.00%*	*169,697,300*	*77.00%*	*97,501,010*						*1,496,029,843*	
		Persentase sekolah ber PHBS	*48.33%*	*73.00%*		*75.00%*		*78.00%*		*80.00%*								
1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase PHBS rumah tangga dan sekolah										85%	729,999,820	90.00%	729,999,820	90.00%	1,459,999,640	
1.03	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM**				**89,693,930,172**		**90,737,476,146**		**104,420,015,697**		**84,747,836,965**		**96,314,336,938**		**96,314,336,938**		**562,227,932,856**	
1.01.03.01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*73.69*	*77.00*	5,458,247,261	*80.60*	6,012,656,697	*82.15*	6,540,874,126	*83.28*	*6,523,095,762*						*24,534,873,846*	
1.01.03.01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80.00%*	*80.11%*	*5,013,418,114*	*79.95%*	2,697,739,467	*85.60%*	2,437,947,280	*93.30%*	*11,022,702,798*						*21,171,807,659*	
1.01.03.01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*52,880,000*	*100.00%*	*52,232,500*	*100.00%*	*60,970,000*	*100.00%*	*71,920,000*						*238,002,500*	
1.01.03.01.04	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur*	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	*3*	-	-	*10*	*37,847,695*	*10*	-	-	-						*37,847,695*	
1.01.03.01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*A*	*71,635,900*	*A*	*69,465,900*	*A*	*108,311,350*	*A*	*148,491,026*						*397,904,176*	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat										85.00	14,439,247,126	87	14,439,247,126	87	28,878,494,252	
		Persentase pengelolaan RB (PANRB) SKPD										85.00		90		90		
		INDEKS AKIP SKPD										90.00		92.5		92.5		
1.01.03.01.15	*Program Pembangunan Jalan dan Jembatan*	*persentase Panjang jalan status kota dengan kondisi mantap [2])*	*63.81%*	*67.22%*	*1,798,271,670*	*69.21%*	*1,325,495,800*	*72.25%*	*4,153,713,225*	*75.90%*	*4,426,001,924*						*11,703,482,619*	
1.01.03.01.18	*Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan*	*persentase Panjang jalan yang dipelihara*	*13.70%*	*15.70%*	*29,124,458,686*	*17.60%*	*30,539,145,817*	*19.60%*	*33,042,230,959*	*21.50%*	*18,093,302,373*						*110,799,137,835*	
1.01.03.01.23	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan*	*Jumlah alat berat yang tersedia*	*16 unit*	*16 unit*	*396,776,564*	*19 unit*	*757,263,463*	*19 unit*	*847,537,727*	*19 unit*	*533,966,175*						*2,535,543,829*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Jumlah alat labor yang tersedia	*0*	*0*		*13 unit*		*28 unit*		*29 unit*								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.01.29	*Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh*	*Panjang jalan kota yang memiliki trotoar*	*18.753 m*	*18.753 m*	*1,259,341,163*	*18.753 m*	*469,372,725*	*19.426 m*	*1,266,705,700*	*19.560 m*	*2,628,548,725*						*5,623,968,313*	
1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan kota memenuhi standar konstruksi dan fungsi										48.84	24,364,691,520	50,01	24,364,691,520	50,01	48,729,383,040	
1.01.03.01.16	*Program Pembangunan saluran drainasi/ gorong-gorong*	*persentase jalan kota yang memiliki drainase*	*42.17%*	*51.86%*	*11,783,176,198*	*54.74%*	*13,983,612,286*	*58.95%*	*14,676,945,200*	*61.24%*	*7,080,965,285*						*47,524,698,969*	
1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase jalan kota yang memiliki drainase										62.91%	10,985,834,548	64.44%	10,985,834,548	64.44%	21,971,669,096	
1.01.03.01.24	*Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya*	*persentase irigasi dengan kondisi baik*	*73.43%*	*73.43%*	*17,616,037,257*	*77.96%*	17,806,355,657	*80.60%*	14,695,806,326	*87.62%*	*11,901,366,350*						*62,019,565,590*	
		Persentase Daerah Irigasi berkinerja baik	*73.43%*	*73.45%*		*77.73%*		*80.20%*		*82.08%*								
1.01.03.01.17	*Program Pembangunan Turap /Talud/ Bronjong*	*Persentase Penataan sungai*	*15.44%*	*18.56%*	*676,078,350*	*20.53%*	1,216,011,491	*23.38%*	807,451,520	*23.52%*	*673,794,300*						*3,373,335,661*	
1.01.03.01.26	*Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya*	*Persentase sungai yang dinormalisasi*	*15.44%*	*25.44%*	*12,954,474,480*	*30.44%*	13,017,134,285	*35.44%*	6,996,714,305	*40.44%*	*5,329,548,955*						*38,297,872,025*	
1.01.03.01.28	*Program Pengendalian Banjir*	*Persentase sungai yang terpelihara*	*NA*	*28.72%*	*100,712,000*	*28.77%*	-	*26.14%*	-	*22.23%*	-						*100,712,000*	
1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase irigasi dengan kondisi baik										86.40%	20,322,849,656	89.49%	20,322,849,656	89.49%	40,645,699,312	
		Persentase sungai berfungsi baik										85.84%		89.59%		89.59%		
1.01.03.01.30	*Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan*	*Panjang jalan lingkung yang dibangun*	*N/A*	*N/A*	*2,168,038,717*	*N/A*	172,548,779	*9.938,81m*	*7,720,834,300*	*3.332,14m*	*3,079,741,925*						*13,141,163,721*	
1.03.07	Program pengembangan pemukiman	Persentase jalan lingkung dengan kondisi baik										42%	3,910,813,680	45%	3,438,313,680	45	7,349,127,360	
1.03.09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Pesentase kawasan strategis yang tertata										-	-	16.67%	472,500,000	16.67%	472,500,000	
1.01.03.01.31	*Program Perencanaan Penataan ruang*	*Jumlah advice planning yang diterbitkan*	*586 berkas*	*445 berkas*	*212,820,050*	*487 berkas*	*600,063,297*	*464 berkas*	*525,588,423*	*538 berkas*	*546,866,460*						*1,885,338,230*	
		Jumlah Regulasi Tata Ruang yang tersedia	*1 perda*	*1 perda*		*3 perda*		*4 perda*		*5 perda*								

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01.03.01.32	*Program Pemanfaatan Ruang*	*Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan keseluruhan*	*0.13*	*0.13*	*188,062,750*	*0.13*	*267,262,220*	*0.18*	*482,690,550*	*0.19*	*208,415,100*						*1,146,430,620*	
1.01.03.01.33	*Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang*	*Rasio Ruang Terbuka Hijau*	*39.31*	*40.31*	*164,024,685*	*40.31*	*98,542,273*	*42.44*	*106,059,142*	*42.46*	*253,004,095*						*621,630,195*	
1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang										35.05%	1,564,823,086	36.18%	1,564,823,086	36.18%	3,129,646,172	
1.01.03.01.34	*Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi*	*Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai rencana tata ruang*	*30.60%*	*30.90%*	*95,823,863*	*32.77%*	*136,467,701*	*33.75%*	*132,688,756*	*34.07%*	*33,640,500*						*398,620,820*	
1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Pekerjaan jasa konstruksi yang berkinerja baik										80.00%	345,185,530	85.00%	345,185,530	85.00%	690,371,060	
1.01.03.01.35	*Program Pembangunan Fasilitas Umum*	*Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan [2])*	*66,66%*	*66.67%*	*-*	*66.67%*	*-*	*68.00%*	*6,795,111,700*	*69.84%*	*11,234,535,325*						*18,029,647,025*	
1.03.08	Program penataan bangunan gedung	Persentase penyediaan sarana perkantoran tertentu yang representatif										78.03%	18,466,856,972	79.38%	18,466,856,972	79.38%	36,933,713,944	
		Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan [2])										71.39%		71.98%		71.98%		
		Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif										79.25%		83.15%		83.15%		
1.01.03.01..36	*Program perluasan & peningkatan sambungan rumah (SR)*	*Persentase rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan*	*91.61%*	*94.41%*	*-*	*98.84%*	*754,895,642*	*99.12%*	*2,135,104,000*	*96.84%*	*-*						*2,889,999,642*	
1.01.03.01.27	*Program Pengembangan Kinerja, Pengelolaan Air Minum dan Limbah*	*Persentase rumah tangga yang terlayani air minum perpipaan*	*91.61%*	*94.41%*	*559,652,464*	*98.84%*	*723,362,451*	*99.12%*	*886,731,108*	*96.84%*	*957,929,887*						*3,127,675,910*	
1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah yang terlayani air minum perpipaan										99.25%	1,914,034,820	100.00%	1,914,034,820	100.00%	3,828,069,640	
1.04	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**				**9,443,059,031**		**7,194,616,495**		**7,155,848,963**		**7,028,777,477**		**13,030,080,452**		**13,030,080,452**		**56,882,462,870**	
1.01.04.01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*-*	*80.72*	*450,138,887*	*83.13*	*893,247,503*	*83.21*	*970,316,978*	*85.00*	*701,536,800*						*3,015,240,168*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01.04. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*-*	*90.00%*	*253,220,235*	*90.00%*	*995,860,971*	*90.00%*	*498,561,794*	*90.00%*	*449,214,222*						*2,196,857,222*	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.01.04. 01.03	*Program Peningkatan disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*11,250,000*	*100.00%*	*13,500,000*	*100.00%*	*13,050,000*	*100.00%*	*11,250,000*						*49,050,000*	
1.01.04. 01.04	*Program Peningkatan KapasitasSumber daya aparatur*	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	*4 orang*	*-*	*-*	*0*	*-*	*-*	*-*	*4 orang*	*-*						*-*	
1.01.04. 01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*A*	*A*	*41,865,625*	*A*	*13,951,750*	*A*	*20,499,280*	*A*	*22,069,650*						*98,386,305*	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	Nilai IKM										87	4,696,629,525	87	4,696,629,525	87	*9,393,259,050*	
1.01.04. 01.15	*Program Pengemba-ngan Perumahan*	*Persentase Rumah Layak Huni*	*91.70%*	*91.90%*	*4,045,784,736*	*92.98%*	*977,329,875*	*94.22%*	*823,648,256*	*94.87*	*521,543,520*						*6,368,306,387*	
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penurunan angka Backlog (kebutuhan rumah)										14.57%	10,240,390	13.97%	10,240,390	13.97%	*20,480,780*	
1.01.04. 01.16	*Program Lingkungan sehat Perumahan*	*Persentase rumah bersanitasi layak*	*88.20%*	*89.78%*	*4,640,799,548*	*91.47%*	*4,300,726,396*	*93.23%*	*4,829,772,655*	*92,74%*	*5,323,163,285*						*19,094,461,884*	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak										94,25%	7,705,463,542	95,76	8,188,841,149	95,76	15,894,304,691	
		Persentase Rumah Layak Huni										95,92%		96,98%		96,98%		
		Persentase Luas Permukiman Kumuh $^{2)}$										0.82		0,30		0,30		
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyerahan PSU oleh Pengembang										5,88	617,746,995	7,84	134,369,388	7,84	*752,116,383*	
1.05	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN RAKYAT**				**12,042,372,834**	**-**	**6,832,290,842**	**-**	**7,628,328,297**	**-**	**8,427,222,020**	**-**	**16,318,135,657**	**-**	**16,318,135,657**	**-**	**67,566,485,307**	
	SATPOL PP				**9,562,629,588**		**5,722,177,969**		**6,388,201,984**		**7,884,061,067**		**11,489,064,330**		**11,489,064,330**		**52,535,199,268**	
1.01.05. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*73.92*	*73.33*	*647,554,106*	*83.3*	*771,703,320*	*83.3*	*741,273,277*	*85*	*799,652,893*						*2,960,183,596*	
1.01.05. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*3,070,575,796*	*80.00%*	*644,857,300*	*80.00%*	*375,119,872*	*80.00%*	*521,586,425*						*4,612,139,393*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01.05.01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*218,103,700*	*100.00%*	*197,271,600*	*100%*	*195,830,600*	*100%*	*245,560,000*						*856,765,900*	Satpol PP & Damkar
1.01.05.01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*22,955,920*	*A*	*3,714,900*	*A*	*3,784,670*	*A*	-						*30,455,490*	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										87.00	5,816,151,700	90.00	5,816,151,700	91.00	11,632,303,400	
1.01.05.01.15	*Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan*	*Persentase anggota Linmas yang ikut pelatihan*	*0.00%*	*90.00%*	*71,800,000*	*0.00%*	-	*95.00%*	*216,827,040*	*100.00%*	*116,979,890*						*405,606,930*	
1.01.05.01.16	*Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal*	*Penegakan Perda*	*100.00%*	*100.00%*	*3,290,855,276*	*80.00%*	*2,855,410,947*	*92.60%*	*3,733,125,761*	*100.00%*	*4,975,375,967*						*14,854,767,951*	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda										100%	4,344,757,290	100%	4,344,757,290	100%	8,689,514,580	
		Persentase anggota Linmas yang ikut pelatihan										100%		100%		100%		
1.01.05.01.19	*Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran*	*Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran*	*124.00%*	*124.33%*	*2,240,784,790*	*124.33%*	*1,249,219,902*	*124.33%*	*1,122,240,764*	*124.33%*	*1,224,905,892*						*5,837,151,348*	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase cakupan pelayanan penanganan kebakaran										124,33%	1,328,155,340	124,33%	1,328,155,340	124,33%	2,656,310,680	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**2,479,743,246**		**1,110,112,873**		**1,240,126,313**		**543,160,953**		**4,829,071,327**		**4,829,071,327**		**15,031,286,039**	
5.00.02.01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*77.50*	*80.33%*	*500,532,746*	*82.50%*	*482,308,900*	*83.20%*	*479,346,407*	*82.50%*	*366,505,017*	-	-	-	-		*1,828,693,070*	
5.00.02.01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*100.00%*	*1,197,060,150*	*100.00%*	*184,932,498*	*100.00%*	*124,850,106*	*80.00%*	*63,944,735*	-	-	-	-		*1,570,787,489*	
5.00.02.01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*43,250,000*	*100.00%*	*42,902,000*	*100.00%*	*38,306,400*	*100.00%*	-	-	-	-	-		*124,458,400*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.00.02.01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*8,556,500*	*A*	*6,564,000*	*A*	*5,581,550*	*A*	*5,044,081*	-	-	-	-		*25,746,131*	BPBD
1.05.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.00	4,080,107,847	89.00	4,080,107,847	89.00	8,160,215,694	
5.00.02.01.22	*Program Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam*	*Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana*	*16.24%*	*18.00%*	*730,343,850*	*17.34%*	*393,405,475*	*74.47%*	*592,041,850*	*74.47%*	*107,667,120*	-	-	-	-		*1,823,458,295*	
		Presentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggula-ngan bencana	*100.00%*	*100.00%*		*100.00%*		*100.00%*		*100.00%*		-		-				
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Presentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	-	-		-		-		-		74.47%		100.00%		100.00%		
		Presentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggula-ngan bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	748,963,480	100.00%	748,963,480	100.00%	1,497,926,960	
		Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana	-	-		-		-		-		100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase pelayanan penanggulangan bencana				-		-		-		100.00%		100.00%		100.00%		
1.06	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL**				**3,086,453,372**		**3,263,507,143**		**3,258,495,114**		**2,230,511,578**		**4,053,578,867**		**4,053,578,867**		**19,946,124,941**	
1.01.06.01.01	*Program Pelayanan administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*77.48*	*79.00*	*560,051,837*	*82.00*	*718,183,622*	*85.00*	*800,138,031*	*88.00*	*584,043,303*						*2,662,416,793*	
1.01.06.01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkantoran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*106,937,611*	*80.00%*	*121,318,786*	*80.00%*	*131,332,956*	*80.00%*	*227,918,527*						*587,507,880*	
1.01.06.01.03	*Program Peningkatan disiplin aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*11,694,000*	*100.00%*	*12,650,000*	*100.00%*	*13,500,000*	*100.00%*	*14,850,000*						*52,694,000*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.01.06.01.05	*Program Peningkatan Pengembanngan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*CC*	*B*	*22,575,400*	*BB*	*10,450,000*	*A*	*10,136,025*	*A*	*10,616,160*						*53,777,585*	DINAS SOSIAL
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Nilai IKM										90	3,121,314,037	91	3,121,314,037	91	6,242,628,074	
1.01.06.01.15	*Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya*	*Persentase peningka-tan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan*	*0.00%*	*10.00%*	*539,258,203*	*19.67%*	835,954,035	*45.00%*	602,517,900	*46.77%*	334,206,640						*2,311,936,778*	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS										99.9%	563,886,260	99.9%	122,116,990	100%	686,003,250	
1.01.06.01.16	*Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial*	*Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan, dan anak nakal*	*70.00%*	*70.00%*	*864,694,284*	*80.00%*	*631,024,805*	*82.00%*	879,927,096	*90.00%*	*721,359,587*						*3,097,005,772*	
1.01.06.01.21	*Program pemberda-yaan kelembagaan kesejahteraan sosial*	*Persentase pening-katan kualitas lembaga kesejahteraan sosial*	*70.00%*	*70.00%*	*782,271,287*	*80.00%*	853,326,095	*82.50%*	810,808,356	*90.00%*	*264,764,830*						*2,711,170,568*	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos										65%	234,636,120	70%	234,636,120	70%	469,272,240	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)												100%	441,769,270	100%	441,769,270	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tetangani										100%	102,218,680	100%	102,218,680	100%	204,437,360	
1.01.06.01.22	*Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP*	*Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan*	*70.00%*	*70.00%*	*198,970,750*	*80.00%*	80,599,800	*85.00%*	10,134,750	*90.00%*	*72,752,531*						*362,457,831*	
1.06.07	Program Pegelolaan Taman Makam Pahlawanan	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan										100.00%	31,523,770	100.00%	31,523,770	100.00%	63,047,540	
2	**URUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR**				**52,876,876,774**		**50,959,827,417**		**65,440,789,800**		**47,426,306,917**		**77,664,478,781**		**77,664,478,781**		**372,032,758,470**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA**				**1,727,086,411**		**3,708,756,544**		**2,364,947,355**		**1,431,822,714**		**3,386,738,660**		**3,386,738,660**		**16,006,090,344**	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.01. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*77,48*	*76.81*	*417,860,618*	*85.36*	*874,351,467*	*85.44*	*936,267,573*	*86,00*	*621,139,295*						*2,849,618,953*	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
1.02.01. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80.00%*	*93,074,377*	*80.00%*	*203,295,500*	*80.00%*	*128,994,728*	*80,00%*	*105,853,851*						*531,218,456*	
1.02.01. 01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*		*100.00%*	*11,250,000*	*100.00%*	*11,700,000*	*100.00%*	*17,094,000*	*100,00%*	*17,550,000*						*57,594,000*	
1.02.01. 01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*B*	*12,587,700*	*A*	*9,273,250*	*A*	*9,062,550*		*14,192,285*						*45,115,785*	
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM										89	3,177,384,808	90	3,177,384,808	90	6,354,769,616	
1.02.01. 01.15	*Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*	*Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha*	*57 orang*	*57*	*390,653,220*	*57*	*1,070,924,571*	*60*	*338,514,150*	*96 orang*	*3,410,900*						*1,803,502,841*	
		Jumlah tenaga kerja yg diserap wirausaha	*86 orang*	*86*		*86 org*		*88 org*		*143 orang*								
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Jumlah Tenaga Kerja Yang Berwirausaha										25 org	73,148,945	50 org	73,148,945	50 orang	146,297,890	
		2. Jumlah Tenaga Kerja Yang Diserap Wirausaha										45 org		75 org		75 org		
1.02.01. 01.16	*Program Peningkatan Kesempatan Kerja*	*Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan*	*160 orang*	*160*	*777,131,196*	*160*	*1,472,921,886*	*170*	*881,858,404*	*219 orang*	*643,326,078*						*3,775,237,564*	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan										239 orang	114,586,987	261 orang	114,586,987	261 orang	229,173,974	
1.02.01. 01.17	*Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan*	*Jumlah penurunan angka pemutusan hubungan kerja*	*8 orang*	*8 orang*	*24,529,300*	*8 orang*	*66,289,870*	*18*	*53,155,950*	*34 orang*	*26,350,305*						*170,325,425*	
		Jumlah Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan								*5 kasus*								
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Jumlah Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan										4 kasus	21,617,920	3 kasus	21,617,920	12 kasus	43,235,840	
2.08	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**1,870,800,483**		**1,980,501,787**		**2,320,576,490**		**1,578,098,424**		**4,781,324,862**		**4,781,324,862**		**17,312,626,908**	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.02. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*79.95*	*78.12*	*497,379,206*	*87.12*	*656,737,320*	*88.12*	*870,252,874*	*89*	*735,220,057*						2,759,589,457	
1.02.02. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*191,664,628*	*80.00%*	*173,861,684*	*80.00%*	*329,009,025*	*80.00%*	*187,380,292*						881,915,629	
3.00.03. 01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100*	*24,200,000*	*100*	*25,069,000*	*100*	*22,275,000*	*100.00%*	*20,700,000*						92,244,000	
3.00.03. 01.04	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD*	*Jumlah PKB yang meningkat kualitasnya*	*0*	*0*	*3,900,000*	*1*	*-*	*1*	*-*	*1*	*-*						3,900,000	
3.00.03. 01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*CC*	*B*	*49,453,630*	*BB*	*10,927,905*	*A*	*2,741,775*	*A*	*2,738,475*						65,861,785	
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										90.00	3,658,515,106	90.5	3,658,515,106	A	7,317,030,212	
		Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik										80.00%		80.00%		80.00%		
		Persentase ASN berpakaian Dinas dengan Atribut Lengkap										100%		100%		100%		
		Persentase kepuasan ASN terhadap pelayanan kepegawaian										89.00%		89.00%		89.00%		
		Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat										A		A		A		
		Persantase sasaran program kegiatan renja perangkat daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah										90		90		90		
		Persentase pelaksanaan program dan kegiatan APBD bebas temuan										90		90		90		
3.00.03. 01.15	*Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan*	*Persentase perempuan yang duduk di legislatif*	*8.00%*	*8.00%*	*119,837,590*	*8.00%*	*86,193,004*	*16.00%*	*49,272,580*	*16.00%*	*29,204,340*						284,507,514	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Jumlah perwako, himbauan, MOU terkait perlindungan anak	*1*	*0*		*1*		*1*		*1*								Dinas P2AP3KB
		Persentase kekerasan terhadap anak	*0.075%*	*0.040%*		*0.039%*		*0.054%*		*0.040%*								
3.00.03. 01.16	*Program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak*	*Jumlah kelembagaan PUG*	*33 lembaga*	*33 lembaga*	*595,365,950*	*33 lembaga*	*588,007,813*	*33 lembaga*	*678,917,778*	*33 lembaga*	*399,886,195*						*2,262,177,736*	
		Persentase program dan kegiatan yang di PPRG-kan	*1.00%*	*2.00%*		*5.00%*		*10.00%*		*12.00%*								
		Persentase penganan kasus kekerasan perempuan	*100.00%*	*100.00%*		*100.00%*		*100.00%*		*100.00%*								
		Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak	*tidak ada penilaian*	*520*		*560*		*610*		*650*								
		Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	*0*	*0*		*5 lembaga*		*10 lembaga*		*10 lembaga*								
		Persentase kasus penanganan kekerasan anak	*100.00%*	*100.00%*		*100.00%*		*100.00%*		*100.00%*								
3.00.03. 01.17	*Program Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan*	*Persentase Pelaku usahan ekonomi perempuan*	*40.00%*	*41.00%*	*20,556,239*	*55.00%*	*78,478,208*	*60.00%*	*17,754,500*	*66.00%*	*17,455,910*						*134,244,857*	
		Persentase kekerasan terhadap perempuan	*0.110%*	*0,050%*		*0,0395%*		*0,018%*		*0.060%*								
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang duduk di legislatif										16.00	88,440,630	16.00	88,440,630	16.00	176,881,260	
		Jumlah kelembagaan PUG										33 lembaga		33 lembaga		33 lembaga		
		Persentase program dan kegiatan yang di-PPRG-kan										15.00%		17.00%		17.00%		
		Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan										75.00%		80.00%		80.00%		
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan										0.055%	25,131,240	0.040%	25,131,240	0.040%	50,262,480	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan										100.00%		100.00%		100.00%		
3.00.03. 01.17	*Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan*	*Jumlah organisasi perempuan yang aktif*	*18 buah*	*20 buah*	*368,443,240*	*25 buah*	*361,226,853*	*27 buah*	*350,352,958*	*30 buah*	*185,513,155*						*1,265,536,206*	
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang aktif										33 buah	517,063,176	33 buah	517,063,176	33 buah	1,034,126,352	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perwako, himbauan, MoU terkait perlindungan anak										2	9,010,160	2	9,010,160	2	18,020,320	
		Rata- rata capaian pengelolaan sistem data gender dan anak										35.00		35.00		35.00		
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak										720	107,589,840	850	107,589,840	850	215,179,680	
		Jumlah Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat										11 lembaga		12 lembaga		12 lembaga		
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak										0.035%	375,574,710	0.026%	375,574,710	0.026%	751,149,420	
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak										100%		100%		100%		
2.09	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN**				**1,455,910,064**		**1,403,493,479**		**1,611,664,954**		**721,616,857**		**3,419,690,047**		**3,419,690,047**		**12,032,065,448**	
1.02.03. 01.01	*Program pelayanan administrasi perkantoran*	*Nilai IKM*	*77,56*	*77,56*	*281,544,441*	*80,11*	*445,594,822*	*80,63*	*629,836,594*	*82,15*	*450,684,033*						*1,807,659,890*	
1.02.03. 01.02	*Program peningkatan sarana dan prasarana*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*237,567,498*	*80.00%*	*107,093,030*	*80.00%*	*73,711,650*	*80.00%*	*65,081,500*						*483,453,678*	
1.02.03. 01.03	*Program peningkatan disiplin aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*9,450,000*	*100.00%*	*12,630,000*	*100.00%*	*11,250,000*	*100.00%*	*11,250,000*						*44,580,000*	
1.02.03. 01.05	*Program Peningkatan Pe-ngembangan Sistem Pela-poran Capaian Kinerja Dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*B*	*12,224,150*	*BB*	*4,523,200*	*A*	*6,840,375*	*A*	*5,688,050*						*29,275,775*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM										85	2,599,083,245	85	2,803,083,245	85	5,402,166,490	DINAS KETAHANAN PANGAN
1.02.03. 01.15	*Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan*	*Persentase bahan pa-ngan yg telah memenu-hi Angka Kecukupan Energi (AKE)*	*55.00%*	*67.00%*	*915,123,975*	*77.00%*	*833,652,427*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1,748,776,402*	
		Persentase cadangan pangan yang tersedia	*7.00%*	*19.00%*		*20,5%*		-		-		-		-		-		
		Cakupan supply lemba-ga distribusi pangan	*2.00%*	*2.00%*		*4.00%*		-		-		-		-		-		
		Nilai capaian keterse-diaan informasi harga, pasokan&akses pangan	*22.00%*	*25.00%*		*22.00%*		-		-		-		-		-		
		Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE	*NA*	*NA*		*40.00%*		-		-		-		-		-		
		Persentase penurunan konsumsi beras	*NA*	*NA*		*1.00%*		-		-		-		-		-		
		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	*60%*	*75.00%*		*91,5%*		-		-		-		-		-		
1.02.03. 01.16	*Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan*	*Persentase bahan pa-ngan yg telah memenu-hi Angka Kecukupan Energi (AKE)*		-	-	-	-	*88.00%*	*130,805,635*	*88.00%*	*105,325,725*						*236,131,360*	
		Persentase cadangan pangan yang tersedia		-		-		*21.00%*		*35.00%*								
		Cakupan supply lemba-ga distribusi pangan		-		-		*8.00%*		*10.00%*								
		Nilai capaian keterse-diaan informasi harga, pasokan&akses pangan		-		-		*33.00%*		*33.00%*								
1.02.03. 01.17	*Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan*	*Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE*		-		-		*45.00%*		*50.00%*								

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase penurunan konsumsi beras		-	-	-	-	*1.00%*	*759,220,700*	*1.00%*	*83,587,549*						*842,808,249*	
		Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi		-		-		*80,09%*		*85.00%*								
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	% cadangan pangan yang tersedia										40.00%		50.00%		50.00%		
		% masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE										54.00%		60.00%		60.00%	1,289,729,816	
		%penurunan konsumsi beras										1.00%	746,864,908	1.00%	542,864,908	1.00%		
		Cakupan supply lemba-ga distribusi pangan										12.00%		15.00%		15.00%		
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan										50.00%		60.00%		60.00%		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang telah memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE)										88.00%	16,516,250	88.00%	16,516,250	88.00%	33,032,500	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi										87.00%	57,225,644	90.00%	57,225,644	90.00%	114,451,288	
2.10	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN**				**44,170,040**		**13,831,060**		**48,065,220**		**38,500,000**		**180,994,320**		**180,994,320**		**506,554,960**	
1.01.03.01.16	*Program Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Pemanfaatan Tanah*	*Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko*	*-*	*11.75%*	*30,609,290*	*12.59%*	*13,831,060*	*14.29%*	*48,065,220*	*15.56%*	*38,500,000*						*131,005,570*	
2.10.10	Program penatagunaan tanah	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum										10.00%	49,999,670	15.00%	49,999,670	15.00%	99,999,340	
		Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko										16.40%		17.46%		17.46%		
2.10.02	Program pengelolaan izin lokasi	Persentase luas tanah yang pemanfaatannya sesuai izin lokasi										80.00%	29,994,790	85.00%	29,994,790	85.00%	59,989,580	
1.01.03.01.17	*Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan*	*Jumlah kasus konflik pertanahan yang terselesaikan*	*2 kasus*	*2 kasus*	*13,560,750*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*						*13,560,750*	**DINAS PUPR**

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.10.04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase tanah sengketa konflik yang difasilitasi										21.43	100,999,860	27.83	100,999,860	27.83	201,999,720	
2.11	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**12,554,213,659**		**13,093,226,348**		**13,310,136,613**		**13,117,981,158**		**13,967,245,379**		**13,967,245,379**		**80,010,048,536**	
1.02.05. 01.01	*Program Pelayanan adimistrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*75.00*	*77.22*	*7,360,600,672*	*77.42*	*7,597,794,078*	*77.59*	*1,213,394,919*	*83.00*	*1,129,015,624*						*17,300,805,293*	
1.02.05. 01.02	*Peningkatan Sarana-Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*221,405,025*	*80.00%*	*167,554,475*	*80.00%*	*119,005,605*	*80.00%*	*177,362,033*						*685,327,138*	
1.02.05. 01.03	*Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*150,815,400*	*100.00%*	*150,735,200*	*100.00%*	*146,802,513*	*100.00%*	*154,510,000*						*602,863,113*	
1.02.05. 01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja& Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*29,363,050*	*A*	*8,356,800*	*A*	*12,300,250*	*A*	*4,257,470*						*54,277,570*	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										85.00%	4,575,827,658	89.00%	4,575,827,658	89.00%	9,151,655,316	
1.02.05. 01.15	*Program Pengembang an Kinerja Pengelola-an Persampahan*	*Persentase cakupan pelayanan persampahan*	*88,02%*	*88.24%*	*1,613,870,200*	*88.24%*	*3,201,411,665*	*89.40%*	*8,388,374,499*	*92,26%*	*7,338,211,620*						*20,541,867,984*	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan										93,30%	6,904,993,084	95,34%	6,844,993,084		13,749,986,168	
1.02.05. 01.16	Program pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup	Persentase Usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	30,01%	40.00%	771,135,800	40.00%	874,402,492	42.22%	218,353,650	51,05%	349,357,445						2,213,249,387	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan yang disusun										5 Dokumen	81,674,680	5 Dokumen	81,674,680	5 Dokumen	163,349,360	
2.11.06	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup										55.03%	35,299,310	60.01%	35,299,310	60.01%	70,598,620	
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diterima										7 Penghargaan	44,565,770	7 Penghargaan	44,565,770	7 Penghargaan	89,131,540	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	1 dokumen	2 dokumen	*45,825,500*	*0.00%*	-	*5 dokumen*	*176,040,400*	*5 dokumen*	-						221,865,900	
2.11.08	Program peningkatan pendiidkan dan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan										80%	34,692,380	80%	34,692,380	80%	69,384,760	
1.02.05.01.19	*Program Peningkatan Kualitas & Akses Infor-masi SDA dan Lingkungan Hidup*	*Persentase sekolah adiwiyata*	*70.00%*	*70.00%*	*92,779,050*	*70.00%*	*72,798,830*	*72.00%*	*44,229,050*	*74.00%*	*29,213,145*						*239,020,075*	
1.02.05.01.20	*Program peningkatan pengendalian polusi*	*Indeks Kualitas Air*	75	76	*24,212,000*	66.67	*443,852,768*	70.83	*804,369,234*	*75*	*420,472,234*						*1,692,906,236*	
		Indeks kualitas udara	80	95.32		92.29		93.73		*80,00*								
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air										*75,00*	475,389,225	75,00	475,389,225	75,00	*950,778,450*	
		Indeks kualitas udara										*80,00*		80,00		80,00		
1.02.05.01.24	*Program pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH)*	*Persentase RTH Publik*	*15,45%*	*21.00%*	*2,244,206,962*	*22.99%*	*576,320,040*	*22.99%*	*2,187,266,493*	*16.50%*	*3,515,581,587*						*8,523,375,082*	
2.11.04	Program Pengelolaan Keaneka ragaman hayati	Presentasi RTH Publik										16,75%	1,814,803,272	17,00%	1,814,803,272	17,00%	3,629,606,544	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan bakar Berbahaya (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH												50.00%	60,000,000	50.00%	60,000,000	
2.12	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**2,435,221,128**		**2,624,416,342**		**2,971,767,518**		**2,601,075,905**		**4,884,385,963**		**4,884,385,963**		**20,401,252,819**	
1.02.06.01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*82.83*	*83.00*	*726,218,893*	*85.00*	*878,886,119*	*87.00*	*869,517,023*	*88.00*	*796,419,266*						*3,271,041,301*	
3.00.04.01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80.00%*	*%*	*288,103,326*	*80.00%*	*466,050,462*	*80.00%*	*622,257,592*	*80.00%*	*528,718,270*						*1,905,129,650*	
3.00.04.01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*24,076,000*	*100.00%*	*21,476,000*	*100.00%*	*22,686,000*	*100.00%*	*25,272,000*						*93,510,000*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.00.04. 01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*34,745,100*	*BB*	*6,907,450*	*BB*	*19,012,000*	*A*	*19,202,560*						*79,867,110*	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat										A	3,394,360,393	A	3,394,360,393	A	6,788,720,786	
		Nilai IKM										89,00		90,00		90%		
1.02.06. 01.15.	*Program Penataan Administrasi Kependudukan*	*Cakupan kepemilikan kartu keluarga*	*90.00%*	*100.00%*	*1,362,077,809*	*100.00%*	*1,251,096,311*	*100.00%*	*1,438,294,903*	*100.00%*	*1,231,463,809*						*5,282,932,832*	
		Cakupan kepemilikan KTP-el	*80.00%*	*96.70%*		*95.23%*		*98.96%*		*98.96%*								
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 1-18 tahun	*69.00%*	*86.10%*		*91.01%*		*94.52%*		*94.52%*								
		Cakupan penertiban akte kematian	*24.00%*	*36.00%*		*50.17%*		*70.53%*		*47.00%*								
		Persentase penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu	*80.00%*	*85.00%*		*100.00%*		*100.00%*		*100.00%*								
		Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (SOP)	*1 hari*	*1 hari*		*1 hari*		*1 hari*		*1 hari*								
2 12 02	Program pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan KK										100%	790,667,224	100%	790,667,224	100%	1,581,334,448	
		cakupan kepemilikan KTP										90%		91%		91%		
		Persentase penyelesaian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk tepat waktu										100%		100%		100%		
		Rata-rata lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen (SOP) pendaftaran penduduk										1 hari		1 hari		1 hari		
2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun										91%		92%		92%		
		Cakupan penerbitan akta kematian										52%		62%		75%		

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase penyelesaian penerbitan dokumen pencatatan sipil tepat waktu										100%	465,291,626	100%	465,291,626	100%	930,583,252	
		Rata-rata lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen (SOP) pencatatan sipil										1 hari		1 hari		1 hari		
2 12 04	Program pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Persentase sarana an prasarana SIAK dan KTP El dalam kondisi baik										90%	183,123,750	92%	183,123,750	92%	366,247,500	
		Jumlah nota kesepahaman kerjasam inovasi pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil										13 Nota kesepahaman		15 Nota kesepahaman		15 Nota kesepahaman		
		Persentase pemberian hak akses data kependudukan										35%		50%		60%		
		Persentase pengolahan data kependudukan										80%		85%		85%		
		Persentase media yang digunakan untuk publikasi dan edukasi										85%		90%		90%		
2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan										100%	50,942,970	100%	50,942,970	100%	101,885,940	
2.14	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK & KB**				**2,751,265,885**		**3,373,384,559**		**3,036,784,558**		**3,325,929,170**		**2,406,299,745**		**2,406,299,745**		**17,299,963,662**	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh pemko payakumbuh										100.00%	62,999,940	100.00%	62,999,940	100.00%	125,999,880	
1.02.02. 01.15	*Program keluarga berencana*	*unmeet need*	*11.85*	*14,29*	*1,614,699,345*	*15,90*	*2,328,029,639*	*13,22*	*2,092,642,433*	*11.06*	*2,379,109,475*						*8,414,480,892*	
1.02.02. 01.17	*Program pelayanan kontrasepsi*	*Cakupan peserta KB aktif*	*76.36%*	*71.13%*	-	*69.06%*	*28,102,200*	*70.30%*	*22,429,200*	*76.70%*	*19,939,450*						*70,470,850*	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmeet need										10.92	2,292,169,165	10.87	2,292,169,165	10.87	4,584,338,330	
		Cakupan peserta KB aktif										61,84%		62,94%		62,94%	-	
		Jumlah Peserta KB Baru (PB)										2284		2170		2170		
1.02.02. 01.16	*Program kesehatan reproduksi remaja*	*Rata-rata usia perkawinan*	*21 tahun*	*21 tahun*	-	*21,7 tahun*	-	*22,1 tahun*	-	*22,3 tahun*							-	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.02.01.20	*Program pengembangan pusat informasi dan konseling KRR*	*Jumlah kelompok PJK remaja sekolah dan luar sekolah yang aktif*	*27 kelompok*	*27 kelompok*	-	*27 kelompok*	-	*27 kelompok*	-	*28 kelompok*	*31,397,750*						*31,397,750*	DP3A DAN P2KB
1.02.02.01.20	*Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak*	*Persentase BKB aktif*	*100.00%*	*100.00%*	*371,887,300*	*100.00%*	*339,351,120*	*100.00%*	*332,709,700*	*100.00%*	*340,231,150*						*1,384,179,270*	
1.02.02.01.23	*Program penyiapan tenaga pendamping bina keluarga*	*Persentase UPPKS aktif*	*50.00%*	*50.00%*	-	*50.00%*	-	*51.00%*	-	*52.00%*	-						-	
		Persentase BKL aktif	*70.00%*	*700.00%*		*70.00%*		*75.00%*		*80.00%*								
1.02.02.01.23	*Program pengembangan model operasional BKB, Posyandu, PAUD*	*Persentase posyandu dengan stata mandiri*	*57.00%*	*59.00%*	*764,679,240*	*65.00%*	*677,901,600*	*70.00%*	*589,003,225*	*70.00%*	*555,251,345*						*2,586,835,410*	
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rata- rata Usia Perkawinan										22, 4 tahun		22,5 tahun		22,5 tahun		
		Jumlah Kelompok PIK- Remaja sekolah dan luar sekolah yang aktif										29 kelompok		30 kelompok		30 kelompok		
		Persentase BKB aktif										65.00%	51,130,640	65.00%	51,130,640	65.00%	102,261,280	
		Persentase UPPKS Aktif										53.00%		54.00%		54.00%		
		Persentase BKL aktif										81.00%		83.00%		83.00%		
2.15	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN**				**3,805,678,266**		**3,583,477,184**		**3,967,509,288**		**4,043,760,907**		**6,877,172,890**		**6,877,172,890**		**29,154,771,425**	
1.02.09.01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*89.22%*	*89.31%*	*1,413,615,238*	*89.20%*	*1,714,041,301*	*89.28%*	*1,953,995,926*	*100%*	*2,020,565,160*	-	-	_	-		*7,102,217,625*	
1.02.09.01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*524,418,250*	*80.00%*	*369,228,483*	*80.00%*	*329,251,350*	*80.00%*	*262,946,197*	-	-	_	-		*1,485,844,280*	
1.02.09.01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100%*	*147,332,000*	*100.00%*	*129,198,000*	*100.00%*	*129,400,095*	*100.00%*	*214,000,000*	-	-	_	-		*619,930,095*	
1.02.09.01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*B*	*22,030,060*	*A*	*1,754,950*	*A*	*6,699,400*	*A*	*2,309,450*	-	-	_	-		*32,793,860*	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.00%	6,323,135,600	94.00	6,323,135,600	94.00	12,646,271,200	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.09. 01.16	*Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ*	*Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas*	*65.25%*	*40.00%*	*234,799,500*	*86.06%*	*122,698,500*	*76.67%*	*212,875,400*	*75.33%*	*556,513,500*	-	-	-	-		*1,126,886,900*	DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09. 01.17	*Program Peningkatan Pelayanan Angkutan*	*Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum*	*60.12%*	*63.24%*	*1,068,457,218*	*92.95%*	*391,548,900*	*94.77%*	*308,539,650*	*70.60%*	*281,667,100*	-	-	-	-		*2,050,212,868*	
1.02.09. 01.19	*Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas*	*Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan*	*65.00%*	*89.22%*	*103,677,000*	*70.00%*	*377,213,000*	*82.00%*	*596,705,879*	*85.00%*	*132,000,000*	-	-	-	-		*1,209,595,879*	
1.02.09. 01.20	*Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor*	*Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas*	*65.25%*	*40.00%*	*291,349,000*	*86.06%*	*150,140,200*	*76.67%*	*108,411,388*	*75.33%*	*251,240,000*	-	-	-	-		*801,140,588*	
1.02.09. 01.21	*Program Pengendalian dan Peningkatan Pelayanan Parkir*	*Persentase peningkatan pelayanan parkir*	*65.00%*	*65.00%*	-	*65.00%*	*327,653,850*	*70.20%*	*321,630,200*	*71.00%*	*322,519,500*	-	-	-	-		*971,803,550*	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	-	-		-		-		-		78.15%		80.21%		80.21%		
		Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum	-	-		-		-		-		50.65%		50.80%		50.80%		
		Persentase peningkatan pelayanan parkir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.00%	554,037,290	74.00%	554,037,290	74.00%	1,108,074,580	
		Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas pendukung jalan	-	-		-		-		-		88.00%		88.00%		88.00%		
		Persentase ketersediaan fasilitasi umum	-	-		-		-		-		71.45%		71.55%		71.55%		
2.16	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**				**5,704,258,531**		**5,275,576,132**		**8,397,514,760**		**6,913,887,686**		**7,418,337,650**		**7,418,337,650**		**41,127,912,409**	
1.02.10. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*89.22%*	*79.64%*	*917,198,345*	*80.36%*	*918,829,101*	*81.25%*	*911,223,571*	*93.00%*	*704,529,940*	-	-	-	-		*3,451,780,957*	
1.02.10. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*350,057,960*	*100.00%*	*277,939,450*	*100.00%*	*152,415,829*	*80.00%*	*247,668,082*	-	-	-	-		*1,028,081,321*	
1.02.10. 01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*12,557,000*	*100.00%*	*17,600,000*	*100.00%*	*27,000,000*	*100.00%*	*31,500,000*	-	-	-	-		*88,657,000*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.10. 01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capai-an Kinerja& Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*11,437,500*	*A*	*3,573,300*	*A*	*3,816,000*	*A*	*1,533,640*	-	-	-	-		*20,360,440*	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00	3,588,590,132	87.00	3,588,590,132	91.00	7,177,180,264	
1.02.10. 01.15	*Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa*	*Persentase PD yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yg terintegrasi*	*15.00%*	*20.00%*	-	*29.03%*	*69,421,574*	*45.16%*	*90,125,725*	-	-	-	-	-	-		*159,547,299*	
1.02.10. 01.18	*Program Kerjasama Informasi dan Media Massa*	*Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media*	*15.00%*	*20.00%*	*1,279,977,102*	*40.00%*	*1,447,740,908*	*80.00%*	*2,851,978,083*	*60.00%*	*2,411,201,729*	-	-	-	-		*7,990,897,822*	
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PD yang menyebarkan informasi melalui media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00%	1,606,373,362	85.00%	1,606,373,362	85.00%	3,212,746,724	
1.02.10. 01.19	*Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*	*Persentase layanan yang terintegrasi TIK*	*15.00%*	*20.00%*	*3,133,030,624*	*40.00%*	*2,540,471,799*	*65.00%*	*4,360,955,552*	*60.00%*	*3,517,454,295*		-		-		*13,551,912,270*	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan yang terintegrasi TIK	-	-		-		-		-		70.00%		72.00%		75.00%		
		Persentase PD yang telah menerapkan aplikasi pemerintahan yg terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00%	2,223,374,156	72.00%	2,223,374,156	75.00%	4,446,748,312	
		Persentase ketersediaan sarana prasarana TIK PD	-	-		-		-				80.00%		85.00%		85.00%		
2.17	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI DAN UKM**				**2,282,720,147**		**2,903,163,969**		**4,704,021,897**		**2,421,475,390**		**8,541,121,924**		**8,541,121,924**		**29,393,625,251**	
1.02.11. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*73,58*	*74.78*	*1,402,451,586*	*77.11*	*1,709,500,285*	*81.72*	*2,953,468,851*	*83,00*	*1,561,280,769*						*7,626,701,491*	
1.02.11. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana prasarana perkantoran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80.00%*	*352,313,276*	*80.00%*	*538,655,250*	*80.00%*	*947,820,061*	*80,00%*	*192,093,100*						*2,030,881,687*	
1.02.11. 01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100,00%*	*100.00%*	*22,915,750*	*100.00%*	*33,697,950*	*100.00%*	*48,951,650*	*100,00%*	*53,600,000*						*159,165,350*	
1.02.11. 01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*24,200,500*	*A*	*7,750,500*	*A*	*7,030,000*	*A*	*7,037,675*						*46,018,675*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM										86,00%	8,002,864,904	89,00%	8,002,864,904	89,00%	16,005,729,808	DINAS KOPERASI UKM
1.02.11. 01.15	*Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif*	*persentase pertumbuhan UMKM*	*1,20%*	*1.00%*	*60,811,875*		*23,030,700*	*1.00%*	*25,510,000*	*1,70%*	*42,848,000*						*152,200,575*	
1.02.11. 01.16	*Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*	*Persentase pertambahan tenaga manajer UMKM*	*1,00%*	*1.00%*	*170,065,730*	*1.00%*	*187,524,947*	*1.00%*	*205,943,880*	*1,70%*	*1,787,790*						*565,322,347*	
		Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM	*1,00%*	*2.00%*		*1.00%*		*2.00%*		*1,70%*								
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase pertumbuhan UMKM										1.80%	16,481,450	2,00%	16,481,450	2.00%	32,962,900	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan modal UMKM										3.00%	42,847,870	3,50%	42,847,870	3,50%	85,695,740	
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern										2.00%		2,20%		2,20%		
1.02.11. 01.17	*Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah*	*Persentase peningkatan modal UMKM*	*2,00%*	*15.00%*	*77,734,930*	*2.00%*	*140,816,770*	*1.70%*	*62,295,400*	*3,00%*	*17,044,425*						*297,891,525*	
		Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	*1,00%*	*5.00%*		*1.50%*		*8.00%*		*1,80%*								
1.02.11. 01.18	*Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi*	*Persentase penurunan jumlah tunggakan*	*5,00%*	*47.00%*	*172,226,500*	*500.00%*	*262,187,567*	*47.70%*	*453,002,055*	*5,00%*	*545,783,631*						*1,433,199,753*	
		Persentase peningkatan koperasi aktif	*47,52%*	*10*		*47*		*11.6*		*48,20%*								
		Persentase peningkatan koperasi sehat	*11,36%*	*1.2*		*10*		*1.5*		*11,70%*								
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase penambahan anggota baru koperasi										0.75%	443,927,970	0.75%	443,927,970	0.75%	887,855,940	
		Persentase peningkatan koperasi aktif										48,25%		49,00%		49,00%		
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi sehat										11,80%	14,999,930	11,90%	14,999,930	11,90%	29,999,860	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase penurunan jumlah tunggakan										5,00%	19,999,800	5,00%	19,999,800	5,00%	39,999,600	
2.18	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**			**1**	**1,700,182,727**		**1,428,161,525**		**4,091,977,045**		**3,123,677,923**		**5,392,214,045**		**5,392,214,045**		**21,128,427,310**	
1.02.12. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*81.56*	81.67	*615,353,975*	*90.05*	*692,853,154*	*93.49*	*909,938,808*	*94.03*	*1,574,931,991*						*3,793,077,928*	DPM & PTSP
1.02.12. 01.02	*Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80.00%*	100.00%	*95,187,150*	*100.00%*	*130,352,974*	*100.00%*	*136,916,200*	*80.00%*	*121,009,912*						*483,466,236*	
1.02.12. 01.03	*Program Peningkatan disiplin aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	100.00%	*17,546,100*	*100.00%*	*53,988,000*	*100.00%*	*17,096,700*	*100.00%*	*26,550,000*						*115,180,800*	
1.02.12. 01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	BB	*19,727,500*	*A*	*19,937,600*	*A*	*19,968,150*	*A*	*19,229,190*						*78,862,440*	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	IKM										94.05	4,684,488,600	95.03	4,684,488,600	94,5	9,368,977,200	
1.02.12. 01.15	*Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi*	*jumlah kerjasama investasi*	*4 kerjasama*	8	*127,022,150*	*8*	*132,355,889*	*8*	*33,606,500*	*1 kerjasama*	*45,831,875*						*338,816,414*	
		jumlah promosi investasi	*2 kali*	2		*2*		*3*		*2 kali*								
		Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	*4 orang*			*1*		*2*		*0*								
1.02.12. 01.16	*Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi*	*Jumlah investor*	*327 investor*	*496 investor*	*354,069,050*	*766 investor*	*195,271,108*	*936 investor*	*19,075,725*	*1.151 investor*	*30,199,800*						*598,615,683*	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah promosi investasi										1 kali	39,999,170	1 kali	39,999,170	11 kali	79,998,340	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor										1.839 investor	52,199,590	2.000 investor	52,199,590	2.000 investor	104,399,180	
		Jumlah kerjasama investasi										1 kerjasama		1 kerjasama		27 kerjasama		
1.02.12. 01.17	*Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah*	*Persentase peluang investasi yang telah divalidasi*	*20%*	*22%*	*471,276,802*	*22%*	*203,402,800*	*25%*	*72,618,650*	*28%*	*18,999,920*						*766,298,172*	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi										28%	326,121,425	29.00%	326,121,425	29.00%	652,242,850	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.02.12. 01.00	*Program optimalisasi pelayana publik*	*Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti*	*100%*	*100%*	*-*		*-*	*100%*	*2,882,756,312*	*100.00%*	*1,286,925,235*						*4,169,681,547*	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penertiban dokumen perijinan dan non perijinan sesuai SOP										100%	264,405,460	100.00%	264,405,460	100.00%	528,810,920	
		Persentase jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti										100%		100.00%		100.00%		
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan										80%	24,999,800	80.00%	24,999,800	80.00%	49,999,600	
2.19	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**13,478,418,443**		**8,416,601,148**		**14,910,500,505**		**6,756,664,585**		**12,918,579,795**		**12,918,579,795**		**69,399,344,271**	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	*Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional*	*1 orang*	*-*	*60,412,750*	*0*	*22,006,950*	*1*	*123,712,925*	*2 orang*	*336,000*						*206,468,625*	
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	*Persentase pemuda yang berwirausaha*	*na*	*60.00%*	*36,483,300*	*61.00%*	*631,737,460*	*63.00%*	*895,414,100*	*64,00%*	*56,415,950*						*1,620,050,810*	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Peringkat pramuka tingkat provinsi										2	208,140,630	2	208,140,630	2	416,281,260	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional										2 orang	605,476,240	2 orang	605,476,240	8 orang	1,210,952,480	
		Persentase pemuda yang berwirausaha										65%		65,00%		65,00%	-	
		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif										27 buah		30 buah		30 buah	-	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	*Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah*	*149 medali*	*24 medali*	*4,052,937,818*	*145 medali*	*4,751,341,528*	*30 medali*	*5,282,341,099*	*155 medali*	*688,109,895*						*14,774,730,340*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	*Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik*	*75,00%*	*75.00%*	*9,328,584,575*	*75.00%*	*2,580,767,210*	*80.00%*	*1,693,577,500*	*85,00%*	*634,571,600*						*14,237,500,885*	
	Program Pembangu-nan Sarana dan Prasarana Olahraga	*Jumlah sapras olah raga yang dibangun*	*3 buah*			*1 buah*	*430,748,000*	*3 buah*	*6,915,454,881*	*2 buah*	*5,377,231,140*						*12,723,434,021*	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah										33 medali	12,104,962,925	170 medali	12,104,962,925	557 medali	24,209,925,850	DINAS PARIWISATA PEMUDA & OLAH RAGA

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik										87,00%		90,00%		90,00%	-	
		Jumlah sapras olah raga yang dibangun										3 buah		2 buah		13 buah	-	
		Jumlah Penyelenggaraan event olah raga rekreasi										8 event		9 event		30 event	-	
2.20	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK**				**12,970,000**		**43,713,000**		**72,501,000**		**77,496,750**		**74,998,680**		**74,998,680**		**356,678,110**	
1.02.10. 01.15	*Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah*	*Persentase kepuasan data pengguna statistik*	*80.00%*	*80.00%*	*12,970,000*	*89.00%*	*43,713,000*	*87.51%*	*72,501,000*	*85.00%*	*77,496,750*	*90.00%*		*90.00%*		*90.00%*	*206,680,750*	**Dinas Kominfo**
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00%	74,998,680	80.00%	74,998,680	80.00%	149,997,360	
2.21	**URUSAN PERSANDIAN**												**86,888,202**		**86,888,202**		**173,776,404**	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jenis informasi berklasifikasi persandian yang diamankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 set	86,888,202	1 set	86,888,202	1 set	173,776,404	
		Persentase penanganan cyber attack	-	-		-		-		-		85.00%		90.00%		90.00%		
2.22	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN**				**1,881,294,727**		**1,878,995,754**		**2,452,966,992**		**353,541,400**		**418,775,780**		**418,775,780**		**7,404,350,433**	
	Program Pengembangan Nilai Budaya	*Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif*	*66 kelompok*	*66 kelompok*	*711,677,320*	*70 kelompok*	*614,721,073*	*71 kelompok*	*503,614,000*	*72 kelompok*	*11,150,400*						*1,841,162,793*	**DINAS PARPORA**
		Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah	*22 orang*	*22 orang*		*23 orang*		*24 orang*		*25 orang*								
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	*Jumlah penyelenggaraan festival budaya*	*8 event*	*8 event*	*963,651,332*	*8 event*	*1,169,801,081*	*13 event*	*1,541,818,236*	*5 even*	*322,394,900*						*3,997,665,549*	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif										73 kelompok	365,435,580	74 kelompok	365,435,580	74 kelompok	730,871,160	
		Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah										26 orang		27 orang		27 orang	-	
		Jumlah penyelenggaraan festival budaya										12 event		15 event		15 event	-	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	*Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi*	*18 bcb*	*18 bcb*	*205,966,075*	*26 bcb*	*94,473,600*	*26 bcb*	*407,534,756*	*26 bcb*	*19,996,100*						*727,970,531*	
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi										26 bcb	53,340,200	28 bcb	53,340,200	28 bcb	106,680,400	
2.23	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN**				**852,502,597**		**905,128,943**		**1,030,033,721**		**753,665,374**		**2,733,503,071**		**2,733,503,071**		**9,008,336,777**	
1.02.17. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*80.03*	*78.97*	*383,113,166*	*80.94*	*375,465,061*	*84.86*	*500,182,460*	*88.00*	*382,821,364*						*1,641,582,051*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1.02.17. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*142,356,283*	*80.00%*	*104,138,898*	*80.00%*	*134,437,173*	*80.00%*	*79,352,938*						*460,285,292*	
1.02.17. 01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*9,900,000*	*100.00%*	*9,900,000*	*100.00%*	*9,900,000*	*100.00%*	*10,350,000*						*40,050,000*	
1.02.17. 01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*B*	*19,597,050*	*A*	*7,027,300*	*A*	*9,849,460*	*A*	*10,031,685*						*46,505,495*	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM										89.00	2,361,225,783	90.00	2,361,225,783	90.00	4,722,451,566	
1.02.17. 01.15	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah anggota perpustakaan	1290 orang	1509 orang	297,536,098	1637 orang	408,597,684	1913 orang	*375,664,628*	1675 orang	271,109,387						1,352,907,797	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan										1736 orang	372,277,288	1810 orang	372,277,288	3546 orang	744,554,576	
2.24	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN**				**320,183,666**		**327,399,643**		**149,821,884**		**167,112,674**		**176,207,768**		**176,207,768**		**1,316,933,403**	
1.02.17. 01.15	*Program perbaikan sistem administrasi kearsipan*	*Persentase PD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku*	*9,67%*	*9.67%*	*64,619,056*	*9.67%*	*111,114,094*	*9.67%*	*15,670,180*	*48,38%*	-						*191,403,330*	
1.02.17. 01.17	*Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan*	*Persentase PD dan Kelurahan yang telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan arsip sesuai standar*	*5,13%*	*5.13%*	*9,670,550*	*5.13%*	*5,099,500*	*5.13%*	*8,200,640*	*19,23%*	-						*22,970,690*	
1.02.17. 01.18	*Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi*	*Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis*	*0.00%*	*0.00%*	*51,555,060*	*0.00%*	*114,658,703*	*0.00%*	*43,795,390*	*48,38%*	*72,329,060*						*282,338,213*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku										61.29%	46,774,600	74.19%	46,774,600	74.19%	93,549,200	
		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis										70.96%		100.00%		100.00%	-	
1.02.17. 01.16	*Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah*	*Jumlah dokumen/ arsip yang diakuisisi*	*0 berkas*	*0 berkas*	*194,339,000*	*3142 berkas*	*96,527,346*	*747 berkas*	*82,155,674*	*760 berkas*	*94,783,614*						*467,805,634*	
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah dokumen/ arsip yang diakuisisi										760 berkas	129,433,168	760 berkas	129,433,168	1520 berkas	258,866,336	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**32,827,464,554**		**33,503,648,895**		**32,312,646,466**		**18,205,155,313**		**28,619,029,990**		**28,619,029,990**		**174,086,975,208**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**1,164,037,709**		**738,097,927**		**701,313,804**		**387,019,238**		**422,755,517**		**422,755,517**		**3,835,979,712**	
2.00.03. 01.20	*Program pengembangan budidaya perikanan*	*Produksi ikan konsumsi*	*433,27 ton*	*485,27 ton*	*1,003,510,059*	*501.65 ton*	*504,672,427*	*520.11 ton*	*579,507,804*	*540 ton*	*352,778,018*						*2,440,468,308*	**DINAS PERTANIAN**
2.00.03. 01.21	*Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan*	*Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan*	*73.33%*	*50.00%*	*127,240,000*	*56.00%*	*181,459,000*	*65.00%*	*104,850,100*	*83,87%*	*34,241,220*						*447,790,320*	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya perikanan										70%		72%		72%		
		Persentase kematian ikan										5%	402,755,637	5%	402,755,637	5%	805,511,274	
		Jumlah Produksi ikan konsumsi										550 ton		560 ton		560 ton		
		Jumlah Angka konsumsi ikan										34 kg/kapita/ thn		35 kg/kapita/thn		35 kg/kapita/t hn		
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	*Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan*	*1 kali*	*1 kali*	*33,287,650*	*1 kali*	*51,966,500*	*1 kali*	*16,955,900*		-						*102,210,050*	
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil perikanan										1 kali	19,999,880	2 kali	19,999,880	3 kali	39,999,760	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**5,724,167,168**		**8,988,848,794**		**8,793,305,217**		**7,145,380,335**		**6,675,100,835**		**6,675,100,835**		**44,001,903,184**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Nilai IKM*	*68,60*	*78.97*	*787,571,936*	*74.65*	*775,635,036*	*84.86*	*1,429,773,743*	*83,00*	*1,285,441,409*						*4,278,422,124*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80,00%*	*80.00%*	*124,735,322*	*80.00%*	*416,353,550*	*80.00%*	*217,471,941*	*80,00%*	*592,090,700*						*1,350,651,513*	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100,00%*	*100.00%*	*31,131,500*	*100.00%*	*15,266,000*	*100.00%*	*16,646,300*	*100,00%*	*15,300,000*						*78,343,800*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*B*	*18,681,540*	*B*	*13,699,210*	*B*	*18,106,475*	*A*	*101,093,190*						*151,580,415*	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM										86,00	5,130,882,044	89,00	5,130,882,044	89,00	10,261,764,088	
	Program pengembangan pemasaran Pariwisata	*Persentase promosi kepariwisa-taan yang dilaksanakan*	*40,00%*	*50,00%*	*1,101,306,964*	*50,00%*	*1,195,513,876*	*24.00%*	*1,153,337,009*	*65,00%*	*165,481,600*						*3,615,639,449*	
		Rata-rata lama tingggal wisatawan	*1,20 hari*	*1,20 hari*		*1,25 hari*		*1,27 hari*		*1,30 hari*								
	Program Pengembangan Kemitraan	*Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa Pariwisata*	*3 kerja-sama*	*3 kerja-sama*	*67,647,750*	*3 kerja-sama*	*88,702,775*	*2 kerja-sama*	*529,698,200*	*5 kerja-sama*	*333,036,840*						*1,019,085,565*	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan									-	75,00%	162,999,070	80,00%	162,999,070	80,00%	325,998,140	
		Rata-rata lama tingggal wisatawan										1,40 hari		1,50 hari		1,50 hari		
		Jumlah Kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa Pariwisata										6 kerja-sama		7 kerja-sama		7 kerja-sama		
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	*Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik*	*32,50%*	*35%*	*3,593,092,156*	*35,00%*	*6,120,513,459*	*37,00%*	*4,791,102,002*	*40,00%*	*4,630,552,723*						*19,135,260,340*	
		Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata	*1 ow*	*1 ow*		*1 ow*		*1 ow*		*1 ow*							-	
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik										45,00%	1,270,539,031	50,00%	1,270,539,031	50,00%	2,541,078,062	
		Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata										1 ow		1 ow		7 ow		

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	*Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi*	-	-	-	*1 fasilitasi*	*363,164,888*	*1 fasilitasi*	*637,169,547*	*1 fasilitasi*	*22,383,873*						*1,022,718,308*	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi										1 fasilitasi	110,680,690	1 fasilitasi	110,680,690	5 fasi-litasi	221,361,380	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**5,780,762,693**		**9,405,606,265**		**10,896,486,708**		**5,060,595,524**		**14,303,333,713**		**14,303,333,713**		**59,750,118,616**	
2.00.03. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*		*79.68*	*823,390,129*	*80.05*	*1,119,769,398*	*81.91*	*1,388,105,790*	*83*	*1,323,971,841*						*4,655,237,158*	
2.00.03. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80.00%*	*90.00%*	*452,745,100*	*90.00%*	*405,841,533*	*90.00%*	*665,533,663*	*80.00%*	*339,111,000*						*1,863,231,296*	
2.00.03. 01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*74,052,000*	*100.00%*	*71,808,000*	*100.00%*	*57,150,000*	*100.00%*	*49,500,000*						*252,510,000*	
2.00.03. 01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh inspektorat*	*BB*	*BB*	*23,073,700*		-		-								*23,073,700*	
3.27.01	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM										86	11,264,551,963	89	11,264,551,963	89	22,529,103,926	
2.00.03. 01.15	*Program Peningkatan Kesejahteraan Petani*	*Nilai Tukar Petani (NTP)*	*100.28*	*99.23*	*452,632,750*	*100.44*	*221,958,440*	*98.95*	*181,629,485*	*100,73*	*39,002,696*						*895,223,371*	
2.00.03. 01.17	*Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan*	*Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan*	*15.00%*	*20.00%*	*124,816,550*		-	*25.00%*	*37,853,000*	*28.00%*	*145,395,672*						*308,065,222*	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan										29.00%	10,031,690	30.00%	10,031,690	30.00%	20,063,380	
		Nilai Tukar Petani (NTP)										100,15		100,22		100,22	-	
2.00.03. 01.18	*Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan*	*Produktivitas Padi*	*5,30 ton/ha*	*5,46 ton/ha*	*906,536,771*	*5,36 ton/ha*	*932,065,775*	*5,13 ton/ha*	*611,209,070*	*5,69 ton/ha*	*431,305,151*						*2,881,116,767*	
		Produktivitas Cabe	*9,00 ton/ha*	*5,3 ton/ha*		*5,5 ton/ha*		*6,5 ton/ha*		*11 ton/ha*								
		Produktivitas Bawang	*10,00 ton/ha*	*11,32 ton/ha*		*5,3 ton/ha*		*6,5 ton/ha*		*13 ton/ha*								
		Produktivitas Kakao	*1,00 ton/ha*	*0,97 ton/ha*		*0,96 ton/ha*		*0,91 ton/ha*		*1,33 ton/ha*								

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.00.03. 01.22	*Program peningkatan produksi hasil peternakan*	*Jumlah Populasi Sapi (ekor)*	*5510 ekor*	*5707 ekor*	*583,180,564*	*5756 ekor*	*2,477,556,848*	*5849 ekor*	*4,991,534,296*	*5962 ekor*	*546,485,912*						*8,598,757,620*	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Produksi Sapi Konsumsi (ton)	*922 ton*	*923 ton*		*914 ton*		*1091 ton*		*1036 ton*								
3,27,02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi										5,17 ton/ha	981,531,225	5,18 ton/ha	981,531,225	5,18 ton/ha	1,963,062,450	
		Produktivitas bawang merah										8 ton/ha		9 ton/ha		9 ton/ha		
		Produktivitas Cabe										6,84 ton/ha		6,94 ton/ha		6,94 ton/ha		
		Produktivitas kakao										0,95 ton/ha		0,96 ton/ha		0,96 ton/ha		
		Produktivitas jagung										7,77 ton/ha		7,93 ton/ha		7,93 ton/ha		
		populasi sapi										5.992 ekor		6.025 ekor		6.025 ekor		
		Jumlah kelahiran sapi										800 ekor		820 ekor		820 ekor		
2.00.03. 01.19	*Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan*	*Produksi padi*	*37.402 ton*	*41150 ton*	*1,202,745,300*	*41515 ton*	*3,151,950,006*	*39800 ton*	*1,309,721,750*	*40517 ton*	*1,334,894,078*						*6,999,311,134*	
		Produksi cabe	*973,90 ton*	*606 ton*		*892 ton*		*897,6 ton*		*985 ton*								
		Produksi bawang	*-*	*110 ton*		*140 ton*		*211,5 ton*		*400 ton*								
		Produksi Kakao	*1092 ton*	*950 ton*		*1045 ton*		*2002,24 ton*		*1100 ton*								
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produksi padi										41.000 ton	113,999,540	41.200 ton	113,999,540	41.200 ton	227,999,080	
		Produksi bawang merah										215 ton		220 ton		220 ton		
		Produksi cabe										900 ton		905 ton		905 ton		
		Produksi kakao										1.105 ton		1.110 ton		1.110 ton		
		Produksi jagung										2.900 ton		2.950 ton		2.950 ton		
3,27,03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian										57.31%	444,145,300	58.5%	444,145,300	58.5%	888,290,600	
2.00.03. 01.20	*Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan*	*Persentase kelompok tani yg menerapkan anjuran teknologi budidaya pertanian*	*35.00%*	*41.00%*	*164,092,429*	*43.00%*	*114,735,100*	*45.00%*	*43,526,150*	*51.00%*	*68,286,486*						*390,640,165*	
3,27,07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok tani yang menerapkan teknologi anjuran										55.00%	226,788,720	60.00%	226,788,720	60.00%	453,577,440	
2.00.03. 01.21	*Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak*	*Persentase angka kematian ternak*	*0.45%*	*0,16*	*333,359,400*	*0,21*	*273,709,029*	*0,22*	*657,885,526*	*0,35%*	*250,485,599*						*1,515,439,554*	
2.00.03. 01.23	*Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan*	*Persentase Fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan*	*20.00%*	*29%*	*640,138,000*	*30%*	*636,212,136*	*31%*	*952,337,978*	*32%*	*532,157,089*						*2,760,845,203*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kematian ternak										0,3%	1,262,285,275	0,3%	1,262,285,275	0,3%	2,524,570,550	
		Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan										34.00%		35%		35%		
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**10,249,275,983**		**6,577,371,502**		**7,590,362,058**		**3,869,131,406**		**1,001,481,660**		**1,001,481,660**		**30,289,104,269**	
1.02.11.01.15	*Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan*	*Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga*	*50,00%*	*55.00%*	*339,626,572*	*55.00%*	*622,279,547*	*65.00%*	*1,037,436,100*	*70,00%*	*99,681,535*						*2,099,023,754*	**Dinas Koperasi dan UKM**
		Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan	*2,00%*	*3.00%*		*3.00%*		*4.00%*		*4,50%*								
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga										20%	62,317,120	20%	62,317,120	20,00%	124,634,240	
1.02.11.01.18	*Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri*	*Jumlah Kerjasama Perdagangan*	*25 kerjasama*	*30 kerjasama*	*8,532,370,529*	*30 kerjasama*	*4,143,949,285*	*32 kerjasama*	*4,687,787,306*	*33 kerjasama*	*1,901,725,596*						*19,265,832,716*	
1.02.11.01.19	*Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan*	*Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP*	*60,00%*	*65.00%*	*1,377,278,882*	*65.00%*	*1,811,142,670*	*75.00%*	*1,865,138,652*	*80,00%*	*1,867,724,275*						*6,921,284,479*	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah kerjasama perdagangan										4 kerja-sama	164,282,160	4 kerjasama	164,282,160	11 kerjasama	328,564,320	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Volume Perdagangan Luar Negeri											-	6 ton	150,000,000	6 ton	150,000,000	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha										20%	19,679,920	25%	19,679,920	25%	39,359,840	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan										5%	34,374,160	5.50%	34,374,160	5.50%	68,748,320	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP										85%	720,828,300	90%	570,828,300	90%	1,291,656,600	
		Persentase sarana prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik										80%		80%		80%		
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**9,909,221,001**		**7,793,724,407**		**4,331,178,679**		**1,743,028,810**		**6,216,358,265**		**6,216,358,265**		**36,209,869,427**	
1.02.01. 01.15	*Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi*	*Persentase industri yang menerapkan standarisasi mutu produk*	*1,50%*	*1.50%*	*473,340,526*	*1.50%*	*379,072,164*	*2.00%*	*228,253,355*	*2,25%*	*93,468,700*						*1,174,134,745*	**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**
1.02.01. 01.16	*Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*	*Persentase promosi produk yang memperoleh umpan balik*	*30,00%*	*40.00%*	*64,048,150*	*40.00%*	*2,079,500*		-	*45,00%*	-						*66,127,650*	
1.02.01. 01.17	*Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri*	*Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna*	*3,00%*	*3.00%*	*140,797,400*	*3.00%*	*736,163,850*	*3.00%*	*221,225,776*	*3,25%*	*48,247,000*						*1,146,434,026*	
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna										3,30%	6,179,128,235	3,35%	6,159,128,235	3,35%	12,338,256,470	
		Persentase Sentra/Klaster Industri Yang Tertata										40%		60%		60%	-	
1.02.01. 01.18	*Program Penataan Struktur Industri*	*Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk*	*1 buah*	*2 buah*	*9,231,034,925*	*1 buah*	*6,676,408,893*	*1 buah*	*3,841,265,548*	*1 buah*	*1,601,313,110*						*21,350,022,476*	
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk										2,50%	37,230,030	2,75%	37,230,030	2,75%	74,460,060	
		Jumlah produk industri yang mendapat sertifikat produk										1 bh		1 bh		1 bh	-	
1.02.01. 01.19	*Program Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial*	*Persentase sentra/klaster industri yang tertata*	-					*40.00%*	*40,434,000*	*20,00%*	-						*40,434,000*	
3.31.04	Program Pengelolan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah izin usaha yang diawasi dari jumlah izin yang dikeluarkan 2 tahun sebelumnya										0	-	25 IUI	20,000,000	25 IUI	20,000,000	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**36,817,106,815**		**40,284,823,307**		**42,794,117,819**		**34,571,771,543**		**60,117,751,292**		**60,117,751,292**		**274,703,322,068**	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**19,169,511,789**		**19,906,807,085**		**21,396,375,140**		**16,130,835,556**		**26,609,032,930**		**26,609,032,930**		**129,821,595,430**	
3.00.03. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM Setdako*	*76.00*	*77.00*	5,134,422,631	*80.98*	*5,391,909,285*	*83.96*	*7,593,472,601*	*83.00*	*7,100,227,366*	-	-	-	-		*25,220,031,883*	
3.00.03. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	5,202,480,788	*80.00%*	*6,569,732,419*	*80.00%*	*5,495,445,268*	*80.00%*	*3,755,987,478*	-	-	-	-		*21,023,645,953*	
3.00.03. 01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	181,379,000	*100.00%*	*167,571,250*	*100.00%*	*202,791,600*	*100.00%*	*180,750,000*	-	-	-	-		*732,491,850*	
3.00.03. 01.04	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	*4*	*4*	-							-	-	-	-		-	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*310,955,878*	*BB*	*444,384,106*	*A*	*552,722,160*	*A*	*321,883,245*	-	-	-	-		*1,629,945,389*	
		Nilai IKM Kota	*78,39*	*79.7*		*80.35*		*81.66*		*80.75*		-	-	-	-			
3.00.03. 01.17	*Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH*	*Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah*	*100.00%*	-	-	*100.00%*	*24,971,860*	*100.00%*	*3,685,780*	*100.00%*	*10,439,815*	-	-	-	-		*39,097,455*	
3.00.03. 01.27	*Program penataan kelembagaan dan organisasi daerah*	*Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk Sesuai Perundang-undangan*	*100.00%*	*100.00%*	*435,305,860*	*100.00%*	*131,811,483*	*100.00%*	*68,262,025*	*100.00%*	*17,664,530*	-	-	-	-		*653,043,898*	
3.00.03. 01.16	*Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah*	*Presentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah*	*100.00%*	*100.00%*	*2,372,453,059*	*100.00%*	*3,279,683,052*	*100.00%*	*3,588,608,110*	*100.00%*	*2,501,597,500*	-	-	-	-		*11,742,341,721*	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan penyelesaian dokumen SAKIP Setdako sesuai pedoman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	23,495,824,535	100%	23,495,824,535	100%	46,991,649,070	
		Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		IKM Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86		87		87		
		Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A		A		A		

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh KemenPan RB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,01		12.50		12.50		
		Indeks Kematangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.09		39.09		39.09		
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK pada tahun n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.67		66.67		66.67		
		Persentase pemenuhan kebutuhan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase sarana dan prasarana kantor serta rumah dinas yang terpelihara dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85%		90%		90%		
		Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sesuai SOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase pelayanan informasi kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
3.00.03. 01.19	*Program Penataan Peraturan Perundang-undangan*	*Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi*	*N/A*	*50.00%*	*689,948,845*	*60.00%*	*505,034,804*	*70.00%*	*305,571,078*	*80.00%*	*471,179,220*	-	-	-	-		*1,971,733,947*	
3.00.03. 01.28	*Program penyelenggaraan pemerintahan umum dan perangkat daerah*	*Peringkat LPPD*	*20*	*19*	*1,416,864,720*	*15*	*993,926,439*	*30*	*946,492,739*	*15*	*550,560,085*	-	-	-	-		*3,907,843,983*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.00.03. 01.29	*Program peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama*	*Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf 3)*	*2.50%*	*3.00%*	*1,419,330,028*	*3.20%*	*545,992,254*	*4.78%*	*425,588,754*	*4.20%*	*170,503,610*	-	-	-	-		*2,561,414,646*	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase masjid yang dikelola secara optimal	*40.00%*	*50.00%*		*55.00%*		*60.00%*		*65.00%*		-	-	-	-			
3.00.03. 01.30	*Program peningkatan peran dan fungsi lembaga sosial keagamaan*	*Persentase organisasi/ lembaga sosial dan keagamaan yang aktif*	*55.00%*	*61.00%*	*374,989,957*	*67.00%*	*587,471,332*	*74.00%*	*1,271,236,700*	*77.00%*	*228,165,500*	-	-	-	-		*2,461,863,489*	
3.00.03. 01.52	*Program peningkatan pendidikan Usaha Kesehatan Sekolah*	*Jumlah Sekolah/Madrasah yang mencapai Strata yang Maksimal*	*100.00%*	*100.00%*	*287,236,031*	*100.00%*	*154,538,381*	*100.00%*	*160,692,750*	*100.00%*	*17,187,960*	-	-	-	-		*619,655,122*	
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1500	2,442,786,175	3.1600	2,442,786,175	3.1600	4,885,572,350	
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase masalah kewilayahan yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90%		100%		100%		
		Persentase mesjid yang berfungsi secara optimal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		85%		85%		
		Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77%		80%		80%		
		Persentase MUI Kecamatan dan Lembaga Keagamaan Pendukung MUI yang aktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		100%		100%		
		Persentase Pegawai Negeri Sipil yang menyalurkan zakat/wakaf melalui lembaga badan zakat/wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		85%		85%		
		Jumlah sekolah/ madrasah yang meningkat strata UKS/M pada tahun n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 sekolah		4 sekolah		4 sekolah		

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%		80%		80%		
		Persentase perda yang dibahas di DPRD setelah diusulkan pemrakarsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%		85%		85%		
		Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan ke masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
3.00.03. 01.32	*Program peningkatan kapasitas kelembagaan*	*Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindak lanjuti*	*100.00%*	*100.00%*	*163,406,559*	*100.00%*	*210,776,679*	*100.00%*	*34,934,960*	*100.00%*	*40,229,200*						*449,347,398*	
3.00.03. 01.35	*Program peningkatan produksi daerah*	*Persentase lembaga yang memanfaatkan data perkembangan produksi daerah*	*100.00%*	*-*	*-*	*100.00%*	*131,677,468*	*100.00%*	*89,568,800*	*100.00%*	*61,693,800*	*-*	*-*	*-*	*-*		*282,940,068*	
3.00.03. 01.48	*Program peningkatan pengendalian administrasi pembangunan*	*Persentase pengelola kegiatan yang tertib Administrasi sesuai aturan*	*87.00%*	*87.00%*	*137,808,004*	*90.50%*	*81,319,697*	*92.50%*	*21,571,815*	*94.50%*	*24,513,803*	*-*	*-*	*-*	*-*		*265,213,319*	
3.00.03. 01.49	*Program pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi*	*Persentase tertib administrasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah*	*100.00%*	*100.00%*	*747,007,743*	*100.00%*	*686,006,576*	*100.00%*	*635,730,000*	*100.00%*	*678,252,444*	*-*	*-*	*-*	*-*		*2,746,996,763*	
	Program Pengembangan Data / Informasi	*Persentase data yang dimanfaatkan untuk perkembangan produksi daerah*	*100.00%*	*100.00%*	*115,821,450*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*		*115,821,450*	
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	*Persentase lembaga yang memanfaatkan data perkembangan produksi daerah*	*100.00%*	*100.00%*	*180,101,236*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*		*180,101,236*	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	670,422,220	100%	670,422,220	100%	1,340,844,440	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase terlaksananya penyajian data/ informasi bidang ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
		Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan menguntungkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%		100%		100%		
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**17,647,595,026**		**20,378,016,222**		**21,397,742,679**		**18,440,935,987**		**33,508,718,362**		**33,508,718,362**		**144,881,726,638**	
3.00.04.01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*78.35*	*79.35*	5,118,462,956	*79.85*	*7,276,317,371*	*80.35*	*9,193,436,013*	*80.75*	*7,997,590,668*						*29,585,807,008*	**SEKRETARIAT DPRD**
3.00.04.01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	1,086,188,557	*80.00%*	*1,114,674,156*	*80.00%*	*2,092,668,505*	*80.00%*	*2,971,665,085*						*7,265,196,303*	
3.00.04.01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	150,317,000	*100.00%*	*147,770,000*	*100.00%*	*495,750,000*	*100.00%*	*198,750,000*						*992,587,000*	
3.00.04.01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	758,502,313	*BB*	*328,932,750*	*BB*	*360,646,000*	*A*	*320,614,900*						*1,768,695,963*	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM										81.35	18,873,783,542	81.85	18,873,783,542	81.85	37,747,567,084	
		Nilai AKIP										A		A		A		
3.00.04.01.15	*Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah*	*Persentase fasilitasi rapat rapat dan persidangan DPRD tepat waktu*	*100.00%*	*100.00%*	*10,534,124,200*	*100.00%*	*11,510,321,945*	*100.00%*	*9,255,242,161*	*100.00%*	*6,952,315,334*						*38,252,003,640*	
		Jumlah Produk Hukum DPRD yang difasilitasi	*10*	*10*		*11*		*14*		*12*								

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi rapat rapat dan persidangan DPRD tepat waktu										100%	14,634,934,820	100%	14,634,934,820	100%	29,269,869,640	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**17,574,505,627**	**-**	**14,705,176,960**	**-**	**15,355,373,933**	**-**	**10,750,785,958**	**-**	**39,728,416,251**	**-**	**39,728,416,251**	**-**	**137,842,674,980**	
5.01	**PERENCANAAN**				**5,151,968,165**		**3,145,388,223**		**3,124,764,620**		**2,129,576,254**		**6,203,382,468**		**6,203,382,468**		**25,958,462,198**	
4.00.02. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*76,78*	*72,93*	*835,409,516*	*76,69*	*1,017,264,699*	*81,22*	*1,580,516,118*	*83,00*	*835,181,494*	-	-	-	-		*4,268,371,827*	
4.00.02. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80,00%*	*80,00%*	*416,514,626*	*80,00%*	*261,775,976*	*80,00%*	*251,348,631*	*80,00%*	*215,649,585*	-	-	-	-		*1,145,288,818*	
4.00.02. 01.03	*Program Peningkatan disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100,00%*	*100,00%*	*18,895,800*	*100,00%*	*17,996,000*	*100,00%*	*17,996,000*	*100,00%*	*18,900,000*	-	-	-	-		*73,787,800*	
4.00.02. 01.05	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur*	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	*3*	*3*	*26,079,938*	*3*	*26,165,571*	*3*	*26,493,900*	*3*	-	-	-	-	-		*78,739,409*	
4.00.02. 01.06	*Program Peningkatan Pengembangan Sis-tem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan*	*Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*A*	*34,480,120*	*A*	-	*A*	*12,396,360*	*A*	*9,563,025*	-	-	-	-		*56,439,505*	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM		-	-	-	-	-	-	-	-	86	5,225,148,288	89	5,225,148,288	89	10,450,296,576	
		Nilai evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A		A		A		
		Persentase Aparatur perencana yang memiliki sertifikat perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.12%		58.82%		58.82%		
		Persentase sasaran, progam dan kegiatan Renja Bappeda yang selaras dengan Renstra Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		
4.00.02. 01.21	*Program perencanaan pembangunan daerah*	*Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD*	*92,86%*	*94,08%*		*92,24%*		*88,76%*		*97,04%*		-		-				

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah	*40,00%*	*45,50%*	*2,656,149,088*	*50,00%*	*1,317,998,171*	*55,00%*	*967,718,414*	*60,00%*	*892,032,505*	-	-	-	-		*5,833,898,178*	BAPPEDA
		Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %	*100,00%*	*100,00%*		*100,00%*		*100,00%*		*100,00%*		-		-				
4.00.02.01.15	*Program Pengembangan data/informasi*	*Persentase ketersedia-an data/informasi perencanaan pembangunan daerah*	*78,00%*	*78,00%*	*267,228,221*	*80,00%*	*131,244,800*	*80,00%*	*84,893,997*	*85,00%*	*9,381,850*	-	-	-	-		*492,748,868*	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	-	-		-		-			-	17.50%	771,333,270	18.00%	771,333,270	18.00%	1,542,666,540	
		Persentase indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target	-	-		-		-		-		93.39%		97.22%		97.22%		
		Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan	-	-		-		-		-		28		29		29		
		Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja	-	-		-		-		-		18		20		20		
		Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah										86.36%		90.91%		90.91%		
		Persentase tingkat ketersediaan data pembangunan daerah										97.38%		98.50%		98.50%		
		Tingkat aksesibilitas data	-	-		-		-		-		100%		100		100		
		Persentase Perangkat Daerah yang mencapai target kinerja tahunan rata-rata minimal 90 %										90.32%		93.55%		93.55%		
		Persentase data capaian kinerja PD yang akuntabel	-	-		-		-		-		96.20%		96.84%		96.84%		
4.00.02.01.16	*Program Kerjasama Pembangunan*	*Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti*	*80,00%*	*80,00%*	*111,862,219*	*90,00%*	*38,930,392*	*90,00%*	*8,013,700*	*90,00%*	*8,128,080*	-	-	-	-		*166,934,391*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.00.02.01.18	*Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh*	*Persentase PD bidang IPW yg telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras*	*100,00%*	*100,00%*	*54,095,430*	*100,00%*	*21,822,337*	*100,00%*	*8,472,950*	*100,00%*	*5,482,975*	-	-	-	-		*89,873,692*	
4.00.02.01.19	*Program Perencanaan pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar*	*Persentase hasil koor-dinasi perencanaan pengembangan kota-kota menangah & besar yg ditindaklanjuti*	*100,00%*	*100,00%*	*207,191,767*	*100,00%*	*100,581,095*	*100,00%*	*25,878,500*	*100,00%*	*5,278,850*	-	-	-	-		*338,930,212*	
4.00.02.01.20	*Program peningkatan kapasitas kelemba-gaan perencanaan pembangunan daerah*	*Persentase faskel yang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik*	*75,00%*	*100%*	*84,684,900*	*100%*	*70,885,450*	*100%*	*78,015,420*	*89,36%*	*90,795,250*	-	-	-	-		*324,381,020*	
4.00.02.01.22	*Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi*	*Persentase PD lingkup bidang ekonomi yg telah memiliki dokumen perencanaan yg baik, konsisten dan selaras*	*100,00%*	*100,00%*	*160,221,100*	*100,00%*	*51,754,441*	*100,00%*	*14,450,550*	*100,00%*	*12,258,040*	-	-	-	-		*238,684,131*	
4.00.02.01.23	*Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya*	*Persentase PD lingkup bidang sosial & budaya yg telah memiliki doku-men perencanaan yg baik, konsisten & selaras*	*100,00%*	*100,00%*	*224,881,230*	*100,00%*	*78,834,841*	*100,00%*	*43,329,355*	*100,00%*	*23,261,620*	-	-	-	-		*370,307,046*	
4.00.02.01.24	*Program penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah*	*Persentase Rencana Aksi PPK dengan Kategori Minimal Baik (Hijau)*	*100%*	*100%*	*54,274,210*	*100%*	*10,134,450*	*100%*	*5,240,725*	*100%*	*3,662,980*	-	-	-	-		*73,312,365*	
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.20%	206,900,910	98.80%	206,900,910	98.80%	*413,801,820*	
		Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan provinsi, nasional, kab/kota wilayah perbatasan kota.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota menangah dan besar yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		
		Tingkat Kesesuaian Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%		100.00%		100.00%		
5.02	**KEUANGAN**				**8,886,989,779**		**7,528,709,599**		**8,638,231,022**		**6,659,418,639**		**25,063,679,838**		**25,063,679,838**		**81,840,708,715**	
4.00.03. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*80.14*	*83.32*	*2,633,352,901*	*80.22*	*2,585,172,441*	*81.00*	*3,823,732,540*	*89.00*	*2,573,857,617*						*11,616,115,499*	
4.00.03. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana prasarana perkantoran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*100%*	*890,203,784*	*100.00%*	*271,775,551*	*100.00%*	*704,067,214*	*80.00%*	*907,448,479*						*2,773,495,028*	
4.00.03. 01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100%*	*33,450,000*	*100.00%*	*28,800,000*	*100.00%*	*27,450,000*	*100.00%*	*27,000,000*						*116,700,000*	
4.00.03. 01.04	*Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur*	*Jumlah ASN yang mengikuti bimtek*	-							-							-	
4.00.03. 01.05	*Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*9,437,000*	*A*	*6,023,460*	*A*	*6,272,200*	*A*	*6,345,480*						*28,078,140*	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai IKM										83	10,268,823,733	85	10,268,823,733	85	20,537,647,466	
4.00.03. 01.15	*Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	*Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja*	*95.00%*	*95%*	*4,329,980,209*	*90.13%*	*3,488,533,882*	*91.96%*	*2,851,854,091*	*95%*	*2,119,767,063*						*12,790,135,245*	**BADAN KEUANGAN DAERAH**
		Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap APBD	*10.00%*	*6%*		*4,91%*		*3,55%*		*<10.00%*								
		Laporan Keuangan berbasis Akrual	*Ada*	*Ada*		*Ada*		*Ada*		*Ada*								
		Persentase Perangkat Daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD	*74.19%*	*74.41%*		*80.64%*		*83.67%*		*87.07%*								

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase realisasi PAD	*100.00%*	*100%*		*97,97%*		*97,41%*		*100.00%*								
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran										95%	13,320,078,720	95,00%	13,320,078,720	95,00%	26,640,157,440	
		Persentase sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu terhadap APBD										<10%		<10%		<10%		
		Laporan Keuangan berbasis Akrual										ADA		ADA		ADA		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD										90,32%	762,464,630	93,54%	762,464,630	93,54%	1,524,929,260	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD										100%	712,312,755	100,00%	712,312,755	100,00%	1,424,625,510	
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Fasilitasi Pembiayaan	*Persentase fasilitasi pembiayaan yg lancar dari total pembiayaan*	*70.00%*	*70.00%*	*990,565,885*	*800 pemanfaat*	*1,148,404,265*			*800 pemanfaat*	*1,025,000,000*					*70% ; 800 pemanfaat*	*3,163,970,150*	
	Program Peningkatan Pelayanan	*Jumlah penerima manfaat BLUD*	*800 pemanfaat*					*800 pemanfaat*	*1,224,854,977*							*800 pemanfaat*	*1,224,854,977*	
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**3,535,547,683**		**3,605,330,588**		**3,204,002,331**		**1,871,591,455**		**8,062,965,085**		**8,062,965,085**		**28,342,402,227**	
4.00.04. 01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*79.25*	*79.34*	*505,071,058*	*83.00*	*562,018,767*	*83.28*	*1,144,556,153*	*82.70*	*918,662,035*						*3,130,308,013*	
4.00.04. 01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80.00%*	*80.00*	*221,151,102*	*80.00*	*144,321,598*	*80.00*	*83,935,068*	*80.00%*	*81,982,350*						*531,390,118*	
4.00.04. 01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00*	*17,550,000*	*100.00*	*15,300,000*	*100.00*	*18,000,000*	*100.00%*	*17,100,000*						*67,950,000*	
4.00.04. 01.04	*Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	*Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi*	*29.10%*	*96.03*	*1,087,162,843*	*97.95*	*1,205,830,846*	*98.36*	*1,202,553,385*	*48.00%*	*271,850,740*						*3,767,397,814*	
4.00.04. 01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*B*	*19,044,675*	*A*	*7,279,800*	*A*	*9,101,600*	*A*	*9,224,110*						*44,650,185*	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai IKM										83.85	7,309,893,295	85.00	7,309,893,295	85.00	14,619,786,590	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.00.04. 01.17	*Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur*	*Persentase database kepegawaian yang tersedia secara lengkap*	*100.00%*	*100.00*	*1,685,568,005*	*100.00*	*1,670,579,577*	*100.00*	*745,856,125*	*100.00%*	*572,772,220*						*4,674,775,927*	BKPSDM
		Persentase laporan kesalahan data kepegawaian yang ditindaklanjuti	*100.00%*	*100.00*		*100.00*		*100.00*		*100.00%*								
		Persentase penyelesaian produk layanan	*100.00%*	*100.00*		*100.00*		*100.00*		*100.00%*								
		Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan	*100.00%*	*100.00*		*100.00*		*0.00*		*100.00%*								
		Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan	*100.00%*	*100.00*		*100.00*		*100.00*		*100.00%*								
		Persentase Prestasi Kerja PNS Bernilai Baik	*98.77%*	*96.00*		*93.03*		*98.90*		*99.00%*								
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase database kepegawaian yang tersedia secara lengkap										100.00%	753,071,790	100.00%	753,071,790	100.00%	1,506,143,580	
		Persentase laporan kesalahan data kepegawaian yang ditindaklanjuti										100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase penyelesaian produk layanan										100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan										100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan										100.00%		100.00%		100.00%		
		Persentase prestasi kerja PNS yang bernilai baik										99.40%		99.50%		99.50%		
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110,026,900**		**110,026,900**		**220,053,800**	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi			-		-		-		-	55.00%	110,026,900	64.00%	110,026,900	64.00%	220,053,800	BKPSDM

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**-**		**425,748,550**		**388,375,960**		**90,199,610**		**288,361,960**		**288,361,960**		**1,481,048,040**	
4.00.02.01.29	*Program pengembangan inovasi daerah*	*Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder*	*50.00%*	*80.00%*	*-*	*85.71%*	*425,748,550*	*90.91%*	*388,375,960*	*85.00%*	*90,199,610*	-	-	-	-		*904,324,120*	INSPEKTORAT
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan	-	-		-		-		-		90.00%	288,361,960	95.00%	288,361,960	95.00%	576,723,920	
		Indeks inovasi daerah	-	-		-		-		-		500		800		800		
		Persentase Implemantasi Rencana Kelitbangan	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	-	-		-		-		-		2		2		2		
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	-		-		-		-		100%		100%		100%		
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**2,135,877,548**		**1,327,889,573**		**1,710,887,575**		**4,128,353,902**		**9,735,062,621**		**9,735,062,621**		**28,773,133,840**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**2,135,877,548**		**1,327,889,573**		**1,710,887,575**		**4,128,353,902**		**9,735,062,621**		**9,735,062,621**		**28,773,133,840**	
4.00.01.01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*78.35*	*80.56*	*481,338,205*	*84.20*	*448,439,975*	*88.38*	*753,387,344*	*80.75*	*903,090,211*						*2,586,255,735*	
4.00.01.01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80.00%*	*95.00%*	*137,699,756*	*96.84%*	*179,988,550*	*96.84%*	*138,384,955*	*80.00%*	*1,076,336,566*						*1,532,409,827*	
4.00.01.01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*19,200,000*	*100.00%*	*17,850,000*	*100.00%*	*19,350,000*	*100.00%*	*53,257,100*						*109,657,100*	
4.00.01.01.05	*Program Peningkatan Pengembanngan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan*	*Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*A*	*38,655,866*	*A*	*13,759,300*	*A*	*12,028,400*	*A*	*9,700,000*						*74,143,566*	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										81.85	7,501,225,051	81.85	7,501,225,051	81.85	15,002,450,102	
4.00.01.01.15	*Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan*	*Tingkat/level kapabilitas APIP*	*na*	*2*	*482,735,477*	*3*	*352,063,067*	*3*	*443,572,992*	*3*	*202,130,000*						*1,480,501,536*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.00.01.01.16	*Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan*	*Persentase penyelesaian pengaduan gratifikasi yang ditindaklanjuti di lingkungan perangkat daerah*	*100.00%*	*100.00%*	*71,779,300*	*100.00%*	*260,765,231*	*100.00%*	*271,469,734*	*100.00%*	*645,439,775*						*1,249,454,040*	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Gratifikasi yang ditindaklanjuti di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh										100%	954,245,040	100%	954,245,040	100%	1,908,490,080	
4.00.01.01.17	*Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH*	*Persentase rekomendai hasil pemriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti*	*55.30%*	*82.16%*	*904,468,944*	*85.12%*	*55,023,450*	*86.02%*	*72,694,150*	*82.00%*	*1,238,400,250*						*2,270,586,794*	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	*53.75%*	*78.21%*		*80.80%*		*64.42%*		*60.00%*								
6.01.02	Program Peneyelenggaraan Pengawasan	Presentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti										82.00%	1,279,592,530	82.00%	1,279,592,530	82.00%	2,559,185,060	
		Presentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti										60.00%		60.00%		60.00%		
		Tingkat/level kapabilitas APIP										3		3		3		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**17,127,150,196**		**18,736,835,835**		**31,283,953,489**		**19,812,190,207**		**44,805,446,665**		**44,805,446,665**		**176,571,023,057**	
7.01	**KECAMATAN**				**17,127,150,196**		**18,736,835,835**		**31,283,953,489**		**19,812,190,207**		**44,805,446,665**		**44,805,446,665**		**176,571,023,057**	
	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT				**5,496,155,796**		**5,428,513,482**		**8,949,816,869**		**4,923,088,277**		**14,203,046,656**		**14,203,046,656**		**53,203,667,736**	
6.00.01.01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*82.19*	82.17	*955,476,861*	85.83	*1,386,588,539*	87.11	*923,602,829*	89.00	*670,117,253*						*3,935,785,482*	
6.00.01.01.02	*Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*1,717,078,861*	*80.00%*	*1,275,415,850*	*80.00%*	*653,061,218*	*80.00%*	*759,319,950*						*4,404,875,879*	
6.00.01.01.03	*Program peningkatan disiplin aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*52,990,000*	*100.00%*	*51,225,000*	*100.00%*	*53,922,000*	*100.00%*	*49,050,000*						*207,187,000*	
6.00.01.01.04	*Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur*	*Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan*	*1*	*1*	*33,298,250*	*1*	*3,530,000*										*36,828,250*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.00.01.01.05	*Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan*	*Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*19,728,950*	*A*	*3,904,500*	*A*	*3,763,190*	*A*	*4,161,550*						*31,558,190*	Kec Payakumbuh Barat
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										90.00	11,688,658,859	91	11,688,658,859	91	23,377,317,718	
.6.00.01.01.15	*Program Peningkatan keberdayaan masyarakat*	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*100.00%*	*100.00%*	*868,103,220*	*100.00%*	*847,625,742*	*100.00%*	*847,226,185*	*100.00%*	*588,166,450*						*3,151,121,597*	
.6.00.01.01.17	*Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa*	*Persentase kehadiran peserta musrenbang*	*100.00%*	*100.00%*	*233,415,750*	*100.00%*	*192,150,850*	*100.00%*	*178,503,880*	*100.00%*	*155,321,320*						*759,391,800*	
.6.00.01.01.28	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah*	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*	*100%*	*1,540,120,404*					*100%*	*2,529,458,486*						*4,069,578,890*	
		Nilai IKM	*82.19*	*82.17*						*89.00*								
.6.00.01.01.50	*Program Penyelenggaraan Kewilayahan*	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*		*-*	*100%*	*1,529,200,201*	*100%*	*1,462,457,321*				*-*		*-*		*2,991,657,522*	
		Nilai IKM	*82.19*			*85.83*		*87.11*										
6.00.01.04.53.	*Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*						*100.00%*	*4,759,208,446*								*4,759,208,446*	
		Nilai IKM						*87.11*										
.6.00.01.01.29	*Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama*	*Persentase santri yang berkualitas*	*50.00%*	*60.00%*	*75,943,500*	*65.00%*	*138,872,800*	*70.00%*	*68,071,800*	*75.00%*	*167,493,268*						*450,381,368*	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kecamatan										70%	87,779,878	75%	87,779,878	75%	175,559,756	
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti										100%		100%		100%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan										70%	2,321,886,999	75%	2,321,886,999	75%	4,643,773,998	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif										100%		100%		80%		
		IKM Kelurahan										90		91		91	-	
7.01.05	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100%	92,362,340	100%	92,362,340	100%	184,724,680	
		Persentase santri yang berkualitas										75%		80%		80%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti										100%	12,358,580	100%	12,358,580	100%	24,717,160	
	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR				**2,792,660,699**		**3,898,033,905**		**5,296,951,768**		**3,109,317,309**		**9,034,652,754**		**9,034,652,754**		**33,166,269,189**	
6.00.02.01.01	*Program Pelayanan Adm Perkantoran*	*Nilai IKM*	*79.42*	*81.00*	*798,736,194*	*83.00*	*1,355,823,353*	*85.00*	*874,935,203*	*87.00*	*721,045,614*						*3,750,540,364*	
6.00.02.01.02	*Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*121,199,850*	*80.00%*	*554,061,211*	*80.00%*	*481,046,250*	*80.00%*	*345,142,750*						*1,501,450,061*	
6.00.02.01.03	*Program peningkatan disiplin aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*30,950,000*	*100.00%*	*38,700,000*	*100.00%*	*39,600,000*	*100.00%*	*39,600,000*						*148,850,000*	
6.00.02.01.05	*Prog. Peningkatan pengem-bangan sistem pelaporan capaian kinerja&Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*12,739,300*	*BB*	*3,624,000*	*A*	*15,115,850*	*A*	*13,490,510*						*44,969,660*	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										90	7,624,214,153	91	7,624,214,153	91	15,248,428,306	
6.00.02.01.15	*Program Peningkatan keberdayaan masyarakat*	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*100.00%*	*100.00%*	*512,250,300*	*100.00%*	*494,863,670*	*100.00%*	*489,840,650*	*100.00%*	*323,963,440*						*1,820,918,060*	
6.00.02.01.17	*Program Peningkatan Partisipasi Masy. dlm membangun Desa*	*Persentase kehadiran peserta musrenbang*	*100.00%*	*100.00%*	*115,150,200*	*100.00%*	*126,219,200*	*100.00%*	*128,915,250*	*100.00%*	*148,620,800*						*518,905,450*	
6.00.02.01.28	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah*	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100.00%*	*-*	*1,127,839,655*		*-*	*100.00%*		*100.00%*	*1,423,526,745*						*2,551,366,400*	
		Nilai IKM	*79.42*	*81*		*83.00*		*85.23*		*87.00*								Kecam

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
.6.00.01 .01.50	*Program Penyelenggaraan Kewilayahan*	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*	*100%*		*100.00%*	*862,991,928*	*100.00%*	*831,469,851*								*1,694,461,779*	matan Payakumbuh Tmur
		Nilai IKM	*79.42*	*81.00*		*83.00*		*85.23*										
6.00.02. 01.29	*Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama*	*Persentase santri yang berkualitas*	*50.00%*	*60.00%*	*73,795,200*	*65.00%*	*461,750,543*	*70.00%*	*50,099,750*	*75.00%*	*93,927,450*						*679,572,943*	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang						65.00%	2,385,928,964			65%	68,712,580	70%	68,712,580	70%	2,523,354,124	
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti						87.11%				100%		100%		100.00%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan										65%	1,242,995,491	70%	1,242,995,491	70%	2,485,990,982	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif										100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan										90		91		91		
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100%	79,299,790	100.00%	79,299,790	100%	158,599,580	
		Persentase santri yang berkualitas										75%		80%		80%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti										100%	19,430,740	100%	19,430,740	100%	38,861,480	
	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA				**4,689,627,954**		**4,507,121,070**		**8,948,042,633**		**7,353,089,806**		**9,146,344,191**		**9,146,344,191**		**43,790,569,845**	
6.00.03. 01.01	*Program Pelayanan Adm Perkantoran*	*Nilai IKM*	*85.72*	*86.72*	*872,003,837*	*87.75*	*964,577,772*	*88.28*	*1,143,958,938*	*89.00*	*830,262,601*						*3,810,803,148*	
6.00.03. 01.02	*Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*1,418,518,857*	*80.00%*	*1,406,707,256*	*80.00%*	*2,763,684,909*	*80.00%*	*4,132,771,024*						*9,721,682,046*	
6.00.03. 01.03	*Program peningkatan disiplin aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*29,000,000*	*100.00%*	*26,550,000*	*100.00%*	*31,185,000*	*100.00%*	*33,400,000*						*120,135,000*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.00.03.01.04	*Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur*	*Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan*	*1*	*1*	*9,269,950*	*1*	*6,195,500*										*15,465,450*	Kec Payakumbuh Utara
6.00.03.01.05	*Prog. Peningkatan pengem-bangan sistem pelaporan capaian kinerja& Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*A*	*A*	*19,977,300*	*A*	*2,799,600*	*A*	*2,932,000*	*A*	*3,051,000*						*28,759,900*	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										90	7,266,763,400	91	7,266,763,400	91	14,533,526,800	
6.00.02.01.15	*Program Peningkatan keberdayaan masyarakat*	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*100.00%*	*100.00%*	*543,388,900*	*100.00%*	*711,743,050*	*100.00%*	*623,778,739*	*100.00%*	*604,742,625*						*2,483,653,314*	
6.00.02.01.17	*Program Peningkatan Partisipasi Masy. dlm membangun Desa*	*Persentase kehadiran peserta musrenbang*	*100.00%*	*100.00%*	*158,850,780*	*100.00%*	*136,471,370*	*100.00%*	*151,634,000*	*100.00%*	*157,547,940*						*604,504,090*	
6.00.02.01.28	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah*	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*	*100%*	*1,583,647,330*					*100%*	*1,487,587,966*						*3,071,235,296*	
		Nilai IKM	*85.72*	*86.19*						*89*								
.6.00.01.01.50	*Program Penyelenggaraan Kewilayahan*	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*	*100%*		*100%*	*1,134,172,272*	*100%*	*1,070,575,881*								*2,204,748,153*	
		Nilai IKM	*85.72*	*86.19*		*87.75*		*88.28*										
6.00.03.01.29	*Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama*	*Persentase santri yang berkualitas*	*50%*	*50%*	*54,971,000*	*65%*	*113,470,250*	*70%*	*79,057,275*	*75%*	*103,726,650*						*351,225,175*	
	Program Peningkatan Ketertiban Kewilayahan	*Jumlah kegiatan peningkatan ketertiban kewilayahan yang dilaksanakan*				*1*	*4,434,000*										*4,434,000*	
6.00.03.03.53	*Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*						*100%*	*3,081,235,891*								*3,081,235,891*	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kecamatan										65%	70,734,410	70%	70,734,410	70%	141,468,820	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti										100%		100%		100%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan										65%	1,639,724,808	70%	1,639,724,808	70%	3,279,449,616	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif										100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan										90		91		91		
7.01.05	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100%	146,221,840	100%	146,221,840	100%	292,443,680	
		Persentase santri yang berkualitas										75%		80%		85%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti										100%	22,899,733	100%	22,899,733	100%	45,799,466	
	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN				**2,184,885,418**		**2,213,721,013**		**3,936,257,079**		**2,278,929,532**		**6,317,632,177**		**6,317,632,177**		**23,249,057,396**	
6.00.04. 01.01	*Program Pelayanan Adm. Perkantoran*	*Nilai IKM*	*79.5*	*80.89*	*711,627,997*	*81.67*	*835,500,237*	*85,97*	*641,547,251*	*87,08*	*525,243,079*						*2,713,918,564*	
6.00.04. 01.02	*Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80%*	*80%*	*297,533,050*	*80%*	*244,385,000*	*80%*	*284,514,273*	*80%*	*239,166,400*						*1,065,598,723*	
6.00.04. 01.03	*Program peningkatan disiplin aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100%*	*100%*	*24,294,000*	*100%*	*25,234,800*	*100%*	*23,844,700*	*100%*	*22,045,100*						*95,418,600*	
6.00.04. 01.05	*Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*B*	*BB*	*13,639,500*	*A*	*7,654,600*	*A*	*7,413,200*	*A*	*2,299,450*						*31,006,750*	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										89	5,301,676,889	90	5,301,676,889	91	10,603,353,778	
6.00.04. 01.15	*Program Peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan*	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*100.00%*	*100.00%*	*322,563,190*	*100.00%*	*331,771,350*	*100.00%*	*333,734,100*	*100.00%*	*191,690,505*						*1,179,759,145*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.00.04.01.17	*Program Peningkatan Partisipasi Masy. dlm Membangun Desa*	*Persentase kehadiran peserta musrenbang*	*100.00%*	*100.00%*	*97,131,080*	*100.00%*	*69,794,775*	*100.00%*	*91,244,725*	*100.00%*	*85,248,365*						*343,418,945*	Kec Payakumbuh Selatan
6.00.04.01.28	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah*	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100%*	*100%*	*660,136,001*		*-*			*100%*	*863,651,473*						*1,523,787,474*	
		Nilai IKM	*79.5*	*80.89*						*87.08*								
.6.00.01.01.50	*Program Penyelenggaraan Kewilayahan*	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100.00%*			*100.00%*	*576,166,951*	*100.00%*	*567,714,360*		*-*						*1,143,881,311*	
		Nilai IKM	*7950.00%*			*81.67%*		*85,97*										
6.00.01.04.53.	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti						1	1,934,085,820								*1,934,085,820*	
		Nilai IKM						85,97										
6.00.04.01.29	*Program Peningkatan kualitas hidup beragama*	*Persentase santri yang berkualitas*	*50.00%*	*60.00%*	*57,960,600*	*65.00%*	*123,213,300*	*70.00%*	*52,158,650*	*75.00%*	*349,585,160*						*582,917,710*	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kecamatan										70%	28,588,250	75%	28,588,250	75%	57,176,500	
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti										100%		100%		100%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan										70%	921,771,458	75%	921,771,458	75%	1,843,542,916	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif										100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan										89		90		90		
.7.01.05	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100.00%	62,515,260	100.00%	62,515,260	100.00%	125,030,520	
		Persentase santri yang berkualitas										80.00%		85.00%		85.00%		

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti										100%	3,080,320	100%	3,080,320	100%	6,160,640	
	KECAMATAN LIMPOSI TIGO NAGORI				**1,963,820,329**		**2,689,446,365**		**4,152,885,140**		**2,147,765,283**		**6,103,770,887**		**6,103,770,887**		**23,161,458,891**	
6.00.05.01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*72.48*	*79.94*	*671,554,969*	*84.68*	*816,077,664*	*84.85*	*650,230,134*	*84.00*	*431,325,645*						*2,569,188,412*	Kecamatan LATINA
6.00.05.01.02	*Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	*Persentase kondisi sa-rana prasarana perkan-toran dlm keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*305,727,479*	*80.00%*	*890,462,809*	*80.00%*	*691,828,032*	*80.00%*	*214,233,875*						*2,102,252,195*	
6.00.05.01.03	*Program peningkatan disiplin aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*21,043,000*	*100.00%*	*19,345,700*	*100.00%*	*20,146,500*	*100.00%*	*21,600,000*						*82,135,200*	
6.00.05.01.05	*Prog. Peningkatan pengem-bangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*18,561,470*	*BB*	*9,894,250*	*A*	*7,445,605*	*A*	*9,811,900*						*45,713,225*	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										86.00	5,088,776,129	89.00	5,088,776,129	89.00	10,177,552,258	
6.00.05.01.15	*Program Peningkatan keberdayaan masyarakat*	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*100.00%*	*100.00%*	*365,328,620*	*100.00%*	*360,955,110*	*100.00%*	*370,920,240*	*100.00%*	*299,754,670*						*1,396,958,640*	
6.00.05.01.17	*Program Peningkatan Partisipasi Masy. dlm Membangun Desa*	*Persentase kehadiran peserta musrenbang*	*100.00%*	*100.00%*	*90,363,720*	*100.00%*	*47,018,725*	*100.00%*	*48,875,420*	*100.00%*	*46,000,510*						*232,258,375*	
6.00.05.01.28	*Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah*	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100.00%*	*-*	*436,059,051*	*-*		*100.00%*		*100.00%*	*1,009,980,658*						*1,446,039,709*	
		Nilai IKM	*72.48*	*79.94*		*84.68*		*84.85*		*84.00*								
	Program Penyelenggaraan Kewilayahan	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*	*100.00%*			*100.00%*	*395,048,007*	*100.00%*	*410,737,985*								*805,785,992*	
		Nilai IKM	*72.48*			*84.68*		*84.85*										
	Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti*						*100.00%*	*1,902,650,884*								*1,902,650,884*	
		Nilai IKM						*81.00*										

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6.00.05.01.29	*Program Peningkatan kualitas pelayanan Kehidupan beragama*	*Persentase santri yang berkualitas*	*50.00%*	*60.00%*	*55,182,020*	*65.00%*	*150,644,100*	*70.00%*	*50,050,340*	*75.00%*	*115,058,025*						*370,934,485*	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kecamatan										65%	25,009,340	70%	25,009,340	70%	50,018,680	
		Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti										100%		100%		100%		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang meyampaikan usulan dalam musrenang kelurahan										65%	879,757,308	70%	879,757,308	70%	1,759,514,616	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif										100%		100%		100%		
		IKM Kelurahan										86		89		89		
7.01.05	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas										100%	83,090,950	100%	83,090,950	100%	166,181,900	
		Persentase santri yang berkualitas										70%		75%		75%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti										100%	27,137,160	100%	27,137,160	100%	54,274,320	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**2,373,766,732**		**2,405,232,965**		**2,481,619,962**		**1,638,020,025**		**3,291,688,834**		**3,291,688,834**		**15,482,017,352**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**2,373,766,732**		**2,405,232,965**		**2,481,619,962**		**1,638,020,025**		**3,291,688,834**		**3,291,688,834**		**15,482,017,352**	
5.00.01.01.01	*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Nilai IKM*	*82.86*	*85.57%*	*526,707,142*	*88.73%*	*377,866,188*	*89.99%*	*628,936,122*	*89.00%*	*282,281,962*						*1,815,791,414*	
5.00.01.01.02	*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik*	*80.00%*	*80.00%*	*110,036,350*	*80.00%*	*72,649,208*	*80.00%*	*63,464,190*	*80.00%*	*56,613,615*						*302,763,363*	
5.00.01.01.03	*Program Peningkatan Disiplin Aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*100.00%*	*100.00%*	*5,850,000*	*100.00%*	*5,850,000*	*100.00%*	*5,850,000*	*100.00%*	*5,850,000*						*23,400,000*	
5.00.01.01.05	*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	*Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat*	*BB*	*BB*	*29,388,925*	*A*	*11,357,700*	*A*	*24,477,400*	*A*	*14,999,685*						*80,223,710*	

No/ Rek	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Realisasi Kinerja Per tahun						Target Kinerja Per tahun								PD Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kinerja akhir periode RPJMD		
				Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM										87.00	1,595,852,271	87.00	1,595,852,271	87.00	3,191,704,542	
5.00.01.01.17	*Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan*	*Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat*	*100.00%*	*100.00%*	*1,243,124,790*	*100.00%*	*1,484,886,619*	*100.00%*	*1,214,837,200*	*100.00%*	*1,095,720,195*						*5,038,568,804*	
5.00.01.01.18	*Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan*	*Jumlah sosialisasi yang diadakan*	*3 kali*	*3 kali*	*88,637,750*	*5 kali*	*143,697,600*	*5 kali*	*197,755,550*	*5 kali*	*60,828,113*						*490,919,013*	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan										25.06%	52,988,770	25.06%	52,988,770	25.06%	105,977,540	
5.00.01.01.21	*Program Pendidikan Politik Masyarakat*	*Persentase Ormas yang aktif*	*88.89%*	*88.89%*	*370,021,775*	*84.78%*	*308,925,650*	*86.27%*	*346,299,500*	*90.64%*	*121,726,455*						*1,146,973,380*	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan Ormas Yang aktif										90.64%	789,154,563	90.64%	789,154,563	90.64%	1,578,309,126	
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase penangaanan konflik antar agama										100.00%	205,607,820	100.00%	205,607,820	100.00%	411,215,640	
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik yang terjadi di tengah masyarakat										100.00%	648,085,410	100.00%	648,085,410	100.00%	1,296,170,820	
TOTAL					**418,168,172,525**		**402,534,043,465**		**473,240,834,971**		**388,558,673,621**		**731,004,205,721**		**731,004,205,721**		**3,144,510,136,024**	



BAB 8

KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait.

8.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam pencapaian sasaran strategis dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel VIII.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	Kondisi Tahun Dasar 2016	TAHUN									Kondisi Akhir Periode RPJMD
			Realisasi			Target Capaian						
			2017	2018	2019	2020		2021		2022		
						Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif											
	Jumlah sekolah (SD, SMP) yang berakreditasi A [2])	*64*	*65*	*70*	*75*	*77*	*77*	80	-	82	-	-
1	Rata-rata lama sekolah [2])	-	-	-	-	-	10,79	10,80	10,85	10,90	10,90	10,90
2	Angka Usia Harapan Hidup [2])	73,03	73,13	73,33	73,61	73,90	73,90	74,30	74,30	74,50	74,50	74,50
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	NA	61,70	61,99	62,30	61,86	61,86	61,92	62,35	62,37	62,37	62,37
4	Tingkat Kemiskinan [2])	6,46	5,88	5,77	5,68	5,39	5,54	5,12	5,41	5,00	5,27	5,27
5	Tingkat Pengangguran [2])	7,07	3,45	3,78	4,11	6,47	5,90	6,32	5,83	5,80	5,80	5,80
	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional [2])	*3*	*9*	*14*	*20*	*15*	-	*18*	-	*20*	-	-
	Misi II : Membangun Perekonomian yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama											
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB [2])	23,92	24,48	25,15	25,13	24,07	24,07	24,12	24,12	24,17	24,17	24,17
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB [2])	5,64	5,67	5,35	5,60	6,08	6,08	6,11	6,11	6,12	6,12	6,12
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB [2])	7,39	7,04	6,75	6,35	7,45	7,45	7,46	7,46	7,47	7,47	7,47
4	Persentase peningkatan kunjungan wisata [2])	7,5	10,8	11,28	5,11	5,50	5,50	6,70	6,70	7,50	7,50	7,50
5	Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah) [2])	175,70	229,3	231,5	250,6	198,9	74,4	200,9	200,9	202	203,8	1.190,5
6	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM [2])	26,64	27,14	15,27	15,49	28,66	1,50	29,18	2,00	29,70	2,50	2,50
	Persentase Peningkatan SHU Koperasi [2])	*6,25*	*2,18*	*3,77*	*9,01*	*14,25*	-	*16,40*	-	*18,30*	-	-
	Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan											
1	Persentase pelayanan air minum [2])	94,21	95,46	96,73	97,84	99,02	99,02	99,67	99,67	100	100	100
2	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap [3])	63,81	67,22	69,21	72,25	74,81	75,90	77,56	75,56	80,31	77,31	77,31
3	Persentase sistem drainase skala kota [2])	39,88	47,44	51,74	58,95	47,39	60,39	48,91	62,91	50,44	64,40	64,40
4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	78,30	78,60	78,90	79,23	79,50	79,50	79,80	79,80	80,10	80,10	80,10
	Persentase daerah irigasi berkinerja baik	*73,43*	*73,45*	*77,73*	*80,20*	*82,08*	-	*84,21*	-	*86,58*	-	-
5	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan [3])	66,66	66,67	66,67	68,00	88,89	69,84	94,44	71,39	94,44	71,98	71,98
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [1])	56,23	56,50	58,96	59,66	57,50	57,50	57,75	57,75	58,00	58,00	58,00
7	Persentase luas permukiman kumuh [3])	1,77	2,59	1,88	1,64	1,47	1,34	1,32	0,82	1,17	0,30	0,30
	Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih											
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota	B	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	A	A
2	Opini BPK [2])	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase PD terintegrasi TI [2])	*0,00*	*9,68*	*29,03*	*45,16*	*64,52*	-	*100*	-	*100*	-	-

NO	INDIKATOR	Kondisi Tahun Dasar 2016	TAHUN									Kondisi Akhir Periode RPJMD
			Realisasi			Target Capaian						
			2017	2018	2019	2020		2021		2022		
						Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Indeks SPBE [2])	-	-	-	-	-	2,70	-	2,80	-	3,00	3,00
	IKM [2])	*78,39*	*79,35*	*80,90*	*81,66*	*80,75*	-	*81,35*	-	*81,85*	-	-
	Indeks RB [1])	*NA*	*56,83*	*67,41*	*71,66*	*60,00*	-	*65,00*	-	*70,00*	-	-
4	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	4,00	-	4,20	-	4,51	4,51
	Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah											
1	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik [3])	5,31	13,83	22	47,62	36,17	47,62	43,62	47,62	51,06	51,06	51,06
2	Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/ Badan Zakat/ Wakaf [4])	2,5	3	3,20	4,78	4,20	4,20	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00
	Persentase lembaga keagamaan (MUI) yg aktif	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*60,00*	*60,00*	-	*80,00*	-	*100,00*	-	-
	Persentase lembaga adat (KAN) yang aktif	*75,00*	*80,00*	*90.00*	*100*	*100*	-	*100*	-	*100*	-	-
3	Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya						100,00		100,00		100,00	100,00

Keterangan :

[1]) Indikator Tujuan Kota;
[2]) IKD Kota;
[3]) IKD Kota dan IK Program;
[4]) Indikator Tujuan Kota, IKD Kota dan IK program;

8.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial yang meliputi indikator kesejahteraan, pemerataan Ekonomi, dan kesejahteraan Sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi indikator kinerja dalam penyelenggaraan Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel VIII.2
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	Realisasi			Target Capaian						KINERJA AKHIR RPJMD
				2017	2018	2019	2020		2021		2022		
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**												
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi [1])	%	6.08	6,12	6,05	5,92	6,26	1,18	6,32	4,18	6,38	5,00	5,00
2.	Laju Inflasi	%	4,17	2,11	2,55	1,72	3,91	3,91	3,38	3,38	2,85	2,85	2,85
3.	PDRB (ADHB) Perkapita	(Rp /juta)	40,08	42,78	45,89	50,37	44,64	50,25	45,70	51,63	47,89	53,47	53,47
4.	PDRB (ADHK) Perkapita (2010=100)	(Rp /juta)	29,02	30,33	31,71	33,12	-	33,05	-	33,96	-	35,16	35,16
5.	Nilai Koefisien Gini [1])	Nilai	0,340	0,303	0,303	0,280	0,300	0,276	0,300	0,273	0,300	0,271	0,271

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	Realisasi			Target Capaian						
				2017	2018	2019	2020		2021		2022		KINERJA AKHIR RPJMD
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
6.	Tingkat Kemiskinan [2)]	%	6,46	5,88	5,77	5,68	5,39	5,54	5,12	5,41	5,00	5,27	5,27
7.	Tingkat Pengangguran[2)]	%	7,07	3,45	3,78	4,11	6,47	5,90	6,32	5,83	5,80	5,80	5,80
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) [1)]	Skor	77,56	77,97	78,23	78,95	78,94	79,33	78,29	80,13	79,63	80,93	80,93
9.	Angka Rata-rata Lama Sekolah [2)]	Tahun	10,30	10,42	10,50	10,72	10,70	10,79	10,80	10,85	10,90	10,90	10,90
10.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,22	14,25	14,24	14,25	14,58	14,58	14,67	14,67	14,77	14,77	14,77
11.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) [2)]	Tahun	73,03	73,13	73,33	73,61	73,90	73,90	74,30	74,30	74,50	74,50	74,50
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**												
I.	**Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**												
1.	**Urusan Pendidikan**												
1.1	**Angka Partisipasi Kasar**												
1.1.1	APK PAUD	%	Na	62,61	82,81	81,49	75,90	75,90	76,10	76,10	76,30	76,30	76,30
1.1.2	APK SD/MI/Paket A [5)]	%	114,00	124,20	125,89	122,53	127,50	127,50	130,10	130,10	132,75	132,75	132,75
1.1.3	APK SMP/MTs/Paket B [5)]	%	141,00	159,67	163,68	163,51	160,08	160,08	161,15	161,15	162,10	162,10	162,10
1.2	**Angka Partisipasi Murni**												
1.2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A [5)]	%	100,88	110,65	112,68	110,16	110,50	110,50	112,05	112,05	113,80	113,80	113,80
1.2.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B [5)]	%	109,94	121,32	125,40	125,30	121,30	121,30	122,10	122,10	124,15	124,15	124,15
1.2.3	Jumlah Prestasi Siswa Tingkat Provinsi	Prestasi	12	27	15	30	16	16	17	17	18	18	18
1.2.4	Jumlah Prestasi Siswa Tingkat Nasional	Prestasi	2	7	1	4	3	3	3	3	4	4	4
1.2.5	Jumlah sekolah (SD, SMP)yg berakreditasi A	sekolah	64	70	70	75	77	77	80	80	82	82	82
1.2.6	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik [3)]	%	5,31	13,83	22	47,62	36,17	47,62	43,62	47,62	51,06	51,06	51,06
	Jumlah Lembaga PAUD & Dikmas yg terakreditasi	*sekolah*	*3*	*54*	*4*	*9*	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Jumlah PAUD terakreditasi A	sekolah	-	-	-	-	9	9	11	11	12	12	12
1.2.8	Jumlah Dikmas yang terakreditasi B	Lembaga	-	-	-	-	-	2	-	3	-	4	4
1.2.9	Angka kelulusan	%	100,00	99,91	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata nilai US SD	*Nilai*	*7,60*	*7,60*	*7,43*	*7,29*	*7,75*	-	*7,80*	-	*7,90*	-	-
1.2.10	Persentase pencapaian KKM SD pada Satuan Pendidikan	Persen	-	-	-	-	-	90	-	92	-	94	94
	Rata-rata Nilai UN SMP	*Nilai*	*5,73*	*5,75*	*5,95*	*5,81*	*5,90*	*5,90*	*6,00*	-	*6,10*	-	*6,10*
1.2.11	Persentase Pencapaian KKM Siswa SMP pada Satuan Pendidikan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	6,10	6,10
2	**Urusan Kesehatan**												
2.1	Jumlah Kasus Kematian Bayi [5)]	jumlah	19	13	16	9	25	25	24	24	23	23	23
2.2	Jumlah Kasus Kema-tian Ibu melahirkan [5)]	jumlah	2	3	1	2	3	3	3	3	3	3	3
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk [5)]	%	0,08	0,07	0,08	0,13	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
2.4	Jumlah kasus Kematian Balita	jumlah	<13	3	0	1	<10	<10	<9	<9	<8	<8	<8
2.5	Persentase Penanganan Kasus Penyakit Menular berpotensi KLB [5)]	%	100	100	97,87	100	100	100	100	100	100	100	100
2.6	Persentase Penaganan Kasus Penyakit Tidak Menular [5)]	%	100	100	95,39	100	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	%	85,00	80,00	85,56	100	92	100	94	100	95	100	100
2.8	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.9	Persentase Kelurahan STBM [5)]	%	87	90	95,74	100	92	100	93	100	95	100	100
2.10	Persentase Kemandirian Masyarakat Hidup Sehat	%	77	75,55	77,14	77,98	82	82	85	85	87	87	87
2.11	Persentase Peningkatan Mutu Pengelolaan Obat dan Perbelkes	%	80	90,00	85,46	85	87	87	90	90	93	93	93
2.12	Persentase IRTP sesuai standar kesehatan	%	60	60,0	75,5	65	70	70	75	75	80	80	80
2.13	Cakupan usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan	%	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
2.14	Cakupan Lansia yang mendapatkan skrining kesehatan	%	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**												
	Persentase rumah yg terlayani air minum perpipaan	*%*	*91,61*	*94,41*	*98,84*	*99,12*	*96,84*	-	*94,26*	-	*97,22*	-	-
3.1	Persentase Pelayanan Air Minum [2)]	%	94,21	95,46	96,73	97,84	*99,02*	*99,02*	*99,67*	*99,67*	*100*	*100*	*100*
3.2	persentase irigasi dengan kondisi baik [5)]	%	73,43	73,43	77,96	80,60	81,72	87,62	84,21	86,40	86,58	89,49	89,49
3.3	Persentase Penataan sungai [5)]	%	15,44	18,56	20,53	23,38	23,52	23,52	24,81	24,81	26,37	26,37	26,37
3.4	Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap [3)]	%	63,81	67,22	69,21	72,25	74,81	75,90	77,56	75,56	80,31	77,31	77,31
	Persentase jalan kota yang memiliki drainase [5)]	*%*	*42,17*	*51,86*	*54,74*	*58,95*	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Persentase Sistem drainase Skala Kota [2)]	%	39,88	47,44	51,74	58,95	47,39	60,39	48,91	62,91	50,44	64,40	64,40
3.6	Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang	%	30,60	30,90	32,77	33,75	32,74	34,07	33,46	35,05	34,18	36,18	36,18
3.7	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan [3)]	%	66,66	66,67	66,67	68,00	88,89	69,84	94,44	71,39	94,44	71,98	71,98

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	Realisasi			Target Capaian						
				2017	2018	2019	2020		2021		2022		KINERJA AKHIR RPJMD
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
4	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**												
4.1	Persentase Rumah Layak Huni [5)]	%	91,70	91,90	92,98	94,22	94,87	94,87	95,92	95,92	96,98	96,98	96,98
	Persentase pengurangan Backlog [5)]	*%*	*NA*	*16,96*	*16,23*	*15,02*	*2,08*	-	*3,08*	-	*2,06*	-	-
4.2	Persentase penurunan Angka Backlog Rumah (kebutuhan rumah) [5)]	%	-	-	-	-	-	15,18	-	14,57	-	13,97	13,97
4.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak [5)]	%	88,20	89,78	91,47	93,23	92,74	92,74	94,25	94,25	95,76	95,76	95,76
	Luas Pengurangan Kawasan Kumuh	Ha	2,89	2,59	1,88	1,64	5,50	-	5,40	-	5,30	-	-
4.4	Persentase luas permukiman kumuh [3)]	%	1,77	2,59	1,88	1,64	1,47	1,34	1,32	0,82	1,17	0,30	0,30
4.5	Persentase penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang [5)]	%	0	0	0	14,70	3,92	3,92	5,88	5,88	7,84	7,84	7,84
5	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**												
5.1	Penegakkan Perda [5)]	%	100	100	80	92,6	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Rasio	8,00	8,00	8,00	9,8	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
5.3	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Rasio	48,00	42,00	39,81	56,25	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
5.4	Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan	Unit	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5.5	Persentase Cakupan pelayanan penanganan kebakaran [5)]	%	124,00	124,33	124,33	124,33	124,33	129	124,33	131	124,33	133	133
5.6	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	40,35	55,77	84,64	85,71	40,91	87,75	40,91	89,79	40,91	91,83	91,83
6	**Penanggulangan Bencana Daerah**												
6.1	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yg siap menghadapi bencana [5)]	%	16,24	18,00	17,34	74,47	18,36	74,47	18,36	74,47	18,36	100	100
6.2	Persentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana [5)]	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3	Persentase kelurahan yang difasilitasi kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan kajian renkontjensi	%	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
6.3	Persentase pemulihan lokasi/objek kejadian pasca bencana	%	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
6.4	Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana [5)]	%	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
7	**Urusan Sosial**												
7.1	Tingkat Kemiskinan [2)]	%	6,46	5,88	5,77	5,68	5,39	5,54	5,12	5,41	5,00	5,27	5,27
7.2	Persentase Rumah Tangga sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu	%	0,20	0,53	1,95	7,93	0,60	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00
7.3	Persentase PSKS yang berdaya dlm penyelenggaraan kesos [5)]	%	40,00	45,55	92,57	66,66	60,00	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00
7.4	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS [5)]	%	99,20	98,00	101,64	98,85	99,80	98,80	99,90	99,90	100,00	100,00	100,00
II	**Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar**												
1	**Urusan Ketenagakerjaan**												
1.1	Tingkat Pengangguran [2)]	%	7,07	3,45	3,78	4,11	6,47	5,90	6,32	5,83	5,80	5,80	5,80
1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,85	70,62	43,67	68,06	71,42		71,44		71,50		
1.3	Persentase penempatan tenaga kerja formal	%	-	-	-	-	-	33,00	-	40,00	-	40,00	40,00
1.4	Persentase penyerapan tenaga kerja informal	%	-	-	-	-	-	33,00	-	40,00	-	47,00	47,00
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**												
2.1	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Nilai	N/A	98,53	98,54	98,54	98,55	98,55	98,56	98,56	98,57	98,57	98,57
2.2	Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Kategori	Utama	-	Utama	-	Utama	Utama	-	-	Mentor	Utama	Utama
2.3	Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Kategori	-	Pratama	-	Madya	-	-	Nindya	Madya	-	-	Madya
2.4	Jumlah Kebijakan tekait hak dan perlindungan anak	Jumlah	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2.5	Persentase Penanganan kasus kekerasan terhada perempuan & anak (termasuk TPPO)	%	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.6	Persentase perempuan yang duduk dalam legislatif (DPRD) [5)]	%	8,00	8,00	8,00	16,00	12,00	16,00	12,00	16,00	12,00	16,00	12,00
2.7	Persentase kekerasan terhadap anak [5)]	%	0,075	0,040	0,0385	0,054	0,040	0,040	0,035	0,035	0,026	0,026	0,026
2.8	Persentase kekerasan terhadap perempuan [5)]	%	0,11	0,050	0,0395	0,018	0,06	0,06	0,055	0,055	0,04	0,04	0,04
3	**Urusan Pangan**												
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berbasis ketersediaan	skor	78,84	81,50	84,31	87,64	90,00	88,00	94,00	88,50	96,50	89,00	89,00
3.2	Skor PPH Konsumsi	skor	NA	NA	84,1	82	86,00	83,00	90,50	84,00	93,00	85,00	85,00

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	Realisasi			Target Capaian						
				2017	2018	2019	2020		2021		2022		KINERJA AKHIR RPJMD
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
3.3	Tingkat Keamanan Pangan	Indeks	sedang	sedang	sedang	Sedang	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi	Tinggi	tinggi	Tinggi
3.4	Stabilisasi harga												
	a. Beras	%	≤10	3,18	1,74	3,13	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
	b. Cabe	%	≤25	28,87	13,62	22,80	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25
	c. Bawang	%	≤10	11	15,83	17,25	≤10	≤25	≤10	≤25	≤10	≤25	≤25
3.5	Stabilisasi Pasokan	%	≥77	77,55	78,25	79,00	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77	≥77
4	**Urusan Pertanahan**												
4.1	Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko [5)]	%	-	11,75	12,59	14,29	61,36	15,56	62,27	16,40	63,64	17,46	17,46
5	**Urusan Lingkungan Hidup**												
5.1	Persentase RTH Publik [5)]	%	15,45	15,45	0,96	14,87	16,50	16,50	16,75	16,75	17,00	17,00	17,00
5.2	Indeks Kualitas Air [5)]	Nilai	75,00	75,00	66,67	70,83	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5.3	Indeks Kualitas udara [5)]	Nilai	80,00	80,00	92,29	93,73	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5.4	Persentase Usaha yg memenuhi baku mutu lingkungan hidup [5)]	%	30,01	30,01	42,06	42,22	51,05	51,05	55,03	55,03	60,01	60,01	60,01
5.5	Persentase cakupan pelayanan persampahan [5)]	%	88,02	88,02	88,00	89,40	92,26	92,26	93,30	93,30	95,34	95,34	95,34
5.6	Indeks tutupan lahan	Nilai						24,12		24,17		24,22	24,22
6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**												
6.1	Cakupan kepemilikan KTP-el [5)]	%	80,00	96,70	95,23	98,96	89,00	98,96	90,00	90,00	91,00	91,00	91,00
6.2	Cakupan kepemilikan Akte kelahiran (0 – 18 Tahun) [5)]	%	69,00	86.10	91,01	94,52	90,00	94,52	91,00	91,00	92,00	92,00	92,00
6.3	Cakupan kepemilikan KK [5)]	%	90,00	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4	Cakupan kepemilikan akte kematian [5)]	%	24,00	36,00	50,17	70,53	46,00	47,00	52,00	52,00	62,00	62,00	62,00
6.5	Persentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan	%	68,00	76,00	84,10	90,77	81,25	90,77	83,25	91,00	86,25	86,25	92,00
6.6	Persentase Penyelesaian Penerbitan dokumen kependudukan tepat waktu [5)]	%	80,00	85,00	100	100	93,00	100	95,00	100	98,00	100	100
6.7	Rata-rata lama waktu penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan (SOP) [5)]	hari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	Persentase sarana dan prasarana SIAK dan KTP el dalam kondisi baik [5)]	%	-	-	-	-	-	-	-	90,00	-	92,00	92,00
6.9	Jumlah nota kesepahaman kerjasama inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil [5)]	Nota Kesepahaman	-	-	-	-	-	-	-	13 nota kesepahaman	-	15 nota kesepahaman	28 nota kesepahaman
6.10	Persentase pemberian hak akses data kependudukan [5)]	%	-	-	-	-	-	-	-	35,00	-	50,00	50,00
6.11	Persentase pengolahan data kependudukan [5)]	%	-	-	-	-	-	-	-	80,00	-	85,00	85,00
6.12	Persentase media yang digunakan untuk publikasi dan edukasi [5)]	%	-	-	-	-	-	-	-	85,00	-	90,00	90,00
6.13	Persentase penyajian data kependudukan [5)]	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	100
7	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**												
7.1	Contrasepsi Prevalens Rate	%	76,57	71,14	69,07	70,30	77,00	70,35	77,05	70,50	77,10	70,75	70,75
7.2	Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	%	70,00	70,00	74,00	80,00	83,00	83,00	85,00	85,00	90,00	87	87
8	**Perhubungan**												
8.1	Persentase masyarakat yg menggunakan sarana angkutan umum [5)]	%	60,12	63,24	92,95	94,77	70,60	50,50	72,72	50.65	75,84	50,80	50,80
8.2	Persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang	%	70,30	70,45	71,42	100	71,20	71,20	71,45	71,45	71,55	71,55	71,55
8.3	Jumlah rute pelayanan angkutan umum dalam kota	Rute	23,00	23	23	13	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
8.4	Nilai survey IKM Pelayanan transportasi	angka	90,08	90,16	89,20	89,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas [5)]	*%*	*65,25*	*40,00*	*86,06*	*76,67*	*75,33*	-	*78,15*	-	*80,21*	-	-
9	**Urusan Komunikasi dan Informatika**												
9.1	Persentase Perangkat Daerah yang telah terintegrasi TI	%	-	12,90	29,03	45,16	64,52	64,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.2	Persentase Perangkat Daerah yang mempublikasikan informasi pembangunan daerah	%	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
9.3	Persentase penerapan keterbukaan informasi publik	%	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00
9.4	Indeks SPBE [2)]	nilai	-	-	-	-	-	2,70	-	2,8	-	3	3
10	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**												
10.1	Persentase UKM terhadap UMKM [2)]	%	26,64	27,14	15,27	15,49	28,66	1,50	29,18	2,00	29,70	2,5	2,5
10.2	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	%	8,00	10,09	14,18	1,50	16,00	1,70	18,00	2,20	20,00	2,70	2,70
10.3	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	%	6,25	2,18	3,77	9,01	14,25	5,00	16,40	5,50	18,30	6,00	6,00
10.4	Persentase pertumbuhan aset koperasi	%	2,77	14,54	5,30	4,33	8,55	4,50	10,58	5,00	12,60	5,50	5,50
11	**Urusan Penanaman Modal**												
11.1	Jumlah investor [5)]	orang	327	564	1.038	1.539	1.539	1.151	1.689	1.839	1.839	2.000	2.000
11.2	Nilai Survey kepuasaan masyarakat	Nilai	81,56	81,67	90,05	93,49	82,40	94,03	82,60	94,50	82,80	95,03	95,03
11.3	Jumlah penurunan pengaduan perizinan masyarakat	pengaduan	9	7	5	3	5	5	4	4	3	3	3

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	Realisasi			Target Capaian						
				2017	2018	2019	2020		2021		2022		KINERJA AKHIR RPJMD
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
11.4	Nilai Realisasi Investasi [2)]	(Miliar Rupiah)	175,70	229,3	231,5	250,60	198,9	74,4	200,9	200,9	202	203,8	1.190,5
12	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**												
12.1	Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional	Peringkat	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-
12.2	Jumlah Pemuda Pelopor yang sampai ke tingkat nasional [5)]	Orang	1	-	-	1	-	2	-	2	-	2	8
12.3	Peringkat pramuka tk. Propinsi [5)]	Regu	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
12.4	Peringkat pemuda pada lomba wirausaha muda tk. Propinsi dan tk. nasional	Peringkat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.5	Jumlah organisasi kepemudaan yg aktif [5)]	organisasi	18	-	-	24	26	26	27	27	30	30	30
12.6	Jumlah medali pada even olahraga tingkat daerah [5)]	Medali	149	24	145	30	155	155	33	33	170	170	557
12.7	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional	Orang	-	4	7	11	15	15	18	18	20	20	20
13	**Urusan Statistik**												
13.1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	Buah	3	3	4	4	4	4	4	5	4	5	5
13.2	Persentase kepuasan pengguna data statistik [5)]	%	-	-	-	-	-	85	-	90	-	90	90,00
13.3	Persentase kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral yang tersedia [5)]	%	-	-	-	-	-	70,00	-	75,00	-	80,00	80,00
13.4	Jumlah data statistik sektoral yang dimanfaatkan perangkat daerah	Data	-	-	-	-	-	10	-	10	-	10	10
13.5	Jumlah forum data yang terlaksana	kali	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
14	**Urusan Persandian**												
14.1	Persentase penanganan cyber attack [5)]	%	-	-	-	-	-	80,00	-	85,00	-	90,00	90,00
14.2	Persentase pemenuhan NSPK keamanan informasi	%	-	-	-	-	-	-	-	85,00	-	90,00	90,00
14.3	Indeks Domain Kebijakan Internal	nilai	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3
14.4	Indeks Domain Tata Kelola	nilai	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	2,5	2,5
14.5	Indeks domain Layanan	nilai	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3,25	3,25
15	**Urusan Kebudayaan**												
15.1	Jumlah Benda Cagar Budaya (BCB) yang dilindungi [5)]	unit	18	18	26	26	24	26	26	26	28	28	28
15.2	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif [5)]	grup	66	66	70	71	72	72	73	73	74	74	74
16	**Urusan Perpustakaan**												
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	4.559	8.850	14.086	15.102	11.500	6.000	12.500	3.000	13.000	7.000	7.000
17	**Urusan Kearsipan**												
17.1	Jumlah khasanah arsip	berkas	6.000	6.541	10.645	8.594	8.500	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
II	**Layanan Urusan Pilihan**												
1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**												
1.1	Produksi ikan konsumsi [5)]	Ton	433,27	485,27	501,65	520,11	540,00	540,00	550,00	550,00	560,00	560,00	560,00
1.2	Angka Konsumsi Ikan [5)]	%	28,16	29	30,15	31,52	33,00	33,00	34,00	34,00	35,00	35,00	35,00
2	**Urusan Pariwisata**												
2.1	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan [2)]	%	7,50	10,80	11,28	5,11	5,50	5,50	6,70	6,70	7,50	7,50	7,50
3	**Urusan Pertanian**												
3.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB [2)]	%	7,39	7,04	6,75	6,35	7,45	7,45	7,46	7,46	7,47	7,47	7,47
3.2	Produksi padi [5)]	Ton	37.402	41.150	41.515	39.800	40.517	40.517	41.543	41.000	43.000	41.200	41.200
3.3	Produksi cabe [5)]	Ton	973,90	606	892	897,6	985	985	990	900	990	905	905
3.4	Produksi bawang [5)]	Ton	-	110	140	211,50	400	400	500	215	600	220	220
3.5	Produksi Kakao [5)]	Ton	1.092	950	1.045	2.002,24	1.100	1.100	1.170	1.105	1.230	1.110	1.110
3.6	Produksi Jagung [5)]	Ton	-	-	-	-	-	-	-	2.900	-	2.950	2.950
3.7	Populasi sapi [5)]	Ekor	5.510	5.707	5.756	5.849	5.962	5.962	6.080	5.992	6.200	6.025	6.025
4	**Urusan Perdagangan**												
4.1	Persentase pertumbuhan omset	%	23,00	-	6,45	6,45	31,00	5,00	33,00	5,25	35,00	5,50	5,50
4.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB [2)]	%	23,92	24,48	25,15	25,13	24,07	24,07	24,12	24,12	24,17	24,17	24,17
5	**Urusan Perindustrian**												
5.1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB [2)]	%	5,64	5,67	5,35	5,60	6,08	6,08	6,11	6,11	6,12	6,12	6,12
5.2	Persentase peningkatan nilai produksi	%	-	2,15	1,59	1,65	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00
	Jumlah Produk Industri Yang Mendapatkan Sertifikat Industri	*Buah*	-	*5,52*	*9,00*	*9,00*	*12,00*	-	*15,00*	-	*15,00*	-	-
III	**Fungsi Pendukung**												
1	**Kesekretariatan Daerah**												
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [5)]	*Nilai*	*B*	*BB*	*BB*	*BB*	*A*	-	*A*	-	*A*	-	-
1.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan [5)]	%	-	-	-	-	-	-	-	12,01	-	12,50	12,50
	Peringkat LPPD [5)]	*Peringkat*	*20*	*19*	*15*	*30*	*15*	-	*13*	-	*12*	-	-
1.2	Nilai LPPD [5)]	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	3.150	-	3.160	3.160
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	*Kategori*	*Baik*	*Baik*	*Baik*	*Baik*	*Baik*	-	*Baik*	-	*Baik*	-	-
1.3	Nilai IKM [2)]	Nilai	-	-	-	-	-	80,75	-	81,35	-	81,85	81,85
1.4	Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	Realisasi			Target Capaian						
				2017	2018	2019	2020		2021		2022		KINERJA AKHIR RPJMD
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
1.5	Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi [5]	%	N/A	50	60	70	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
1.6	Persentase Peningkatan Zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/Badan zakat/wakaf [4]	%	2,5	3	3,20	4,78	4,20	4,20	4,60	4,60	5,00	5,00	5,00
	Persentase Lembaga Keagamaan (MUI) yang aktif	*%*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*80,00*	-	*100,00*	-	-
1.7	Persentase Lembaga Keagamaan yang aktif	%	-	-	-	-	-	-	-	70	-	80	80
2	**Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**												
2.1	Indeks kepuasan pimpinan & anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	N/A	73,29	82,00	83,00	78,00	83,00	80,00	84,00	81,00	84,00	84,00
2.2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD	%	N/A	100	100,00	100,00	85,00	100,00	86,00	100,00	87,00	100,00	100,00
IV	**Fungsi Penunjang**												
1	**Perencanaan**												
	Persentase Pagu Belanja Langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	*%*	*30,00*	*31,23*	*33,08*	*33,11*	*34*	-	*35*	-	*36*	-	-
1.1	Persentase Pagu dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat [5]	%	-	-	-	-	-	17,00	-	17,50	-	18,00	18,00
1.2	Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD [5]	%	92.86	94,08	92,24	88,76	97,04	97,04	98,20	98,20	98,80	98,80	98,80
1.3	Persentase Indikator RPJMD yang tercapai atau melebihi target [5]	%	83,00	83,29	78,57	89,88	91,67	91,67	93,39	93,39	97,22	97,22	97,22
1.4	Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan [5]	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	28	-	29	29
1.5	Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja [5]	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	18	-	20	20
2	**Keuangan**												
2.1	Opini laporan keuangan pemerintah daerah [2]	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Waktu	26 Nov	23 Nov	23 Nov	27 Des	20 Des	20 Des	20 Des	20 Des	20 Des	27 Des	27 Des
2.3	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	%	12,00	15,78	13,64	13,36	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	**Kepegawaian**												
3.1	Persentase Pegawai yg memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	%	47,99	52,97	57,54	57,81	83,13	57,81	94,47	57,81	100,00	57,81	100,00
3.2	Persentase pegawai yg memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	%	36,76	41,79	47,63	48,86	68,38	56,24	85,79	56,24	98,28	56,24	98,28
3.3	Persentase Indeks Ke-puasan Pelayanan Adm -inistrasi Kepegawaian	%	79,25	79,34	83,00	83,28	82,70	82,70	83,85	83,85	85,00	85,00	85,00
3.4	Pesentase Jabatan yang terisi	%	-	-	-	-	-	-	-	99,00	-	99,00	99,00
4	**Penelitian dan Pengembangan**												
4.1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan [5]	%	50,00	80	85,71	90,91	85,00	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
4.2	Indeks Inovasi Daerah [5]	skor	-	-	-	-	-	-	-	4100	-	4140	4140
5	**Inspektorat**												
5.1	Nilai Indeks reformasi Birokrasi [1]	%	N/A	58,86	59,63	61,69	60	60	65	65	70	65	65
5.2	Persentase Perangkat Daerah yang Bebas dari temuan Keuangan	%	58,30	64,52	81,48	77,78	45,16	60	54,84	60	64,52	64,52	64,52
5.3	Persentase Perangkat Daerah yg Bebas dari temuan Aset	%	78,15	80,65	62,96	74,07	45,16	60	58,84	60	64,52	64,52	64,52
5.4	Nilai Indeks RB pada area pengawasan	Indeks	N/A	N/A	2,35	3,82	3,50	3,50	3,50	3,65	3,65	3,70	3,70
5.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yg ditindaklanjuti [5]	%	55,30	82,16	85,12	86,02	59	82	59	82	59	82	82
5.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yg ditindaklanjuti [5]	%	53,75	78,21	80,80	64,42	60	60	60	60	60	60	60
5.7	Persentase Perangkat Daerah yg akuntabilitas kinerjanya meningkat per tahun	%	n.a	93,55	83,87	100	67,74	80,64	74,19	80,64	80,64	80,64	80,64
5.8	Nilai evaluasi AKIP Inspektorat yg diberikan oleh tim evaluasi AKIP	Nilai	B	A	A	A	A	AA	A	AA	A	AA	AA
6	**Kewilayahan**												
6.1	Persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yg aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**Kesatuan Bangsa dan Politik**												
7.1	Persentase penanganan konflik yg terjadi di tengah masyarakat [5]	%	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase ormas yang aktif	*%*	*88,89*	*88,89*	*84,78*	*86,27*	*90,64*	-	*90,64*	-	*90,64*	-	-
7.2	Persentase parpol dan ormas	%	-	-	-	-	-	90,64	-	90,64	-	90,64	90,64

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINE RJA TAHUN 2016	Realisasi			Target Capaian						
				2017	2018	2019	2020		2021		2022		KINERJA AKHIR RPJMD
							AWAL	PERUB AHAN	AWAL	PERUB AHAN	AWAL	PERUB AHAN	
	yang aktif [5])												
	ASPEK DAYA SAING DAERAH												
1.	Produktivitas Total Daerah	Rp. Jt	77,01	81,92	84,24	108,73	95,84	95,84	101,23	101,23	106,93	106,93	106,93
2.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.Ribu	1.638,015	1.816,96	2.602,68	1.431,85	2.060,03	2.060,03	2.165,69	2.165,69	2.271,42	2.271,42	2.271,42
	Nilai Tukar Petani	*%*	*100,28*	*99,23*	*100,44*	*98,95*	*100,73*	-	*100,80*	-	*101,00*	-	-
3.	Rasio Ketergantungan	%	54,37	54,15	53,62	53,86	54.42	54.42	54.43	54.43	54.44	54.44	54.44

Keterangan :

[1]) Indikator Tujuan Kota;
[2]) IKU Kota;
[3]) IKU Kota dan IK Program;
[4]) Indikator Tujuan Kota, IKU Kota dan IK program;
[5]) IK Program

BAB 9
PENUTUP



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 di lakukan karena adanya perubahan regulasi yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Dampak pandemi covid-19 yang tergolong ke dalam bencana non alam yang mengakibatkan krisis ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis. Pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar 1,18 % turun drastis dari asumsi ekonomi yang ditetapkan pada RPJMD sebelum perubahan yaitu sebesar 6,26%. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi juga kehidupan sosial masyarakat, sehingga perubahan asumsi dilakukan terhadap beberapa bidang dan urusan pembangunan.

Perubahan kebijakan nasional yang terjadi setelah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 antara lain :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dimana struktur keuangan tidak lagi mengenal belanja langsung dan belanja tidak langsung;
b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
c. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dimana matrik program, kegiatan, sub kegiatan beserta seluruh indikator harus masuk ke dalam aplikasi SIPD nasional;
d. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Mengacu ketentuan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 dan peraturan turunan secara teknis, maka tidak dilakukan perubahan terhadap visi dan misi RPJMD, Sedangkan indikator tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi tengah tahun terhadap kinerja RPJMD 2017-2022. Dan terdapat IKU yang pertanggungjawabannya turun ke level perangkat daerah yang dijabarkan ke dalam rencana strategis Perangkat daerah (renstra PD) dengan sesuai kondisi indikator yang cukup ditampilkan di Perangkat Daerah. Untuk strategi, arah kebijakan dan isu strategis tahun 2021 s/d 2022 menyesuaikan dengan kondisi yang diakibatkan oleh pandemi covid 19 dan perubahan kebijakan.

Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen perubahan RPJMD ini. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil

pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Payakumbuh sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah yakni "PAYAKUMBUH MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT, DENGAN SEMANGAT KEBERSAMAAN MENUJU PAYAKUMBUH MENANG".

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KOTA PAYAKUMBUH
Jl. Hj. Rky. RASUNA SAID Telp./Fax. (0752) 92779